



PROFIL

KESEHATAN PROVINSI RIAU

TAHUN 2024



Disusun oleh :
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

 **(0761) 23810**

 **dinkes.riau.go.id / [https://:profil.dinkes.riau](https://profil.dinkes.riau)**

 **dinkespemprovriau**

PROFIL KESEHATAN PROVINSI RIAU 2024

TIM PENYUSUN

Pengarah

drg. **Sri Sadono Mulyanto**, M.Han
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Ketua

Heri Permana, S.STP, M. Si
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Editor

Jefri Herimen, S. Sos
Ketua Tim Perencanaan Program

Anggota

Donal, SKM, M. Si; **Nita Cahyaning**, SKM. M. Si; **Ali Napia**, S.Kom; **Dwi Sri Rahayu**, SKM; **Rina Susanti**, Amd; **Amsirman**, SKM, M. Si; **Syamdi**, S.IP, M.Si; **Emi Zernita**, SKM; **Mina Lestari**, SKM; **Airina Yanti**, SKM; **Zuhelfitri**, SE; **Yuswarti Indra**, SKM; **Jagad Raffany**, S.STP., M.Tr.I.P; **Afridesi**, SKM, MKM; **Rudi Musyahril**, Amd; **Reny Elsera**, SKM, MKM; **Ns Rizki Zamzami**, S. Kep; **Reysi Eka Putri**, SKM; **Dwipi Nanda**, SKM ; **Indra Gunawan**, Amd;

Kontributor

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- Substansi Perencanaan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
- Seksi Surveilans dan Imunisasi

Bidang Kesehatan Masyarakat

- Substansi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja
- Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Bidang Pelayanan Kesehatan

- Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional
- Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
- Substansi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian

- Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Substansi Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana

Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota se Provinsi Riau
Rumah Sakit se Provinsi Riau
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya, sehingga buku **Profil Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2024** ini dapat disusun dan diterbitkan. Buku ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam menyediakan data dan informasi kesehatan yang akurat, komprehensif, dan terkini bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang kesehatan.

Profil ini memuat gambaran umum situasi kesehatan masyarakat Provinsi Riau sepanjang tahun 2024, **mencakup indikator-indikator utama seperti kesehatan ibu dan anak, status gizi, kesehatan lingkungan, surveilans, penyakit menular dan tidak menular, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan serta capaian program prioritas**. Data yang disajikan diharapkan dapat menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan kebijakan di sektor kesehatan.

Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2024 ini, **tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan, instansi lintas sektor, dan pemangku kepentingan terkait**. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyediaan dan pengolahan data.

Kami berharap **Profil Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2024** dapat menjadi **rujukan utama bagi para pengambil kebijakan, akademisi, praktisi, maupun masyarakat** dalam merancang program dan kebijakan kesehatan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Akhir kata, semoga buku Profil Kesehatan Provinsi Riau tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi semua pihak dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Provinsi Riau. Dan tidak lupa kami mohon maaf apabila dalam penyusunan profil ini terdapat banyak kesalahan baik dalam kata ataupun isi secara keseluruhan. Kami sadar bahwa dalam profil ini masih jauh dari kata sempurna dan untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi kebaikan penyusunan profil kedepan.

Pekanbaru, Juli 2025

Sekretaris

Dinas Kesehatan Provinsi Riau



Heri Permana, S.STP, M. Si
NIP. 19900819 201206 1 001



KATA SAMBUTAN



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. atas izin-Nya, **Profil Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2024** dapat diterbitkan sebagai salah satu rujukan penting dalam menilai capaian pembangunan kesehatan di Provinsi Riau.

Tahun 2025 menjadi tahun yang penting dalam perjalanan transformasi sistem kesehatan Provinsi Riau. Enam pilar transformasi dimulai dari penguatan layanan primer dan rujukan, ketahanan sistem kesehatan, pembiayaan, SDM kesehatan, hingga pemanfaatan teknologi terus kita dorong agar layanan kesehatan menjadi lebih merata, responsif, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

Profil Kesehatan ini berperan penting karena memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi kesehatan masyarakat dan capaian program di berbagai wilayah. Data yang terkumpul tidak hanya mencerminkan situasi saat ini, tetapi juga membantu kita melihat mana yang sudah berjalan baik dan mana yang masih perlu diperbaiki. Ini menjadi dasar penting dalam mengambil keputusan, menyusun kebijakan, dan menetapkan arah kerja ke depan.

Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten/ Kota, serta para mitra yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Kolaborasi lintas sektor dan komitmen terhadap data yang valid akan terus menjadi kunci dalam mempercepat transformasi kesehatan di Indonesia.

Semoga **Profil Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2024** ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, serta memperkuat langkah kita bersama menuju Indonesia yang lebih sehat, adil, dan tangguh.

Pekanbaru, Juli 2025
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau

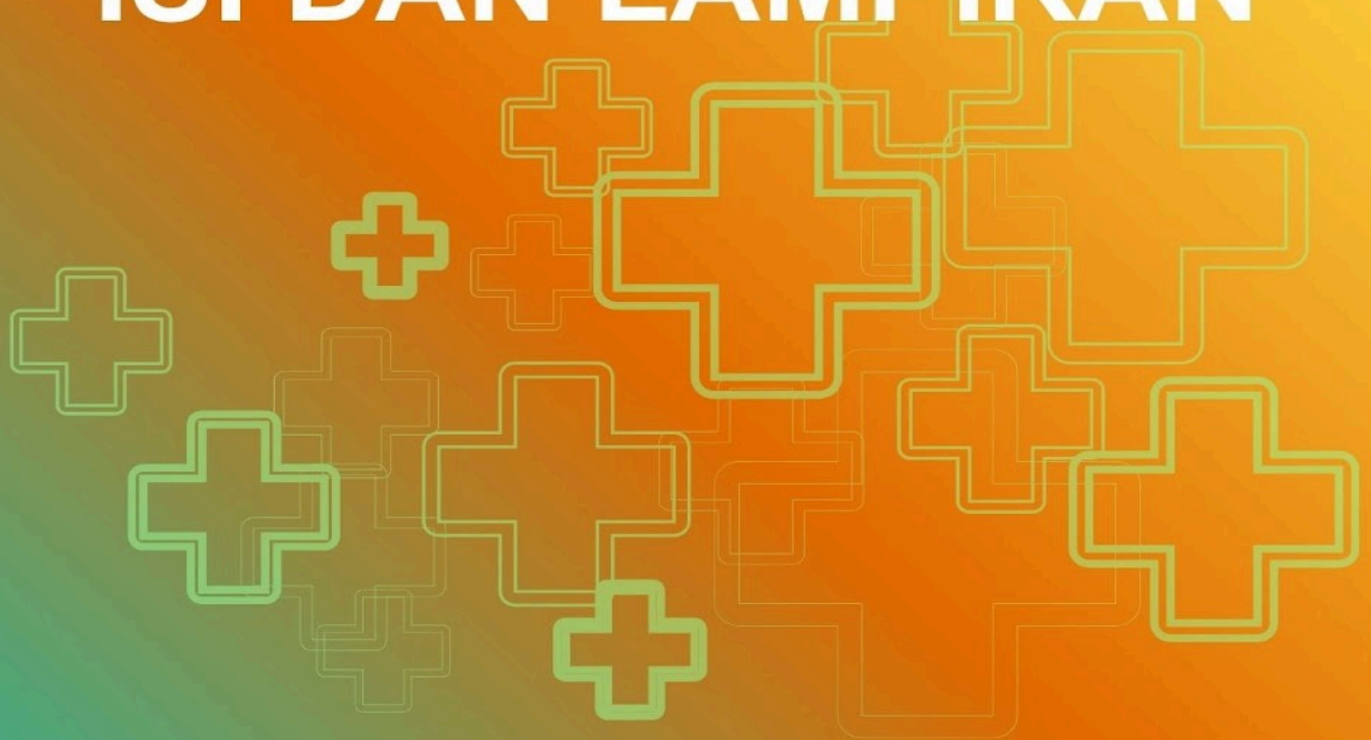


drg. Sri Sadono Mulyanto, M.Han
NIP. 19770812 200501 1 004





DAFTAR GAMBAR, ISI DAN LAMPIRAN



PROFIL KESEHATAN PROVINSI RIAU 2024



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
KATA SAMBUTAN.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I DEMOGRAFI	1
A. KONDISI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRASI	1
1. Luas Wilayah	2
2. Jumlah Desa/Kelurahan	3
B. KEPENDUDUKAN	4
1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur.....	4
2. Kepadatan Penduduk/km ²	6
3. Rasio Beban Tanggungan	8
4. Rasio Jenis Kelamin.....	9
C. PENDIDIKAN	12
BAB II SARANA KESEHATAN	14
A. SARANA KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN / PENGELOLA	14
1. Rumah Sakit.....	14
2. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).....	23
B. AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN	31
1. Cakupan Kunjungan Rawat Jalan & Rawat Inap Di Sarana Pelayanan Kesehatan	31
2. Kunjungan Gangguan Jiwa Di Sarana Pelayanan Kesehatan	33
3. Angka Kematian Pasien Di Rumah Sakit	34
4. Indikator Kinerja Pelayanan Di Rumah Sakit.....	37
5. Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Vaksin dan Esensial.....	41
6. Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Vaksin Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	42
C. UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT	43
1. Posyandu	44
2. Posyandu Aktif	45
3. Rasio Posyandu Per 100 Balita	47
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	49
A. JUMLAH DAN RASIO TENAGA MEDIS (DOKTER UMUM, SPESIALIS, DOKTER GIGI) DI SARANA KESEHATAN	51
1. Rasio Dokter Spesialis	51



2. Rasio Dokter umum.....	54
3. Rasio Dokter Gigi	56
B. JUMLAH DAN RASIO TENAGA KEPERAWATAN (BIDAN DAN PERAWAT) DI SARANA KESEHATAN.....	59
1. Rasio Tenaga Perawat.....	59
2. Rasio Tenaga Bidan	61
C. JUMLAH DAN RASIO TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI SARANA KESEHATAN	64
1. Tenaga Kesehatan Masyarakat.....	64
2. Tenaga Kesehatan Lingkungan.....	65
3. Tenaga Gizi	68
D. JUMLAH DAN RASIO TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISIAN MEDIK DI SARANA KESEHATAN	70
1. Tenaga Keterampilan Fisik	70
2. Tenaga Keteknisian Medik.....	71
E. JUMLAH DAN RASIO TENAGA KEFARMASIAN (TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN DAN APOTEKER) DI SARANA KESEHATAN	73
1. Apoteker.....	73
2. Tenaga Teknis Kefarmasian	75
F. JUMLAH DAN RASIO TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN.....	77
BAB IV PEMBIAYAAN KESEHATAN.....	80
A. PESERTA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN.....	80
B. ANGGARAN KESEHATAN DALAM APBD KABUPATEN / KOTA	83
C. ANGGARAN KESEHATAN PERKAPITA.....	85
BAB V KESEHATAN KELUARGA	87
A. KESEHATAN IBU.....	87
1. Kematian Ibu.....	87
2. Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil	96
3. Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.....	103
4. Cakupan Pelayanan Nifas	106
5. Cakupan Imunisasi Td (Tetanus Difteri) Ibu Hamil Dan Wanita Usia Subur.....	109
6. Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan	112
7. Peserta Keluarga Berencana (KB).....	113
B. KESEHATAN ANAK.....	119
1. Kematian Neonatal	121
2. Kematian Post Neonatal.....	123
3. Kematian Bayi.....	125
4. Kematian Balita.....	127



5. Cakupan Pelayanan Neonatal dan Post Neonatal	128
6. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	135
7. Pemberian Vitamin A Pada Bayi dan Anak Balita	141
8. Pelayanan Kesehatan Balita	145
C. STATUS GIZI PADA BALITA	150
1. Status Gizi Balita berdasarkan Survey Nasional	151
2. Status Gizi Balita berdasarkan Surveilans Gizi (SIGIZITERPADU – ePPGM)	154
D. PENJARINGAN KESEHATAN SISWA Kelas 1 SD/MI, 7 SMP/MTs, dan 10 SMA/MA	160
E. KESEHATAN USIA PRODUKTIF	162
1. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	162
2. Calon Pengantin mendapat layanan kesehatan	164
F. PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT	166
BAB VI PENGENDALIAN PENYAKIT	169
A. PENYAKIT MENULAR LANGSUNG	169
1. Tuberkulosis	169
2. HIV dan AIDS	177
3. Infeksi Saluran Pernafasan Akut dan Pneumonia	180
4. Diare	184
5. Kusta dan Frambusia	187
6. Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I)	192
7. Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis	202
B. PENYAKIT TIDAK MENULAR	212
1. Hipertensi	214
2. Diabetes Melitus	216
C. KESEHATAN JIWA & NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA & ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA)	217
D. DAMPAK KESEHATAN KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)	218
E. PELAYANAN KESEHATAN HAJI	220
BAB VII KESEHATAN LINGKUNGAN	223
A. AIR MINUM	223
B. AKSES SANITASI LAYAK	225
C. SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)	228
D. TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR	230
E. TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP)	232



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	PETA PROVINSI RIAU	1
GAMBAR 1.2	LUAS WILAYAH PROVINSI RIAU MENURUT KABUPATEN/KOTA (KILOMETER PERSEGI) TAHUN 2024	3
GAMBAR 1.3	PIRAMIDA PENDUDUK PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	4
GAMBAR 1.4	KEPADATAN PENDUDUK / KM ² MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	7
GAMBAR 1.5	ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (DEPENDENCY RATIO) PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024.....	9
GAMBAR 1.6	RASIO JENIS KELAMIN MENURUT KELOMPOK UMUR PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	11
GAMBAR 1.7	RASIO JENIS KELAMIN PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	11
GAMBAR 1.8	PERSENTASE PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2024	12
GAMBAR 2.1	JUMLAH RUMAH SAKIT PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024	15
GAMBAR 2.2	PERKEMBANGAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN KEPEMILIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	17
GAMBAR 2.3	PERSENTASE RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS PROVINSI RIAU TAHUN 2024	17
GAMBAR 2.4	PERSENTASE RUMAH SAKIT BERDASARKAN TIPE PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	18
GAMBAR 2.5	JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	19
GAMBAR 2.6	RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024.....	20
GAMBAR 2.7	RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	21
GAMBAR 2.8	JUMLAH TOTAL PUSKESMAS, PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP	23
GAMBAR 2.9	PUSKESMAS TEREISTRASI MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2023 – 2024	25
GAMBAR 2.10	RASIO PUSKESMAS PER 30.000 PENDUDUK PROVINSI RIAU.....	26
GAMBAR 2.11	RASIO PUSKESMAS PER 30.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	28
GAMBAR 2.12	RASIO PUSKESMAS PER 100.000 PENDUDUK PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024.....	28
GAMBAR 2.13	PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP PER KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	29
GAMBAR 2.14	JUMLAH PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU) DAN PUSKESMAS KELILING (PUSLING) PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024	31
GAMBAR 2.15	CAKUPAN KUNJUNGAN RAWAT JALAN DI PUSKESMAS PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	32



GAMBAR 2.16	CAKUPAN KUNJUNGAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024.....	33
GAMBAR 2.17	PERSENTASE KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA DI RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024.....	34
GAMBAR 2.18	<i>GROSS DEATH RATE</i> (GDR) PER 1.000 PENDERITA DI RUMAH SAKIT PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	35
GAMBAR 2.19	NET DEATH RATE (NDR) PER 1.000 PENDERITA DI RUMAH SAKIT PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024.....	36
GAMBAR 2.20	<i>BED OCCUPATION RATE</i> (BOR) DI RUMAH SAKIT PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024.....	38
GAMBAR 2.21	<i>BED TURN OVER</i> (BTO) DI RUMAH SAKIT PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024.....	39
GAMBAR 2.22	<i>AVERAGE LENGTH OF STAY</i> (ALOS) DI RUMAH SAKIT PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024.....	40
GAMBAR 2.23	TURN OVER INTERVAL (TOI) DI RUMAH SAKIT PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024	41
GAMBAR 2.24	PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT & VAKSIN ESENSIAL PROVINSI RIAU TAHUN 2024	41
GAMBAR 2.25	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT & VAKSIN ESENSIAL PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	42
GAMBAR 2.26	PERSENTASE KETERSEDIAAN VAKSIN IDL DI KABUPATEN/KOTA.....	43
GAMBAR 2.27	PERSENTASE POSYANDU AKTIF PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 ..	46
GAMBAR 2.28	PERSENTASE POSYANDU AKTIF MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	46
GAMBAR 2.29	RASIO POSYANDU PER 100 BALITA PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	48
GAMBAR 3.1	JUMLAH TENAGA KESEHATAN PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	50
GAMBAR 3.2	PERSENTASE TENAGA KESEHATAN PROVINSI RIAU TAHUN 2024	51
GAMBAR 3.3	RASIO DOKTER SPESIALIS PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	52
GAMBAR 3.4	RASIO DOKTER SPESIALIS PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	53
GAMBAR 3.5	RASIO DOKTER UMUM PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024.....	55
GAMBAR 3.6	RASIO DOKTER UMUM PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	55
GAMBAR 3.7	RASIO DOKTER GIGI PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024.....	57
GAMBAR 3.8	RASIO DOKTER GIGI PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA.....	59
GAMBAR 3.9	RASIO TENAGA PERAWAT PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024.....	60
GAMBAR 3.10	RASIO TENAGA PERAWAT PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	61



GAMBAR 3.11	RASIO TENAGA BIDAN PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024.....	62
GAMBAR 3.12	RASIO TENAGA BIDAN PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA.....	63
GAMBAR 3.13	RASIO TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024.....	64
GAMBAR 3.14	RASIO TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	65
GAMBAR 3.15	RASIO TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	66
GAMBAR 3.16	RASIO TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	67
GAMBAR 3.17	RASIO TENAGA GIZI PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024.....	68
GAMBAR 3.18	RASIO TENAGA GIZI PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KAB/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	69
GAMBAR 3.19	RASIO TENAGA KETERAPIAN FISIK PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	70
GAMBAR 3.20	RASIO TENAGA KETERAPIAN FISIK PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	71
GAMBAR 3.21	RASIO TENAGA KETEKNISIAN MEDIS PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	72
GAMBAR 3.22	RASIO TENAGA KETEKNISIAN MEDIS PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	73
GAMBAR 3.23	RASIO TENAGA APOTEKER PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	74
GAMBAR 3.24	RASIO TENAGA APOTEKER PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA.....	75
GAMBAR 3.25	RASIO TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	76
GAMBAR 3.26	RASIO TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA	76
GAMBAR 3.27	RASIO TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN PER 100.000 PENDUDUK PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	77
GAMBAR 4.1	PERSENTASE KEPEMILIKAN JAMINAN KESEHATAN PROVINSI RIAU 2024.....	81
GAMBAR 4.2	PERSENTASE PESERTA JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) PROVINSI RIAU TAHUN 2024	82
GAMBAR 4.3	PERSENTASE PESERTA JAMINAN KESEHATAN BUKAN PENERIMA BANTUAN (NON PBI) PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	82
GAMBAR 4.4	PERSENTASE ANGGARAN KESEHATAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN SUMBERNYA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	83
GAMBAR 4.5	PERSENTASE ANGGARAN KESEHATAN APBD TERHADAP TOTAL ANGGARAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	84



GAMBAR 4.6	PERSENTASE ANGGARAN KESEHATAN BERSUMBER APBD KAB/KOTA TANPA DAK	85
GAMBAR 4.7	ANGGARAN KESEHATAN PER KAPITA MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	86
GAMBAR 5.1	JUMLAH KEMATIAN IBU (KEHAMILAN, KELAHIRAN, NIFAS) PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2024	88
GAMBAR 5.2	PETA SEBARAN KEMATIAN IBU PER KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2024	90
GAMBAR 5.3	JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT FASE PROVINSI RIAU TAHUN 2020- 2024	91
GAMBAR 5.4	DISTRIBUSI KEMATIAN IBU BERDASARKAN FASE KEMATIAN PROVINSI RIAU TAHUN 2024	91
GAMBAR 5.5	JUMLAH KEMATIAN IBU BERDASARKAN FASE MENURUT KABUPATEN/KOTA.....	93
GAMBAR 5.6	PERSENTASE KEMATIAN IBU HAMIL BERDASARKAN PENYEBABNYA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	94
GAMBAR 5.7	PERSENTASE KEMATIAN IBU MENURUT TEMPAT KEJADIAN PROVINSI RIAU TAHUN 2024	95
GAMBAR 5.8	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN (K1 DAN K4) PADA IBU HAMIL PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	97
GAMBAR 5.9	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN (K1) PADA IBU HAMIL MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2023-2024	98
GAMBAR 5.10	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN K4 PADA IBU HAMIL MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2023 -2024	99
GAMBAR 5.11	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN K6 PADA IBU HAMIL MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2023 -2024	100
GAMBAR 5.12	PERSENTASE IBU HAMIL YANG MENDAPAT TABLET FE 3 DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	101
GAMBAR 5.13	PERSENTASE IBU HAMIL YANG MENDAPAT TABLET FE3 PROVINSI RIAU TAHUN 2023 -2024	102
GAMBAR 5.14	PERSENTASE IBU HAMIL YANG MENGKONSUMSI TABLET FE3 DI PROVINSI RIAU TAHUN 2024	103
GAMBAR 5.15	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU BERSALIN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	104
GAMBAR 5.16	CAKUPAN PERSALINAN DI FASYANKES MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU	105
GAMBAR 5.17	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU NIFAS (KF LENGKAP) DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	106
GAMBAR 5.18	CAKUPAN PELAYANAN IBU NIFAS (KF LENGKAP) MENURUT KABUPATEN/KOTA.....	107
GAMBAR 5.19	CAKUPAN IBU NIFAS MENDAPATKAN VITAMIN A DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024.....	108
GAMBAR 5.20	CAKUPAN IBU NIFAS MENDAPATKAN VITAMIN A MENURUT KABUPATEN/KOTA.....	108



GAMBAR 5.21	CAKUPAN IMUNISASI TD2+ PADA IBU HAMIL DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024.....	110
GAMBAR 5.22	CAKUPAN IMUNISASI TD2+ PADA IBU HAMIL MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU	110
GAMBAR 5.23	CAKUPAN IMUNISASI TD PADA IBU HAMIL DI PROVINSI RIAU TAHUN 2023 DAN 2024	111
GAMBAR 5.24	CAKUPAN IMUNISASI TD WUS TIDAK HAMIL DI PROVINSI RIAU TAHUN 2023-2024.....	111
GAMBAR 5.25	PERSENTASE PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	112
GAMBAR 5.26	PERSENTASE KOMPLIKASI KEBIDANAN DITANGANI MENURUT KABUPATEN/KOTA.....	113
GAMBAR 5.27	PESERTA KB AKTIF DAN PUS TIDAK AKTIF KB DI PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	114
GAMBAR 5.28	PERSENTASE PESERTA KB AKTIF DI PROVINSI RIAU 2020-2024	115
GAMBAR 5.29	PESERTA KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI DI PROVINSI RIAU TAHUN 2024	115
GAMBAR 5.30	PERSENTASE PESERTA KB AKTIF MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	116
GAMBAR 5.31	PERSENTASE PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	117
GAMBAR 5.32	PESERTA KB AKTIF PASCA PERSALINAN DAN TIDAK IKUT KB AKTIF PASCA PERSALINAN	117
GAMBAR 5.33	PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	118
GAMBAR 5.34	PERSENTASE PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT KABUPATEN/KOTA.....	119
GAMBAR 5.35	JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, ANAK BALITA DAN BALITA PROVINSI RIAU	120
GAMBAR 5.36	JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, ANAK BALITA DAN BALITA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	121
GAMBAR 5.37	JUMLAH KEMATIAN NEONATAL MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	122
GAMBAR 5.38	PESERTA PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0 - 28 HARI) PROVINSI RIAU TAHUN 2024	123
GAMBAR 5.39	PERSENTASE PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29 HARI - 11 BULAN) PROVINSI RIAU TAHUN 2024	124
GAMBAR 5.40	JUMLAH KEMATIAN POST NEONATAL MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	125
GAMBAR 5.41	PETA SEBARAN KEMATIAN BAYI PER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024	126
GAMBAR 5.42	PETA SEBARAN KEMATIAN BALITA PER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024.....	127



GAMBAR 5.43	PERSENTASE PENYEBAB KEMATIAN ANAK BALITA (1-4 TAHUN) PROVINSI RIAU TAHUN 2024	128
GAMBAR 5.44	CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL 1 (KN1) DAN KN LENGKAP PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024.....	129
GAMBAR 5.45	CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL 1 (KN1) DAN KN LENGKAP MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2023 -2024 ...	130
GAMBAR 5.46	BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSUI DINI (IMD) DI PROVINSI RIAU 2020-2024	131
GAMBAR 5.47	CAKUPAN BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSUI DINI DAN PERSALINAN DI FASYANKES MENURUT KAB/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	132
GAMBAR 5.48	PERSENTASE BAYI DIBERIKAN ASI EKSKLUSIF PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024.....	134
GAMBAR 5.49	CAKUPAN ASI EKSKLUSIF MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2023 - 2024	135
GAMBAR 5.50	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024	136
GAMBAR 5.51	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2023-2024	136
GAMBAR 5.52	CAKUPAN DESA/KELURAHAN UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION (UCI) PROVINSI RIAU 2020-2024	138
GAMBAR 5.53	CAKUPAN DESA/KELURAHAN UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION (UCI) MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2023-2024....	139
GAMBAR 5.54	PERSENTASE ANAK YANG MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL) MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	140
GAMBAR 5.55	PERSENTASE ANAK YANG MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL).....	140
GAMBAR 5.56	CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI (6-11 BULAN) PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	141
GAMBAR 5.57	CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI (6-11 BULAN) MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	142
GAMBAR 5.58	CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BALITA (6-59 BULAN) MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	143
GAMBAR 5.59	CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA ANAK BALITA (12-59 BULAN) PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	144
GAMBAR 5.60	CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA ANAK BALITA (12-59 BULAN) MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	144
GAMBAR 5.61	BALITA MEMILIKI BUKU KIA MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	145
GAMBAR 5.62	PERSENTASE BALITA DIPANTAU PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	147
GAMBAR 5.63	PERSENTASE BALITA DILAYANI SDIDTK MENURUT KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	147



GAMBAR 5.64	PERSENTASE BALITA DILAYANI MTBS MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	148
GAMBAR 5.65	PERSENTASE BALITA DITIMBANG PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	149
GAMBAR 5.66	PERSENTASE BALITA DITIMBANG MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	150
GAMBAR 5.67	PREVALENSI BALITA STUNTING (TB/U) BERDASARKAN SURVEY PROVINSI RIAU TAHUN 2016 – 2024.....	152
GAMBAR 5.68	PREVALENSI BALITA STUNTING (TB/U) BERDASARKAN SURVEY MENURUT KAB/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2019 – 2024	152
GAMBAR 5.69	PREVALENSI BALITA WASTING (BB/TB) BERDASARKAN SURVEY PROVINSI RIAU TAHUN 2016 – 2024.....	153
GAMBAR 5.70	PREVALENSI BALITA WASTING (BB/TB) BERDASARKAN SURVEY MENURUT KAB/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2019 -2024	154
GAMBAR 5.71	STATUS BALITA BERDASARKAN PENIMBANGAN (E PPGBM) PROVINSI RIAU TAHUN 2024	155
GAMBAR 5.72	STATUS BALITA BERAT BADAN KURANG BERDASARKAN INDEKS BB/U PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	156
GAMBAR 5.73	STATUS BALITA UNDERWEIGHT MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	156
GAMBAR 5.74	STATUS BALITA PENDEK/STUNTING BERDASARKAN INDEKS TB/U PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	157
GAMBAR 5.75	STATUS BALITA STUNTING BERDASARKAN TB/U MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	158
GAMBAR 5.76	STATUS BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/TB PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024.....	159
GAMBAR 5.77	STATUS BALITA WASTING BERDASARKAN BB/TB MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	159
GAMBAR 5.78	STATUS BALITA GIZI BURUK BERDASARKAN INDEKS BB/U PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	160
GAMBAR 5.79	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN (PENJARINGAN) ANAK SEKOLAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024	161
GAMBAR 5.80	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN (PENJARINGAN) ANAK SEKOLAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023-2024	162
GAMBAR 5.81	CAKUPAN USIA PRODUKTIF MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR DAN YANG BERESIKO PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024.....	163
GAMBAR 5.82	CAKUPAN USIA PRODUKTIF MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR DAN YANG BERISIKO MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	164
GAMBAR 5.83	CALON PENGANTIN (CATIN) MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	165
GAMBAR 5.84	CATIN PEREMPUAN ANEMIA DAN GIZI KURANG MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	166



GAMBAR 5.85	CAKUPAN USIA LANJUT (60 TH+) MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	167
GAMBAR 5.86	CAKUPAN USIA LANJUT (60 TH+) MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2023 - 2024.....	168
GAMBAR 6.1	JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS YANG MENDAPATKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR DI PROVINSI RIAU TAHUN 2024	171
GAMBAR 6.2	JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS DEWASA (> 14 THN) MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	172
GAMBAR 6.3	TREATMENT COVERAGE (TC-%) PROVINSI RIAU TAHUN 2022-2024	173
GAMBAR 6.4	TREATMENT COVERAGE (TC-%) TUBERKULOSIS MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2024	173
GAMBAR 6.5	KASUS TUBERKULOSIS ANAK 0-14 TAHUN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2024	175
GAMBAR 6.6	ANGKA KEBERHASILAN PENGobatan (SUCCESS RATE/SR) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS PROVINSI RIAU TAHUN 2024	176
GAMBAR 6.7	TREND KUMULATIF HIV PROVINSI RIAU TAHUN 2020 -2024	178
GAMBAR 6.8	PROPORSI KASUS HIV MENURUT KELOMPOK UMUR DI PROVINSI RIAU TAHUN 2024	179
GAMBAR 6.9	PROPORSI KASUS HIV BERDASARKAN JENIS KELAMINPROVINSI RIAU TAHUN 2024	180
GAMBAR 6.10	INFEKSI SALURAN PERNAFASAN AKUT (ISPA) PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	181
GAMBAR 6.11	PERSentase PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA PADA BALITA PROVINSI RIAU TAHUN 2023-2024	183
GAMBAR 6.12	PENDERITA DIARE SEMUA UMUR MENDAPAT YANKES MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2023-2024	184
GAMBAR 6.13	PERSentase BALITA PENDERITA DIARE MENDAPAT YANKES MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2023-2024....	185
GAMBAR 6.14	PERSentase BALITA PENDERITA DIARE MENDAPAT ZINC MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2023-2024	186
GAMBAR 6.15	PERSentase BALITA PENDERITA DIARE MENDAPAT ORALIT MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2023-2024....	186
GAMBAR 6.16	ANGKA PENEMUAN KASUS BARU (NEW CASE DETECTION RATE/NCDR) PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024.....	188
GAMBAR 6.17	ANGKA PENEMUAN KASUS BARU (NEW CASE DETECTION) KUSTA MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2023-2024....	189
GAMBAR 6.18	JUMLAH KASUS MULTI BASILER/KUSTA BASAH MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	190
GAMBAR 6.19	JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK BERDASARKAN MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	196
GAMBAR 6.20	CAKUPAN PEMERIKSAAN HEPATITIS B PADA IBU HAMIL PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024	197



GAMBAR 6.21	DETEKSI DINI HEPATITIS C PADA IBU HAMIL PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	198
GAMBAR 6.22	CAKUPAN BAYI LAHIR DARI IBU HBSAG REAKTIF MENDAPAT HBIG PROVINSI RIAU TAHUN 2024	199
GAMBAR 6.23	AFP RATE (NON FOLIO) PER 100.000 PENDUDUK PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024.....	200
GAMBAR 6.24	AFP RATE (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA <15 TAHUN PROVINSI RIAU	201
GAMBAR 6.25	INCIDENCE RATE (IR) PER 100.000 PENDUDUK DAN LAJU KEMATIAN/CASE FATALITY RATE (CFR) DBD PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024.....	203
GAMBAR 6.26	INCIDENCE RATE (IR) DBD PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	204
GAMBAR 6.27	ANGKA KESAKITAN MALARIA (ANNUAL PARASITE INCIDENCE/API) PER 1000 PENDUDUK PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024.....	207
GAMBAR 6.28	CAKUPAN PENEMUAN MALARIA YANG TERKONFIRMASI POSITIF MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	209
GAMBAR 6.29	PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	212
GAMBAR 6.30	PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI PROVINSI RIAU	214
GAMBAR 6.31	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2023-2024	215
GAMBAR 6.32	PERSENTASE PENDERITA DIABETES MELITUS (DM) MENDAPAT PELAYANAN SESUAI STANDAR MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2023-2024	216
GAMBAR 6.33	PERSENTASE ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024	217
GAMBAR 6.34	KABUPATEN/KOTA YANG MERESPON SINYAL ALERT KLB MINIMAL 80% <24JAM	219
GAMBAR 6.35	CAPAIAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI PROVINSI RIAU TAHUN 1445 H/2024 M	220
GAMBAR 6.36	TREND KELOMPOK UMUR JEMAAH HAJI PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2024.....	221
GAMBAR 6.37	DIAGNOSA PENYEBAB WAFAT JEMAAH HAJI PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	221
GAMBAR 7.1	PERSENTASE AIR MINUM DIPERIKSA KUALITAS AIRNYA SESUAI STANDAR PROVINSI RIAU TAHUN 2024 PROVINSI RIAU TAHUN 2024	224
GAMBAR 7.2	PERSENTASE KK STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)	226
GAMBAR 7.3	PERSENTASE KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK PROVINSI RIAU TAHUN 2024	226
GAMBAR 7.4	PERSENTASE KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG AMAN PROVINSI RIAU TAHUN 2024	227



GAMBAR 7.5	PERSENTASE DESA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024	229
GAMBAR 7.6	PERSENTASE DESA AKTIF MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	229
GAMBAR 7.7	PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR PROVINSI RIAU TAHUN 2024	231
GAMBAR 7.8	PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) MEMENUHI SYARAT KESEHATAN BERDASARKAN JENIS PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	233
GAMBAR 7.9	PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024.....	234





BAB I

DEMOGRAFI



PROFIL KESEHATAN PROVINSI RIAU **2024**



BAB I DEMOGRAFI

A. KONDISI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRASI

Provinsi Riau memiliki posisi geografis yang sangat strategis, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Lokasinya yang berada di jalur perdagangan regional dan global menjadikan provinsi ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, serta potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia.

Dengan luas wilayah mencapai 87.023,66 km², Provinsi Riau membentang dari kawasan lereng Pegunungan Bukit Barisan di sebelah barat hingga perairan Selat Malaka di sebelah timur. Secara astronomis, Riau terletak di antara 01°05'00" Lintang Selatan hingga 02°25'00" Lintang Utara, serta antara 100°00'00" hingga 105°05'00" Bujur Timur.

Batas-batas wilayah administrasi Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
- Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara

GAMBAR 1.1
PETA PROVINSI RIAU



Letak strategis ini menjadikan Provinsi Riau berbatasan langsung dengan empat provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, dan Kepulauan Riau. Selain itu, Riau juga berhadapan langsung dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura, melalui perairan Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia.

Kondisi geografis dan posisi lintas batas ini memberikan peluang besar bagi Provinsi Riau untuk meningkatkan peranannya dalam kegiatan perdagangan, investasi, dan kerjasama antar wilayah maupun antar negara. Apabila dimanfaatkan secara optimal, posisi ini dapat menjadi faktor pendorong utama dalam percepatan pembangunan ekonomi daerah. Secara administratif, Provinsi Riau terbagi ke dalam beberapa kabupaten dan kota. Masing-masing kabupaten/kota terdiri atas sejumlah kecamatan, yang selanjutnya terbagi ke dalam kelurahan dan/atau desa sebagai unit pemerintahan terkecil.

1. Luas Wilayah

Provinsi Riau merupakan daerah kepulauan dengan luas wilayah mencapai 89.935,896 km². Provinsi ini merupakan provinsi terluas kedua di Pulau Sumatera setelah Provinsi Sumatera Selatan.

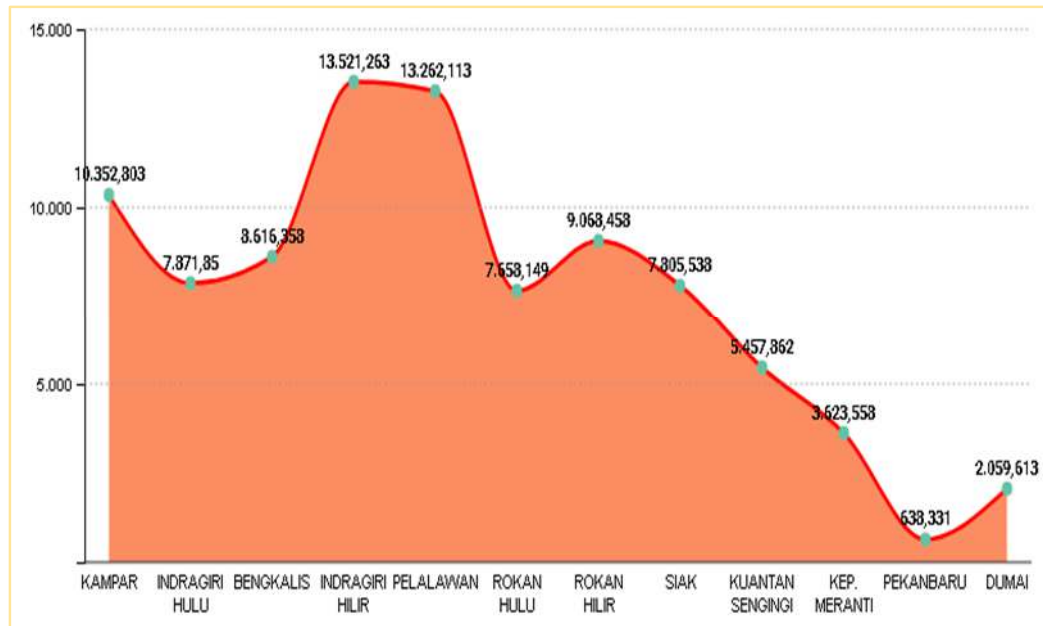
Dari seluruh wilayah administratif yang ada di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan wilayah terluas dengan total luas mencapai 13.521,263 km². Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Pelalawan dengan luas wilayah sebesar 13.262,113 km², disusul oleh Kabupaten Kampar yang memiliki luas wilayah sebesar 10.352,803 km².

Sementara itu, wilayah dengan luas terkecil di Provinsi Riau adalah Kota Pekanbaru, yang memiliki luas 638,331 km². Luas wilayah Kota Dumai berada sedikit di atasnya, yaitu sebesar 2.059,613 km², diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki luas 3.623,558 km².

Gambaran lebih rinci mengenai luas wilayah masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat dilihat pada ilustrasi atau peta yang disajikan di bawah ini.



GAMBAR 1.2
LUAS WILAYAH PROVINSI RIAU MENURUT KABUPATEN/KOTA
(KILOMETER PERSEGI) TAHUN 2024



Sumber : BPS Provinsi Riau, 2025

2. Jumlah Desa/Kelurahan

Secara administratif, Provinsi Riau terdiri atas 10 kabupaten dan 2 kota, yang selanjutnya terbagi ke dalam 172 kecamatan serta 1.867 desa dan kelurahan. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.592 desa dan 275 kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah provinsi.

Kabupaten Kampar merupakan daerah dengan jumlah kecamatan terbanyak, yakni sebanyak 21 kecamatan. Kabupaten ini juga memiliki jumlah desa dan kelurahan terbanyak di Provinsi Riau, yaitu sebanyak 250 unit pemerintahan setingkat desa/kelurahan.

Di sisi lain, Kota Dumai merupakan wilayah dengan jumlah kecamatan paling sedikit, yakni sebanyak 7 kecamatan. Kota ini juga memiliki jumlah kelurahan paling sedikit, yaitu 36 kelurahan, dan tidak memiliki desa dalam struktur pemerintahannya, sebagaimana lazimnya pada wilayah kota.



B. KEPENDUDUKAN

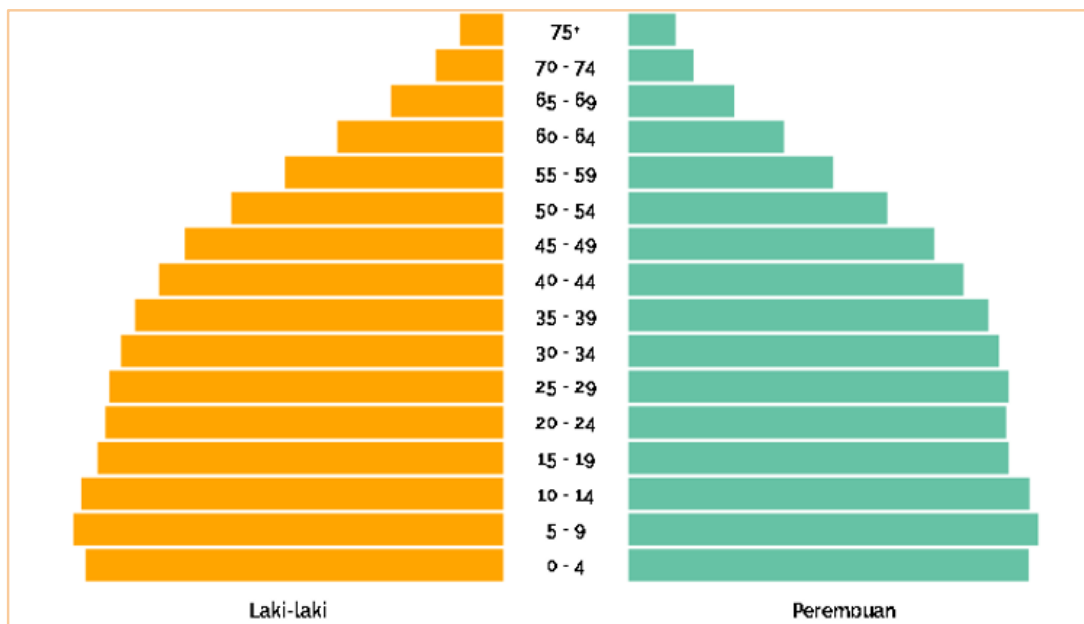
1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Hasil proyeksi penduduk Indonesia dari Sensus 2024 menunjukkan perbedaan komposisi penduduk di Provinsi Riau berdasarkan jenis kelamin, yaitu sebanyak 3.437.170 jiwa laki-laki dan 3.290.883 jiwa perempuan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan rasio jenis kelamin yang cenderung lebih tinggi pada kelompok laki-laki.

Berdasarkan Gambar 1.2, piramida penduduk Provinsi Riau masih bertipe ekspansif, ditandai dengan:

- Tingginya proporsi penduduk usia muda (0–14 tahun), yang menunjukkan angka kelahiran yang masih relatif tinggi.
- Lebarnya badan piramida pada usia 15–64 tahun, menandakan besarnya jumlah penduduk usia produktif.
- Kecilnya proporsi penduduk usia lanjut (75 tahun ke atas), yang hanya mencakup sekitar 1% dari total penduduk.

GAMBAR 1.3
PIRAMIDA PENDUDUK PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : BPS Provinsi Riau, 2025



Struktur penduduk Provinsi Riau yang masih bertipe ekspansif memberikan tantangan tersendiri di sektor kesehatan, beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- Kebutuhan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Dengan tingginya proporsi penduduk usia dini (0–14 tahun), maka kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan anak menjadi sangat penting. Pemerintah daerah perlu memastikan kecukupan akses terhadap imunisasi, gizi balita, layanan persalinan yang aman, serta penanganan stunting dan penyakit menular pada anak.

- Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Primer

Jumlah penduduk usia muda yang besar menuntut penguatan pelayanan kesehatan tingkat pertama (puskesmas, klinik, dan posyandu). Fokus utama harus diarahkan pada upaya promotif dan preventif, termasuk edukasi kesehatan, sanitasi, dan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

- Kesehatan Remaja dan Reproduksi

Penduduk usia remaja (10–19 tahun) memerlukan perhatian dalam aspek kesehatan reproduksi, mental, dan gizi. Edukasi mengenai seksualitas, pencegahan penyakit menular seksual (PMS), serta gangguan kesehatan mental perlu diintegrasikan ke dalam program kesehatan sekolah dan masyarakat.

- Perencanaan Kesehatan Lansia

Walaupun saat ini jumlah lansia di Provinsi Riau masih relatif kecil, seiring bertambahnya usia harapan hidup, proporsi penduduk lansia diperkirakan akan meningkat. Oleh karena itu, penting untuk mulai merencanakan layanan geriatri, deteksi dini penyakit kronis (seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung), serta penyediaan fasilitas rawat jalan dan perawatan jangka panjang untuk lansia.

- Beban Ganda Penyakit (Double Burden of Disease).

Seperti banyak daerah di Indonesia, Riau kemungkinan menghadapi beban ganda penyakit, yakni penyakit menular yang masih tinggi di kalangan anak-anak, serta meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes dan hipertensi di kalangan usia produktif. Hal ini menuntut penyesuaian kebijakan kesehatan yang adaptif dan berbasis data demografis.

- Sumber Daya Kesehatan dan Pembiayaan.



- Besarnya jumlah penduduk usia produktif juga menuntut peningkatan kualitas layanan kesehatan kerja dan jaminan kesehatan nasional (JKN). Pemerintah daerah harus menyesuaikan perencanaan pembiayaan kesehatan serta distribusi tenaga medis yang merata, terutama ke daerah-daerah yang memiliki jumlah penduduk tinggi.

2. Kepadatan Penduduk/km²

Penduduk merupakan aset penting dalam pembangunan suatu wilayah, karena merekalah pelaku utama dalam proses ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, disisi lain, pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak terkendali dapat menjadi tantangan besar bagi pembangunan yang berkelanjutan, termasuk dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, perumahan, dan terutama pelayanan kesehatan.

Di Provinsi Riau, peningkatan jumlah penduduk terus terjadi dari tahun ke tahun, yang berdampak langsung terhadap peningkatan kepadatan penduduk. Berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 2000, kepadatan penduduk di wilayah ini tercatat sebesar 43 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat signifikan hingga mencapai 74 jiwa/km² pada tahun 2023 dan menjadi 75 jiwa/km² pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan harus diantisipasi dengan perencanaan wilayah dan pelayanan publik yang tepat.

Namun, tidak semua wilayah di Provinsi Riau mengalami kepadatan penduduk yang sama. Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di kawasan perkotaan, khususnya di Kota Pekanbaru yang merupakan ibu kota provinsi. Kota ini memiliki kepadatan tertinggi, yaitu sebesar 1.608,4 jiwa/km². Kota Dumai, sebagai kota pelabuhan dan pusat industri, berada di posisi kedua dengan kepadatan 161,7 jiwa/km², disusul oleh Kabupaten Kampar dengan kepadatan 85 jiwa/km². Sebaliknya, beberapa wilayah seperti Kabupaten Pelalawan (31,3 jiwa/km²), Indragiri Hilir (50,7 jiwa/km²), dan Kepulauan Meranti (59 jiwa/km²) tergolong wilayah dengan kepadatan penduduk yang rendah.

Kepadatan penduduk yang tinggi, terutama di wilayah perkotaan, memberikan tekanan yang besar terhadap sistem pelayanan kesehatan. Permintaan terhadap fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan obat-obatan meningkat seiring dengan jumlah penduduk. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya



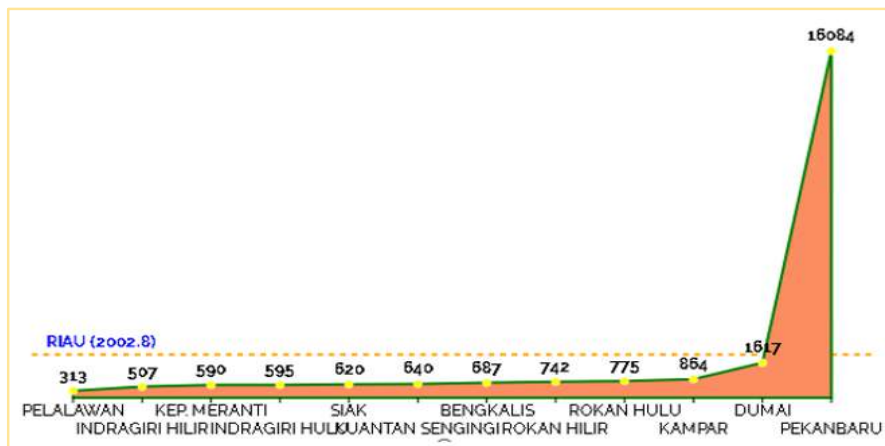
penumpukan pasien di rumah sakit dan puskesmas, memperpanjang waktu tunggu pelayanan, dan menurunkan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, kawasan dengan kepadatan tinggi lebih rentan terhadap penyebaran penyakit menular, terutama di lingkungan dengan sanitasi yang buruk dan keterbatasan ruang hunian.

Sebaliknya, daerah dengan kepadatan rendah juga menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam hal aksesibilitas pelayanan kesehatan. Jarak tempuh yang jauh, infrastruktur yang terbatas, serta minimnya fasilitas kesehatan menyebabkan penduduk di wilayah tersebut kesulitan mendapatkan layanan medis yang memadai. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya cakupan imunisasi, angka kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi, serta keterlambatan penanganan penyakit.

Tidak meratanya persebaran penduduk ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kondisi geografis, iklim, kesuburan tanah, ketersediaan lapangan kerja, serta faktor sosial budaya. Ketimpangan dalam persebaran penduduk memerlukan intervensi kebijakan yang terintegrasi, tidak hanya dalam aspek tata ruang dan pembangunan ekonomi, tetapi juga dalam pemerataan pelayanan kesehatan.

Untuk menggambarkan kondisi tersebut secara lebih jelas, berikut ini disajikan grafik kepadatan penduduk per kilometer persegi menurut kabupaten/kota di Provinsi Riau pada tahun 2024. Untuk melihat gambaran kepadatan penduduk di Provinsi lihat dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

GAMBAR 1.4
KEPADATAN PENDUDUK / KM² MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : BPS Provinsi Riau, 2025



Dengan memahami dinamika kepadatan dan persebaran penduduk, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif dan inklusif, khususnya dalam bidang kesehatan. Upaya pemerataan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas layanan, serta penyuluhan kesehatan masyarakat menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan demografi yang terus berkembang di Provinsi Riau.

3. Rasio Beban Tanggungan

Di Provinsi Riau, struktur umur penduduk saat ini masih didominasi oleh kelompok usia produktif. Hal ini berdampak langsung terhadap angka beban ketergantungan yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, angka beban tanggungan tercatat sebesar 50,1, dan turun menjadi 45,7 pada tahun 2024. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 46 penduduk usia tidak produktif. Penurunan ini menunjukkan bahwa Provinsi Riau tengah memasuki masa yang dikenal sebagai bonus demografi, yaitu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan penduduk usia tidak produktif.

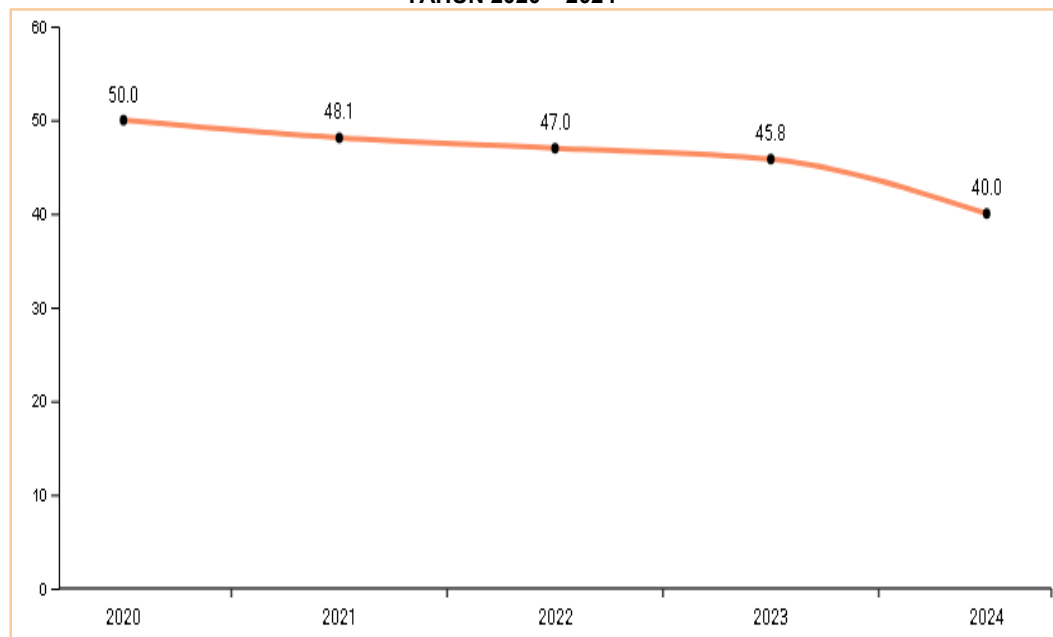
Era bonus demografi merupakan peluang emas yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, untuk mengoptimalkan potensi ini, perlu dukungan dari sektor kesehatan yang kuat dan merata. Beberapa implikasi penting yang perlu diperhatikan:

- a. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Usia Produktif
 - Penduduk usia produktif adalah tulang punggung pembangunan. Oleh karena itu, kesehatan mereka harus dijaga melalui layanan kesehatan promotif dan preventif, seperti pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi dewasa, dan program pencegahan penyakit tidak menular (PTM).
 - Program kesehatan kerja juga menjadi penting untuk menjamin produktivitas dan keselamatan di lingkungan kerja.
- b. Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan Anak dan Lansia
 - Meskipun proporsinya menurun, kelompok usia tidak produktif tetap memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal kesehatan ibu dan anak, gizi balita, serta pelayanan lansia.



- Lansia memerlukan layanan geriatri yang terintegrasi, sedangkan anak-anak membutuhkan layanan tumbuh kembang yang optimal agar kelak dapat menjadi sumber daya manusia berkualitas.
- c. Investasi pada Gizi dan Kesehatan Reproduksi
- Untuk menciptakan generasi produktif yang sehat dan berkualitas di masa depan, perlu dilakukan investasi pada gizi sejak dini, termasuk pencegahan stunting, serta edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja.
- d. Penyusunan Kebijakan Berbasis Data Demografi dan Kesehatan
- Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang menyelaraskan data demografi dengan indikator kesehatan masyarakat, sehingga setiap intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan berkelanjutan.

GAMBAR 1.5
ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (DEPENDENCY RATIO) PROVINSI RIAU
TAHUN 2020 – 2024



Sumber : BPS Provinsi Riau, 2025

4. Rasio Jenis Kelamin

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin merupakan salah satu indikator penting dalam analisis demografi yang memiliki dampak langsung terhadap perencanaan sosial dan pembangunan, termasuk dalam sektor kesehatan. Salah satu ukuran yang lazim digunakan untuk menggambarkan keseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah rasio jenis



kelamin (*sex ratio*), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan, yang dinyatakan per 100 penduduk perempuan.

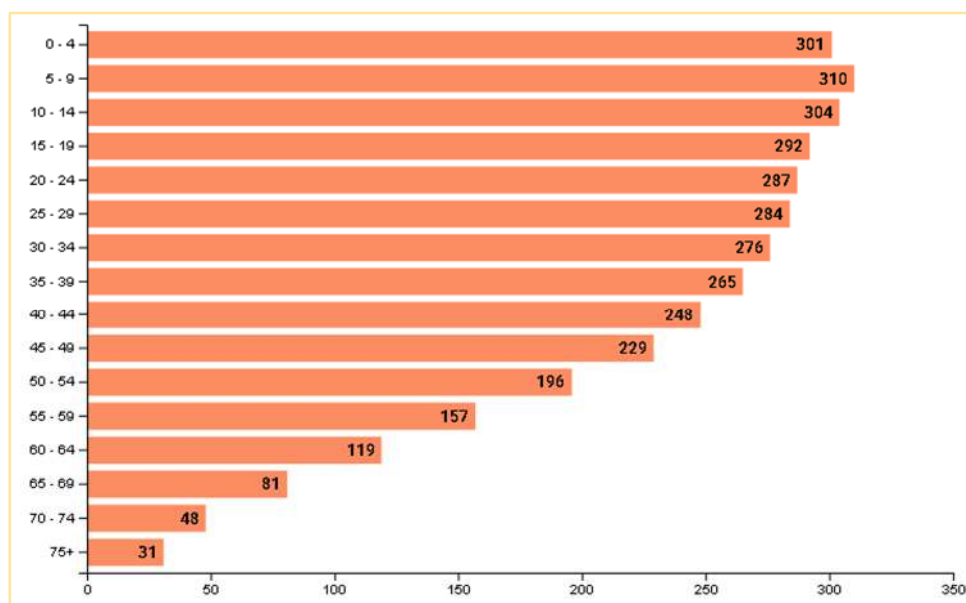
Pada tahun 2024, rasio jenis kelamin penduduk di Provinsi Riau tercatat sebesar 104. Artinya, terdapat sekitar 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan.

Dari perspektif kesehatan, informasi ini memiliki beberapa implikasi penting:

- Perencanaan Pelayanan Kesehatan Spesifik Gender: Ketidakseimbangan rasio jenis kelamin dapat mempengaruhi kebutuhan dan distribusi pelayanan kesehatan. Misalnya, jika populasi laki-laki lebih dominan, maka penyedia layanan kesehatan perlu memperhatikan penyakit yang lebih sering terjadi pada laki-laki, seperti penyakit kardiovaskular, cedera akibat kecelakaan kerja, serta masalah kesehatan reproduksi pria.
- Program Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana: Keseimbangan jenis kelamin berkaitan erat dengan dinamika kependudukan jangka panjang. Ketimpangan rasio dapat memengaruhi struktur rumah tangga, pernikahan, dan perencanaan keluarga. Oleh karena itu, strategi kesehatan reproduksi perlu disesuaikan agar dapat mengantisipasi perubahan ini secara komprehensif.
- Kesehatan Mental dan Sosial : Ketimpangan gender dalam jumlah penduduk juga dapat berpengaruh terhadap aspek sosial dan psikologis, seperti kompetisi dalam pasar pernikahan, kesenjangan ekonomi berbasis gender, atau isolasi sosial yang semuanya berdampak pada kesehatan mental.
- Kesiapan Sistem Kesehatan : Sistem kesehatan perlu memastikan bahwa sumber daya manusia, fasilitas, dan program yang disediakan mampu menjawab kebutuhan spesifik dari kelompok laki-laki maupun perempuan secara adil dan merata. Berikut adalah gambaran rasio jenis kelamin berdasarkan kelompok umur di tahun 2024.

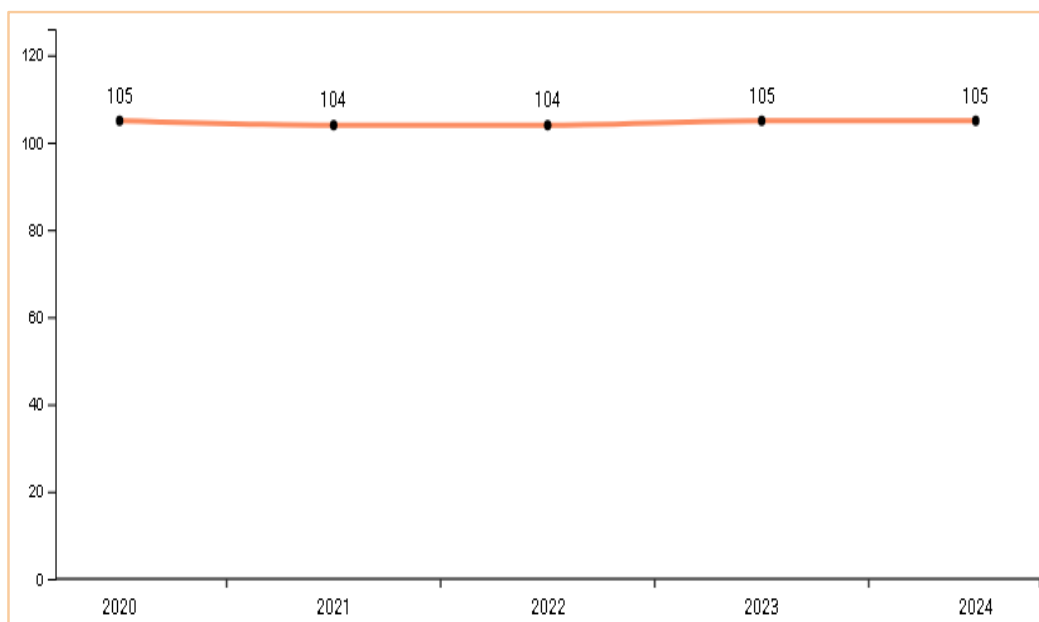


GAMBAR 1.6
RASIO JENIS KELAMIN MENURUT KELOMPOK UMUR PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : BPS Provinsi Riau, 2025

GAMBAR 1.7
RASIO JENIS KELAMIN PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Riau, 2025



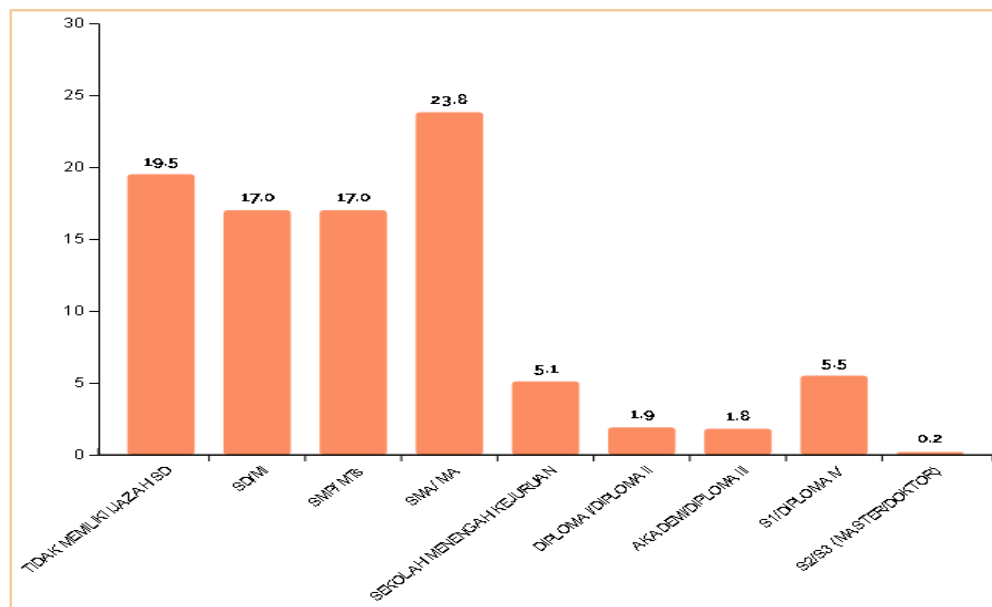
C. PENDIDIKAN

Pada tahun 2024, data menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Provinsi Riau memiliki ijazah tertinggi pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA/MA), yaitu sebesar 23,8%. Sementara itu, persentase penduduk dengan ijazah tertinggi Sekolah Dasar (SD) tercatat sebesar 17,0%. Angka ini menunjukkan adanya tren penurunan jumlah penduduk yang hanya berpendidikan hingga tingkat SD. Hal ini merupakan indikator positif bagi pembangunan wilayah, termasuk dalam sektor kesehatan, karena menunjukkan adanya peningkatan akses dan partisipasi pendidikan di masyarakat.

Di sisi lain, penduduk yang memiliki ijazah tertinggi pada jenjang pendidikan tinggi (Diploma atau Sarjana) baru mencapai 9,4%. Meskipun angkanya masih tergolong rendah, kehadiran lulusan pendidikan tinggi tetap menjadi potensi penting dalam mendorong kualitas sumber daya manusia, terutama dalam bidang-bidang strategis seperti kesehatan.

Sedangkan untuk persentase tingkat pendidikan tertinggi yang dimiliki oleh penduduk Riau bisa dilihat pada gambar dibawah ini.

GAMBAR 1.8
PERSENTASE PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : BPS Provinsi Riau, 2025

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin tinggi kualitas pendidikan, semakin besar pula kontribusinya terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menciptakan



masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi. Pendidikan tidak hanya memperluas wawasan dan membuka peluang kerja, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku individu terhadap kesehatan.

Individu yang berpendidikan cenderung memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya menjaga kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Mereka lebih memahami pentingnya pola makan seimbang, aktivitas fisik rutin, pemeriksaan kesehatan berkala, dan gaya hidup bebas rokok serta alkohol. Hal ini secara langsung berdampak pada penurunan angka kesakitan dan peningkatan angka harapan hidup.

Selain itu, pendidikan mendorong kemampuan seseorang dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan secara efektif. Dalam konteks kesehatan masyarakat, hal ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program-program seperti imunisasi, keluarga berencana, pencegahan stunting, dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular.





BAB II

SARANA KESEHATAN



PROFIL KESEHATAN PROVINSI RIAU **2024**



BAB II SARANA KESEHATAN

Derajat kesehatan masyarakat suatu negara sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas sarana kesehatan yang ada. Sarana kesehatan berperan sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan masyarakat, baik dalam upaya pencegahan maupun pengobatan. Pada bagian ini, sarana kesehatan yang menjadi fokus meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, yang terdiri dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit, serta Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu, Poskesdes, dan sejenisnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada individu maupun masyarakat. Pelayanan ini mencakup pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif, serta dapat diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat itu sendiri.

A. SARANA KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN / PENGELOLA

1. Rumah Sakit

Ruang lingkup pembangunan kesehatan selain upaya promotif dan preventif, di dalamnya juga terdapat pembangunan kesehatan bersifat kuratif dan rehabilitatif. Rumah Sakit (RS) merupakan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang utamanya menyelenggarakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Rumah Sakit juga berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan. Tugas Rumah Sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan paripurna, diklat, dapat juga melakukan penelitian, pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan.

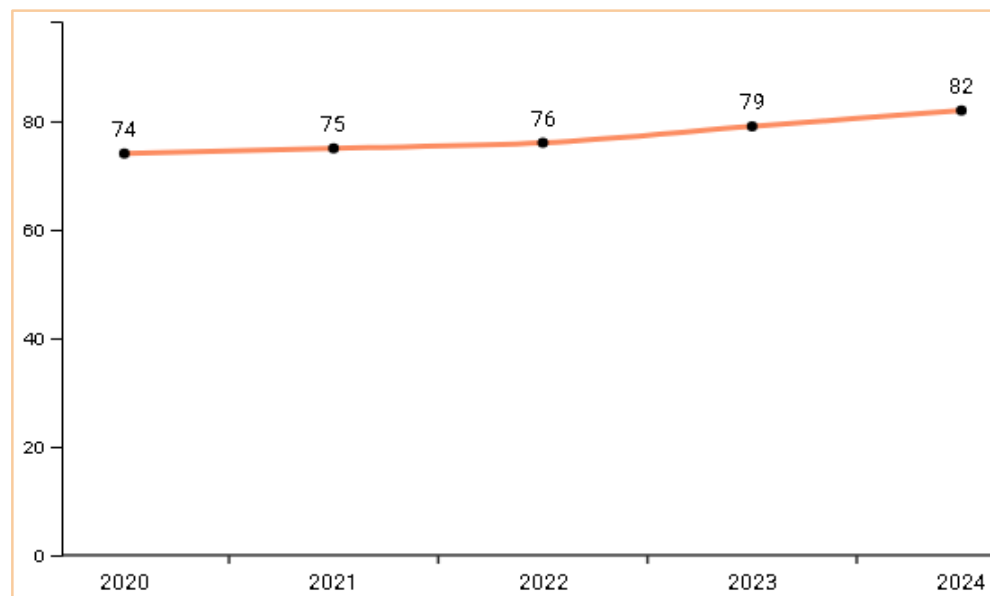
Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024), jumlah rumah sakit di Provinsi Riau baik yang dikelola oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2024, tercatat terdapat 82 rumah sakit, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 79 rumah sakit. Tren ini mencerminkan adanya upaya penguatan infrastruktur pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.

Peningkatan jumlah rumah sakit di Provinsi Riau selama lima tahun terakhir merupakan perkembangan yang positif. Namun, tantangan pemerataan



pelayanan kesehatan tetap menjadi agenda penting yang harus diatasi oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah afirmatif untuk memastikan setiap masyarakat, dimanapun mereka tinggal, mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas. Perkembangan Rumah Sakit di Provinsi Riau dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

GAMBAR 2.1
JUMLAH RUMAH SAKIT PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024



Sumber : Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Secara keseluruhan, terdapat penambahan 8 rumah sakit selama lima tahun, dengan lonjakan signifikan terjadi di tahun 2024 (penambahan 3 rumah sakit dalam satu tahun). Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya percepatan pembangunan pelayanan kesehatan, meskipun sebelumnya pertumbuhan cenderung stagnan selama periode 2021-2023.

Tren pertumbuhan rumah sakit di Provinsi Riau, khususnya pada tahun 2024, merupakan perkembangan positif dalam memperkuat infrastruktur kesehatan. Namun, ketimpangan geografis dalam distribusinya masih menjadi tantangan serius. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan perlu melakukan intervensi yang lebih strategis agar pertumbuhan tersebut berdampak merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang tinggal di luar pusat kota.

Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut memiliki peran krusial dalam sistem kesehatan masyarakat. Di Indonesia, rumah sakit



diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar berdasarkan pengelolaannya, yaitu rumah sakit publik (pemerintah) dan rumah sakit privat (non-pemerintah).

Rumah sakit publik dikelola oleh berbagai instansi pemerintah (Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, TNI/Polri, Kementerian lain, Organisasi swasta non-profit seperti lembaga keagamaan dan organisasi sosial). Di Provinsi Riau, hingga tahun 2024, terdapat 25 unit rumah sakit publik. Rumah sakit ini berfungsi sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan dasar hingga rujukan bagi masyarakat, terutama di wilayah yang kurang terjangkau oleh sektor swasta.

Berbeda dengan rumah sakit publik, rumah sakit privat dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Swasta perorangan, Perusahaan dan investor kesehatan lainnya. Pada tahun 2024, jumlah rumah sakit privat di Provinsi Riau tercatat sebanyak 57 unit, atau sekitar 69,5% dari total 82 rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa sektor swasta memainkan peran dominan dalam penyediaan layanan kesehatan di daerah ini.

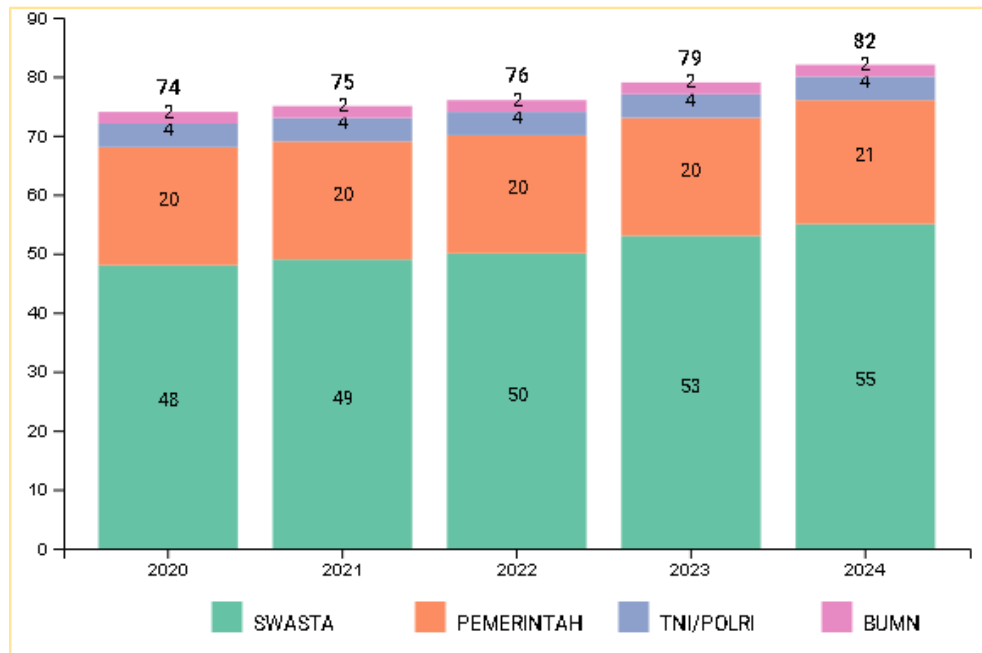
Dominasi rumah sakit privat, khususnya di kota besar seperti Pekanbaru, menunjukkan bahwa masyarakat Riau sebagian besar mengandalkan layanan dari sektor swasta. Hal ini dapat menguntungkan dari sisi keberagaman layanan dan inovasi, namun juga dapat menimbulkan masalah ketimpangan akses, terutama bagi kelompok masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.

Pada tahun 2024, rumah sakit privat di Provinsi Riau mencakup proporsi terbesar dari total rumah sakit yang ada. Sementara rumah sakit publik memainkan peran penting sebagai penyedia layanan dasar dan pelaksana program nasional. Oleh karena itu, keberhasilan sistem kesehatan di Riau akan sangat ditentukan oleh kolaborasi yang seimbang dan terarah antara sektor publik dan swasta, disertai kebijakan pemerataan yang responsif terhadap kebutuhan wilayah pinggiran dan kelompok rentan.

Rumah Sakit publik maupun privat menunjukkan peningkatan pada kurun waktu 2020 s.d 2024 seperti yang disajikan pada gambar dibawah ini.



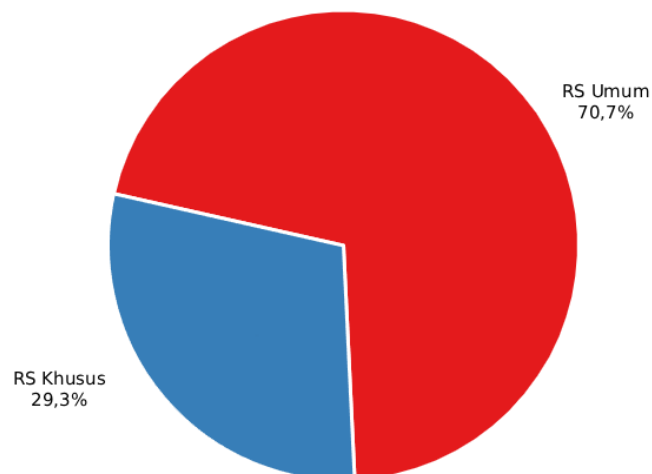
GAMBAR 2.2
PERKEMBANGAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN KEPEMILIKAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Bila Rumah Sakit dikelompokkan berdasarkan dua kategori maka di tahun 2024 Rumah Sakit umum ada sebanyak 87% (71 Rumah Sakit) sedangkan untuk Rumah Sakit khusus sebanyak 13% (13 Rumah Sakit) yang tersebar di seluruh Provinsi Riau. Perbandingan antara rumah sakit umum dan rumah sakit khusus di Provinsi Riau tahun 2024 dapat dilihat dalam diagram dibawah ini :

GAMBAR 2.3
PERSENTASE RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS PROVINSI RIAU TAHUN 2024



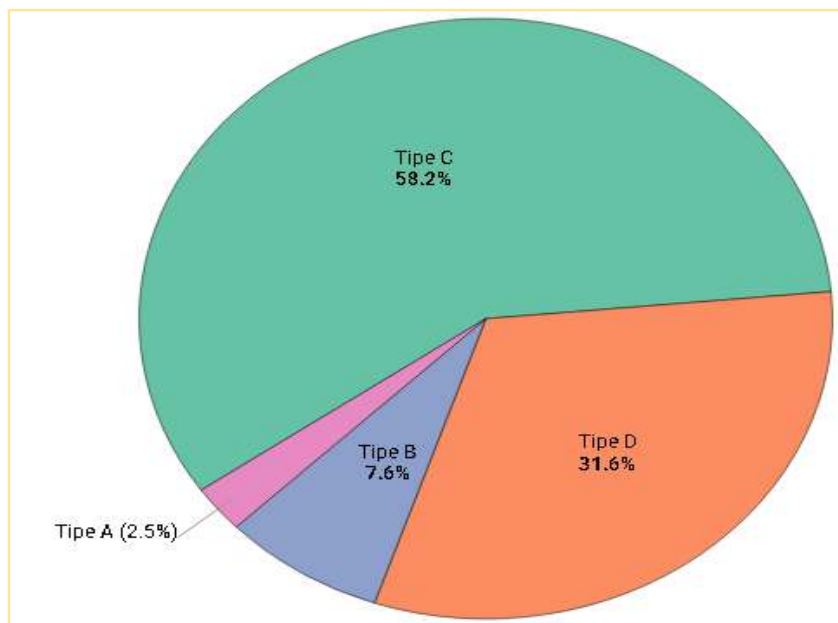
Sumber : Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



Kemudian bila dilihat Rumah sakit berdasarkan tipe, Diagram dibawah ini menyajikan tentang tipe Rumah Sakit berdasarkan fasilitas kesehatan dan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membuat rumah sakit terbagi menjadi 4 tipe yakni tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D.

Dari seluruh jumlah Rumah Sakit yang ada di Provinsi Riau yang berjumlah 82 rumah sakit, tipe D sebanyak 26 RS (31,6%), tipe C sebanyak 48 RS (58,2%), tipe B sebanyak 6 RS (7,6%), tipe A sebanyak 2 RS (2,5%). Untuk lebih jelasnya pembagian RS berdasarkan tipe dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

GAMBAR 2.4
PERSENTASE RUMAH SAKIT BERDASARKAN TIPE PROVINSI RIAU TAHUN 2024

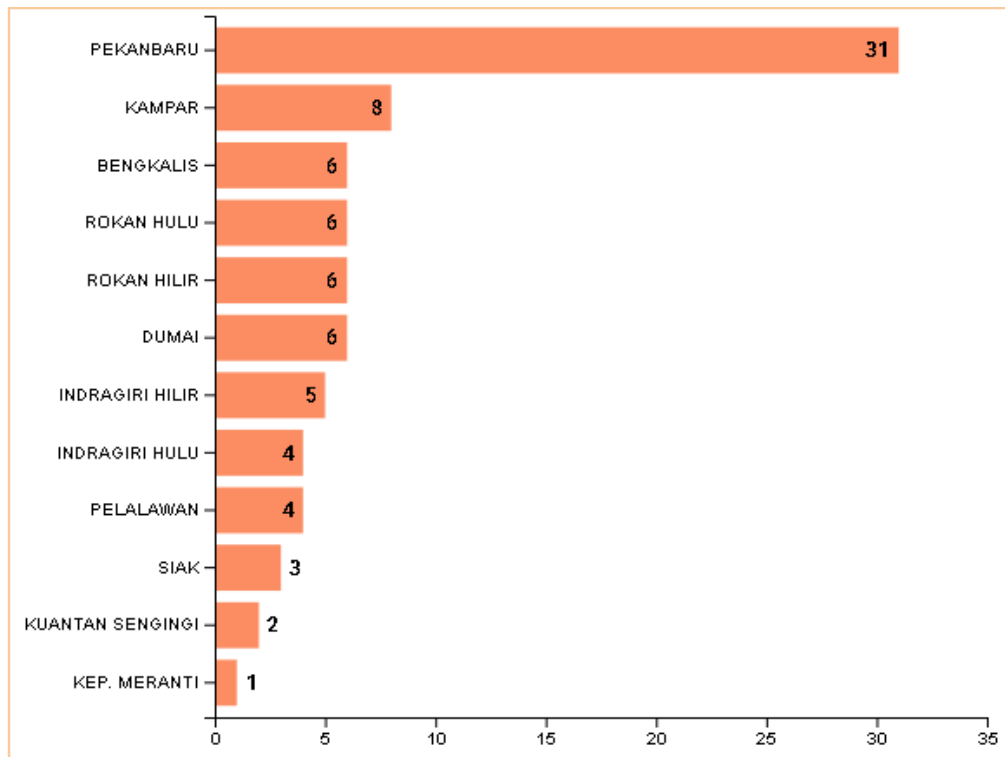


Sumber : Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Pada tahun 2024, persebaran rumah sakit di Provinsi Riau didominasi oleh Kota Pekanbaru dengan jumlah sebanyak 31 rumah sakit (38%). Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Kampar dengan 8 rumah sakit (10%), diikuti oleh Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Rokan Hilir yang masing-masing memiliki 6 rumah sakit (7%). Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi wilayah dengan jumlah rumah sakit paling sedikit, yaitu hanya 1 rumah sakit (1%). Adapun Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Siak masing-masing memiliki 3 rumah sakit. Penyebaran Rumah Sakit menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



GAMBAR 2.5
JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024



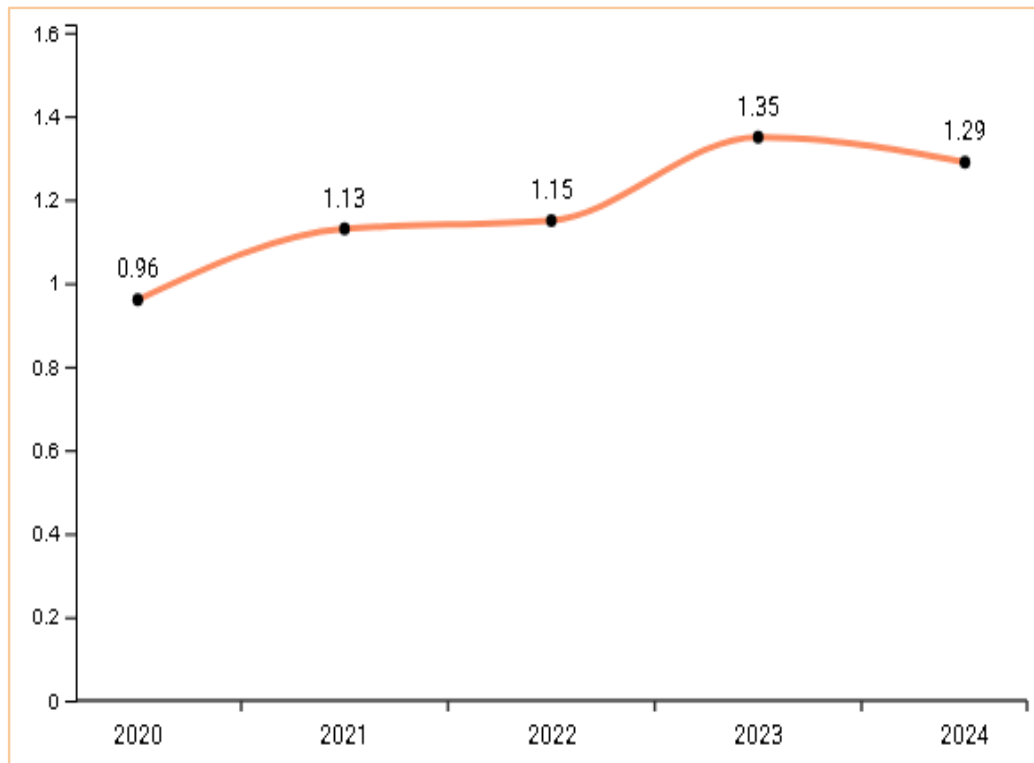
Sumber : Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Rasio tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kapasitas sistem kesehatan, khususnya dalam menyediakan layanan rawat inap yang memadai. Rasio ini mencerminkan kemampuan rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan perorangan, terutama bagi pasien yang memerlukan perawatan intensif atau lanjutan. Umumnya, rasio ini dinyatakan dalam jumlah tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk.

Berdasarkan data yang tersedia, perkembangan rasio tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk dari tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



GAMBAR 2.6
RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK PROVINSI RIAU
TAHUN 2020 – 2024



Sumber : Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Terjadi peningkatan bertahap dalam rasio tempat tidur rumah sakit dari tahun 2021 hingga 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kapasitas fasilitas rawat inap, baik melalui pembangunan rumah sakit baru, perluasan kapasitas rumah sakit yang sudah ada, atau pengadaan tempat tidur tambahan.

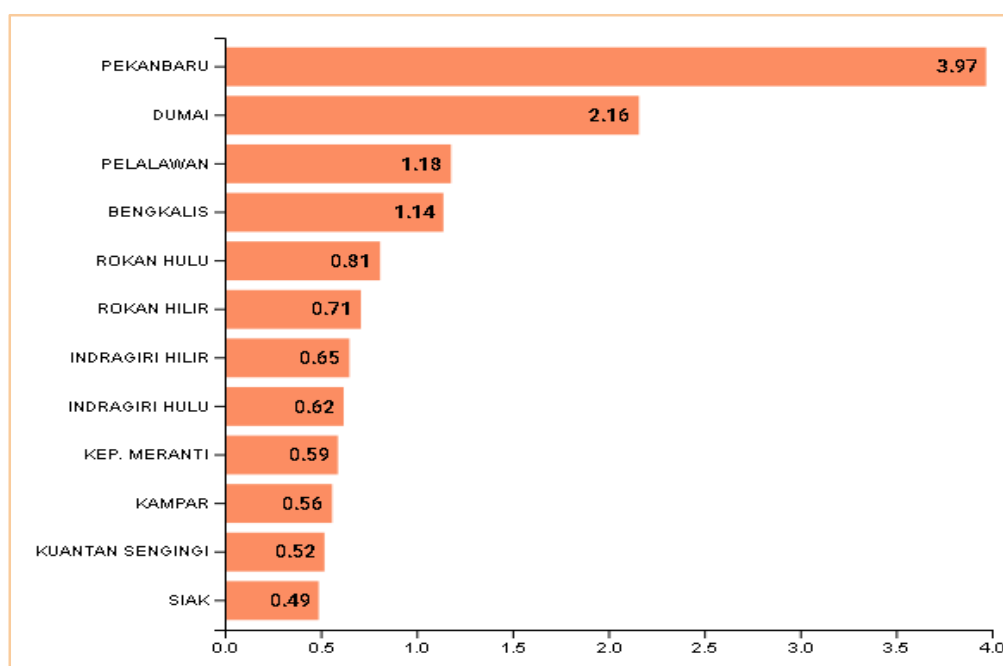
Pada tahun 2024, rasio mengalami sedikit penurunan dari 1,32 per 1000 penduduk menjadi 1,29 per 1.000 penduduk. Penurunan ini meskipun tidak signifikan, tetap perlu dicermati karena dapat mengindikasikan beberapa hal, antara lain:

- Pertumbuhan jumlah penduduk yang lebih cepat daripada peningkatan jumlah tempat tidur.
- Penyesuaian kapasitas layanan rumah sakit, misalnya karena renovasi, alih fungsi ruangan, atau efisiensi operasional.
- Perubahan arah kebijakan kesehatan, yang mungkin lebih menitikberatkan pada penguatan layanan primer dan promotif-preventif di luar rumah sakit.



Penurunan rasio pada tahun 2024 perlu menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan untuk memastikan bahwa akses terhadap pelayanan rawat inap tidak terganggu, serta untuk mendorong penyediaan fasilitas kesehatan yang proporsional dengan pertumbuhan penduduk. Perencanaan strategis yang komprehensif dibutuhkan agar sistem pelayanan kesehatan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara optimal. Sedangkan gambaran rasio tempat tidur di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

GAMBAR 2.7
RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di Provinsi Riau masih menunjukkan ketimpangan antar wilayah. Hal ini dapat dilihat dari rasio jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk di masing-masing kabupaten/kota. Data terbaru menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru memiliki rasio rumah sakit tertinggi, yaitu sebesar 3,97 per 10.000 penduduk, sedangkan beberapa kabupaten lainnya memiliki rasio yang masih sangat rendah, bahkan berada di bawah 0,1.

Kabupaten/Kota dengan rasio rumah sakit yang tergolong cukup baik selain Pekanbaru antara lain adalah Kabupaten Pelalawan (1,01 per 1000 penduduk) dan Rokan Hulu (0,81 per 1000 penduduk). Sementara itu, kabupaten lainnya



seperti Kabupaten Indragiri Hulu (0,62 per 1000 penduduk), Kabupaten Indragiri Hilir (0,65 per 1000 penduduk), Kabupaten Kampar (0,56 per 1000 penduduk), dan Kabupaten Kuantan Singingi (0,52 per 1000 penduduk) menunjukkan angka rasio yang masih berada di bawah 1, namun relatif lebih baik dibandingkan kabupaten lainnya.

Beberapa daerah masih menunjukkan rasio rumah sakit yang sangat rendah, seperti Kota Dumai (0,22 per 1000 penduduk), Kabupaten Bengkalis (0,11 per 1000 penduduk), Kabupaten Rokan Hilir (0,07 per 1000 penduduk), Kabupaten Kepulauan Meranti (0,06 per 1000 penduduk), dan Kabupaten Siak (0,05 per 1000 penduduk). Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan tingkat rujukan masih terbatas di wilayah-wilayah tersebut.

Ketimpangan ini dapat berdampak pada kualitas dan kecepatan pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat, terutama dalam kondisi darurat atau penyakit kronis yang memerlukan penanganan lanjutan. Selain itu, ketimpangan ini juga berpotensi menambah beban layanan di rumah sakit yang berada di Pekanbaru, karena menjadi rujukan utama bagi wilayah-wilayah dengan keterbatasan fasilitas.

Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat merupakan sarana kesehatan yang telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar dan dapat diakses oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Kemampuan pelayanan gawat darurat yang dimaksud adalah upaya cepat dan tepat untuk segera mengatasi puncak kegawatan yaitu henti jantung dengan Resusitasi Jantung Paru Otak (*Cardiopulmonary–Cerebral– Resuscitation*) agar kerusakan organ yang terjadi dapat dihindarkan atau ditekan sampai minimal dengan menggunakan Bantuan Hidup Dasar (*Basic Life Support/BLS*) dan Bantuan Hidup Lanjut (ALS).

Sarana kesehatan yang dimaksud dalam hal ini adalah rumah bersalin, puskesmas, dan Rumah Sakit baik Rumah Sakit umum, jiwa maupun khusus. Puskesmas dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat. Untuk Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level I Rumah Sakit (RS) di Provinsi Riau Tahun 2024 telah mencapai 100% baik Rumah Sakit khusus maupun Rumah Sakit Umum.



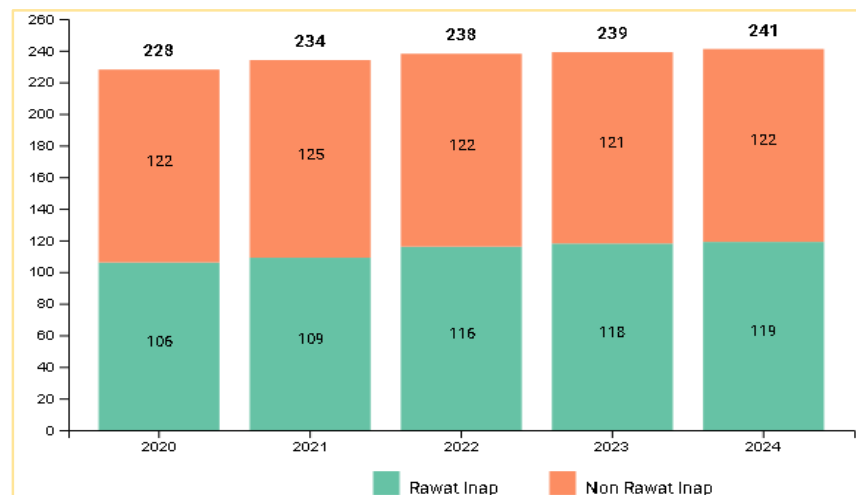
2. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang strategis dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Puskesmas memiliki tugas utama menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif, yang didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh, berkesinambungan, dan berbasis masyarakat. Puskesmas bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan di wilayah kerjanya guna mewujudkan masyarakat yang sehat dan mandiri melalui penyelenggaraan pelayanan yang berfokus pada pendekatan keluarga, kelompok, dan komunitas, dalam rangka menciptakan wilayah kerja yang sehat (kecamatan sehat).

Dengan landasan hukum yang kuat dalam UU No. 17 Tahun 2023, Puskesmas bukan hanya tempat pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga motor penggerak transformasi kesehatan masyarakat di tingkat akar rumput. Penguatan peran Puskesmas sangat penting untuk menjawab tantangan epidemiologi baru, ketimpangan akses kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara adil dan merata.

Jumlah Puskesmas di Provinsi Riau sampai dengan Bulan Desember 2024 sebanyak 241 unit yang sudah teregistrasi. Jumlah tersebut terdiri dari 119 unit puskesmas rawat inap dan 122 unit puskesmas non rawat inap dapat dilihat pada gambar berikut .

GAMBAR 2.8
JUMLAH TOTAL PUSKESMAS, PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP
PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



Gambar grafik diatas menunjukkan Gambar grafik diatas menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah Puskesmas secara bertahap, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan primer. Pada tahun 2020, jumlah Puskesmas tercatat sebanyak 228 unit. Jumlah ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai 241 unit pada tahun 2024, atau meningkat sebanyak 13 unit (5,7%) dalam lima tahun terakhir. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah dalam memperluas cakupan pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah dengan kebutuhan tinggi atau akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan.

Kondisi ini menunjukkan adanya penguatan kapasitas Puskesmas untuk menangani kasus-kasus kesehatan secara lebih menyeluruh, efisien, dan dekat dengan masyarakat. Meski demikian, peningkatan kapasitas layanan juga perlu diiringi oleh ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang kompeten, peralatan medis yang memadai, serta sistem rujukan yang efektif.

Puskesmas berdasarkan jenis pelayanan, dibagi dalam 2 (dua) kategorikan sebagai berikut :

- Puskesmas Rawat Inap

Jumlah Puskesmas Rawat Inap meningkat dari 106 unit pada tahun 2020 menjadi 119 unit pada tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan kapasitas pelayanan Puskesmas dalam menangani pasien yang membutuhkan perawatan sementara tanpa harus dirujuk ke rumah sakit. Dalam periode lima tahun, terjadi penambahan 13 unit Puskesmas Rawat Inap, atau sekitar 12,3% peningkatan.

Proporsi Puskesmas Rawat Inap terhadap total Puskesmas juga meningkat, dari 46,5% pada tahun 2020 menjadi 49,4% pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa hampir separuh dari seluruh Puskesmas kini telah mampu menyediakan layanan rawat inap dasar, yang penting terutama di wilayah pedesaan dan terpencil.

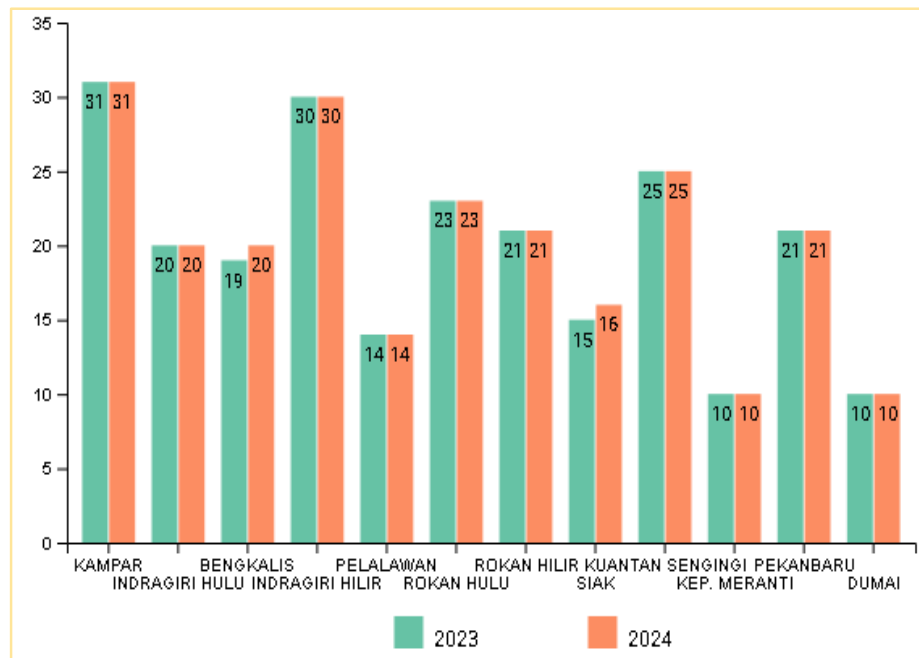
- Puskesmas Non Rawat Inap

Sementara itu, jumlah Puskesmas Non Rawat Inap relatif stabil selama lima tahun terakhir, dengan kisaran 122–125 unit. Pada tahun 2024, jumlahnya tercatat sebanyak 122 unit, sama dengan tahun 2020. Stabilitasnya angka ini mengindikasikan bahwa fokus pengembangan lebih diarahkan pada



peningkatan status Puskesmas menjadi rawat inap, ketimbang penambahan unit non rawat inap baru.

GAMBAR 2.9
PUSKESMAS TEREGISTRASI MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU
TAHUN 2023 – 2024



Sumber : Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Pada tahun 2024, jumlah Puskesmas di Provinsi Riau tercatat sebanyak 241 unit, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 239 unit. Secara umum, tren jumlah Puskesmas cenderung stagnan, dengan sebagian besar kabupaten/kota tidak mengalami perubahan jumlah fasilitas.

Dari total 12 kabupaten/kota, hanya 2 daerah yang mencatatkan penambahan jumlah Puskesmas, yakni Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak. Penambahan ini mengindikasikan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperluas cakupan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar, baik karena pertumbuhan penduduk, perluasan wilayah administratif, atau peningkatan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, 9 kabupaten/kota lainnya tidak mengalami perubahan jumlah Puskesmas, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pembangunan Puskesmas baru dalam satu tahun terakhir. Ini perlu menjadi perhatian, terutama di daerah



yang memiliki luas wilayah besar dan jumlah penduduk tinggi seperti Kampar dan Indragiri Hilir, untuk memastikan pelayanan yang merata.

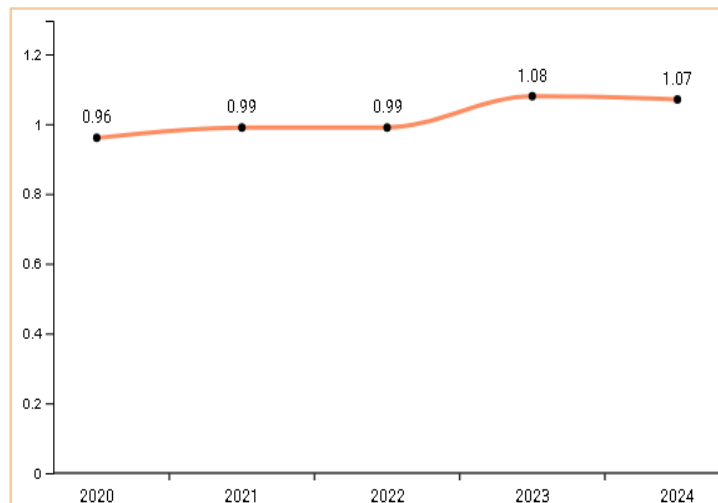
Distribusi jumlah Puskesmas juga menunjukkan variasi antar wilayah. Kabupaten Kampar dan Indragiri Hilir memiliki jumlah Puskesmas tertinggi (masing-masing 31 dan 30 unit), sedangkan Pelalawan memiliki jumlah terendah (14 unit). Perbedaan ini harus dianalisis lebih lanjut dalam konteks kepadatan penduduk, jumlah kecamatan, dan kondisi geografis.

Untuk indikator yang mampu menggambarkan secara kasar kemampuan Puskesmas dalam mencukupkan kebutuhan pelayanan kesehatan primer terhadap masyarakat adalah Rasio Puskesmas. Idealnya, 1 Puskesmas melayani 20.000–30.000 penduduk, namun angka ini sangat bergantung pada kondisi wilayah, infrastruktur, dan sistem rujukan.

Untuk indikator yang mampu menggambarkan secara kasar kemampuan Puskesmas dalam mencukupkan kebutuhan pelayanan kesehatan primer terhadap masyarakat adalah Rasio Puskesmas. Idealnya, 1 Puskesmas melayani 20.000-30.000 penduduk, namun angka ini sangat bergantung pada kondisi wilayah, infrastruktur, dan sistem rujukan.

Secara umum, Provinsi Riau telah berada dalam kategori ideal dalam hal ketersediaan Puskesmas terhadap jumlah penduduk. Namun, penurunan rasio pada tahun 2024 mengindikasikan perlunya antisipasi terhadap laju pertumbuhan penduduk dan distribusi geografis penduduk agar tidak terjadi ketimpangan akses layanan kesehatan, terutama di wilayah padat atau terpencil.

GAMBAR 2.10
RASIO PUSKESMAS PER 30.000 PENDUDUK PROVINSI RIAU
TAHUN 2020 – 2024



Sumber : Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



Dari grafik trend rasio Puskesmas diatas terlihat bahwa :

- Tahun 2020-2022 : Rasio berada di angka 0,96 - 0,99, yang berarti secara agregat belum mencapai standar ideal (di bawah 1). Ini menunjukkan bahwa satu Puskesmas melayani lebih dari 30.000 penduduk, yang berpotensi menyebabkan kelebihan beban pelayanan, antrian panjang, dan penurunan kualitas layanan.
- Tahun 2023 : Rasio meningkat signifikan menjadi 1,08, menandakan bahwa jumlah Puskesmas telah memenuhi bahkan sedikit melampaui kebutuhan ideal populasi secara provinsi. Hal ini menunjukkan adanya penambahan Puskesmas atau peningkatan efisiensi dalam distribusinya.
- Tahun 2024 : Rasio sedikit menurun menjadi 1,07, meskipun masih di atas standar nasional. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah Puskesmas yang signifikan (hanya terdapat penambahan dua unit dari tahun sebelumnya).

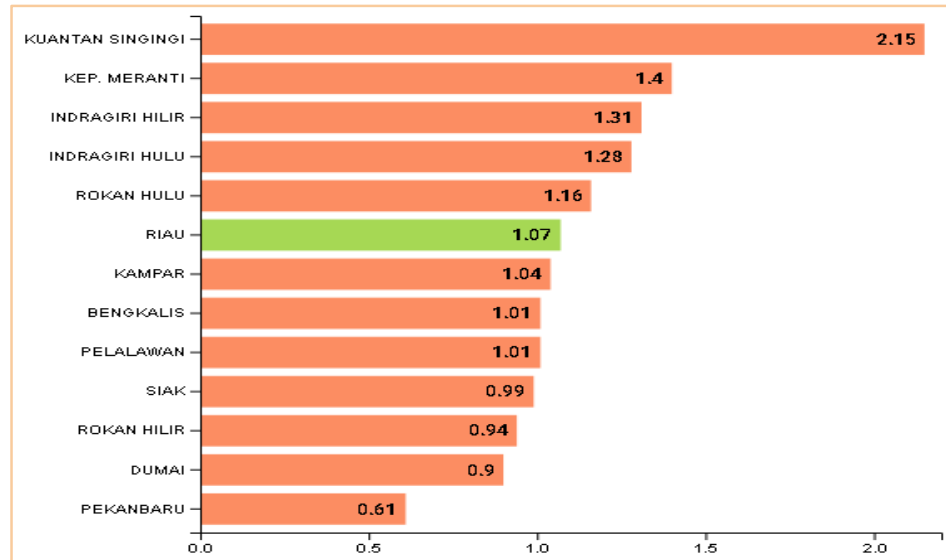
Secara umum, mayoritas kabupaten di Riau telah memenuhi rasio ideal Puskesmas per 30.000 penduduk. Sebanyak 8 dari 12 kabupaten/kota telah mencapai atau melampaui rasio ideal. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, wilayah-wilayah tersebut memiliki jumlah Puskesmas yang mencukupi terhadap jumlah penduduknya.

Kabupaten Rokan Hilir (0,94), Siak (0,99), dan Dumai (0,90) menunjukkan rasio yang hampir mencapai standar, namun masih berada di bawah angka ideal. Hal ini mengindikasikan bahwa satu Puskesmas di daerah tersebut melayani lebih dari 30.000 penduduk, sehingga ada potensi overload layanan, terutama pada Puskesmas di kawasan padat penduduk.

Kota Pekanbaru (0,61) mencatat rasio terendah di Provinsi Riau. Ini menunjukkan bahwa satu Puskesmas di Pekanbaru melayani hampir 50.000 penduduk, yang sangat jauh dari standar ideal. Rendahnya rasio ini bisa berdampak pada kepadatan pelayanan, antrian tinggi, dan keterbatasan daya jangkau, terutama pada kawasan pinggiran kota yang sedang tumbuh pesat. Untuk melihat rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



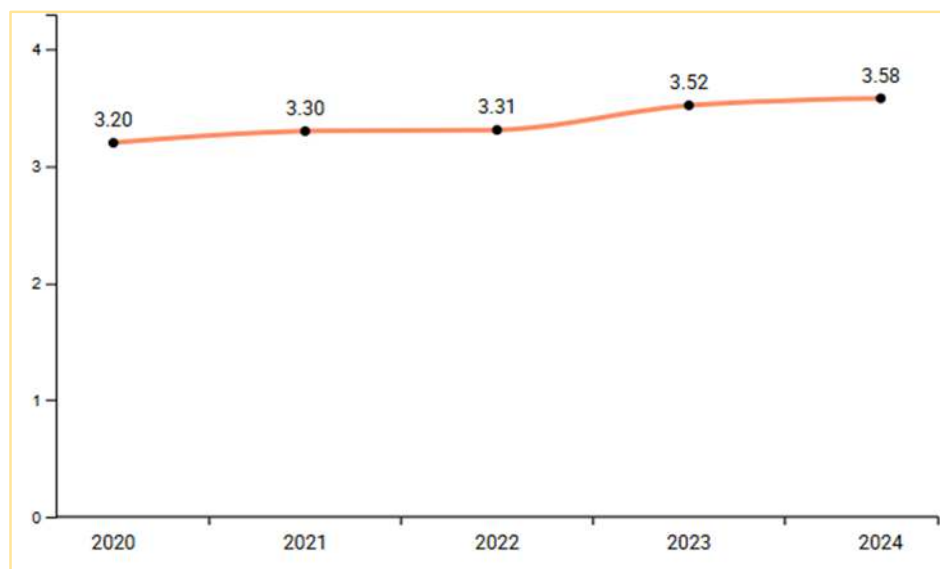
GAMBAR 2.11
RASIO PUSKESMAS PER 30.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Sedangkan untuk rasio Puskesmas per 100.000 penduduk di Provinsi Riau adalah sebesar 3,58. Ini artinya untuk 100.000 penduduk di Provinsi Riau dilayani sekitar 3 puskesmas. Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan selama 5 tahun dimana sejak (2019-2024) dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

GAMBAR 2.12
RASIO PUSKESMAS PER 100.000 PENDUDUK PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



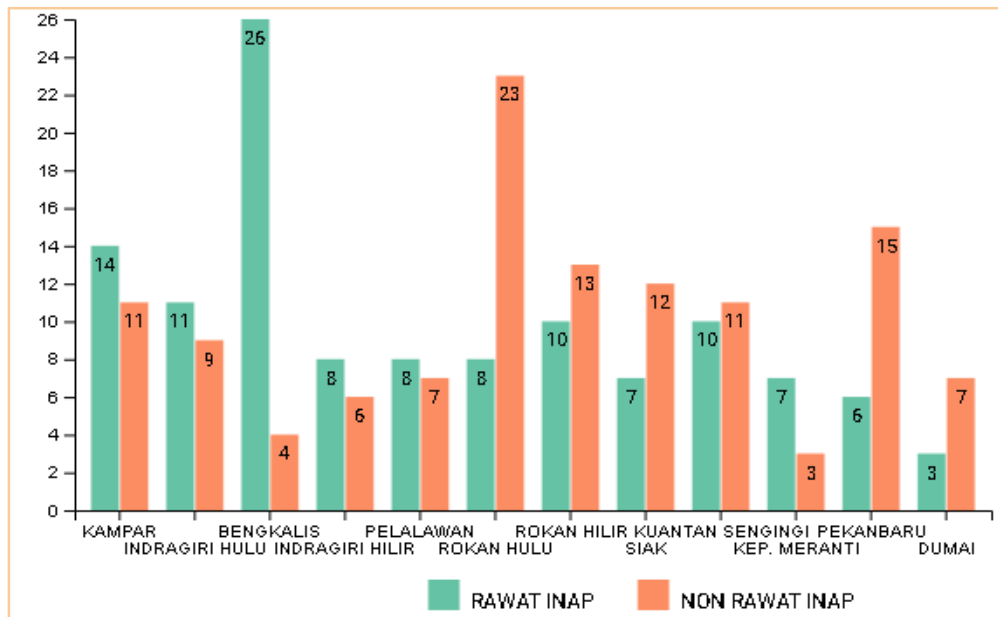
Sumber : Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, beberapa Puskesmas di Provinsi Riau telah ditingkatkan statusnya dari Puskesmas non-perawatan menjadi Puskesmas perawatan. Peningkatan ini bertujuan memperluas akses pelayanan, terutama rawat inap dasar, tanpa meninggalkan fungsi promotif, preventif, dan rehabilitatif. Upaya ini terbukti lebih efektif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat jika dilaksanakan secara konsisten, melibatkan masyarakat dan berkesinambungan.

Perkembangan jumlah Puskesmas perawatan dan non perawatan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2024 dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 2.13
PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP PER KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Pada grafik diatas terlihat bahwa pada tahun 2024, Kabupaten Indragiri Hilir tercatat sebagai daerah dengan jumlah Puskesmas Rawat Inap terbanyak di Provinsi Riau, yaitu sebanyak 26 unit. Sebaliknya, jumlah Puskesmas Rawat Inap paling sedikit terdapat di Kota Dumai, yaitu hanya 3 unit. Untuk Puskesmas Non Rawat Inap, jumlah terbanyak berada di Kabupaten Kampar sebanyak 23 unit, sedangkan jumlah terendah tercatat di Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu 3 unit.

Distribusi Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap di Provinsi Riau menunjukkan variasi yang mencerminkan perbedaan kebutuhan layanan



kesehatan di tiap wilayah. Untuk mendukung pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, Puskesmas dibantu oleh Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas Keliling. Kedua unit ini berperan penting dalam menjangkau masyarakat di wilayah terpencil atau sulit diakses.

Pustu merupakan unit pelayanan sederhana yang memperluas cakupan pelayanan Puskesmas di wilayah kerja yang lebih kecil. Jenis dan mutu layanan disesuaikan dengan ketersediaan tenaga dan sarana yang ada.

Sementara itu, Puskesmas Keliling bergerak secara mobil untuk menjangkau daerah yang tidak memiliki fasilitas tetap, serta mendukung kegiatan luar gedung seperti imunisasi, penyuluhan, dan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.

Keberadaan Pustu dan Puskesmas Keliling menjadi bagian penting dalam memastikan akses pelayanan kesehatan yang merata, berkesinambungan, dan dekat dengan masyarakat.

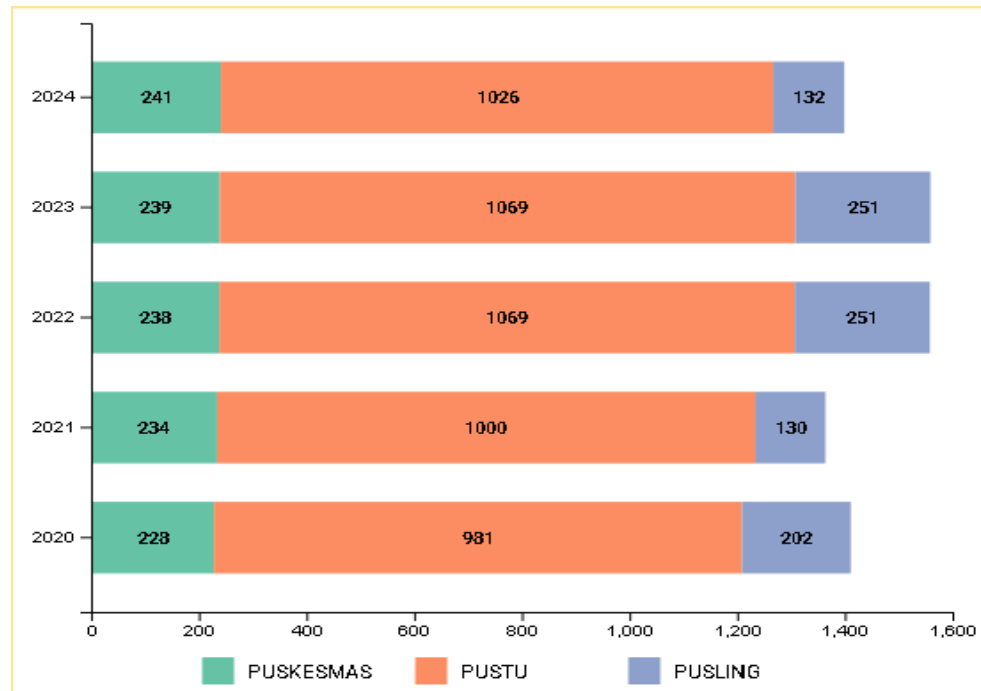
Puskesmas Keliling berperan penting dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan ke wilayah yang sulit diakses. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyuluhan kesehatan, pelatihan kader posyandu (balita dan lansia), kemitraan bidan-dukun, kelas ibu hamil, UKS, desa siaga, serta kegiatan lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Bersama Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling menjadi pilar dalam peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar. Ketiganya berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama, pusat pemberdayaan masyarakat, serta pusat pembangunan berwawasan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan perorangan (private goods) dan pelayanan kesehatan masyarakat (public goods) secara terpadu.

Perkembangan jumlah Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Puskesmas Keliling di Provinsi Riau pada tahun 2020 – 2024 dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



GAMBAR 2.14
JUMLAH PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU) DAN PUSKESMAS KELILING (PUSLING)
PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024



Sumber : Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Berdasarkan data pada gambar di atas, terlihat adanya penurunan jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas Keliling (Pusling) pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Penurunan ini perlu menjadi perhatian serius, karena dapat berdampak pada menurunnya akses layanan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap jaringan pelayanan Puskesmas, termasuk keberadaan dan fungsi Pustu serta Pusling. Penguatan kembali peran kedua unit ini sangat penting untuk memastikan pelayanan kesehatan dasar tetap menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkesinambungan.

B. AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

1. Cakupan Kunjungan Rawat Jalan & Rawat Inap Di Sarana Pelayanan Kesehatan

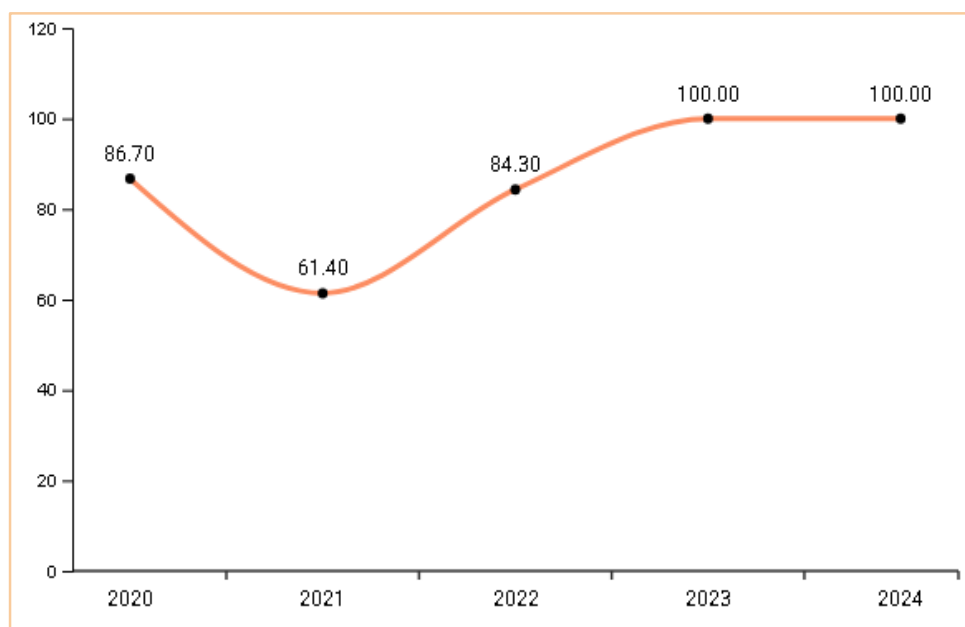
Cakupan rawat jalan adalah persentase kunjungan rawat jalan baru yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan dalam wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Kunjungan ini mencakup pelayanan rawat jalan di Puskesmas dan



Rumah Sakit. Pada tahun 2024, cakupan kunjungan rawat jalan di Provinsi Riau mencapai 100%, menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2023 dan 2022, yang masing-masing tercatat sebesar 84,3%. Peningkatan ini mencerminkan kondisi pelayanan kesehatan yang telah kembali berjalan normal setelah terdampak pandemi COVID-19. Pemulihan sistem kesehatan serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan turut mendorong peningkatan kunjungan rawat jalan.

Untuk jelaskan gambaran cakupan kunjungan rawat jalan berbanding jumlah penduduk selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2018-2024 pada grafik dibawah ini.

GAMBAR 2.15
CAKUPAN KUNJUNGAN RAWAT JALAN DI PUSKESMAS PROVINSI RIAU
TAHUN 2020-2024



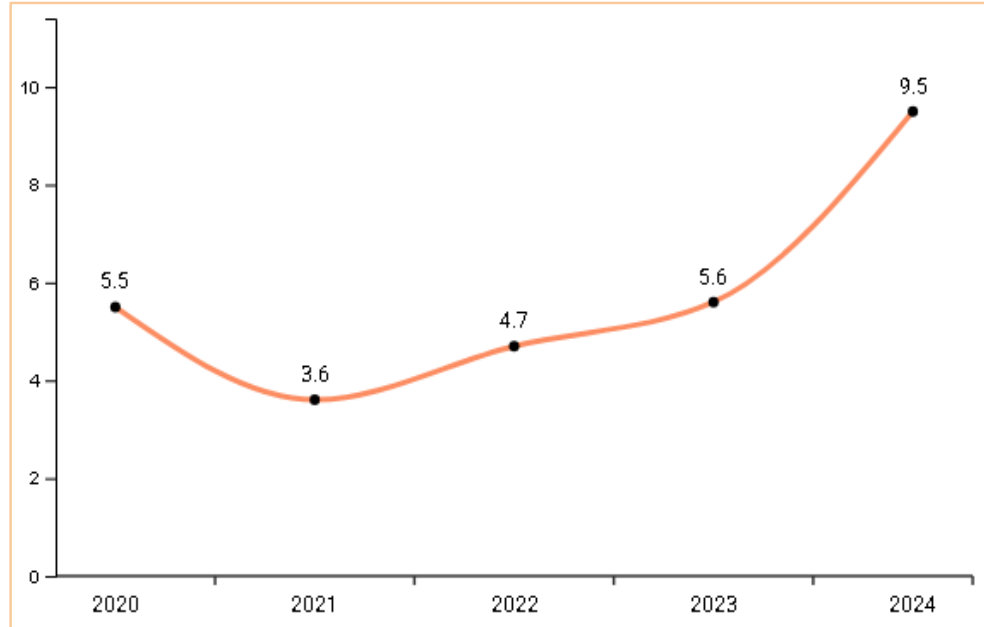
Sumber : Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Sedangkan Cakupan rawat inap adalah cakupan kunjungan rawat inap baru di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan kunjungan rawat inap ini meliputi kunjungan rawat inap di Puskesmas, kunjungan rawat inap di Rumah Sakit, dan kunjungan rawat inap di sarana pelayanan kesehatan lain. Cakupan rawat inap di sarana kesehatan di Provinsi Riau Tahun 2024 sebesar 9,5% meningkat dibandingkan tahun 2023 (5,6%) tahun 2022 (4,7%) .



Untuk jelaskan gambaran cakupan kunjungan rawat inap berbanding jumlah penduduk selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2018-2024 pada grafik dibawah ini.

GAMBAR 2.16
CAKUPAN KUNJUNGAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

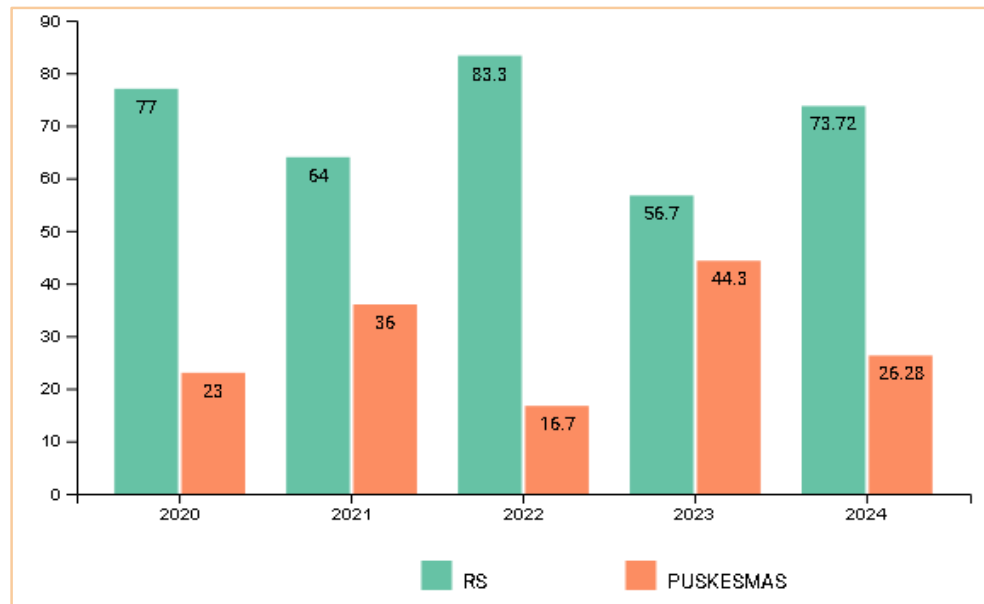
2. Kunjungan Gangguan Jiwa Di Sarana Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan jiwa ditujukan bagi pasien dengan gangguan kejiwaan, mencakup gangguan perasaan, proses pikir, dan perilaku yang menyebabkan penderitaan serta menghambat fungsi sosial. Data pelayanan jiwa di rumah sakit umumnya berasal dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dan Rumah Sakit Umum (RSU) yang memiliki klinik jiwa.

Namun, masih terdapat kendala di lapangan, yaitu tidak semua RSU memiliki layanan kesehatan jiwa karena keterbatasan tenaga medis jiwa. Selain itu, banyak kasus gangguan jiwa di masyarakat belum tertangani secara optimal, karena rendahnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penderita atau keluarganya.



GAMBAR 2.17
PERSENTASE KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA DI RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS
PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024



Sumber : Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dari grafik diatas diketahui bahwa dari jumlah gangguan jiwa di Provinsi Riau Tahun 2024 sebagian besar berkunjung ke Rumah Sakit sebesar 73,72% meningkat dibandingkan tahun 2022 (55,7%) dibandingkan dengan berkunjung ke Puskesmas (28,28%).

3. Angka Kematian Pasien Di Rumah Sakit

Angka kematian merupakan salah satu indikator hasil kinerja dari proses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kematian pasien dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kematian di bawah 48 jam dan kematian di atas 48 jam setelah pasien dirawat.

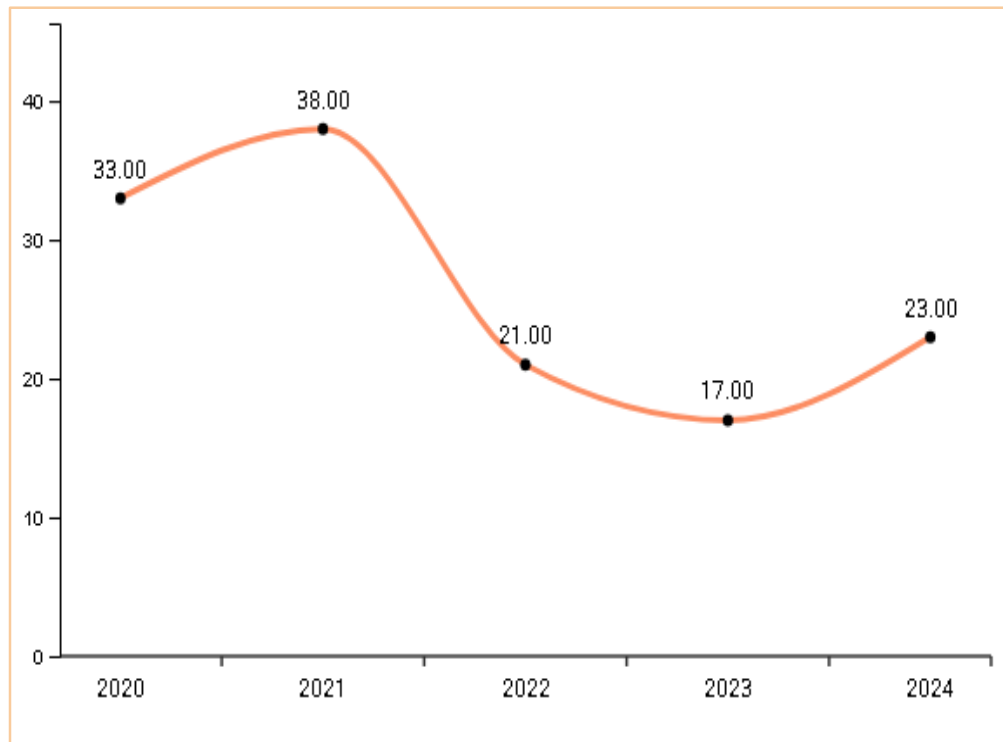
Salah satu parameter utama yang digunakan untuk menilai angka kematian di rumah sakit adalah Gross Death Rate (GDR), yaitu angka kematian umum yang dihitung untuk setiap 1.000 pasien yang keluar dari rumah sakit, baik karena sembuh, dirujuk, atau meninggal dunia.

Pada perhitungan GDR, tidak memperhitungkan lama waktu pasien dirawat sebelum meninggal. Artinya, seluruh kematian — baik yang terjadi dalam waktu kurang dari atau lebih dari 48 jam — tetap dihitung dalam indikator ini. Standar nilai GDR yang baik adalah tidak lebih dari 45 per 1.000 pasien keluar. Nilai yang melebihi standar ini dapat mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap kualitas



pelayanan medis dan sistem manajemen pasien di rumah sakit. Gambaran *Gross Death Rate* (GDR) Rumah Sakit (RS) di Provinsi Riau Tahun 2018-2024 dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

GAMBAR 2.18
GROSS DEATH RATE (GDR) PER 1.000 PENDERITA DI RUMAH SAKIT PROVINSI RIAU
TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, GDR Rumah Sakit di Provinsi Riau menunjukkan tren membaik pasca pandemi. GDR sempat meningkat dari 33 per 1.000 pasien keluar pada 2020 menjadi 38 pada 2021, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, yang diduga akibat tingginya beban pelayanan dan pasien dalam kondisi kritis selama pandemi COVID-19.

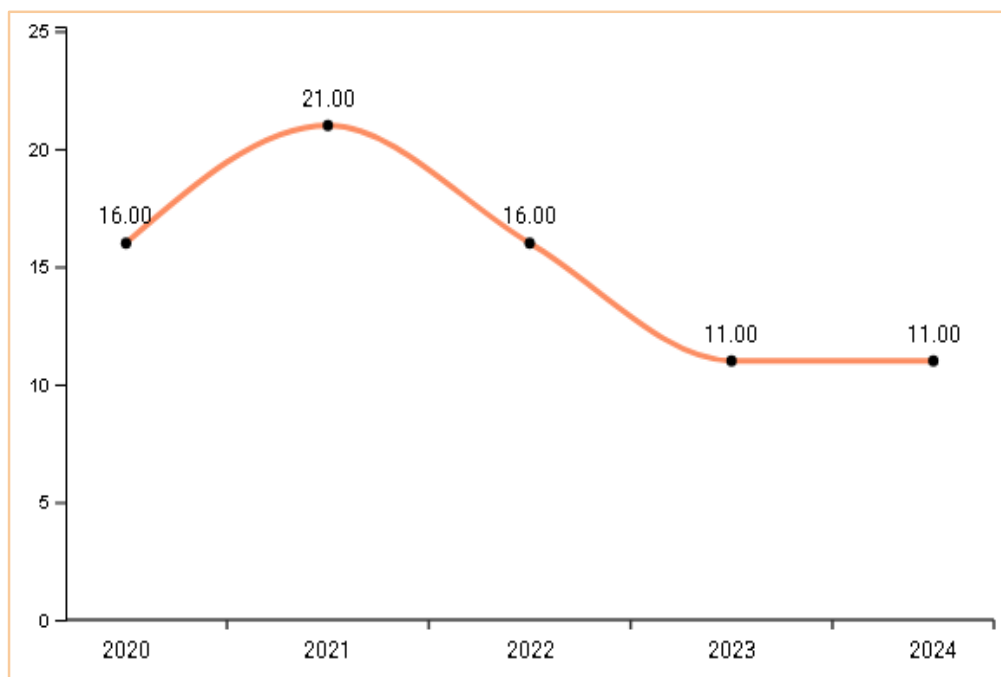
Setelah itu, terjadi penurunan signifikan menjadi 21 pada 2022 dan 17 per 1000 penderita pada 2023, mencerminkan pemulihan layanan kesehatan, peningkatan kualitas perawatan, serta menurunnya angka kematian akibat COVID-19. Namun, pada tahun 2024, GDR kembali meningkat menjadi 22,7 per 1.000 pasien keluar meskipun masih dalam batas standar (< 45), tren kenaikan ini perlu dicermati khususnya terkait dengan mutu pelayanan klinis, efektivitas sistem rujukan, serta manajemen pasien dengan kondisi kritis.



Net Death Rate (NDR) adalah angka kematian pasien setelah 48 jam perawatan per 1.000 pasien keluar, yang digunakan sebagai indikator mutu pelayanan rumah sakit. Kematian setelah 48 jam umumnya dikaitkan dengan kualitas layanan, sedangkan kematian sebelum 48 jam sering disebabkan oleh keterlambatan pasien dalam mengakses fasilitas kesehatan. Batas toleransi NDR yang masih dapat diterima adalah kurang dari 25 per 1.000 pasien keluar.

Di Provinsi Riau, angka NDR menunjukkan tren membaik dalam tiga tahun terakhir, dimana tahun 2022 (15 per 1000 penderita), tahun 2023 (11 per 1000 penderita) dan tahun 2024 (11,3 per 1000 penderita). Meskipun terdapat sedikit kenaikan pada tahun 2024 dibandingkan 2023, angka tersebut masih jauh di bawah batas toleransi dan secara keseluruhan mencerminkan mutu pelayanan rumah sakit yang baik. Gambaran NDR Rumah Sakit di Provinsi Riau tahun 2020-2024 dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

GAMBAR 2.19
NET DEATH RATE (NDR) PER 1.000 PENDERITA DI RUMAH SAKIT
PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024



Sumber : Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



4. Indikator Kinerja Pelayanan Di Rumah Sakit

Tingkat keberhasilan pelayanan di rumah sakit umumnya dinilai dari berbagai aspek, seperti pemanfaatan sarana, mutu pelayanan, dan efisiensi operasional. Untuk itu, sejumlah indikator standar pelayanan kesehatan digunakan sebagai alat ukur dalam evaluasi kinerja rumah sakit yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat penggunaan fasilitas, efektivitas pelayanan, serta ketersediaan sumber daya di rumah sakit. Beberapa indikator utama yang dipantau meliputi :

a. Pemanfaatan Tempat Tidur (Bed Occupation Rate /BOR)

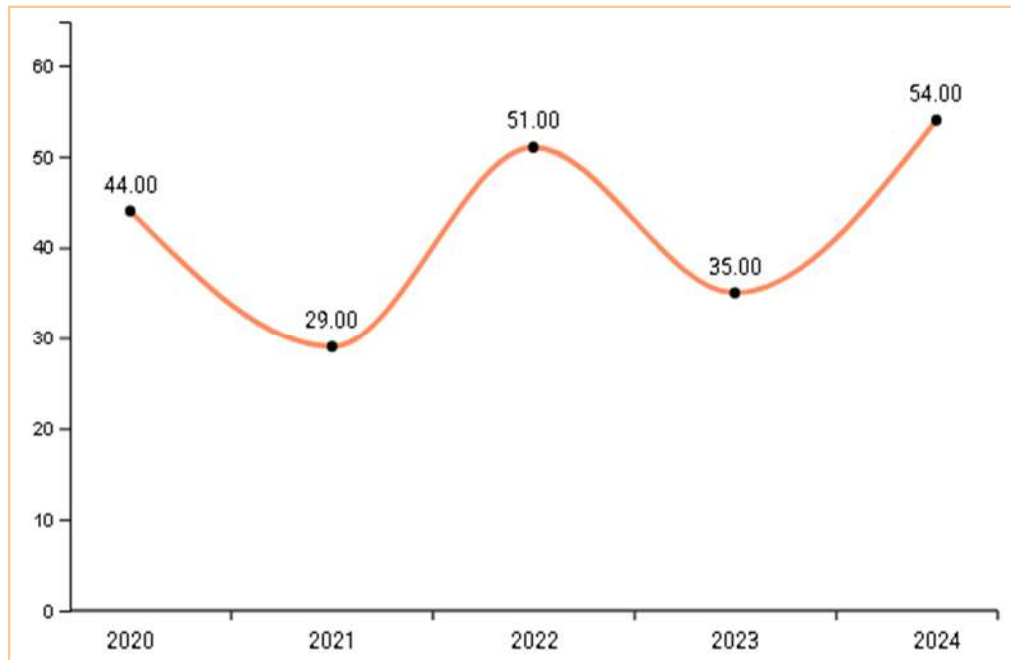
Bed Occupancy Rate (BOR) adalah indikator yang menunjukkan persentase pemakaian tempat tidur rumah sakit dalam suatu periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai kinerja serta tingkat pemanfaatan fasilitas rawat inap. Rentang BOR yang dianggap ideal adalah antara 60% hingga 80%. BOR yang terlalu rendah mengindikasikan rendahnya pemanfaatan layanan, sedangkan angka di atas 85% menunjukkan kebutuhan akan penambahan kapasitas tempat tidur.

Meskipun angka BOR tahun 2024 (54%) belum mencapai kisaran ideal, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam akses layanan kesehatan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rawat inap di rumah sakit. Hal ini menjadi sinyal positif dalam upaya peningkatan pemanfaatan fasilitas kesehatan di Provinsi Riau.

Untuk BOR Rumah Sakit di Provinsi Riau sejak TAHUN 2020-2024 dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



GAMBAR 2.20
BED OCCUPATION RATE (BOR) DI RUMAH SAKIT PROVINSI RIAU
TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

b. Angka Perputaran Tempat Tidur (Bed Turn Over/BTO)

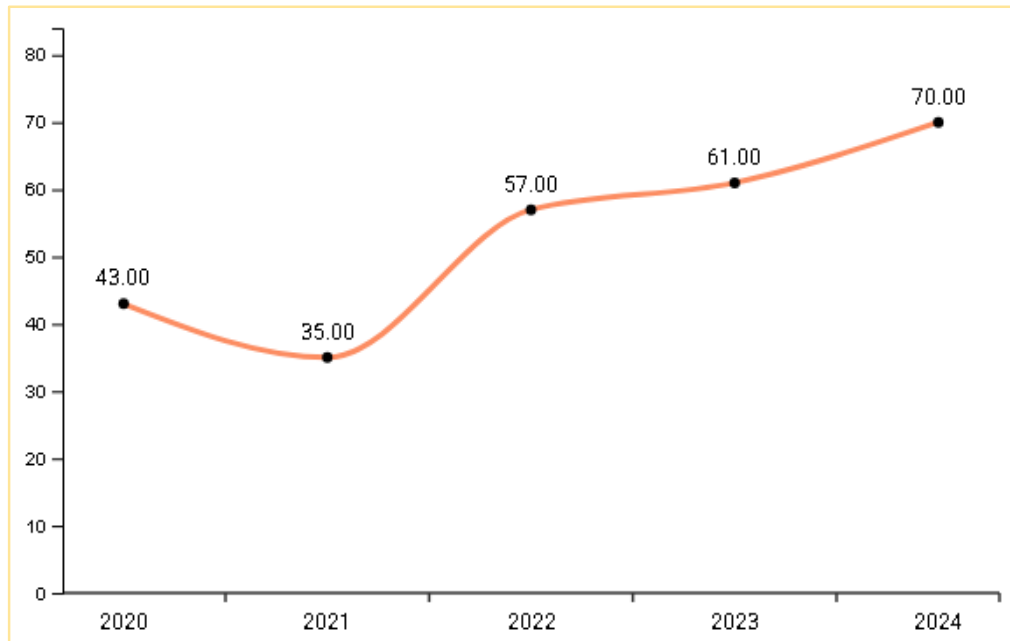
Bed Turn Over (BTO) adalah indikator yang menunjukkan frekuensi pemakaian tempat tidur rumah sakit dalam suatu periode, atau berapa kali rata-rata satu tempat tidur digunakan oleh pasien dalam satu tahun. Nilai ideal BTO adalah antara 40 hingga 50 kali per tahun, yang mencerminkan keseimbangan antara efisiensi pemanfaatan tempat tidur dan kestabilan alur pasien.

Berdasarkan data, angka BTO Rumah Sakit di Provinsi Riau menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir dimana tahun 2022 sebesar 57 kali, Tahun 2023 sebesar 61 kali dan tahun 2024 sebesar 69 kali. Peningkatan angka BTO ini menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan tempat tidur meningkat, yang bisa diartikan sebagai tingginya mobilitas pasien keluar-masuk rumah sakit.

Namun, angka BTO yang melebihi batas ideal dapat mengindikasikan beban kerja tinggi, waktu rawat inap yang lebih singkat, atau tingginya rotasi pasien, yang memerlukan perhatian agar tidak berdampak pada mutu pelayanan. Untuk gambaran lebih lengkap, tren BTO Rumah Sakit di Provinsi Riau sejak tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



GAMBAR 2.21
BED TURN OVER (BTO) DI RUMAH SAKIT PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024



Sumber : Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

c. Average Length of Stay (ALOS)

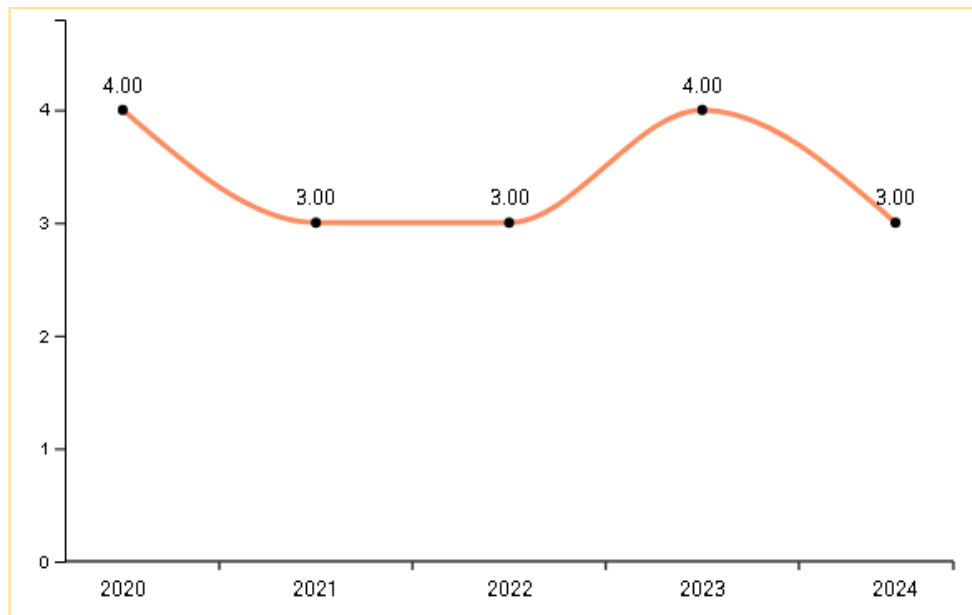
Average Length of Stay (ALOS) merupakan indikator yang menggambarkan rata-rata lama hari perawatan pasien rawat inap, dihitung dari total hari perawatan dibagi jumlah pasien keluar (baik hidup maupun meninggal). Nilai ALOS yang ideal berkisar antara 6 hingga 9 hari, yang mencerminkan efisiensi sekaligus kecukupan waktu perawatan pasien. Di Provinsi Riau, angka ALOS tahun 2024 adalah 3 hari, menurun dibandingkan tahun 2023 (4 hari). Sejak tahun 2019 - 2023 angka ini lebih rendah dari ALOS ideal.

Meskipun menunjukkan efisiensi dalam waktu perawatan, ALOS yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan bahwa pasien dirawat dalam waktu yang sangat singkat, yang berisiko terhadap efektivitas pengobatan dan kemungkinan rawat ulang.

Dengan demikian, meskipun efisien, angka ALOS yang masih di bawah standar ideal perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tetap optimal dan tidak mengorbankan kualitas perawatan. Gambaran jelas ALOS Rumah Sakit Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



GAMBAR 2.22
AVERAGE LENGTH OF STAY (ALOS) DI RUMAH SAKIT PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024



Sumber : Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

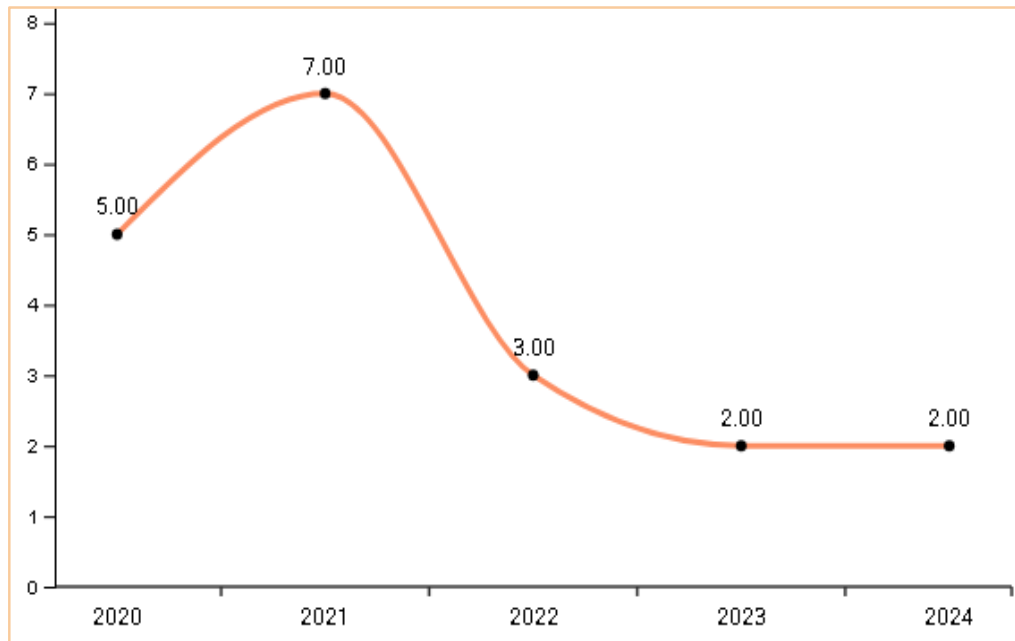
d. Turn Over Interval (TOI)

Turn Over Interval (TOI) adalah indikator yang mengukur rata-rata selang waktu tempat tidur kosong di rumah sakit, yaitu waktu antara pasien keluar (sembuh atau meninggal) dengan pasien berikutnya yang masuk. TOI mencerminkan efisiensi penggunaan tempat tidur. Semakin besar TOI, semakin rendah efisiensi pemanfaatan tempat tidur. Nilai TOI yang ideal adalah antara 1 hingga 3 hari. Di Provinsi Riau, rata-rata TOI menunjukkan kondisi yang stabil dan berada dalam batas ideal yakni 2 hari.

Sementara itu, data tahun 2018–2024 juga menunjukkan tren penurunan TOI dan konsisten berada pada kisaran ideal. Hal ini menggambarkan bahwa interval pemakaian tempat tidur di rumah sakit Provinsi Riau telah efisien, dengan waktu tunggu yang relatif singkat sebelum tempat tidur kembali digunakan oleh pasien berikutnya. Gambaran TOI di Provinsi Riau dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



GAMBAR 2.23
TURN OVER INTERVAL (TOI) DI RUMAH SAKIT PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024

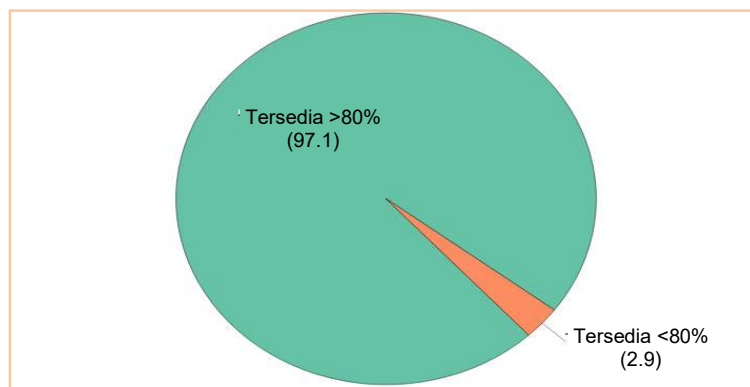


Sumber : Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

5. Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Vaksin dan Esensial

Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan terhadap seluruh puskesmas yang melaporkan data. Pemantauan ketersediaan di Puskesmas dilakukan terhadap 40 item obat indikator yang merupakan obat pendukung Program Kesehatan Ibu dan Anak, Program Gizi, Program TB Paru, Program Malaria, serta obat pelayanan kesehatan dasar esensial dan terdapat di dalam Formularium Nasional. Untuk Tahun 2024 gambaran Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial dapat dilihat grafik dibawah ini.

GAMBAR 2.24
PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT & VAKSIN ESENSIAL PROVINSI RIAU TAHUN 2024

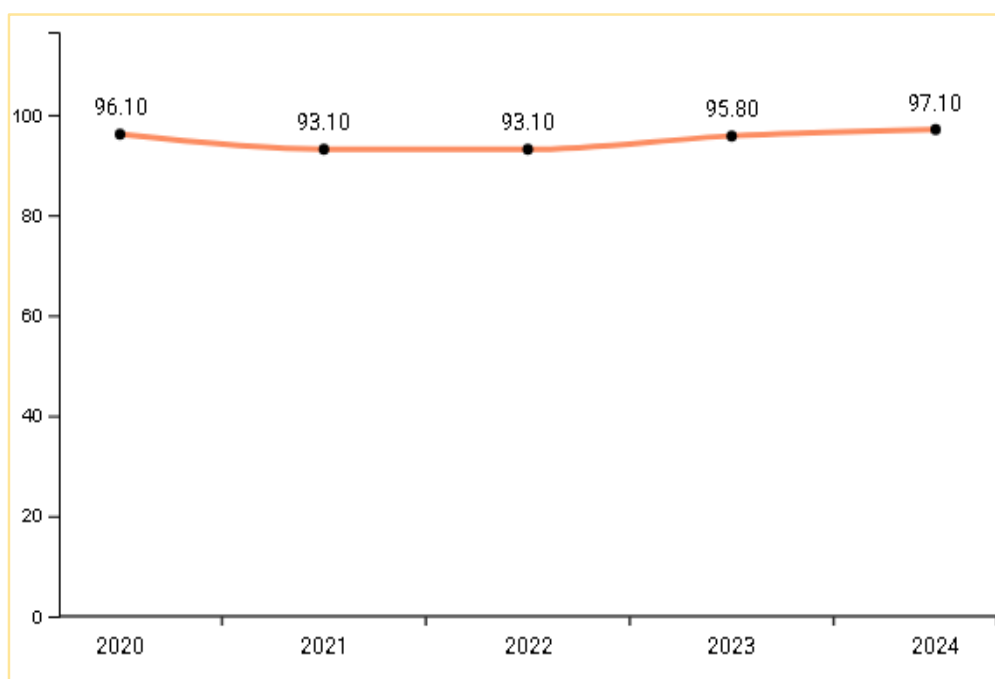


Sumber :UPT. Instalasi Farmasi Dan Logistik, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



Sedangkan persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial dalam 5 (lima) TAHUN 2020-2024 di atas 97,1% , ini artinya hampir semua Puskesmas memiliki ketersediaan obat dan vaksin esensial. Untuk gambar jelasnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

GAMBAR 2.25
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT & VAKSIN ESENSIAL PROVINSI RIAU
TAHUN 2020-2024



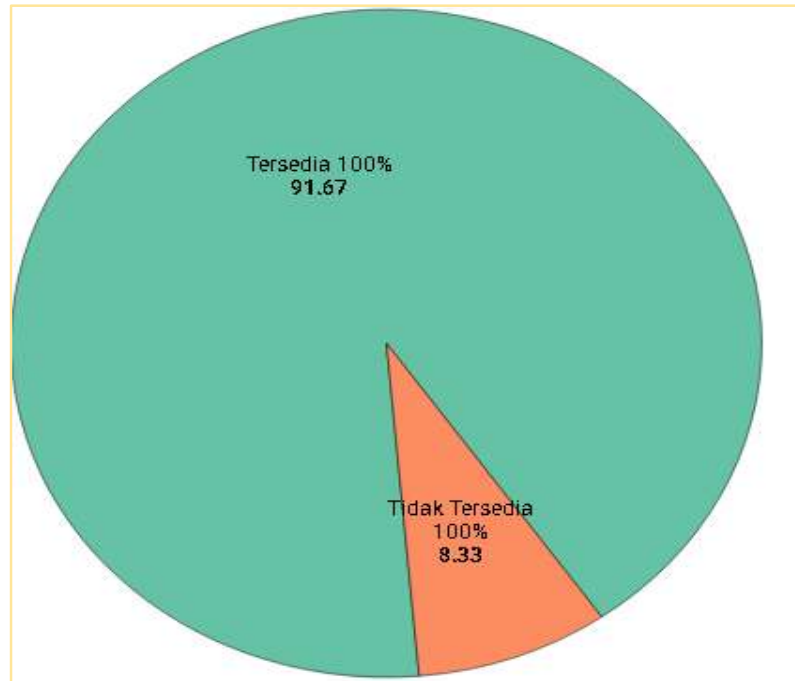
Sumber :UPT. Instalasi Farmasi Dan Logistik, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

6. Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Vaksin Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)

Persentase kabupaten/kota yang memiliki vaksin IDL terdiri dari Vaksin Hepatitis B, Vaksin BCG, Vaksin DPT-HB-HIB, Vaksin Polio, Vaksin Campak/Campak Rubella pada saat dilakukan pemantauan. Pemantauan ketersediaan di kabupaten/kota dilakukan terhadap 5 item vaksin indikator yang merupakan vaksin pendukung program imunisasi dasar. Persentase ketersediaan vaksin IDL tahun 2024 sebesar 91,7 menurun sedikit dibandingkan tahun 2023 ini sudah 100% dan tahun 2022 sebesar 98,3%. Ini artinya semua fasilitas kesehatan telah mendapat distribusi vaksin dengan lengkap untuk pelaksanaan vaksin ke balita di Provinsi Riau.



GAMBAR 2.26
PERSENTASE KETERSEDIAAN VAKSIN IDL DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : UPT. Instalasi Farmasi Dan Logistik, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

C . UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan kesehatan yang berbasis partisipasi aktif masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UKBM didefinisikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dan dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat, serta dapat difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa, dengan melibatkan sektor lain yang terkait.

UKBM bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kesehatannya melalui pendekatan gotong royong dan kebersamaan. Bentuk pelaksanaan UKBM di lapangan antara lain berupa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Poskesdes, Posbindu PTM, Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), dan Upaya Kesehatan Kerja (UKK). Pos pelayanan tersebut diselenggarakan oleh kader atau masyarakat setempat, dan difasilitasi oleh



tenaga kesehatan dari Puskesmas, serta mendapat dukungan teknis dan insentif dari pemerintah.

1. Posyandu

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan bagian dari Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 sebagai wujud pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui wadah pelayanan sosial dasar. Posyandu dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan oleh kader atau warga sendiri, dengan dukungan pembinaan teknis dan insentif dari Puskesmas serta Pemerintah Pusat, Daerah, atau Desa.

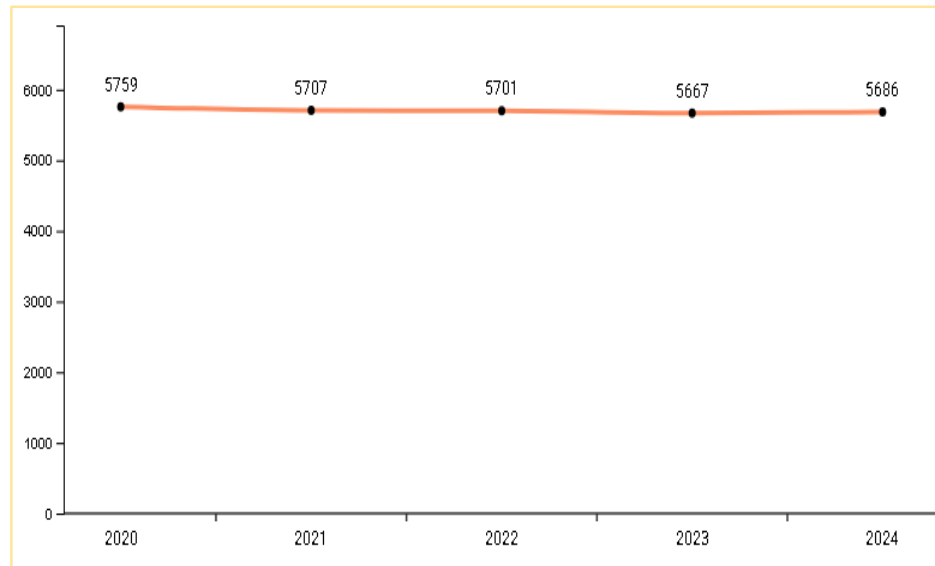
Posyandu menyelenggarakan berbagai kegiatan kesehatan dasar, seperti pelayanan ibu hamil, balita, imunisasi, gizi, serta penyuluhan kesehatan, dan berperan penting sebagai penggerak utama dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan promotif dan preventif di tingkat lapangan.

Pada tahun 2024, jumlah Posyandu tercatat sebanyak 5.686 unit, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 5.667 unit. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam penguatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, terutama dalam menjangkau kelompok ibu, bayi, balita, dan lansia di tingkat desa dan kelurahan.

Kecenderungan peningkatan jumlah Posyandu dalam dua tahun terakhir menjadi indikator positif atas komitmen pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Berikut gambaran jumlah Posyandu dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat di bawah ini.



GAMBAR 2.26
JUMLAH POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

2. Posyandu Aktif

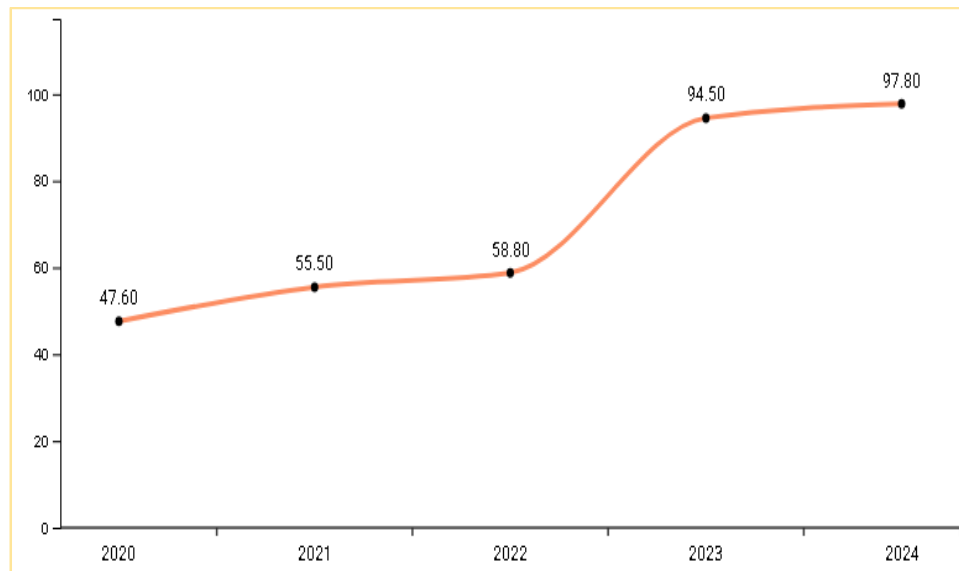
Posyandu aktif merupakan Pos Pelayanan Terpadu yang secara rutin melaksanakan kegiatan bulanan minimal satu kali, mencakup layanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, gizi, serta penyuluhan. Keberadaan Posyandu aktif menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

Pada tahun 2024, tingkat Posyandu aktif di Provinsi Riau mencapai 97,8%, meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 94,5%. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam penggerakan kegiatan Posyandu di berbagai wilayah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelayanan kesehatan dasar berbasis komunitas.

Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 127 unit Posyandu yang belum aktif. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk terus menggerakkan peran serta masyarakat. Diperlukan dukungan lintas sektor, baik dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, maupun lembaga swadaya masyarakat, guna mengoptimalkan fungsi Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan promotif dan preventif di tingkat desa dan kelurahan. Gambaran Posyandu aktif yang dimiliki oleh Provinsi Riau selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak TAHUN 2020-2024 dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



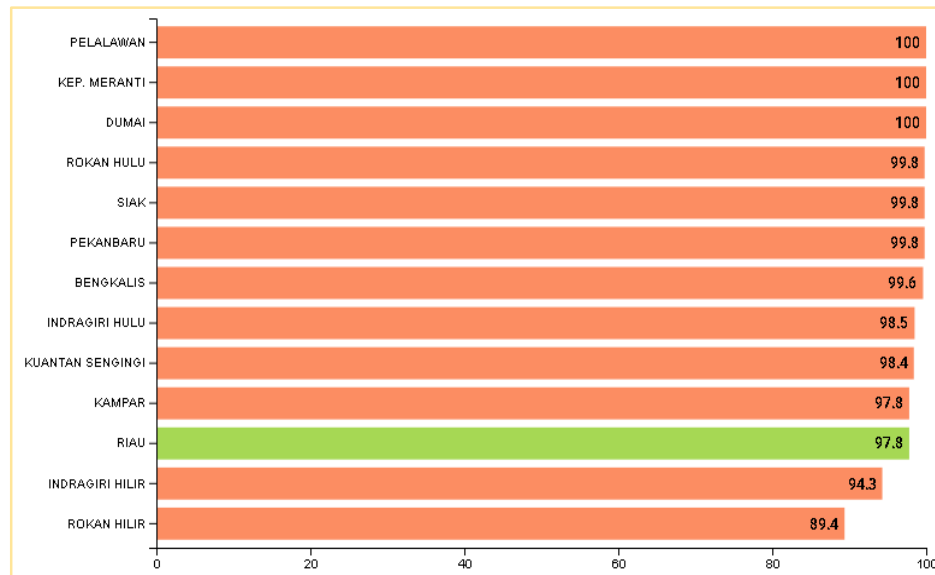
GAMBAR 2.27
PERSENTASE POSYANDU AKTIF PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Sedangkan posyandu aktif menurut kabupaten/kota di Provinsi Riau pada tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

GAMBAR 2.28
PERSENTASE POSYANDU AKTIF MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota yang semua posyandunya telah aktif capaian 100% ada 3 kabupaten/kota yakni Kabupaten Kep. Meranti, Pelalawan, Kota Dumai. Diikuti oleh Kota Pekanbaru sebesar 99,8% dan kabupaten Bengkalis sebesar 99,6%.



3. Rasio Posyandu Per 100 Balita

Rasio Posyandu per 100 balita merupakan salah satu indikator penting dalam menilai ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar bagi kelompok usia balita. Indikator ini menggambarkan jumlah Posyandu yang tersedia untuk setiap 100 balita, sehingga dapat mencerminkan kemampuan sistem kesehatan dalam menjangkau dan melayani kebutuhan dasar anak usia dini.

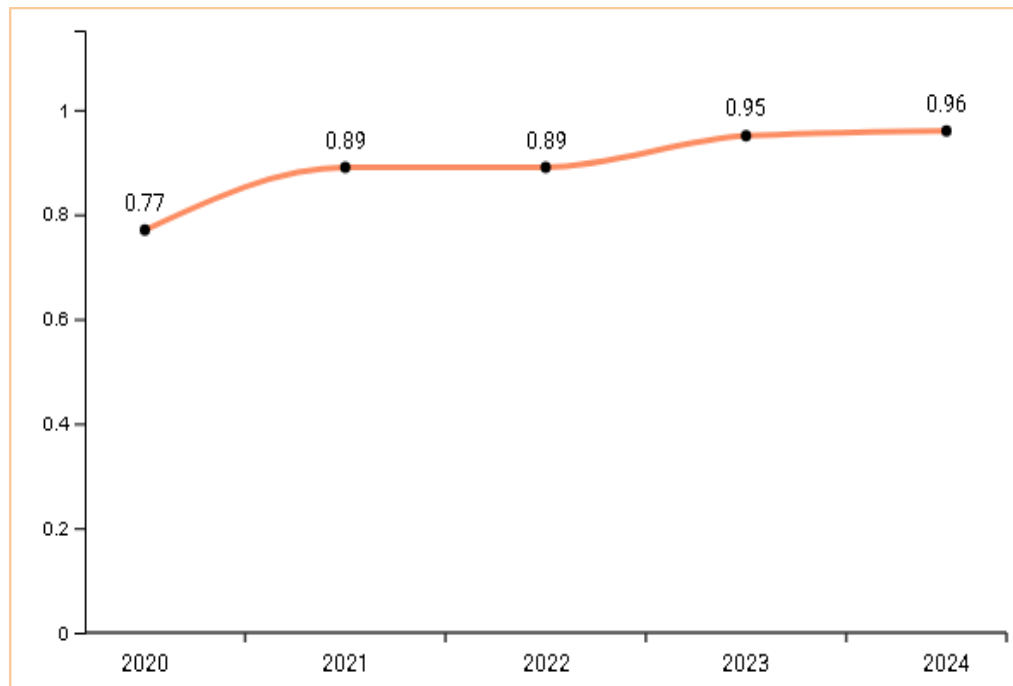
Selama periode lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024, rasio Posyandu per 100 balita di Provinsi Riau menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 0,77 dan meningkat menjadi 0,89 pada tahun 2021. Rasio ini tetap stabil pada angka 0,89 di tahun 2022. Selanjutnya, terjadi peningkatan pada tahun 2023 menjadi 0,95, dan mencapai 0,96 pada tahun 2024.

Meskipun terjadi peningkatan rasio dari tahun ke tahun, capaian tahun 2024 menunjukkan bahwa rasio Posyandu per 100 balita masih berada di bawah angka ideal, yaitu 1. Artinya, secara rata-rata, satu Posyandu di Provinsi Riau masih melayani lebih dari 100 balita. Kondisi ini mengindikasikan bahwa jumlah Posyandu yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh balita di wilayah ini.

Tren peningkatan rasio Posyandu selama lima tahun terakhir mencerminkan adanya upaya yang cukup signifikan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam memperluas cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui Posyandu. Namun demikian, untuk mencapai rasio ideal dan meningkatkan kualitas pelayanan, diperlukan langkah strategis yang berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan jumlah dan pemerataan Posyandu, penguatan kapasitas kader Posyandu, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta dukungan dari lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Untuk melihat gambaran rasio posyandu per 100 balita selama 5 (lima) tahun terakhir 2020 – 2024 dapat dilihat dari gambar dibawah.



GAMBAR 2.29
RASIO POSYANDU PER 100 BALITA PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025





BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

KESEHATAN



PROFIL KESEHATAN PROVINSI RIAU 2024



BAB III SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Ketersediaan sumber daya kesehatan merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Sumber daya kesehatan yang memadai diharapkan dapat meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan, serta berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sumber daya kesehatan mencakup seluruh aspek yang digunakan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, meliputi: tenaga kesehatan, pendanaan, sediaan farmasi, alat kesehatan, teknologi kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dimanfaatkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam mendukung terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peran ini penting untuk mendorong kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam menjalani hidup sehat, yang pada akhirnya akan meningkatkan derajat kesehatan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.

Tenaga kesehatan merupakan bagian dari kelompok sumber daya manusia kesehatan, yang dalam UU ini terdiri dari:

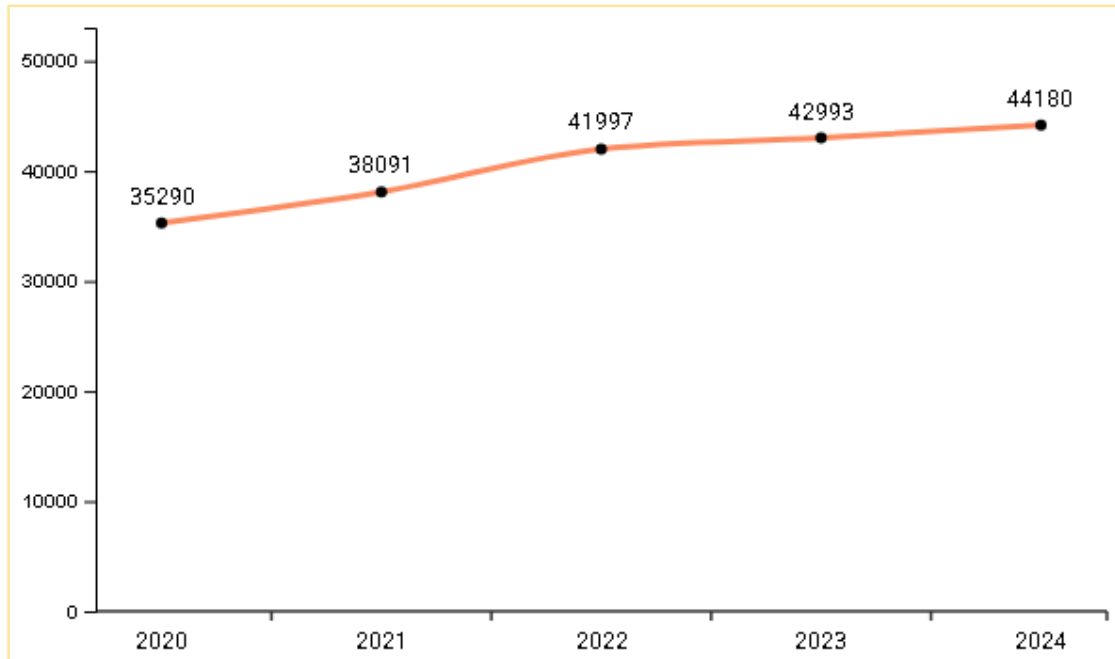
- Tenaga Medis
(dokter, dokter gigi, dokter spesialis, subspesialis)
- Tenaga Kesehatan lainnya
(perawat, bidan, tenaga farmasi, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, rehabilitasi, dan sebagainya)
- Tenaga Pendukung Kesehatan
(tenaga non-medis yang mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan)

Ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan yang merata dan sesuai dengan kebutuhan wilayah menjadi faktor kunci dalam pemerataan pelayanan kesehatan, terutama di daerah dengan akses terbatas. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan tenaga kesehatan, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal terkait UU No. 17 Tahun 2023.



Data jumlah tenaga kesehatan diperlukan untuk mengetahui ketersediaan dan kekurangan tenaga kesehatan. Dan jumlah keseluruhan tenaga kesehatan yang tersebar di Puskesmas dan Rumah Sakit di Provinsi Riau selama 5 (Lima) tahun terus mengalami peningkatan, dapat dilihat dari jumlah tenaga kesehatan TAHUN 2020-2024.

GAMBAR 3.1
JUMLAH TENAGA KESEHATAN PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024

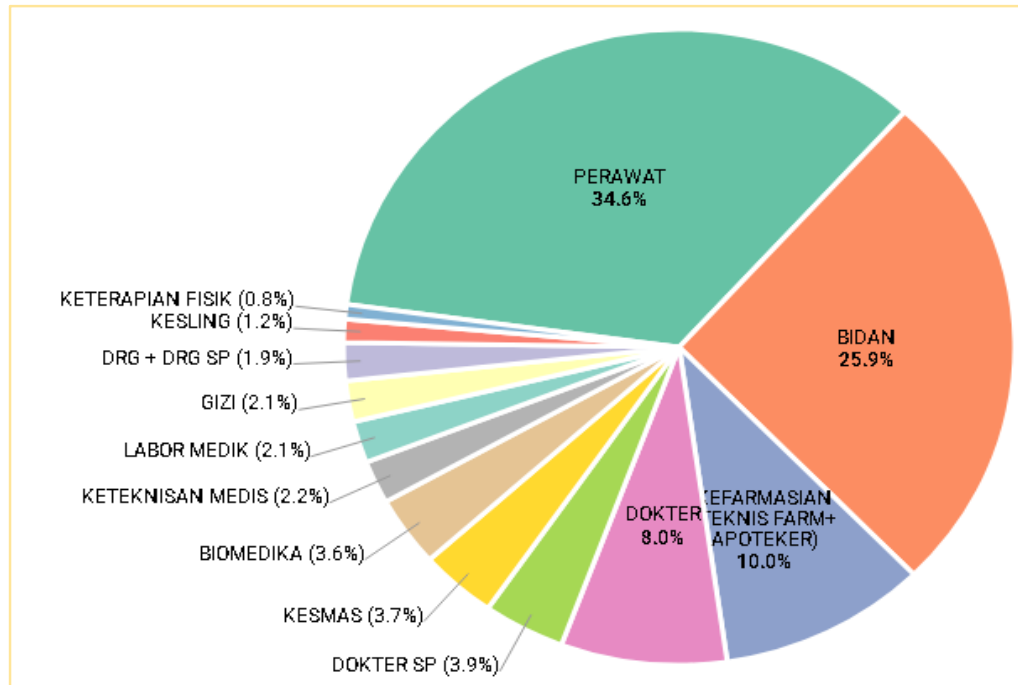


Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Tenaga kesehatan terbanyak di Provinsi Riau saat ini adalah tenaga keperawatan sebesar 28,6% dan jumlah kebidanan sebesar 22,5% dan tenaga penunjang/pendukung kesehatan sebesar 15%. Sedangkan tenaga yang paling sedikit adalah tenaga kesehatan lingkungan 1 %, tenaga gizi 1,7% dan tenaga dokter gigi /drg spesialis sebesar 2,6%. Untuk gambaran jelasnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



GAMBAR 3.2
PERSENTASE TENAGA KESEHATAN PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Berdasarkan data jumlah tenaga kesehatan yang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dan estimasi jumlah penduduk, dapat disusun rasio tenaga kesehatan di Provinsi Riau. Jumlah tenaga kesehatan yang digunakan adalah jumlah tenaga kesehatan yang bekerja sesuai dengan fungsinya.

Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai indikator untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan guna mencapai target pembangunan kesehatan tertentu. Untuk target rasio tenaga kesehatan di Provinsi Riau Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025.

A. JUMLAH DAN RASIO TENAGA MEDIS (DOKTER UMUM, SPESIALIS, DOKTER GIGI) DI SARANA KESEHATAN

1. Rasio Dokter Spesialis

Rasio tenaga dokter spesialis di Provinsi Riau menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, rasio dokter spesialis mencapai 23 per 100.000 penduduk, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2023 yang

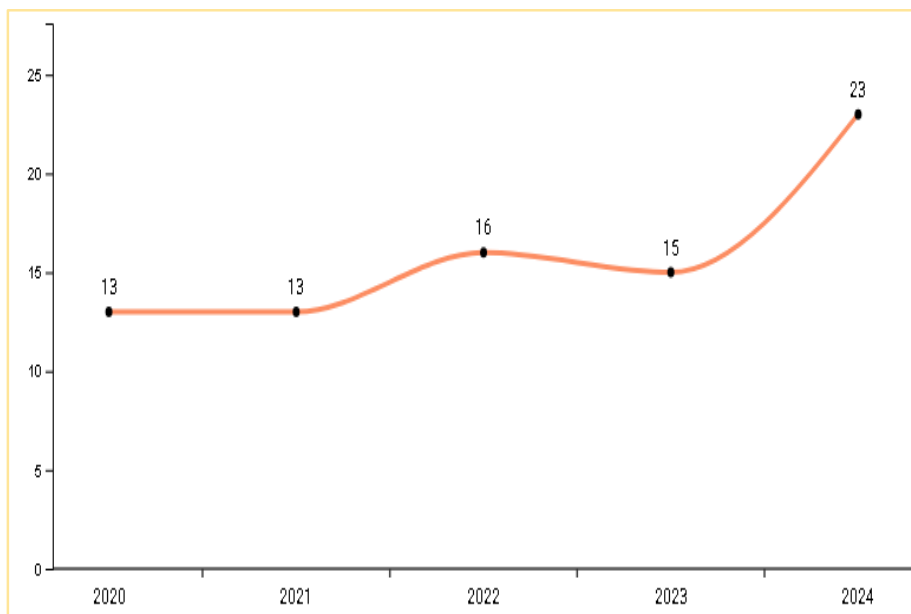


sebesar 15,4 per 100.000 penduduk dan tahun 2022 sebesar 16 per 100.000 penduduk.

Jika dibandingkan dengan target nasional, rasio ideal untuk tenaga dokter spesialis adalah 12 per 100.000 penduduk pada tahun 2025. Dengan capaian 22,1 per 100.000 penduduk di tahun 2024. Provinsi Riau tidak hanya telah memenuhi, namun melampaui target nasional tersebut jauh lebih awal dari tenggat waktu yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi kuantitas, ketersediaan dokter spesialis di Riau relatif memadai untuk mendukung pelayanan kesehatan rujukan dan spesialistik.

Untuk gambaran rasio dokter spesialis di Provinsi Riau tahun dalam lima tahun (2020 -2024) dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

GAMBAR 3.3
RASIO DOKTER SPESIALIS PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Meskipun secara agregat Provinsi Riau telah melampaui target nasional dalam hal rasio dokter spesialis, distribusi tenaga spesialis di tingkat kabupaten/kota masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Pada tahun 2024, terdapat 67% atau 8 dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau yang telah mencapai atau melampaui target nasional rasio dokter spesialis, yaitu 12 dokter spesialis per 100.000 penduduk.

Kota Pekanbaru mencatat rasio tertinggi dengan 69 dokter spesialis per 100.000 penduduk, mencerminkan konsentrasi fasilitas pelayanan kesehatan

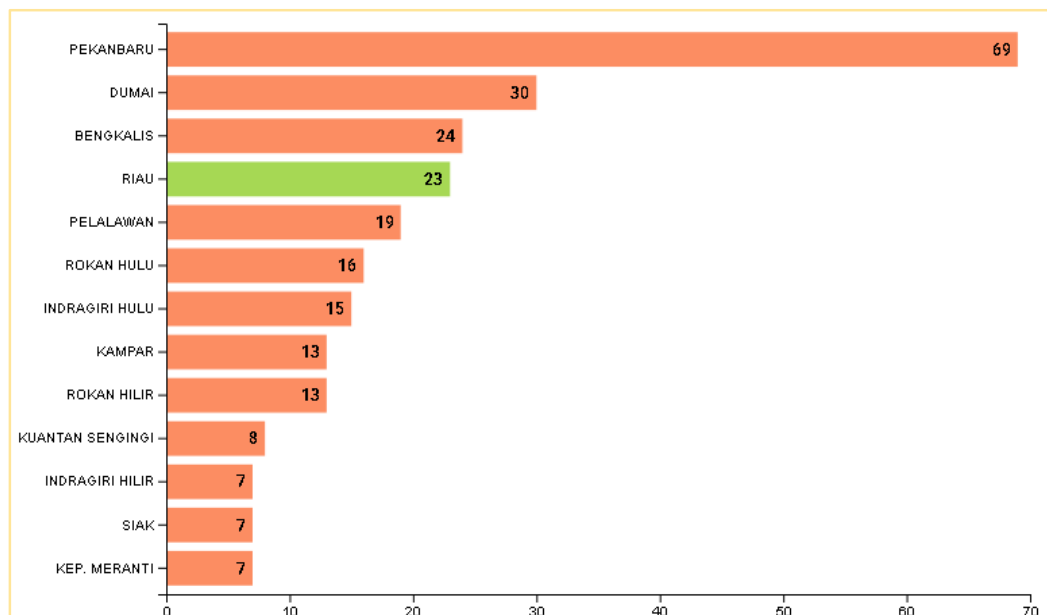


rujukan, rumah sakit besar, dan tenaga medis di ibu kota provinsi tersebut. Disusul oleh Kota Dumai dengan rasio 30 per 100.000 penduduk dan Kabupaten Bengkalis berada di posisi ketiga dengan rasio 24 per 100.000 penduduk.

Tingginya rasio di ke 3 (tiga) wilayah tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan dokter spesialis lebih banyak terfokus di kawasan perkotaan dan pusat-pusat pelayanan kesehatan sekunder dan tersier. Sedangkan terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yang belum mencapai target rasio nasional, yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti, masing-masing dengan rasio 7 dokter spesialis per 100.000 penduduk. Diikuti Kabupaten Kuantan Singingi dengan rasio 8 per 100.000 penduduk.

Wilayah-wilayah ini umumnya merupakan daerah dengan sebaran penduduk yang lebih luas, aksesibilitas terbatas, serta fasilitas kesehatan tingkat rujukan yang masih terbatas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam akses pelayanan kesehatan spesialisik bagi masyarakat di daerah tersebut. Gambaran penyebaran dokter spesialis di kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2024 dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

GAMBAR 3.4
RASIO DOKTER SPESIALIS PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



2. Rasio Dokter umum

Rasio dokter umum terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai indikator untuk mengukur ketersediaan tenaga dokter umum untuk mencapai target pembangunan kesehatan pada tahun tertentu. Secara umum, rasio dokter umum di Provinsi Riau TAHUN 2020-2024 mengalami tren peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023. Pada tahun 2020 -2022 terjadi peningkatan bertahap dari 30 menjadi 41 dokter per 100.000 penduduk. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi atau penambahan tenaga dokter umum.

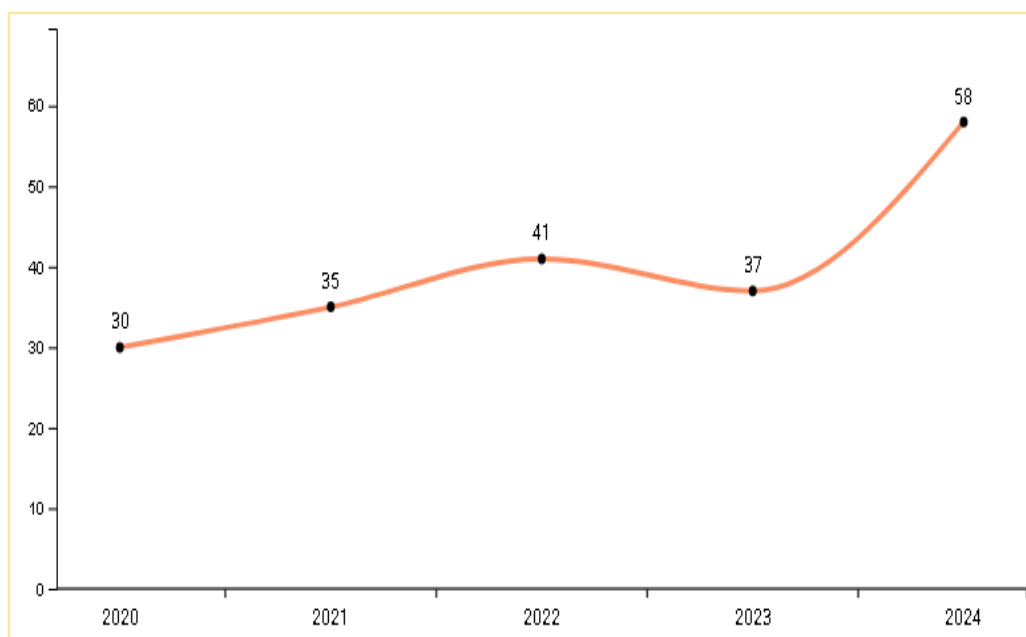
Sedangkan pada tahun 2023 rasio dokter umum menurun ke angka 37, setelah sempat mencapai 41 per 100.000 penduduk pada tahun sebelumnya. Penurunan di tahun 2023 menunjukkan bahwa sistem distribusi tenaga kesehatan belum sepenuhnya stabil. Diperlukan kebijakan berkelanjutan agar tidak hanya mengejar jumlah, tapi juga menjaga pemerataan dan kontinuitas pelayanan.

Dan tahun 2024 terjadi lonjakan tajam ke angka 59 dokter per 100.000 penduduk, peningkatan sebesar 59,5% dibanding tahun 2023. Ini merupakan capaian yang melampaui target nasional 2025 (50 dokter per 100.000 penduduk). Peningkatan rasio tahun 2024 secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan lebih tertibnya pencatatan dan pelaporan data tenaga kesehatan.

Gambaran jelasnya ketersediaan dokter umum di Provinsi Riau pada TAHUN 2020-2024 dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



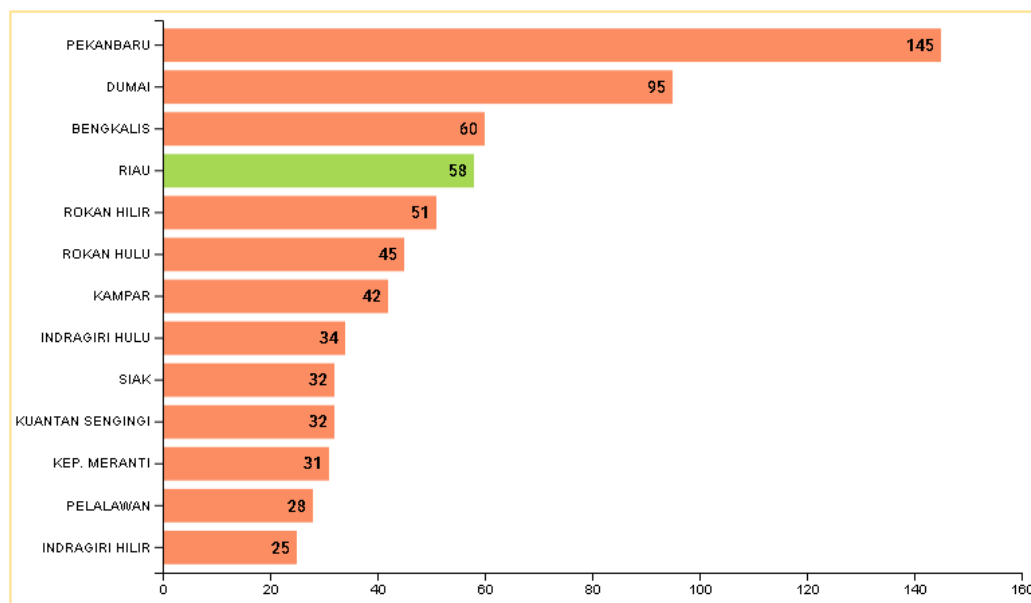
GAMBAR 3.5
RASIO DOKTER UMUM PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Namun bila dilihat dari penempatan dokter umum di kabupaten/kota, , terdapat ketimpangan yang sangat mencolok. Gambaran lebih jelasnya rasio dokter umum di Provinsi Riau dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

GAMBAR 3.6
RASIO DOKTER UMUM PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



Dari grafik diatas terlihat rasio tenaga dokter umum di Provinsi Riau menunjukkan perkembangan yang positif di beberapa wilayah, meskipun secara keseluruhan masih belum merata. Kota Pekanbaru memiliki rasio tertinggi sebesar 145/100.000 penduduk, disusul oleh Kota Dumai (95 per 100.000) dan Kabupaten Bengkalis (60 per 100.000), rasio ini jauh melampaui target nasional 50/100.000.

Sebaliknya, beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Kampar, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti masih berada di bawah ambang batas nasional, yakni 50 per 100.000 penduduk. Kondisi ini menggambarkan ketimpangan distribusi yang sangat tajam, kota-kota besar seperti Pekanbaru dan Dumai menarik lebih banyak dokter kemungkinan karena :

- Fasilitas kesehatan yang lebih lengkap
- Kerja dan penghidupan yang lebih baik
- Akses terhadap pelatihan lanjutan dan rumah sakit pendidikan

Sebanyak 67% atau 8 (delapan) kabupaten/kota belum mencapai target tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi strategis dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, baik dalam bentuk redistribusi tenaga medis, penyediaan insentif di wilayah kurang diminati, serta penguatan infrastruktur layanan kesehatan. Kesenjangan ini harus segera diatasi guna menjamin akses pelayanan kesehatan dasar yang adil dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

3. Rasio Dokter Gigi

Rasio tenaga dokter gigi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi masyarakat. Kementerian Kesehatan menetapkan target nasional rasio ideal dokter gigi sebesar 17 per 100.000 penduduk untuk menjamin pelayanan kesehatan gigi yang optimal dan merata.

Selama empat tahun berturut-turut, dari tahun 2020 hingga 2023, Provinsi Riau belum mampu memenuhi target nasional. Rasio dokter gigi stagnan pada angka 8 hingga 9 per 100.000 penduduk, yang berarti bahwa setiap 100.000 penduduk hanya dilayani oleh kurang dari 10 dokter gigi. Angka ini menunjukkan keterbatasan signifikan dalam kapasitas sistem kesehatan gigi untuk menjangkau seluruh populasi, terutama di daerah terpencil atau dengan keterbatasan akses.

Tahun 2024 menjadi tonggak penting, di mana rasio dokter gigi mencapai angka 17 per 100.000 penduduk, sesuai dengan target nasional. Capaian ini patut

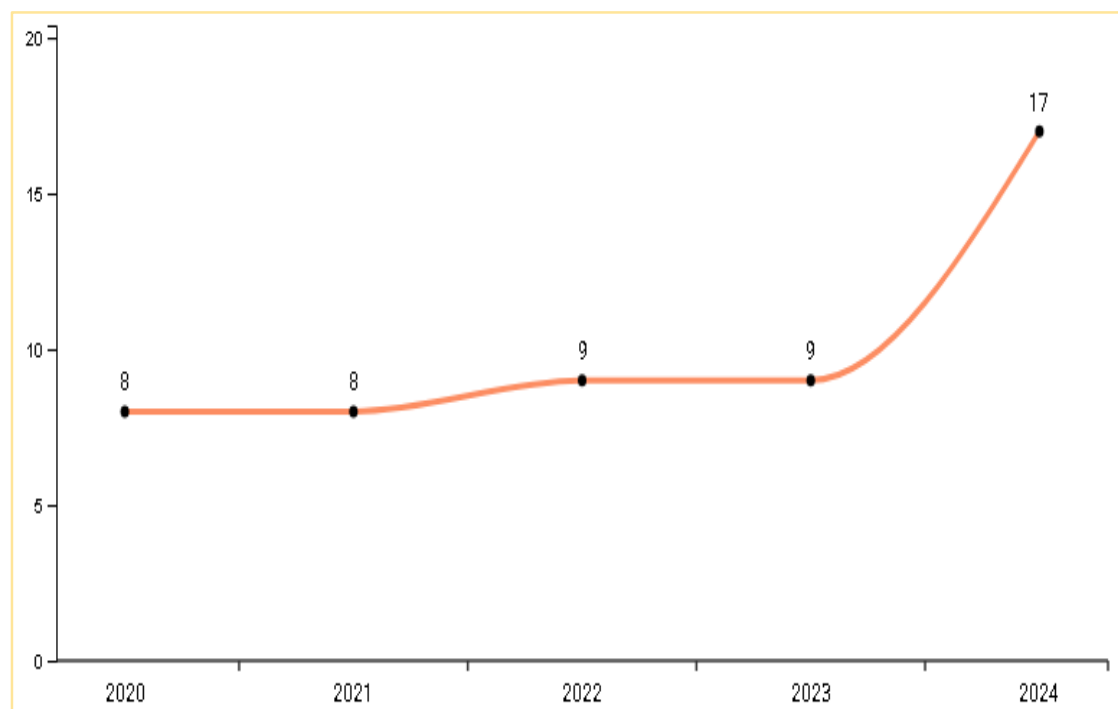


diapresiasi sebagai bentuk keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan gigi. Namun, peningkatan tajam dari rasio 9 pada tahun 2023 menjadi 17 pada tahun 2024 menimbulkan sejumlah catatan kritis yang perlu dicermati lebih lanjut.

Kenaikan rasio secara agregat belum tentu mencerminkan pemerataan distribusi dokter gigi di seluruh kabupaten/kota. Besar kemungkinan peningkatan konsentrasi tenaga hanya terjadi di wilayah perkotaan, sementara daerah perbatasan, kepulauan, dan terpencil masih mengalami defisit tenaga kesehatan.

Gambaran rasio dokter gigi per 100.000 penduduk di Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

GAMBAR 3.7
RASIO DOKTER GIGI PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Meskipun secara agregat Provinsi Riau pada tahun 2024 telah mencapai target nasional rasio dokter gigi sebesar 17 per 100.000 penduduk, namun distribusi tenaga dokter gigi antar kabupaten/kota masih belum merata. Ketimpangan ini terlihat jelas dari perbedaan rasio dokter gigi yang cukup signifikan di tingkat kabupaten/kota.



Kota Pekanbaru mencatatkan rasio tertinggi, yaitu 55 per 100.000 penduduk pada tahun 2024, meningkat tajam dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 21 per 100.000 penduduk. Hal ini menunjukkan konsentrasi tenaga dokter gigi yang sangat tinggi di ibu kota provinsi. Disusul oleh Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kampar, masing-masing dengan rasio 16 per 100.000 penduduk, mendekati target nasional.

Sebaliknya, beberapa daerah tercatat masih memiliki rasio yang sangat rendah. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki rasio terendah, yaitu 6 per 100.000 penduduk, diikuti oleh Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti, masing-masing hanya mencapai 7 per 100.000 penduduk. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan signifikan dalam akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut, khususnya di wilayah-wilayah dengan infrastruktur dan daya tarik tenaga kesehatan yang terbatas.

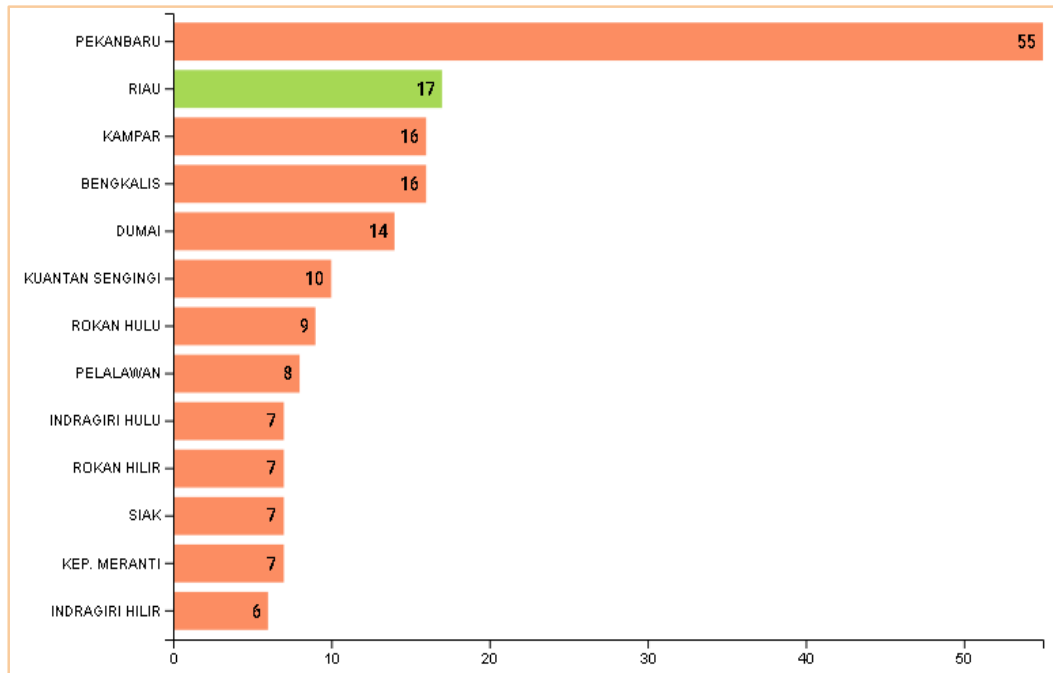
Dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, baru empat daerah yang telah mencapai atau melampaui target rasio dokter gigi nasional sebesar 14 per 100.000 penduduk, yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kota Dumai. Ini artinya, 8 (delapan) Kabupaten/Kota lainnya masih berada di bawah standar, yang menunjukkan tantangan besar dalam hal perencanaan, distribusi, dan retensi tenaga dokter gigi, khususnya di daerah non-perkotaan.

Kondisi ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengingat keberadaan tenaga dokter gigi yang merata sangat berpengaruh terhadap cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan gigi masyarakat, termasuk program promotif, preventif, dan kuratif di tingkat Puskesmas maupun Rumah Sakit.

Untuk rasio dokter gigi terhadap per 100.000 penduduk menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2024 terlihat pada gambar dibawah ini.



GAMBAR 3.8
RASIO DOKTER GIGI PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

B. JUMLAH DAN RASIO TENAGA KEPERAWATAN (BIDAN DAN PERAWAT) DI SARANA KESEHATAN

1. Rasio Tenaga Perawat

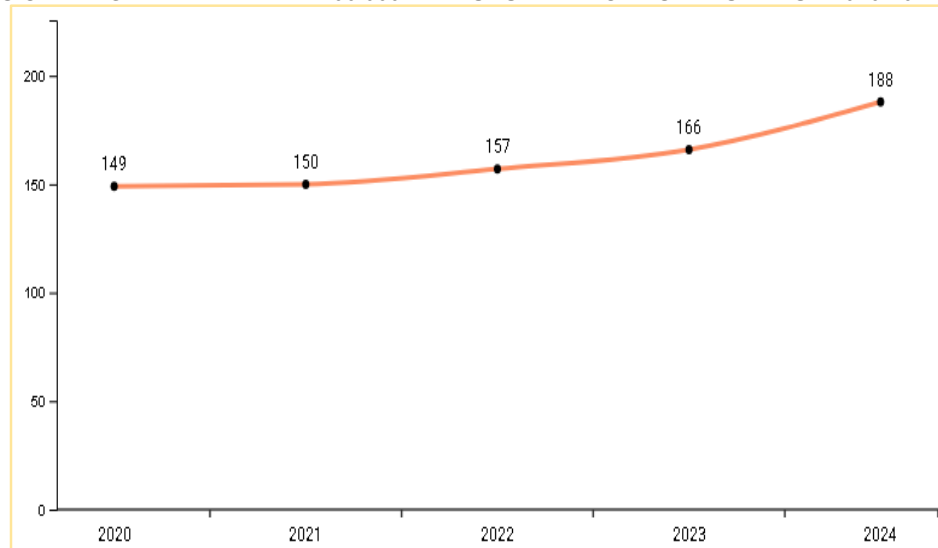
Rasio tenaga perawat di Provinsi Riau menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, rasio tenaga perawat tercatat sebesar 188 per 100.000 penduduk, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun capaian tersebut masih belum mencapai target nasional yang ditetapkan, yaitu 200 per 100.000 penduduk. Dengan kata lain, Provinsi Riau masih mengalami kekurangan tenaga perawat untuk dapat secara optimal melayani kebutuhan kesehatan masyarakat

Meskipun secara angka absolut terjadi peningkatan rasio tenaga perawat, namun laju pertumbuhan jumlah perawat belum sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini menandakan bahwa ketersediaan perawat per individu belum mengalami perbaikan yang signifikan secara fungsional, terutama di wilayah-wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Untuk melihat gambaran rasio perawat 100.000



penduduk di Provinsi Riau pada tahun 2020-2024 dapat dilihat dari gambar berikut ini.

GAMBAR 3.9
RASIO TENAGA PERAWAT PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

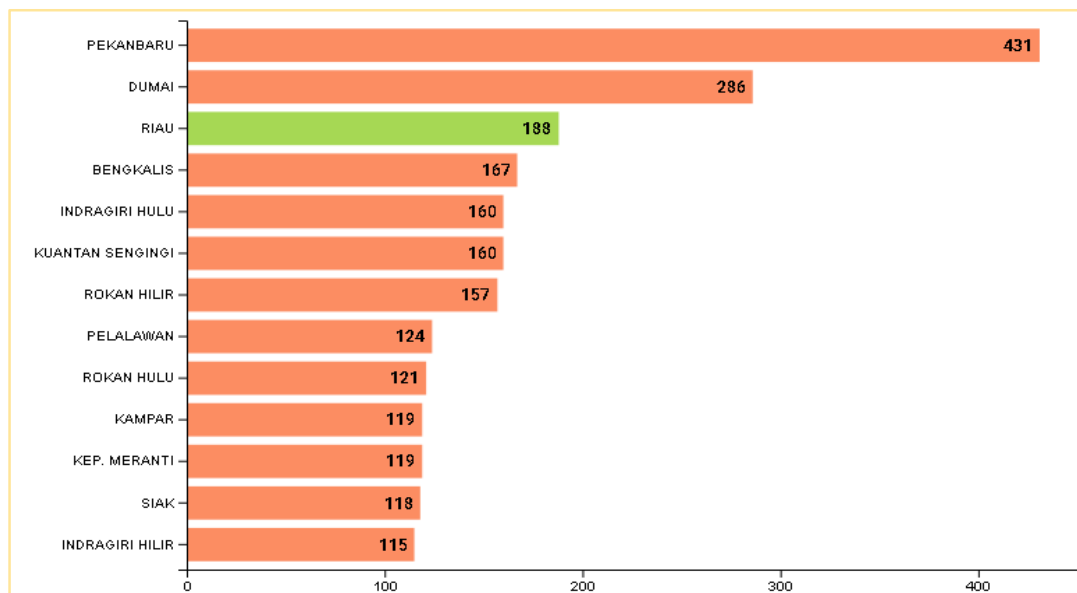
Penyebaran tenaga perawat di Kabupaten/Kota Provinsi Riau belum merata. Ketimpangan ini menjadi salah satu isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius, karena secara langsung berdampak pada akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di daerah. Kota Pekanbaru sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan kesehatan tercatat menyerap sekitar 35% dari total tenaga perawat di Provinsi Riau, dengan rasio mencapai 431 per 100.000 penduduk pada tahun 2024, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 397 per 100.000 penduduk. Kondisi ini menempatkan Pekanbaru jauh di atas target nasional, yakni 200 per 100.000 penduduk, dan mencerminkan konsentrasi tenaga kesehatan yang tinggi di wilayah perkotaan.

Selain Pekanbaru, Kota Dumai juga telah melampaui target rasio ideal dengan capaian 286 per 100.000 penduduk dan telah memenuhi standar kebutuhan pelayanan kesehatan. Sebaliknya, sejumlah kabupaten masih menghadapi keterbatasan serius dalam hal ketersediaan tenaga perawat. Kabupaten Indragiri Hilir mencatatkan rasio terendah, yaitu 115 per 100.000 penduduk, diikuti Kabupaten Siak (118 per 100.000 penduduk) dan Kabupaten Kampar, Kabupaten Kep Meranti masing-masing 119 per 100.000 penduduk



Rendahnya rasio ini mencerminkan terbatasnya daya dukung SDM kesehatan di daerah tersebut dan berisiko tinggi terhadap ketimpangan pelayanan kesehatan dasar. Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan jumlah tenaga perawat secara keseluruhan belum dibarengi dengan pemerataan distribusi antar wilayah, terutama ke daerah yang memiliki tantangan geografis, kepadatan penduduk tinggi, atau keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk penyebaran tenaga perawat di Provinsi Riau tahun 2024 dapat di lihat pada gambar diatas.

GAMBAR 3.10
RASIO TENAGA PERAWAT PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

2. Rasio Tenaga Bidan

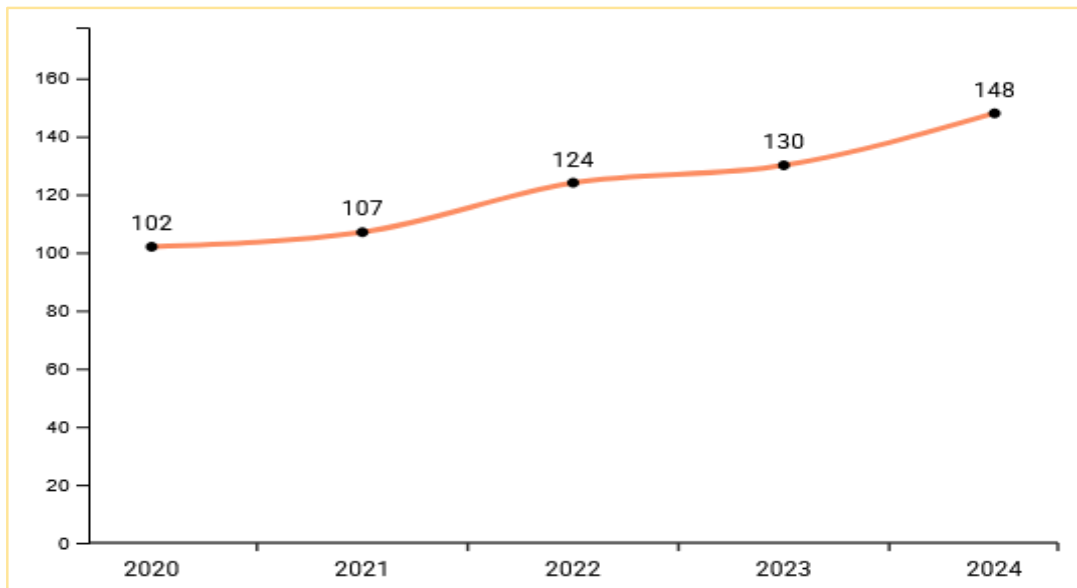
Tenaga bidan merupakan salah satu komponen tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak serta upaya promotif dan preventif di masyarakat. Rasio tenaga bidan di Provinsi Riau menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, rasio bidan mencapai 131 per 100.000 penduduk, yang berarti telah melampaui target nasional sebesar 130 per 100.000 penduduk.

Tenaga Bidan di Provinsi Riau pada tahun 2024 dengan rasio 148 per 100.000 penduduk meningkat dibandingkan tahun 2023 (130 per 100.000 penduduk) dan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan adanya



komitmen dan upaya nyata dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya tenaga bidan di berbagai wilayah di Provinsi Riau. Keberhasilan melampaui target nasional menjadi indikator positif dalam mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama dalam bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak, yang merupakan salah satu prioritas utama dalam sistem pelayanan kesehatan dasar. Gambaran rasio tenaga bidan per 100.000 penduduk Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 dibawah ini.

GAMBAR 3.11
RASIO TENAGA BIDAN PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dari 12 (dua belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, sebanyak 9 (sembilan) wilayah atau sekitar 75% telah mencapai target rasio tersebut. Beberapa wilayah bahkan memiliki rasio yang jauh melebihi target nasional, seperti Kota Dumai (225 per 100.000 penduduk), Kabupaten Rokan Hilir (200 per 100.000 penduduk), dan Kuantan Singingi (179 per 100.000 penduduk). Hal ini menunjukkan adanya surplus tenaga bidan di beberapa wilayah.

Namun demikian, masih terdapat 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang belum memenuhi target rasio bidan, yaitu:

- Kota Pekanbaru dengan rasio 108 bidan per 100.000 penduduk
- Kabupaten Siak dengan rasio 119 per 100.000 penduduk
- Kabupaten Kepulauan Meranti dengan rasio 129 per 100.000 penduduk.



Kota Pekanbaru menjadi perhatian utama karena merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Riau, namun memiliki rasio tenaga bidan yang paling rendah. Kondisi ini berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar, terutama pelayanan kebidanan dan kesehatan ibu-anak yang sangat dibutuhkan di daerah padat penduduk.

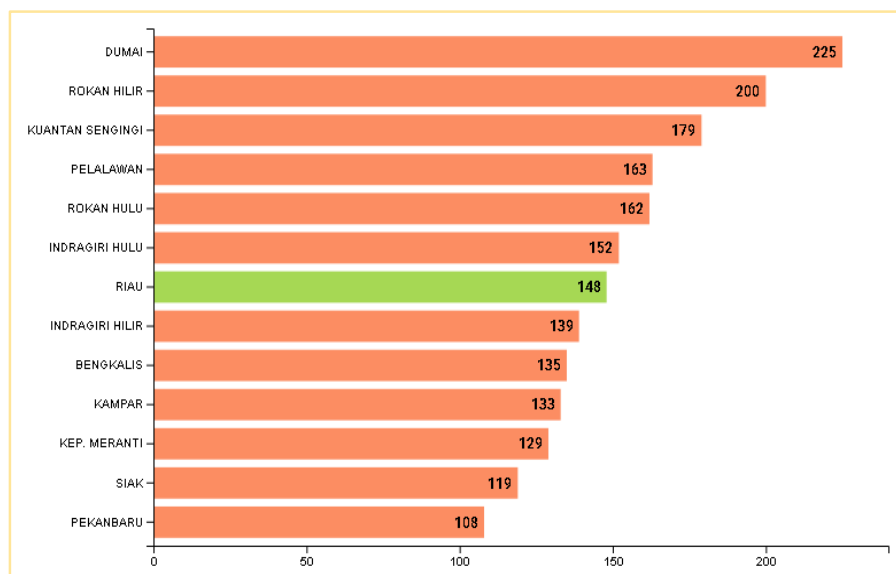
Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Meranti hanya kurang satu poin dari target rasio, dan Kabupaten Siak juga berada cukup dekat dengan target, sehingga peningkatan jumlah tenaga bidan dalam jumlah kecil sudah dapat membantu mencapai standar yang ditetapkan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga bidan antara lain:

- Redistribusi tenaga bidan
- Pemberian insentif dan fasilitas penunjang
- Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang berbasis data,
- Peningkatan kapasitas pendidikan kebidanan lokal.

Pemerataan tenaga bidan perlu menjadi prioritas dalam upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Provinsi Riau, guna mendukung pencapaian target indikator pembangunan kesehatan dan program prioritas nasional. Lebih jelasnya bagaimana penempatan tenaga bidan di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

GAMBAR 3.12
RASIO TENAGA BIDAN PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



C. JUMLAH DAN RASIO TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI SARANA KESEHATAN

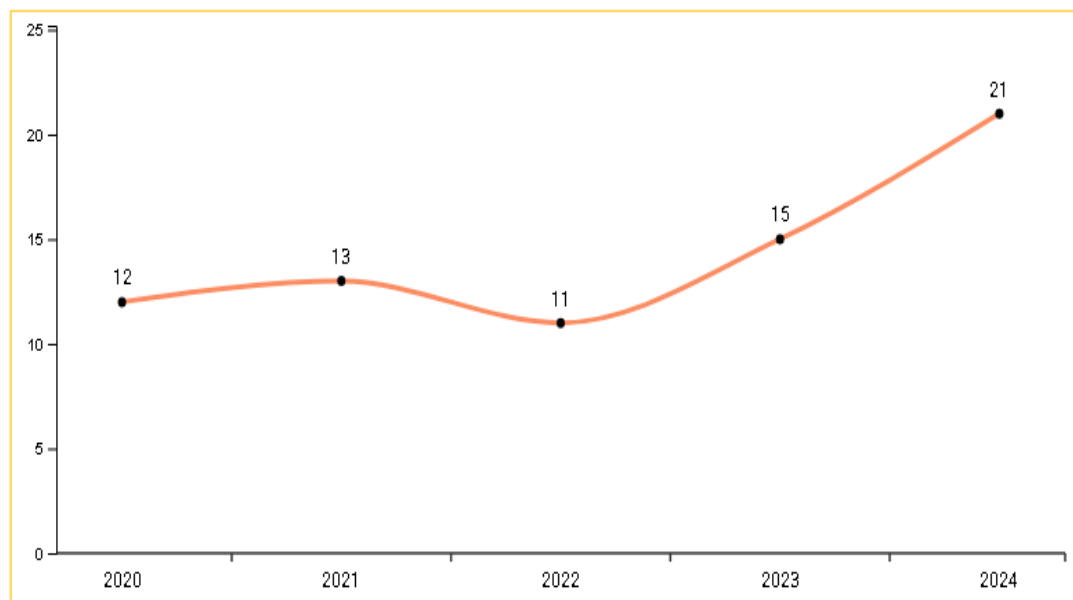
1. Tenaga Kesehatan Masyarakat

Pada tahun 2024, Provinsi Riau mencatat lonjakan signifikan dalam rasio tenaga kesehatan masyarakat, mencapai 21 per 100.000 penduduk. Ini merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir, melampaui target nasional sebesar 18 per 100.000 penduduk. Sebagai perbandingan, rasio pada tahun 2023 hanya 15, sementara tahun 2022 bahkan lebih rendah, yakni 11 per 100.000 penduduk.

Peningkatan tajam ini mencerminkan dua hal utama yakni komitmen pemerintah daerah terhadap pemenuhan standar tenaga kesehatan serta kemungkinan adanya intervensi kebijakan atau program strategis dalam rekrutmen dan distribusi tenaga kesehatan masyarakat selama dua tahun terakhir.

Peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan masyarakat ini diharapkan menjadi peran strategis tenaga kesehatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Mereka berfungsi sebagai ujung tombak dalam mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat, menyelenggarakan program promotif dan preventif. Untuk melihat gambaran rasio tenaga kesehatan masyarakat selama 5 tahun (2020 - 2024) dapat dilihat dari gambar berikut ini.

GAMBAR 3.13
RASIO TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PER 100.000 PENDUDUK
DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



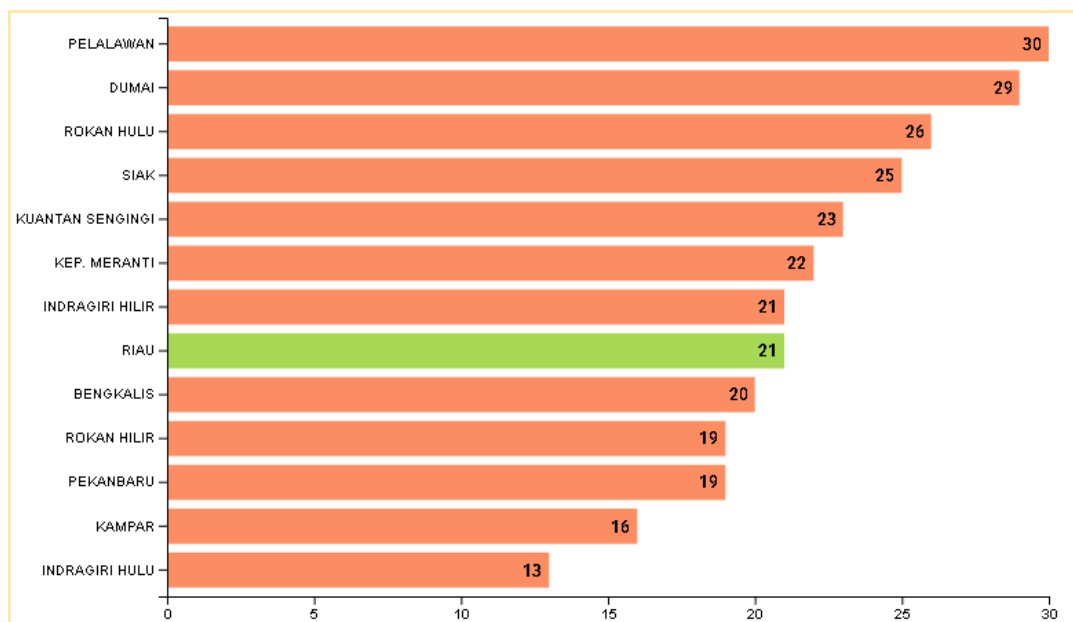
Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



Meskipun secara Provinsi target telah tercapai, pemerataan distribusi tenaga kesehatan masyarakat masih menjadi tantangan. Dari 12 kabupaten/kota terdapat 10 kabupaten/kota telah mencapai atau melampaui target dan 2 kabupaten masih di bawah target yakni Kabupaten Kampar 16 per 100.000 penduduk, Kabupaten Indragiri Hulu: 13 per 100.000 penduduk.

Ketimpangan ini mencerminkan tantangan struktural dalam pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah. Dan rasio tenaga Kesehatan Masyarakat per 100.000 penduduk menurut Kabupaten/Kota tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 3.14
RASIO TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

2. Tenaga Kesehatan Lingkungan

Pada tahun 2024, rasio tenaga kesehatan lingkungan di Provinsi Riau tercatat 6 per 100.000 penduduk, tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (2023), dan hanya naik sedikit dibanding tahun 2022 (5 per 100.000). Jika ditinjau dalam rentang waktu 2020–2024, tren peningkatan ini tergolong sangat lambat dan masih jauh dari angka ideal nasional, yaitu 20 per 100.000 penduduk.

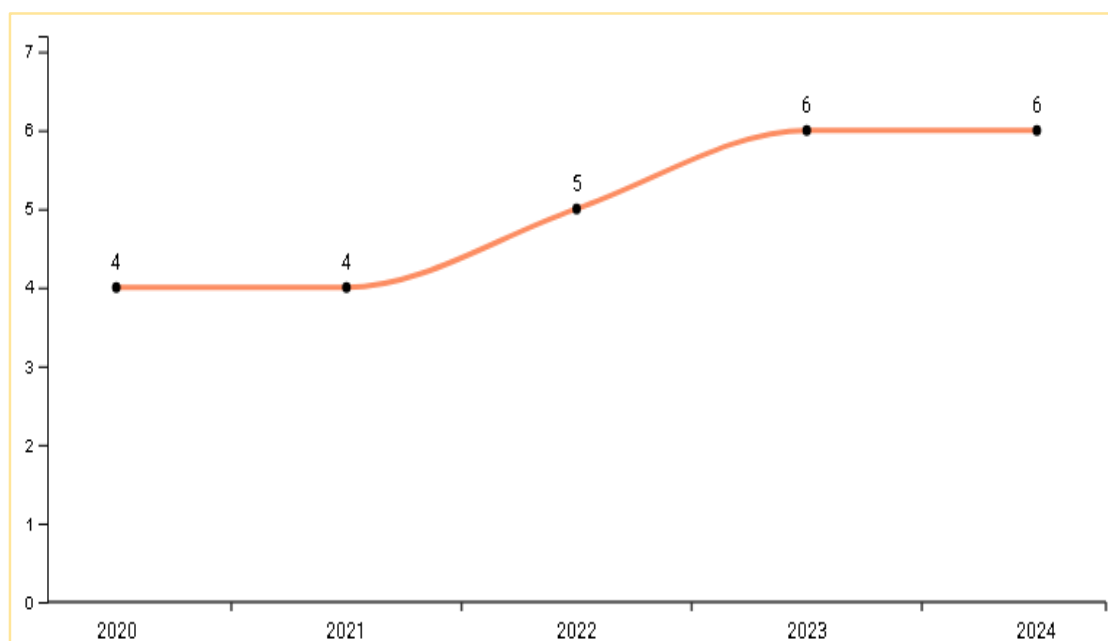


Tren ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat sedikit perbaikan, laju peningkatan tenaga kesehatan lingkungan tidak sebanding dengan kebutuhan dan beban kerja yang semakin kompleks dalam menghadapi tantangan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga kesehatan lingkungan yang rendah menjadi penghambat utama pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan. SPM mensyaratkan ketersediaan tenaga teknis untuk pelaksanaan layanan dasar, termasuk:

- Pemeriksaan kualitas air minum dan lingkungan permukiman
- Pengendalian vektor penyakit
- Edukasi masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

Tanpa SDM yang cukup, pemenuhan indikator SPM akan sulit dicapai secara merata di seluruh kabupaten/kota. Gambaran 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

GAMBAR 3.15
RASIO TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PER 100.000 PENDUDUK DI
PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Jika dilihat dari distribusi tenaga kesehatan lingkungan per kabupaten/kota, terdapat ketimpangan antara daerah:

- Rasio tertinggi dicapai oleh Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 13 per 100.000 penduduk. Disusul oleh Kabupaten Siak, Kota Dumai, Kabupaten

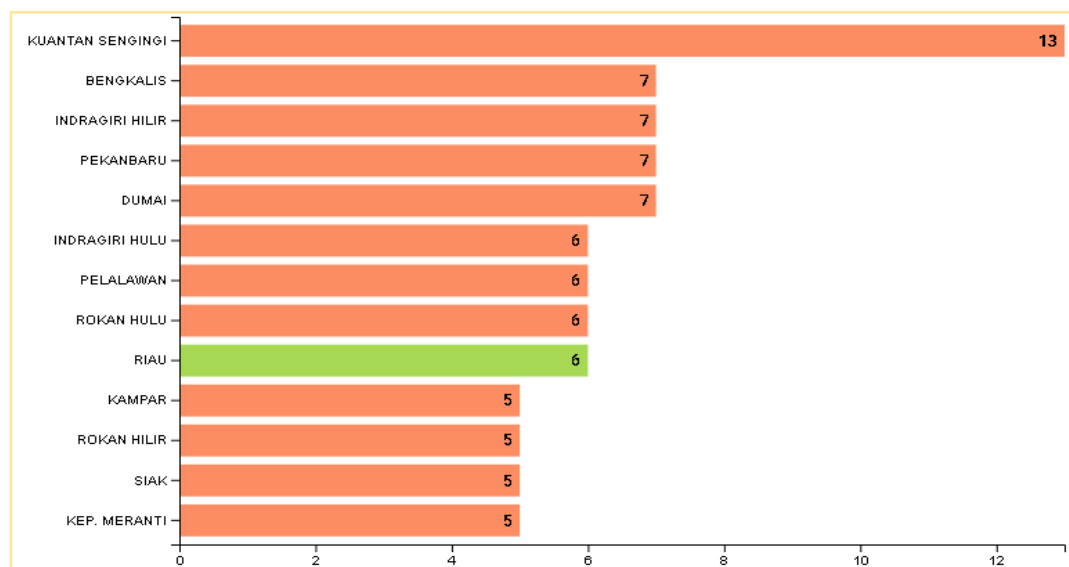


Indragiri Hilir, dan Kota Pekanbaru, masing-masing dengan rasio 7 per 100.000 penduduk.

- Sementara itu, rasio terendah tercatat di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Siak, yang masing-masing hanya mencapai 5 per 100.000 penduduk. Meskipun terdapat perbedaan rasio antar wilayah, perlu dicatat bahwa tidak ada satupun kabupaten/kota di Provinsi Riau yang mencapai target rasio tenaga kesehatan lingkungan yaitu 20 per 100.000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh wilayah di Provinsi Riau masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan lingkungan dalam jumlah signifikan.

Rendahnya ketersediaan tenaga ini dapat berdampak terhadap keterbatasan kapasitas dalam pengawasan faktor risiko lingkungan, seperti pengendalian sanitasi, pengelolaan limbah, serta pengendalian vektor penyakit. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya perencanaan, penambahan formasi, serta penempatan strategis untuk tenaga kesehatan lingkungan di seluruh wilayah, terutama di daerah dengan beban risiko lingkungan yang tinggi.

GAMBAR 3.16
RASIO TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PER 100.000 PENDUDUK MENURUT
KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Rendahnya penempatan tenaga kesehatan di daerah harus menjadi perhatian Pemerintah guna menekan angka kesakitan pada masyarakat yang



disebabkan oleh lingkungan, dimana penyebab masalah kesehatan terbesar adalah kondisi lingkungan yang tidak sehat.

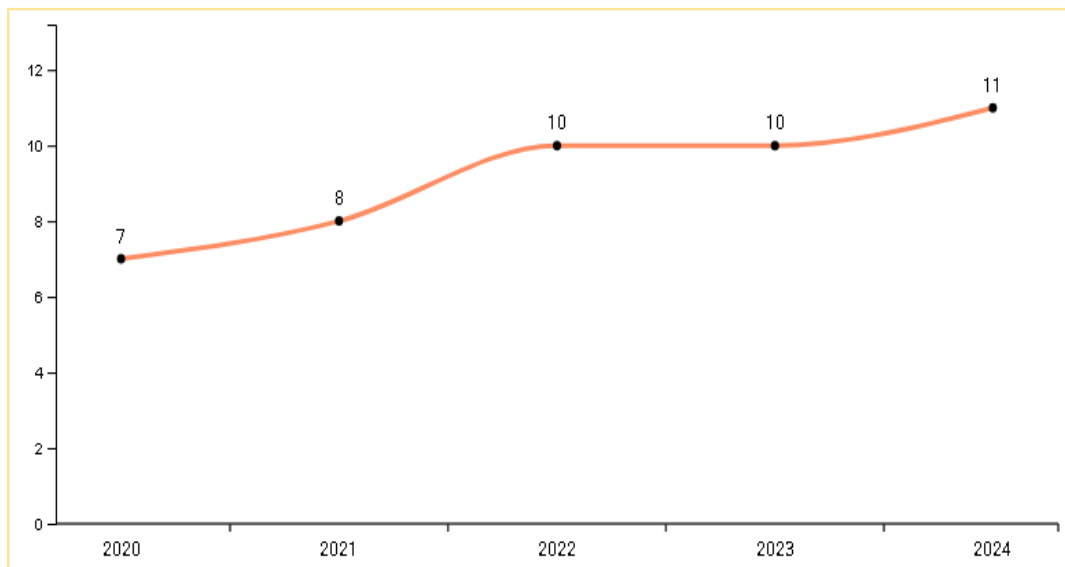
3. Tenaga Gizi

Tenaga gizi merupakan tenaga kesehatan profesional yang terdiri dari nutrisisionis dan dietisien, dengan peran penting dalam pelayanan gizi individu, kelompok, dan masyarakat. Pada tahun 2024, rasio tenaga gizi di Provinsi Riau tercatat 11 per 100.000 penduduk, mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya, namun masih jauh dibawah target nasional yaitu 18 per 100.000 penduduk. Tren lima tahun terakhir (2020–2024) menunjukkan:

- Pertumbuhan yang stagnan dan lambat
- Tidak terjadi lompatan signifikan dalam pemenuhan tenaga gizi
- Ketimpangan antara kebutuhan program dan ketersediaan SDM

Rasio tenaga gizi di Provinsi Riau yang masih jauh dari target nasional menjadi peringatan penting bahwa sistem pelayanan gizi belum optimal mendukung program prioritas, terutama dalam penurunan stunting. Tanpa intervensi segera dan terencana, capaian pembangunan kesehatan akan terhambat. Gambaran ketersediaan tenaga gizi di Provinsi Riau 5 tahun terakhir sejak tahun 2020 – 2024 dapat dilihat dari gambar berikut ini.

GAMBAR 3.17
RASIO TENAGA GIZI PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

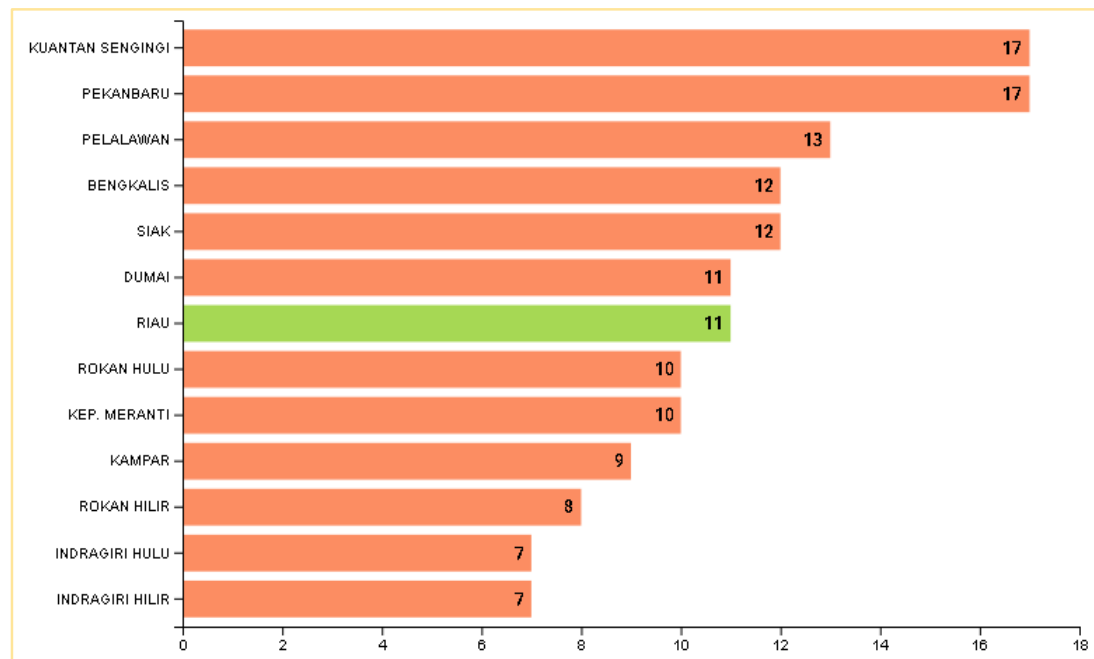


Untuk penyebaran tenaga gizi di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tidak merata, hal ini bisa dilihat dari rasio tenaga Gizi. Kondisi yang lebih memprihatinkan tampak pada tingkat Kabupaten/Kota. Tidak ada satupun dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang telah mencapai target ketersediaan tenaga gizi nasional.

Rasio tertinggi yakni Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Pekanbaru masing-masing 17 per 100.000 penduduk diikuti Kabupaten Pelalawan 13 per 100.000 penduduk. Sedangkan rasio terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hilir masing-masing dengan rasio 7 per 100.000 penduduk diikuti Kabupaten Rokan Hilir dengan rasio 8 per 100.000 penduduk.

Kekurangan tenaga gizi di berbagai wilayah di Riau sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program gizi, khususnya dalam mendukung upaya penurunan stunting, anemia, dan kekurangan gizi kronis. Minimnya tenaga gizi juga berpotensi menyebabkan ketidaktercapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang gizi, serta berdampak pada rendahnya literasi gizi masyarakat. Untuk mengetahui gambaran rasio tenaga gizi di Provinsi Riau tahun 2024 bisa dilihat dari gambar dibawah ini.

GAMBAR 3.18
RASIO TENAGA GIZI PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KAB/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

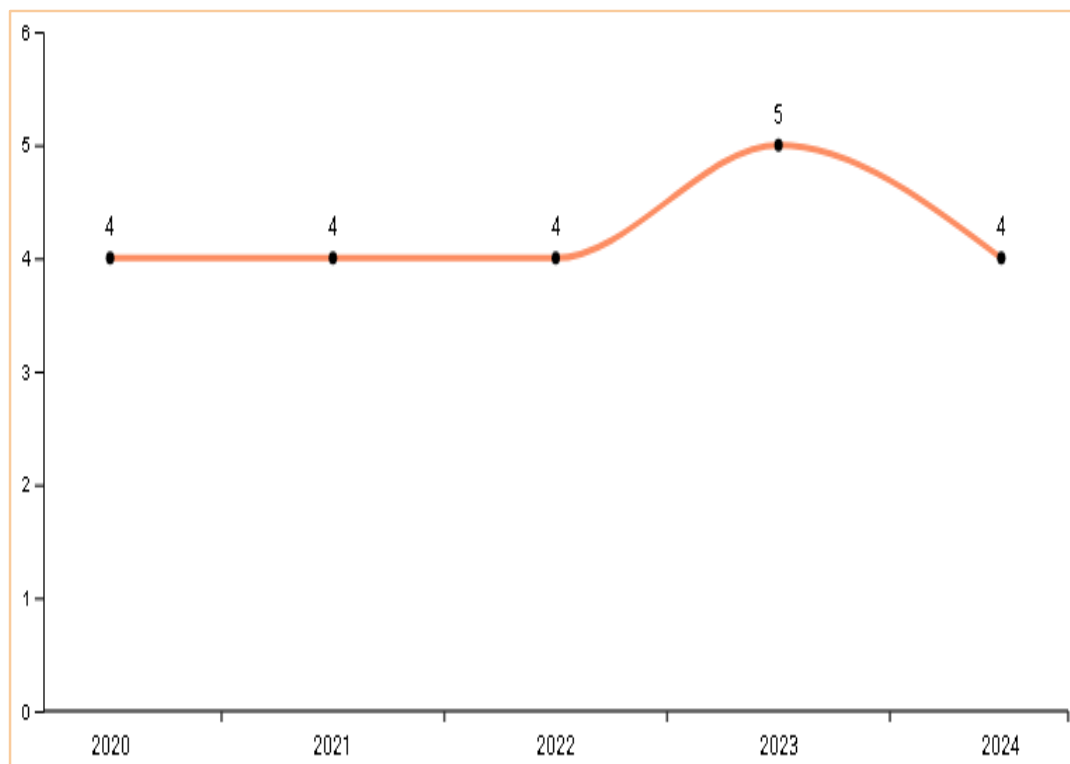


D. JUMLAH DAN RASIO TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISIAN MEDIK DI SARANA KESEHATAN

1. Tenaga Keterapihan Fisik

Tenaga keterampilan fisik adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang keterampilan fisik yang terdiri dari fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk tahun 2024 ini tenaga keterampilan fisik dengan rasio 4 per 100.000 penduduk, rasio ini menurun dibandingkan dengan rasio tahun 2023 (5 per 100.000 penduduk). Sebagaimana gambaran rasio tenaga keterampilan fisik per 100.000 penduduk selama 5 (lima) tahun 2020 – 2024.

GAMBAR 3.19
RASIO TENAGA KETERAPIAN FISIK PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

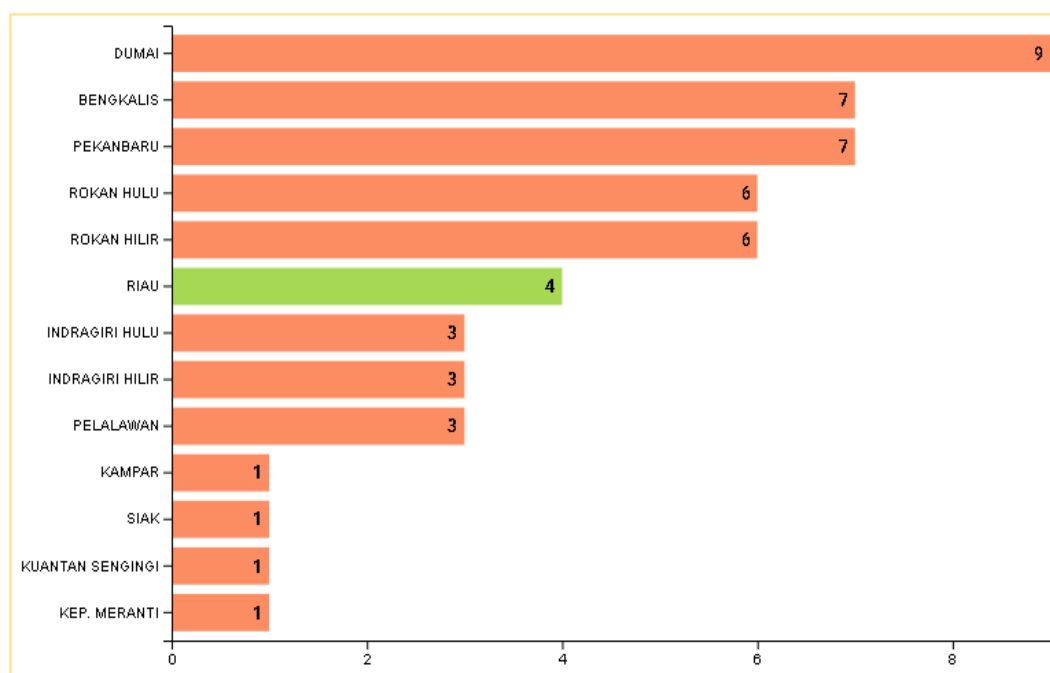
Jika dilihat dari penempatan tenaga keterampilan fisik di Kabupaten/Kota masih dominannya berada di daerah Kota seperti Kota Dumai (9 per 100.000 penduduk) diikuti oleh Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Bengkalis masing-masing 7 per 100.000 penduduk. Sedangkan rasio terendah adalah Kabupaten Siak, Kabupaten



Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti masing-masing hanya mencapai 1 per 100.000 penduduk.

Untuk melihat lebih jelas gambaran rasio tenaga keterampilan fisik dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

GAMBAR 3.20
RASIO TENAGA KETERAPIAN FISIK PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

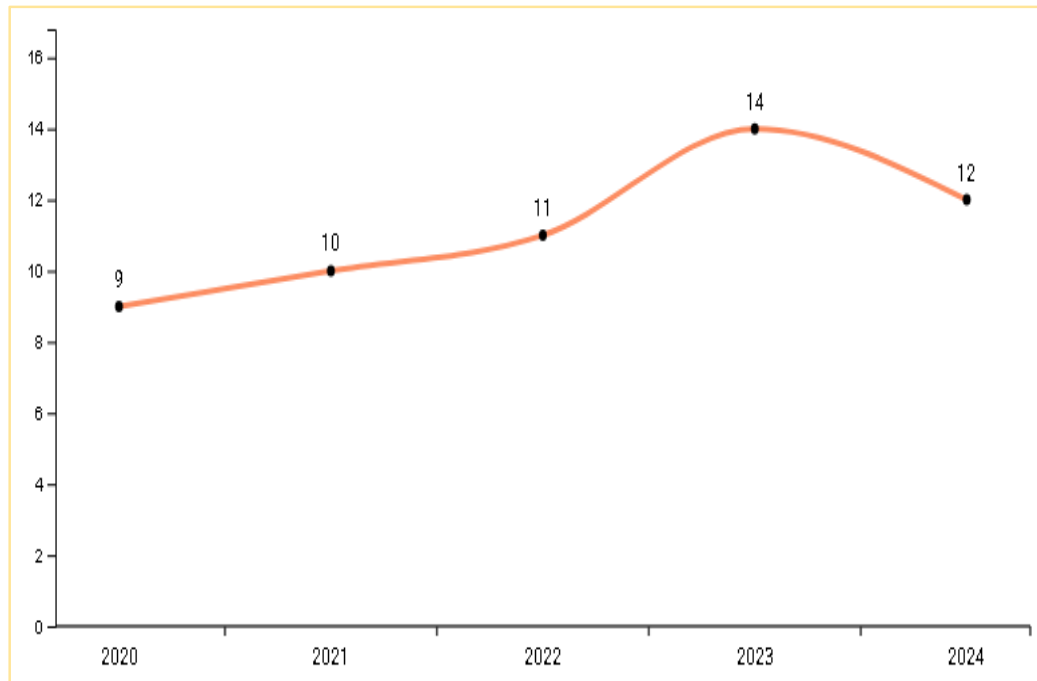
2. Tenaga Keteknisian Medik

Tenaga keteknisian medis adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang keteknisian medis yang terdiri dari perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi (perawat anestesi), terapis gigi dan mulut (perawat gigi), dan audiologist.

Tenaga teknisi medis di Provinsi Riau tahun 2024 dengan rasio 12 per 100.000 penduduk menurun dibanding tahun 2023 dengan rasio 14 per 100.000 penduduk. Untuk mengetahui lebih jelas gambaran ketersediaan tenaga keteknisian medis dalam 5 (lima) tahun sejak tahun 2019 – 2024 dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



GAMBAR 3.21
RASIO TENAGA KETEKNISIAN MEDIS PER 100.000 PENDUDUK
DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



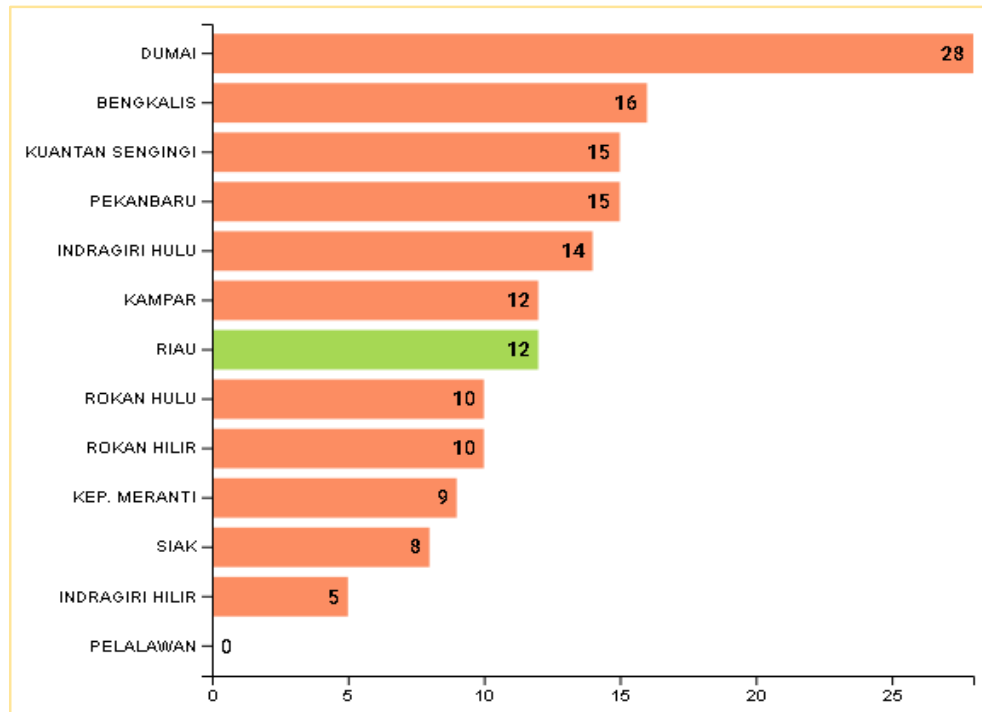
Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Jika dilihat dari penempatan tenaga keteknisian medis di Kabupaten/Kota masih dominannya berada di daerah Kota seperti Kota Dumai (28 per 100.000 penduduk) diikuti Kota Pekanbaru, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Bengkalis masing-masing 15 per 100.000 penduduk). Dari 12 Kabupaten yang ada hanya Kota Dumai yang telah mencapai target 18 per 100.000 penduduk.

Ketersediaan tenaga keteknisian medis yang terendah adalah Kabupaten Pelalawan sebesar 0,5 per 100.000 penduduk diikuti, Kabupaten Indragiri hilir (5 per 100.000 penduduk) dan kabupaten Rokan Hulu (7 per 100.000 penduduk). Pada gambar dibawah ini dapat dilihat bagaimana rasio tenaga keteknisian medis per 100.000 penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024.



GAMBAR 3.22
RASIO TENAGA KETEKNISIAN MEDIS PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

E. JUMLAH DAN RASIO TENAGA KEFARMASIAN (TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN DAN APOTEKER) DI SARANA KESEHATAN

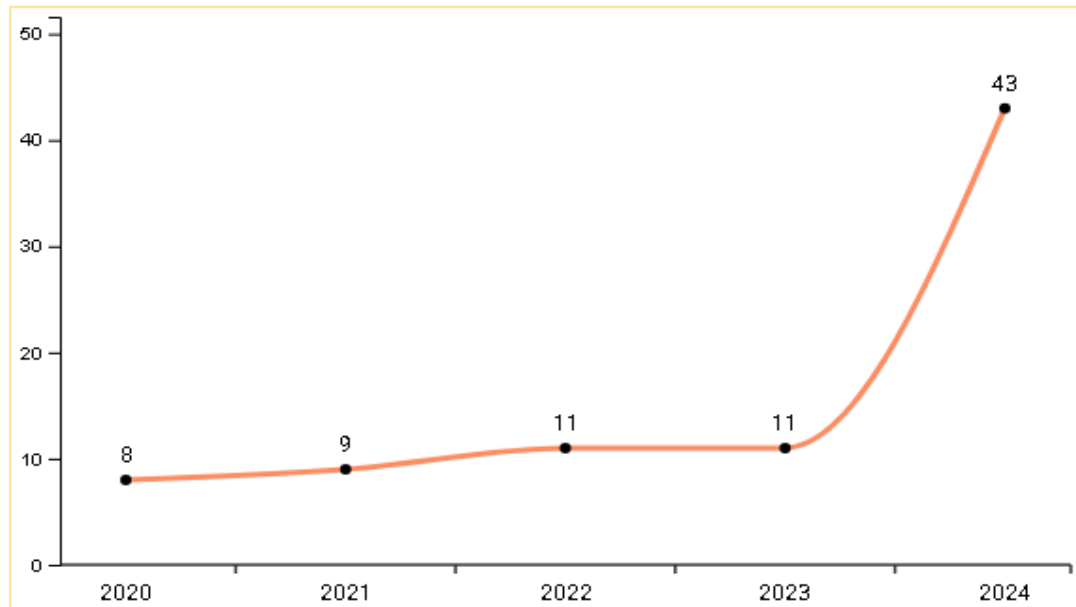
Tenaga kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Apoteker

Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (Permenkes Nomor 889/ Menkes/ Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian). Untuk tenaga apoteker di Provinsi Riau tahun 2024 dengan rasio 43 per 100.000 penduduk, meningkat tajam dibandingkan dengan rasio tahun 2023 (11 per 100.000 penduduk). Untuk gambaran jelasnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



GAMBAR 3.23
RASIO TENAGA APOTEKER PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

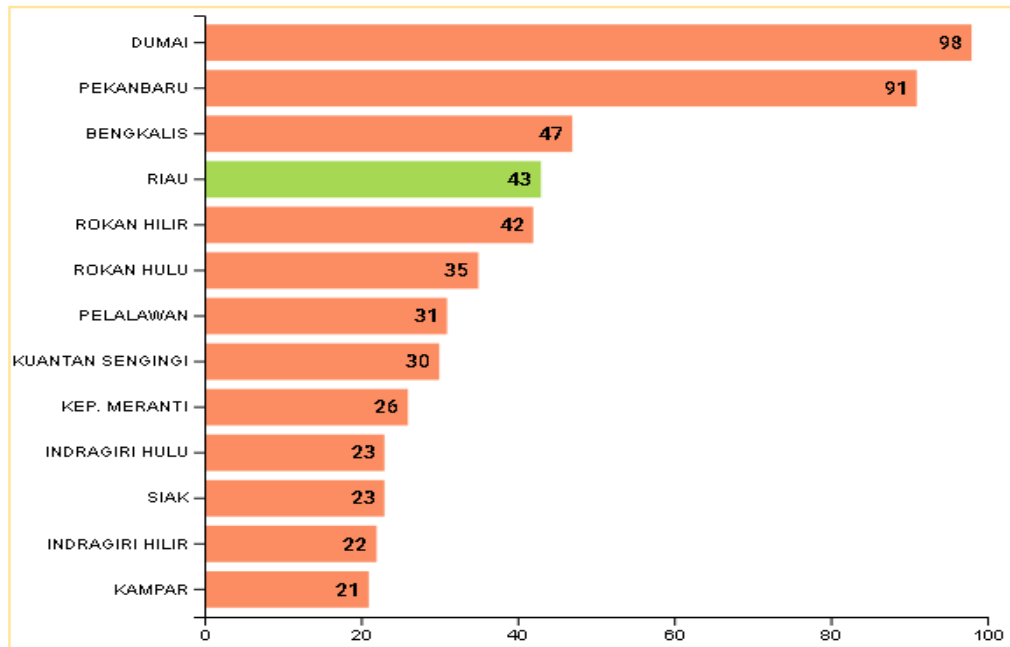
Meskipun ketersediaan tenaga apoteker terus mengalami peningkatan namun dalam 5 (Lima) tahun terakhir, baru pada tahun 2024 ini rasio tenaga apoteker telah mencapai target (20 per 100.000 penduduk). Meskipun telah mencapai Kondisi ini menjadi hambatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standard kepada masyarakat, dan harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah bersama-sama dengan Pemerintah Pusat bagaimana memenuhi ketersediaan tenaga apoteker agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu bagi masyarakat.

Jika dilihat dari penempatan tenaga apoteker di Kabupaten/Kota masih dominannya berada di daerah Kota seperti Kota Dumai (98 per 100.000 penduduk) diikuti Kota Pekanbaru (91 per 100.000 penduduk) dan Kabupaten Bengkalis (47 per 100.000 penduduk). Untuk tahun ini semua Kabupaten/Kota rasio tenaga apotekernya yang telah melampaui target rasio tenaga apoteker (15 apoteker per 100.000 penduduk).

Ketersediaan tenaga apoteker yang terendah adalah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hilir (21 per 100.000 penduduk) diikuti oleh Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hulu masing-masing 23 per 100.000 penduduk. Pada gambar dibawah ini dapat dilihat bagaimana rasio tenaga apoteker per 100.000 penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024.



GAMBAR 3.24
RASIO TENAGA APOTEKER PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

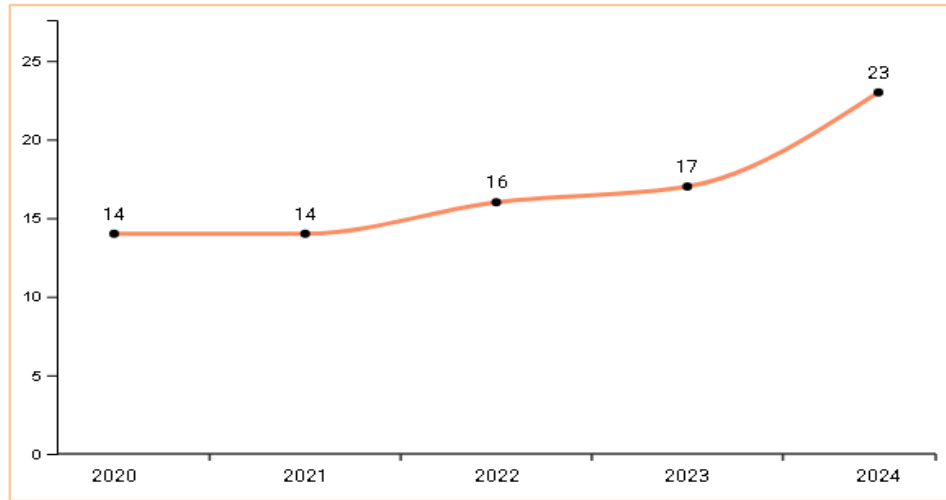
2. Tenaga Teknis Kefarmasian

Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker (Permenkes Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian). Tenaga teknis kefarmasian terdiri dari S-1 Farmasi, D-III Farmasi, dan Asisten Apoteker. Tenaga teknis kefarmasian di Provinsi Riau pada tahun 2024 dengan rasio 23 per 100.000 penduduk meningkat tajam dibandingkan tahun 2023 dengan rasio 17 per 100.000 penduduk

Rasio ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan sebesar 30 per 100.000 penduduk. Untuk lebih jelas dapat dilihat grafik rasio tenaga kefarmasian 5 tahun terakhir (2020-2024) dibawah ini.



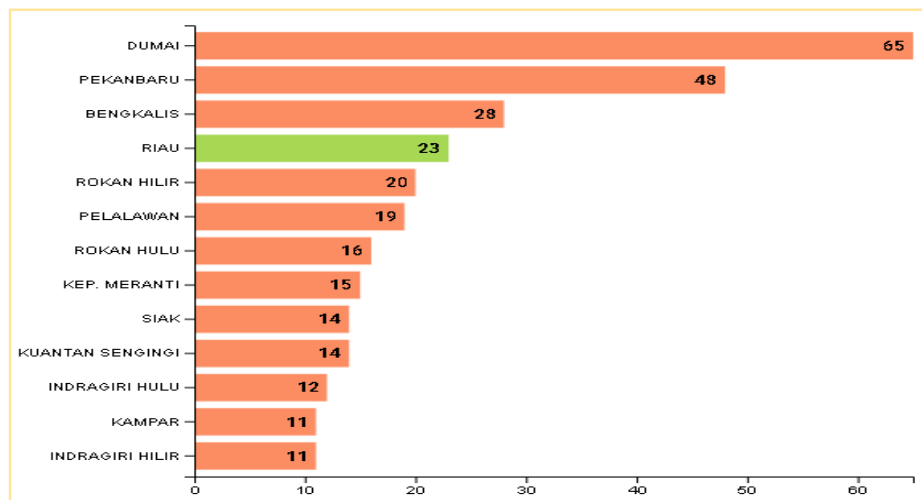
GAMBAR 3.25
RASIO TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN PER 100.000 PENDUDUK
DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Sedangkan bila dilihat penyebaran tenaga teknis kefarmasian di Kabupaten/Kota maka Kota Dumai merupakan daerah yang rasio tenaga teknis kefarmasian yang tertinggi (65 per 100.000 penduduk) diikuti Kota Pekanbaru (48 per 100.000 penduduk) dan Kabupaten Bengkalis (28 per 100.000 penduduk), kemudian rasio tenaga teknis kefarmasian rasio terendah adalah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hilir masing-masing 11 per 100.000 penduduk dan Kabupaten Hulu (12 per 100.000 penduduk). Gambaran penyebaran tenaga kefarmasian dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

GAMBAR 3.26
RASIO TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



F. JUMLAH DAN RASIO TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN

Adapun yang dimaksud dengan Tenaga penunjang/pendukung kesehatan adalah tenaga selain tenaga kesehatan yang bekerja di sektor/bidang kesehatan yang meliputi pejabat struktural, tenaga pendidik, dan tenaga dukungan manajemen. Ketersediaan tenaga non kesehatan juga tidak kalah pentingnya dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah kerja sarana kesehatan.

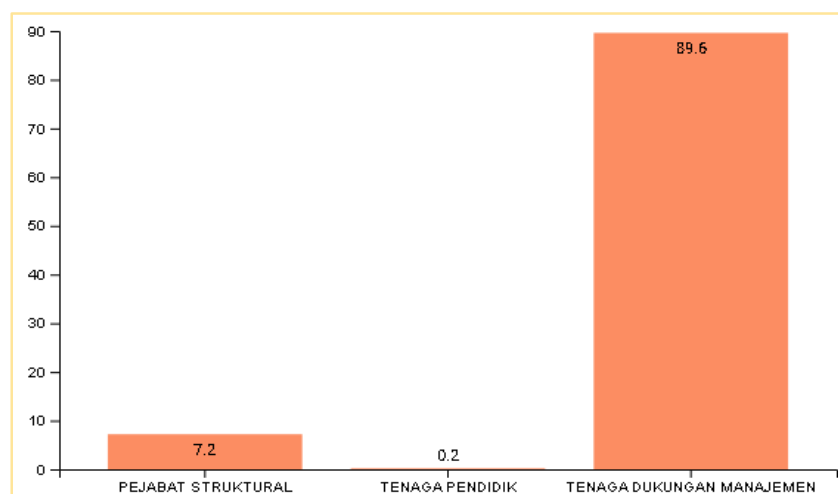
Jumlah Tenaga penunjang/pendukung kesehatan di Provinsi Riau pada tahun 2024 berjumlah 5.266 orang menurun dibandingkan tahun 2023 berjumlah 11540 orang, hal ini disebabkan penghapusan tenaga struktural. Tenaga Penunjang Kesehatan ini terdiri dari Pejabat struktural, tenaga pendidik dan tenaga dukungan manajemen.

Adapun batasan antara pejabat struktural, tenaga pendidik dan tenaga dukungan manajemen adalah sebagai berikut :

- Pejabat struktural adalah tenaga yang menempati jabatan struktural di institusi kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- Tenaga pendidik adalah tenaga yang bertugas mengajar di institusi pendidikan yang terdiri dari dosen, widyaiswara, dan lainnya.
- Tenaga dukungan manajemen terdiri dari pengelola program kesehatan, staf penunjang administrasi, staf penunjang teknologi, staf penunjang perencanaan, dan tenaga penunjang kesehatan lainnya.

Untuk lebih jelas rincian tenaga penunjang ini adalah seperti gambar dibawah ini.

GAMBAR 3.27
RASIO TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN PER 100.000 PENDUDUK
PROVINSI RIAU TAHUN 2024

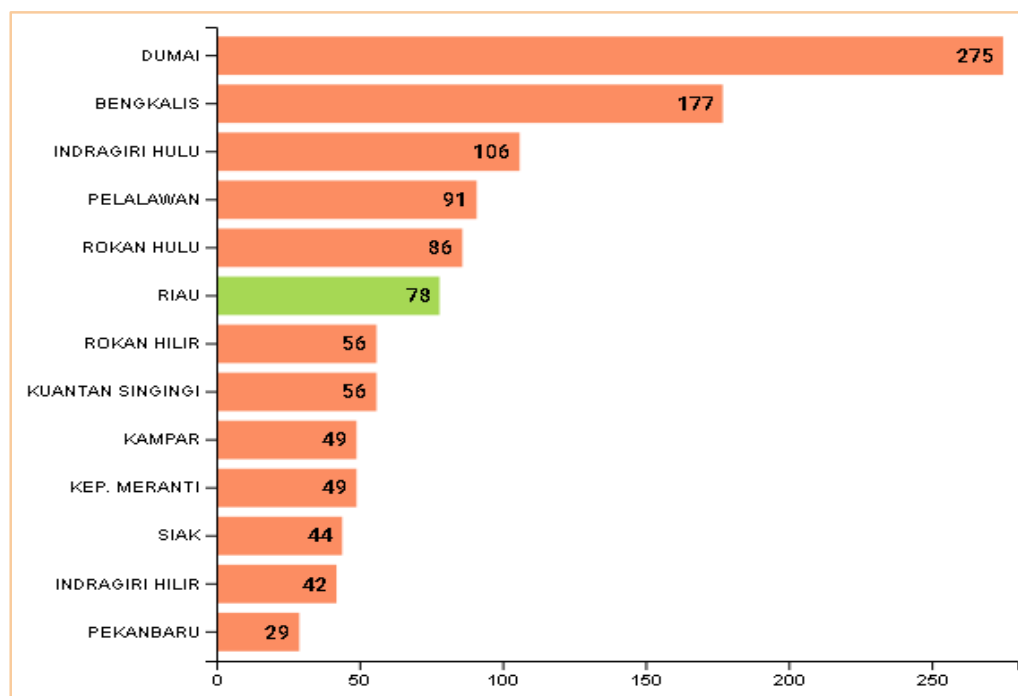


Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



Jika dilihat dari ketersediaan tenaga Penunjang Kesehatan yang tersebar di Kabupaten/Kota jumlah tersebar berada di Kota Dumai dengan rasio 275 per 100.000 penduduk, diikuti Kabupaten Bengkalis dengan rasio 177 per 100.000 penduduk dan Kabupaten Indragiri Hulu dengan 106 per 100.000 penduduk. Kabupaten merupakan daerah yang paling sedikit tenaga penunjangnya dengan 29 per 100.000 penduduk, diikuti Kabupaten Indragiri Hilir 42 per 100.000 penduduk dan Kabupaten Siak 44 per 100.000 penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

GAMBAR 3.28
RASIO TENAGA PENUNJANG KESEHATAN PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang SDK dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dari data yang ada memang jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Riau masih belum tercukupi, namun Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) telah berusaha mencukupi kebutuhan tenaganya melalui pengangkatan tenaga baru seperti CPNS, PTT dan kontrak, yang terpenting saat ini keberadaan tenaga kesehatan tersebut belum merata sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota, masih ditemui penempatan tenaga pada satu daerah sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat belum semua terjangkau.

Mobilitas tenaga atau distribusi tenaga kesehatan yang tersebar di wilayah pelayanan kesehatan diupayakan dengan peningkatan sarana-sarana kesehatan



yang ada, seperti peningkatan akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas, peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap dan pemberian insentif. Guna mengatasi masalah ketenagaan maka salah satu langkah awal kedepan adalah pemetaan tenaga kesehatan disertai dengan analisis kebutuhan berdasarkan problema spesifik dan kewilayahan





BAB IV

PEMBIAYAAN KESEHATAN



PROFIL KESEHATAN PROVINSI RIAU 2024



BAB IV PEMBIAYAAN KESEHATAN

A. PESERTA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

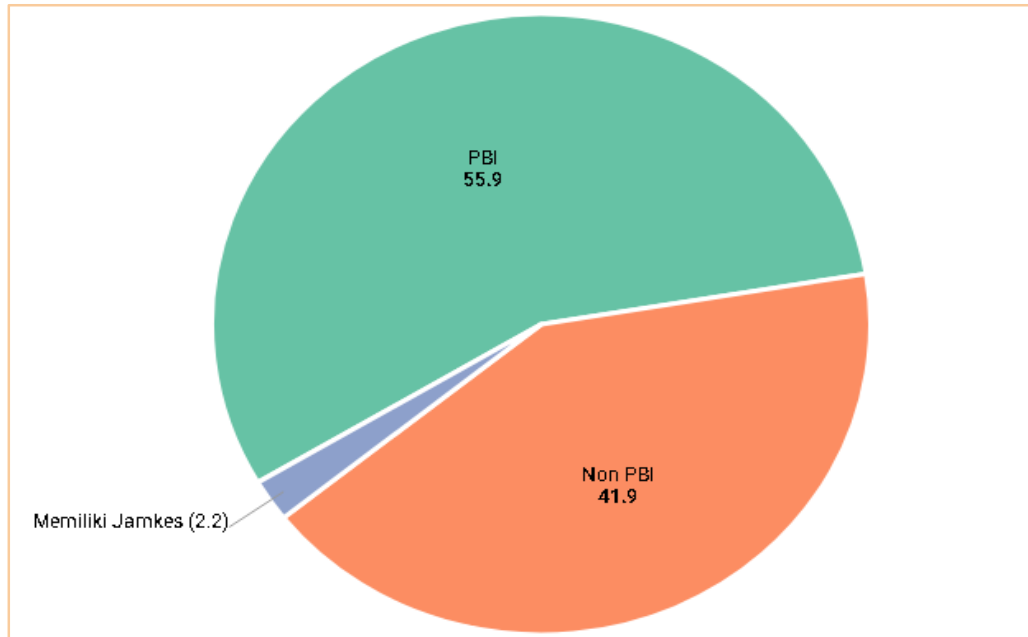
Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sejak 1 Januari 2014 pemerintah Indonesia mulai menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara bertahap untuk seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, diharapkan tidak ada lagi masyarakat terutama yang miskin yang enggan berobat ke fasilitas kesehatan karena kendala biaya. JKN diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sebagai program jaminan sosial nasional di bidang kesehatan. Tujuannya adalah memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan kepada peserta, agar kebutuhan dasar kesehatan mereka terpenuhi. Program ini bisa diikuti oleh siapa pun yang telah membayar iuran secara mandiri atau yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, seperti masyarakat miskin dan rentan.

Pada tahun 2024 peserta jaminan kesehatan di Provinsi Riau sebanyak 6.869.613 jiwa. Kepesertaan tahun 2024 ini meningkat dibandingkan tahun 2023. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdiri dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN adalah peserta PBI jaminan kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh Pemerintah melalui APBN sebesar 36,3%.
2. PBI APBD adalah peserta PBI jaminan kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh Pemerintah daerah melalui APBD sebesar 23,2%.
3. Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah peserta jaminan kesehatan yang terdiri dari PNS, TNI, POLRI, pejabat negara, pegawai Pemerintah non PNS, dan pegawai swasta sebesar 27,7% .
4. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri adalah jaminan kesehatan dengan peserta yang berasal dari pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan sebesar 13,5%.
5. Bukan Pekerja (BP) adalah peserta jaminan kesehatan yang terdiri dari investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, dan perintis kemerdekaan sebesar 1,5%.



GAMBAR 4.1
PERSENTASE KEPEMILIKAN JAMINAN KESEHATAN PROVINSI RIAU 2024



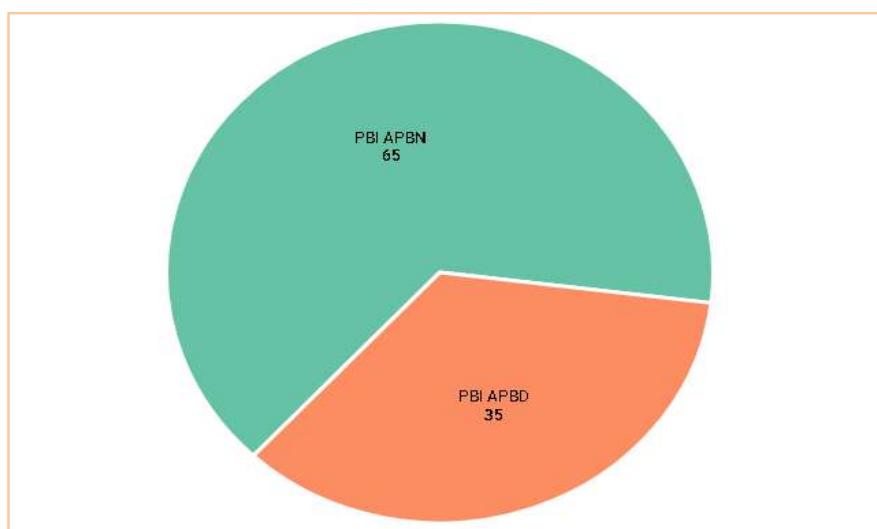
Sumber : Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Gambar diatas merupakan gambaran Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Provinsi Riau Tahun 2024. Dimana pada di tahun Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Provinsi Riau ini pada tahun 2024 ini sudah 100%, meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 97,8% meningkat dibantu tahun 2022 sebesar 79,2%. Ini sudah semua penduduk Provinsi Riau memiliki Jaminan Kesehatan.

Dari 97.8% penduduk yang sudah memiliki jaminan kesehatan terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar 59,5% dan Non Penerima bantuan Iuran (Non PBI) 42,6%.



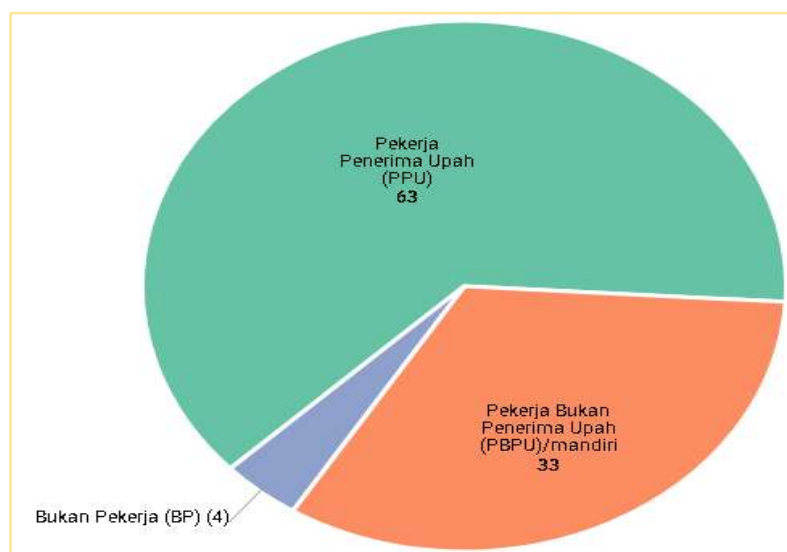
GAMBAR 4.2
PERSENTASE PESERTA JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Pada gambar diatas, dijelaskan bahwa Kepesertaan jaminan kesehatan Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) sebesar 59,5% yang terbesar bersumber dari Anggaran APBN (36,3%) dan APBD (23,2%). Ini artinya kepesertaan PBI yang bersumber anggaran dari APBN lebih banyak bila dibandingkan dengan anggaran dari daerah.

GAMBAR 4.3
PERSENTASE PESERTA JAMINAN KESEHATAN BUKAN PENERIMA BANTUAN (NON PBI) PROVINSI
RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

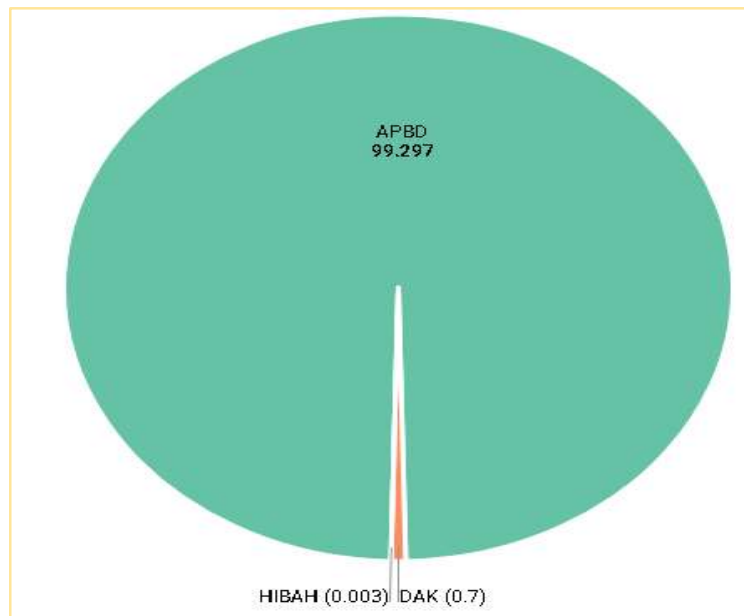


Sedangkan untuk kepesertaan Jaminan Kesehatan Non PBI sebesar 42,6% dan yang kepesertaan yang terbanyak dari PPU (27,7%), PBPU/mandiri (13,5 %) dan Bukan Pekerja sebesar 1,5% sekaligus paling sedikit kepesertaannya.

B. ANGGARAN KESEHATAN DALAM APBD KABUPATEN / KOTA

Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk menyediakan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, terealisasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

GAMBAR 4.4
PERSENTASE ANGGARAN KESEHATAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN SUMBERNYA
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Sekretariat, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

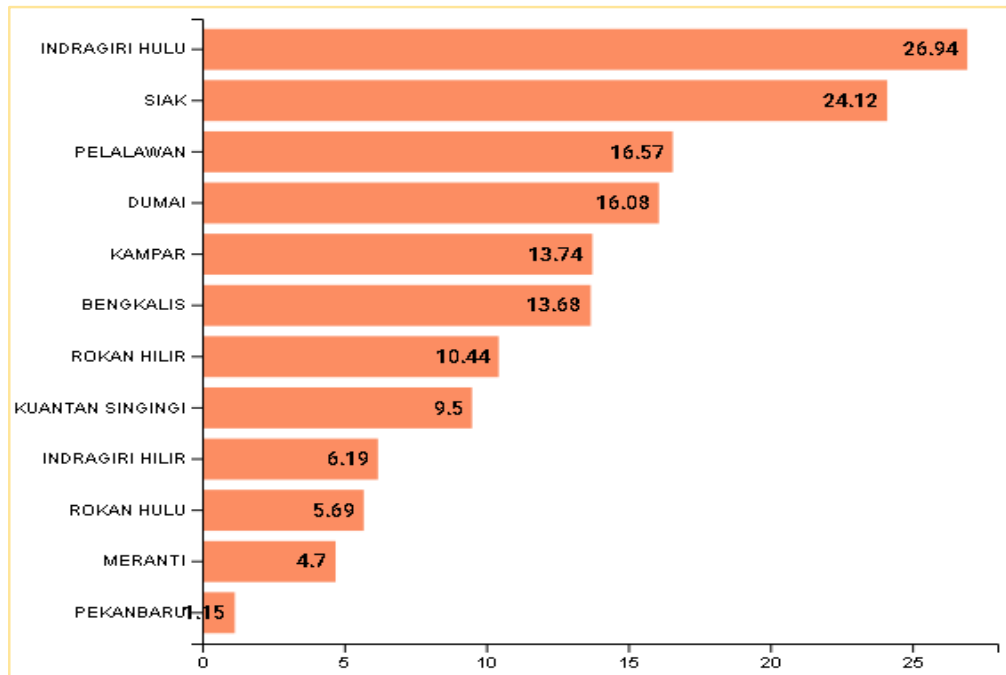
Gambar di atas menjelaskan bahwa, pada tahun 2024 jumlah keseluruhan anggaran kesehatan di 12 Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sumber lainnya yang berjumlah sebesar Rp. 5.870.585.963.879,- .

Untuk sumber sumber anggaran kesehatan terbesar di Kabupaten/ Kota berasal dari APBD Kabupaten/Kota sebesar 99,3%, sumber dari DAK 0,7% dan anggaran sumber lain 0,003%. Persentase alokasi anggaran kesehatan



merupakan gambaran sejauh mana respon Pemerintah terhadap pembangunan khususnya bidang kesehatan di Kabupaten/Kota sehingga apa yang menjadi kebutuhan program dan pelayanan kesehatan di daerah tersebut dapat dituangkan dalam perencanaan dan penganggarannya pembangunan kesehatan di daerah tersebut.

GAMBAR 4.5
PERSENTASE ANGGARAN KESEHATAN APBD TERHADAP TOTAL ANGGARAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



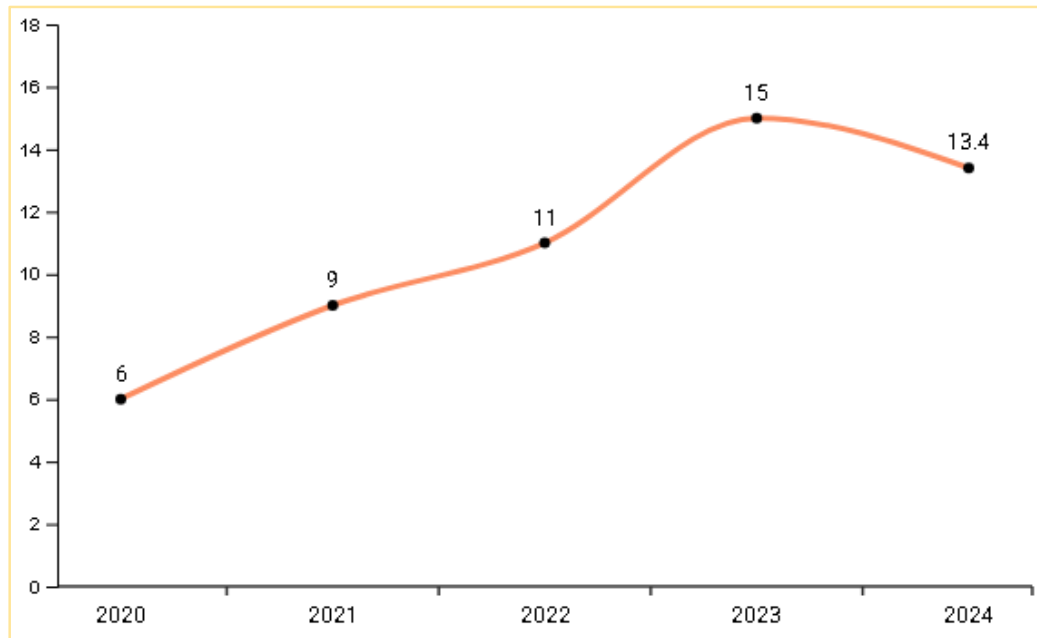
Sumber : Sekretariat, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dari gambaran grafik di atas, untuk persentase anggaran kesehatan bersumber APBD Kabupaten/Kota terhadap APBD Kabupaten/Kota, maka Kota Pekanbaru merupakan Kabupaten/Kota yang mempunyai persentase terbesar (26,9%), diikuti oleh Kabupaten Kep. Meranti sebesar 20,2% dan Kabupaten Siak sebesar 19,2%. Sedangkan persentase total anggaran kesehatan terhadap total anggaran APBD nya terkecil yaitu Kabupaten Pelalawan sebesar 0,5% diikuti oleh Kabupaten Bengkalis sebesar 9,2% dan Kabupaten Rokan Hilir sebesar 9,3%.

Untuk persentase anggaran kesehatan bersumber APBD terhadap total APBD Kabupaten/kota Tahun 2024 ini sebesar 13,4%, besaran tahun ini menurun dibandingkan besaran anggaran tahun sebelumnya. Berikut ini gambaran persentase anggaran kesehatan bersumber APBD dalam 5 tahun terakhir.



GAMBAR 4.6
PERSENTASE ANGGARAN KESEHATAN BERSUMBER APBD KAB/KOTA TANPA DAK



Sumber : Sekretariat, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

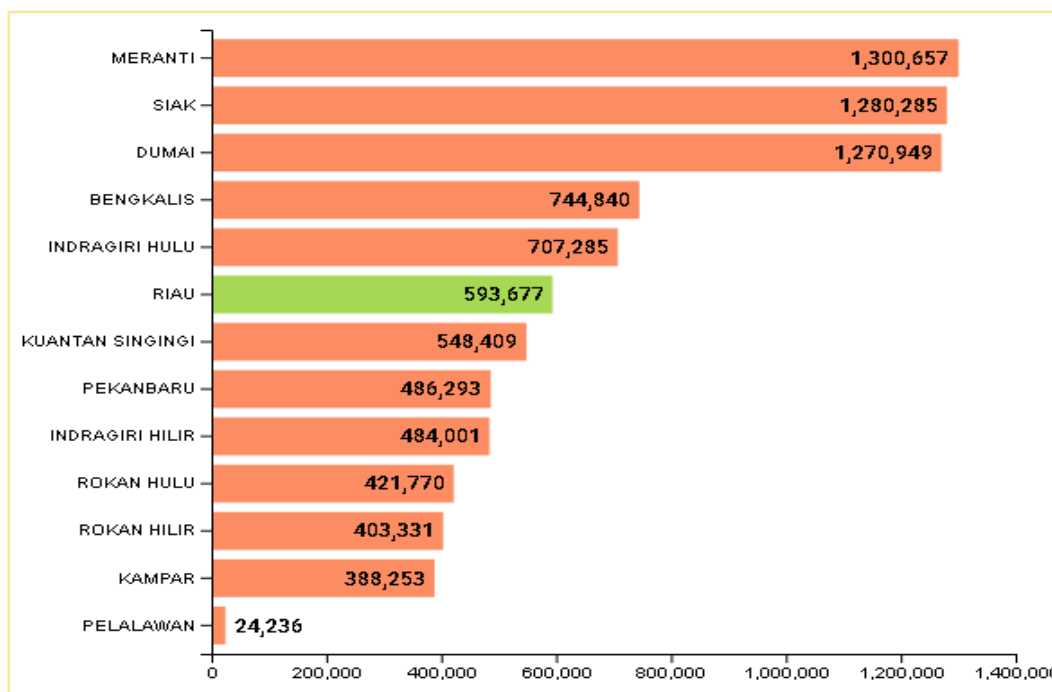
Besarnya alokasi anggaran kesehatan tersebut sangat penting karena ini merupakan komitmen Pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap pembangunan kesehatan di daerahnya. Hal ini mengingat salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya derajat kesehatan adalah seberapa besar tingkat pembiayaan untuk sektor kesehatan. Semakin besar belanja kesehatan yang dikeluarkan Pemerintah diharapkan semakin baik pencapaian derajat kesehatan masyarakat. Dan saat ini setiap daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban pencapaian Standar Pelayanan Minimal 100%.

C. ANGGARAN KESEHATAN PERKAPITA

Namun dalam melakukan penganggaran tidak hanya memperhatikan berapa besarnya persentase anggaran kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pada tahun 2023 ini yang dihubungkan dengan besarnya penduduknya atau anggaran kesehatan perkapita seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini. anggaran tersebut untuk kesehatan, juga harus melihat penduduk dari daerah tersebut.



GAMBAR 4.7
ANGGARAN KESEHATAN PER KAPITA MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Sekretariat, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Untuk anggaran kesehatan perkapita terbesar tahun 2024 adalah Kabupaten Kep. Meranti (1.300.657) diikuti Kabupaten Siak (1.280.285), dan selanjutnya adalah Kota Dumai (1.270.949). Sedangkan Anggaran kesehatan perkapita terendah adalah Kabupaten Pelalawan (24.253), diikuti Kabupaten Kampar (388.253) dan Kabupaten Rokan Hilir (403.331)





BAB V

KESEHATAN KELUARGA



PROFIL KESEHATAN PROVINSI RIAU 2024



BAB V KESEHATAN KELUARGA

A. KESEHATAN IBU

1. Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian maternal selama periode waktu tertentu per 100.000 kelahiran hidup pada periode yang sama. Berdasarkan definisi dari Kementerian Kesehatan, kematian maternal adalah kematian seorang perempuan saat hamil, saat melahirkan, atau dalam waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa memperhatikan lama dan tempat persalinan yang disebabkan oleh kehamilan itu sendiri atau penanganannya, dan bukan disebabkan oleh kecelakaan atau sebab non-obstetrik lainnya.

Perlu dicatat bahwa angka kematian ibu (AKI) hanya dapat diperoleh melalui survei khusus, seperti Riskesdas atau Long Form SP BPS, karena memerlukan metode estimasi yang mempertimbangkan kelahiran hidup sebagai penyebut. Sementara itu, data rutin yang tersedia dari fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Riau hanya mencatat jumlah kematian ibu, bukan angka kematian.

Berdasarkan hasil Long Form SP 2020 oleh BPS Provinsi Riau (BPS, 2023), AKI di Provinsi Riau tercatat sebesar 158 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan hasil Riskesdas 2018, yang mencatat AKI sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup.

Meskipun tidak tersedia AKI rutin tahunan, data jumlah kematian ibu tetap merupakan alat penting untuk mengevaluasi efektivitas program KIA dan untuk mendesain kebijakan berbasis bukti di Provinsi Riau.

Sementara itu, laporan rutin dari fasilitas kesehatan di Provinsi Riau mencatat jumlah kematian ibu, yaitu jumlah ibu yang meninggal saat hamil, bersalin, atau dalam masa nifas (hingga 42 hari pasca persalinan), di luar kejadian akibat kecelakaan. Data jumlah kematian ini digunakan untuk pemantauan program dan perencanaan intervensi di daerah, meskipun tidak dapat langsung digunakan untuk menghitung AKI secara akurat tanpa survey.



GAMBAR 5.1
JUMLAH KEMATIAN IBU (KEHAMILAN, KELAHIRAN, NIFAS) PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2024

No.	Provinsi / Kabupaten - Kota	Jumlah Kematian Ibu (Jiwa)						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Kuantan Singingi	5	10	14	11	10	8	4
2	Kab. Indragiri Hulu	11	11	10	12	16	12	13
3	Kab. Indragiri Hilir	9	7	10	17	8	15	17
4	Kab. Pelalawan	12	10	8	8	6	7	2
5	Kab. Siak	11	12	9	22	7	15	7
6	Kab. Kampar	11	11	11	7	20	11	8
7	Kab. Rokan Hulu	9	7	7	14	6	3	5
8	Kab. Bengkalis	12	14	21	20	10	15	5
9	Kab. Rokan Hilir	13	13	14	18	11	9	20
10	Kab. Kep. Meranti	5	7	8	7	10	5	5
11	Kota Pekanbaru	6	13	14	22	5	13	14
12	Kota Dumai	5	10	3	22	5	9	7
	TOTAL	109	125	129	180	114	122	107

Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Jumlah kematian ibu di Provinsi Riau mengalami tren peningkatan signifikan pada tahun 2021, yaitu mencapai 180 jiwa, yang kemungkinan besar berkaitan dengan gangguan akses layanan kesehatan selama pandemi COVID-19, termasuk penurunan kunjungan ANC (Antenatal Care), keterlambatan rujukan, dan beban sistem kesehatan.

Setelah 2021, terdapat penurunan bertahap, dengan jumlah kematian ibu pada tahun 2024 tercatat 107 jiwa, lebih rendah dibandingkan tahun 2018 (109 jiwa). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan akses dan kualitas pelayanan maternal, meskipun jumlah ini masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan target nasional untuk penurunan angka kematian ibu.

Secara keseluruhan, jumlah kematian ibu di Provinsi Riau sudah kembali menurun setelah lonjakan di masa pandemi, namun masih fluktuatif dan menunjukkan perlunya penguatan tata kelola sistem rujukan, pemerataan layanan, serta edukasi kepada ibu hamil terkait tanda bahaya dan pentingnya pemeriksaan rutin.

Beberapa kabupaten/kota memberikan kontribusi signifikan terhadap jumlah kematian ibu di tingkat provinsi, antara lain :

- Kabupaten Rokan Hilir : Menjadi penyumbang tertinggi pada tahun 2024 dengan 20 kematian ibu, dan cenderung menunjukkan angka yang tinggi



dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus, terutama terkait efektivitas sistem rujukan dan deteksi dini komplikasi obstetri.

- Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir : Menunjukkan jumlah kematian ibu yang relatif tinggi dan stabil. Pada tahun 2024, Indragiri Hulu mencatat 13 jiwa, sementara Indragiri Hilir 17 jiwa. Pola ini mengindikasikan perlunya penguatan pelayanan kesehatan ibu di wilayah pedesaan serta peningkatan aksesibilitas terhadap fasilitas bersalin yang memadai.
- Kota Pekanbaru dan Kota Dumai : Sebagai wilayah dengan rumah sakit rujukan dan fasilitas kesehatan tersier, jumlah kematian ibu tetap cukup tinggi, yaitu masing-masing 14 jiwa dan 7 jiwa pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan tata kelola sistem rujukan, penguatan komunikasi antar fasilitas, serta peningkatan mutu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di fasilitas rujukan.

Sementara itu, beberapa kabupaten menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah kematian ibu, yang patut diapresiasi dan dijadikan contoh praktik baik :

- Kabupaten Pelalawan: Berhasil menurunkan jumlah kematian ibu dari 7 jiwa pada tahun 2023 menjadi 2 jiwa pada tahun 2024, yang dapat mencerminkan keberhasilan intervensi program KIA di tingkat lokal.
- Kabupaten Bengkalis : Mengalami penurunan dari 15 jiwa (2023) menjadi 5 jiwa (2024). Penurunan ini mengindikasikan dampak positif dari peningkatan layanan kesehatan ibu, baik melalui penguatan fasilitas, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, maupun efektivitas sistem rujukan.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan jumlah kematian ibu dalam dua tahun terakhir, jumlah kematian ibu di Provinsi Riau masih tergolong tinggi dan perlu terus ditekan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

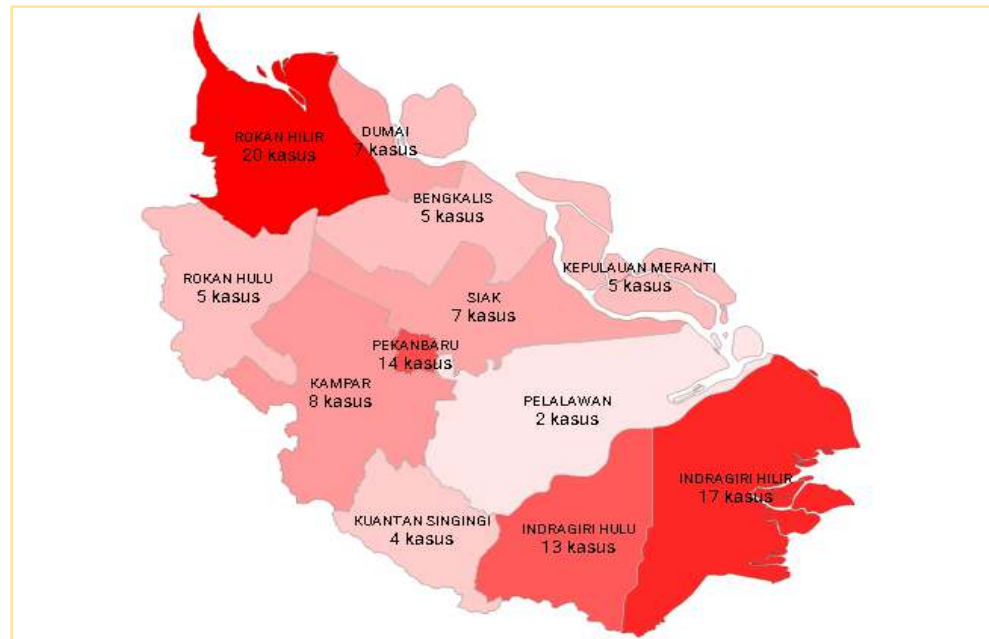
- Peningkatan akses dan mutu pelayanan ANC terpadu di tingkat puskesmas.
- Penguatan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk setiap kematian ibu.
- Pemetaan wilayah risiko tinggi dan penguatan jejaring rujukan ibu hamil risiko tinggi.



- Edukasi masyarakat, terutama ibu hamil dan keluarganya, mengenai tanda bahaya kehamilan dan pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan.

Sedangkan gambaran jumlah kematian ibu di Kabupaten/Kota dapat dilihat dari peta dibawah ini.

GAMBAR 5.2
PETA SEBARAN KEMATIAN IBU PER KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dari peta diatas diketahui beberapa Kab/Kota yang besar kasus kematian ibu adalah Kabupaten Rokan Hilir 20 kasus, Indragiri Hilir 17 kasus dan Pekanbaru 14 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun lalu terjadi peningkatan jumlah kematian ibu dimana jumlah kematian ibu di Provinsi Riau tahun 2022 berjumlah 114 kasus dan meningkat di tahun 2023 menjadi 122 kasus kematian dan untuk tahun 2024 menurun menjadi 107 kasus.

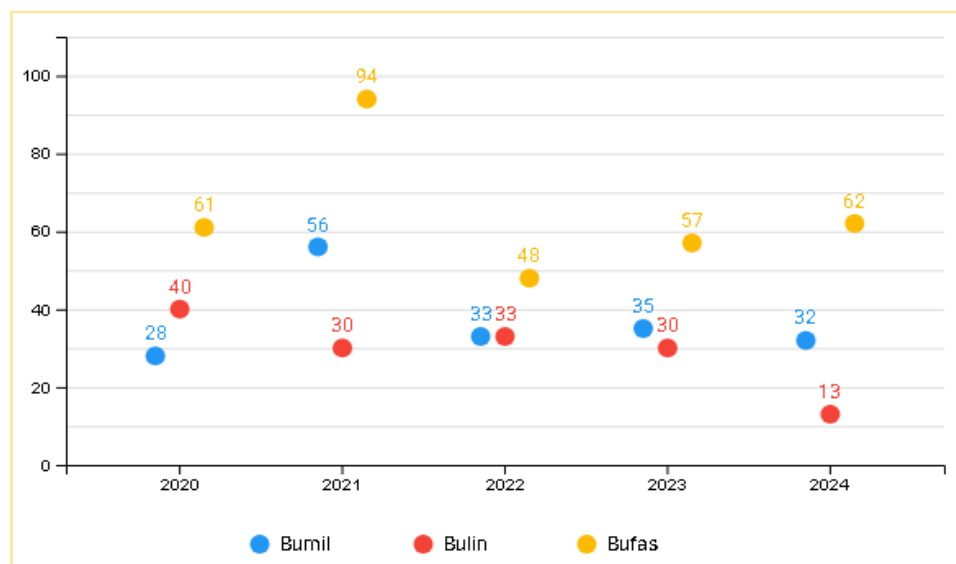
Upaya penurunan kasus kematian dapat digambarkan dari pendekatan program cakupan pemeriksaan kehamilan (antenatal care), penyediaan fasilitas pelayanan persalinan dan pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu nifas. Mencegah kematian ibu, khususnya saat persalinan telah menjadi perhatian baik secara global dan nasional. Salah satu target dalam SDGs adalah untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (Target 3,1). Memastikan seluruh wanita memiliki akses terhadap



kontrasepsi, menyediakan perawatan untuk melahirkan, serta akses perawatan darurat yang tepat waktu pada ibu hamil ketika akan melahirkan dinilai menjadi upaya terbaik dalam upaya mencapai target AKI.

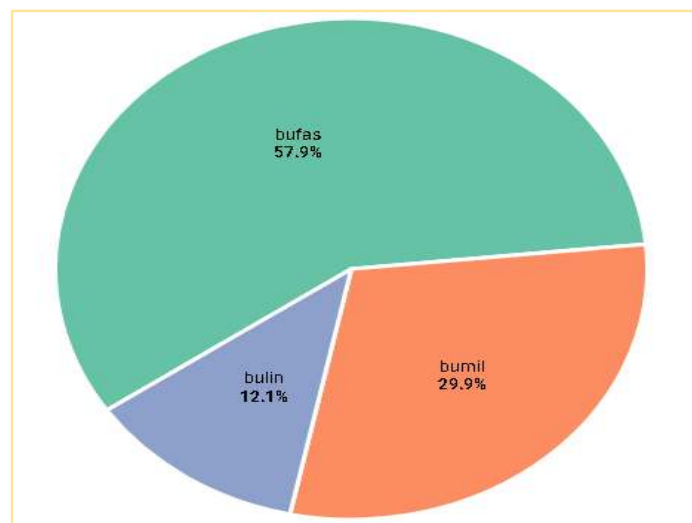
Selanjutnya memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan kematian maternal telah disepakati setiap kasus kematian harus dilaporkan dalam aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) dan melampirkan format otopsi verbal kematian maternal dan perinatal, dalam audit maternal revisi dalam perjalanannya masih belum berjalan seperti yang diharapkan.

GAMBAR 5.3
JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT FASE PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

GAMBAR 5.4
DISTRIBUSI KEMATIAN IBU BERDASARKAN FASE KEMATIAN PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



Dari grafik diatas terlihat, persentase kematian Ibu berdasarkan fase (kehamilan, persalinan dan nifas) yang terbanyak di provinsi Riau adalah pada saat nifas yaitu 62 kasus (57,94%). Sementara kematian ibu pada saat hamil sejumlah 32 kasus (29,91%) dan kematian ibu pada saat bersalin sejumlah 13 kasus (12,15%).

Tingginya kematian ibu saat fase nifas ini dikarenakan proses nifas mempengaruhi berbagai kondisi kesehatan ibu terutama yang terbanyak adalah perdarahan pasca persalinan, infeksi di masa nifas dan hipertensi pada masa nifas, untuk itu dibutuhkan penatalaksanaan ibu nifas sesuai standar, berdasarkan laporan kabupaten/kota Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2024, Cakupan Pelayanan Nifas sesuai standar (KF lengkap/KF4) baru mencapai 79,4% dari target 95%.

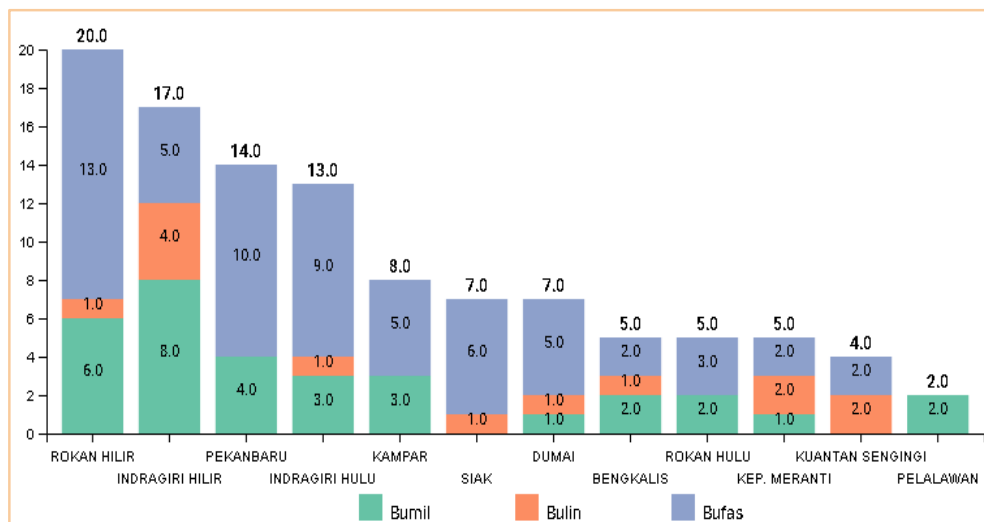
Penyebab tingginya proporsi kematian ibu pada saat nifas dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

- Ibu selama kehamilan tidak mendapatkan penanganan Antenatal Care sesuai standar.
- Kurangnya kompetensi petugas dalam pertolongan persalinan dan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
- Pelayanan nifas yang tidak sesuai standar.
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung persalinan di fasilitas kesehatan.
- Respon time Rumah Sakit yang lambat

Dari seluruh jumlah kematian ibu hamil, bersalin dan masa nifas ini dapat dirincikan jumlah kematiannya per Kabupaten/Kota seperti grafik di bawah ini :



GAMBAR 5.5
JUMLAH KEMATIAN IBU BERDASARKAN FASE MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



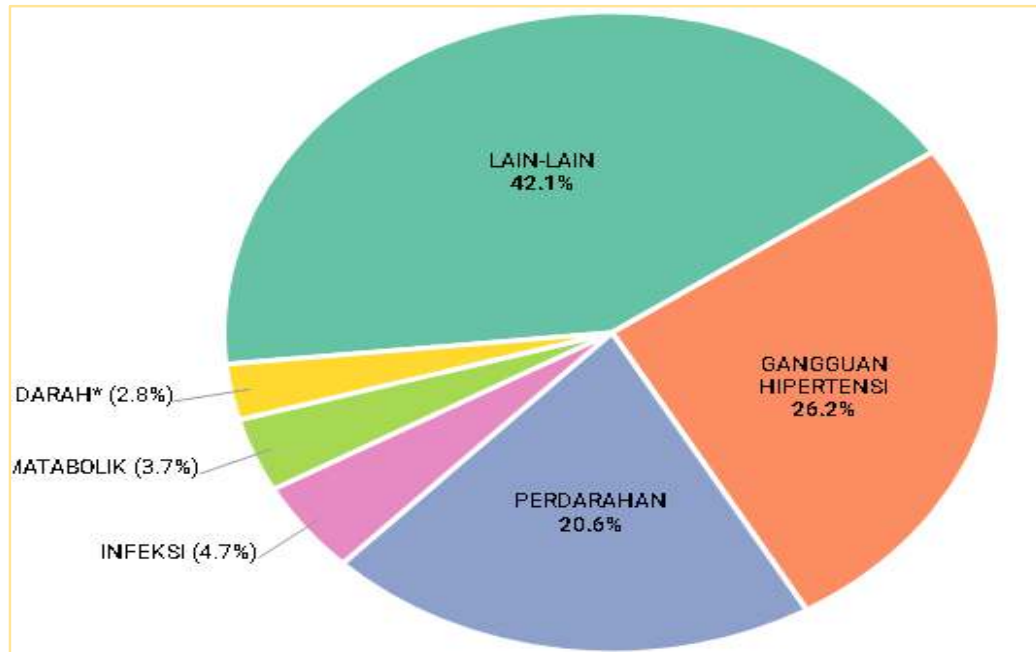
Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Berdasarkan Lap rutin Gizi KIA Tahun 2024 Provinsi Riau, jumlah kematian ibu adalah 107 orang dengan penyebab kematian ibu tertinggi adalah hipertinggi 28 kasus (26,17%), perdarahan 22 kasus (20,56%), infeksi 5 kasus (4,67%), gangguan metabolik 4 kasus (3,74%), kelainan jantung dan pembuluh darah 3 kasus (2,80%). Untuk Penyebab lain-lain yang 45 kasus kematian(42,06%) ini disebabkan karena Anemia, Hipertensi, Jantung, Diabetes Melitus, HIV, IMS, Malaria, TB, Hepatitis, dan penyakit lain yang mengakibatkan semakin beratnya kondisi ibu yang terjadi dalam kehamilan, oleh karena itu sangat dibutuhkan pelayanan yang terintegrasi pada saat pemeriksaan kehamilan dengan melakukan skrining faktor resiko.

Data distribusi kematian ibu berdasarkan penyebab kematian di Provinsi Riau dapat dilihat pada diagram berikut:



GAMBAR 5.6
PERSENTASE KEMATIAN IBU HAMIL BERDASARKAN PENYEBABNYA PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dari penyebab kematian Ibu yang perlu diperhatikan adalah tingginya penyebab kematian karena penyakit lain-lainnya, dimana tahun 2024 (42,06%) 2023 (22,9%) 2022 (35%), 2021 (15%), 2020 (45%), 2019 (39%).

Kemudian masih tingginya kematian disebabkan lain-lain disebabkan beberapa faktor antara lainnya :

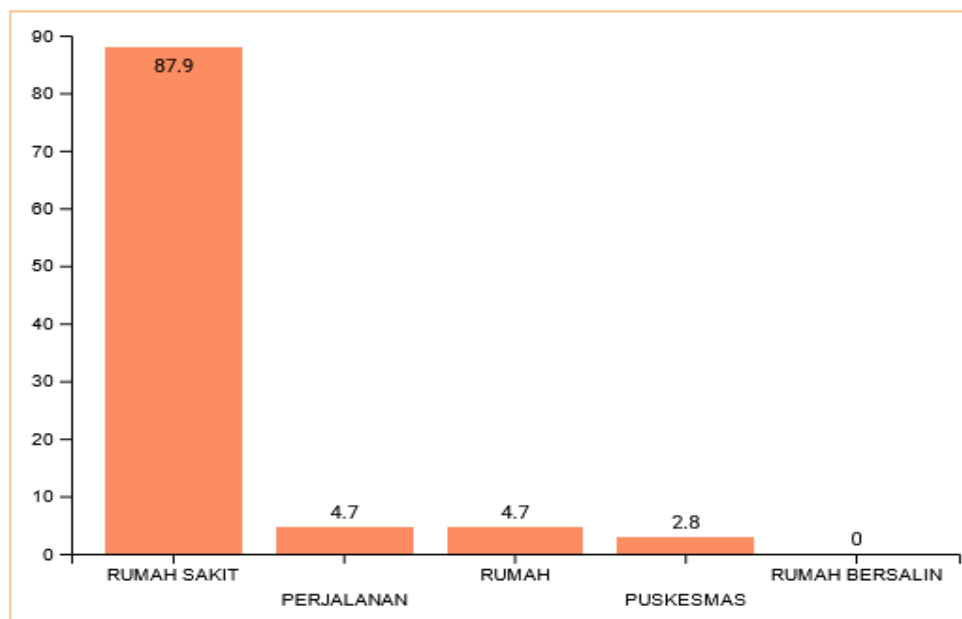
1. Belum semua pelayanan ANC terintegrasi (berkualitas), beberapa analisis data hasil data .
2. Tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat) yang dilatih penanganan kegawatdaruratan maternal dan perinatal masih rendah/sedikit, yaitu tenaga kesehatan dari 3 Kabupaten (Rokan Hilir, Pelalawan dan Kuantan Singingi) berasal dari 14 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit.
3. Pelaksanaan AMPSR yang belum maksimal dilakukan kabupaten/kota.

Untuk itu perlu upaya yang lebih keras lagi dari semua pelaksana kegiatan, penanggung jawab, lintas sektor dan lintas program terkait dalam menurunkan jumlah kematian ibu di masa yang angka datang. Kasus kematian Ibu bisa terjadi pada saat ibu hamil, ibu bersalin atau pada ibu masa nifas. Dan tempat terjadinya kematian ibu tersebut bisa terjadi di Rumah, di Puskesmas, di Polindes/Poskesdes, Rumah Bersalin, Bidan Praktek Swasta/Mandiri, dan bisa



saja terjadi di Rumah Sakit. Berikut adalah diagram tempat kematian ibu Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2024.

GAMBAR 5.7
PERSENTASE KEMATIAN IBU MENURUT TEMPAT KEJADIAN PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dari grafik diatas terlihat jumlah kematian berdasarkan tempat yang mendominasi di Provinsi Riau adalah kematian di RS yaitu 94 kasus (87,9%) dari 122 kasus kematian. Apabila dibandingkan data tahun 2023, kematian ibu di Rumah Sakit tahun 2023 sebanyak 90 kasus (73,8%) dan tahun 2022 sebanyak 78 kasus (68,4%), angka menunjukkan terjadinya peningkatan kematian ibu di Rumah sakit.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi banyaknya kematian ibu di RS dan dalam perjalanan ke RS diantaranya sebagai berikut:

- Deteksi faktor resiko ibu hamil yang masih rendah dimana berdasarkan data tahun 2024, Cakupan Pelayanan Antenatal K1 oleh dokter mencapai 91,5%, K6 oleh dokter 77,45%. Sedangkan berdasarkan Permenkes No.21 Tahun 2021, standar pelayanan pada ibu hamil minimal 6 kali dengan pemeriksaan K1 dan K5 oleh dokter untuk mengetahui faktor resiko serta untuk mengetahui apakah ada komplikasi lain termasuk melakukan Skrining Preeklampsia pada ibu hamil
- RS belum Mampu PONEK, terutama belum tersedianya bank darah.



- Rujukan kasus dari pelayanan kesehatan primer belum memenuhi standar.
- Perencanaan persalinan yang belum mantap dikarenakan belum maksimalnya Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi di desa.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam penurunan kematian ibu adalah melalui penerapan Audit Maternal Perinatal (AMP) dan Autopsi Verbal kematian ibu. AMP merupakan suatu kegiatan untuk menelusuri sebab kesakitan dan kematian ibu dan perinatal untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama melalui pembahasan kasus. Kegiatan ini melibatkan dinas kesehatan kabupaten/kota, para pemberi pelayanan dasar (puskesmas dan jajarannya) dan rumah sakit kabupaten/kota, yang tergabung dalam satu tim.

Melalui pertemuan pembahasan kasus, tim AMP kabupaten/kota dapat mengidentifikasi faktor medik, non medik dan faktor pelayanan kesehatan yang berpengaruh terhadap kematian ibu dan perinatal sehingga diharapkan dapat menetapkan prioritas pemecahan masalah dalam upaya penurunan AKI dan AKB.

2. Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil

a. Cakupan Kunjungan Antenatal Care (K4)

Antenatal Care K4 adalah Persentase ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal minimal 4 kali sesuai dengan standar (10T) ke tenaga kesehatan dengan ketentuan: minimal 1 kali pada trimester 1, minimal 1 kali pada trimester 2 dan minimal 2 kali pada trimester 3. Kunjungan antenatal K4 merupakan salah satu indikator kinerja program kesehatan keluarga yang harus dicapai (SPM Bidang Kesehatan berdasarkan PMK No.4 Tahun 2019).

Adapun Pelayanan Antenatal Care yang sesuai standar (10T), yaitu :

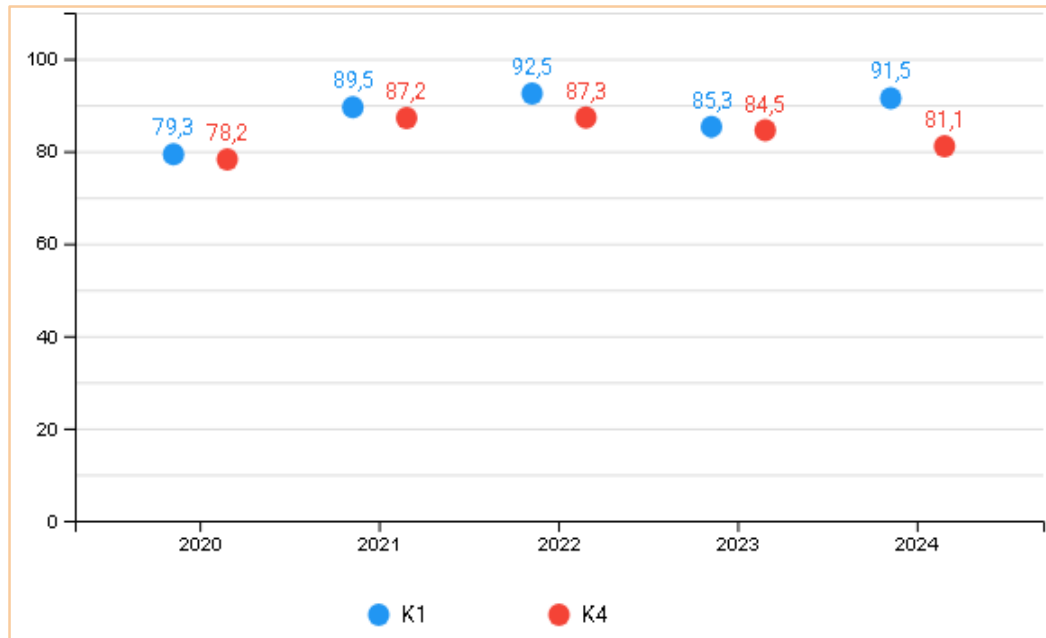
- 1) Timbang Berat Badan dan Ukur Tinggi Badan,
- 2) Ukur Tekanan Darah,
- 3) Nilai status gizi (Ukur LILA),
- 4) Ukur tinggi fundus uteri,
- 5) Presentasi janin dan DJJ,
- 6) Nilai status imunisasi TT dan berikan bila perlu,
- 7) Berikan tablet FE minimal 90 Tablet,
- 8) Tes Laboratorium (Rutin dan khusus),



- 9) Tatalaksana kasus, dan
- 10) Temu Wicara (konseling) P4K serta KB Pasca Salin.

Grafik berikut adalah Cakupan Pelayanan Kesehatan (K1 dan K4) di Provinsi Riau dari tahun 2020 sampai tahun 2024.

GAMBAR 5.8
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN (K1 DAN K4) PADA IBU HAMIL PROVINSI RIAU
TAHUN 2020-2024



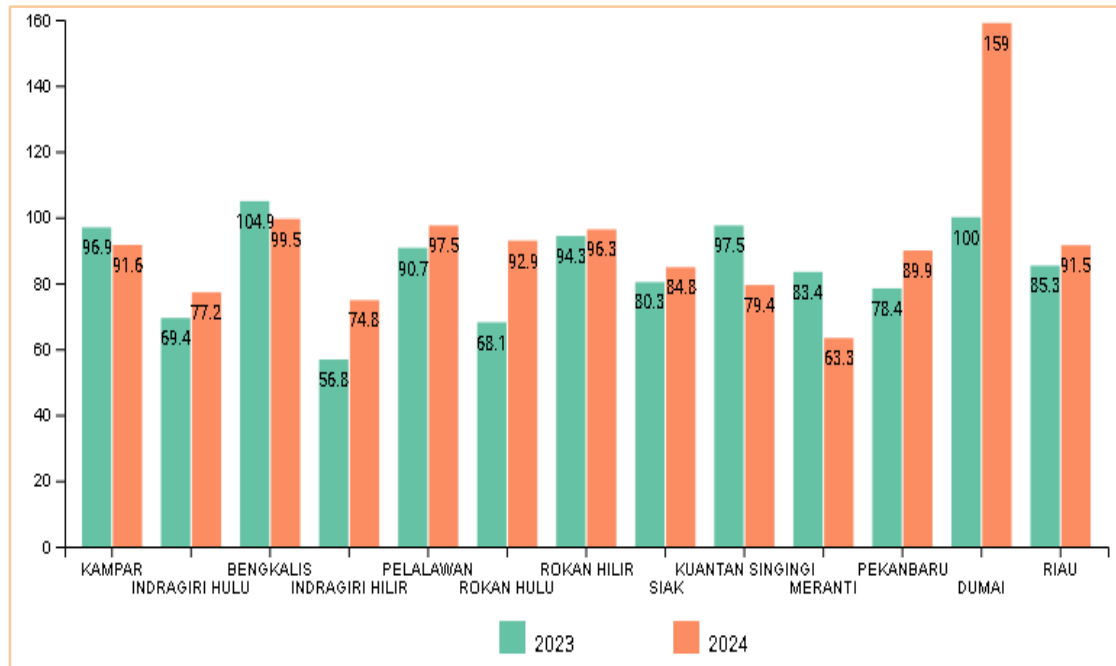
Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dari grafik diatas terlihat cakupan pelayanan kesehatan (K1 dan K4) dari tahun 2020 sampai tahun 2024 terlihat fluktuatif. Cakupan pelayanan kesehatan pada ibu hamil tahun 2024 terjadi penurunan dan belum mencapai target K4 yang telah ditetapkan (95%).

Hal ini menunjukan bahwa masih kurangnya kesadaran ibu dalam memeriksakan kehamilannya dan masih perlunya optimalisasi promosi kesehatan dalam meningkatkan kesadaran ibu untuk memeriksakan kehamilannya. Untuk melihat upaya pencapaian cakupan Pelayanan Kesehatan (K1) pada ibu hamil kabupaten/Kota Provinsi Riau di tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



GAMBAR 5.9
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN (K1) PADA IBU HAMIL MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2023-2024

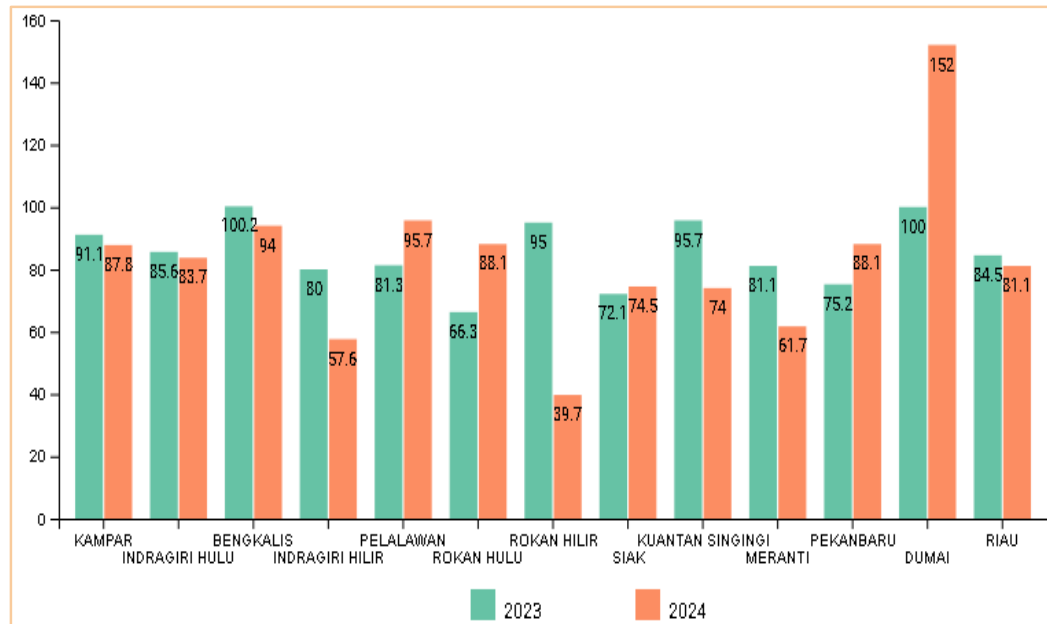


Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dalam grafik terlihat bahwa cakupan pelayanan kesehatan K1 pada ibu hamil di Kabupaten/Kota Provinsi Riau sebagian besar mengalami penurunan. Cakupan pelayanan kesehatan K1 pada ibu hamil yang telah mencapai 100 % ada di kota Dumai diikuti Kabupaten Bengkalis (99,5%) dan Kabupaten Pelalawan (97,5%), sedangkan cakupan pelayanan kesehatan K1 pada ibu hamil yang paling rendah di Kabupaten Kep. Meranti (63,3%) diikuti Kabupaten Indragiri Hilir (74,8%) dan Kabupaten Indragiri Hulu (77,2%). Sedangkan untuk capaian cakupan pelayanan kesehatan K4 pada ibu hamil dari Kabupaten/Kota dapat kita lihat dari grafik berikut ini :



GAMBAR 5.10
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN K4 PADA IBU HAMIL MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2023 -2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dari grafik diatas dapat dilihat Capaian indikator kinerja sasaran berupa persentase ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan Antenatal Care (K4) Provinsi Riau tahun 2024 sebesar 81,1% terjadi penurunan dibandingkan tahun 2023 (84,5%) dan jauh dibawah target Nasional yaitu 95%. Ada 2 Kabupaten/Kota yang mencapai target Nasional dan Provinsi, yaitu Kota Dumai, yaitu 100%, Kabupaten Pelalawan 95,7%. Sementara 10 Kabupaten/Kota yang lainnya masih dibawah target Nasional.

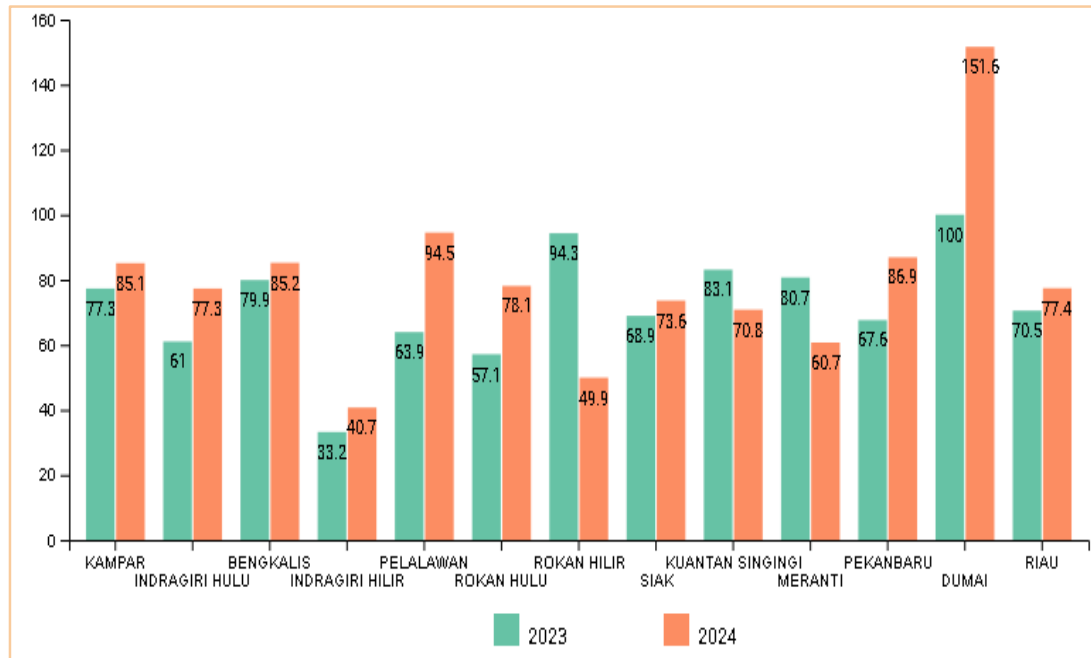
b. Cakupan Pemeriksaan Ibu Hamil 6 Kali (ANC 6x)

Antenatal Care 6 (enam) kali adalah Persentase ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal minimal 6 kali sesuai dengan standar (10T) ke tenaga kesehatan dengan ketentuan : minimal 1 kali pada trimester 1 dengan pemeriksaan USG oleh dokter, minimal 2 kali pada trimester 2 dan minimal 3 kali pada trimester 3 dengan minimal 1 kali pemeriksaan USG oleh dokter. Kunjungan antenatal 6 (enam) kali merupakan salah satu indikator kinerja program kesehatan keluarga yang harus dicapai dengan target Nasional 80%.

Cakupan kunjungan ANC 6 kali di Provinsi Riau tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



GAMBAR 5.11
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN K6 PADA IBU HAMIL MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2023 -2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dari grafik 2 diatas dapat dilihat Capaian indikator kinerja sasaran berupa persentase ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan Antenatal Care 6 (enam) kali di Provinsi Riau tahun 2024 (77,4%) belum mencapai target Nasional ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC 6 kali adalah 80%. Dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, hanya 5 Kabupaten/Kota yang sudah mencapai target 80%, yaitu Kota Dumai (100%), Kabupaten Pelalawan (94,5%), Kota Pekanbaru (86,9%), Kabupaten Bengkalis (85,2%) dan Kabupaten Kampar (85,1%). Dan capaian K6 terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir (40,7%), Kabupaten Rokan Hilir (49,9%) dan Kabupaten Kep. Meranti (60,7%).

c. Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah Pemberian 90 Tablet tambah Darah pada Ibu Hamil

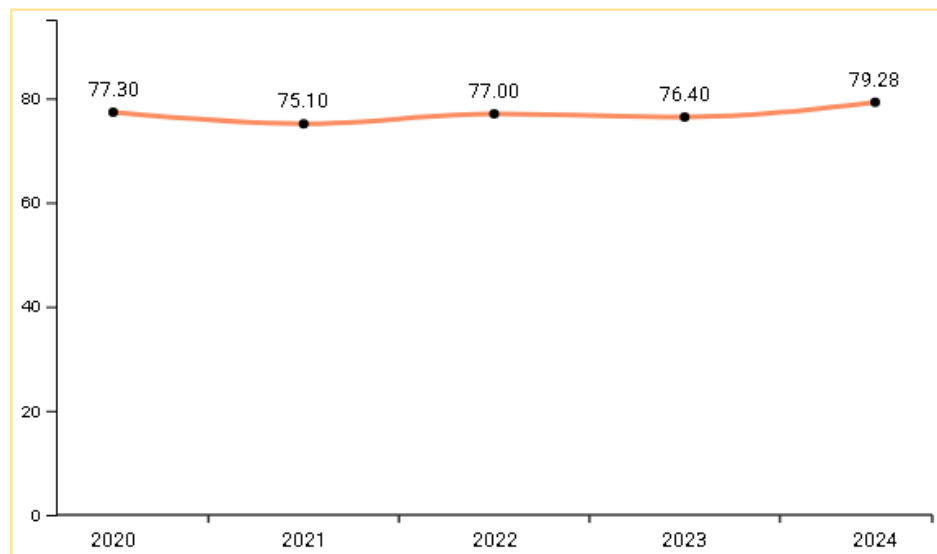
Anemia gizi yang terutama disebabkan oleh kekurangan zat besi merupakan salah satu masalah gizi utama di Indonesia yang mempunyai dampak terhadap tingkat kesehatan masyarakat antara lain pada tingginya angka kematian ibu dan bayi, rendahnya prestasi belajar pada anak sekolah serta menurunnya produktivitas kerja. Pemberian Tablet Tambah Darah kepada ibu sebanyak



minimal 90 tablet selama kehamilan merupakan salah satu intervensi yang penting dalam rangka mencegah anemia ibu hamil.

Masalah kekurangan gizi dan anemia ibu hamil sangat berbahaya terhadap perkembangan janin terhambat, BBLR, bahkan terhadap kesehatan ibu hamil sendiri. Anemia ibu hamil juga berisiko terjadinya perdarahan dan kematian pada ibu dan bayi. Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, merupakan langkah pencegahan dari terjadinya perdarahan selama kehamilan, persalinan dan nifas. Capaian tahun 2024 sebesar 79,3% yang masih jauh dari target 90% dan capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan ibu hamil yang mengkonsumsi Tablet Fe3 ini baru mencapai 78,5%. Gambaran ibu hamil yang mendapat tablet Fe3 dari tahun 2019 – 2024 bisa dilihat dari gambar dibawah ini.

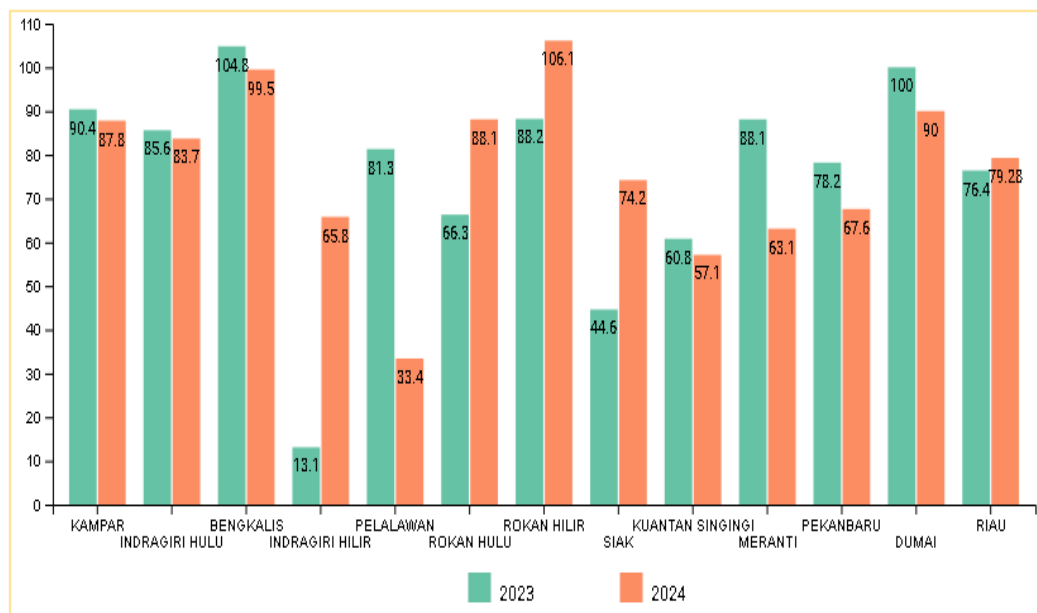
GAMBAR 5.12
PERSENTASE IBU HAMIL YANG MENDAPAT TABLET FE 3 DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



GAMBAR 5.13
PERSENTASE IBU HAMIL YANG MENDAPAT TABLET FE3 PROVINSI RIAU TAHUN 2023 -2024



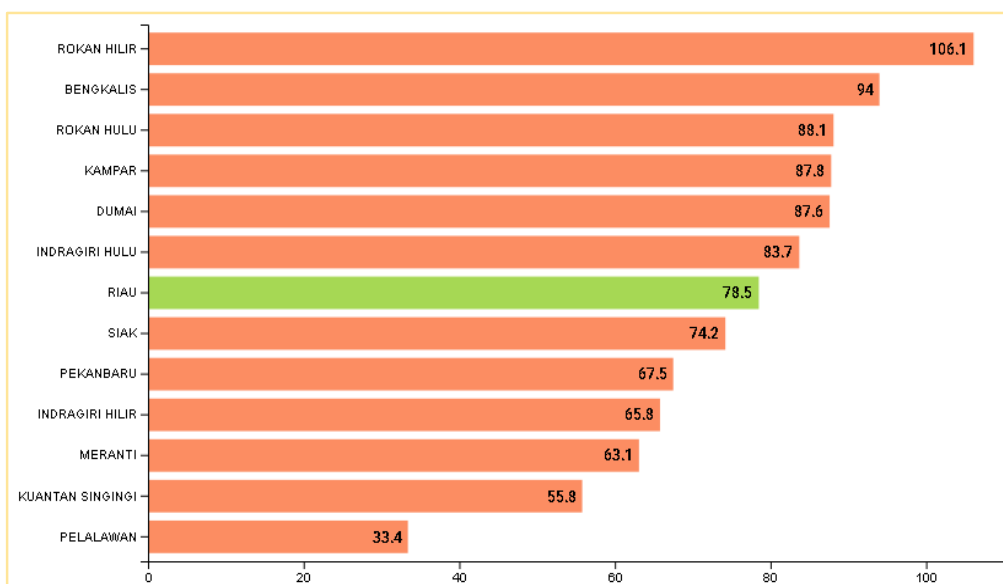
Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Laporan tahun 2024, menunjukkan cakupan ibu hamil mendapat tablet tambah darah di Provinsi Riau masih belum mencapai target 90%, hanya tercapai 79,3%. Dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau hanya 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang sudah mencapai target. Cakupan paling rendah adalah di Kabupaten Pelalawan, yaitu 33,4%.

Hasil monitoring ke puskesmas diketahui tidak semua ibu hamil mendapatkan TTD pada kunjungan pertama. Selain itu, masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan ibu menyebabkan ibu hamil walaupun sudah diberi TTD oleh petugas tidak langsung mau meminumnya dengan alasan masih mual, atau alasan lupa dan malas. Kondisi lain yang ditemui di lapangan adalah ibu hamil hanya diberi 10 tablet setiap kali datang periksa kehamilan ke puskesmas, untuk 10 hari. Sedangkan ibu akan berkunjung ke Puskesmas atau faskes biasanya dalam waktu 1-2 bulan berikutnya.



GAMBAR 5.14
PERSENTASE IBU HAMIL YANG MENGKONSUMSI TABLET FE3 DI PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah persentase untuk ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe3 di Provinsi Riau tahun 2024 adalah sebesar 79,3% terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2023 (76,4%) tahun 2022 (77%) dan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun terjadi peningkatan ibu hamil yang mendapat tablet Fe3 namun capaian ini masih jauh dari target yang ditetapkan (90%), kondisi ini harus mendapat perhatian mengingat pentingnya konsumsi tablet Fe3 mencegah anemia pada ibu hamil dan terjadinya perdarahan pada persalinan, dan untuk Provinsi Riau 22 % lebih kematian ibu disebabkan oleh pendarahan.

3. Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Kesehatan persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan. Pelayanan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah Persalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Persalinan dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu) orang tenaga medis dan 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Tim sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- Dokter, bidan dan perawat
- Dokter dan 2 (dua) bidan

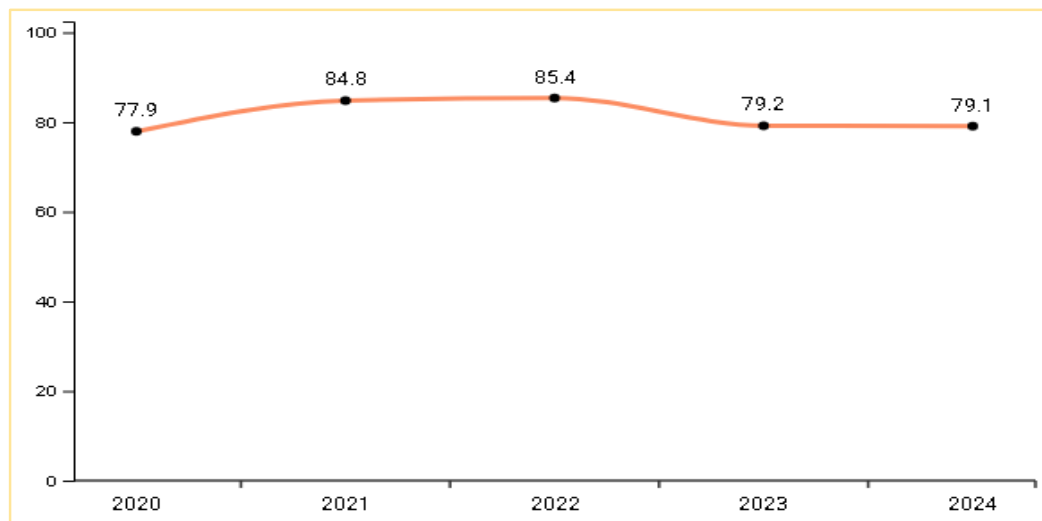


Dalam hal terdapat keterbatasan akses persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, persalinan tanpa komplikasi dapat dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan. Pelayanan persalinan harus memenuhi 7 (tujuh) aspek yang meliputi :

1. Membuat keputusan klinik;
2. Asuhan sayang ibu dan sayang bayi, termasuk Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan resusitasi bayi baru lahir;
3. Pencegahan infeksi
4. Pencegahan penularan penyakit dari ibu ke anak;
5. Persalinan bersih dan aman
6. Pencatatan atau rekam medis asuhan persalinan; dan
7. Rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi

Dengan masih tingginya angka kematian ibu dan bayi maka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan dilaksanakan di fasilitas kesehatan menjadi salah satu upaya yang diharapkan dapat menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi. Berikut adalah Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang ditolong Nakes dan Fasyankes di Provinsi Riau tahun 2020 – 2024.

GAMBAR 5.15
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU BERSALIN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

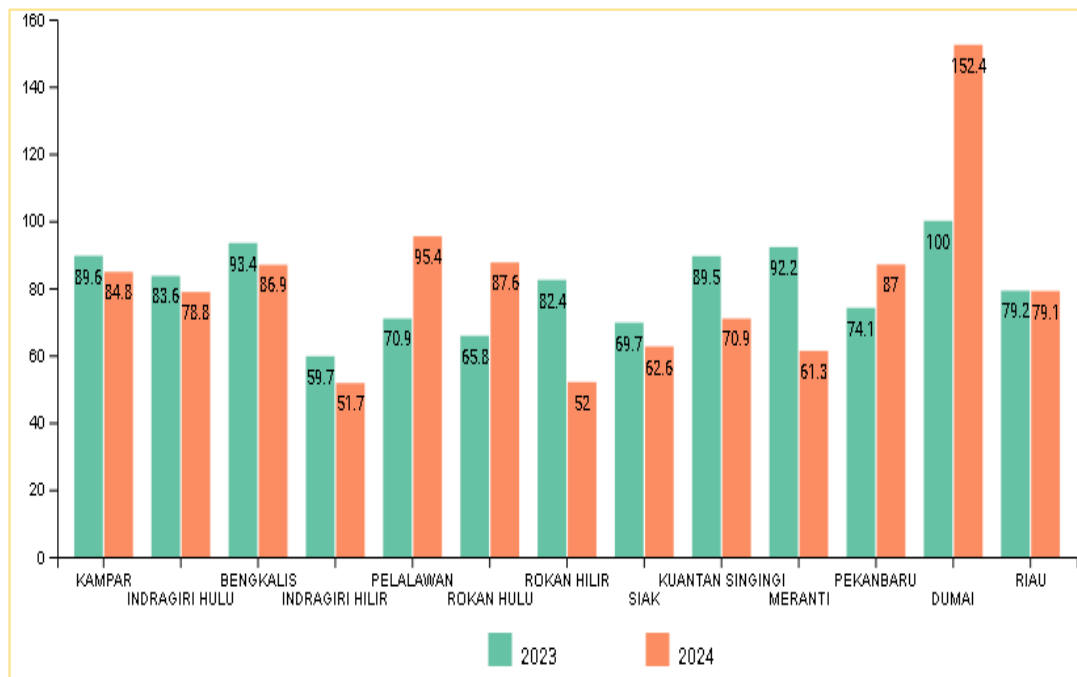
Dari grafik ini dapat terlihat bahwa cakupan pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan masih perlu mendapat perhatian karena disamping capaian persalinan fasyankes mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, juga capaian masih jauh dari target yang telah ditetapkan, dimana persalinan di



fasilitas kesehatan tahun 2022 (85,4%), tahun 2023 (79,2%) dan tahun 2024 (79,11) sedangkan target yang harus dicapai sebesar 95%.

Pertolongan Persalinan yang dilaksanakan di Fasyankes menjadi faktor penentu bagi Keselamatan persalinan dan menghambat penambahan jumlah kematian ibu. Sejak tahun 2022 ini kita telah meniadakan data persalinan oleh tenaga kesehatan karena yang menjadi target dan fokus adalah persalinan di fasilitas kesehatan guna menekan angka kematian ibu. Dibawah ini adalah grafik cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan tahun 2023 dan 2024.

GAMBAR 5.16
CAKUPAN PERSALINAN DI FASYANKES MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU
TAHUN 2023 -2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dari grafik diatas terlihat bahwa dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, hanya ada 2 (dua) Kabupaten/Kota sudah mencapai target yaitu Kota Dumai (100 %) dan kabupaten Pelalawan(95,37%). Sementara cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan di 10 Kabupaten/Kota lainnya masih dibawah target Nasional (95%). Kabupaten yang capaian yag terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir (51,71%) dan Rokan Hilir (51,95%).

Sehubungan baru 2 (dua) Kabupaten/Kota yang mencapai target persalinan fasyankes, maka kondisi ini benar-benar harus mendapat perhatian dari semua



pihak baik di kabupaten itu sendiri maupun di tingkat provinsi agar capaian persalinan di fasilitas kesehatan tersebut dapat meningkat dan harus dicari permasalahan yang jelas yang menjadi penyebab rendahnya capaian tersebut.

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan untuk ibu hamil masih perlu pembinaan agar capaian dapat lebih ditingkatkan. Adapun yang menjadi faktor penghambat diatas adalah sebagai berikut :

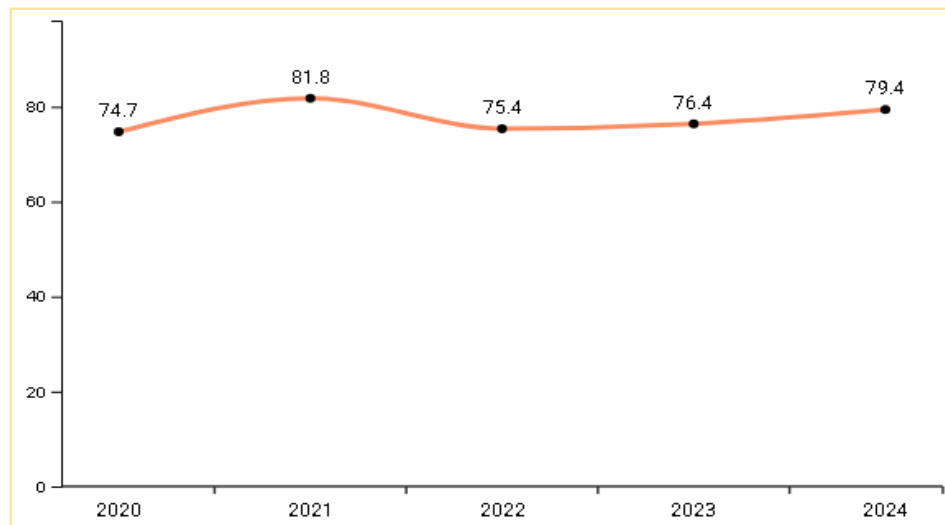
- Sistem pencatatan dan pelaporan yang belum maksimal dimana di register kohort ibu banyak form yang seharusnya diisi tetapi kosong (tidak diisi)
- Belum maksimalnya pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi
- Belum semua faskes swasta melaporkan persalinannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

4. Cakupan Pelayanan Nifas

Pelayanan Nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Pelayanan diperlukan dalam periode nifas ini karena merupakan masa krisis baik ibu maupun bayinya.

Untuk tahun 2024 diperkirakan bahwa 57,9% kematian ibu pada fase nifas. Cakupan pelayanan ibu nifas pada tahun 2024 sebesar 79,4% terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 76,4%. Cakupan ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

GAMBAR 5.17
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU NIFAS (KF LENGKAP) DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024

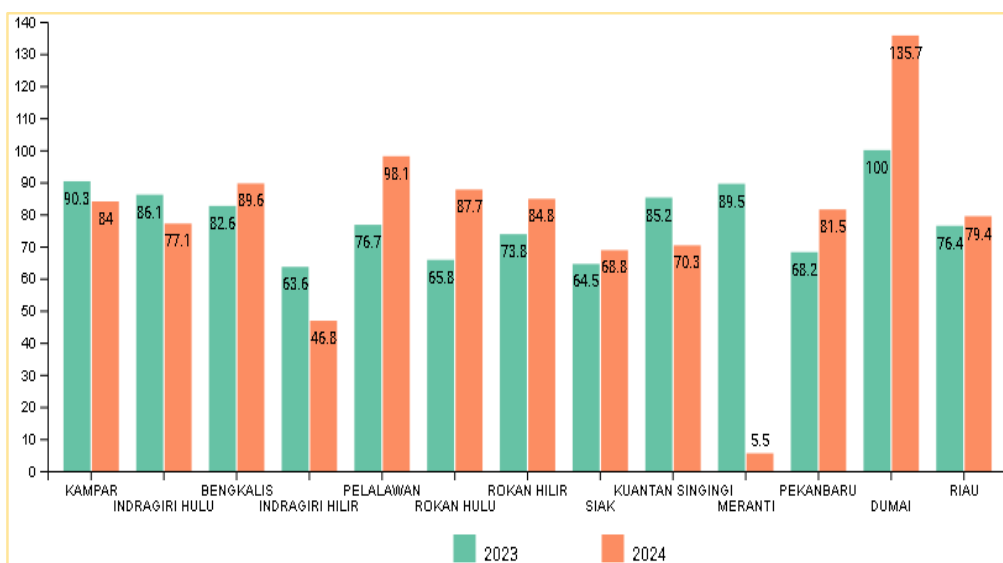


Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



Sedangkan gambaran cakupan pelayanan ibu nifas menurut Kabupaten/Kota tahun 2022, dimana capaian tertinggi kota Dumai 100%, diikuti oleh Kabupaten Kampar sebesar 90,35% diikuti Kabupaten Kep. Meranti sebesar 89,5%. Sedangkan yang terendah Kabupaten Indragiri Hilir 63,6% diikuti oleh Kabupaten Siak 64,5% dan Kabupaten Rokan Hulu 65,8%. Untuk gambaran jelasnya cakupan pelayanan ibu nifas pada grafik dibawah ini.

GAMBAR 5.18
CAKUPAN PELAYANAN IBU NIFAS (KF LENGKAP) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2023 -2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

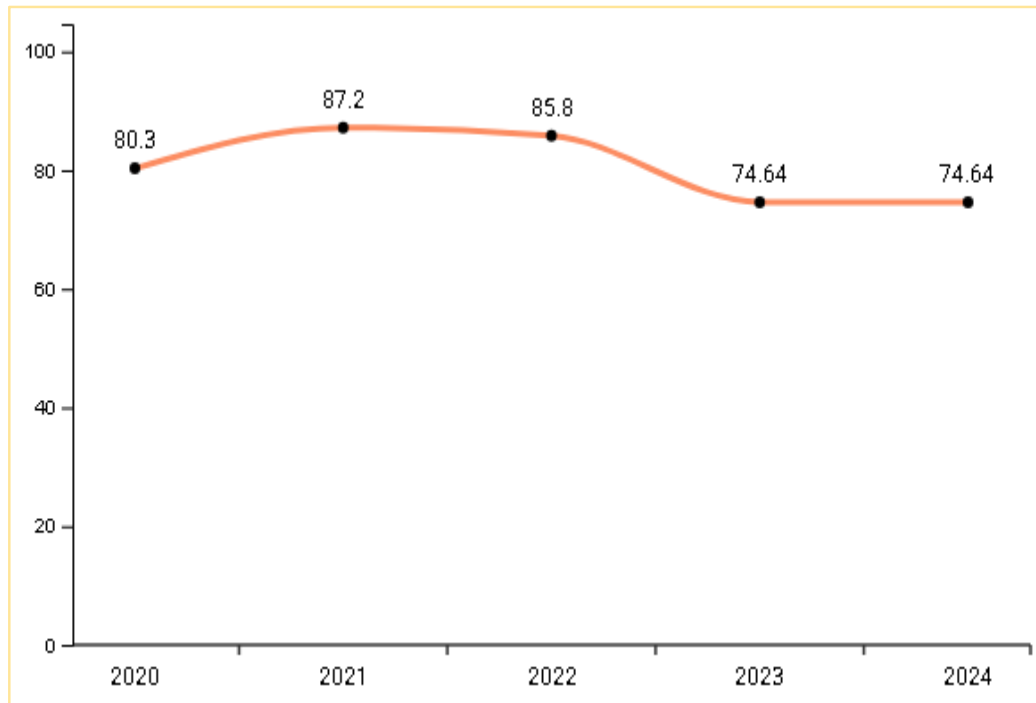
Ibu Nifas Mendapat Vitamin A

Ibu nifas adalah ibu yang baru melahirkan sampai 6 minggu setelah kelahiran bayi (0-42 hr). Pemberian vitamin A dosis tinggi yaitu 200.000 Standar Internasional (SI) diberikan kepada ibu baru melahirkan sampai hari ke-42, sebanyak 2 kapsul, yaitu satu kapsul setelah melahirkan dan satu kapsul berikutnya diberikan minimal 24 jam setelah pemberian kapsul pertama.

Dari grafik dibawah dapat dilihat bahwa cakupan ibu nifas mendapat vitamin A pada tahun 2024 sebesar 74,6% sama dengan tahun 2023 sebesar 74,6%.



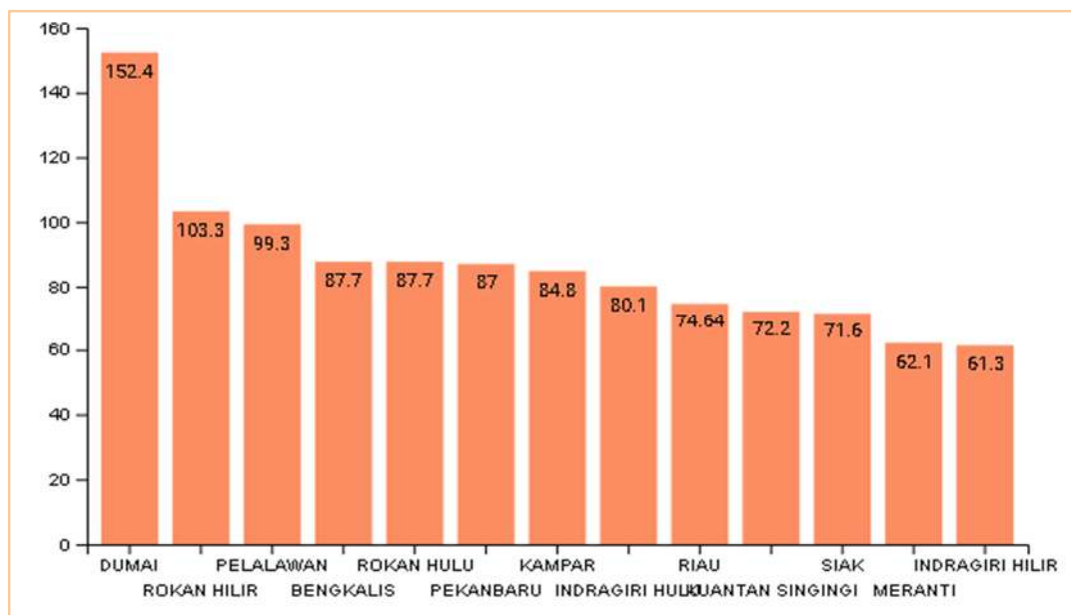
GAMBAR 5.19
CAKUPAN IBU NIFAS MENDAPATKAN VITAMIN A DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Berdasarkan laporan tahun 2024 dari 12 Kabupaten/Kota terkait cakupan pemberian vitamin A pada ibu nifas dapat dilihat pada gambar berikut.

GAMBAR 5.20
CAKUPAN IBU NIFAS MENDAPATKAN VITAMIN A MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



Untuk Kabupaten/kota yang memiliki cakupan persentase ibu nifas mendapat kapsul vitamin A dosis tinggi paling tinggi adalah Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir yang telah mencapai 100% dan Kabupaten Pelalawan 99,3%, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 61,3% diikuti Kabupaten Kepulauan Meranti 62,1% dan Kabupaten Siak Sri Indrapura 71,6%. Capaian provinsi Riau belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 79%, sedangkan capaian 74,64%. Sebagian besar kabupaten/kota sudah mencapai target. Integrasi pemberian kapsul vitamin A ibu nifas sangat penting terutama dengan program Kunjungan Nifas (KF) dan Kunjungan Neonatal (KN).

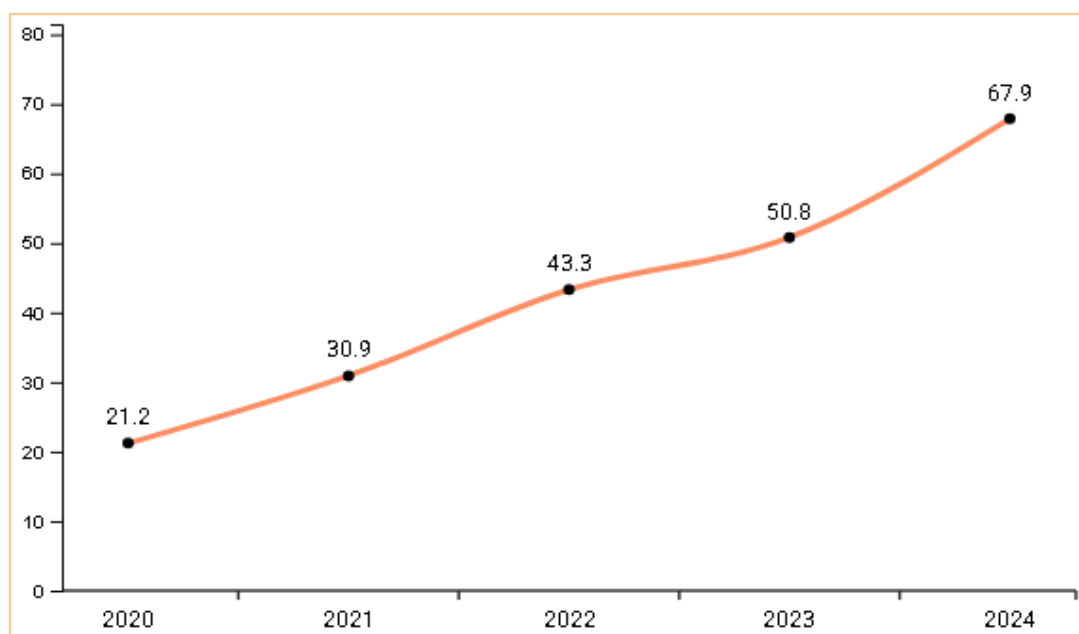
Apabila ibu nifas belum dapat kapsul pada saat sesudah persalinan, maka dapat diberikan pada kesempatan berikutnya ketika kontak dengan petugas kesehatan selama masa nifas. Ibu yang bersalin pada non kesehatan, atau tidak di fasilitas pelayanan kesehatan serta ibu yang bersalin yang RS swasta yang belum berintegrasi dengan program umumnya belum mendapat vitamin A pasca melahirkan. Oleh karena itu diharapkan kunjungan petugas pada KN dan KF 1 sampai KF3 dapat menjangkau sasaran tersebut, sehingga semua ibu nifas dapat kapsul Vitamin A.

5. Cakupan Imunisasi Td (Tetanus Difteri) Ibu Hamil Dan Wanita Usia Subur

Pemberian Imunisasi Td pada ibu hamil dan wanita usia subur diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit difteri pada bayi baru lahir. Cakupan (jumlah dan persentase) ibu hamil yang mendapatkan imunisasi Td (Tetanus difteri) dengan interval tertentu (yang dimulai saat dan atau sebelum kehamilan) dengan memperhatikan hasil skrining dan status T. Dalam pemberian imunisasi harus memperhatikan bahwa Setiap ibu hamil yang akan diimunisasi Td harus dilakukan skrining terlebih dahulu dengan melihat interval minimal, kemudian hasil skrining akan menentukan pemberian dosis imunisasi Td berikutnya pada ibu hamil.



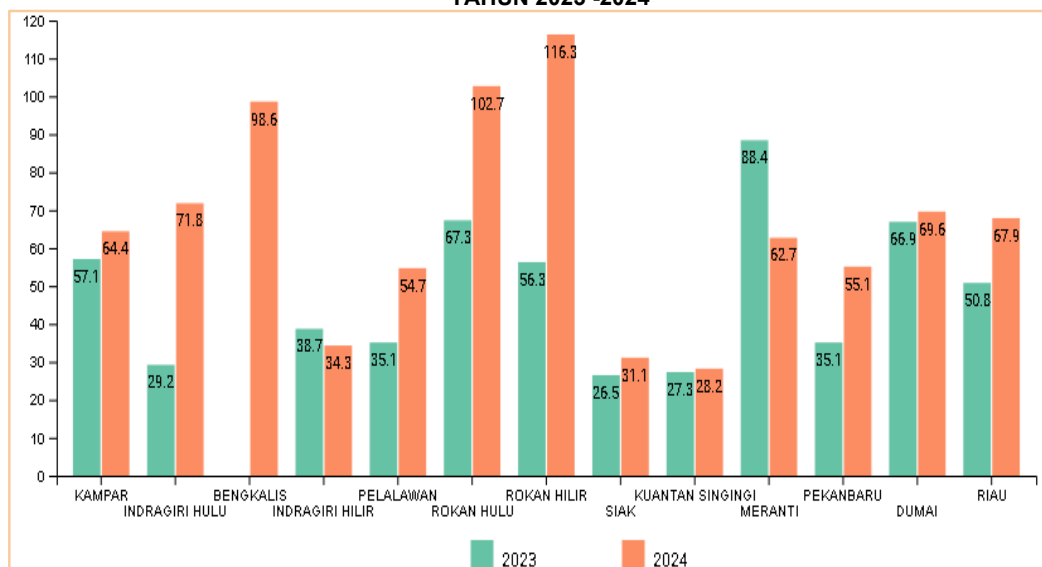
GAMBAR 5.21
CAKUPAN IMUNISASI TD2+ PADA IBU HAMIL DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Cakupan imunisasi Td2+ pada ibu hamil Provinsi Riau menunjukkan peningkatan sejak TAHUN 2020-2024 memperlihatkan capaian imunisasi sebesar 21,2% meningkat sampai dengan Tahun 2024 (67,9%). Capaian Td+ ini termasuk rendah, hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk imunisasi Td secara keseluruhan. Permasalahan pencatatan dan pelaporan merupakan jadi penyebab masih rendahnya capaian imunisasi Td2+.

GAMBAR 5.22
CAKUPAN IMUNISASI TD2+ PADA IBU HAMIL MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2023 -2024

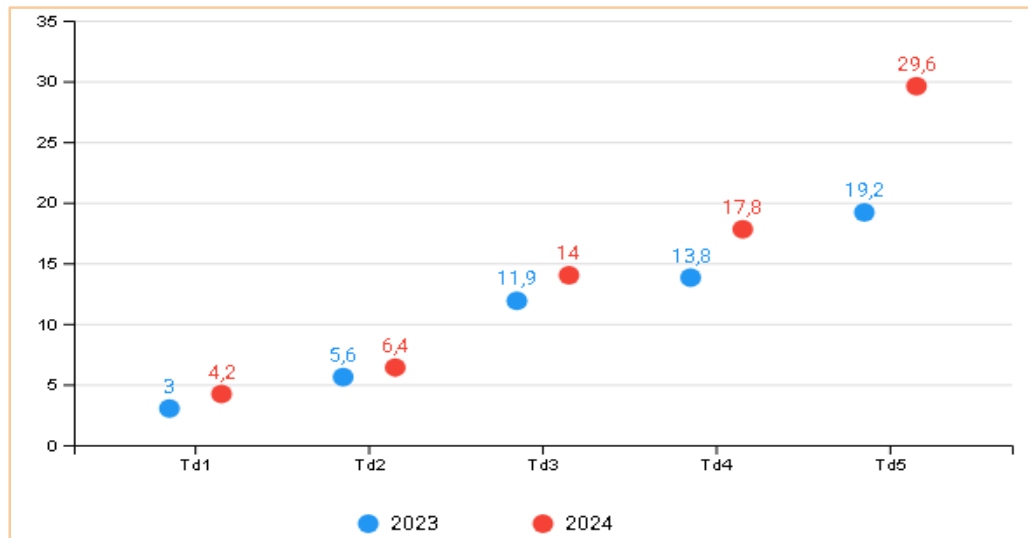


Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



Dari grafik diatas cakupan Imunisasi Td+ pada ibu hamil hampir semua kabupaten/kota pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Diharapkan untuk tahun mendatang semua ibu hamil memiliki kesadaran untuk melakukan imunisasi Td+ pada ibu hamil.

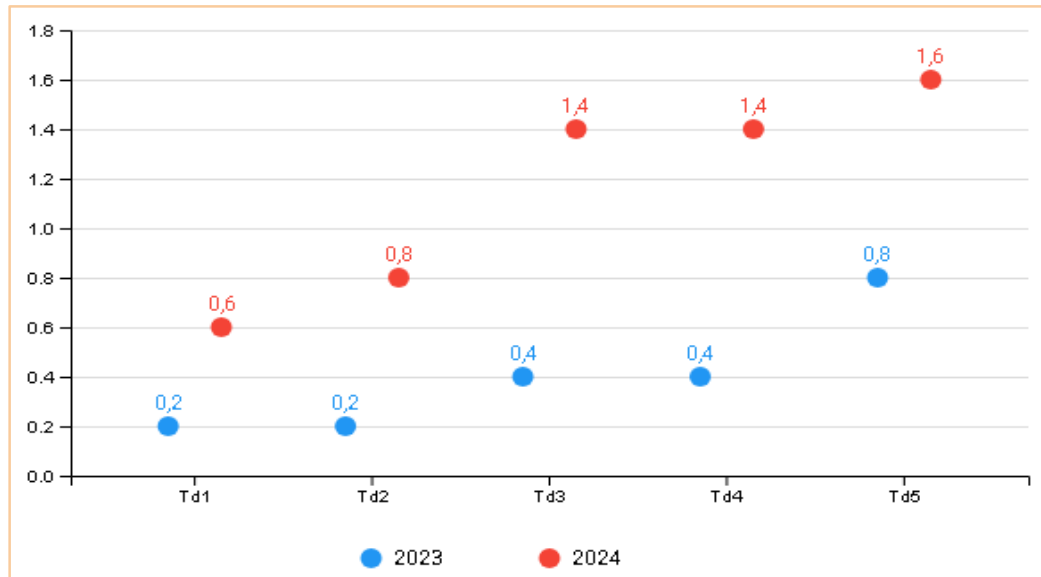
GAMBAR 5.23
CAKUPAN IMUNISASI TD PADA IBU HAMIL DI PROVINSI RIAU TAHUN 2023 DAN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Berikut adalah trend dari cakupan imunisasi Td pada wanita usia subur tidak hamil.

GAMBAR 5.24
CAKUPAN IMUNISASI TD WUS TIDAK HAMIL DI PROVINSI RIAU TAHUN 2023-2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

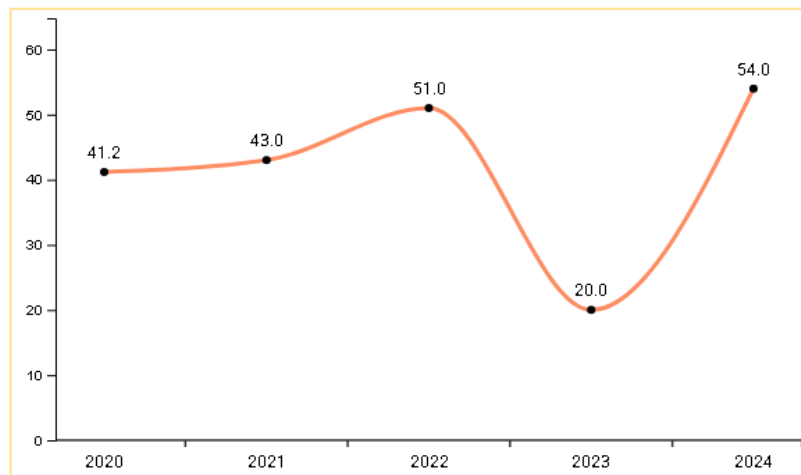


Dari cakupan imunisasi Td pada wanita usia subur tidak hamil baik tahun 2024 semua meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023.

6. Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan

Komplikasi kebidanan menjadi faktor yang berkontribusi dalam kematian ibu dan bayi. Komplikasi kebidanan yang ditangani dengan baik akan memberi dampak pada keselamatan ibu dan bayi. Dibawah ini adalah grafik persentase penanganan komplikasi kebidanan di Provinsi Riau untuk tahun 2019 – 2024.

GAMBAR 5.25
PERSENTASE PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Pada grafik terlihat bahwa persentase penanganan komplikasi kebidanan di Provinsi Riau tahun 20129 - 2024 diketahui bahwa pada tahun 2024, persentase penanganan komplikasi kebidanan di Provinsi Riau mencapai 54%, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2023 yang hanya sebesar 20%. Capaian ini bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang berada pada angka 51%.

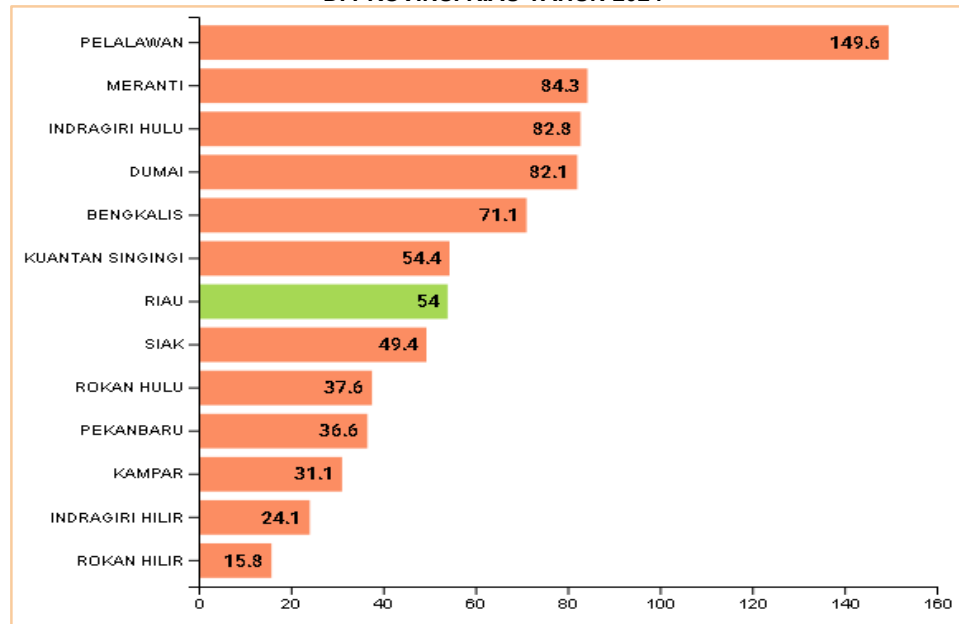
Peningkatan tersebut menunjukkan perbaikan dalam sistem deteksi dini, rujukan, dan penanganan kasus komplikasi kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini juga dapat mencerminkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta efektivitas sistem rujukan kegawatdaruratan obstetri.

Namun demikian, meskipun mengalami peningkatan, capaian 54% masih menyisakan 46% kasus komplikasi kebidanan yang belum tertangani secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam hal akses,



kualitas layanan, maupun pelaporan kasus komplikasi di beberapa wilayah kabupaten/kota.

GAMBAR 5.26
PERSENTASE KOMPLIKASI KEBIDANAN DITANGANI MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dari 12 Kabupaten/Kota ada di provinsi Riau 50% Kabupaten/kota mengalami peningkatan penangan komplikasi kebidanan. Dan Kabupaten Pelalawan merupakan daerah yang telah mencapai 100%. Penanganan komplikasi kebidanan harus menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan program kesehatan ibu, karena untuk menekan jumlah kematian ibu salah satunya melakukan penangan komplikasi kebidanan.

7. Peserta Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, karena dengan keluarga berencana pengaturan jarak kelahiran memberikan waktu pemulihan pada ibu dan fokus dalam mengasuh bayi baru lahir dengan optimal. Menurut SDG's angka pemakaian kontrasepsi atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR), dengan target 70% pada tahun 2024 dan target KB Pasca Persalinan (KBPP) 40%.



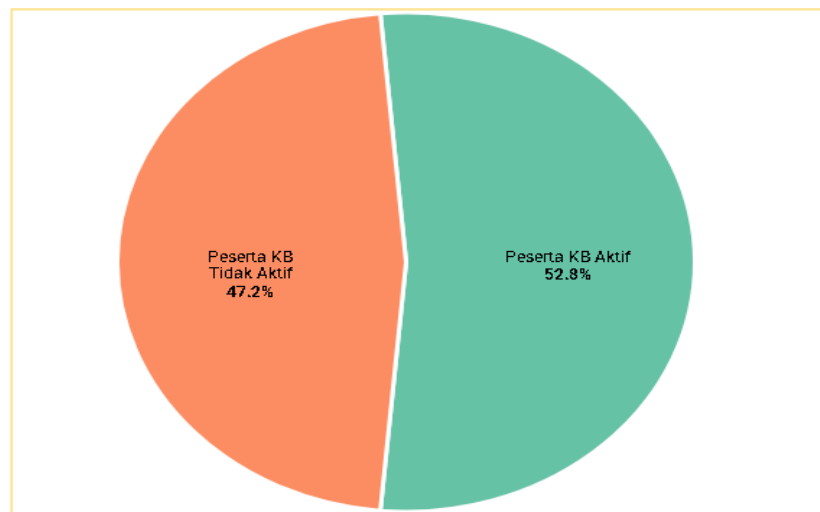
Di Provinsi Riau jumlah peserta KB Aktif belum mencapai target Nasional di mana cakupannya hanya mencapai 64,4%. Sementara capaian untuk KBPP di Provinsi Riau sudah mencapai target yang diharapkan yaitu 44,6 % dari target Nasional 40%. Data distribusi Peserta KB Aktif dan KBPP berdasarkan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan ibu bersalin di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Peserta KB Aktif

Peserta KB Aktif adalah PUS peserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai alkon dan masih terlindungi oleh alokon hingga saat ini untuk menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan.

Gambar dibawah di Provinsi Riau jumlah peserta KB Aktif belum mencapai target nasional dimana target 68% sedangkan cakupannya hanya 52,85% dan PUS yang tidak mengikuti KB Aktif sebesar 47,15%.

GAMBAR 5.27
PESERTA KB AKTIF DAN PUS TIDAK AKTIF KB DI PROVINSI RIAU TAHUN 2024

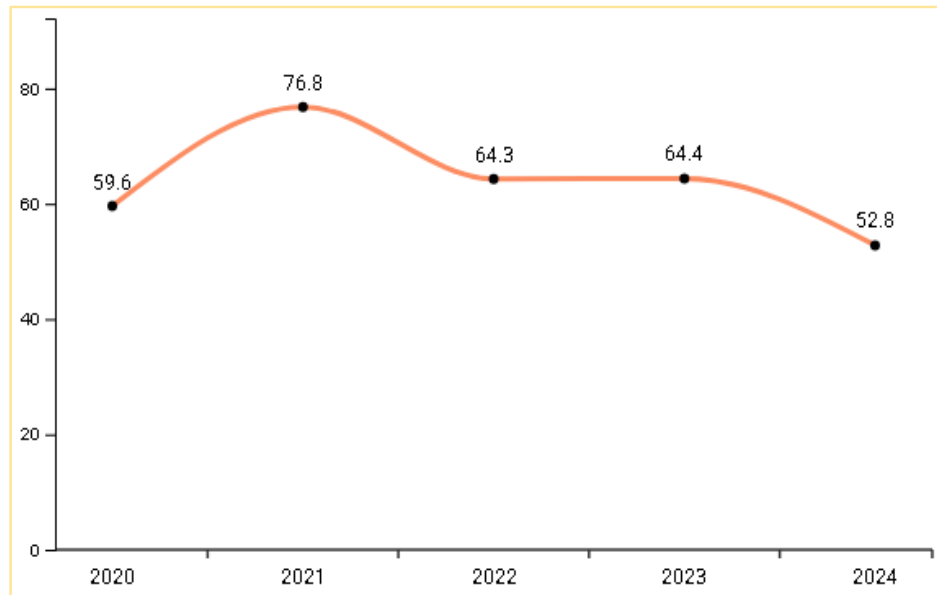


Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Peserta KB Aktif tahun 2024 sebesar 52,85% terjadi penurunan dibandingkan tahun 2023 (64,36%). Ini artinya kesadaran masyarakat untuk menjadi akseptor KB masih harus terus ditingkatkan. Dimana peserta KB tidak aktif cukup besar hampir setengah dari Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada yakni sebesar 47,15%. Sedangkan gambaran peserta KB Aktif sejak tahun 2018 – 2024 dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



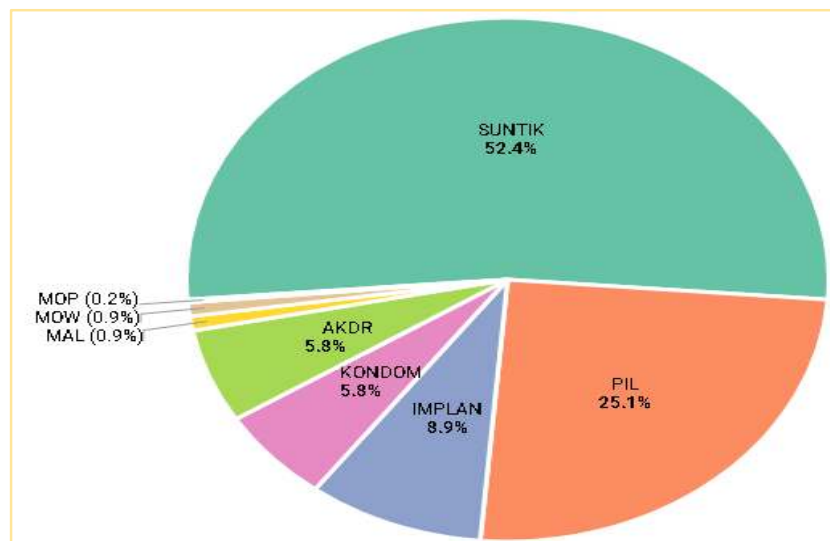
GAMBAR 5.28
PERSENTASE PESERTA KB AKTIF DI PROVINSI RIAU 2020-2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Sedangkan alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh peserta KB aktif adalah suntik 52,90% selanjutnya adalah pemakai pil 25,37% kemudian implant 9,0%, kondom dan AKDR masing-masing 5,9%, sisanya MOW dan MAL masing-masing 0,9% dan MOP 0,2%. Untuk gambaran lebih jelasnya dapat pada grafik dibawah ini.

GAMBAR 5.29
PESERTA KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI DI PROVINSI RIAU TAHUN 2024

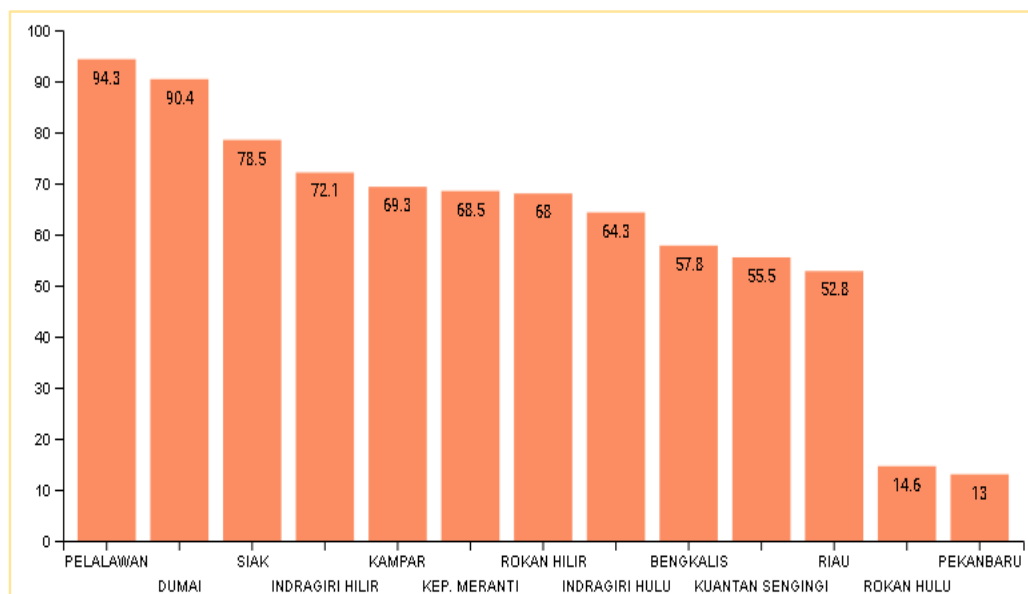


Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



Dari gambar peserta KB aktif dibawah ini baru sekitar 58,3% atau sekitar 7 Kabupaten/Kota yang sudah mencapai target. Masih ada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang belum mencapai target, yakni Kabupaten Rokan Hulu (14,6%), Kota Pekanbaru (13,0%), Kabupaten Kuantan Singingi (55,5%), Kabupaten Bengkalis (57,8) dan Kabupaten Indragiri Hulu (64,3%.. Hal ini disebabkan oleh faktor masih adanya PUS yang pengantin baru sehingga masih mengharapkan keturunan, PUS yang sudah lama menikah tapi belum memiliki keturunan, PUS yang sudah memiliki anak dan mau menambah keturunan serta permasalahan pencatatan dan pelaporan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

GAMBAR 5.30
PERSENTASE PESERTA KB AKTIF MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024



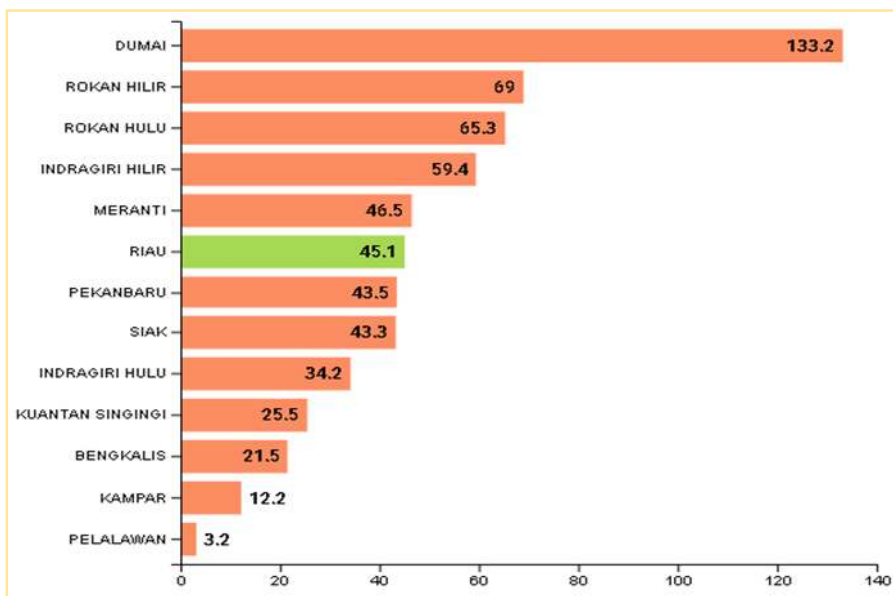
Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

b. Peserta KB Pasca Persalinan

Peserta KB Pasca Persalinan merupakan PUS yang memakai kontrasepsi pada pasca persalinan (0-42 hari setelah melahirkan). Dan capaian untuk Peserta KB Pasca Persalinan (KBPP) tahun 2024 di Provinsi Riau juga sudah melampaui target yang diharapkan yaitu 43,1 % dari target Nasional 40%. Meskipun capaian mencapai target namun capaian ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



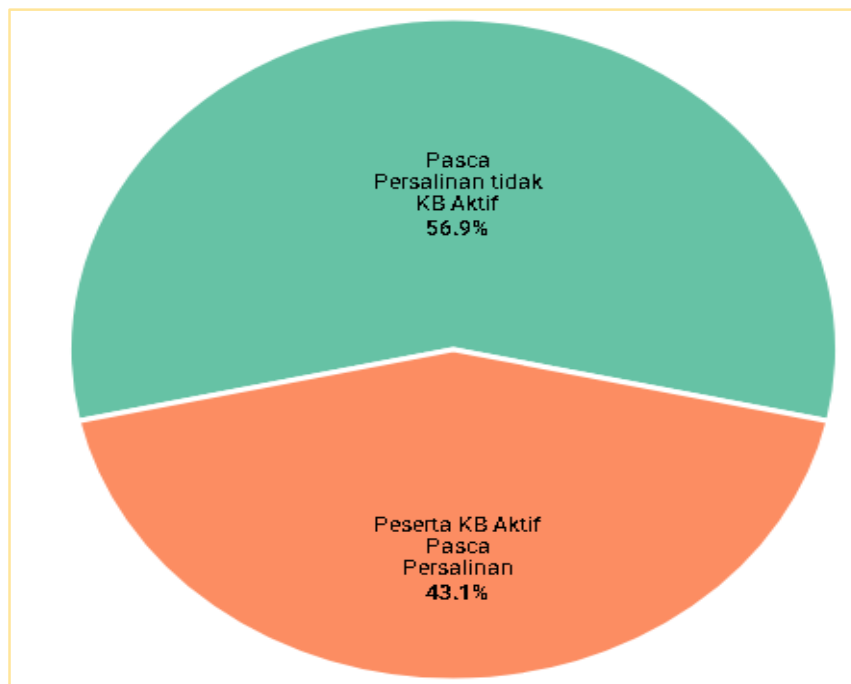
GAMBAR 5.31
PERSENTASE PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU
TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dan gambaran peserta KB Pasca Persalinan di Provinsi Riau Tahun 2024 dapat dilihat dibawah ini.

GAMBAR 5.32
PESERTA KB AKTIF PASCA PERSALINAN DAN TIDAK IKUT KB AKTIF PASCA PERSALINAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



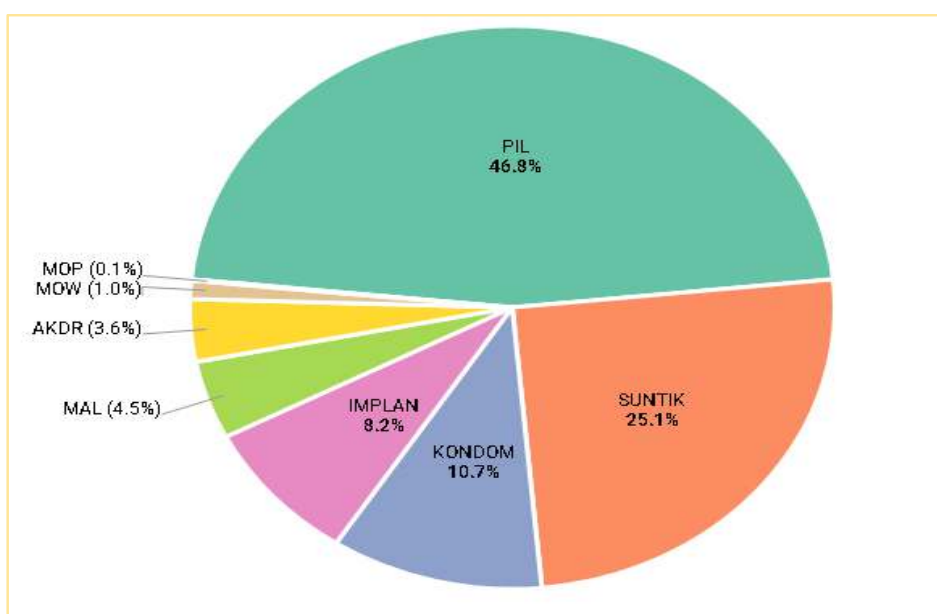
Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



Dan yang harus menjadi perhatian ada sekitar 53.344 orang (43,1%) ibu bersalin yang belum menjadi peserta KB Pasca Persalinan . Dan perlu adanya edukasi sehingga dapat langsung menggunakan alat kontrasepsi selama masa nifas. Kondisi ini berarti perlu pendidikan kesehatan dari sejak seorang ibu mulai hamil, sehingga setelah bersalin sudah bisa memutuskan alat kontrasepsi atau metode KB yang akan digunakan.

Berikut adalah proporsi Peserta KB Pasca Persalinan di Provinsi Riau, terlihat dari diagram dibawah ini paling banyak menggunakan suntik, 49% diikuti dengan menggunakan Pil sebanyak 26,3%, kondom 11,2%, implan 8,02% dan sisanya menggunakan AKDR, MOW dan MOP. Untuk melihat gambaran proporsi peserta KB pasca persalinan di Provinsi Riau Tahun 2024.

GAMBAR 5.33
PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2024



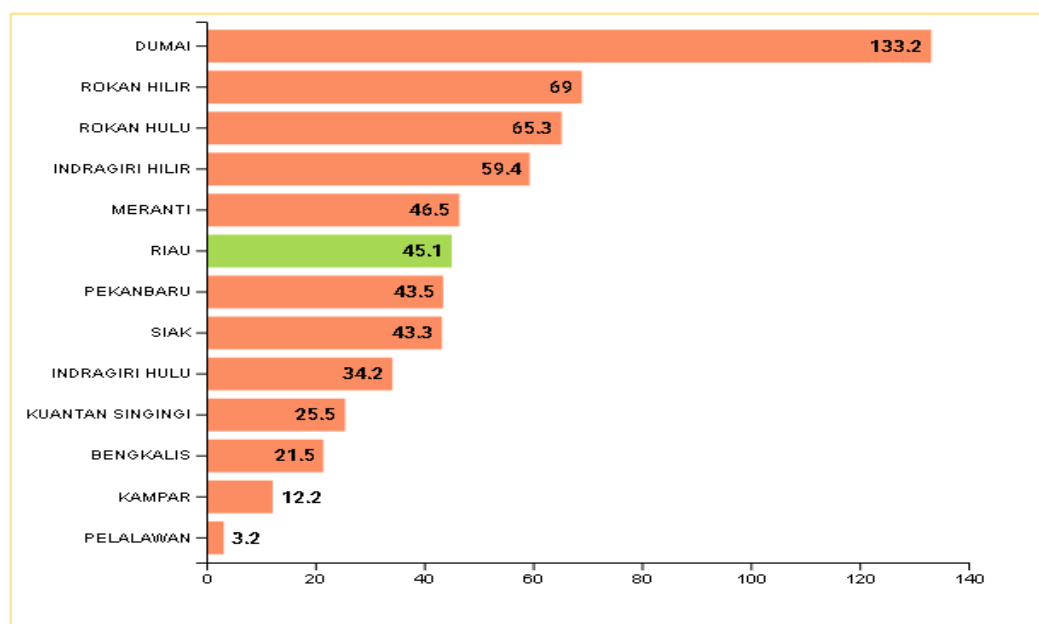
Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dari gambar diagram dibawah ini akseptor KB pasca persalinan menurut Kabupaten/Kota terbanyak di Kota Dumai (100%), diikuti oleh Kabupaten Rokan Hilir 69% dan Kabupaten Rokan Hulu 65,3%. Sementara capaian terendah Kabupaten Pelalawan sebesar 3,2% diikuti Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 12,2% dan Kabupaten Bengkalis 21,5%. Dari 12 Kabupaten/Kota ada 5 Kabupaten/Kota (Pelalawan, Kampar, Bengkalis, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu)



yang belum mencapai target 40%, dan ini harus menjadi perhatian agar ibu-ibu yang setelah melahirkan agar menjadi peserta KB Pasca Persalinan.

GAMBAR 5.34
PERSENTASE PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

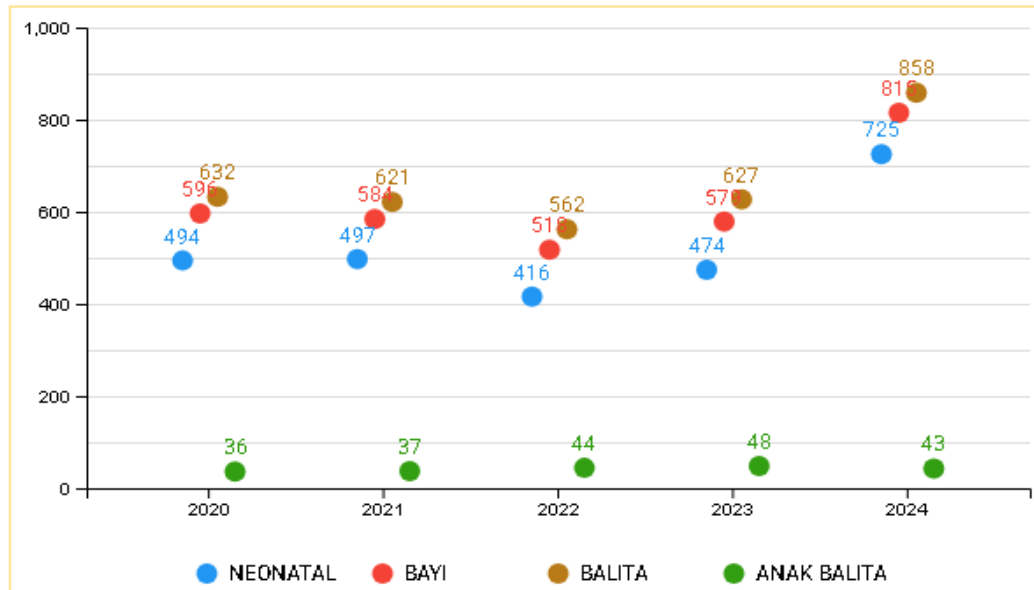
Masih rendahnya capaian ini bisa disebabkan karena kurangnya informasi, pengetahuan dan konseling tenaga kesehatan kepada ibu bersalin saat kunjungan masa hamil sampai kunjungan nifas ke 4 kali (KF 4) tentang penggunaan alat kontrasepsi pasca persalinan.

B. KESEHATAN ANAK

Periode tiga tahun pada masa balita merupakan periode emas pertumbuhan fisik, intelektual, mental dan emosional anak. Gizi yang baik, kebersihan, imunisasi, vitamin A dan pelayanan kesehatan yang bermutu, serta kasih sayang dan stimulasi yang memadai pada usia Balita akan meningkatkan kelangsungan hidup dan mengoptimalkan kualitas hidup anak. Kematian balita, bayi, neonatus dan anak balita merupakan ukuran keberhasilan Pelayanan Kesehatan pada anak. Kematian neonatal, bayi dan balita merupakan indikator dalam menilai kesejahteraan masyarakat. Sedangkan gambaran kematian neonatal, bayi, anak balita dan balita di Provinsi Riau Tahun 2024 dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



GAMBAR 5.35
JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, ANAK BALITA DAN BALITA PROVINSI RIAU
TAHUN 2020 – 2024



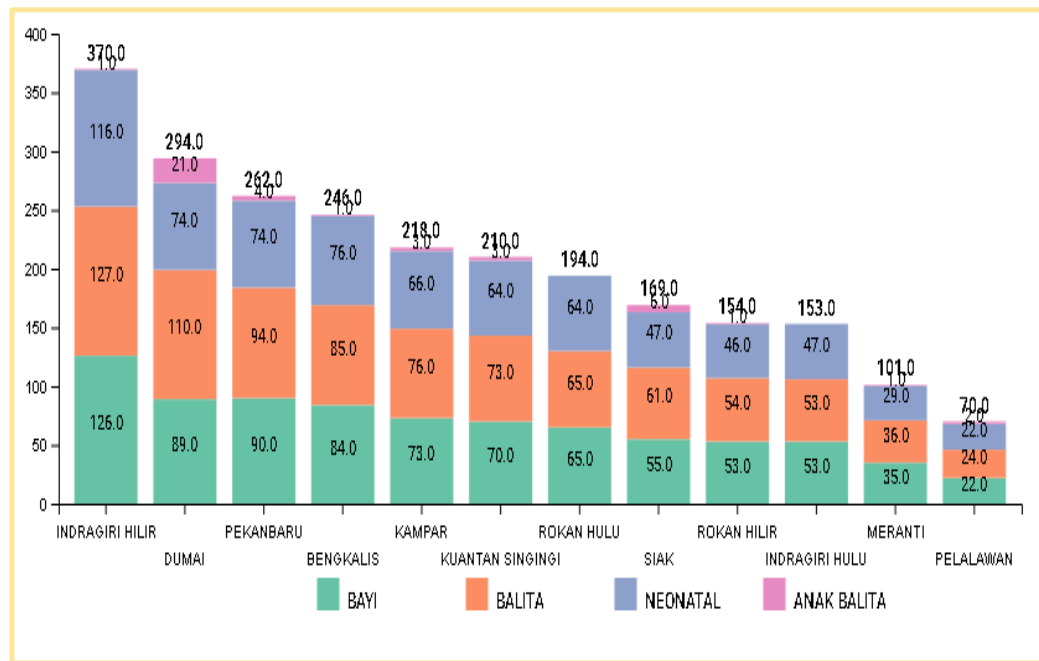
Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa kematian neonatal, bayi, balita pada tahun 2024 di Provinsi Riau semua mengalami kematian peningkatan dibandingkan dengan kematian pada tahun 2023. Mengingat meningkatnya semua kematian tahun 2024 kecuali anak balita, Ini artinya pelayanan kesehatan anak harus benar-benar lebih ditingkatkan agar dapat menekan jumlah kematian. Sama halnya pada kematian Ibu, tingginya jumlah kematian anak disebabkan pada tahun ini lebih tertibnya administrasi pencatatan dan pelaporan khususnya kematian.

Kematian neonatal, bayi, anak balita dan balita merupakan indikator dalam menilai kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah diagram yang menggambarkan penyebab dan jumlah kematian neonatal, bayi, anak bayi dan balita yang dilaporkan per-1000 kelahiran hidup. Untuk gambaran jumlah kematian neonatal, bayi, anak balita dan balita di Kabupaten/Kota dapat dilihat dari grafik ini.



GAMBAR 5.36
JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, ANAK BALITA DAN BALITA PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Jika diperhatikan dari grafik diatas maka terlihat bahwa secara keseluruhan kematian tertinggi di Kabupaten Indragiri Hilir diikuti Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru, sedangkan yang jumlah kematian yang terendah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kep. Meranti. Jumlah kematian ini belum menggambarkan besaran kematian di suatu daerah, karena data jumlah kematian ini hanya data tunggal, tidak membandingkan antara jumlah kematian dengan kelahiran hidup.

1. Kematian Neonatal

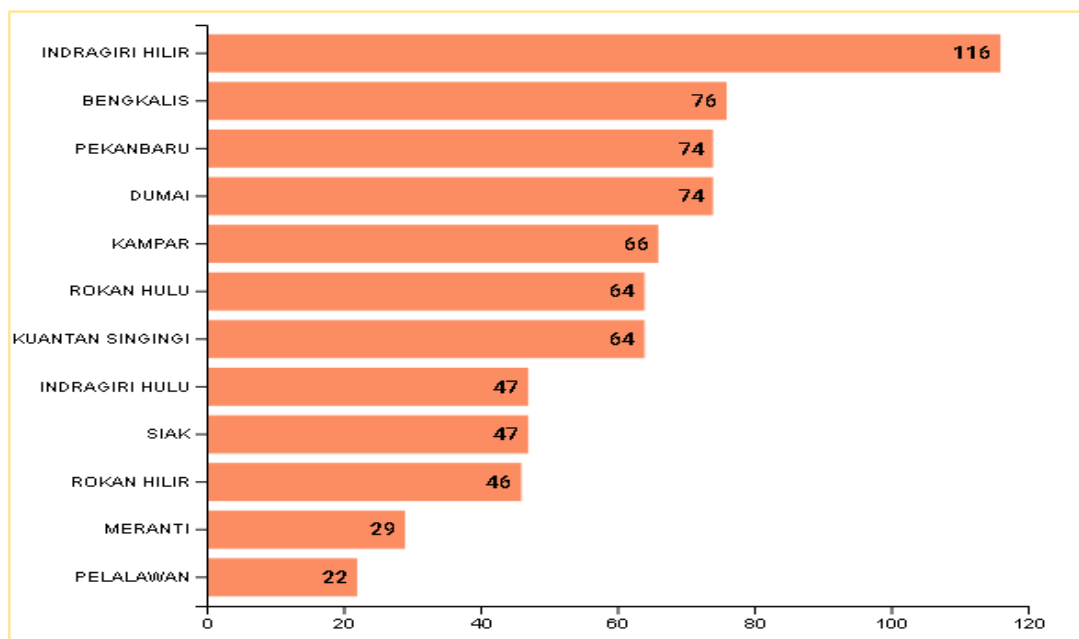
Kematian Neonatus merupakan kematian yang terjadi pada bayi sampai dengan 28 hari tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Jumlah kematian neonatus di Provinsi Riau tahun 2024 sebanyak 815 kasus meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini merupakan angka absolut jumlah kematian di Provinsi Riau yang dilaporkan, sehubungan tidak adanya data survei kematian neonatal di Provinsi Riau.

Untuk tahun 2024 ini kematian neonatal tertinggi di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 116 kasus, pada tahun sebelumnya kematian neonatal tertinggi di Kota Pekanbaru dengan 70 kasus, tahun 2022 Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 56 kasus. Selanjutnya kematian tertinggi Kota Dumai dan Kota Pekanbaru masing-



masing 74 kasus. Sedangkan kematian yang terendah Kabupaten Pelalawan 22 Kasus diikuti Kabupaten Kep. Meranti 29 kasus dan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Siak Sri Indrapura masing-masing 47 kasus. Untuk melihat gambaran jumlah kematian di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

GAMBAR 5.37
JUMLAH KEMATIAN NEONATAL MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

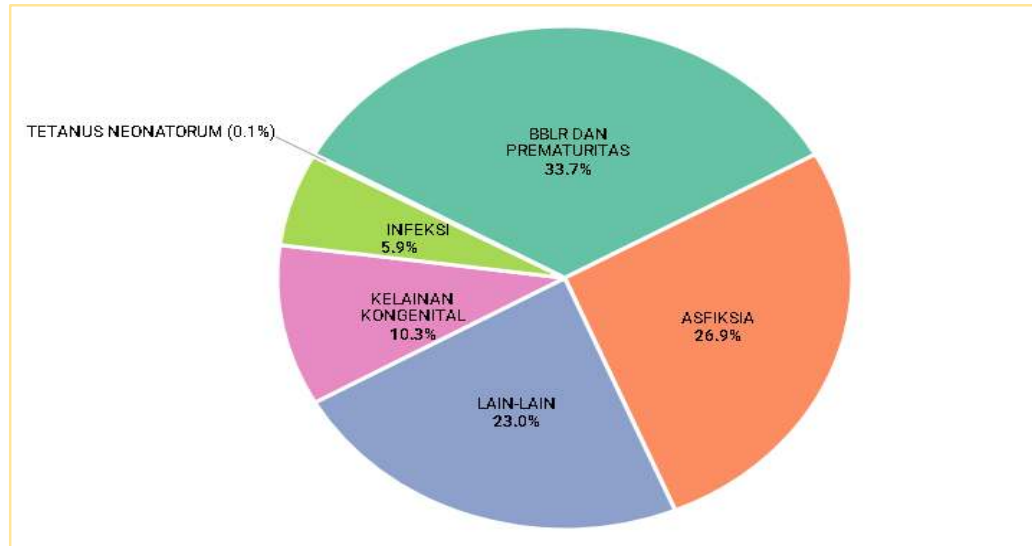
Sedangkan yang menjadi penyebab kematian neonatal terbanyak dari Neonatal adalah sama dengan tahun sebelumnya yakni bayi berat lahir rendah (BBLR). Untuk penyebab kematian disebabkan BBLR pada tahun 2024 sebesar 33,7% menurun sedikit dibandingkan pada tahun 2023 (34,18 %) turun sedikit dibandingkan tahun 2022 (39,2%). Bayi berat lahir rendah adalah bayi yang dilahirkan memiliki berat badan kurang dari 2500 gram. Berat badan saat lahir merupakan satu-satunya faktor penentu kesehatan seseorang.

Selain BBLR penyebab lain kematian neonatal antara lain asfiksia sebesar 26,9% menurun dibandingkan tahun 2023 (31,4%), kelainan kongenital 10,3% menurun dibandingkan tahun 2023 (13,2%). infeksi 5,9% menurun dibandingkan tahun 2023 (6,33%), tetanus neonatorum 0,1% menurun dibandingkan tahun 2023 (1,27%) , jika penyebab yang lain terjadi penurunan maka untuk lain-lain pada tahun 2024 ini terjadi peningkatan dibanding tahun 2023 (13,9%), hal ini



harus lebih dikaji lagi apa yg menjadi peningkatan pada penyebab lain-lain ini. Dan gambaran penyebab kematian neonatal dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

GAMBAR 5.38
PESERTA PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0 - 28 HARI) PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

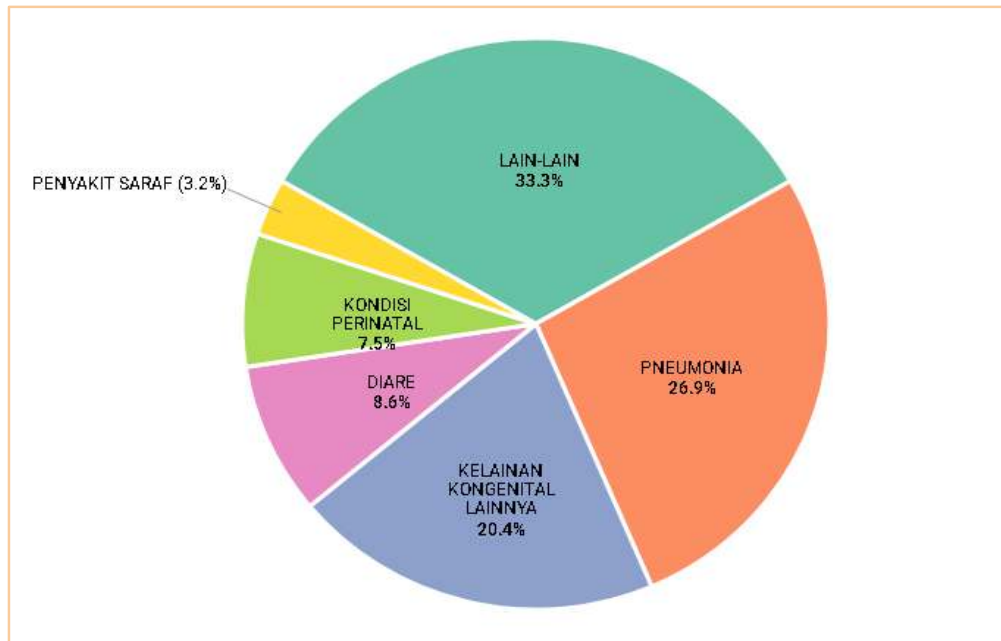
2. Kematian Post Neonatal

Sedangkan Kematian Neonatal merupakan kematian yang terjadi pada bayi (usia 29 hari sampai 11 bln) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Dan kematian Post Neonatal di Provinsi Riau Tahun 2024 sebanyak 90 kasus menurun dibandingkan tahun 2023 sebanyak 105 kasus dan tahun-tahun sebelumnya. Data kematian ini merupakan angka absolut jumlah kematian di Provinsi Riau yang dilaporkan, sehubungan tidak adanya data survei kematian neonatal di Provinsi Riau.

Sedangkan dilihat dari grafik dibawah bahwa kematian postnatal tahun 2024 yang terbanyak disebabkan pneumonia 26,9%, diikuti kelainan kongenital sebesar 20,4%, Diare 8,6% dan kondisi perinatal 7,5% serta penyakit syaraf 3,2 %. Kematian yang disebabkan lain-lain yang cukup tinggi yakni sebesar 33,3%, Dan menyebabkan ini harus menjadi perhatian untuk dapat mencari apa penyebab jumlah lain-lain cukup besar. Pada gambar dibawah ini melihatkan penyebab kematian post neonatal di Provinsi Riau Tahun 2024.



GAMBAR 5.39
PERSENTASE PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29 HARI - 11 BULAN)
PROVINSI RIAU TAHUN 2024

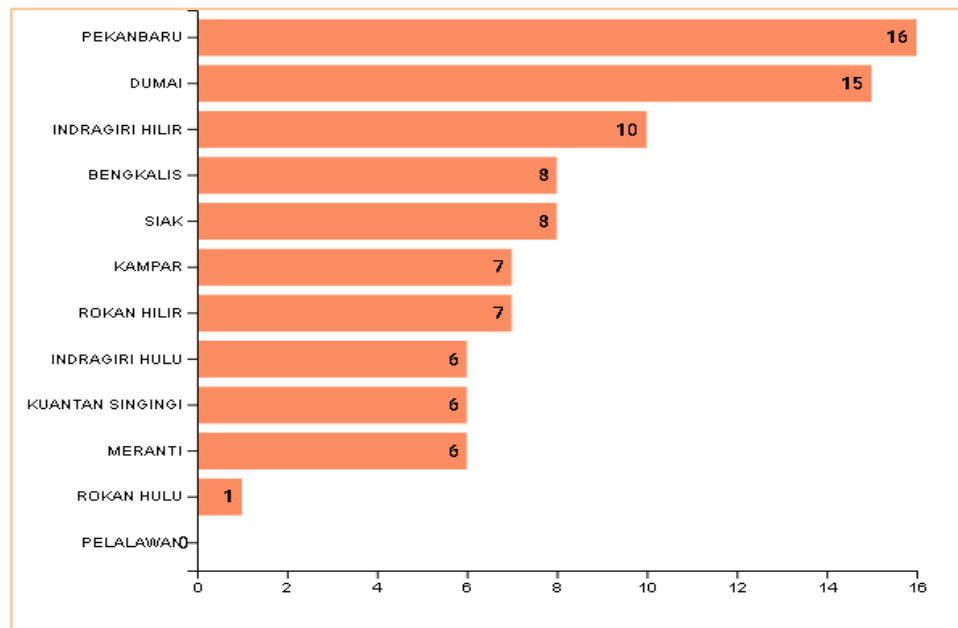


Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Sedangkan kematian post neonatal di Kabupaten/kota pada tahun 2024 sekitar 18% atau 16 kasus merupakan kematian post neonatal yang berasal Kota Pekanbaru, yang mana pada tahun sebelumnya kematian terbanyak 32 kasus. Selanjutnya diikuti Kota Dumai 15 kasus dan Kabupaten Indragiri Hilir 10 kasus. Dan Kabupaten Pelalawan tahun 2023 dan 2024 yang tidak ada ditemukan kasus kematian pada post neonatal. Untuk gambaran jelasnya kematian post neonatal di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



GAMBAR 5.40
JUMLAH KEMATIAN POST NEONATAL MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

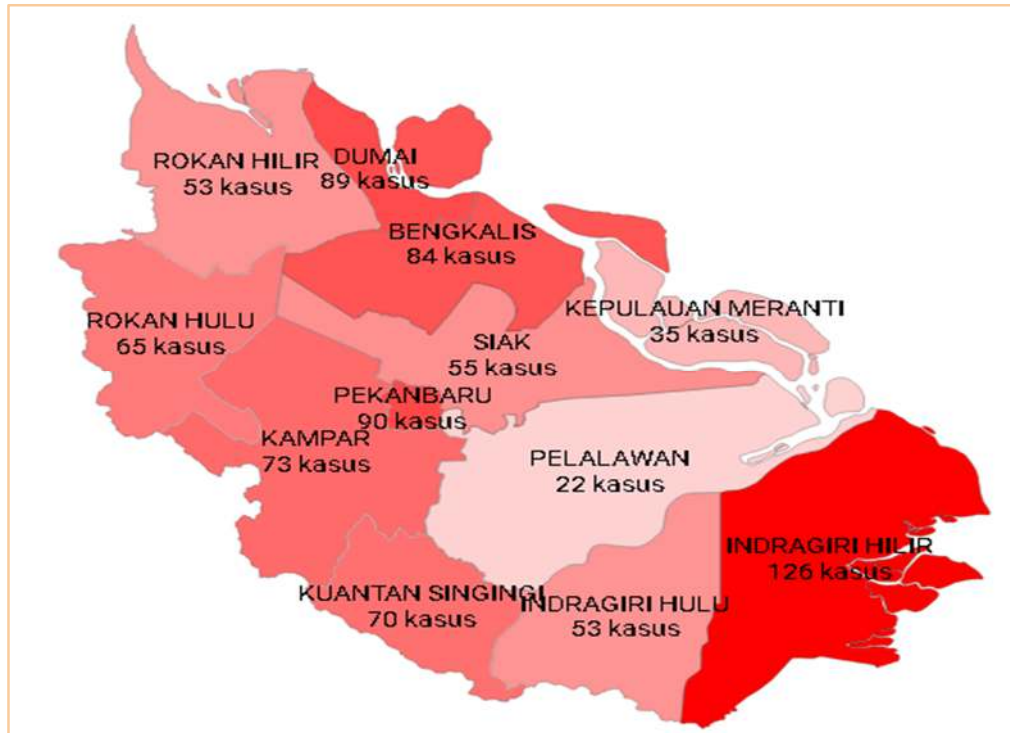
3. Kematian Bayi

Kematian Bayi merupakan kematian yang terjadi usia 0 – 11 bulan (termasuk neonatal) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Jumlah kematian bayi di Provinsi Riau tahun 2024 sebanyak 815 kasus meningkat dibandingkan tahun 2023 sebanyak 579 kasus meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 518 kasus. Angka ini merupakan angka absolut jumlah kematian di Provinsi Riau yang dilaporkan, sehubungan tidak adanya data survei kematian bayi di Provinsi Riau.

Kematian Bayi tersebut terdiri dari kematian Neonatal (usia 0 – 28 hr) dan post Neonatal (usia 29 hari sampai 11 bln). Jumlah kematian neonatal di Provinsi Riau 725 kasus dan kematian Post Neonatal 90 kasus, angka ini menunjukkan bahwa 88,96 % kematian bayi terjadi pada masa Neonatus.



GAMBAR 5.41
PETA SEBARAN KEMATIAN BAYI PER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Jumlah kematian bayi tahun 2024 sebanyak 815 kasus, angka ini merupakan angka absolut jumlah kematian bayi di Provinsi Riau yang dilaporkan, sehubungan tidak adanya data survei kematian bayi di Provinsi Riau. Grafik diatas menunjukan Kabupaten/Kota yang kasus kematian paling banyak adalah Kabupaten Indragiri Hilir (126 kasus), Kota Pekanbaru (90 kasus), dan Kota Dumai (89 kasus). Dibandingkan tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah kematian bayi yang cukup besar sebanyak 236 Kasus (29%).

Adapun yang menjadi masalah adanya kematian pada bayi disebabkan antara lain:

- Kualitas Pelayanan Antenatal Care pada ibu hamil yang belum memenuhi
- Standar sehingga kurang terpantaunya kondisi/perkembangan janin
- Penanganan bayi baru lahir yang belum memenuhi standar
- Kompetensi petugas yang masih belum optimal di dalam penanganan bayi baru lahir terutama didalam penanganan asfiksia dan bayi berat lahir rendah

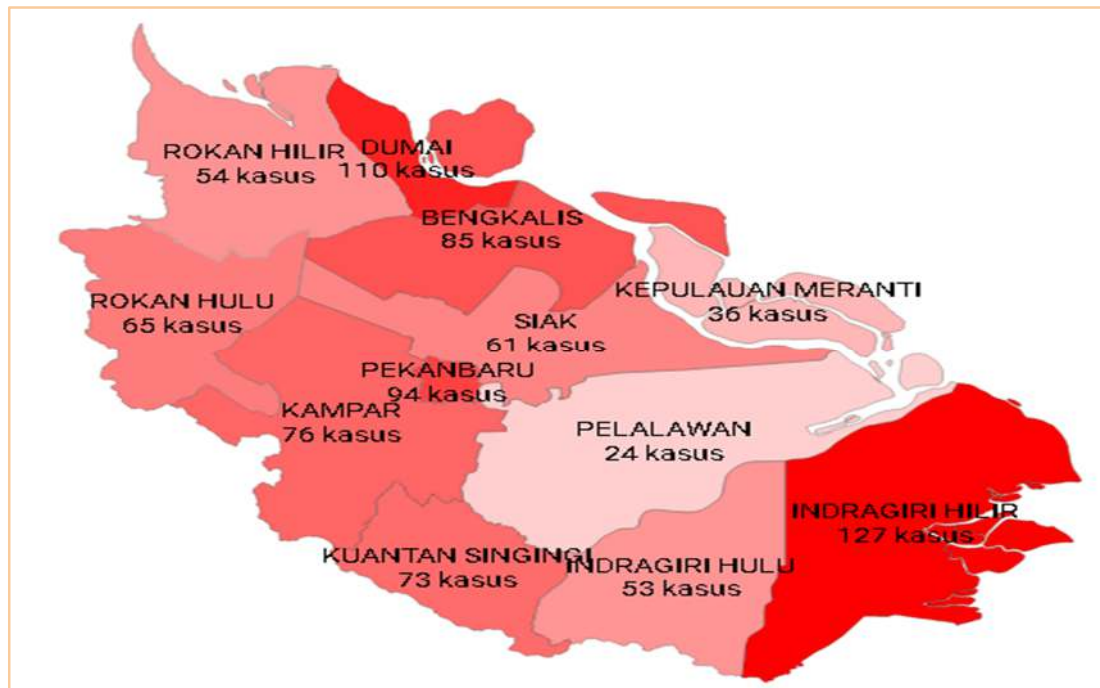


4. Kematian Balita

Sedangkan kematian balita merupakan kematian yang terjadi pada bayi/anak usia 0-59 bulan (bayi + anak balita) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Bisa disebutkan bahwa jumlah kematian balita itu adalah Jumlah Balita yang meninggal setelah lahir sampai sebelum usia 5 (lima) tahun.

Jumlah Kematian Balita pada tahun 2024 sebanyak 858 kasus meningkat tajam dibandingkan tahun 2023 sebanyak 627 kasus, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2022 sebanyak 562 kasus. angka ini menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 231 kasus (27%) dari jumlah kematian Balita tahun 2023.

GAMBAR 5.42
PETA SEBARAN KEMATIAN BALITA PER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024



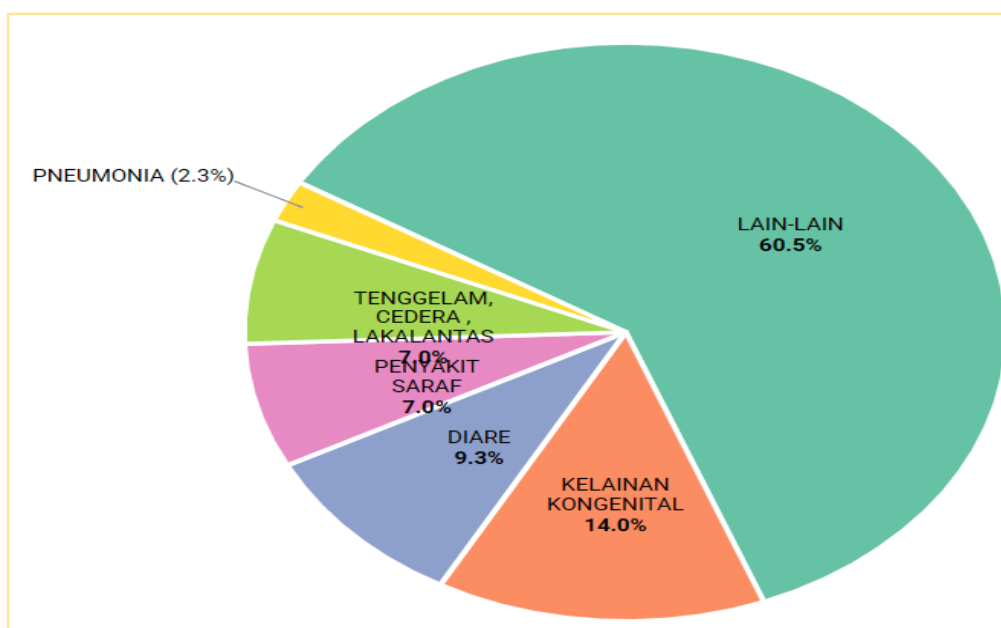
Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dari peta di atas terlihat gambaran penyebaran kematian balita di Provinsi Riau Tahun 2024, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah yang kematian balita tertinggi sebanyak 127 kasus, diikuti Kota Dumai sebanyak 110 kasus dan Kota Pekanbaru sebanyak 94 kasus. Sedangkan Kabupaten Kampar merupakan daerah yang memiliki kematian terkecil di Provinsi Riau dengan jumlah kematian sebanyak 15 kasus diikuti oleh Kabupaten Pelalawan sebanyak 24 kasus dan Kabupaten Kep. Meranti sebanyak 36 kasus kematian.



Adapun yang menjadi penyebab kematian pada Anak Balita (1 – 4 thn) adalah kelainan kongenital sebanyak 13,95%, diare 9,30% dan penyakit saraf dan tenggelam, cedera, kecelakaan lalu lintas masing-masing 6,98%. Dan penyebab terbesar adalah lain-lain sebanyak 60,47%. Penyebab lain-lain ini harus menjadi perhatian sekali kedepannya dan teridentifikasi masalahnya mengingat lebih dari setengah kematian balita ini adalah lain-lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini .

GAMBAR 5.43
PERSENTASE PENYEBAB KEMATIAN ANAK BALITA (1-4 TAHUN) PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Masih tingginya kematian pada bayi dan balita di Provinsi Riau tersebut disebabkan :

- Kualitas Pelayanan Antenatal Care pada ibu hamil yang belum memenuhi standar sehingga kurang terpantaunya kondisi/perkembangan janin.
- Penanganan bayi baru lahir yang belum memenuhi standar
- Kompetensi petugas yang masih belum optimal di dalam penanganan bayi baru lahir terutama didalam penanganan asfiksia dan bayi berat lahir rendah.

5. Cakupan Pelayanan Neonatal dan Post Neonatal

Pelayanan kesehatan neonatus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonatus sedikitnya 3 kali, selama periode 0 sampai 28 hari setelah lahir, baik di fasilitas



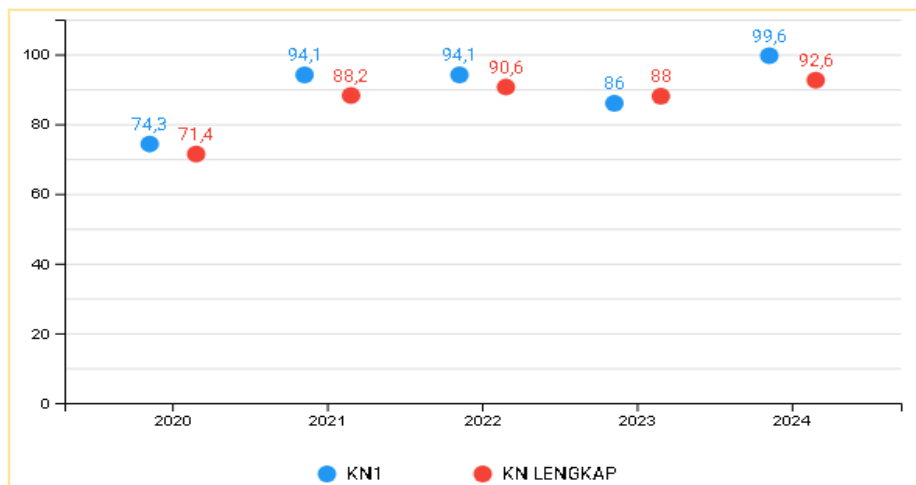
kesehatan maupun melalui kunjungan rumah. Pelaksanaan pelayanan kesehatan neonatus adalah sebagai berikut :

- a. Kunjungan Neonatal ke-1 (KN 1) dilakukan dalam kurun waktu 6-48 jam setelah bayi lahir.
- b. Kunjungan Neonatal ke-2 (KN 2) dilakukan pada kurun waktu hari ke-3 sampai dengan hari ke 7 setelah bayi lahir.
- c. Kunjungan Neonatal ke-3 (KN-3) dilakukan pada kurun waktu hari ke-8 sampai dengan hari ke-28 setelah lahir.

Kunjungan neonatal 1 (KN1) dan KN lengkap merupakan indikator penting dalam pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir. Karena tujuan kunjungan neonatal adalah untuk meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan pada bayi atau mengalami masalah. Kematian neonatal dapat dicegah dengan pelayanan minimum neonatal.

Dan sebagai gambaran pelayanan kesehatan terhadap neonatal di Provinsi Riau dapat dilihat dari cakupan Kunjungan Neonatal (KN1) dan KN Lengkap selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2019-2024 pada grafik dibawah ini.

GAMBAR 5.44
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL 1 (KN1) DAN KN LENGKAP PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

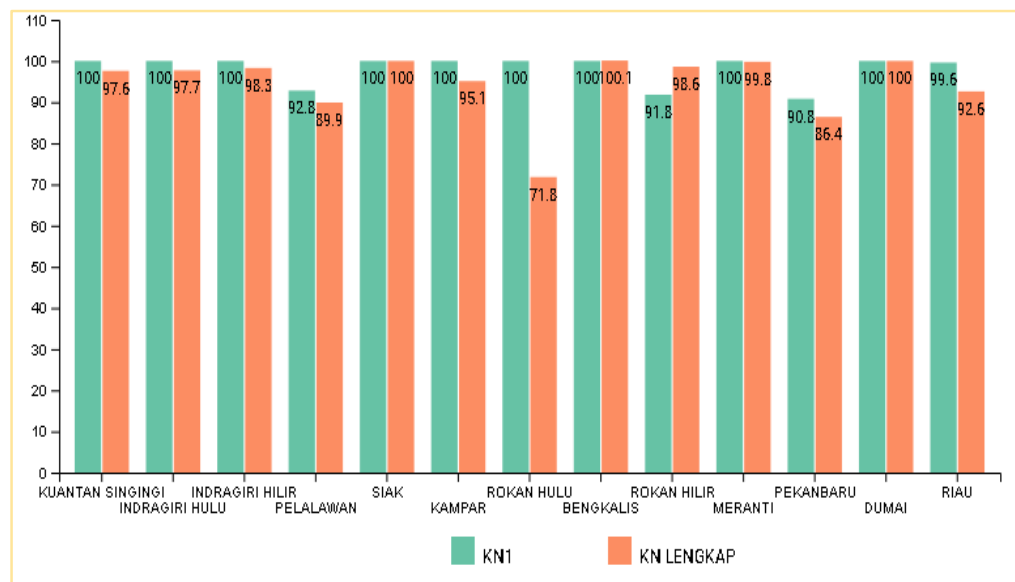
Dari grafik diatas terlihat cakupan KN1 tahun 2024 adalah sebesar 91,7% meningkat dibandingkan tahun 2023 (88%) menurun bila dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 94,1% sedangkan cakupan KN lengkap jauh lebih rendah



dari KN1 yaitu mencapai 85,3% meningkat dibandingkan tahun 2023 (86%) juga menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 90,6%.

Menurunnya jumlah KN lengkap jika dibandingkan dengan KN1 dapat mengindikasikan kurangnya pengetahuan dan kesadaran ibu untuk memeriksakan bayinya ketika masih belum genap usianya satu bulan. Sedangkan untuk melihat gambaran cakupan pelayanan KN1 dan KN lengkap di kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

GAMBAR 5.45
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL 1 (KN1) DAN KN LENGKAP MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2023 -2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa cakupan kunjungan neonatal di 12 kabupaten/kota, dari Kunjungan pertama (KN1) dibanding kunjungan lengkap (KN lengkap) terjadi penurunan hampir di semua Kabupaten/Kota. Untuk peningkatan pelayanan kunjungan neonatal dan pencapaian target salah satu caranya dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu untuk memeriksakan bayinya sebelum berusia 28 hari melalui penyediaan informasi tentang bayi baru lahir dengan memperbanyak penyuluhan kesehatan. Kemudian yang harus dilakukan adalah pembenahan sistem pencatatan dan pelaporan yang belum maksimal dimana di register kohort bayi banyak form yang seharusnya diisi tetapi kosong (tidak diisi).

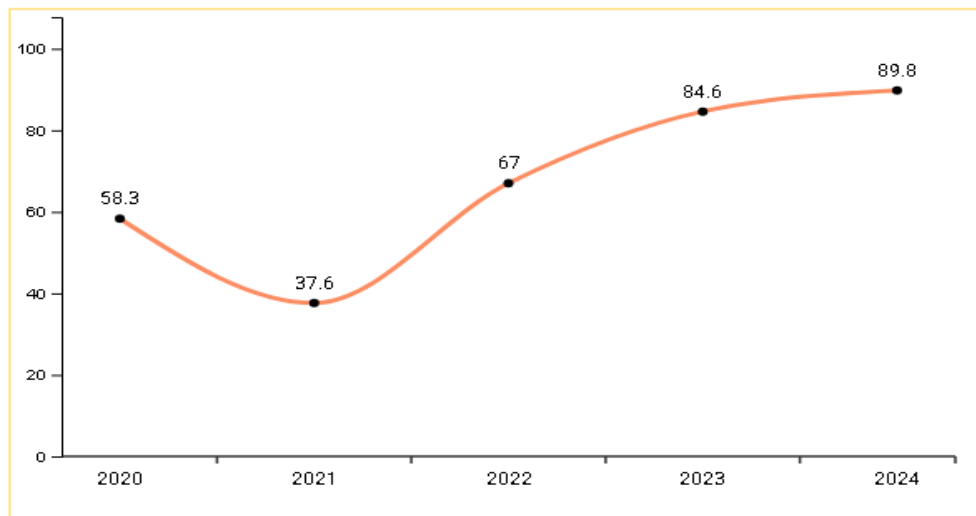


Bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah proses menyusui dimulai secepatnya segera setelah lahir. IMD dilakukan dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dengan ibunya segera setelah lahir dan berlangsung minimal 1 jam. Persentase bayi baru lahir dapat IMD adalah proporsi bayi baru lahir yang mendapat IMD terhadap jumlah baru lahir di suatu wilayah pada periode tertentu $\times 100\%$. Seyogyanya petugas penolong persalinan yang sudah pernah dilatih tentang pelaksanaan IMD baik dalam Pelatihan Asuhan Persalinan Normal maupun Pelatihan Konseling Menyusui atau PMBA sudah dapat membantu ibu yang melahirkan untuk melaksanakan IMD.

Dan capaian tahun 2024 sebesar 89,79% meningkat dibandingkan tahun 2023 (84,6%) dan terjadi peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2022 (67%) dan tahun 2021 (37,6%). Hal ini kemungkinan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat karena gencarnya promosi kesehatan tentang pentingnya IMD. Capaian IMD tahun 2023 ini telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 58%. Dan Cakupan inisiasi menyusui dini (IMD) di Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun 2019-2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

GAMBAR 5.46
BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSUI DINI (IMD) DI PROVINSI RIAU 2020-2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

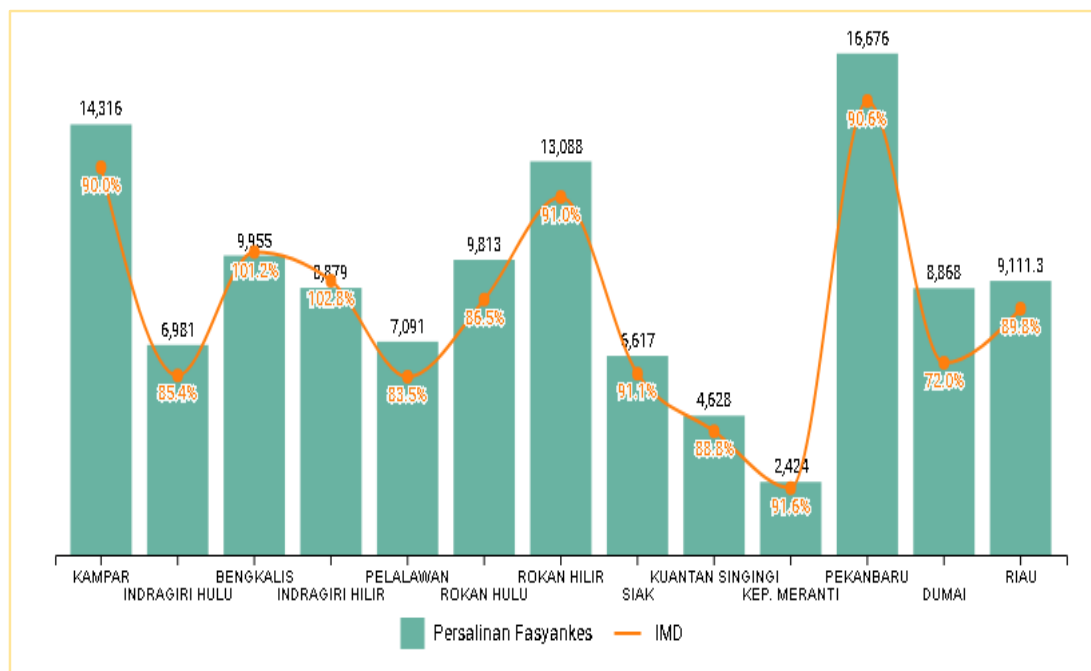
Terlaksananya Inisiasi Menyusu Dini pada ibu melahirkan tidak terlepas dari kebijakan agar ibu hamil melahirkan pada petugas kesehatan di fasilitas



kesehatan dan tidak dibolehkan ke dukun atau bidan kampung. Namun bila kita bandingkan capaian Inisiasi Menyusui Dini hanya 89,79% lebih tinggi dibandingkan dengan persalinan di fasilitas kesehatan tahun 2023 adalah sebesar 79,1%. Demikian juga dengan kabupaten/kota meskipun ada beberapa kabupaten/kota Inisiasi menyusui dini nya lebih tinggi dari persalinan fasyankes.

Sedangkan gambaran capaian IMD di kabupaten/kota dan persalinan di fasilitas kesehatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

GAMBAR 5.47
CAKUPAN BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSUI DINI DAN PERSALINAN DI FASYANKES
MENURUT KAB/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Pada grafik terlihat masih ada persalinan yang dilakukan oleh tidak di fasilitas kesehatan yaitu sebesar 20,89%, Walaupun sudah ada kebijakan dari Kemenkes bahwa tidak ada lagi persalinan selain oleh tenaga kesehatan dan harus di fasilitas kesehatan, namun kondisi di lapangan masih menunjukkan data adanya persalinan selain di faskes dan tidak dengan tenaga kesehatan. Masih adanya dukun yang belum terlatih dan belum ada kemitraan dengan petugas kesehatan atau tidak didampingi oleh petugas kesehatan pada saat melakukan persalinan kemungkinan tidak akan melakukan IMD. Demikian juga apabila persalinan dilakukan di rumah pasien, pengaruh keluarga (orang tua, nenek, suami) lebih dominan untuk menghambat terlaksananya IMD.



Pelaksanaan IMD pada saat persalinan tidak terlepas dari motivasi dan kesadaran pasien, dorongan dari keluarga dan kesabaran petugas. Kesadaran pasien akan pentingnya IMD dapat ditingkatkan melalui konseling oleh petugas pada saat ANC kepada ibu serta keluarga terutama suami dan orang tua (nenek) yang berpengaruh kuat dalam pengambilan keputusan.

Permasalahan yang dijumpai :

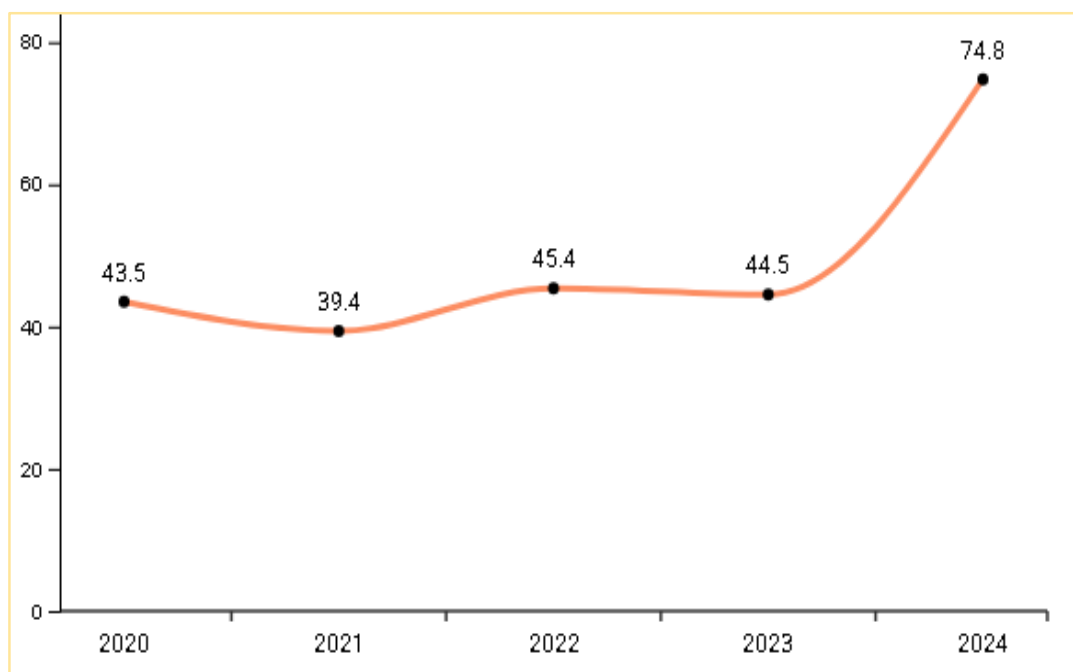
- Masih ada persalinan dilakukan di rumah, baik oleh petugas kesehatan maupun oleh non tenaga kesehatan, pengaruh keluarga sangat tinggi untuk mengambil keputusan akan dilakukan IMD atau tidak.
- Masih ada RS yang menolong persalinan dan tidak melakukan IMD, disebabkan tidak adanya kebijakan yang mendukung pemberian ASI
- Petugas kurang sabar dan menganggap tambahan pekerjaan dan merepotkan,
- Beberapa kabupaten seperti Indragiri Hilir dan Dumai melaporkan PN di fasyankes rendah namun IMD cukup tinggi. Analisnya kemungkinan persalinan yang tidak dilakukan di fasyankes, tapi ditolong oleh bidan dapat melakukan IMD karena kesadaran pasien yang cukup baik dan adanya dukungan dari keluarga.

Bayi Usia 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif

ASI Eksklusif adalah Air Susu Ibu yang diberikan kepada bayi sampai berusia 6 bulan tanpa diberikan makanan dan minuman lain, kecuali atas indikasi medis. Bayi yang mendapat ASI eksklusif adalah bayi 0-6 bulan yang diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral berdasarkan recall 24 jam. Untuk menghitung persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif adalah jumlah bayi 0-6 bulan yang diberi ASI saja dibagi dengan jumlah seluruh bayi 0-6 bulan yang datang dan tercatat dalam register pencatatan/KMS di wilayah tertentu kali 100%. Frekuensi pengamatan dilakukan setiap bulan di Posyandu, namun frekuensi laporan dilakukan setiap 6 bulan, yaitu bulan Februari dan Agustus. Selanjutnya cakupan tahunan menggunakan penjumlahan data bulan Februari dan Agustus.



GAMBAR 5.48
PERSENTASE BAYI DIBERIKAN ASI EKSKLUSIF PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



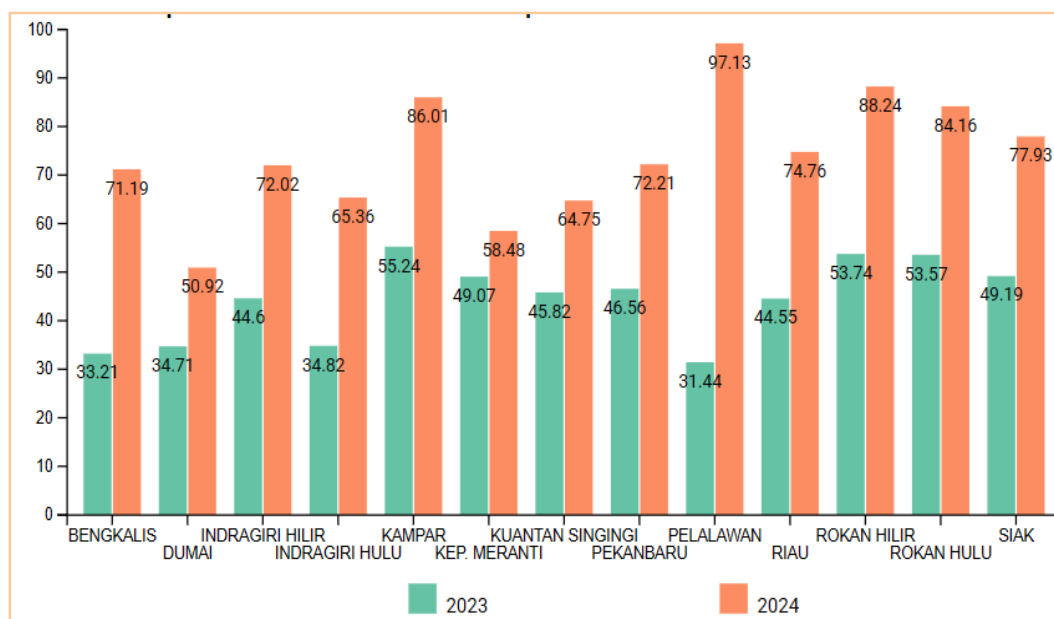
Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Berdasarkan laporan dari kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2024, cakupan pemantauan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 6 bulan adalah sebesar 74,76% terjadi peningkatan yang cukup tajam dibandingkan tahun 2023 (44,5%) menurun sedikit dibandingkan dengan tahun 2022 (45,4%). Dan capaian tahun 2024 ini belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 45%.

Demikian juga untuk capaian asi eksklusif di kabupaten/kota, terlihat semua kabupaten/kota mengalami peningkatan capaian dibandingkan tahun 2024. Dan semua kabupaten/kota yang telah mencapai target asi eksklusif yang ditetapkan 45%. Ini artinya perlu ditingkatkan kesadaran ibu dan keluarga untuk tetap memberikan bayinya asi eksklusif, mengingat penting asi eksklusif tersebut untuk kebutuhan pertumbuhan bayinya. Hal ini dapat dicapai melalui penyuluhan kesehatan oleh semua pihak. Untuk gambaran capaian asi eksklusif di kabupaten/kota dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



GAMBAR 5.49
CAKUPAN ASI EKSKLUSIF MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2023 - 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

6. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi

Pelayanan Kesehatan bayi sesuai standar memiliki kriteria haruslah diberikan pelayanan kesehatan yang sesuai standar secara komprehensif yang melibatkan beberapa program terkait (tidak hanya KIA) yaitu :

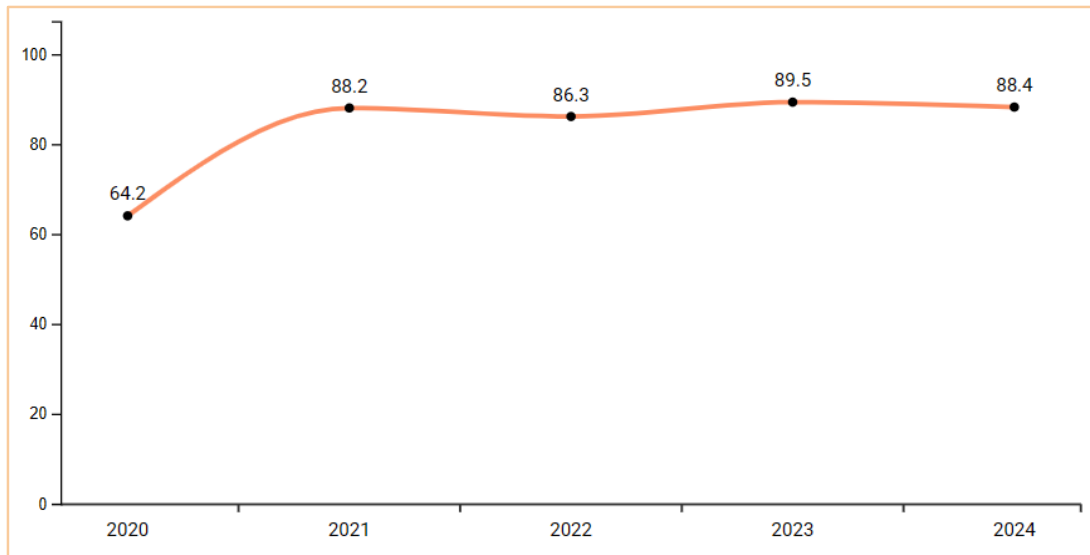
- Dilakukan SDIDTK minimal 4 kali dalam setahun
- Mendapatkan imunisasi dasar lengkap
- Mendapatkan vitamin A sekali dalam setahun
- Dilakukan penimbangan minimal 4 kali dalam setahun
- Mempunyai Buku KIA
- Mendapatkan ASI Eksklusif sampai umur 6 bulan.

Cakupan pelayanan kesehatan bayi di Provinsi Riau tahun 2024 sebesar 88,4% terjadi penurunan sedikit dibandingkan tahun 2023 (89,5%) meningkat dibandingkan tahun 2022 (86,3%).

Kondisi ini disebabkan oleh terkait pelayanan maupun administrasi. Untuk lebih jelasnya gambaran cakupan pelayanan kesehatan bayi selama 5 (lima) tahun dimana cakupan pelayanan kesehatan bayi masih dibawah target yang ditetapkan 90%, dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



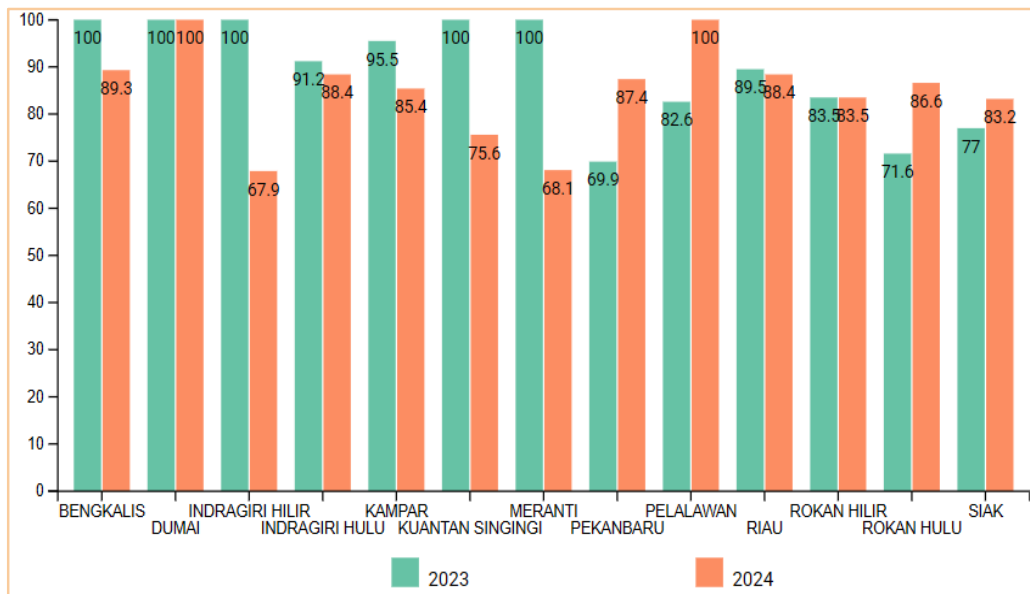
GAMBAR 5.50
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Untuk mendapat gambaran cakupan pelayanan kesehatan bayi menurut Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada grafik berikut ini :

GAMBAR 5.51
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2023-2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dari grafik cakupan pelayanan kesehatan bayi di kabupaten/kota terlihat baru 50% atau 6 (enam) kabupaten/kota mengalami peningkatan dibandingkan dengan



tahun sebelumnya, diantaranya Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak. Sedangkan Kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk itu pencapaian kunjungan bayi masih perlu diperkuat lagi terutama dari sisi kualitas dengan memperhatikan beberapa hal antara lain :

- Masih terdapat kunjungan bayi oleh tenaga kesehatan yang belum tercatat (under reported)
- Program Public Health Nursing (PHN) belum berjalan secara maksimal
- Jadwal imunisasi pada bayi hanya sampai sekitar umur 9 (sembilan) bulan sehingga hal ini juga menjadi penyebab masyarakat tidak membawa bayinya pada petugas kesehatan kecuali jika sakit.

Persentase Desa/Kelurahan UCI

Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi. Keberhasilan UCI tercapai apabila semua bayi di desa tersebut mendapatkan imunisasi dasar lengkap sekitar 90 % atau lebih. Dari grafik dibawah ini dapat dilihat bahwa Cakupan Universal Child Immunization (UCI) di Provinsi Riau pada periode 2019–2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi cukup tajam.

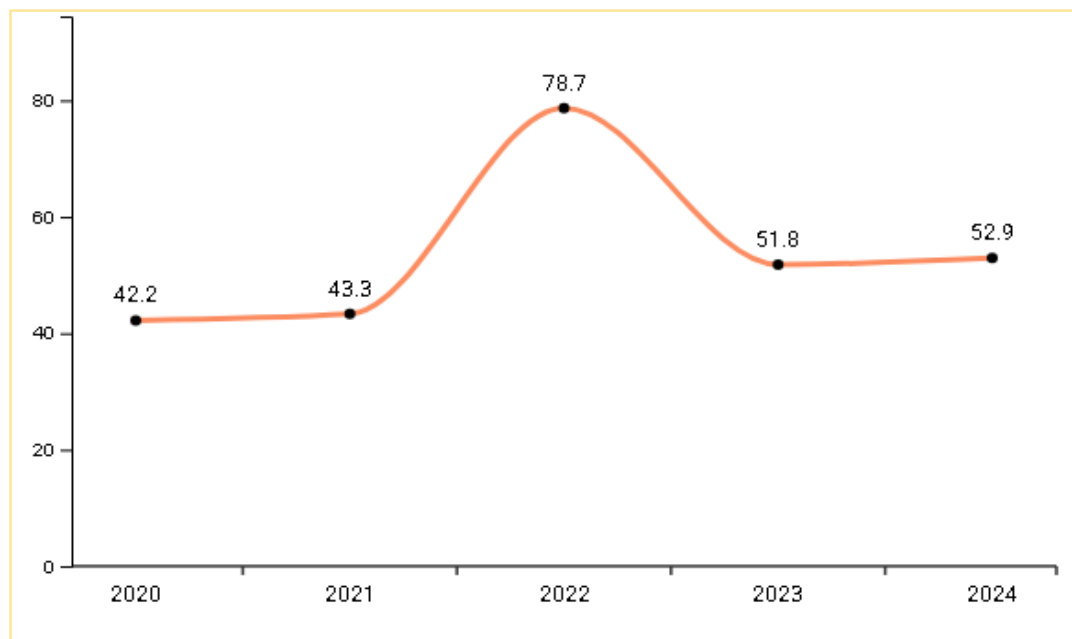
Tahun 2019 tercatat 67,0%, lalu turun drastis pada 2020 menjadi 42,2% akibat dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu pelayanan imunisasi. Tahun 2021 meningkat tipis menjadi 43,3%, kemudian melonjak pada 2022 hingga 78,7% kemungkinan intensifikasi kampanye imunisasi pasca-pandemi. Namun, capaian kembali menurun menjadi 51,8% di 2023 dan tahun 2024 mencatat sedikit peningkatan menjadi 52,9%, namun belum cukup untuk kembali ke capaian optimal.

Fluktuasi yang cukup besar ini menunjukkan bahwa upaya pencapaian UCI di Riau belum konsisten dan rentan terhadap berbagai faktor eksternal. Diperlukan strategi penguatan pelayanan imunisasi di tingkat desa/kelurahan, distribusi vaksin yang tepat waktu, perencanaan berbasis wilayah, serta peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat agar seluruh desa/kelurahan dapat mencapai status UCI secara berkelanjutan. Sedangkan Cakupan Universal Child



Immunization (UCI) di Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024, terlihat pada grafik dibawah ini.

GAMBAR 5.52
CAKUPAN DESA/KELURAHAN UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION (UCI) PROVINSI RIAU 2020-2024



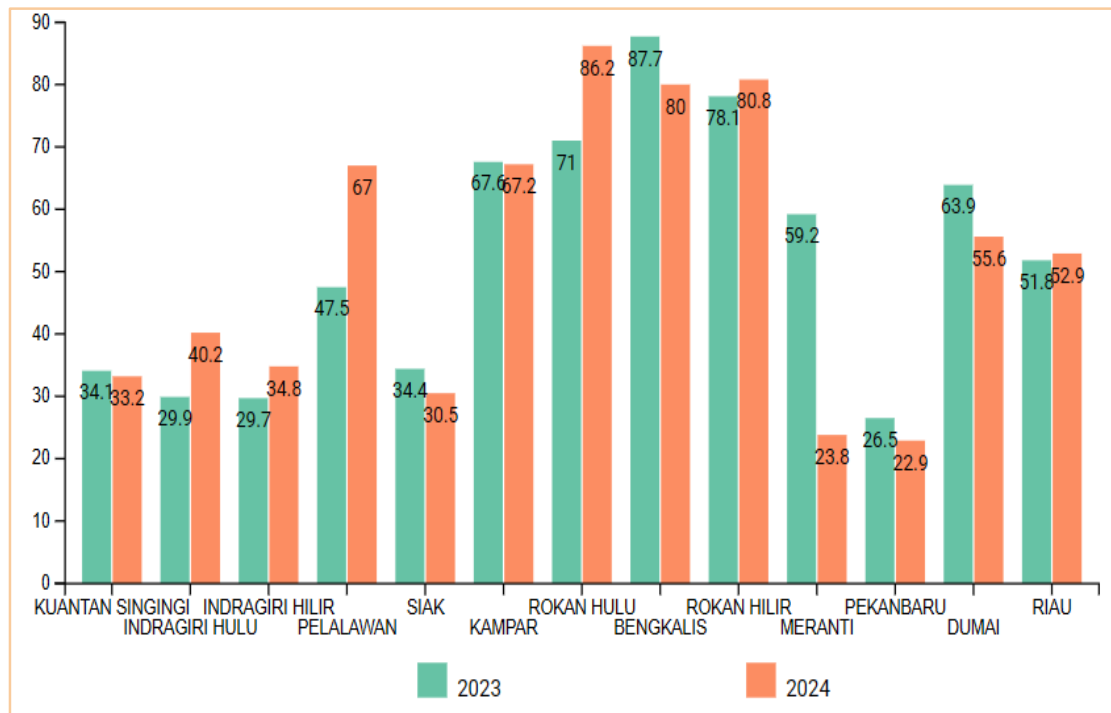
Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Meskipun Cakupan Universal Child Immunization (UCI) di Provinsi Riau mengalami peningkatan namun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Demikian juga bila dilihat dari cakupan UCI tahun 2024 di kabupaten/kota, sebagian Kabupaten/Kota cakupan UCI mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Dan cakupan tertinggi di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 86,21% diikuti cakupan Kabupaten Rokan Hilir 80,75% dan Kabupaten Bengkalis 80 % sedangkan Kabupaten yang cakupan sangat rendah adalah Kota Pekanbaru sebesar 22,89% diikuti Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 23,76% dan Kabupaten Siak 30,53%.

Untuk lebih jelasnya gambaran cakupan desa/kelurahan UCI di kabupaten/kota tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



GAMBAR 5.53
CAKUPAN DESA/KELURAHAN UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION (UCI) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2023-2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

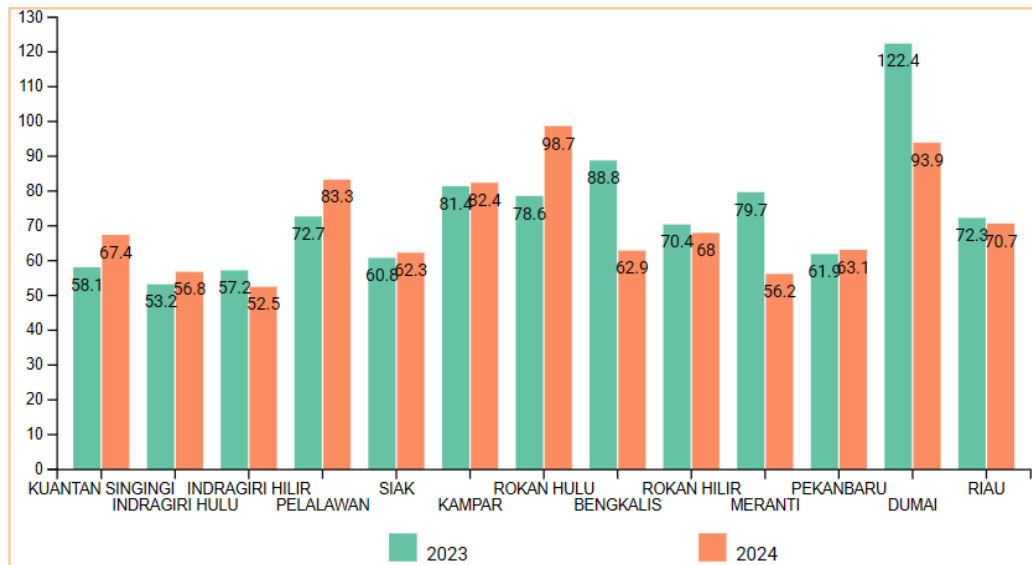
Gambaran cakupan desa/kelurahan UCI di kabupaten/kota perlu menjadi perhatian semua pihak, agar dapat lebih menggerakkan masyarakat untuk dapat meningkatkan kesadaran untuk membawa balita ke posyandu guna mendapat imunisasi. Ini terlihat dari balita yang ditimbang D/S sebesar 51,32%.

Anak Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap

Imunisasi dasar lengkap (IDL) merupakan indikator dalam program imunisasi, dimana setiap bayi usia 0-11 bulan sudah mendapatkan imunisasi hepatitis 1 kali, BCG 1 kali, DPT-HB-Bib 3 kali, Polio 4 kali, IPV 1 kali dan Campak/Measles Rubella (MR) satu kali. Untuk gambaran jelasnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



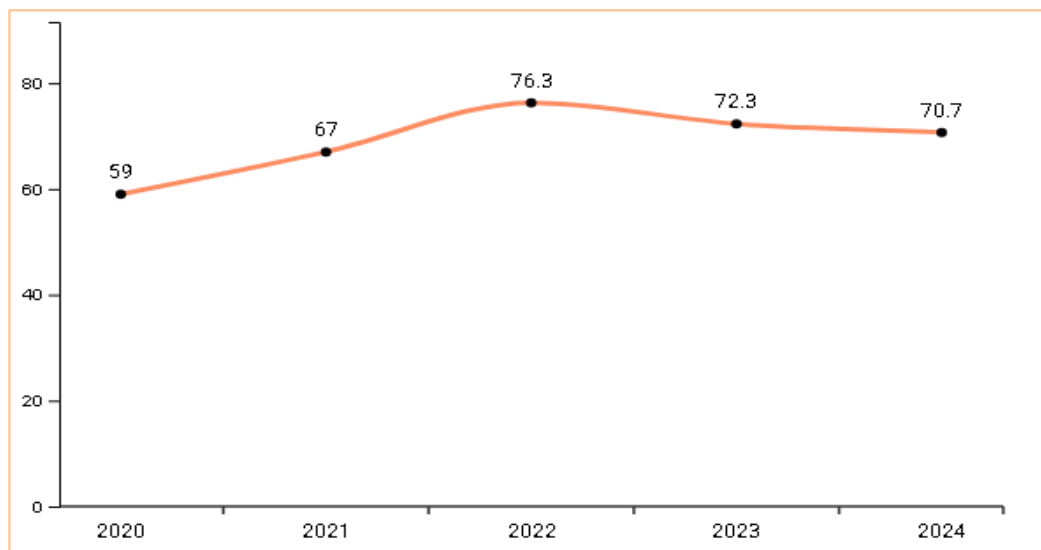
GAMBAR 5.54
PERSENTASE ANAK YANG MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL) MENURUT
KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Untuk persentase anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL) di Provinsi Riau Tahun 2019-2024, dapat dilihat pada grafik dibawah ini yakni persentase anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL) tahun 2024 adalah sebesar 70,70% terjadi penurunan sedikit dari tahun 2023 (72,3%) menurun dibandingkan dengan tahun 2022 (76,3%).

GAMBAR 5.55
PERSENTASE ANAK YANG MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL)
PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

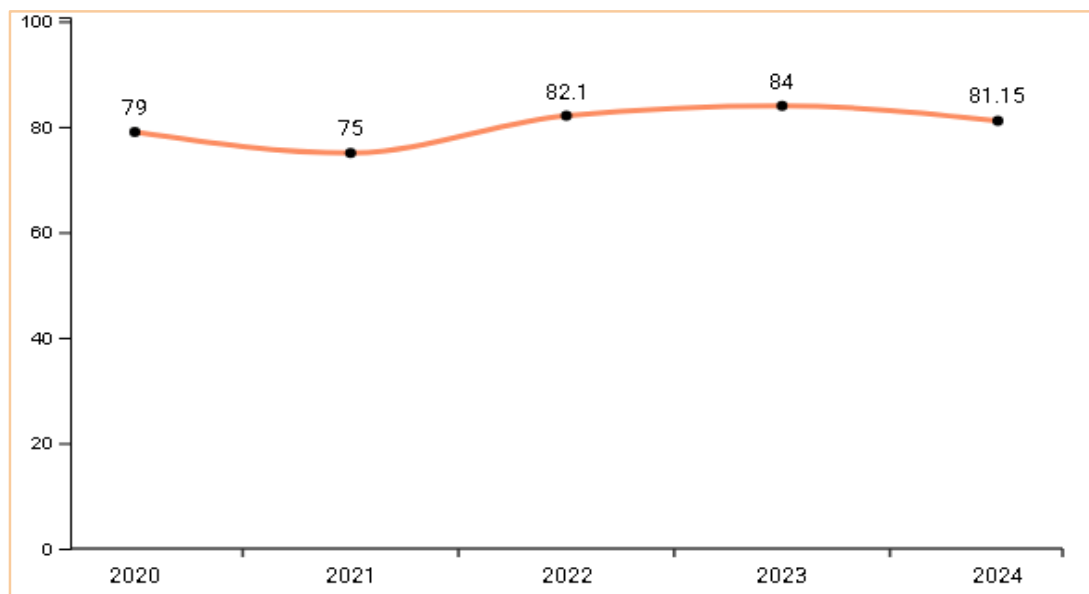


7. Pemberian Vitamin A Pada Bayi dan Anak Balita

Pemberian Vitamin A pada bayi adalah bayi usia 6 sampai 11 bulan yang mendapat kapsul vitamin A berwarna biru dengan kandungan vitamin A 100.000 Satuan Internasional (SI) dan anak umur 12 sampai 59 bulan yang mendapat kapsul vitamin A berwarna merah dengan kandungan vitamin A sebesar 200.000 SI.

Cakupan pemberian kapsul vitamin A balita 6 - 11 bulan dihitung dengan menjumlahkan cakupan vitamin A bayi 6 - 11 bulan bulan Februari dan Agustus. Cakupan pemberian kapsul vitamin A pada bayi 6-11 bulan di Provinsi Riau pada tahun 2024 sebesar 81,15% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 (84,0%) dan tahun 2022 (82,1%) dan capaian cakupan ini tidak sesuai dengan target yang ditetapkan yakni 90%.

GAMBAR 5.56
CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI (6-11 BULAN) PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



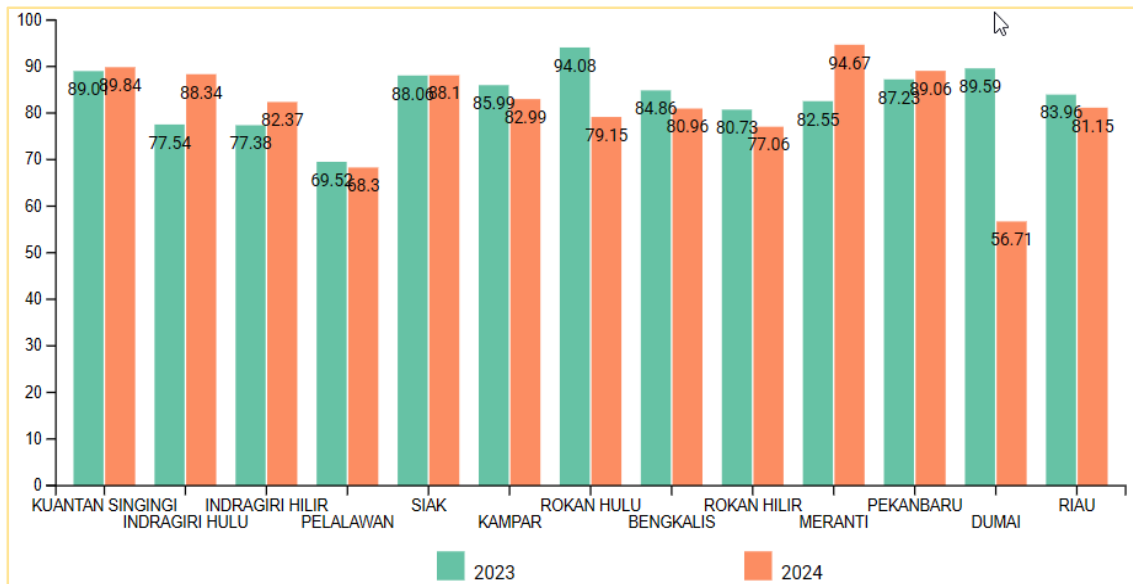
Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Cakupan pemberian kapsul vitamin A Balita umur 6-11 bulan di kabupaten/kota yang tertinggi adalah Kabupaten Kep. Meranti sebesar 94,67% diikuti Kabupaten Kuantan Singingi 89,84% dan Kota Pekanbaru 89,06%. Sedang capaian terendah Kota Dumai sebesar 56,72% diikuti Kabupaten Pelalawan sebesar 68,30% dan kabupaten Rokan Hilir sebesar 77,06%. Dan Hanya



Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :

GAMBAR 5.57
CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI (6-11 BULAN) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Cakupan pemberian kapsul vitamin A bayi terintegrasi dalam pelayanan kesehatan bayi. Berdasarkan laporan terdapat kesenjangan antara dua indikator ini. Cakupan pelayanan kesehatan bayi lebih rendah daripada cakupan vitamin A bayi.

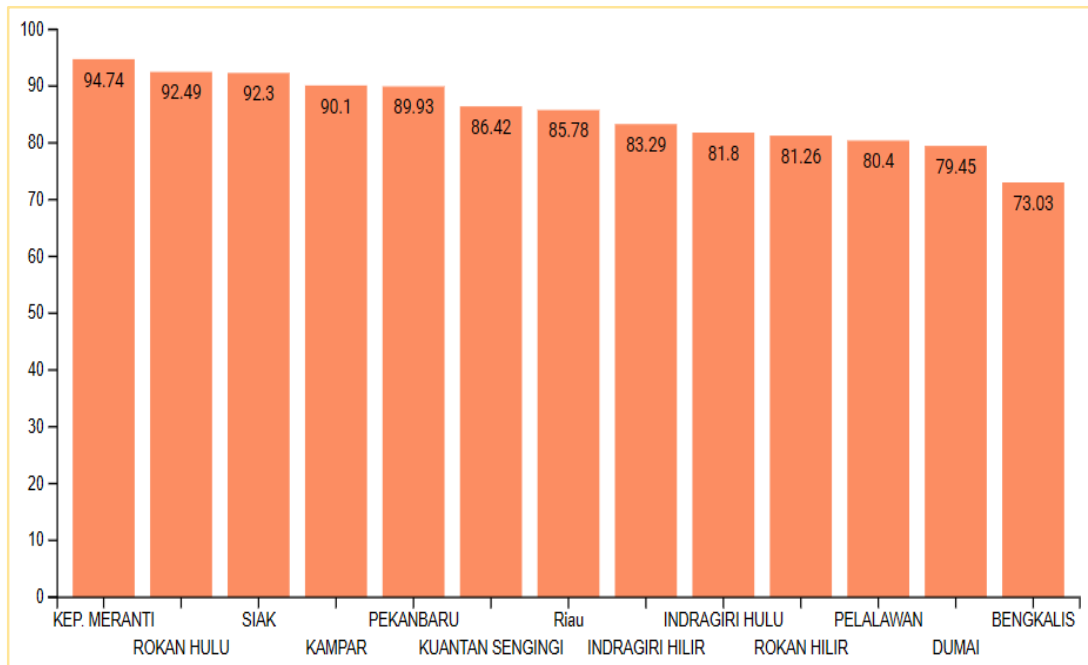
Hal ini kemungkinan disebabkan masih ada beberapa indikator di Pelayanan Kesehatan Bayi yang belum dilaksanakan, seperti deteksi dini tumbuh kembang (DDTK) dan minimal kunjungan bayi 4 kali setahun. Pemberian vitamin A adalah salah satu indikator saja dalam pelayanan kesehatan bayi.

Tujuan pemberian kapsul vitamin A adalah untuk menurunkan prevalensi dan mencegah Kekurangan Vitamin A (KVA) pada balita. Kapsul vitamin A dosis tinggi terbukti efektif untuk mengatasi masalah KVA pada masyarakat apabila cakupannya tinggi.

Bukti-bukti lain menunjukkan peranan vitamin A dalam menurunkan angka kematian yaitu sekitar 30%-54%, maka selain untuk mencegah kebutaan, pentingnya vitamin A saat ini lebih dikaitkan dengan kelangsungan hidup anak, kesehatan dan pertumbuhan anak.



GAMBAR 5.58
CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BALITA (6-59 BULAN) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



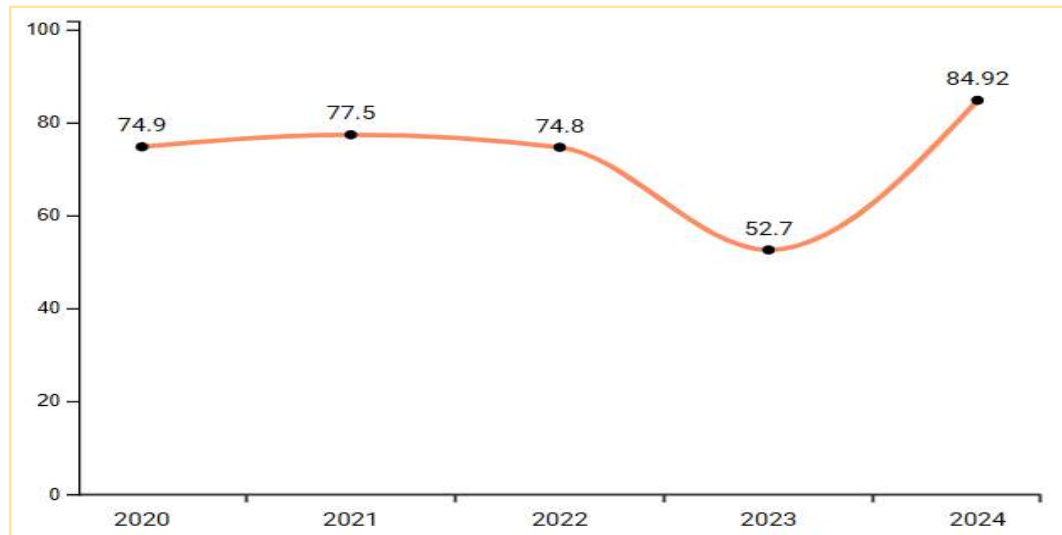
Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dalam grafik diatas terlihat bahwa cakupan pemberian vitamin A pada balita (6-59 bulan) di Provinsi Riau tahun 2024 mencapai 85,78% meningkat dibandingkan tahun 2023 (57%) dan tahun 2022 (75%). Cakupan pemberian vitamin A pada balita (6-59 bulan) Provinsi Riau tertinggi di kabupaten Kepulauan Kep. Meranti sebesar 94,74% dan jumlah terendah di Kabupaten Bengkalis sebesar 73,03%.

Cakupan pemberian kapsul vitamin A pada anak balita usia 12 – 59 bulan di Provinsi Riau pada tahun 2024 adalah sebesar 84,92% mengalami peningkatan tajam dibandingkan tahun 2023 (53%) dan tahun 2022 (73%). Untuk gambaran jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



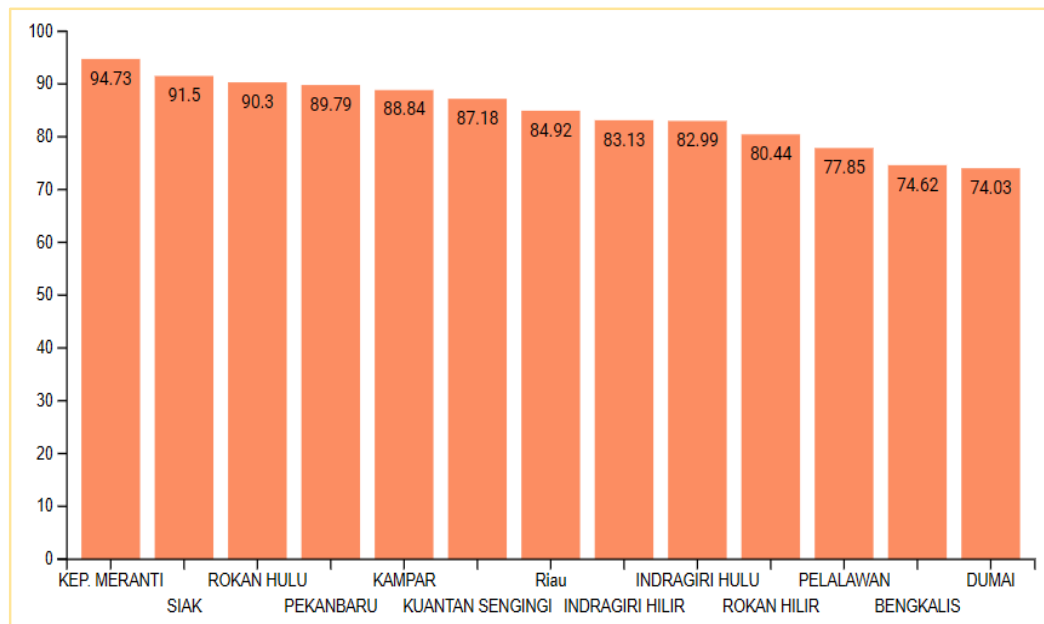
GAMBAR 5.59
CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA ANAK BALITA (12-59 BULAN) PROVINSI RIAU
TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Kabupaten yang paling tinggi capaian pemberian kapsul vitamin A anak balita usia 12-59 bulan adalah Kabupaten Kepulauan Meranti (94,73%). Dan Kabupaten yang paling rendah capaian pemberian kapsul vitamin A anak balita usia 12 – 59 bulan adalah Kota Dumai (74,03%). Untuk gambaran jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

GAMBAR 5.60
CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA ANAK BALITA (12-59 BULAN) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



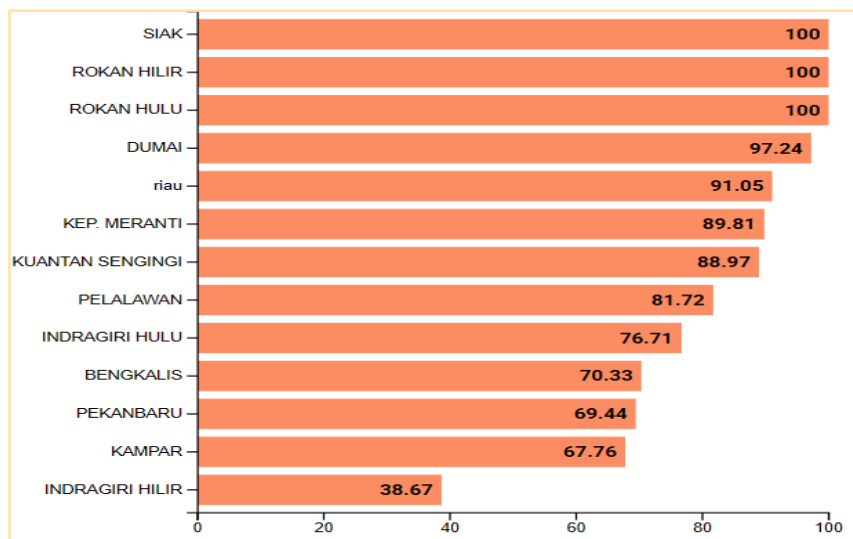
8. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan bayi, balita, dan prasekolah bertujuan menurunkan angka kematian, mencegah stunting dan wasting, serta meningkatkan kualitas hidup anak melalui layanan esensial, pencegahan penyakit, deteksi dini, dan tindak lanjut yang tepat. Data dari posyandu, PAUD/TK/RA, puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya menjadi dasar perencanaan dan evaluasi program agar lebih tepat sasaran.

Penggunaan Buku KIA perlu dioptimalkan melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk memastikan kesinambungan pelayanan ibu dan anak serta deteksi masalah kesehatan secara dini. Balita yang memiliki Buku KIA adalah yang diakui memiliki buku tersebut berdasarkan hasil anamnesis, baik dapat menunjukkan secara fisik maupun tidak.

Untuk persentase balita memiliki Buku KIA di Riau pada tahun 2024 adalah 91,05%. Untuk per Kabupaten//Kota menunjukkan balita memiliki Buku KIA yang telah ada 3 (tiga) Kabupaten/kota yang telah mencapai 100% yakni Kabupaten Siak Sri Indrapura, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten dengan cakupan persentase balita memiliki buku KIA terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 38,67%, Kabupaten Kampar sebesar 67,76% dan Kota Pekanbaru sebesar 69,44%. Gambaran jelasnya balita memiliki buku KIA dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

GAMBAR 5.61
BALITA MEMILIKI BUKU KIA MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



Sedangkan Balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan adalah Balita (0-59 bulan) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya yaitu balita yang ditimbang sedikitnya 8 kali dalam satu tahun, diukur panjang badan atau tinggi badannya sedikitnya 2 kali dalam satu tahun dan dipantau perkembangan sedikitnya 2 kali dalam satu tahun.

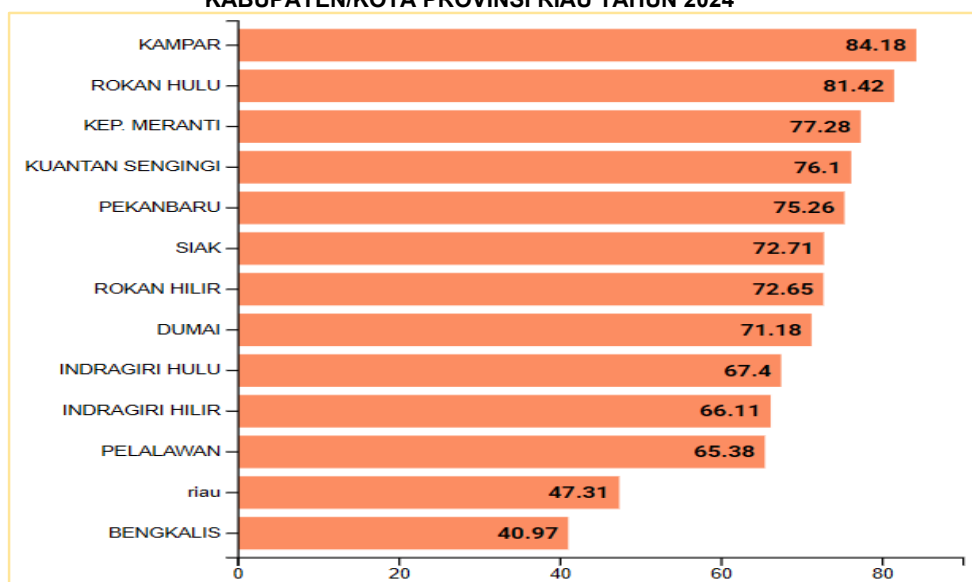
Pemantauan perkembangan menggunakan ceklis Buku KIA atau Kuesioner Pra-Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen baku lainnya. Bahwa persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan di Provinsi Riau pada tahun 2024 adalah sebesar 47,31% menurun dibandingkan tahun 2023 (59,6%).

Sementara target yang harus dicapai Tahun 2024 adalah 70%. Tidak tercapainya target Cakupan Kunjungan Persentase Balita disebabkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan yang selama ini dilaksanakan di Posyandu terhenti jika telah selesai bayi setelah mendapat imunisasi. Hasil capaian persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan antar Kabupaten/Kota yang berkisar antara 40,97% di Kabupaten Bengkalis dan 84,18% di Kota Dumai.

Kabupaten/Kota dengan cakupan persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan tinggi, yaitu Kabupaten Kampar (84,18%), Kabupaten Rokan Hulu (81,42%), Kabupaten Kep. Meranti (77,28%). Kabupaten/kota dengan cakupan persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan terendah adalah Kabupaten Bengkalis (40,97%), Kabupaten Pelalawan (65,38%) dan Kabupaten Indragiri Hilir (66,11%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



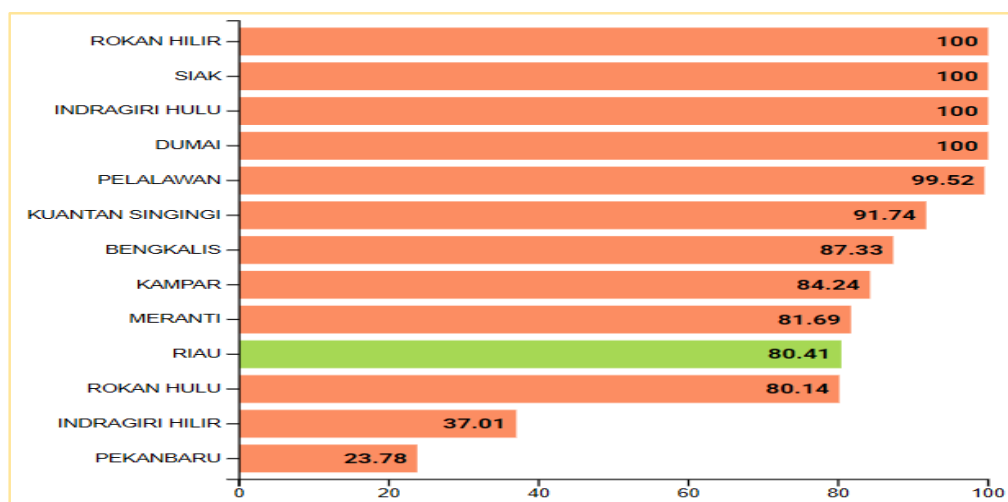
GAMBAR 5.62
PERSENTASE BALITA DIPANTAU PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN MENURUT
KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Pemantauan Pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia dilakukan berjenjang mulai dari tingkat keluarga/masyarakat dengan menggunakan checklist perkembangan Buku KIA. Hasil pemeriksaan perkembangan melalui Buku KIA dengan interpretasi tidak lengkap, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan melalui kegiatan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK) di Puskesmas.

GAMBAR 5.63
PERSENTASE BALITA DILAYANI SDIDTK MENURUT KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI RIAU TAHUN 2024



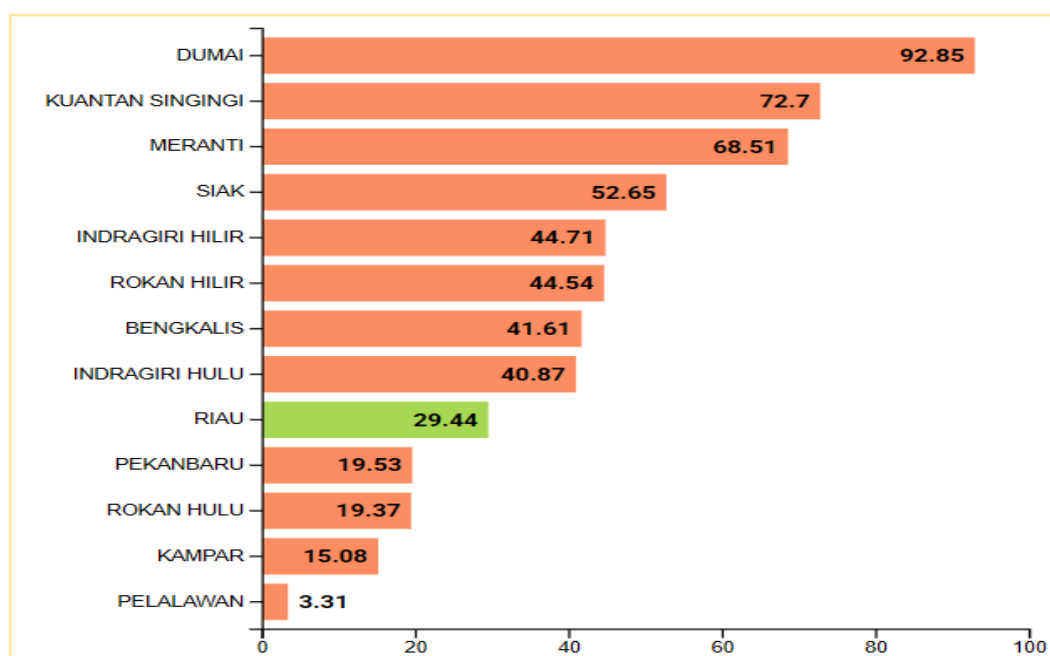
Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



Persentase balita dilayani SDIDTK tingkat Provinsi Riau Tahun 2024 sebesar 80,41% meningkat dibandingkan Tahun 2023 (72%). Hasil capaian per kabupaten/kota cakupan balita dilayani SDIDTK berkisar antara 23,78% di Kota Pekanbaru dan 100% di 4 (empat) Kabupaten/kota yakni Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Siak. Kabupaten/kota dengan cakupan balita dilayani SDIDTK terendah adalah Kota Pekanbaru sebesar 23,78% diikuti Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 37,01% dan Kabupaten Rokan Hulu sebesar 80,14%.

Sebagai tindak lanjut dari upaya deteksi faktor risiko dan penyakit, maka dilakukan penanganan bayi dan balita sakit dengan pendekatan MTBS di Puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya.

GAMBAR 5.64
PERSENTASE BALITA DILAYANI MTBS MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Persentase balita dilayani MTBS Provinsi Riau Tahun 2024 adalah sebesar 29,44% terjadi peningkatan sedikit dibandingkan tahun 2023 sebesar 25%. Cakupan balita dilayani MTBS antar Kabupaten berkisar antara 3,31% di Kabupaten Pelalawan dan 92,85% di Kota Dumai. Kabupaten/kota dengan cakupan balita dilayani MTBS terendah adalah Kabupaten Pelalawan (3,31%), Kabupaten Kampar (15,08%), Kabupaten Rokan Hulu (19,37%).

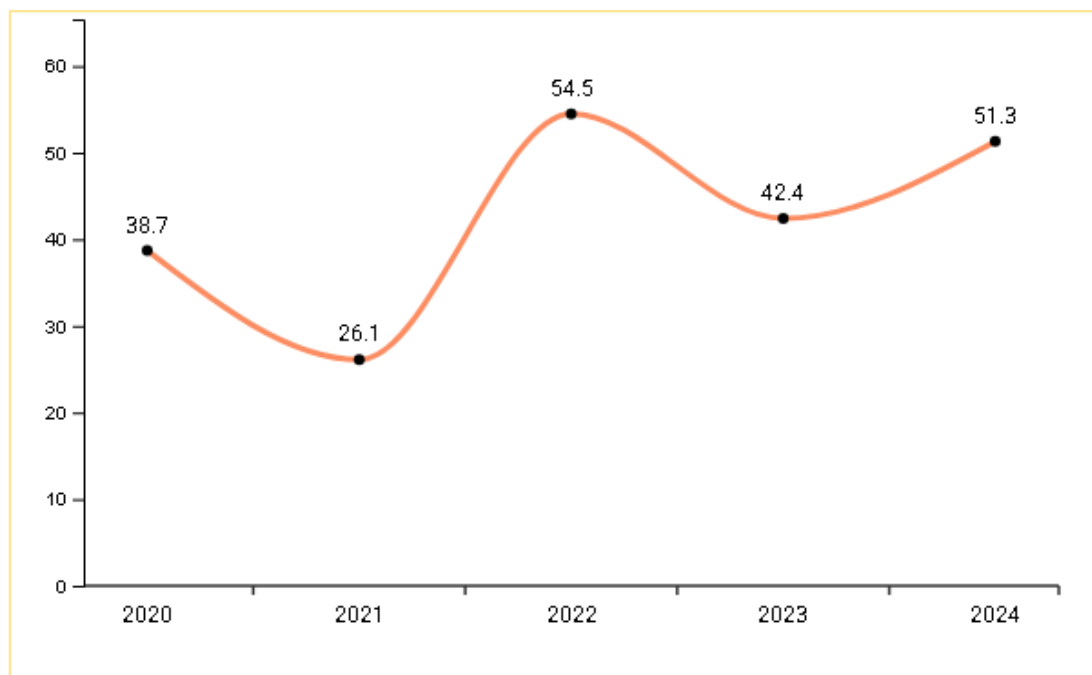


Balita Ditimbang

Penimbangan balita merupakan gambaran kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di Posyandu. Indikatornya berkaitan dengan cakupan pelayanan gizi pada balita, cakupan pelayanan imunisasi, pemberian kapsul vitamin A yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap prevalensi gizi kurang pada balita. Asumsinya semakin tinggi cakupan D/S, semakin tinggi cakupan vitamin A, semakin tinggi cakupan imunisasi maka semakin rendah prevalensi gizi kurang.

Persentase Balita ditimbang Provinsi Riau dalam 5 (lima) tahun fluktuatif. Dimana pada tahun 2019 sebesar 55,7% dan tahun 2024 (51,32%), situasi ini perlu menjadi perhatian dan menjadi strategi promosi kesehatan. Untuk gambaran penimbangan 5 tahun (2019 – 2024) dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

GAMBAR 5.65
PERSENTASE BALITA DITIMBANG PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024

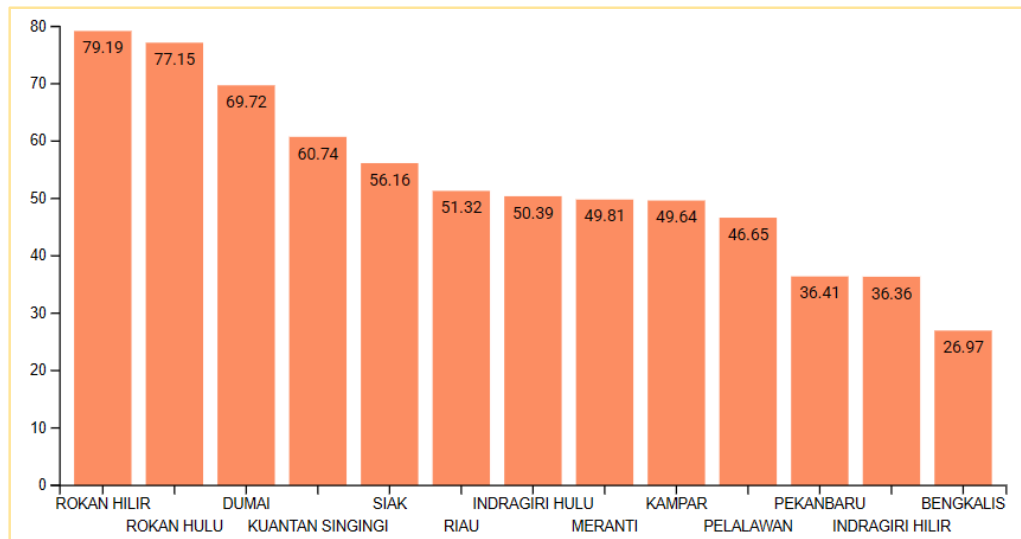


Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Sedangkan gambaran balita di balita ditimbang menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



GAMBAR 5.66
PERSENTASE BALITA DITIMBANG MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dari grafik di atas diketahui bahwa jika tahun 2024 Kabupaten yang paling tinggi cakupan D/S adalah Kabupaten Rokan Hilir (79,19%) diikuti Kabupaten Rokan Hulu (77,15%) dan Kota Dumai (69,72%). Sedangkan cakupan D/S yang terendah tahun 2024 adalah Kabupaten Bengkalis (26,97%) diikuti Kabupaten Indragiri Hilir (36,36%) dan Kota Pekanbaru (36,41%).

C. STATUS GIZI PADA BALITA

Status gizi yang baik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan kesehatan yang pada dasarnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Anak balita merupakan kelompok rawan yang sangat perlu mendapat perhatian khusus karena dampak negatif yang ditimbulkan apabila menderita kekurangan gizi. Masalah gangguan tumbuh kembang terutama pada bayi dan anak usia di bawah 2 tahun (baduta) merupakan masalah yang perlu ditanggulangi dengan serius. Usia di bawah dua tahun merupakan masa yang amat penting sekaligus masa kritis dalam proses tumbuh kembang anak baik fisik maupun kecerdasan.

Permasalahan gizi menjadi bagian penting dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu bangsa. Pengukuran status gizi adalah salah satu kegiatan dalam penentuan kesehatan dan kualitas SDM tersebut. Pengukuran status gizi balita dilakukan untuk mengetahui masalah kesehatan di masyarakat yang dipantau terus menerus agar dapat memberikan gambaran tentang kondisi



status gizi balita di suatu wilayah, dimana hasilnya akan menjadi pedoman dalam penentuan kebijakan, intervensi dan perencanaan program yang efektif dan efisien.

Status gizi balita dapat diketahui melalui hasil pengukuran berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) balita yang disajikan dalam tiga indikator status gizi berdasarkan standar antropometri anak, yaitu :

- berat badan menurut umur (BB/U) underweight (BB kurang dan BB sangat)
- tinggi badan menurut umur (TB/U stunting (Pendek dan sangat pendek)
- berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) wasting (gizi kurang dan Gizi buruk)

Untuk Status Gizi Balita Provinsi Riau ini berasal dari :

- Survei nasional
 - Pemantauan Status Gizi (PSG) Provinsi Riau tahun 2016 dan 2017
 - Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Provinsi Riau tahun 2018
 - Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Provinsi Riau tahun 2019, 2021 dan 2022.
 - Survei Kesehatan Indonesia Provinsi Riau tahun 2023
- Kegiatan surveilans gizi yaitu pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu yang diinput dalam aplikasi sigizi terpadu (e PPGBM) tahun 2021 dan 2023, 2024.

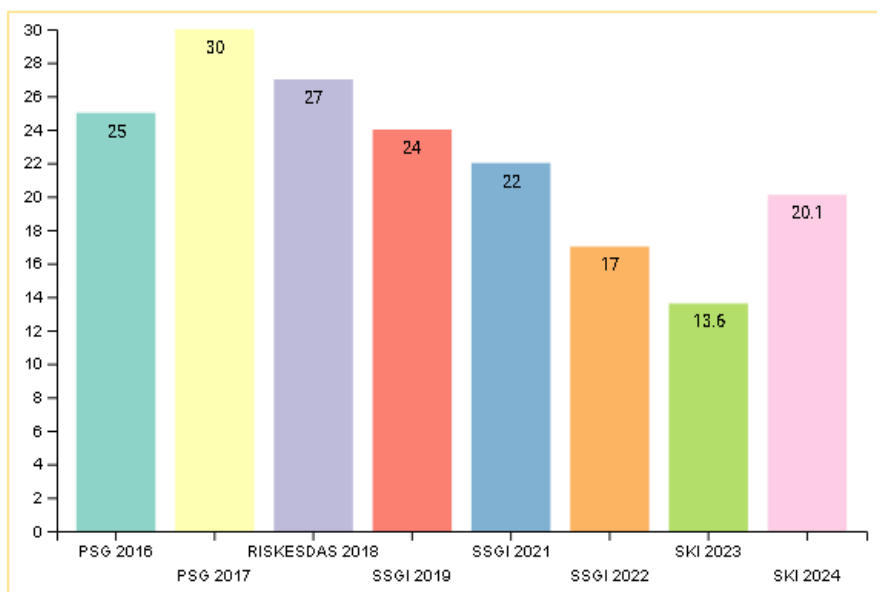
1. Status Gizi Balita berdasarkan Survey Nasional

a. Prevalensi Balita Stunting (TB/U)

Prevalensi balita sangat pendek dan pendek (stunting) dari tahun 2016 sampai tahun 2023 Provinsi Riau termasuk kategori tinggi masalah kesehatan (>20%), tahun 2022 terjadi penurunan prevalensi dan sudah berada pada kategori sedang (10%-<20%). Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



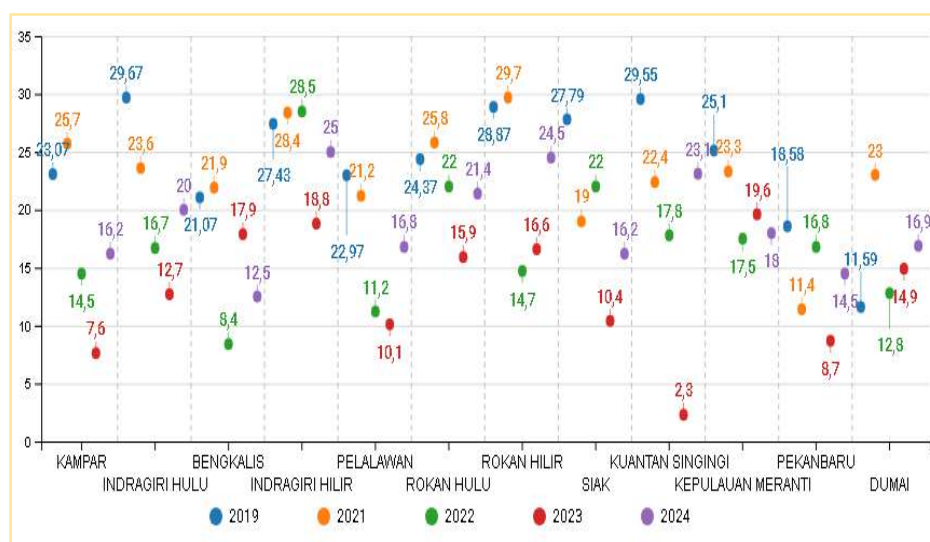
GAMBAR 5.67
PREVALENSI BALITA STUNTING (TB/U) BERDASARKAN SURVEY PROVINSI RIAU
TAHUN 2016 – 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Target nasional tahun 2022 adalah 18,4%, dan hasil SSGI 2022 Provinsi Riau sudah di bawah target (17%), hasil SKI 2023 Provinsi Riau sudah mencapai target 13,6%. Dan SSGI 2024 sebesar 20,1% dengan target 10%.

GAMBAR 5.68
PREVALENSI BALITA STUNTING (TB/U) BERDASARKAN SURVEY MENURUT KAB/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2019 – 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

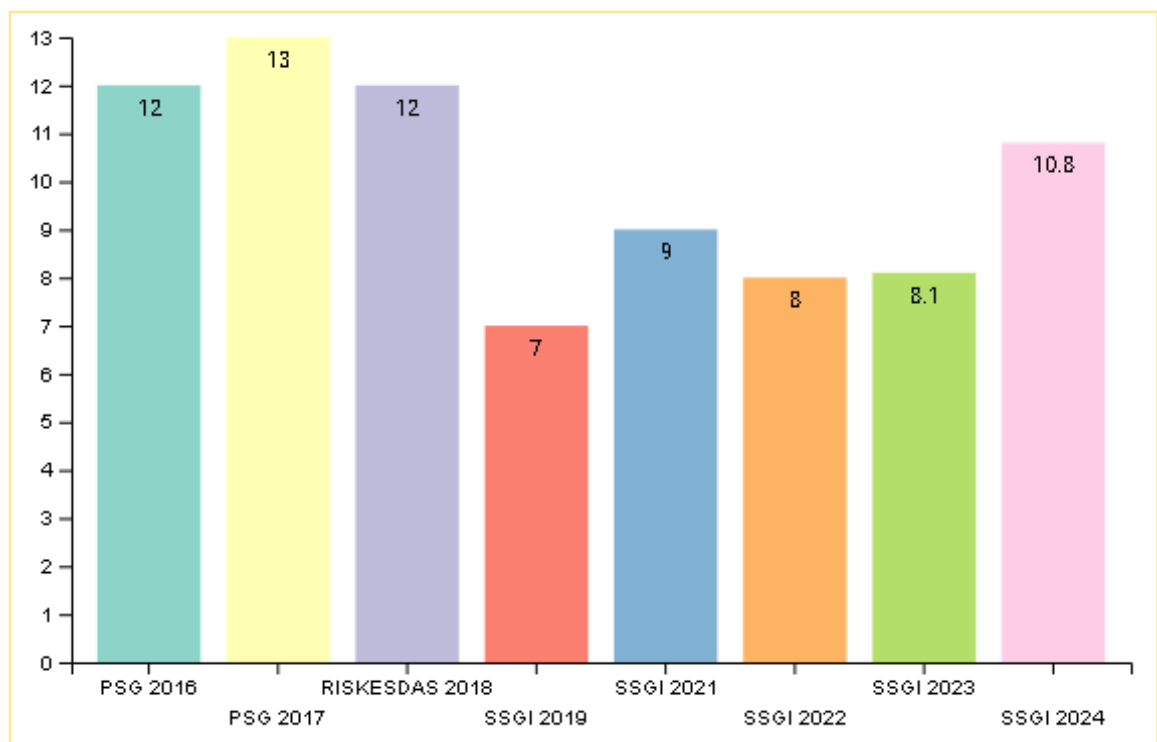
Prevalensi Stunting balita tahun 2016 paling tinggi (>30%) adalah Kabupaten Indragiri Hilir, tahun 2017 Kabupaten Rokan Hulu, dan tahun 2018 Kabupaten Rokan Hilir.



Survei tahun 2022 kabupaten Indragiri Hilir masih paling tinggi prevalensinya (28,5%). Hasil SKI tahun 2023 hanya 1 (satu) kabupaten yang masih berada pada kategori tinggi masalah kesehatan (>20%) yaitu Kabupaten Kuantan Singingi 23%. Dan Kabupaten Indragiri Hilir masih kategori tinggi berdasarkan SSGI 2024 sebesar 20,1% dan prevalensi stunting rendah adalah Kabupaten Bengkalis 12,5%.

b. Prevalensi Balita Wasting (BB/TB)

GAMBAR 5.69
PREVALENSI BALITA WASTING (BB/TB) BERDASARKAN SURVEY
PROVINSI RIAU TAHUN 2016 – 2024

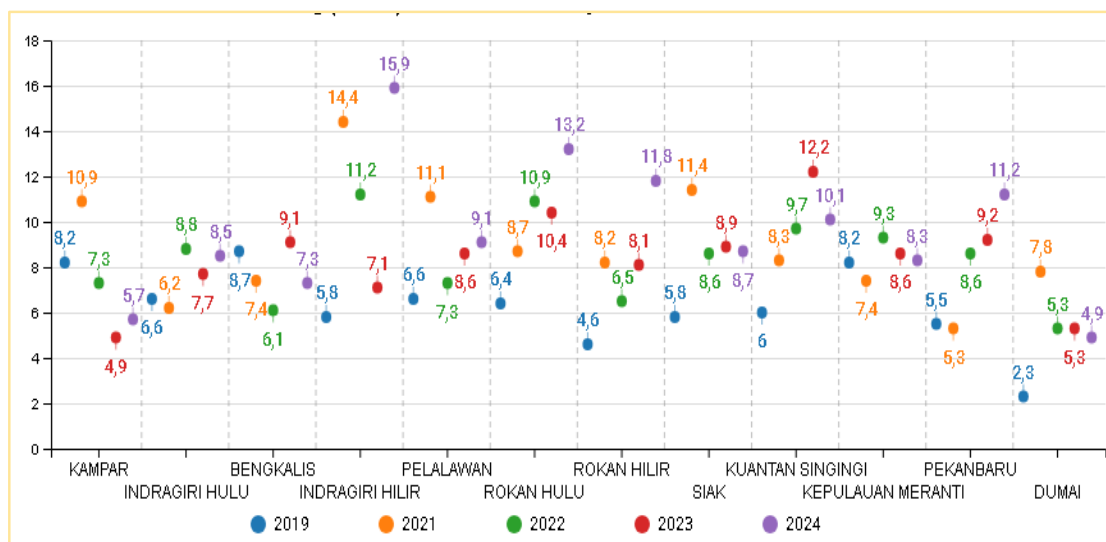


Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Berdasarkan indikator balita gizi buruk dan gizi kurang (wasting) dari tahun 2016 Provinsi Riau termasuk kategori Tinggi (>10%) masalah kesehatan. Jika dibanding target nasional tahun 2024 (<5%), prevalensi wasting Provinsi Riau tahun 2024 sebesar 10,8 % masih belum mencapai target (di atas target).



GAMBAR 5.70
PREVALENSI BALITA WASTING (BB/TB) BERDASARKAN SURVEY MENURUT KAB/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2019 -2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Hasil SKI tahun 2024 Prevalensi wasting paling tinggi adalah Kab. Indragiri Hilir sebesar 15,9% diikuti Kabupaten Rokan Hulu sebesar 13,2% dan Kabupaten Rokan Hilir sebesar 11,8%. Untuk wasting paling rendah Kota Dumai sebesar 4,9% dan merupakan satu-satunya Kabupaten/kota yang sudah mencapai target nasional <5%. Diikuti Kabupaten Kampar sebesar 5,7% dan Kabupaten Bengkalis sebesar 7,3%.

2. Status Gizi Balita berdasarkan Surveilans Gizi (SIGIZITERPADU – ePPGM)

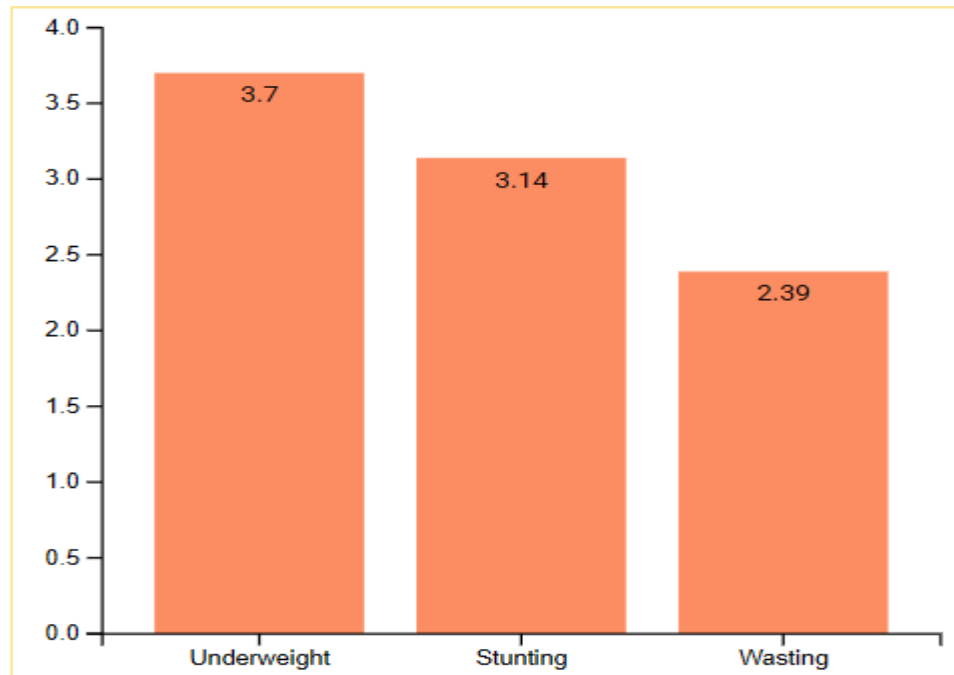
Berdasarkan hasil pendataan di posyandu melalui kegiatan surveilans gizi yang diinput dalam aplikasi e PPGBM tahun 2024, diketahui persentase status gizi balita di Provinsi Riau. Dan cakupan penimbangan pada tahun 2024 telah pencapaian 71,35% sedangkan tahun 2023 telah mencapai 66,18% dan untuk tahun 2022 hanya mencapai 66,98%, meningkat dibanding tahun 2021 (55%).

Berdasarkan analisa data status gizi balita pada tahun 2023 ini terdapat 9.172 balita (3,8%) mengalami berat badan sangat kurang dan Kurang (underweight), 8.572 balita (3,6%) mengalami tinggi badan sangat pendek dan pendek (stunting), 6.471 balita (2,73%) mengalami gizi buruk dan gizi kurang (wasting).



Dan untuk tahun 2024 ini sedikit penurunan dibandingkan tahun 2023 hal ini disebabkan perbaikan gizi balita menjadi program prioritas kesehatan saat ini. Gambaran jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

GAMBAR 5.71
STATUS BALITA BERDASARKAN PENIMBANGAN (E PPGBM) PROVINSI RIAU TAHUN 2024



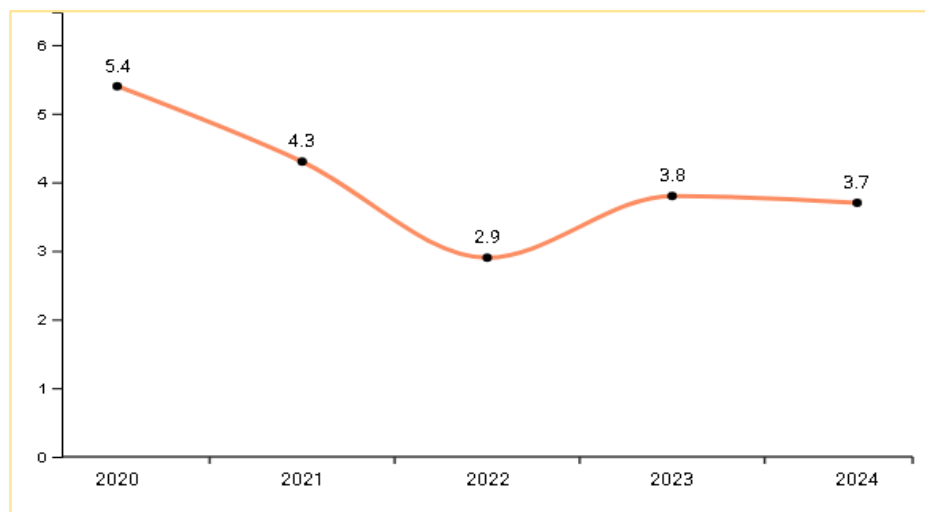
Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

a. Persentase Status Gizi Balita Berdasarkan Indikator BB/U (Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang - Underweight)

Status gizi balita berdasarkan indeks berat badan menurut umur atau BB/U menggambarkan terjadinya gangguan gizi saat ini pada balita (masalah gizi akut). Gambaran status gizi balita di Provinsi Riau tahun 2024 sebesar 3,7% terjadi penurunan sedikit dibandingkan tahun 2023 sebesar 3,8% meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan status gizi ini erat dengan komitmen pemerintah baik pusat dan daerah untuk melakukan perbaikan gizi masyarakat. Gambaran status gizi (*underweight*) di Provinsi Riau selama 5 tahun (tahun 2019 – 2024) dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



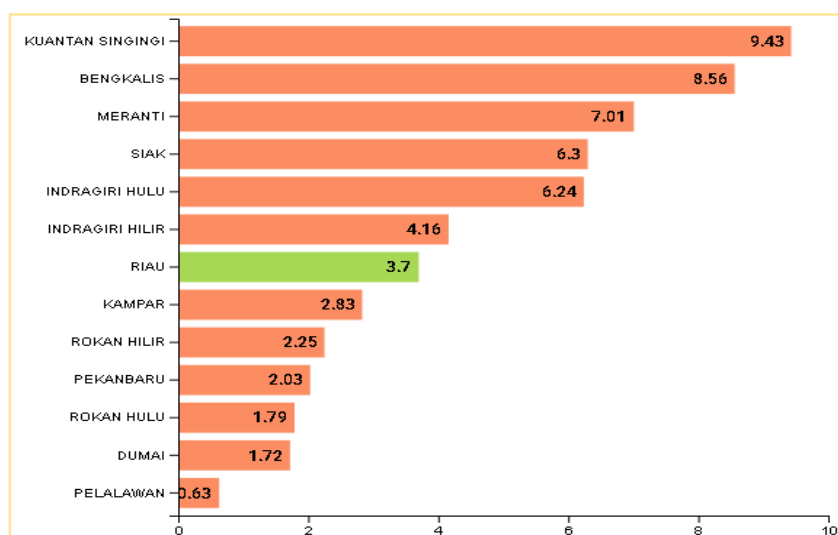
GAMBAR 5.72
STATUS BALITA BERAT BADAN KURANG BERDASARKAN INDEKS BB/U PROVINSI RIAU
TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Untuk melihat gambaran status gizi (underweight) di kabupaten/kota dapat dilihat dari grafik dibawah ini, terlihat bahwa yang terbanyak ditemui balita underweight adalah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 9,43% diikuti dengan Kabupaten Bengkalis 8,56% dan Kabupaten Kep. Meranti capaian 7,01%. Paling sedikit ditemui underweight adalah Kabupaten Pelalawan sebesar 0,63% diikuti Kota Dumai 1,21% dan Kota Pekanbaru 1,49%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

GAMBAR 5.73
STATUS BALITA UNDERWEIGHT MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024



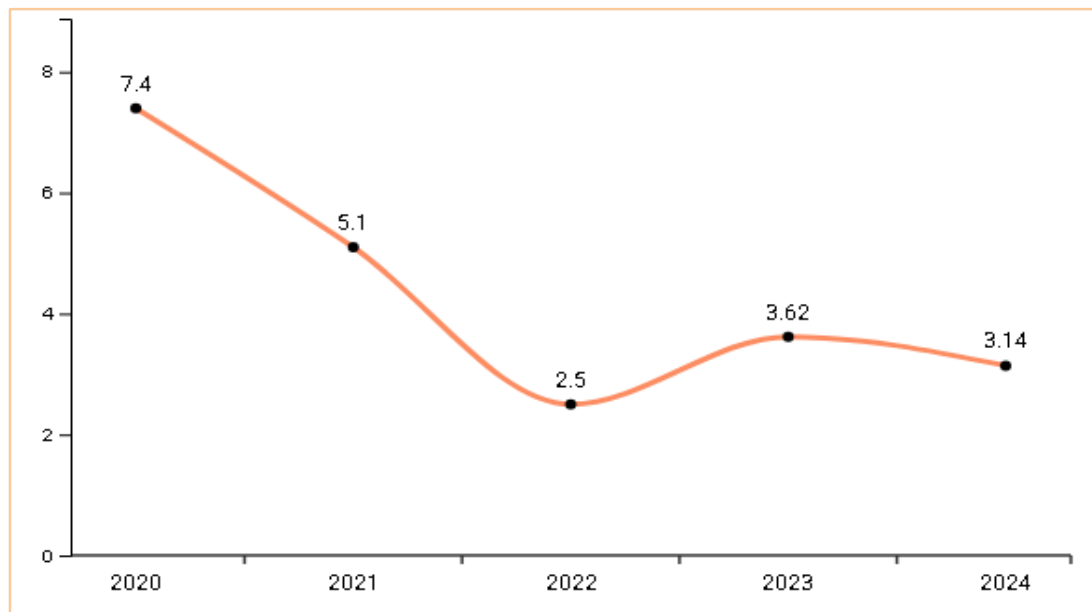
Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



b. Persentase Status Gizi Balita Berdasarkan Indikator TB/U (Berat Badan Sangat pendek dan Berat Badan Pendek – (Stunting)

Persentase balita stunting adalah jumlah dari balita Sangat pendek dan pendek. Berdasarkan hasil analisa data e ppgbm dapat diketahui persentase balita stunting di Provinsi Riau tahun 2024 sebanyak 3,14% menurun dibandingkan tahun 2023 (3,6%). Untuk lebih jelas dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

GAMBAR 5.74
STATUS BALITA PENDEK/STUNTING BERDASARKAN INDEKS TB/U PROVINSI RIAU
TAHUN 2020-2024



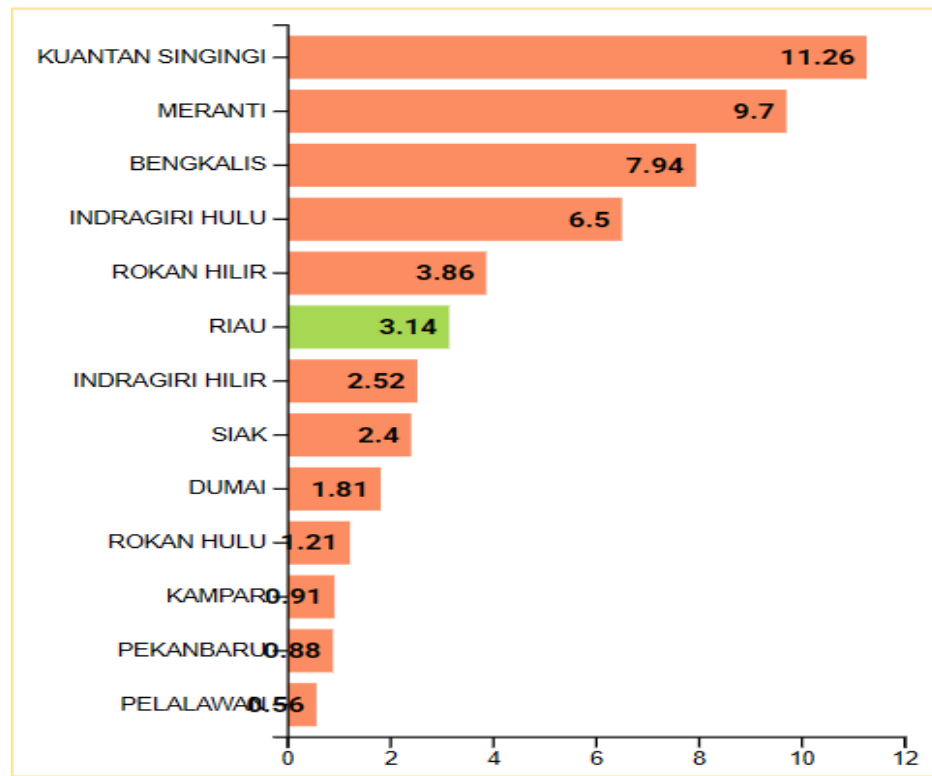
Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Status balita gizi stunting berdasarkan indeks TB/U di Provinsi Riau Tahun 2019-2024 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan balita stunting merupakan program prioritas pembangunan kesehatan saat ini dimana ditargetkan stunting pada tahun 2024 adalah 3,14%, jika dilihat dari data di atas maka Provinsi Riau telah mencapai target, namun ini belum data menggambarkan hasil dilapangan sebab cakupan penimbangan pada tahun 2024 hanya mencapai 66%.

Sehingga untuk Publish data stunting masih menggunakan data dari survei nasional, sementara data hasil dari e-PPGM digunakan melihat pencapaian program. Dan gambaran persentase balita stunting di Kabupaten/kota dapat ditunjukkan pada grafik dibawah ini :



GAMBAR 5.75
STATUS BALITA STUNTING BERDASARKAN TB/U MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU
TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

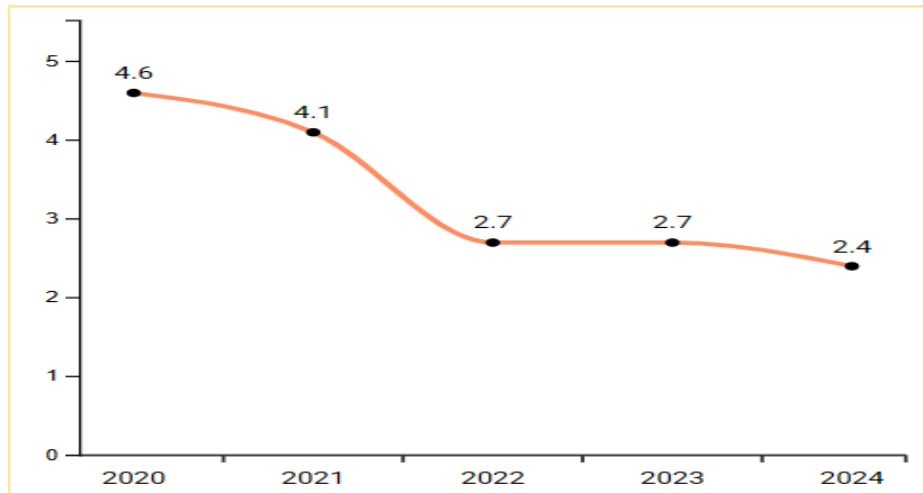
c. Persentase Status Gizi Balita Berdasarkan Indikator TB/U (Berat Badan Gizi Buruk dan Berat Gizi Kurang – (Wasting))

Data yang dikumpulkan adalah data berat badan, tinggi badan atau panjang badan. Umur dan jenis kelamin. Persentase balita wasting adalah gambaran balita dengan pengukuran berat badan dibanding dengan tinggi badan (indeks BB/TB) dan merupakan gabungan status gizi buruk dan gizi kurang.

Dari hasil analisa data ePPGBM diketahui persentase balita wasting di Provinsi Riau tahun 2024 adalah 2,39% (gizi buruk 0,16% dan gizi kurang 2,24% menurun dibanding dengan tahun 2023 adalah 2,7,% (gizi buruk 0,3% dan gizi kurang 2,4%). Dimana status balita wasting seperti yang ditunjukan pada grafik dibawah ini :



GAMBAR 5.76
STATUS BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/TB PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024

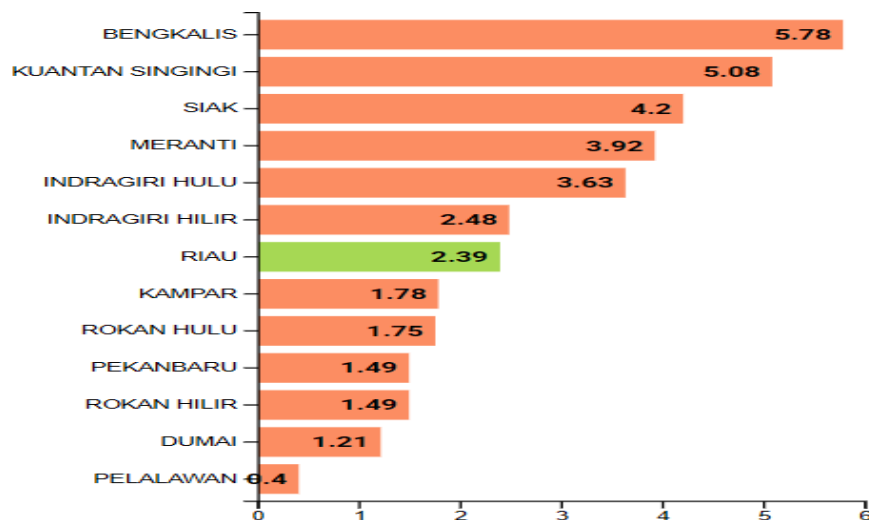


Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Sedangkan persentase status gizi (wasting) di Kabupaten/kota terlihat bahwa Kabupaten Bengkalis (5,78%), Kabupaten Kuantan Singingi (5,08%), Kabupaten Siak (4,20%) menunjukkan persentase wasting cukup tinggi di tahun 2024. Ke 2 (dua) Kabupaten ini masih berada di atas target nasional dan termasuk kategori sedang masalah kesehatan menurut WHO (5 - <10%).

Masalah wasting merupakan masalah gizi akut yang apabila tidak ditangani dengan tepat dapat berdampak pada peningkatan masalah gizi kronis (Stunting). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

GAMBAR 5.77
STATUS BALITA WASTING BERDASARKAN BB/TB MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024

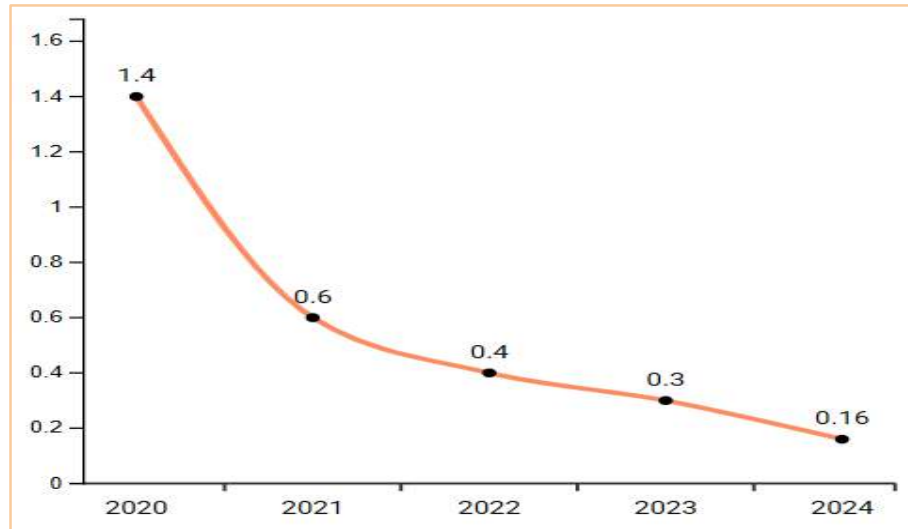


Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



Selain status balita gizi diatas, maka ada juga status gizi buruk berdasarkan indeks BB/U, Untuk Provinsi Riau tahun 2019-2024 menunjukkan tren sangat menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana gizi buruk tahun 2024 mencapai 0,16% menurun dibanding tahun 2022 (0,3%) seperti yang ditunjukkan oleh grafik berikut ini :

GAMBAR 5.78
STATUS BALITA GIZI BURUK BERDASARKAN INDEKS BB/U PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

D. PENJARINGAN KESEHATAN SISWA Kelas 1 SD/MI, 7 SMP/MTs, dan 10 SMA/MA

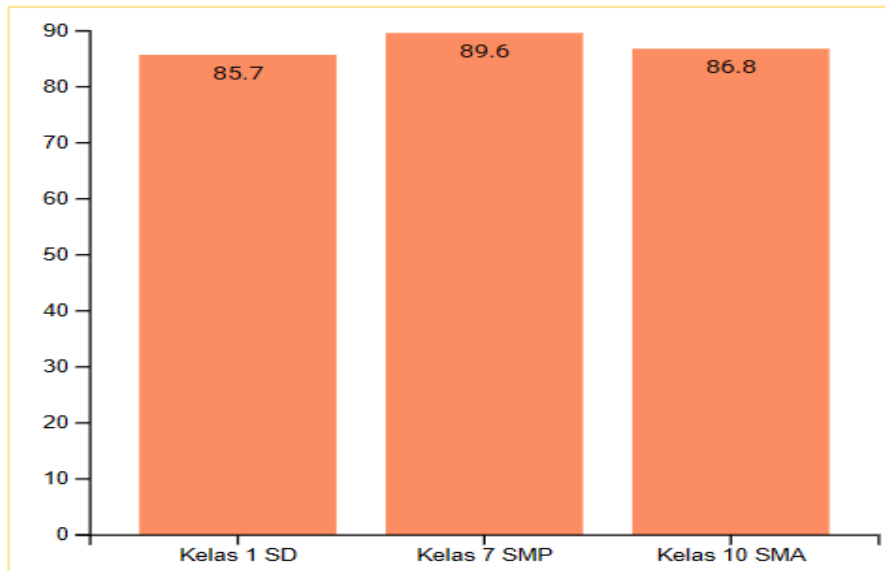
Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjangkaran kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas.

Standar pelayanan penjangkaran kesehatan adalah pelayanan yang meliputi:

- Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia);
- Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas);
- Penilaian kesehatan gigi dan mulut;
- Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen;
- Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala.



GAMBAR 5.79
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN (PENJARINGAN) ANAK SEKOLAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2024



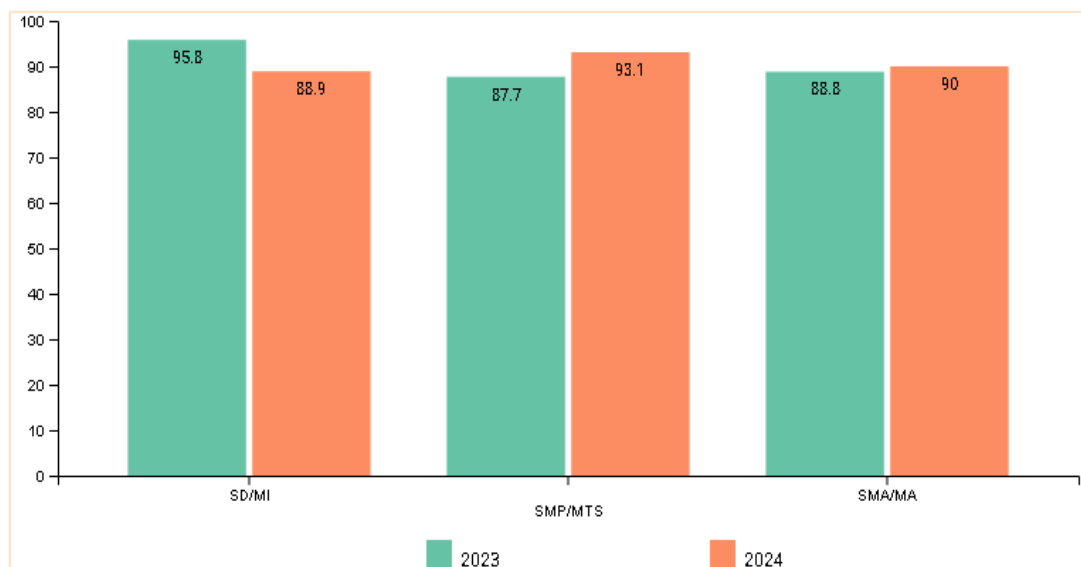
Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Cakupan pelayanan kesehatan (penjaringan) anak sekolah di Provinsi Riau pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Dimana pada tahun 2024 ini menunjukkan bahwa untuk penjaringan kelas 1 Sekolah Dasar sebesar 85,7% 86,1%, kelas 7 SMP/MTS sebanyak 82,2%, kelas 10 SMA/MA sebanyak 78,4 % seperti terlihat pada gambar diatas ini.

Meningkatnya cakupan penjaringan kesehatan siswa disebabkan proses belajar sudah aktif dan didukung kegiatan program kesehatan di sekolah. Sedangkan untuk cakupan sekolah yang melaksanakan pelayanan kesehatan (Penjaringan) di Provinsi Riau tahun 2024 tingkat Sekolah Dasar sebesar 88,9% menurun dibandingkan tahun 2023 (95,8%). Tingkat Sekolah Menengah Pertama sebesar 93,10 meningkat dibandingkan tahun 2023 (87,7%) dan tingkat Sekolah Menengah Atas sebesar 91,8% meningkat dibanding tahun 2023 (88,8%). Gambaran jelasnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



GAMBAR 5.80
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN (PENJARINGAN) ANAK SEKOLAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2023-2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

E. KESEHATAN USIA PRODUKTIF

1. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Penduduk usia 15-59 tahun mendapat adalah pelayanan skinning kesehatan sesuai standar Penduduk usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skinning kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi:

- Deteksi kemungkinan Obesitas.
- Deteksi Hipertensi.
- Deteksi kemungkinan Diabetes Melitus.
- Pemeriksaan ketajaman penglihatan.
- Pemeriksaan ketajaman pendengaran.
- Deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim

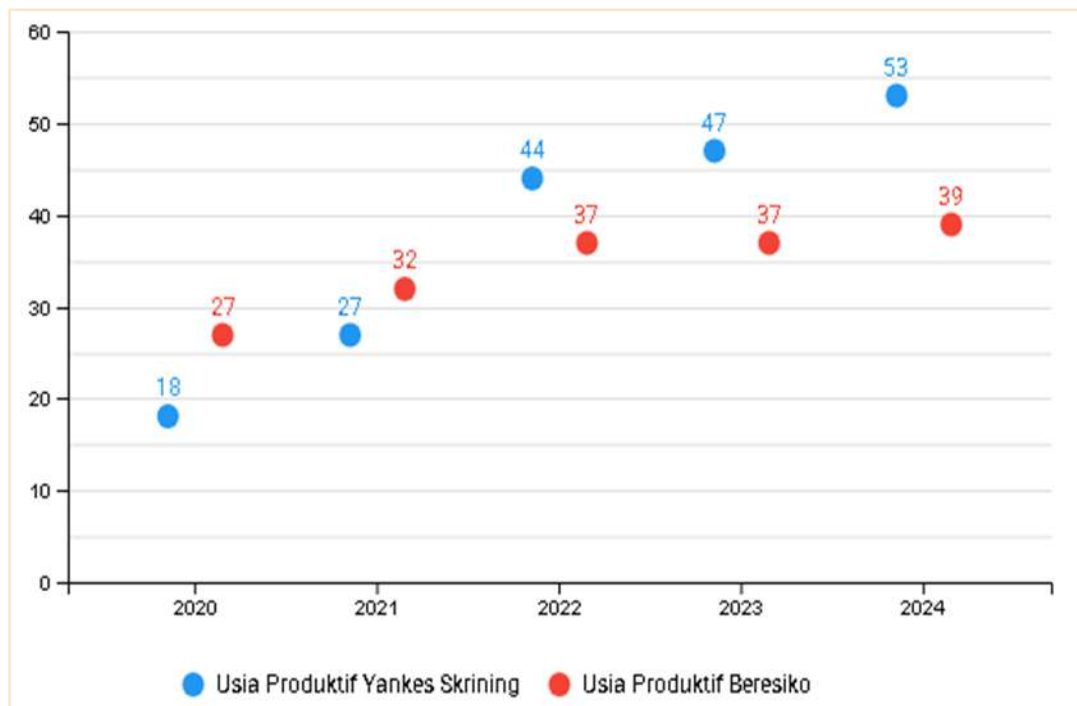
Penduduk usia 15-59 tahun berisiko : Penduduk usia 15-59 tahun yang ditemukan faktor risiko PTM. Sedangkan cakupan usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 sebesar 52,9% meningkat dibandingkan tahun 2023 (47%) dan tahun-tahun sebelumnya. Dari usia produktif yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar ini akan menjaring usia produktif yang berisiko kesehatan khususnya faktor resiko terhadap Penyakit Tidak Menular (PTM). Hal ini menjadi sangat penting guna



mencegah timbulnya penyakit tidak menular yang pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas kerja.

Skrining kesehatan ini dilakukan secara rutin minimal 1 kali dalam setahun. Berikut gambaran usia produktif mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dan yang berisiko dari tahun 2019 – 2024 pada grafik dibawah ini.

GAMBAR 5.81
CAKUPAN USIA PRODUKTIF MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR DAN YANG BERESIKO PROVINSI RIAU TAHUN 2020 – 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 202

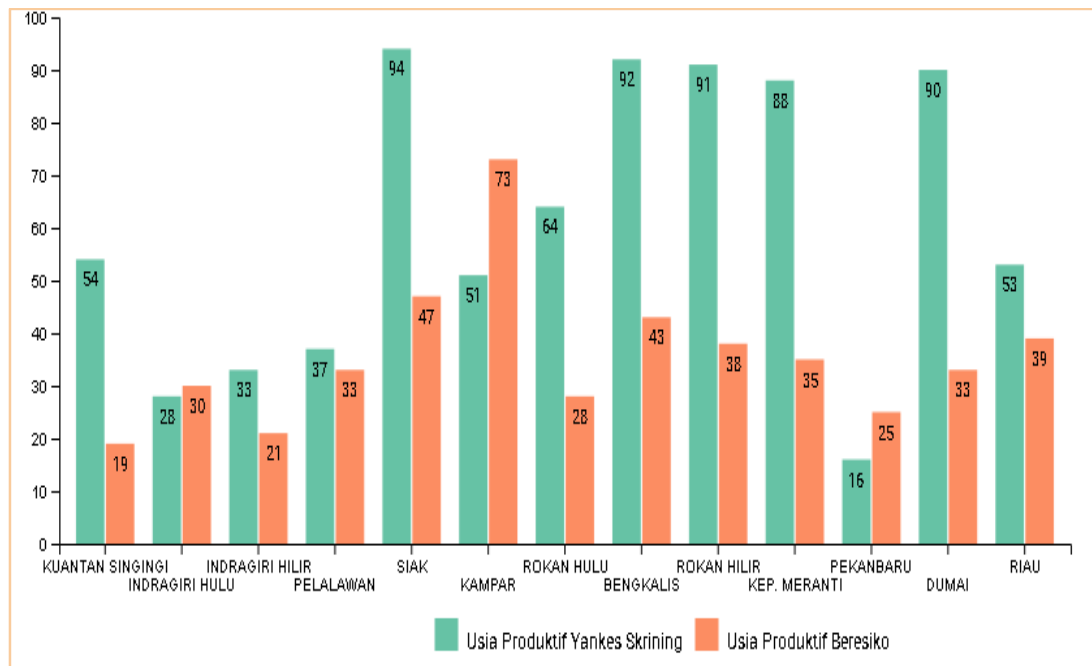
Untuk gambaran pelayanan kesehatan usia produktif yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di Kabupaten/Kota terbanyak di Kabupaten Siak sebesar 94% diikuti Kabupaten Bengkalis 92% dan Kabupaten Rokan Hilir 91%. Meskipun 3 kabupaten/kota ini pelaksanaan skrining kesehatan yang terbanyak namun yang berisiko yang ditemui cukup rendah dimana Kota Pekanbaru sebanyak 16%, Kabupaten Indragiri Hulu 28% dan Kabupaten Indragiri Hilir 33%.

Untuk berisiko Penyakit Tidak Menular tertinggi ada d Kabupaten Kampar 73% diikuti Kabupaten Siak 47% dan Kabupaten Bengkalis sebesar 43%. Tingginya usia produktif yang ditemui berisiko penyakit tidak menular di 3 kabupaten/kota harus menjadi perhatian yang serius karena usia produktif yang berisiko penyakit



tidak menular lebih dari dari 50% dari yang mendapatkan skrining. Jelas ini akan menghambat atau mempengaruhi hasil produktivitasnya. Untuk gambaran jelasnya sebagai cakupan usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan di kabupaten/kota dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

GAMBAR 5.82
CAKUPAN USIA PRODUKTIF MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR DAN YANG BERISIKO MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

2. Calon Pengantin mendapat layanan kesehatan

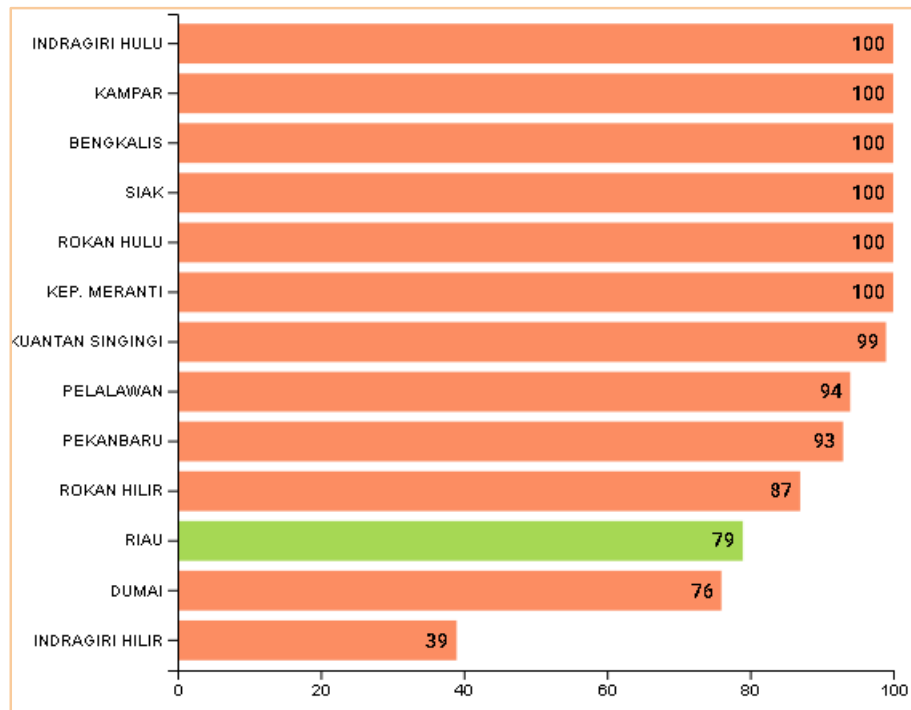
Calon Pengantin mendapatkan layanan kesehatan merupakan Calon pengantin (catin) individu (catin laki-laki dan catin perempuan) yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin (KIE kesehatan reproduksi calon pengantin dan pemeriksaan kesehatan minimal pemeriksaan Hb dan status gizi) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Di Provinsi Riau pada tahun 2024 ini semua puskesmas telah memberikan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin. Dimana catin terdaftar di KUA atau lembaga agama lainnya dari 75.562 calon pengantin terdaftar di KUA atau lembaga agama lainnya, yang mendapatkan pelayanan kesehatan sekitar 78,9%. Kemudian dari 30.545 calon pengantin perempuan yang mendapat layanan kesehatan maka ditemui calon pengantin perempuan anemia sebesar 3,9% dan calon pengantin perempuan gizi kurang sebesar 2,3%.



Sedangkan gambaran calon pengantin yang mendapat layanan kesehatan di kabupaten/kota dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

GAMBAR 5.83
CALON PENGANTIN (CATIN) MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



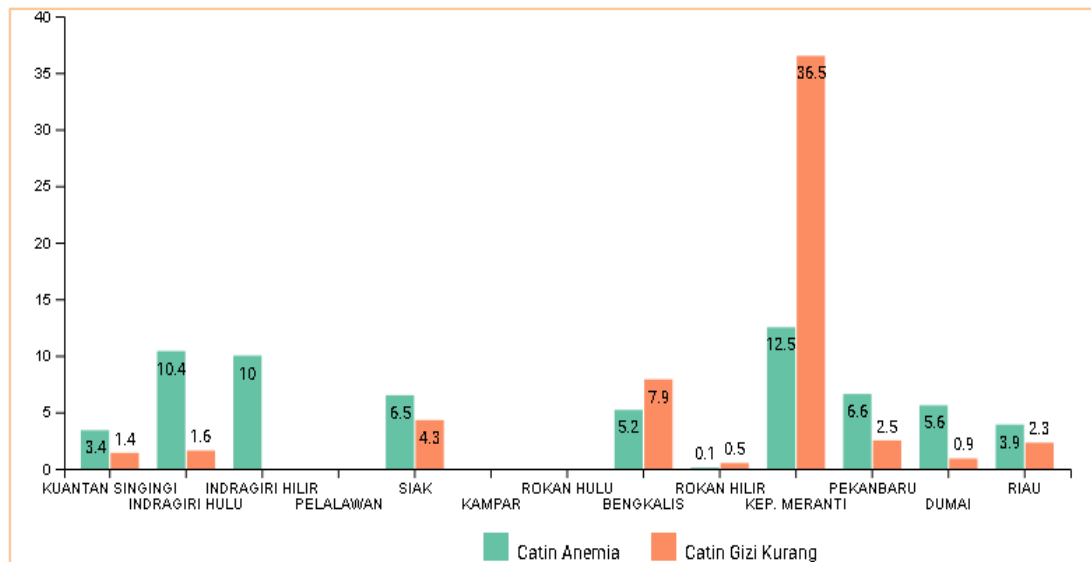
Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa calon pengantin yang mendapat layanan kesehatan di fasilitas kesehatan di Provinsi Riau bahwa ada 6 (enam) Kabupaten/kota yang telah mencapai 100% yakni Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kep. Meranti, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak.

Sedangkan yang harus lebih digerakkan lagi adalah Kabupaten Indragiri Hilir yang hanya sekitar 39% diikuti Kota Dumai 76% dan Kabupaten Rokan Hilir 87%. Sedangkan calon pengantin perempuan anemia dan gizi kurang dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



GAMBAR 5.84
CATIN PEREMPUAN ANEMIA DAN GIZI KURANG MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU
TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Untuk calon pengantin perempuan anemia dan gizi kurang di Kabupaten/kota maka kabupaten Kep. Meranti harus mendapat perhatian oleh semua program dimana ditemukan calon pengantin perempuan anemia sebesar 12,5% dan gizi kurang sebesar 36,5% termasuk tertinggi di Provinsi Riau. Selanjutnya ada 4 kabupaten/kota yang tidak ditemukan calon pengantin perempuan anemia dan gizi kurang yakni Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk itu perlu dilakukan pembinaan, bimbingan teknis dan orientasi serta intervensi yang lebih spesifik terkait pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin kepada Kabupaten yang terjaring calon pengantinnya dengan anemia dan KEK. Ini perlu dilakukan mengingat calon ibu yang sehat akan menghadirkan generasi yang sehat dan kuat.

F. PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT

Pelayanan kesehatan usia lanjut adalah Pelayanan kesehatan untuk usia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam setahun pada satu wilayah kerja dan kurun waktu tertentu. Komponen skrining kesehatan yang dilakukan pada usia lanjut terdiri dari:

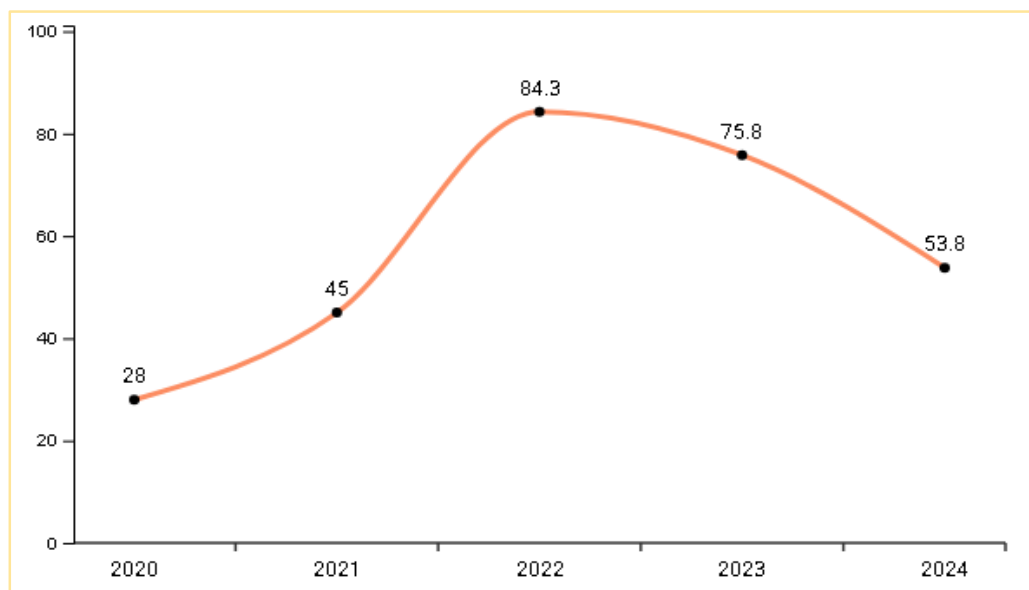
- Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah



- Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah
- Deteksi kadar kolesterol dalam darah
- Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut di Provinsi Riau untuk tahun 2024 sebesar 53,8% menurun dibandingkan tahun 2023 (75,8%) dan tahun 2022 (84,3%). Hal ini menggambarkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya usia lanjut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan secara rutin. Hal ini sangat baik sekali mengingat pentingnya pemantauan kondisi kesehatan usia lanjut dan tetap mempertahankan kemandirian para usia lanjut tersebut. Untuk melihat gambaran cakupan usia lanjut (60 tahun+) yang mendapat pelayanan kesehatan di Provinsi Riau dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

GAMBAR 5.85
CAKUPAN USIA LANJUT (60 TH+) MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



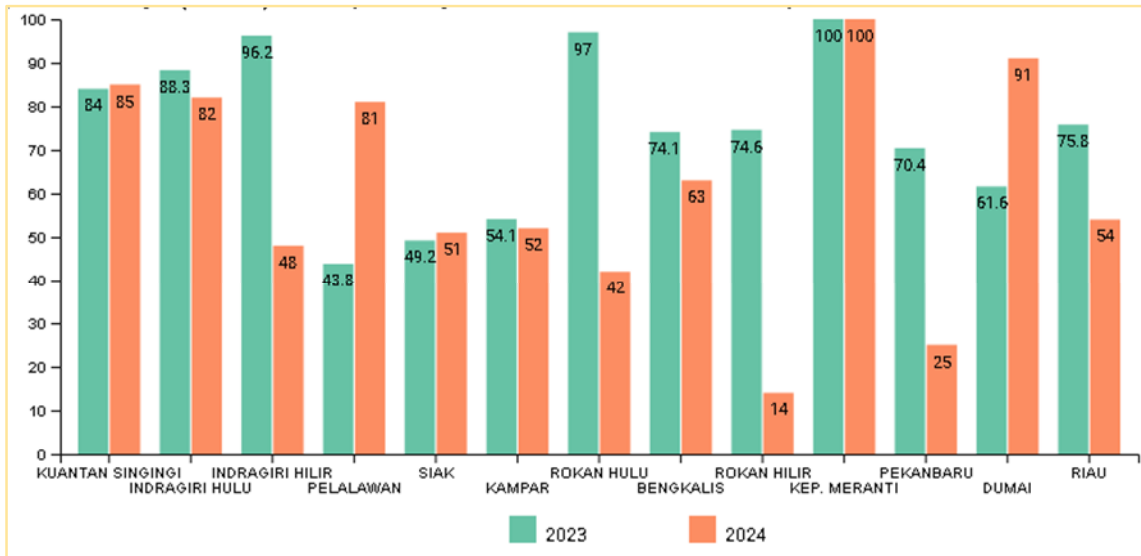
Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Sedangkan cakupan usia lanjut (60 tahun+) yang mendapat pelayanan kesehatan pada tahun 2024 di Kabupaten/kota, yang tertinggi cakupannya adalah Kabupaten Kep. Meranti sebesar 100% diikuti Kota Dumai sebesar 91% dan Kabupaten Kuantan Singingi 85%. Untuk cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut terendah adalah Kabupaten Rokan Hilir sebesar 14% diikuti Kota Pekanbaru 25% dan Kabupaten Rokan Hulu sebesar 42%.



Untuk gambaran cakupan usia lanjut (60 tahun+) yang mendapat pelayanan kesehatan di Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Riau dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

GAMBAR 5.86
CAKUPAN USIA LANJUT (60 TH+) MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI
RIAU TAHUN 2023 - 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025





BAB VI

PENGENDALIAN PENYAKIT



PROFIL KESEHATAN PROVINSI RIAU 2024



BAB VI PENGENDALIAN PENYAKIT

Pengendalian penyakit adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencegah dan mengobati penyakit, dengan fokus pada penurunan dan eliminasi angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, serta membatasi penularan dan penyebaran penyakit. Ini meliputi upaya pencegahan yang bertujuan untuk menghilangkan penyebab atau faktor predisposisi penyakit, serta upaya pengobatan untuk mengatasi penyakit yang telah terjadi.

Pada upaya pengendalian penyakit terdiri dari pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Pengendalian penyakit sebagai upaya penurunan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit mempunyai peranan penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat.

Pengendalian penyakit menular langsung adalah tindakan yang bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit melalui kontak langsung antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Penyakit menular langsung menyebar melalui kontak fisik, cairan tubuh, atau semprotan yang berasal dari orang yang terinfeksi. Penyakit menular meliputi penyakit menular langsung, penyakit yang dapat dikendalikan dengan imunisasi, dan penyakit yang ditularkan melalui binatang. Sedangkan penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.

A. PENYAKIT MENULAR LANGSUNG

1. Tuberkulosis

Tuberkulosis (TB) saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs). Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Kuman tersebut menyebar dari penderita TB melalui udara. Kuman TB ini biasanya menyerang organ paru, namun dapat juga menyerang selain paru (ekstra paru). Hanya tiga bagian tubuh yang tidak diserang TB yaitu : Rambut, kuku dan gigi. Sampai saat ini, TB masih merupakan penyebab kematian tertinggi setelah HIV/AIDS, dan merupakan salah satu dari 20 penyebab utama kematian di seluruh dunia.



Berdasarkan Situasi Global Tuberkulosis (TB), Indonesia merupakan negara dengan estimasi kasus dan kematian tertinggi ke-2 di dunia setelah India dengan angka estimasi 1.092.000 kasus tuberkulosis dan 125.000 kematian akibat tuberkulosis, sehingga penyakit tuberkulosis masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia (WHO, 2024). Indonesia mengalami peningkatan kasus antara 2020-2023. Hasilnya menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam jumlah kasus TB yang tidak dilaporkan dibandingkan dengan studi sebelumnya pada 2017. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam menangani wabah TB dan mencegah penyebarannya lebih lanjut.

Untuk mencapai target eliminasi TB tahun 2050, diperlukan berbagai strategi, salah satunya pengembangan dan adopsi vaksin yang lebih baik untuk pencegahan TB. Beban penyakit yang disebabkan oleh Tuberkulosis dapat diukur antara lain dengan insiden kasus dan mortalitas/kematian, seperti yang dijelaskan di bawah ini. Penemuan kasus TB di Provinsi Riau menemukan kasus sebanyak 17.535 (dewasa dan anak) dari estimasi 23.315 (75,21%) yang ditetapkan Kemenkes RI. Capaian ini merupakan capaian tertinggi Riau sejak TB dijadikan Program Prioritas Nasional.

a. Insiden Tuberkulosis

Capaian penemuan kasus TB di tahun 2024 ditemukan kasus tuberkulosis sebanyak 889 ribu. Namun, pencapaian inisiasi pengobatan TB sensitif obat (SO) masih berada di angka 81%, di bawah target 90%. Sementara itu, keberhasilan pengobatan TB resisten obat (RO) baru mencapai 58%, jauh dari target 80%.

Menurut *Global Tuberculosis Report* tahun 2023, pada tahun 2022 estimasi angka insiden TB di Indonesia sebesar 385 per 100.000 penduduk, meningkat jika dibandingkan dengan angka insiden TB tahun 2021 yaitu sebesar 354 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka kematian TBC tahun 2022 sebesar 49 per 100.000 penduduk. Perkiraan kasus TB merupakan estimate incidence TB yang telah ditetapkan oleh Kemenkes RI Tahun 2024 untuk Provinsi Riau sebesar 23.315 kasus dengan target capaian 90%.

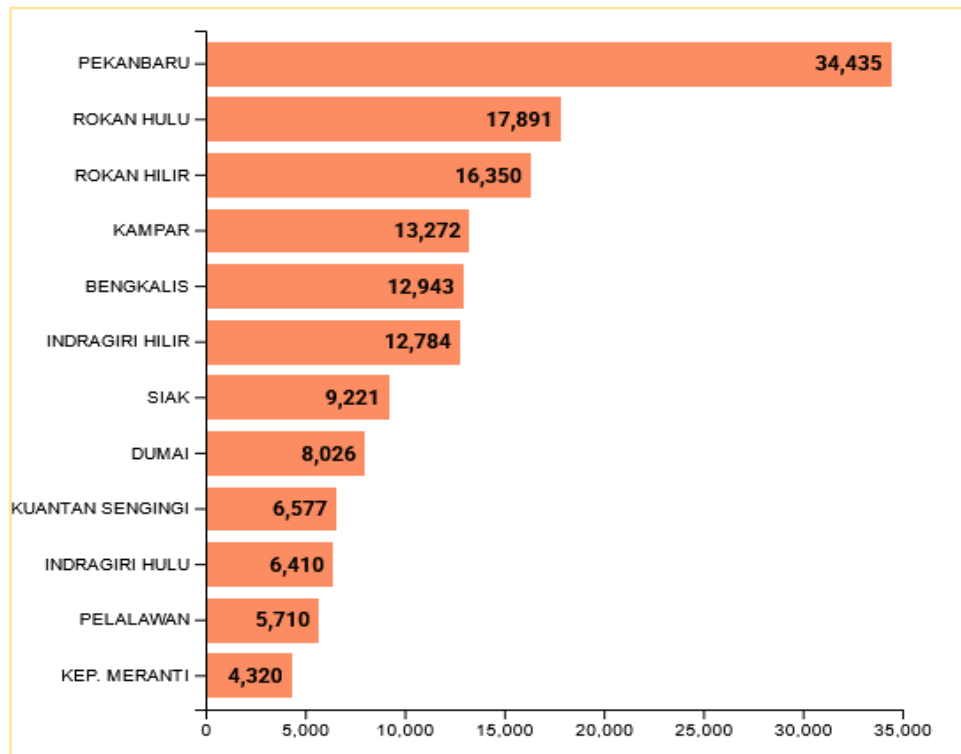
b. Kasus Tuberkulosis Ditemukan

Penemuan orang terduga TB di Provinsi Riau Tahun 2024 sebanyak 147.939 orang, dengan penemuan orang penderita TB yang standar atau melalui



pemeriksaan bakteriologis dan klinis sebanyak 17.535 orang yang terdiri dari sensitive obat dan resistensi obat, ditemukan kasus TB dewasa >14 tahun sebanyak 15.927 orang (90,83%) dan TB anak ditemukan sebesar 1.608 orang (9,17%).

GAMBAR 6.1
JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS YANG MENDAPATKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
DI PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Grafik diatas menunjukkan bahwa beban TB masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di seluruh Kabupaten/Kota, Pekanbaru memiliki beban kasus tertinggi, yang mungkin mencerminkan karakteristik demografi perkotaan yang padat. Penemuan kasus TB dengan persentase rendah yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Kep. Meranti. Hal ini perlu untuk dilakukan tindak lanjut dengan kemungkinan skrining yang terlalu "longgar" (menangkap terlalu banyak non-kasus) atau karena kesulitan dalam menegaskan diagnosis. Karena diagnosis TB bisa dilakukan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Permenkes 67 tahun 2021 :

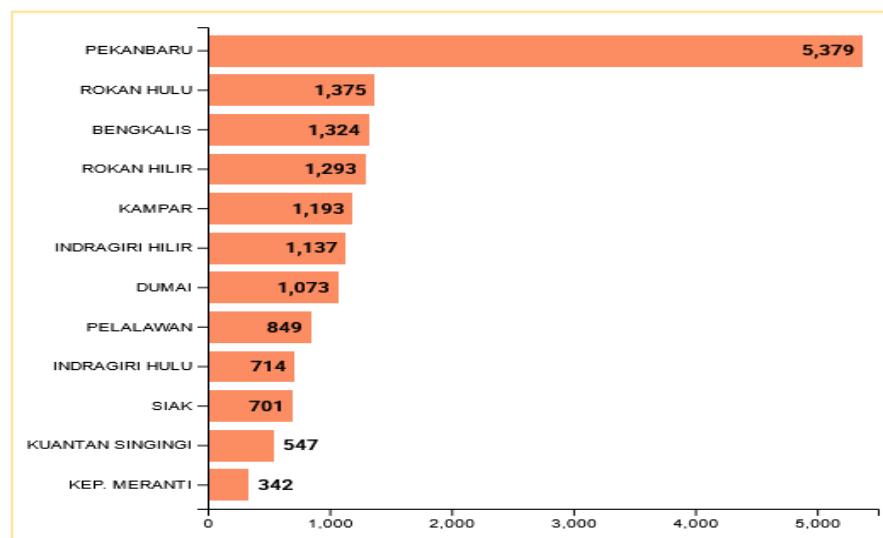
- Pemeriksaan dahak menggunakan TCM menjadi prioritas, namun pemeriksaan mikroskopis tetap dapat dilakukan jika akses TCM sulit.



- Pemeriksaan dahak dilakukan minimal 2 kali pada terduga TB.
- Diagnosis juga dapat ditegakkan melalui pemeriksaan penunjang lain seperti rontgen paru dan tes darah TB.

Pentingnya penemuan dini terduga TBC dengan memastikan pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar yaitu dengan melakukan diagnostic secara klinis dan bakteriologis guna memutuskan mata rantai penularan TBC. Dengan semakin tingginya orang terduga TB dilakukan penapisan (skrining) maka makin banyak ditemukan kasus TBC yaitu dengan melakukan investigasi terhadap individu yang menunjukkan gejala TBC. Dari table 56 terlihat bahwa penemuan penderita TBC dewasa banyak ditemukan pada jenis kelamin laki-laki 10.293 orang (64,6%) daripada perempuan 5.634 orang (35.4%).

GAMBAR 6.2
JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS DEWASA (> 14 THN) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2024

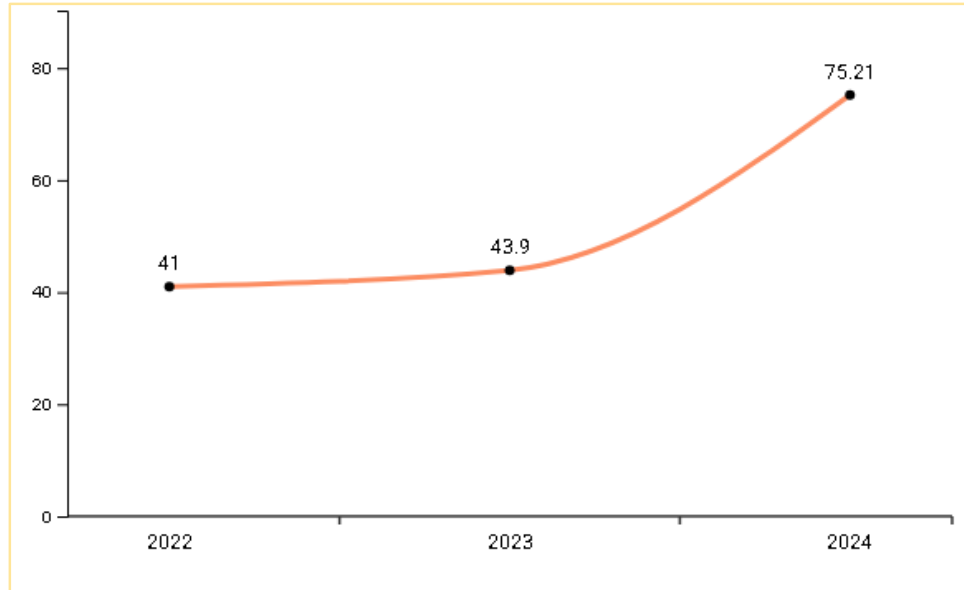


Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Pekanbaru, sebagai ibukota Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak (1.026.671 jiwa), secara proporsional juga menunjukkan angka tertinggi dalam upaya penemuan kasus. Sebanyak 34.435 terduga TB telah mendapatkan pelayanan, dan dari jumlah tersebut, 6.039 kasus TB berhasil ditemukan. Laju penemuan kasus (case notification rate/CNR) di Pekanbaru mencapai sekitar 588 kasus per 100.000 penduduk, angka yang signifikan dan kemungkinan mengindikasikan beban penyakit yang tinggi dan/atau sistem surveilans yang sangat aktif.



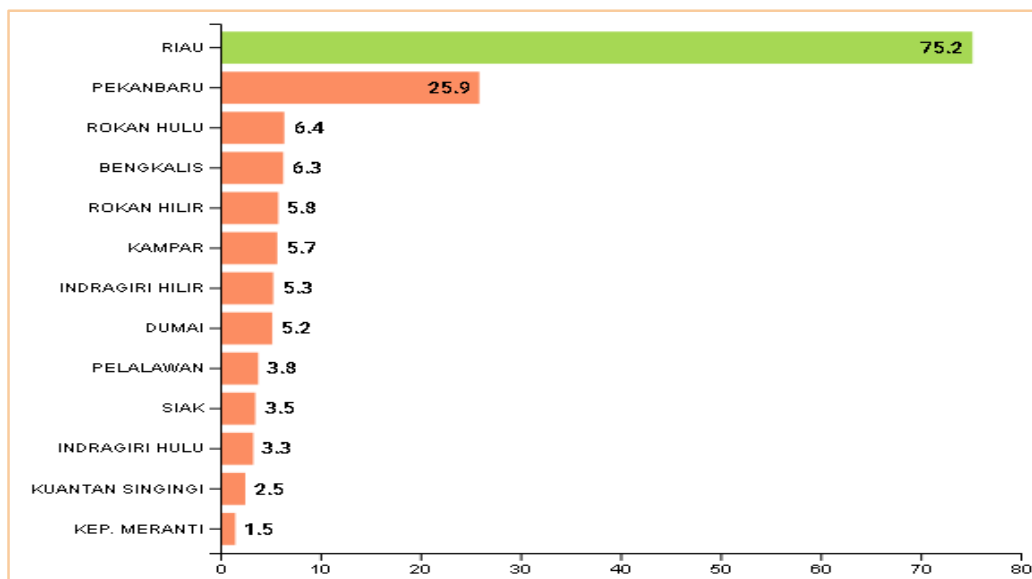
GAMBAR 6.3
TREATMENT COVERAGE (TC-%) PROVINSI RIAU TAHUN 2022-2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dari Grafik diatas, menunjukkan proporsi kasus TB yang berhasil diobati dan dilaporkan dari total estimasi kasus yang ada di populasi (seringkali berdasarkan estimasi insidensi global atau nasional).

GAMBAR 6.4
TREATMENT COVERAGE (TC-%) TUBERKULOSIS MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2024



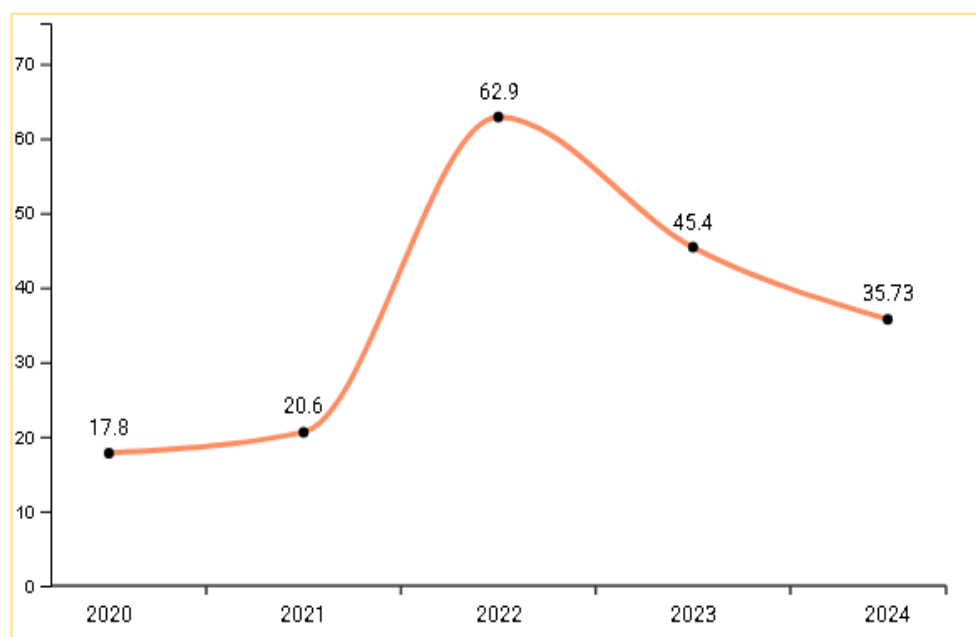
Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



Rata-rata cakupan pengobatan untuk seluruh wilayah di Provinsi Riau yang tercatat adalah 75,21%. Dan dari grafik diatas, terlihat bahwa cakupan pengobatan (Treatment Coverage) yang tinggi yaitu Kota Pekanbaru mencapai 25,90%. Meskipun secara absolut angka ini tampak rendah dibandingkan target ideal 100%, namun di antara kabupaten/kota lain di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru menunjukkan kinerja penemuan dan cakupan pengobatan yang paling tinggi. Berarti kemungkinan program penemuan kasus yang lebih agresif, akses layanan yang lebih baik, atau beban penyakit yang memang lebih tinggi dan berhasil ditangani.

Sedangkan kabupaten dengan cakupan pengobatan yang sangat rendah yaitu Kepulauan Meranti (1,52%), Kuantan Singingi (2,5%) sebagai prioritas untuk intervensi yang lebih intensif dengan melakukan evaluasi efektivitas strategi penemuan kasus dan akses ke layanan diagnostik di setiap wilayah kabupaten tersebut dan merencanakan alokasi sumber daya (tenaga kesehatan, logistik obat, alat diagnostik) secara lebih tepat sasaran untuk meningkatkan cakupan pengobatan dan mencapai target eliminasi TB.

GAMBAR 6. 4
CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS ANAK (%) PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

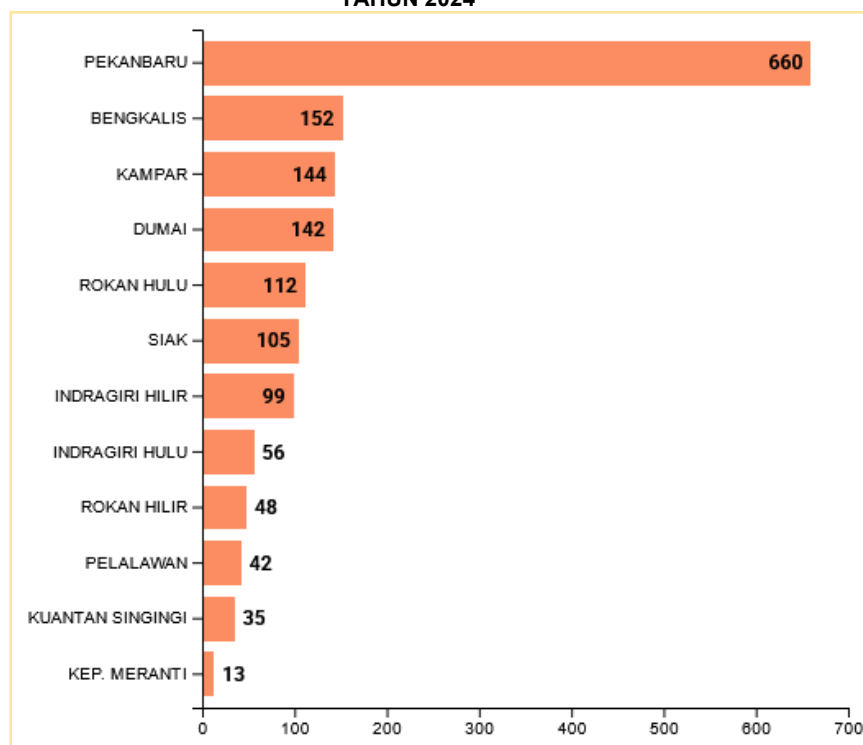


TB Anak masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang perlu penanganan serius di setiap kabupaten/kota. Dan dilihat dari gambar 6.4 bahwa cakupan penemuan kasus Tuberkulosis pada anak 0-14 tahun trend menurun dimulai dari tahun 2022-2024 hanya 35,73 % atau 1.608 orang.

c. Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis

Cakupan penemuan kasus tuberkulosis adalah jumlah kasus TBC yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu dibagi dengan perkiraan jumlah insiden kasus TBC pada tahun yang sama dan dinyatakan dalam persentase. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang terjangkau oleh program.

GAMBAR 6.5
KASUS TUBERKULOSIS ANAK 0-14 TAHUN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU
TAHUN 2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

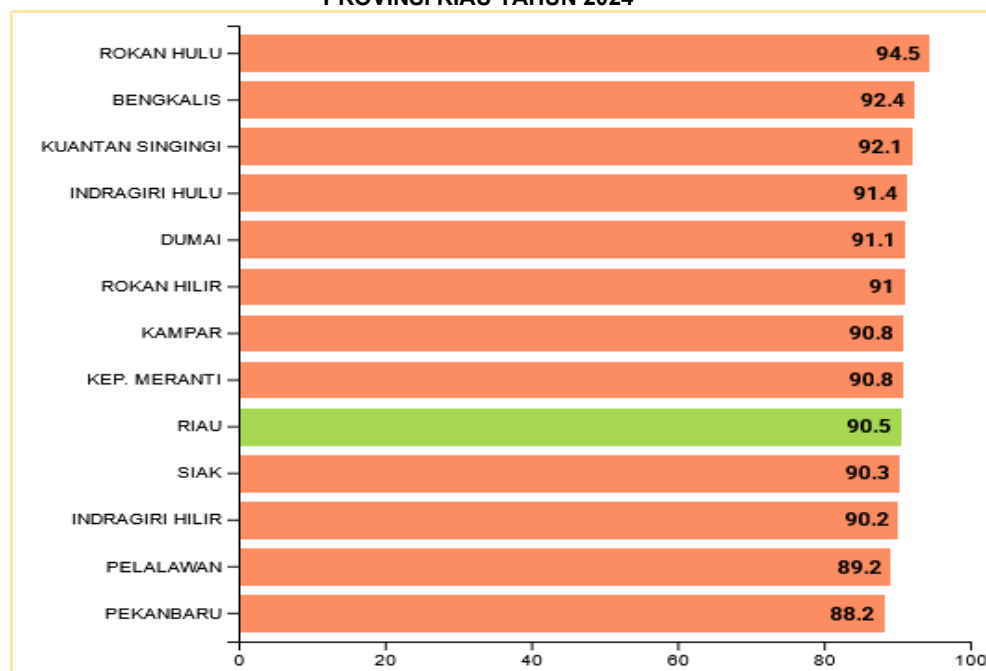
Gambar 6.5 menunjukkan bahwa cakupan penemuan kasus Tuberkulosis pada anak 0-14 tahun yang paling tinggi di Kota Pekanbaru sebesar 11% atau 660 orang dari semua kasus yang ditemukan dan diobati. Dengan demikian, belum mencapai target 12% perkiraan insiden TBC pada anak untuk wilayah Kota Pekanbaru. d. Angka Keberhasilan Pengobatan (Treatment Success Rate/TSR) Angka keberhasilan pengobatan (Treatment



Success Rate) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan Tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan yaitu jumlah semua kasus Tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus Tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan. Angka keberhasilan pengobatan (Treatment Success Rate) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan Tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan yaitu jumlah semua kasus Tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus Tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.

Angka keberhasilan pengobatan (*Treatment Success Rate*) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan Tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan yaitu jumlah semua kasus Tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus Tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.

GAMBAR 6.6
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS RATE/SR) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Angka keberhasilan pengobatan pasien Tuberkulosis di kabupaten/kota rata-rata telah mencapai target nasional > 90%. Capaian sukses rate Provinsi Riau tahun 2024 yang ditemukan dan diobati rata-rata mencapai 90,5%, kecuali pada Kota Pekanbaru 80,2% dan Kabupaten Pelalawan 89,2%.



2. HIV dan AIDS

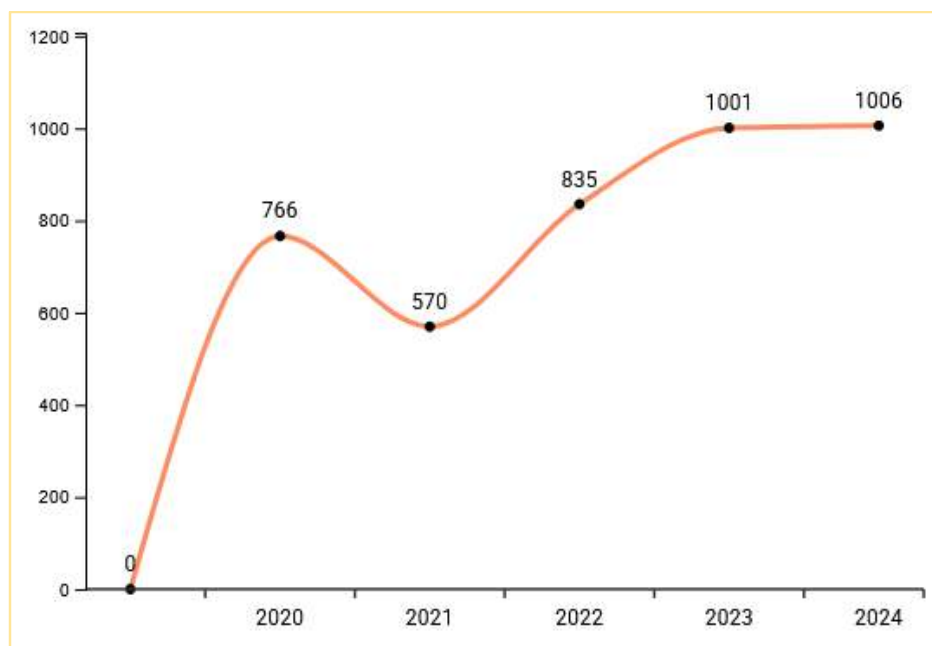
Infeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan kasus AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) serta Infeksi Menular Seksual (IMS) masih menjadi masalah kesehatan di dunia dan Indonesia serta meluas hingga masalah sosial, ekonomi dan budaya. Penanggulangan HIV AIDS dan IMS memberikan manfaat kesehatan masyarakat yang luas dan berkontribusi terhadap pencapaian Pembangunan Nasional dan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2030. Pemerintah berkomitmen mengakhiri epidemi AIDS tahun 2030 yang tertuang pada Kebijakan dan Strategi Penanggulangan HIV AIDS dan IMS. Capaian penanggulangan HIV AIDS dan IMS dijabarkan secara rinci pada indikator-indikator capaian program yang terukur pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra) Pusat dan Daerah.

Orang yang terinfeksi HIV memerlukan pengobatan Antiretroviral (ARV) untuk menekan jumlah virus HIV di dalam tubuh. Virus yang tertekan (tersupresi) tidak berpotensi menular kepada orang lain, dan orang dengan HIV akan memiliki kualitas hidup yang baik. Penemuan kasus pada stadium awal dan segera mendapatkan pengobatan ARV, membuat seseorang tidak jatuh pada HIV stadium lanjut (AIDS).

Pada HIV stadium lanjut (AIDS) terjadi potensi masuknya infeksi-infeksi lainnya yang dikenal dengan infeksi oportunistik. Program pengendalian HIV di Indonesia bertujuan untuk: (1) menurunkan hingga meniadakan infeksi baru; (2) menurunkan hingga meniadakan kematian terkait AIDS; (3) menurunkan stigma dan diskriminasi.



GAMBAR 6.7
TREND KUMULATIF HIV PROVINSI RIAU TAHUN 2020 -2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

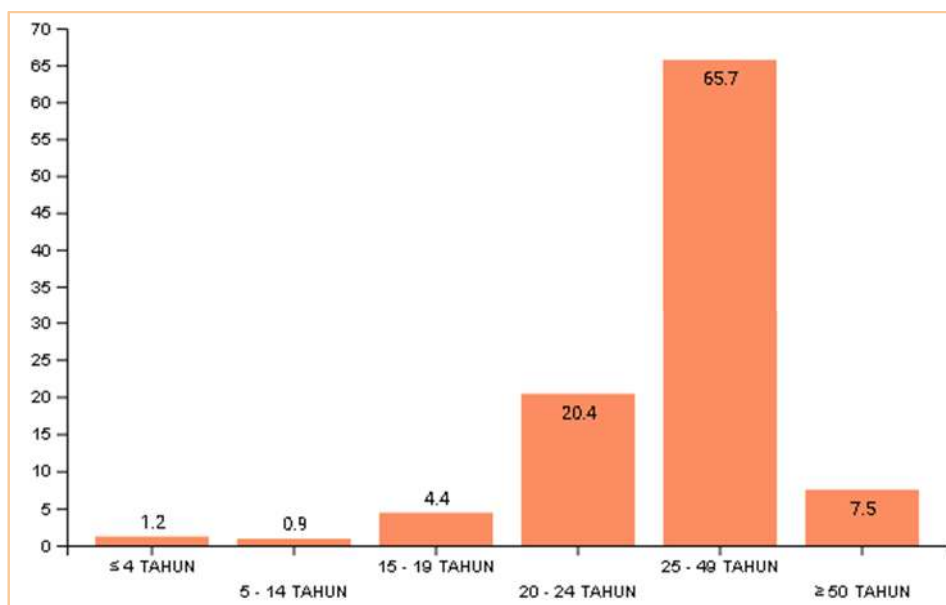
Secara kumulatif jumlah ODHA di Provinsi Riau sampai dengan tahun 2024 meningkat setiap tahun. Sedangkan untuk kasus AIDS kumulatif ditemukan di Provinsi Riau sampai tahun 2024 sesuai dengan tren fluktuatif seperti halnya tren temuan kasus HIV. Trend cakupan penemuan kasus HIV secara kumulatif dari tahun 2019-2024 cenderung meningkat dikarenakan penemuan kasus dengan promosi aktif dan kerjasama dengan masyarakat, organisasi profesi dan lintas sektor Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Sebaya Lancang Kuning Provinsi *Riau* yang fokus menanggulangi orang dengan *HIV/AIDS* (ODHA).

Capaian program penanggulangan HIV tahun 2024 tertera pada lampiran 59-60, dengan penemuan ODHA baru sebanyak 1.006 orang. Dengan target penemuan sebanyak 159.436 ODHA dan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar hanya 126.505 orang (79,3%).

Dari jumlah ODHA baru diatas, yang mendapatkan pengobatan setelah dilakukan inisiasi hanya 824 orang (81,9%). Hal ini dipengaruhi dari ODHA baru yang melakukan treatment paling rendah yaitu Kabupaten Siak (60%), Indragiri Hulu (60,98%) dan Kabupaten Kep.Meranti (66,7%).



GAMBAR 6 8
PROPORSI KASUS HIV MENURUT KELOMPOK UMUR DI PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

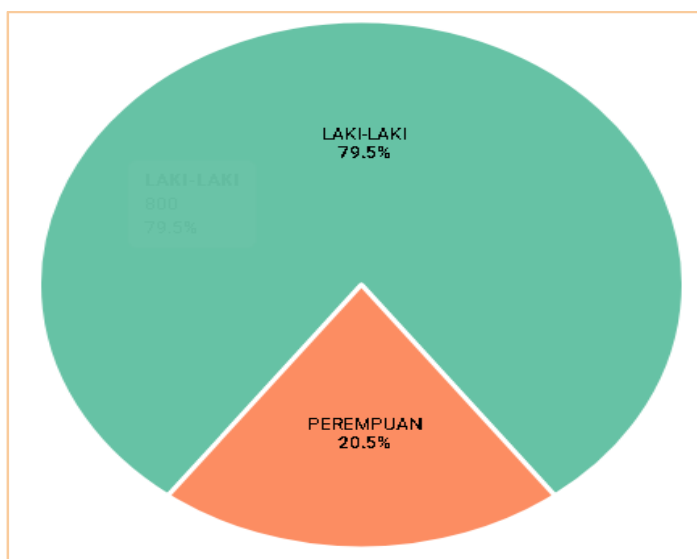
Tahun 2024 sebagian besar sebaran kasus HIV terdapat pada kelompok umur produktif antara 20-49 tahun. Berdasarkan pada kelompok umur pada penderita HIV paling banyak di kelompok usia produktif sebanyak 866 orang dengan proporsi 86% dari penemuan kasus ODHA baru sebanyak 1.006 orang.

Hal ini disebabkan oleh rentang usia produktif lebih rentan terhadap perilaku beresiko seperti perilaku seks yang tidak aman dan penggunaan NAPZA suntik. Sementara itu masih ditemukan kasus HIV dan AIDS pada kelompok usia 1-4 tahun yang menunjukkan penularan HIV dari ibu ke anak.

Penanggulangan HIV dan AIDS pada anak di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual. Namun, masih adanya tantangan pengobatan seperti pengobatan pertama bagi anak dengan HIV yang saat ini hanya tersedia di unit pediatrik di Rumah Sakit dan regimen ART yang tidak ramah anak menyebabkan kurang optimalnya pengobatan HIV sehingga terjadi perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Dalam rangka mencapai tujuan nasional dan global *triple elimination* (eliminasi HIV, hepatitis B, dan sifilis) pada bayi, penularan HIV dari ibu ke anak diharapkan akan terus menurun di tahun selanjutnya.



GAMBAR 6.9
PROPORSI KASUS HIV BERDASARKAN JENIS KELAMIN PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Proporsi jenis kelamin penderita orang dengan HIV AIDS tahun 2023, lebih banyak diderita dari jenis kelamin laki-laki 800 orang (79,5%) dibandingkan dengan perempuan hanya 206 orang (20,5%).

3. Infeksi Saluran Pernafasan Akut dan Pneumonia

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) atau batuk bukan pneumonia merupakan kumpulan gejala yang mengenai saluran pernafasan mulai dari rongga hidung sampai ke alveoli termasuk adneksanya. Infeksi saluran pernafasan akut disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit dan lain-lain yang dapat menimbulkan penyakit atau gejala ISPA antara lain adalah Rinitis, Faringitis, Laringitis, Tonsilitis, Bronkitis, Bronkopneumonia dan Pneumonia. Sedangkan Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur dan parasit.

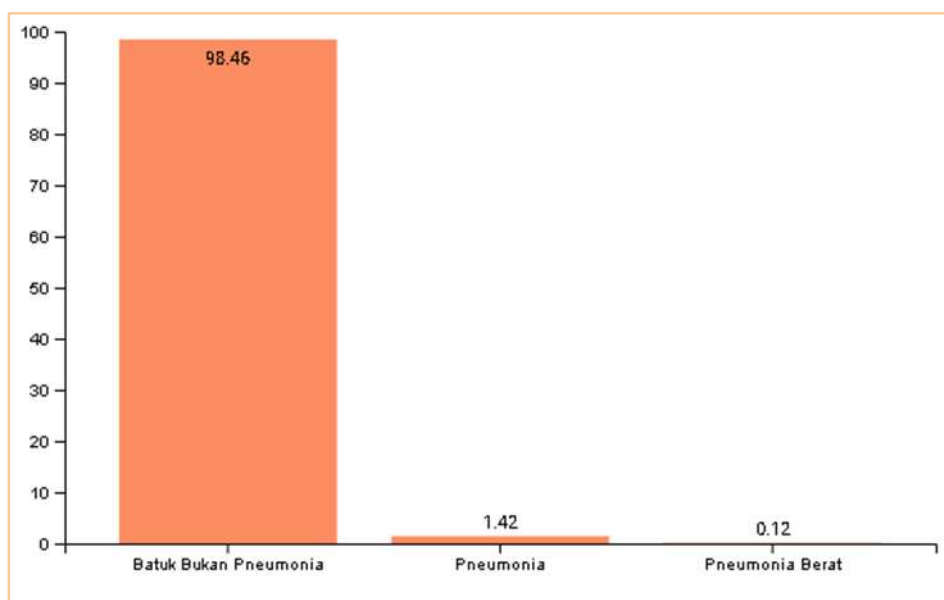
Pneumonia adalah penyakit yang menyebabkan kematian pada anak-anak di dunia dibandingkan penyakit lainnya, seperti malaria, AIDS, ataupun campak. Sedangkan ISPA adalah salah satu penyakit yang termasuk ke dalam penyakit menular yang berbahaya bagi anak-anak, lansia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang menurun



ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) dan pneumonia adalah dua kondisi medis yang berbeda, meskipun keduanya melibatkan saluran pernapasan. ISPA adalah istilah umum untuk berbagai infeksi pada saluran pernapasan atas dan bawah, sedangkan pneumonia adalah infeksi spesifik pada paru-paru, dan bisa berkembang menjadi pneumonia. Sedangkan Pneumonia umumnya lebih serius dan memerlukan perawatan medis yang lebih intensif. ISPA dan pneumonia merupakan penyakit yang berbahaya jika tidak mendapatkan pengobatan yang tepat. Kedua penyakit ini dapat menyebabkan masalah pernapasan.

Sampai saat ini program pengendalian pneumonia lebih diprioritaskan pada pengendalian pneumonia balita karena penyakit pneumonia memiliki kontribusi cukup besar terhadap angka kesakitan dan kematian pada balita. Diharapkan dengan penemuan kasus dan pengobatan pneumonia yang sudah sesuai standar dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian selain pada balita juga pada lanjut usia dan orang yang mempunyai gangguan kekebalan tubuh akibat pneumonia. Pneumonia masih menjadi penyebab morbiditas dan mortalitas utama karena infeksi pada bayi dan anak di dunia.

GAMBAR 6.10
INFEKSI SALURAN PERNAFASAN AKUT (ISPA) PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Grafik diatas memperlihatkan kejadian batuk bukan Pneumonia pada balita jauh lebih banyak dibandingkan kejadian Pneumonia yang proporsinya sekitar



99.54 %. Walaupun kejadian ISPA non Pneumonia atau common cold tidak dilaporkan sebagai penyebab kematian balita, namun tetap harus diwaspadai dan diberikan pengobatan sesuai dengan pola yang berlaku di sarana kesehatan, serta diwaspadai karena berpotensi menjadi parah atau Pneumonia. Tingginya kasus ISPA cenderung dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko antara lain kondisi ekonomi, kependudukan, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan perubahan iklim global juga turut memberikan kontribusi terhadap masalah ISPA.

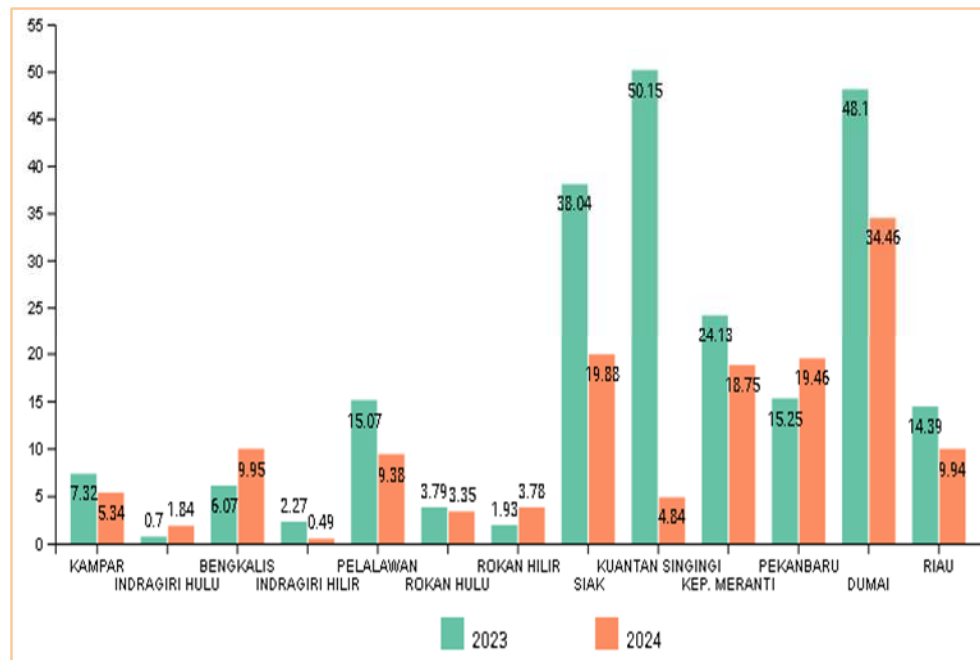
Pada lampiran 58, terlihat bahwa sebagian besar kabupaten/kota berhasil memberikan tatalaksana sesuai standar 100% pada balita yang berkunjung dengan batuk atau kesukaran bernapas, kecuali pada kabupaten Bengkalis (92%) dan Kuantan Singingi (97%), dikarenakan ada kesenjangan antara jumlah kunjungan dan balita yang mendapatkan tatalaksana standar tetapi belum mencapai target 100%. Hal ini terjadi, disebabkan kurangnya tenaga terlatih, kendala logistik, atau faktor lainnya.

Ada variasi yang signifikan dalam jumlah kunjungan di setiap kabupaten/kota, seperti Rokan Hilir memiliki jumlah kunjungan tertinggi untuk pemeriksaan pneumonia (21.590), sedangkan Kep. Meranti memiliki yang terendah (4.729). Variasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya penjangkauan balita batuk atau kesukaran bernapas dari populasi, tingkat prevalensi batuk/kesukaran bernapas, dan aksesibilitas pelayanan kesehatan.

Angka persentase yang tinggi untuk tatalaksana standar menunjukkan bahwa sebagian besar balita yang datang dengan gejala tersebut mendapatkan penanganan sesuai prosedur yang ditetapkan (menghitung napas atau dengan melihat Tarikan Dinding Dada Ke Dalam/ TDDK). Ini krusial untuk deteksi dini dan penanganan yang tepat pada kasus batuk/kesulitan bernapas pada balita yang bisa berujung pada kondisi serius.



GAMBAR 6.11
PERSENTASE PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA PADA BALITA PROVINSI RIAU
TAHUN 2023-2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Cakupan penemuan pneumonia yang tinggi yaitu Kabupaten Siak (19,88%) menunjukkan persentase penemuan pneumonia yang sangat tinggi jauh melebihi perkiraan (dari perkiraan 1.177 kasus ditemukan 234 kasus). Demikian juga dengan Kota Dumai juga sangat tinggi (34,46%) dan Pekanbaru (19,46%). Sedangkan pneumonia yang sangat rendah yaitu Kabupaten Indragiri Hilir (0,49%), Indragiri Hulu (1,84%), Rokan Hulu (3,35%), Rokan Hilir (3,78%), dan Kuantan Singingi (4,84%), Kampar (5,34%). Dan penemuan kasus pneumonia berat terbanyak yaitu di Kota Dumai ditemukan 76 orang (laki-laki 50 orang, Perempuan 26 orang).

Ini bisa menjadi indikator bahwa Dumai memiliki prevalensi pneumonia berat yang lebih tinggi atau sistem deteksi yang lebih baik untuk kasus-kasus berat. Dan kabupaten yang melaporkan nihil kasus pneumonia berat yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Pelalawan, Kuantan Singingi, dan Kota Pekanbaru. Hal ini terjadi, kemungkinan disebabkan *underdiagnosis*, atau tidak melaporkan, padahal deteksi pneumonia berat sangat krusial untuk mencegah kematian.

Sedangkan kasus batuk bukan pneumonia sangat dominan di semua kabupaten/kota, jumlah kasus batuk bukan pneumonia (ISPA) jauh lebih tinggi dari



pada kasus pneumonia. Dan Rokan Hilir memiliki jumlah kasus batuk bukan pneumonia tertinggi (21.522 orang) dan Pekanbaru (13.745 orang).

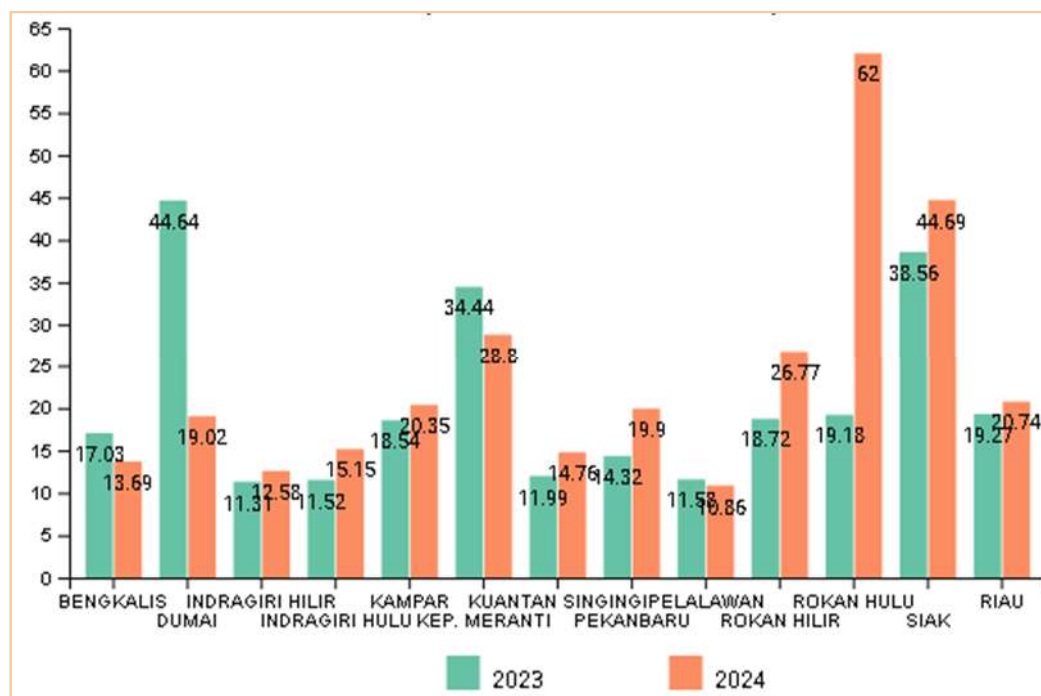
4. Diare

a. Pengertian Diare

Diare adalah kondisi medis yang ditandai dengan peningkatan frekuensi buang air besar (BAB) dan feses yang lebih cair atau encer dari biasanya. Diare bisa disertai gejala lain seperti mual, muntah, kram perut, dan penurunan berat badan. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau parasit, tetapi bisa juga karena keracunan makanan atau masalah pencernaan lainnya. Diare bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi virus (seperti Rotavirus), bakteri (seperti Salmonella atau E. coli), parasit, keracunan makanan, atau masalah pencernaan lainnya.

Penyakit Diare merupakan penyakit endemis yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan masih menjadi penyumbang angka kematian di Indonesia terutama pada balita.

GAMBAR 6.12
PENDERITA DIARE SEMUA UMUR MENDAPAT YANKES MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU
TAHUN 2023-2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

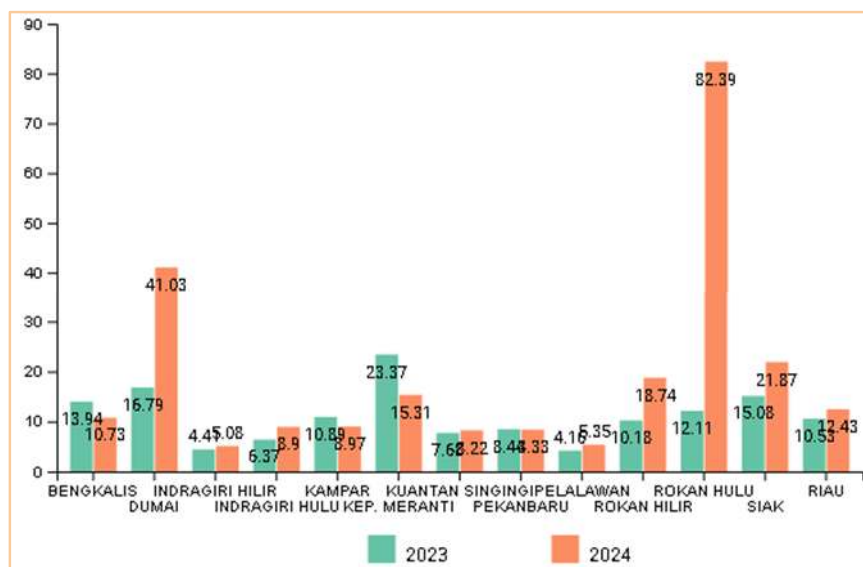


Cakupan pelayanan penderita diare pada semua umur di Provinsi Riau tahun 2024 sebesar 38.465 orang (20,74%) dan pada balita sebesar 11.297 orang (12,43%) dari sasaran yang ditetapkan. Kabupaten/Kota dengan cakupan tertinggi pelayanan diare pada semua umur adalah Kabupaten Rokan Hulu (62%), sedangkan kabupaten/kota dengan cakupan terendah adalah Pelalawan (10,86%).

b. Cakupan Pelayanan Penderita Diare

Sasaran pelayanan penderita diare pada balita yang datang ke sarana kesehatan ditargetkan oleh program sebesar 20% dari perkiraan jumlah penderita diare pada balita. Analisa data penderita diare yang mendapatkan zinc dan oralit pada semua umur dan balita di tahun 2024 terjadi penurunan yang drastis, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

GAMBAR 6.13
PERSENTASE BALITA PENDERITA DIARE MENDAPAT YANKES MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2023-2024

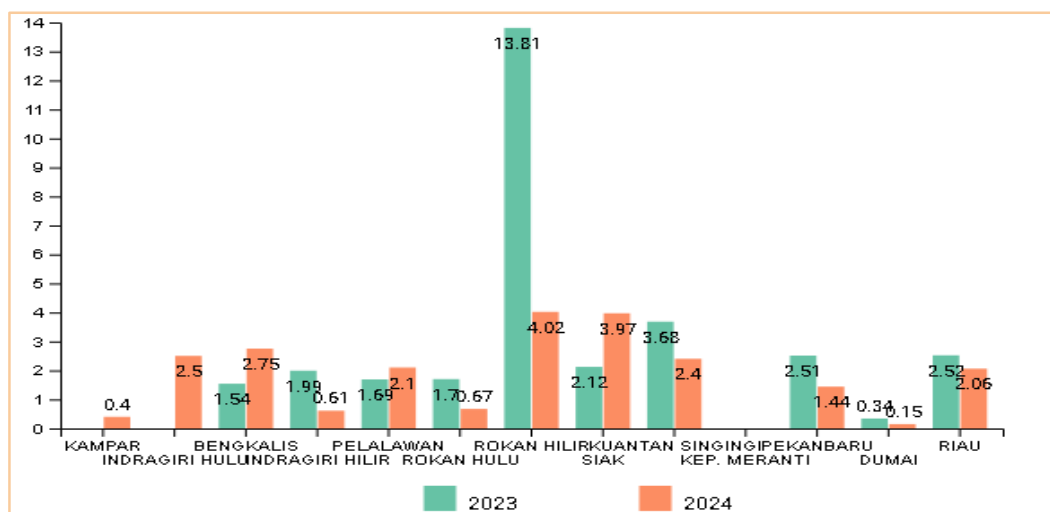


Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Persentase Balita penderita diare yang mendapatkan pelayanan kesehatan di tahun 2022-2024 di Kabupaten/Kota terjadi kenaikan, tahun 2022 balita penderita diare yang mendapatkan pelayanan kesehatan ada 4,2%, naik di tahun 2023 sebesar 10,53%, di tahun 2024 menjadi 12,43% Meski demikian, persentase capaian ini bahkan lebih rendah dari cakupan balita semua umur yang mendapatkan pelayanan Kesehatan mencapai 20,74%, yang sangat memprihatinkan mengingat kerentanan balita terhadap komplikasi diare.



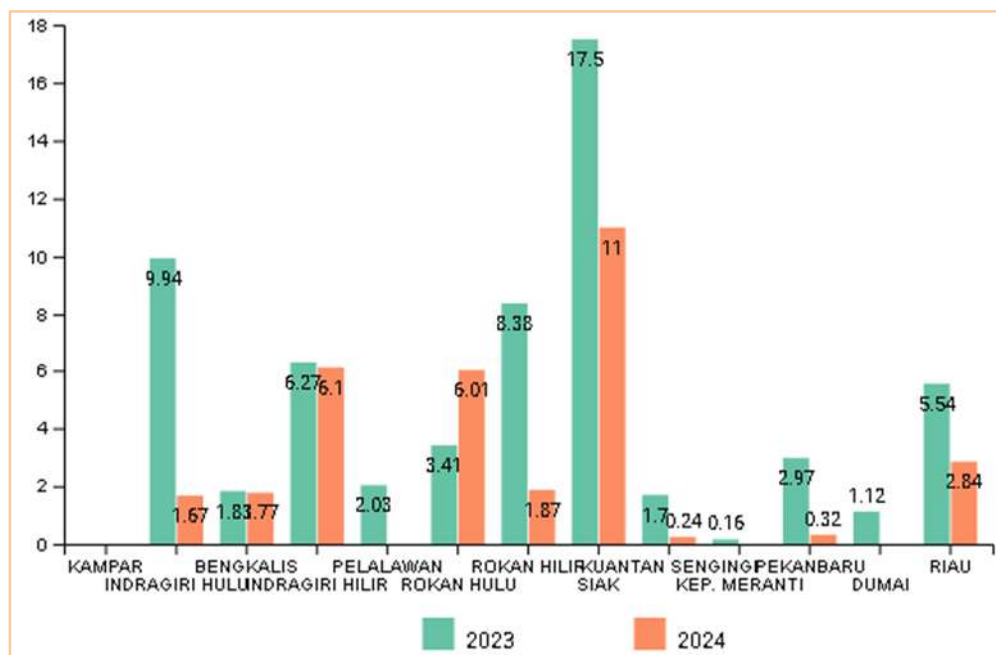
GAMBAR 6.14
PERSENTASE BALITA PENDERITA DIARE MENDAPAT ZINC MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2023-2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Pemberian zinc pada penderita diare di tahun 2022-2024 di Kabupaten/Kota terjadi penurunan yang sangat signifikan, tahun 2022 balita penderita diare yang mendapatkan zinc ada 39,6%, turun tajam di tahun 2023 hanya mencapai 2,52%, dan di tahun 2024 turun lagi menjadi 2,06%.

GAMBAR 6.15
PERSENTASE BALITA PENDERITA DIARE MENDAPAT ORALIT MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2023-2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



Capaian program penanggulangan penyakit diare di Provinsi Riau tahun 2024, dalam penanganan kasus diare untuk semua umur yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan mendapatkan obat atau larutan pengganti cairan tubuh untuk mencegah dehidrasi (ORALIT) telah mencapai target 100%, tetapi untuk kasus diare pada balita yang telah mendapat oralit hanya 0,83% (321 kasus diare pada balita yang mendapatkan ORALIT dari 38.465 balita). Ini adalah angka yang sangat rendah sekali karena Hampir 99% dari kasus diare yang sudah dilayani ternyata tidak mendapatkan oralit.

Pemberian zinc dan oralit pada penderita diare di tahun 2024, hampir di semua kabupaten/kota masih sangat rendah. Kabupaten/Kota yang tinggi untuk pemberian oralit dan Zinc untuk penderita diare adalah Kabupaten Kampar sebesar 99,53%. Kabupaten/kota yang hanya sedikit penggunaan zinc dan oralit adalah kabupaten Siak 57,07%, dikarenakan kurangnya promotive di kegiatan pelayanan Kesehatan pada bayi dan balita di posyandu (lampiran 61).

5. Kusta dan Frambusia

a. Kusta

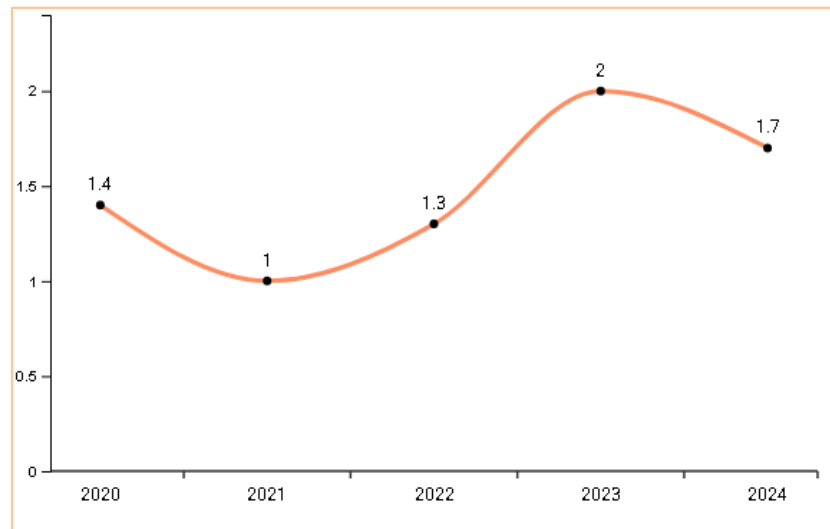
Penyakit kusta sudah dapat diatasi dan seharusnya tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat. Akan tetapi mengingat kompleksnya masalah penyakit kusta maka diperlukan program pengendalian secara terpadu dan menyeluruh melalui strategi yang sesuai dengan endemis penyakit kusta. Selain itu juga harus diperhatikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup bagi penderita kusta dan frambusia.

- Angka Prevalensi dan Angka Penemuan Kasus Baru

Angka prevalensi kusta di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 0,2 per 10.000 penduduk dan angka penemuan kasus baru sebesar 1,7 per 100.000 penduduk. Provinsi Riau telah mencapai eliminasi kusta karena target penemuan kasus baru kusta adalah (<1 kasus per 10.000 penduduk atau < 10 per 100.000 penduduk). Target ini merupakan target eliminasi kusta, yang berarti upaya untuk menurunkan angka kejadian kusta hingga tingkat yang tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat.



GAMBAR 6.16
ANGKA PENEMUAN KASUS BARU (NEW CASE DETECTION RATE/NCDR)
PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Kusta merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri, *Mycobacterium leprae*. Penyakit kusta bersifat kronis, menyerang kulit, saraf tepi, dan organ tubuh lain kecuali saraf pusat. Jenis penyakit kusta ada 2 (dua) yaitu PB (*Pausi Basiler*) / kusta kering dan MB (*Multi Basiler*)/kusta basah, dimana dua tipe kusta yang dibedakan berdasarkan jumlah bakteri kusta (*Mycobacterium leprae*) dalam tubuh penderita. PB atau kusta kering memiliki jumlah bakteri yang sedikit, sedangkan MB atau kusta basah memiliki jumlah bakteri yang banyak.

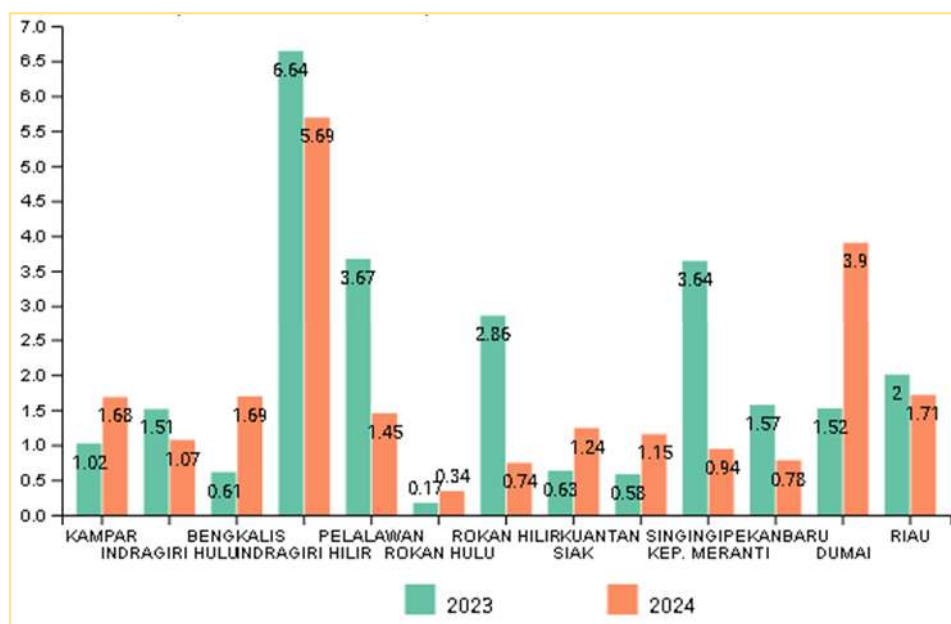
Terlambatnya dalam deteksi dini dan tatalaksana kasus kusta dapat mengakibatkan kecacatan, pada mata, tangan, dan kaki. Penyakit kusta dan frambusia merupakan salah satu penyakit menular yang menimbulkan masalah yang sangat kompleks. Masalah yang dimaksud bukan hanya dari segi medis tetapi meluas ke masalah sosial, ekonomi, budaya keamanan dan ketahanan nasional. Penyakit kusta pada umumnya terdapat di negara-negara berkembang sebagai akibat keterbatasan kemampuan negara tersebut untuk memberikan pelayanan yang memadai dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial serta ekonomi pada masyarakat.

Dengan kemajuan ilmu dan teknologi di bidang promotif bidang kusta, maka Tren angka kejadian kusta di Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 6.16. Selama tiga tahun terakhir 2021-2024 terlihat angka penemuan kasus kusta baru



tren relatif setiap tahun meningkat. Setelah terjadi penurunan pada tahun 2020-2021, tetapi kembali menunjukkan peningkatan sejak tahun 2022 dan di tahun 2023 ditemukan dan dilaporkan sebanyak 133 kasus baru kusta yang hampir 90% diantaranya merupakan kusta tipe *Multibasiler* (MB). Tahun 2024 kusta tipe *Multibasiler* (MB) meningkat lagi menjadi 95% (118 orang dari semua kasus baru kusta sebanyak 124 orang).

GAMBAR 6.17
ANGKA PENEMUAN KASUS BARU (NEW CASE DETECTION) KUSTA MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2023-2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Kasus baru kusta tahun 2022-2023 di Provinsi Riau meningkat menjadi 2% di tahun 2023, di tahun 2024 ditemukan kasus baru kusta 1,7 per 100.000 penduduk dan kabupaten/kota yang masih cenderung meningkat penemuan kasus baru kusta yaitu kabupaten Indragiri Hilir, dan Kota Dumai sedangkan kabupaten lainnya mayoritas menurun dari tahun sebelumnya. hal ini dipengaruhi oleh Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tempat tinggal pasien masih rendah dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera berobat ke faskes terdekat. Jumlah pasien kusta 124 kasus sudah mendapatkan pengobatan 100% dengan *Multidrug Therapy* (MDT) sesuai jenis kusta.

Upaya penanganan kusta terus dilakukan untuk mengeliminasi total penyakit kusta di Indonesia dan Provinsi Riau. Salah satu yang dilakukan adalah



memperluas cakupan penemuan kasus aktif agar dapat segera diobati guna memutus mata rantai penularan.

- **Angka Disabilitas Tingkat 2 pada kusta**

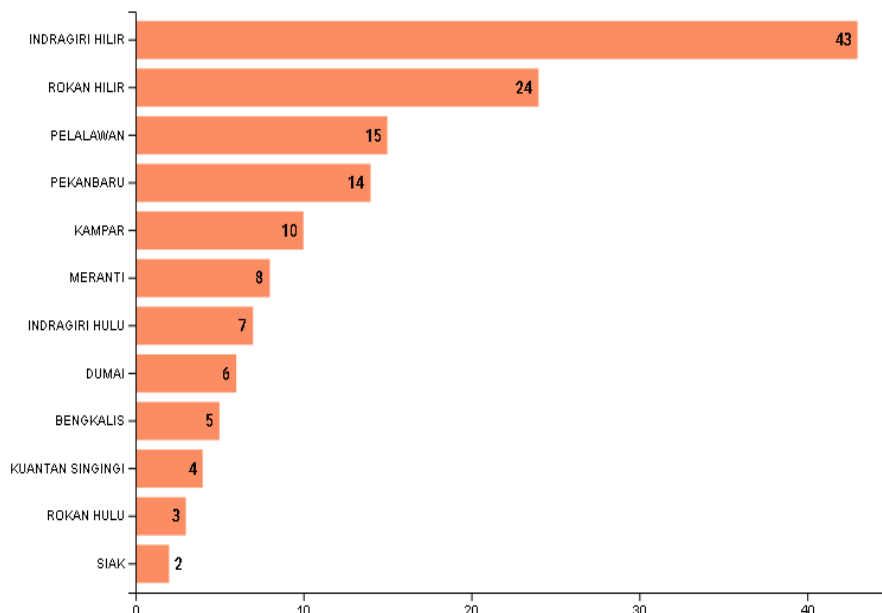
Peningkatan deteksi kasus sejak dini diperlukan dalam pengendalian kasus kusta. Salah satu indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan dalam mendeteksi kasus baru kusta secara dini yaitu angka disabilitas tingkat 2. Pada tahun 2024 angka disabilitas tingkat 2 sebesar 1,6 per 1.000.000 penduduk. Jika dilihat tren dalam dua tahun terakhir, angka disabilitas tingkat 2 cenderung menurun.

Dapat dilihat pada data di lampiran 65, diketahui bahwa dari hasil pengobatan kusta tahun 2024, kusta dengan disabilitas cacat2 terdapat di Kabupaten Kampar meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 7 orang (46,7%), di kota Dumai 2 orang dan Kota Pekanbaru ada 2 orang.

- **Proporsi Kusta Multibasiler (MB) dan Proporsi Kusta Baru**

Proporsi kusta MB/ kusta basah 118 orang (95,16%) dan proporsi kusta pada anak (0-14 tahun) sejumlah 12 orang (9,7%) di antara kasus baru memperlihatkan adanya sumber penularan tersembunyi serta tingginya tingkat penularan di masyarakat.

GAMBAR 6.18
JUMLAH KASUS MULTI BASILER/KUSTA BASAH MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



Tidak banyak terjadi perubahan proporsi kusta *Multibasiler* (MB) selama periode 2013 -2023. Kasus kusta tipe MB masih mendominasi di Provinsi Riau menunjukkan banyaknya sumber penularan di masyarakat. Kabupaten/kota dengan proporsi kusta MB tertinggi pada tahun 2024 yaitu Kabupaten Kampar (100%), Indragiri Hilir (89,74%) dan Kota Dumai 84,62%.

- Proporsi kusta pada anak

Proporsi kusta pada anak mulai mengalami penurunan sejak tahun 2021, dan tahun 2023 proporsi kusta pada anak 6% dan tertinggi di Kabupaten Rokan Hilir. Penemuan kasus baru kusta pada anak <15 tahun meningkat menjadi 7% , rata-rata 1-2 orang tidak merata penyebarannya dan hanya di beberapa kabupaten/kota saja seperti Kabupaten Kampar ditemukan 2 orang (13,3%), Bengkalis 2 orang (20%), Indragiri Hilir 1 orang (2,6%) , Rokan Hilir 1 orang (20%) dan Kota Dumai 2 orang (15,4%) pada lampiran 65.

- Penderita Kusta Selesai Berobat (*Release From Treatment* / RFT)

Program penanggulangan kusta dan pengendalian kusta pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menurunkan angka kejadian kusta dan mencegah kecacatan akibat kusta. RFT pada kusta (*Release From Treatment*) atau Lepas Pengobatan adalah pasien telah menyelesaikan dosis MDT (*Multi drug Therapy*) , dan berarti pengobatan kusta aktif dihentikan. Indikator persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu (RFT) sangat penting digunakan dalam menilai kualitas tatalaksana penderita dan kepatuhan penderita dalam minum obat. Indikator tersebut merupakan indikator tahunan dan perhitungannya dilakukan berdasarkan penderita yang memulai pengobatan MDT pada periode kohort yang sama.

Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu merupakan jumlah penderita baru kusta (PB/MB) dari periode kohort 1 (satu) tahun yang sama yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu (PB menyelesaikan 6 dosis dalam waktu 6-9 bulan/MB menyelesaikan 12 dosis dalam waktu 12-18 bulan) dinyatakan dalam persentase.

Capaian program penanggulangan dan pengendalian kusta tahun 2024, pasien kusta yang RFT di Provinsi Riau sudah cukup tinggi, yaitu kusta PB/ kusta kering berjumlah 9 dari 11 orang kusta baru yang ditemukan dan diobati (81,8%),



sedangkan pasien kusta MB/ kusta basah yang selesai pengobatan dari yang ditemukan dan diobati berjumlah 56 dari 78 orang (95,16%)

b. Frambusia

Kasus Frambusia di Provinsi Riau sudah tidak ditemukan lagi hal ini dikarenakan penyakit Frambusia sudah pada tahap eradikasi dimana pada Tahun 2024 sudah 8 kabupaten/kota di Provinsi Riau yang menerima sertifikat bebas Frambusia dan 4 Kab/Kota sudah dilakukan *Assessment Eradikasi Frambusia* dan akan menerima sertifikat bebas Frambusia di Tahun 2025.

6. Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I)

PD3I adalah singkatan dari penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi, pada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri yang dapat dicegah melalui vaksinasi atau imunisasi, seperti campak, rubella, polio, difteri, tetanus, pertusis (batuk rejan), hepatitis B, dan tuberkulosis (TBC). Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi saat ini masih mengancam dunia karena dapat mengakibatkan kematian dan kecacatan. Imunisasi merupakan suatu upaya untuk menimbulkan/ meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Imunisasi yang diberikan secara tepat waktu dan sesuai dengan jadwal dapat membentuk kekebalan tubuh dan melindungi individu serta masyarakat dari penyakit-penyakit tersebut.

Untuk mendapatkan perlindungan seumur hidup, seseorang perlu mendapatkan imunisasi sesuai dosis dan jadwal secara terus menerus dan berkesinambungan. Selain imunisasi rutin, yaitu imunisasi bayi, imunisasi anak bawah dua tahun (baduta), imunisasi anak usia sekolah dan imunisasi dewasa, juga dikenal imunisasi kejar, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Imunisasi kejar diberikan pada bayi, balita dan anak usia sekolah yang belum mendapatkan dosis vaksin sesuai usia yang ditentukan pada jadwal imunisasi rutin. Imunisasi tambahan merupakan jenis imunisasi tertentu yang diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu, sementara itu imunisasi khusus dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu.



a. Tetanus Neonatorum

Tetanus Neonatorum (TN) merupakan penyakit tetanus yang menyerang neonatus (bayi usia <28 hari). Walaupun disebut sebagai *silent killer*, penyakit ini bisa dicegah melalui pemberian vaksin Tetanus Toxoid (TT) secara tepat waktu, selain menjaga kebersihan tempat praktek bersalin, serta proses persalinan, dan perawatan tali pusat yang bersih dan aman.

Penyebab utama dari penyakit ini adalah infeksi bakteri *Clostridium tetani*, yaitu bakteri yang menghasilkan racun yang dapat menyerang otak dan sistem saraf pusat. Bakteri ini biasa ditemukan di tanah, debu, dan kotoran hewan. Bakteri *Clostridium tetani* bisa menginfeksi seseorang, melalui luka goresan, robekan, atau luka tusukan yang disebabkan oleh benda-benda yang terkontaminasi. Tetanus tidak dapat ditularkan dari orang ke orang, tetapi pada bayi yang baru lahir tetanus neonatorum terjadi oleh karena bakteri ini masuk ke dalam tubuh bayi melalui praktik persalinan yang tidak higienis, seperti memotong dan merawat tali pusat yang tidak bersih atau steril. Persalinan yang dilakukan oleh penolong persalinan dengan tangan yang tidak steril dan terkontaminasi juga merupakan faktor risiko terjadinya kasus *tetanus neonatorum*.

Pada penyakit tetanus, kekebalan tidak bisa didapat setelah terjadi infeksi. Kekebalan terhadap penyakit tetanus hanya dapat diperoleh melalui kekebalan buatan secara pasif dengan suntikan anti tetanus serum dan/atau secara aktif dengan pemberian imunisasi yang mengandung tetanus (jenis vaksin yang diberikan sesuai usia). Jadwal imunisasi tetanus dengan vaksin yang mengandung tetanus toxoid saat ini di Indonesia adalah DPT-HB-Hib (umur 2, 3, 4, dan 18 bulan), DT (SD/ sederajat Kelas 1), Td 2 dosis (SD/ sederajat kelas 2 dan 5), dan Td WUS (15-39 tahun).

Kasus Tetanus Neonatorum di Provinsi Riau dimulai tahun 2022 dan termasuk dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan ditemukannya 1 kasus dan meninggal, tahun 2023 penderita Tetanus Neonatorum meningkat terus, dan semua kasus TN tidak tertangani atau tidak tertolong. Penemuan kasus yang dapat ditoleransi 1/1.000 kelahiran, penemuan kasus tahun 2023 ada 9 orang, dengan meninggal 7 orang (CFR 77,8%). Dan di Tahun 2024 ditemukan kasus TN berjumlah 2 orang dan meninggal 1 orang (50%) pada lampiran 69.



b. Difteri

Difteri adalah salah satu penyakit yang sangat menular yang dapat dicegah dengan imunisasi, disebabkan oleh bakteri *Corynebacterium diphtheriae strain toksigenik*. Penularan terjadi secara droplet (percikan ludah) dari batuk, bersin, muntah, melalui alat makan, atau kontak erat langsung dari lesi di kulit.

Difteri merupakan jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan KLB/Wabah. Setiap satu kasus suspek difteri dengan gejala faringitis, tonsilitis, laringitis, trakeitis, atau kombinasinya disertai demam atau tanpa demam dan adanya *pseudomembran* putih keabu-abuan yang sulit lepas, mudah berdarah apabila dilepas atau dilakukan manipulasi harus dilaporkan dalam 24 jam dan dilakukan segera penanggulangan untuk memutuskan rantai penularan. Kegiatan penanggulangan KLB difteri dilakukan dengan melibatkan program-program terkait yaitu surveilans epidemiologi, program imunisasi, klinisi, laboratorium dan program kesehatan lainnya serta lintas sektor terkait. Tahun 2024 penyebaran penyakit Difteri tidak terjadi di semua kabupaten/kota. Dan jumlah kasus Difteri yang ditemukan di Provinsi Riau terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu CFR 2,7% (1 orang meninggal dari 37 kasus yang ditemukan), dibandingkan tahun sebelumnya CFR 35%.

c. Pertusis

Pertusis, dikenal sebagai batuk rejan atau batuk 100 hari, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Bordetella pertussis*. Penyakit ini menyerang saluran pernapasan dan ditandai dengan batuk parah yang khas, terkadang disertai suara "*whoop*" saat menarik napas. Pertusis sangat menular dan dapat menjadi serius, terutama pada bayi dan anak-anak kecil. Penyebab Pertusis disebabkan oleh bakteri *Bordetella pertussis* yang menyerang saluran pernapasan. Penyakit ini menular melalui percikan ludah saat batuk, bersin, atau berbicara.

Penyebaran Pertusis tidak terjadi di semua kabupaten/kota di Provinsi Riau dan ditemukan sebanyak 96 orang, dengan penyebaran penderitanya paling banyak ditemukan di Kota Pekanbaru sejumlah 55 orang, Kabupaten Kampar ditemukan 24 orang dan Kabupaten Bengkalis 14 orang.



d. Campak

Penyakit campak yang biasanya juga dikenal sebagai morbili atau *measles* merupakan penyakit yang sangat menular disebabkan oleh virus dari *genus Morbillivirus* dan termasuk golongan *Paramyxovirus*.

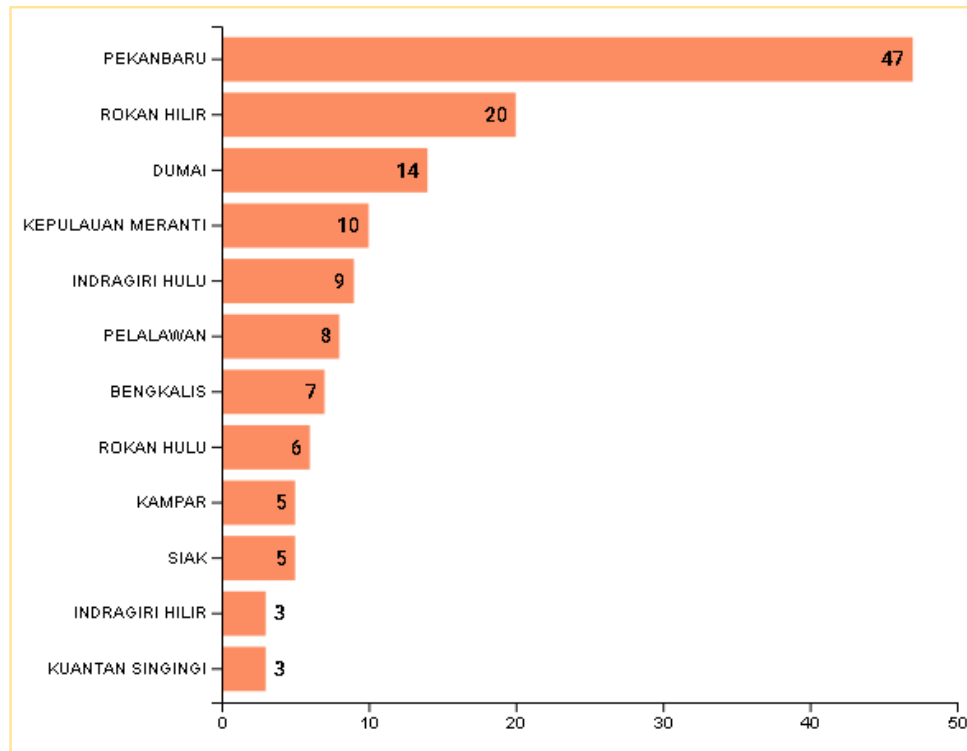
Campak menjadi penyebab penting kematian anak-anak di seluruh dunia. Kelompok anak usia pra sekolah dan usia SD merupakan kelompok rentan tertular penyakit campak. Campak akan menyerang hampir 100% anak yang tidak kebal terhadap virus tersebut. Manusia diperkirakan satu-satunya reservoir, walaupun monyet dapat terinfeksi tetapi tidak berperan dalam penyebaran. Campak ditularkan melalui udara yang terkontaminasi droplet dari hidung, mulut, atau tenggorokan orang yang terinfeksi. Masa inkubasi penyakit campak adalah 7-18 hari, rata-rata 10 hari.

Campak berat mungkin terjadi pada anak-anak yang menderita kurang gizi, terutama pada mereka yang kekurangan vitamin A, atau yang sistem kekebalan tubuhnya telah dilemahkan oleh penyakit lain. Seseorang yang pernah menderita campak akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tersebut seumur hidupnya.

Suspek campak adalah setiap kasus dengan gejala minimal demam dan ruam *makulopapular*, kecuali sudah terbukti secara laboratorium disebabkan oleh penyakit lain. Penemuan kasus suspek campak merupakan salah satu strategi surveilans yang dilakukan untuk menemukan kasus campak lebih dini sehingga bisa terhindar dari komplikasi dan kematian.



GAMBAR 6.19
JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK BERDASARKAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Pada tahun 2024, *Incident Rate* suspek campak sebanyak 137 kasus (2/100.000 penduduk) dan tersebar di kabupaten/kota se- Provinsi Riau, yang paling tinggi adalah Kota Pekanbaru berjumlah 47 kasus (5/100.000 penduduk) dan Kabupaten Kep. Meranti ditemukan 10 kasus.(5/100.000 penduduk) dari jumlah penduduk per Kabupaten/Kota.

e. Hepatitis

Penyakit Hepatitis merupakan masalah kesehatan masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Hepatitis B adalah bentuk hepatitis yang paling sering ditularkan dari ibu ke bayi di seluruh dunia, dengan peningkatan risiko yang lebih besar jika Anda tinggal di negara berkembang. Sekitar 90% wanita hamil dengan infeksi hepatitis B akut akan “mewarisi” virus tersebut ke bayi mereka. Sekitar 10-20% wanita dengan infeksi hepatitis B kronis akan menularkannya. Sekitar 4% ibu hamil yang terinfeksi virus hepatitis C akan menyebarkannya ke bayi mereka.

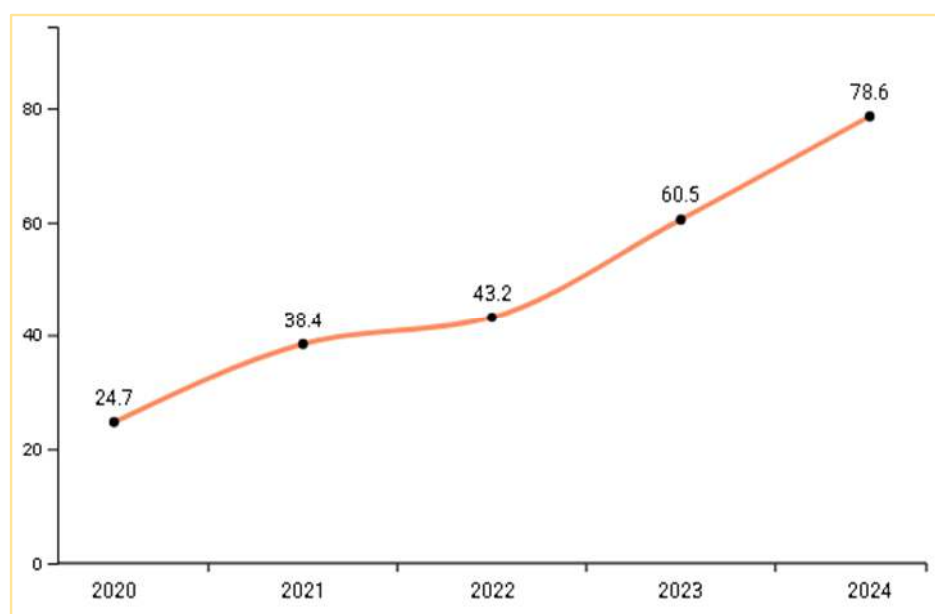
Majelis Kesehatan Dunia atau World Health Assembly (WHA) ke-63 tahun 2010 dimana berbuah suatu resolusi yang menyerukan agar semua negara di



dunia melakukan Penanggulangan Hepatitis secara komprehensif, mulai dari pencegahan.

Indikator kegiatan hepatitis saat ini merupakan indikator lanjutan dari tahun 2015-2019, Tahun 2015 – 2019 indikator kinerja hepatitis adalah Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B saja, tahun 2020-2024 ditambah dengan Deteksi Dini Hepatitis C sehingga indikator di tahun 2020-2024 adalah persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko.

GAMBAR 6.20
CAKUPAN PEMERIKSAAN HEPATITIS B PADA IBU HAMIL PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



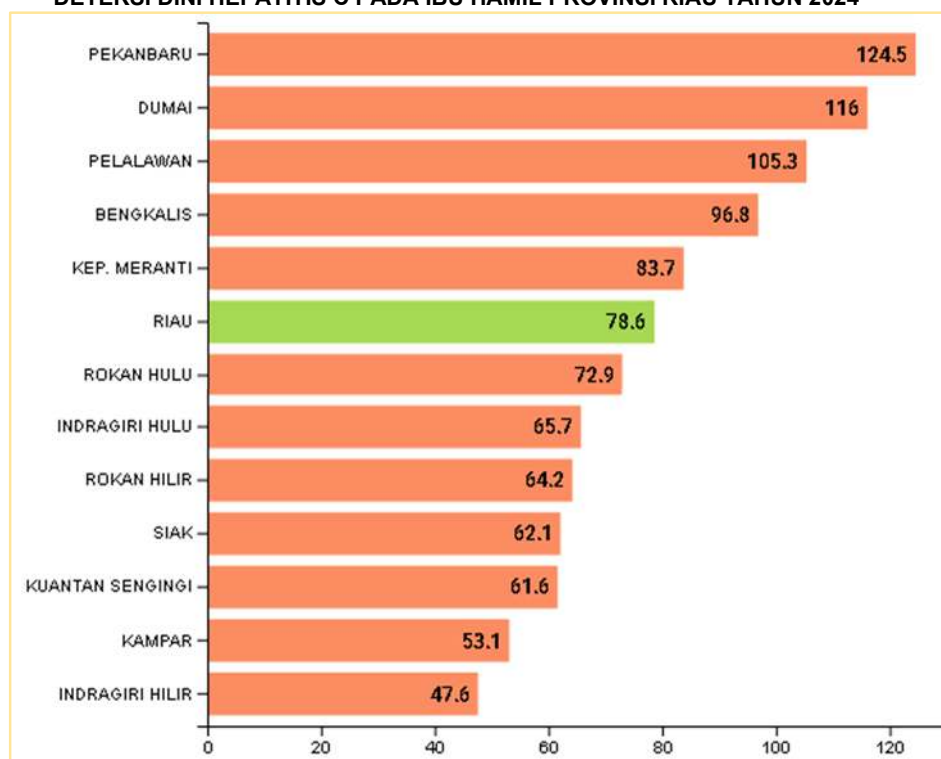
Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Gambar 6.12 pencapaian pemeriksaan Hepatitis pada ibu hamil dari tahun 2019-2024, setiap tahun mengalami kenaikan. Dan dari data yang diterima di Provinsi Riau tahun 2024 cakupan ibu hamil yang diperiksa Hepatitis B sebesar 78,6% (97.107 orang) dimana target Ibu hamil yang akan diperiksa sebesar 90%, ibu hamil yang reaktif sebanyak 1.052 orang (1,08%), bayi yang lahir dari Ibu yang reaktif sebanyak 915 orang dan hampir semuanya telah mendapatkan vaksin Hbig 908 orang (99,23%). Virus ini sangat infeksius, terutama Hepatitis B dan C yang dapat menyebabkan sirosis Hati, dan kanker hati dan bahkan kematian. Indonesia merupakan salah satu negara yang memprakarsai agar Hepatitis menjadi perhatian.



Hasil analisa dan supervisi yang dilakukan selama ini menggambarkan bahwa program Hepatitis belum mendapat perhatian serius dari penentu kebijakan sehingga sangat sulit untuk mengalokasikan dana untuk kegiatan pendukung program seperti peningkatan SDM di Puskesmas, monitoring secara berkala, pengembangan pelayanan swasta dimana dengan situasi dana program penyakit menular sangat terbatas program Hepatitis seakan menjadi bukan prioritas. Dengan tidak teralokasinya dana untuk kegiatan dimaksud maka program Hepatitis belum mencapai target yang telah ditetapkan, serta juga masih kurangnya peran swasta dalam melaksanakan deteksi dini Hepatitis B, seperti RS Swasta, Klinik, Praktek mandiri.

GAMBAR 6.21
DETEKSI DINI HEPATITIS C PADA IBU HAMIL PROVINSI RIAU TAHUN 2024

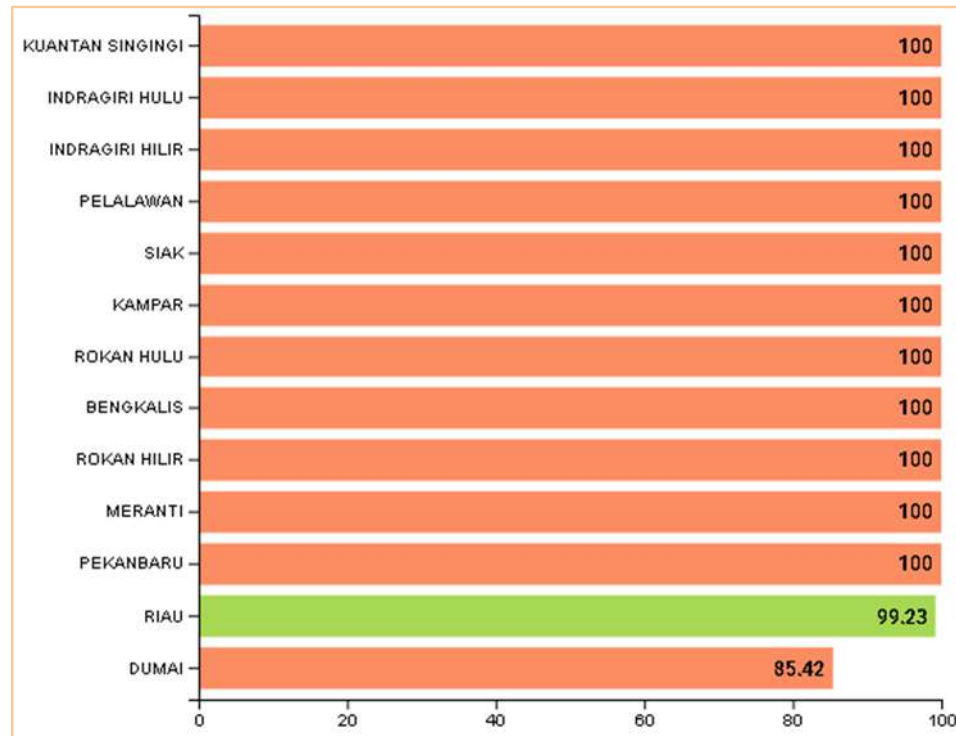


Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Deteksi dini hepatitis C pada ibu hamil tahun 2024, yang paling banyak dilakukan oleh Kabupaten Pelalawan, Pekanbaru, Dumai. Ini menunjukkan keberhasilan dalam menjangkau ibu hamil untuk dilakukan deteksi dini Hepatitis C. Kabupaten dengan persentase reaktif yang lebih tinggi yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Pelalawan, memerlukan perhatian lebih lanjut dalam program pencegahan dan penanganan Hepatitis B.



GAMBAR 6.22
CAKUPAN BAYI LAHIR DARI IBU HBSAG REAKTIF MENDAPAT HBIG
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Ibu hamil yang terinfeksi Hepatitis B, telah mendapatkan vaksin dan pengobatan untuk memperkuat sistem imunitas tubuh guna mencegah perkembangan virus dalam tubuh atau obat-obatan antivirus, guna mencegah perkembangan virus dalam tubuh atau obat-obatan antivirus.

Dan untuk pencegahan penularan pada bayi lahir dari ibu terinfeksi tersebut, maka diberikan vaksin HBIG (imunoglobulin hepatitis B) guna mencegah infeksi virus Hepatitis B, dimana virus ini menginfeksi hati dan menyebabkan peradangan. Cakupan bayi lahir yang mendapatkan HBIG dari ibu reaktif HBsAG di Provinsi Riau telah mencapai target 99,23%, karena 11 (sebelas) kabupaten/kota telah mencapai 100%, sedangkan yang belum mencapai target yaitu Kota Dumai hanya 85,42%.

d. Polio dan Acute Flaccid Paralysis (AFP)/Lumpuh Layu Akut

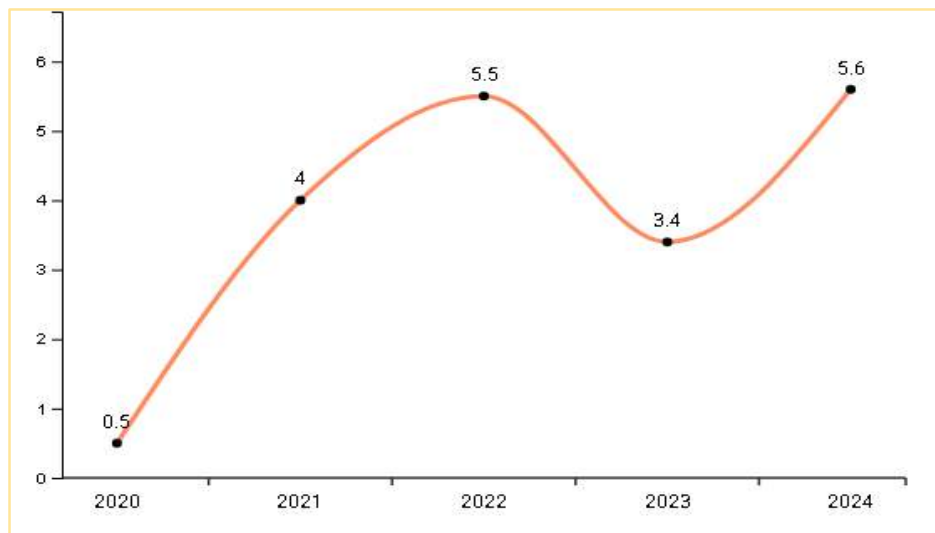
Polio merupakan penyakit yang sangat menular dan disebabkan oleh virus poliomyelitis. Penyakit ini menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan total hanya dalam hitungan jam. Virus ini terutama ditularkan dari orang ke orang melalui fekal-oral. Gejala awal yang terjadi adalah demam,



kelelahan, sakit kepala, muntah, kekakuan pada leher, dan nyeri pada tungkai. Satu dari 200 infeksi menyebabkan kelumpuhan permanen (biasanya di bagian tungkai). Diantara yang lumpuh, 5-10% akan berakhir pada kematian karena kelumpuhan terjadi pada otot-otot pernapasan.

Indikator surveilans AFP adalah *non-polio AFP rate*, yaitu kasus lumpuh layu akut yang terjadi secara akut (mendadak), bukan disebabkan oleh ruda paksa yang diduga disebabkan oleh virus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio. Kementerian Kesehatan menetapkan target *non-polio AFP rate* sebesar minimal 2/100.000 populasi penduduk pada usia <15 tahun. Namun, dikarenakan adanya KLB pada tahun 2022 sehingga target *non-polio AFP rate* dimulai tahun 2023 dinaikkan menjadi minimal 3/100.000 populasi penduduk usia <15 tahun.

GAMBAR 6.23
AFP RATE (NON FOLIO) PER 100.000 PENDUDUK PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

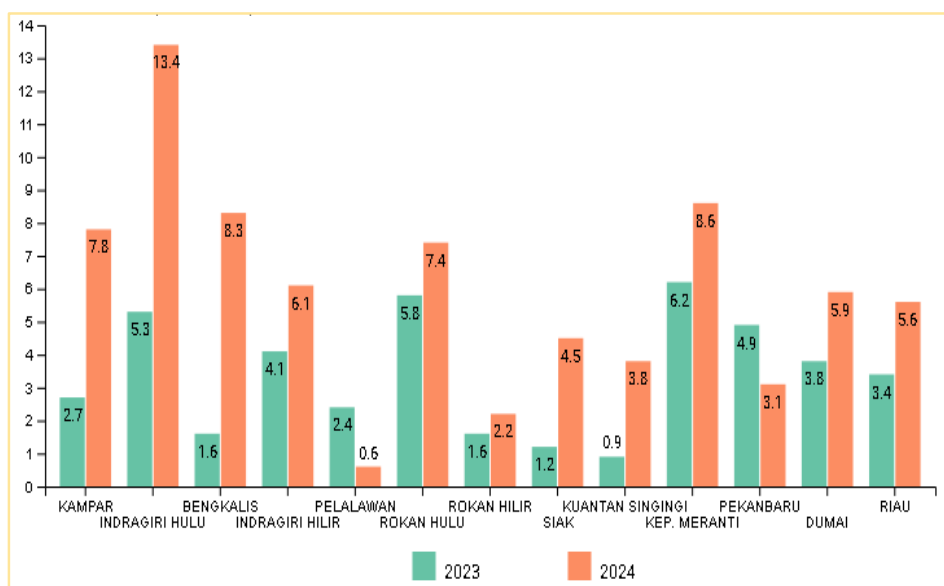
Kasus non-polio AFP rate Provinsi Riau tahun 2024 meningkat kembali menjadi 5,6/100.000 penduduk <15 tahun, setelah mengalami penurunan di tahun 2023 yaitu 3,4/100.000 penduduk dan di tahun 2022 sebesar 5,5 /100.000 populasi penduduk < 15 tahun (target nasional tahun 2023 minimal 3/100.000 penduduk <15 tahun). Hal ini menggambarkan kinerja surveilans AFP untuk menemukan kasus AFP sudah sangat baik sehingga diharapkan tidak ada kasus AFP yang belum terjaring.

Setelah mengidentifikasi data diatas, diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan penemuan kasus Kembali di tahun 2024.



Hal ini diperlukan adanya peningkatan penyuluhan, peningkatan skrining di sekolah dan kegiatan aktif di Posyandu. Meskipun penemuan kasus menunjukkan kinerja baik di atas target, diperlukan kegiatan yang berkelanjutan dan terus ditingkatkan, terutama mengingat kerentanan kelompok usia anak, dan kualitas penemuan kasus, termasuk diagnosis yang akurat dan tindak lanjut pengobatan yang tepat.

GAMBAR 6.24
AFP RATE (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA <15 TAHUN PROVINSI RIAU
TAHUN 2023-2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dari gambar 6.32, terlihat bahwa tahun 2024, kabupaten/kota yang AFP/ *non-polio AFP rate* tinggi yaitu Kabupaten Indragiri Hulu ditemukan 16 orang dengan *AFP rate* sebesar 13,4/100.000 penduduk <15 tahun. Meski terjadi kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya, ada beberapa kabupaten/kota yang masih rendah yaitu Kabupaten Pelalawan ditemukan *AFP Rate non polio* sejumlah 1 orang (0,6/100.000 penduduk usia <15 tahun). Penemuan adanya transmisi virus polio dapat dilakukan melalui surveilans AFP, dimana semua kasus lumpuh layu akut pada anak usia <15 tahun (yang merupakan kelompok rentan terhadap penyakit polio) diamati.

Monitoring dan surveilans yang merupakan upaya pencegahan AFP/ *non-polio AFP* dengan melakukan observasi pada populasi anak-anak usia < 15 tahun, dan merupakan indikator sensitivitas deteksi virus polio. Melacak setiap kelumpuhan yang dilaporkan oleh masyarakat untuk memastikan bahwa



kelumpuhan tersebut adalah AFP atau AFP non Polio, pelacakan harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam. Untuk upaya pencegahan terjadinya AFP / non Polio AFP, maka imunisasi polio harus dijaga tetap tinggi (lebih dari 95% anak diimunisasi) dan merata, dan semua kasus lumpuh layu mendadak (*acute flaccid paralysis/AFP*) harus ditemukan secara dini dan dilaporkan. Dokumentasi kegiatan surveilans AFP/ *non-polio AFP* sangat penting untuk bukti bahwa tidak adanya virus polio sebagai syarat sertifikasi bebas polio.

7. Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis

a. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam berdarah Dengue masih menjadi masalah Kesehatan masyarakat di Provinsi Riau, dimana seluruh Kab/Kotanya merupakan daerah Endemis DBD dan cenderung meluas sebarannya. Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan disebarkan oleh vektor. Virus yang menyebabkan penyakit ini adalah

Vektor penular penyakit ini berasal dari jenis nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Nyamuk *Aedes* menyukai genangan atau tempat penampungan air seperti selokan, vas atau pot tanaman, tempat minum hewan peliharaan, kolam renang, atau tempat sampah sebagai tempat perindukan. Karakteristik vektor penular menentukan persebaran dan waktu kejadian infeksi. Habitat nyamuk *Aedes* pada umumnya berada di wilayah dengan iklim tropis, curah hujan tinggi, serta suhu panas dan lembab. Karakteristik dan perilaku vektor tersebut dapat menjelaskan adanya kecenderungan peningkatan kasus DBD pada musim penghujan

Hal ini karena vektor penularan DBD tersebar luas baik di tempat pemukiman maupun di tempat umum. Selain itu kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, dan urbanisasi yang semakin meningkat. Upaya peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat masih menjadi strategi prioritas dalam upaya pencegahan dan pengendalian DBD, melalui Gerakan 1 (satu) Rumah 1 (satu) Jumantik dalam rangka optimalisasi pemberdayaan PSN 3M Plus di masyarakat, seperti memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, tidak menggantung pakaian di dalam kamar, menaburkan bubuk larvasida pada penampungan air.

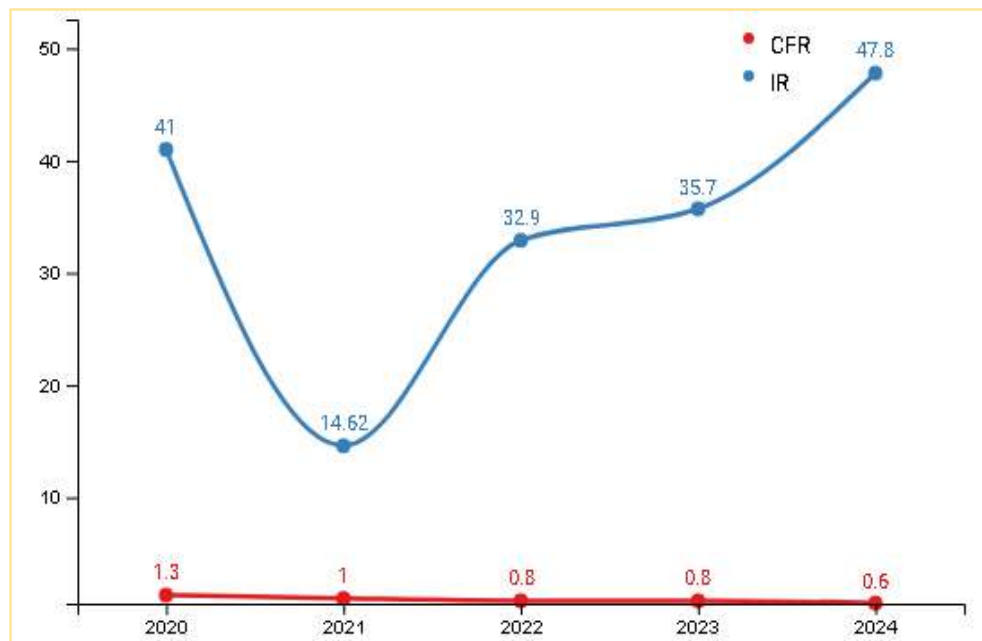


- Kesakitan dan Kematian Akibat DBD

Diagnosa kasus DBD ditegakkan dengan anamnesis perjalanan penyakit, gejala klinis, pemeriksaan fisik termasuk tanda vital dan tanda perdarahan, serta pemeriksaan penunjang konfirmasi diagnosis. Pasien terduga DBD akan menjalani pemeriksaan laboratorium yang mengindikasikan penurunan trombosit $< 100.000/\text{mm}^3$ dan adanya kebocoran plasma yang ditandai dengan peningkatan hematokrit $> 20\%$.

Dalam pengendalian penyakit DBD, digunakan beberapa indikator untuk kegiatan pemantauan. Dua indikator utama yang digunakan adalah *Incidence Rate* per 100.000 penduduk dan *Case Fatality Rate*. Proporsi kematian terhadap seluruh kasus DBD atau yang dikenal dengan *Case Fatality Rate* (CFR) dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pengendalian penyakit DBD, dengan penanggulangan DBD secepatnya, karena jika terjadi keterlambatan dalam mendapatkan perawatan dapat menyebabkan kematian.

GAMBAR 6.25
INCIDENCE RATE (IR) PER 100.000 PENDUDUK DAN LAJU KEMATIAN/CASE FATALITY RATE (CFR) DBD
PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

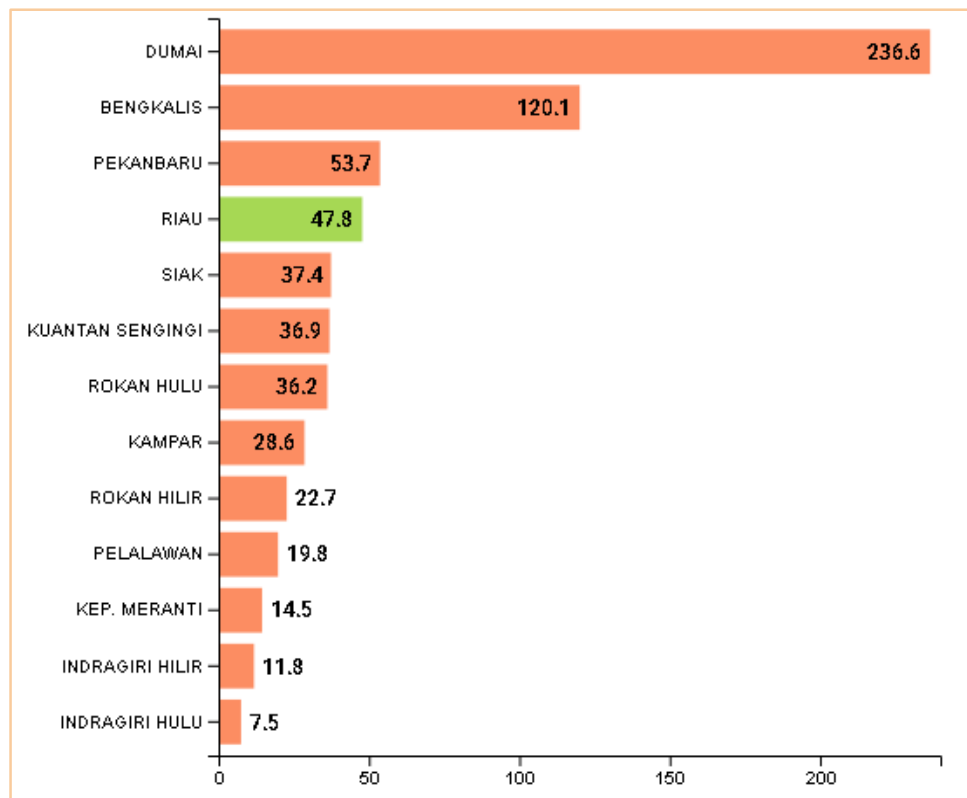
Di Provinsi Riau, Jumlah kasus DBD yang dilaporkan pada tahun 2024 dilaporkan sebanyak 3.213 orang (IR = 47,8 Per 100.000 penduduk), dengan



persentase Kabupaten/Kota IR DBD < 49 per 100.000 penduduk adalah 75 % dan dengan jumlah kematian yang dilaporkan sebanyak 19 orang (CFR = 0,6%). *Incidence Rate* DBD Kabupaten/kota yang tinggi yaitu Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis, sedangkan IR yang rendah yaitu Kabupaten Indragiri Hulu 7,5 /100.000 penduduk (target ≤ 10 per 100.000 penduduk).

Dari grafik diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan angka kesakitan DBD tahun 2024 dengan angka kesakitan IR = 47,8 per 100.000 penduduk) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2023 IR= 32,9 per 100.000 penduduk). Sedangkan angka kematian akibat DBD (CFR = 0,6 %) terjadi tren penurunan dibandingkan dengan dari tahun sebelumnya (CFR = 0,8%)

GAMBAR 6.26
INCIDENCE RATE (IR) DBD PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU
TAHUN 2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Pada tahun 2024, ada 9 (sembilan) Kab/Kota mengalami peningkatan angka kesakitan (IR) DBD, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan bahwa target program tahun 2024 sebesar 75% telah mencapai target <49/100.000 penduduk dan hanya 1 (satu) kabupaten saja, yang telah



mencapai target nasional, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu (IR DBD < 10 per 100.000).

Keberhasilan kegiatan PSN 3M Plus antara lain dapat diukur dengan angka bebas jentik (ABJ). Jika $ABJ \geq 95\%$ diharapkan penularan DBD dan Chikungunya dapat dicegah atau dikurangi. Upaya pemberantasan vektor penyakit DBD dan Chikungunya hanya dapat berhasil apabila seluruh masyarakat berperan secara aktif dalam melakukan kegiatan PSN 3M Plus melalui gerakan 1 Rumah 1 Jumantik. Dan sangat diperlukan adanya upaya pengendalian vektor penyakit DBD dan Chikungunya, dikarenakan vektornya sama yaitu nyamuk *Aedes Aegypti*.

b. Malaria

Terkait dengan pengendalian Malaria di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah menetapkan target program eliminasi malaria agar seluruh wilayah di Indonesia bebas dari malaria selambat-lambatnya tahun 2030.

Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mikroorganisme yang disebut *Plasmodium*. *Plasmodium* menginfeksi manusia melalui vektor penular nyamuk *Anopheles* dan masih merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di masyarakat luas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bahkan seringkali dapat menyebabkan kematian terutama pada kelompok risiko tinggi, yaitu bayi, balita dan ibu hamil. Selain itu malaria secara langsung menyebabkan anemia dan dapat menurunkan produktivitas kerja.

Pada tahun 2018 terdapat penambahan kabupaten/kota yang mendapat sertifikat bebas malaria dari 7 Kab/Kota menjadi 10 Kab/kota setelah dilaksanakan assessment eliminasi malaria, serta pada tahun 2021 ada penambahan 1 (satu) kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan mendapatkan sertifikat eliminasi malaria. Dengan demikian sampai Januari tahun 2022, terdapat 93% penduduk bebas malaria, sedangkan sisanya tinggal di daerah endemis malaria. Dan tahun 2023, seluruh kabupaten/kota ditetapkan sebagai wilayah bebas malaria. Hal ini dilakukan intervensi yang efektif dengan peningkatan status menjadi bebas malaria. Selanjutnya, tahun 2024, semua kabupaten/kota eliminasi malaria mencapai 100% dan telah menerima sertifikat eliminasi malaria.



Dari lampiran 73, terlihat bahwa total kasus suspek dan terkonfirmasi melalui laboratorium (baik mikroskopis maupun RDT) 100%. Ini menunjukkan bahwa sistem surveilans dan diagnosis berjalan dengan sangat baik, di mana setiap kasus yang dicurigai malaria telah dilakukan pengujian konfirmasi.

Metode konfirmasi yang dominan dilakukan dari total 16.963 kasus terkonfirmasi, mayoritas (12.191 kasus atau sekitar 71,8%) dikonfirmasi menggunakan *Rapid Diagnostic Test (RDT)*, sementara 4.772 kasus (sekitar 28,2%) dikonfirmasi melalui mikroskopis. Ini menunjukkan penggunaan RDT sebagai alat diagnostik utama, yang seringkali lebih cepat dan mudah digunakan di lapangan.

Kabupaten yang paling terdampak adalah Rokan Hilir, dengan jumlah kasus suspek dan terkonfirmasi tertinggi secara signifikan, yaitu 7.735 kasus. Ini merupakan 45,6% dari total seluruh kasus di provinsi tersebut. Dari kasus di Rokan Hilir, mayoritas (5.281 kasus) dikonfirmasi dengan RDT, dan 2.454 kasus dengan mikroskopis. Hal ini menjadikan Rokan Hilir sebagai daerah dengan beban malaria tertinggi. Selanjutnya Kabupaten Indragiri Hilir dengan 4.059 kasus terkonfirmasi. Ini menyumbang sekitar 23,9% dari total kasus provinsi., seperti Rokan Hilir, RDT (2.788 kasus) lebih banyak digunakan daripada mikroskopis (1.271 kasus). Kasus malaria juga ditemukan di Kota Pekanbaru Ibu kota Provinsi Riau, dikarenakan penduduk Kota Pekanbaru yang tertular dari kunjungan/tugas di daerah endemis malaria tinggi. Dengan jumlah kasus yang cukup tinggi yaitu 1.033, dan sebagian besar dikonfirmasi melalui RDT (933 kasus).

Proporsi konfirmasi RDT yang sangat dominan (di atas 90% atau bahkan mendekati 100%), seperti Kabupaten Kampar, Bengkalis, Siak, Kep. Meranti, Pekanbaru, dan Dumai menunjukkan aksesibilitas RDT yang baik, atau keterbatasan penggunaan mikroskopis di daerah tersebut. Sedangkan di beberapa kabupaten lainnya terjadi keseimbangan penggunaan mikroskopis dan RDT, seperti Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi memiliki proporsi penggunaan mikroskop yang lebih tinggi atau lebih seimbang dibandingkan RDT.

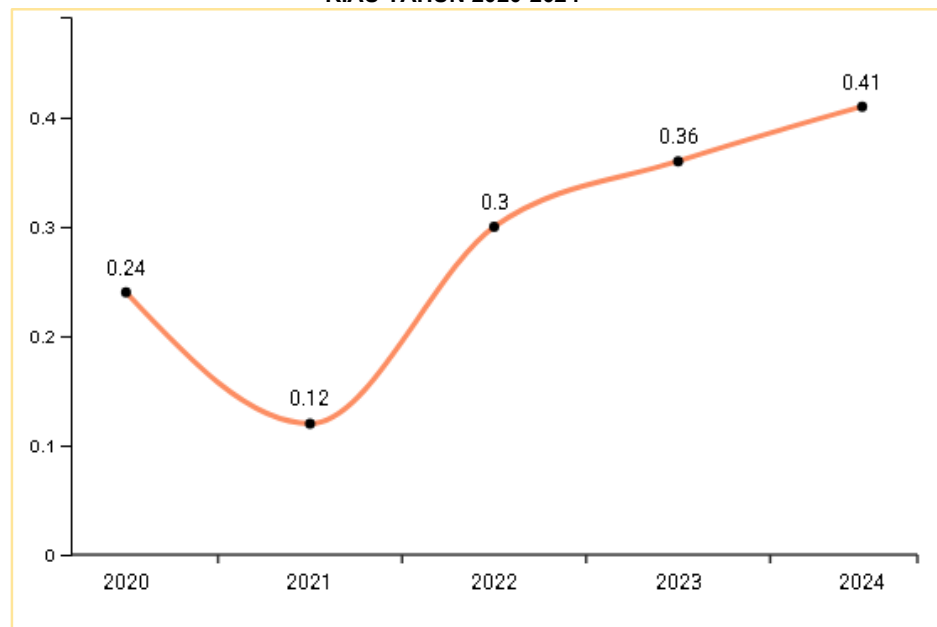
Hal ini cenderung terjadi, kemungkinan dikarenakan dari kurangnya kuantitas dan kualitas dari SDM tenaga laboratorium, alat mikroskop, keterbatasan dan kondisi lain yang mempengaruhi. Dan Kabupaten yang memiliki



kasus konfirmasi mikroskopis lebih banyak daripada RDT yaitu Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu, menunjukkan fokus kuat pada konfirmasi standar akurat.

➤ Kesakitan Malaria

GAMBAR 6.27
ANGKA KESAKITAN MALARIA (ANNUAL PARASITE INCIDENCE/API) PER 1000 PENDUDUK PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Penentuan stratifikasi endemisitas diantaranya ditentukan berdasarkan nilai *Annual Parasite Incidence* (API) per 1.000 penduduk (‰). Wilayah endemis rendah jika API <1 ‰, endemis sedang jika API sebesar 1-5 ‰, dan endemis tinggi jika API >5‰.

Dari grafik diatas terlihat bahwa penanggulangan penyakit malaria di Provinsi Riau mengalami peningkatan setiap tahun, karena API Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun dari 2019-2023 adalah <1‰ penduduk, dan termasuk wilayah endemis rendah. API Provinsi Riau tahun 2024 mencapai 0,41/1.000 penduduk.

API di Provinsi Riau menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi, dengan peningkatan dan penurunan yang signifikan selama periode lima tahun. Terjadi peningkatan yang paling mencolok adalah tren kenaikan yang jelas dari tahun 2021 hingga 2023, yang berpuncak pada API tertinggi di tahun 2023. Hal ini



menunjukkan bahwa kasus malaria telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir di Provinsi Riau.

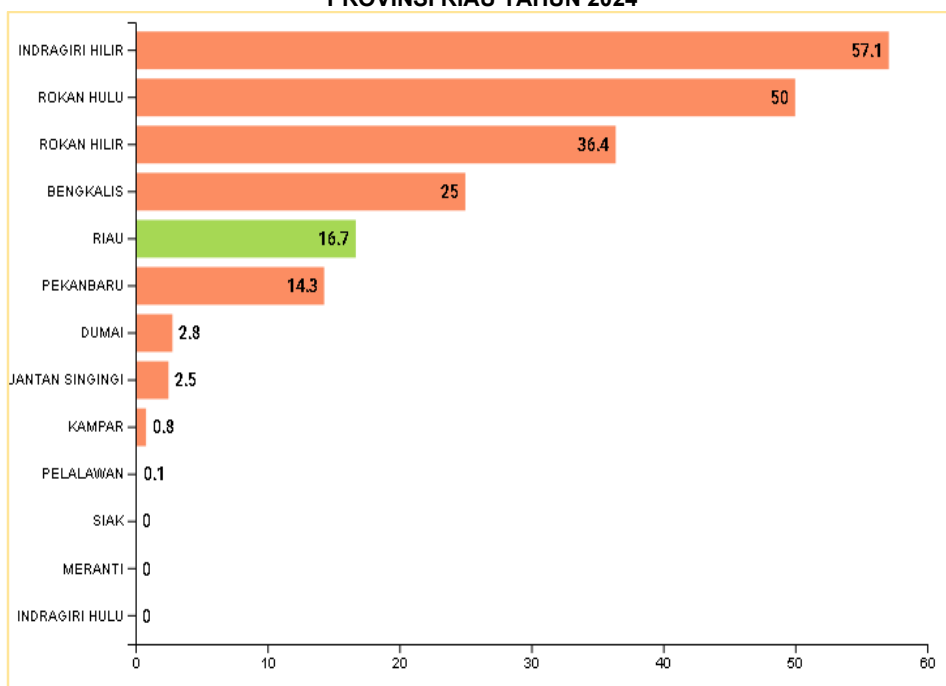
Dan terjadi peningkatan lagi di 2024, API = 0,41/1000 penduduk. tetapi telah memenuhi target nasional dan masih termasuk endemis rendah karena selama lima tahun API <1 ‰. Dari data diatas, program penanggulangan malaria di Provinsi Riau, perlu dilakukan percepatan dalam pengendalian malaria, terutama di kabupaten yang tinggi / sering ditemukan kasus malaria dan endemis sedang atau tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya, seperti Rokan Hilir yang termasuk endemis sedang dengan API = 3,6 ‰. Dari uraian diatas, terjadi peningkatan API di Provinsi Riau, terutama pada tahun 2022-2024, menunjukkan potensi masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian dari pemerintah dan pihak terkait lainnya.

Meskipun ada periode penurunan pada tahun 2021, data dengan jelas menunjukkan tren kenaikan yang mengkhawatirkan dalam kasus malaria di Provinsi Riau dari tahun 2021 hingga 2023, dengan peningkatan yang berkelanjutan hingga tahun 2024. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi ulang dan kemungkinan program pengendalian dan pencegahan malaria yang lebih agresif atau efektif di wilayah tersebut.

Eliminasi malaria dapat diupayakan melalui peningkatan persentase konfirmasi sediaan darah 100% dan persentase pengobatan standar 99%. Pada lampiran 73 dapat diketahui bahwa API malaria di Provinsi Riau 0,41/1.000 penduduk (target API < 1‰). Program pengendalian dan pencegahan penyakit malaria difokuskan untuk mencapai eliminasi malaria yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu antara pemerintah daerah bersama mitra kerja dan masyarakat.



GAMBAR 6.28
CAKUPAN PENEMUAN MALARIA YANG TERKONFIRMASI POSITIF MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Kabupaten yang paling terdampak malaria dengan pemeriksaan mikroskopis dengan hasil mendekati akurat terkonfirmasi positif terbanyak yaitu di Kabupaten Rokan Hilir (31,66%) dan Kabupaten Indragiri Hilir (6,13%) dari jumlah yang terkonfirmasi laboratorium.

Kabupaten Rokan Hilir masih menjadi daerah kasus malaria tertinggi di Provinsi Riau, karena terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) di tahun 2024, ditemukan 2.449 kasus dari total 2.766 secara keseluruhan sekitar 88,5%. Ini menunjukkan bahwa Rokan Hilir bukan hanya memiliki banyak jumlah suspek malaria, tetapi juga kasus positif yang terkonfirmasi secara definitif dalam jumlah yang sangat besar dan menegaskan bahwa Rokan Hilir sebagai *epicenter* malaria Provinsi Riau di tahun selanjutnya. Kabupaten Indragiri Hilir, berada di posisi kedua dengan 249 kasus (9,0%).

Dan Kota Pekanbaru serta Kabupaten lainnya (Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Siak, Kep. Meranti), sebagian besar menemukan kasus malaria positif yang sangat rendah atau bahkan nol



Ini mengindikasikan bahwa meskipun memiliki suspek atau konfirmasi awal yang tinggi, tapi sangat sedikit kasus setelah dilakukan pengujian lanjutan. Beberapa hal yang perlu untuk dilakukan yaitu :

- Penguatan urgensi untuk memfokuskan sumber daya dan intervensi pengendalian malaria secara intensif di Kabupaten Rokan Hilir dan Indragiri Hilir.
- Melakukan upaya pengendalian dan pencegahan dengan fokus / konsentrasi kasus terkonfirmasi positif yang sangat tinggi.
- Melakukan diagnosis lanjutan dengan penekanan pentingnya konfirmasi laboratorium yang akurat dan berlapis, yaitu melakukan pemeriksaan ulang setelah didiagnosa awal positif dengan RDT untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi potensi "positif palsu" yang dapat menguras sumber daya atau menyebabkan salah diagnosis.
- Melakukan identifikasi spesies Plasmodium (*P. falciparum* vs *P. vivax*), data ini akan sangat berharga untuk strategi pengobatan dan pengendalian yang lebih spesifik, dan bagi kabupaten yang dengan positif nol atau sangat rendah, ini adalah indikator positif menuju eliminasi malaria, namun surveilans harus tetap kuat untuk mencegah kasus impor atau penularan lokal yang baru.

Dari uraian dan data diatas, dapat memberikan gambaran yang lebih detail tentang beban malaria yang sebenarnya setelah konfirmasi laboratorium yang lebih ketat. Ini menegaskan bahwa Rokan Hilir adalah wilayah yang paling parah terkena malaria di Provinsi Riau, dengan proporsi kasus terkonfirmasi yang sangat tinggi.

➤ **Pengobatan Malaria**

Pengobatan malaria pada lampiran 73, dapat diketahui hanya sebagian kabupaten / kota di Provinsi Riau yang memenuhi target pengobatan standar 99%. Dan kabupaten/kota yang melakukan pengobatan sekitar 87,5% atau 7 (tujuh) dari 8 (delapan) jumlah kabupaten/kota yang menemukan kasus malaria positif.

Keseluruhan kasus malaria yang diobati di tahun 2024 sejumlah 2.743 kasus, sedangkan kasus yang hasil laboratoriumnya positif malaria sejumlah 2.766. Berarti, ada 23 orang yang terkonfirmasi laboratorium positif tetapi tidak diobati,



dengan rincian sebagai berikut: 19 orang di kabupaten Rohil, 1 orang di Kabupaten Indragiri Hilir, dan 3 orang di Kabupaten Bengkalis.

Tingkat cakupan pengobatan yang sangat tinggi secara keseluruhan (99%), menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penatalaksanaan kasus malaria. Pengobatan yang cepat dan tepat adalah kunci untuk mengurangi reservoir parasit dalam populasi dan memutus rantai penularan

c. Filariasis

Filariasis merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh cacing *Filaria* dan ditularkan dengan perantara nyamuk. Program Eliminasi Filariasis menjadi prioritas nasional dengan agenda utama melaksanakan kegiatan Pemberian Obat Pencegahan Secara Massal (POPM) Filariasis, bertujuan untuk memutus rantai penularan Filariasis pada penduduk di semua Kabupaten/Kota Endemis Filariasis. POPM Filariasis dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota endemis Filariasis selama 5 tahun berturut-turut satu tahun sekali pada seluruh penduduk.

Dalam Pertemuan ke 73 *World Health Assembly* (WHA) secara Virtual tanggal 12 November 2020, WHO telah meluncurkan Roadmap untuk penyakit tropis terabaikan (*Neglected Tropical Diseases /NTDs*) tahun 2021–2030. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia telah menargetkan eliminasi filariasis pada tahun 2030.

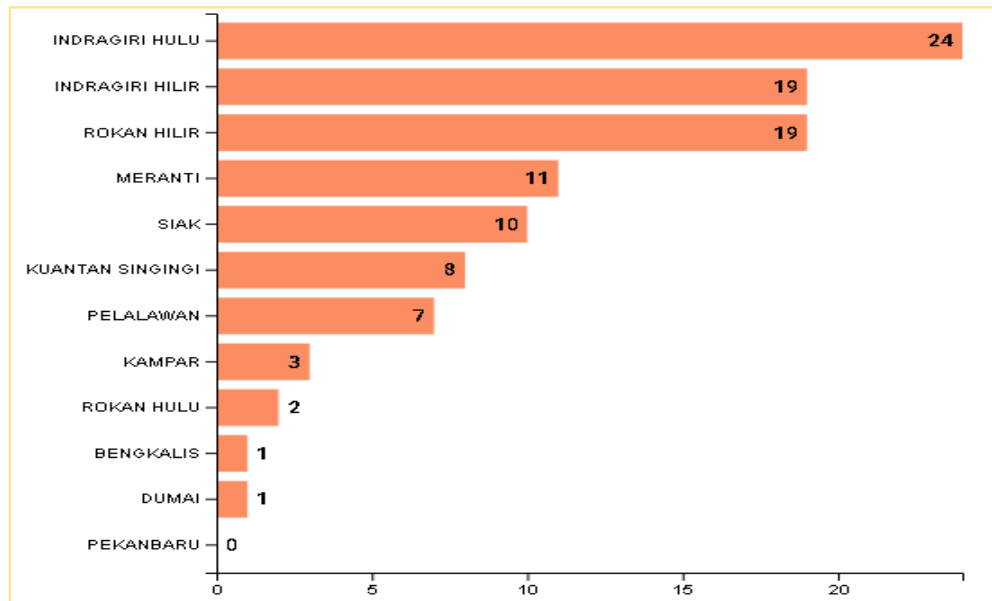
Cacing penyebab *Filaria* yang tersebar di Indonesia terdiri dari tiga spesies yaitu *Wuchereria bancrofti*, *Brugia malayi* dan *Brugia timori*. Cacingan dapat mengakibatkan menurunnya kondisi kesehatan, gizi, kecerdasan, dan produktivitas penderitanya sehingga secara ekonomi banyak menyebabkan kerugian. Cacingan juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *Stunting*. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun). Balita/Baduta (Bayi dibawah usia Dua Tahun) yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak-anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas

Situasi Filariasis Provinsi Riau tahun 2024, Kota Dumai dan Kabupaten Pelalawan sudah mendapatkan sertifikat eliminasi filariasis, sedangkan 8 (delapan) kabupaten/kota lainnya belum mencapai eliminasi filariasis karena



terkendala pandemi covid-19. Hal ini berdampak pada tertundanya timeline target capaian program pengendalian dan pencegahan penyakit filariasis Provinsi Riau.

GAMBAR 6.29
PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Grafik diatas dan di lampiran 74, menjelaskan bahwa penemuan kasus kronis filariasis tahun 2024 di Provinsi Riau, sejumlah 4 orang di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan kasus kronis tahun sebelumnya 105 orang, dengan total keseluruhan sejumlah 108 orang. Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dengan kasus kronis Filariasis terdapat di 2 Kabupaten/Kota yaitu Kepulauan Meranti dan Kota Pekanbaru.

B. PENYAKIT TIDAK MENULAR

Dalam UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa upaya pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan salah satu upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Masalah kesehatan masyarakat yang dihadapi saat ini adalah semakin meningkatnya kasus Penyakit tidak Menular (PTM) .

Penyakit tidak menular juga disebut penyakit kronis atau *non-communicable diseases* (NCDs). Selain itu, beberapa sumber juga menyebutnya sebagai



penyakit degeneratif, antara lain penyakit jantung, diabetes melitus, kanker, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan.

Peningkatan kejadian kesakitan dan kematian akibat PTM menjadi ancaman serius kesehatan masyarakat karena menambah beban ekonomi dan sosial keluarga dan masyarakat. Dari 100 penderita PTM sebanyak 70 orang tidak menyadari dirinya mengidap penyakit tidak menular, sehingga terlambat dalam mendapatkan penanganan yang mengakibatkan terjadinya komplikasi, kecacatan, bahkan kematian, penyakit tidak menular atau penyakit non-infeksi telah menjadi bagian dari beban ganda epidemiologi di dunia sejak beberapa dekade terakhir.

Berbeda dengan penyakit menular, penyakit ini tidak disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti protozoa, bakteri, jamur, maupun virus. Badan kesehatan dunia (WHO) mengestimasi bahwa penyakit ini menyebabkan sedikitnya terhadap 40 juta kematian tiap tahun di dunia. Jumlah tersebut setara dengan 70% kematian oleh seluruh penyebab pada tingkat global.

Angka morbiditas penyakit tidak menular baik di tingkat global maupun nasional menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. WHO mengidentifikasi empat faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap peningkatan tersebut, yaitu konsumsi tembakau, kurangnya aktivitas fisik, penyalahgunaan alkohol, dan diet yang tidak sehat. Akan makin memperparah kondisi pasien dan bahkan menyebabkan kematian, pada penderita COVID-19 yang juga menderita penyakit penyerta lainnya (PTM).

Penanggulangan PTM diprioritaskan pada jenis penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat dengan beberapa kriteria, yaitu tingginya angka kematian atau kecacatan, tingginya angka kesakitan atau tingginya beban biaya pengobatan, dan memiliki faktor risiko yang dapat diubah. Penanggulangan PTM melalui upaya kesehatan masyarakat terdiri dari upaya pencegahan dan pengendalian. Upaya pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, deteksi dini faktor risiko, dan perlindungan khusus yang menitikberatkan pada faktor risiko yang dapat diubah, seperti merokok, kurang aktivitas fisik, diet yang tidak sehat, konsumsi minuman beralkohol, dan



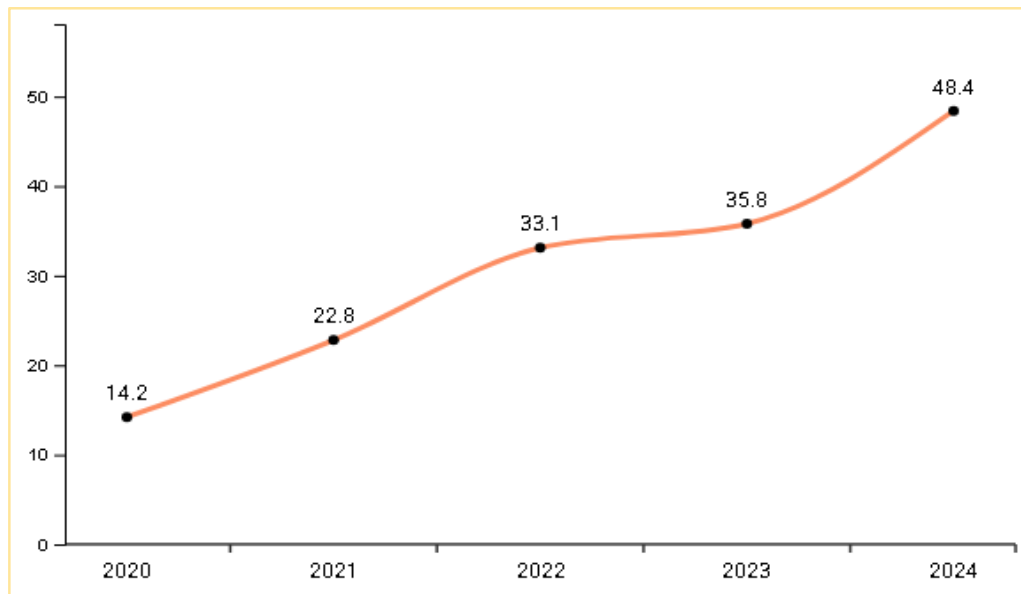
lingkungan yang tidak sehat. Upaya pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan penemuan dini kasus dan tata laksana dini.

1. Hipertensi

Hipertensi adalah salah satu penyebab utama mortalitas dan morbiditas di Indonesia, sehingga tatalaksana penyakit ini merupakan intervensi yang sangat umum dilakukan di berbagai tingkat fasilitas kesehatan. Pedoman Praktis klinis ini disusun untuk memudahkan para tenaga kesehatan di Indonesia dalam menangani hipertensi terutama yang berkaitan dengan kelainan jantung dan pembuluh darah.

Hampir semua consensus/ pedoman utama baik dari dalam walaupun luar negeri, menyatakan bahwa seseorang akan dikatakan hipertensi bila memiliki tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg, pada pemeriksaan yang berulang. Tekanan darah sistolik merupakan pengukuran utama yang menjadi dasar penentuan diagnosis hipertensi.

GAMBAR 6.30
PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI PROVINSI RIAU
TAHUN 2020-2024

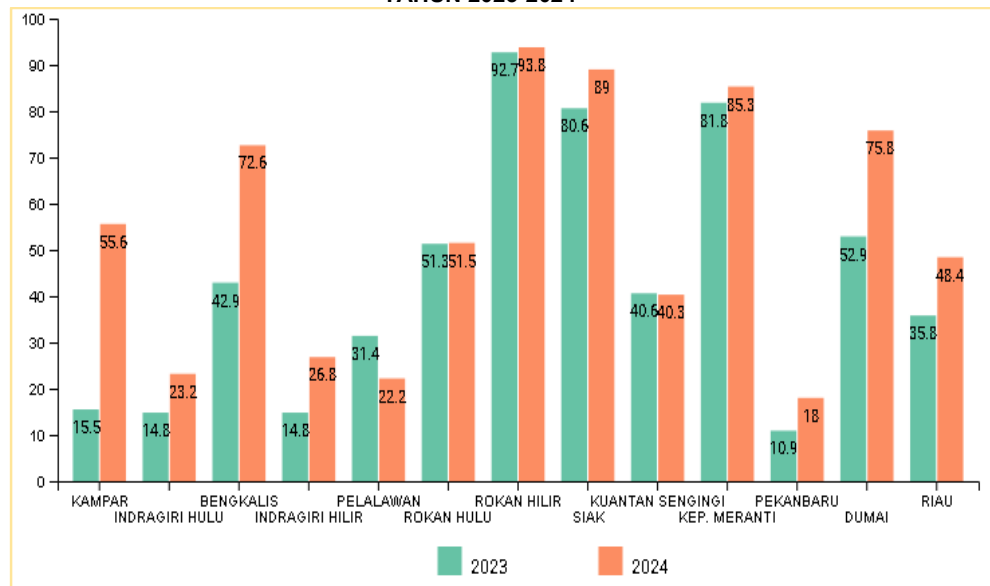


Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Cakupan pelayanan Kesehatan bagi penderita Hipertensi Provinsi Riau tahun 2020-2024 mengalami peningkatan terus menerus setiap tahunnya dan di tahun 2024 menjadi 48,4%.



GAMBAR 6.31
PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU
TAHUN 2023-2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Tahun 2024 pemberian pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi hampir di semua kabupaten/kota terjadi peningkatan, yang paling tinggi yaitu Kabupaten Kampar sekitar 40% dibandingkan tahun 2023 hanya 15,5%. Dan beberapa kabupaten yang bahkan mengalami penurunan yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kuantan Singingi.

Dari grafik diatas terlihat persentase pelayanan Kesehatan bagi penderita hipertensi tahun 2024 sebesar 48,4%. Meski belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 50%, tetapi terjadi peningkatan sebesar 12,4% dibandingkan dengan capaian tahun lalu hanya 35,8%. Terdapat beberapa Kabupaten yang belum mencapai target seperti Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kuantan Singingi dan Kota Pekanbaru.

Capaian pelayanan hipertensi yang rendah disebabkan karena jumlah sasaran penderita hipertensi yang besar, dimana sasaran pelayanan hipertensi adalah penduduk usia ≥ 15 tahun dan berdasarkan penelitian hampir 70% dari penderita hipertensi tidak mengetahui bahwa mereka menderita penyakit tidak menular atau disebut juga dengan penyakit Penyakit "*silent killer*" dimana penyakit yang tidak menunjukkan gejala yang jelas atau gejala awal yang mudah dikenali, sehingga seringkali tidak terdeteksi sampai kondisi sudah parah atau menyebabkan komplikasi serius. Kondisi ini berbahaya karena penderita tidak menyadari bahwa mereka sakit dan terlambat mendapatkan penanganan yang

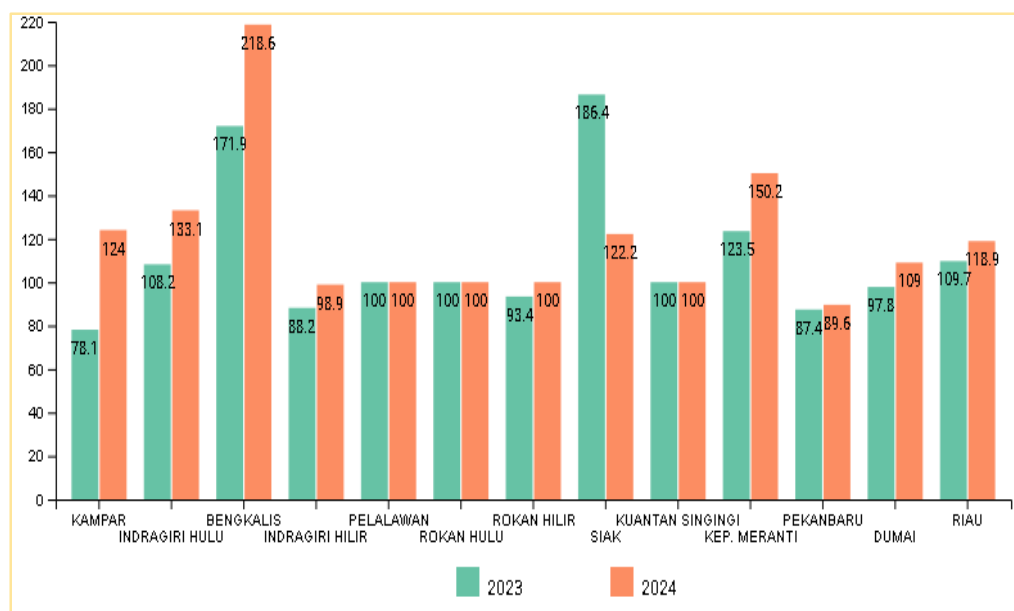


tepat, yang bisa berakibat fatal. Capaian yang rendah juga disebabkan data yang diperoleh masih dari penderita hipertensi yang datang berkunjung ke Puskesmas sementara penderita yang berkunjung ke fasilitas kesehatan lainnya belum terdata

2. Diabetes Melitus

Diabetes melitus (DM) didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin (WHO, 1999).

GAMBAR 6.32
PERSENTASE PENDERITA DIABETES MELITUS (DM) MENDAPAT PELAYANAN SESUAI STANDAR
MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2023-2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Capaian pelayanan Diabetes mellitus Tahun 2024 sebesar 118,9% jauh di atas target yang ditetapkan sebesar 50% serta terjadi peningkatan capaian dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 110%. Dan terdapat 2 (dua) kabupaten/ kota yang capaiannya kurang dari 100% yaitu Kota Pekanbaru dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi jika angka capaian melebihi 100% kemungkinan disebabkan oleh penetapan sasaran yang belum tepat,



sistem pencatatan yang mencatat dan melaporkan jumlah setiap kunjungan pasien dan kemungkinan yang sangat mengkhawatirkan adalah adanya peningkatan prevalensi penderita DM berdasarkan hasil SKI tahun 2024 dibandingkan dengan data RISKESDAS tahun 2018 sebesar 0,8%.

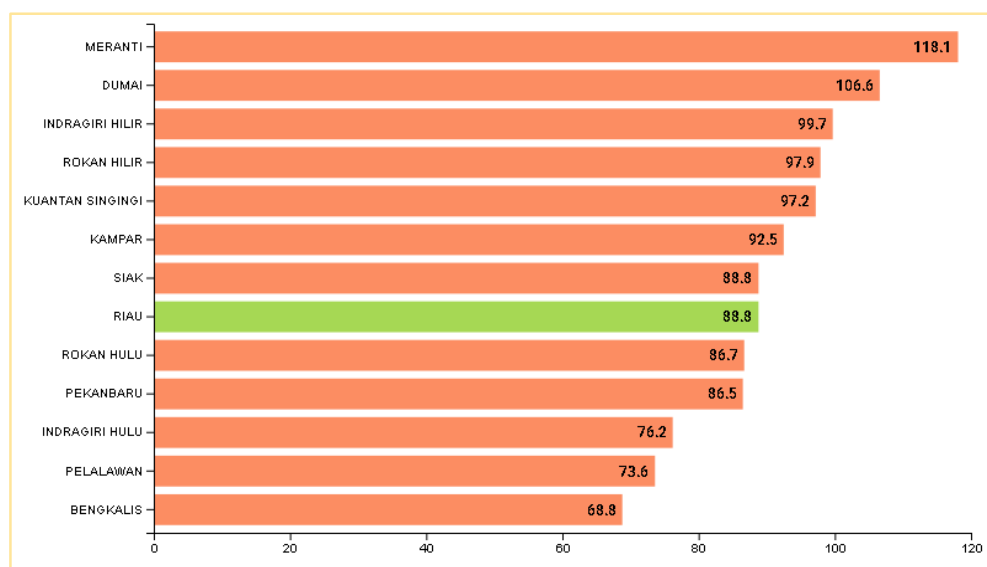
C. KESEHATAN JIWA & NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA & ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA)

ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) sering menerima diskriminasi dari masyarakat karena dianggap berperilaku menyimpang. Padahal, dengan penanganan yang tepat, ODGJ tidak meresahkan atau membahayakan orang lain seperti anggapan umum.

Ada banyak jenis gangguan atau penyakit jiwa yang dapat dialami oleh ODGJ, di antaranya:

1. Gangguan kecemasan
2. Gangguan obsesif kompulsif (OCD)
3. *Post-traumatic stress disorder* (PTSD)
4. Gangguan kepribadian
5. Gangguan bipolar
6. Depresi
7. Skizofrenia

GAMBAR 6.33
PERSENTASE ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



Dari Grafik diatas terlihat bahwa, realisasi pelayanan Kesehatan Jiwa di Provinsi Riau tahun 2024 sebesar 86,7% (target 100%). Hal ini terjadi tren penurunan sebesar 2,1% jika dibandingkan capaian di tahun 2023. Dari 12 Kabupaten/Kota baru 4 Kabupaten yang mencapai target 100% yaitu Indragiri Hilir, Pelalawan, Kepulauan Meranti dan Kota Dumai.

Angka capaian kabupaten kepulauan meranti yang sudah 2 tahun berturut-turut $\geq 100\%$ perlu menjadi perhatian apakah kejadian ini disebabkan oleh jumlah ODGJ berat yang lebih besar dibandingkan jumlah sasaran yang ditetapkan atau karena ketidaktepatan dalam pencatatan dan pelaporan.

Dan bagi Kabupaten/Kota yang capaiannya rendah dan belum mencapai target, seperti Kota Pekanbaru, kemungkinan disebabkan karena belum dijumpainya ODGJ berat sesuai dengan jumlah perhitungan berdasarkan angka prevalensi ODGJ sebesar 0,15% dari jumlah seluruh penduduk. Upaya yang dapat dilakukan oleh petugas Puskesmas adalah berkolaborasi dengan lintas sektor seperti kepala desa atau kader di desa untuk dapat memantau masyarakat yang mempunyai tanda dan gejala ODGJ Berat.

D. DAMPAK KESEHATAN KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)

Pelayanan Kesehatan bagi penduduk yang terdampak dan beresiko kejadian luar biasa termasuk dalam pelayanan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang tertera pada Permendagri no 59 tahun 2021 dan Permenkes nomor 6 tahun 2024 tentang pelaksanaan teknis standar pelayanan minimal di bidang kesehatan.

Penanggulangan KLB adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu oleh pemerintah daerah dan masyarakat meliputi penyelidikan epidemiologi, penatalaksanaan penderita, yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita.

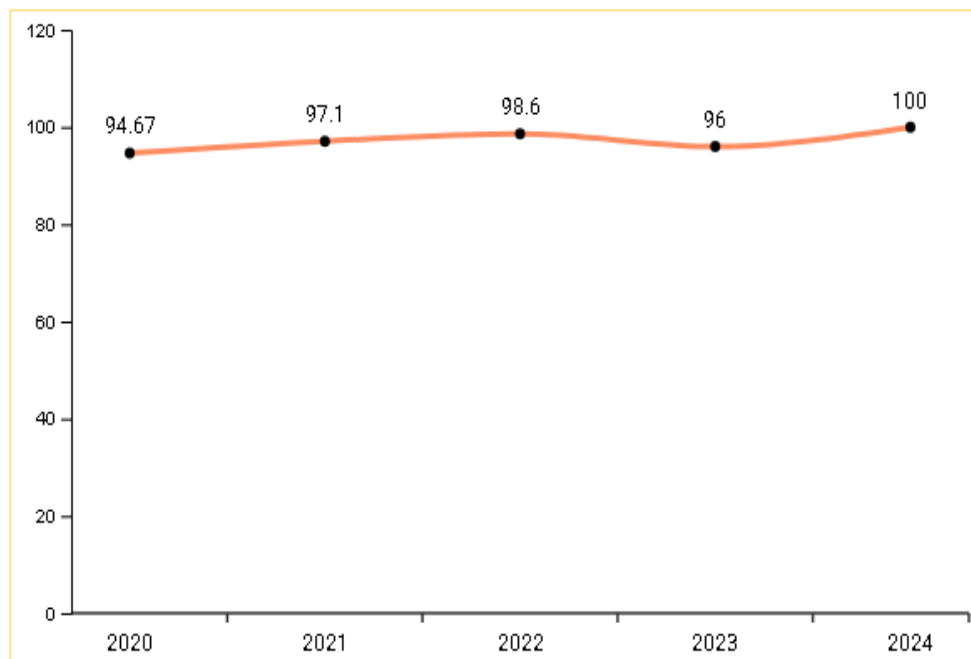
Upaya peningkatan di bidang kesehatan untuk menanggulangi KLB dilakukan secara bertahap setiap tahunnya dengan berbagai macam strategi dan inovasi seiring dengan perkembangan penyakit yang berpotensi KLB. Penanggulangan KLB adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat meliputi penyelidikan epidemiologi, penatalaksanaan penderita, yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita.



Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi adalah 100%.

Desember telah terjadi Kejadian Luar Biasa dengan kasus meninggal dunia sebanyak 6 orang dari 2.736 kasus, dengan jumlah populasi rentan sebanyak 1.798.711 jiwa.

GAMBAR 6.34
KABUPATEN/KOTA YANG MERESPON SINYAL ALERT KLB MINIMAL 80% <24JAM
PROVINSI RIAU TAHUN 2019 - 2023



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dalam upaya meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit, salah satu indikator kinerja yaitu persentase kab/kota yang merespon alert KLB minimal 80% dari tahun 2019-2023 rata-rata realisasi 100%, dan di tahun 2024 meningkat menjadi 100% (minimal 80% <24 jam). Meski sudah mengalami penurunan drastis di tahun 2022, tetapi petugas baik di Puskesmas maupun Dinas Kesehatan tetap perhatian dan masih fokus dalam penanganan COVID-19.

Selain itu terdapat juga indikator kinerja surveilans secara umum yaitu kelengkapan dan ketepatan laporan. Tahun 2024, angka kematian atau *case fatality rate* (RR) di Provinsi Riau sebesar 2% (2 orang). Angka kematian ini



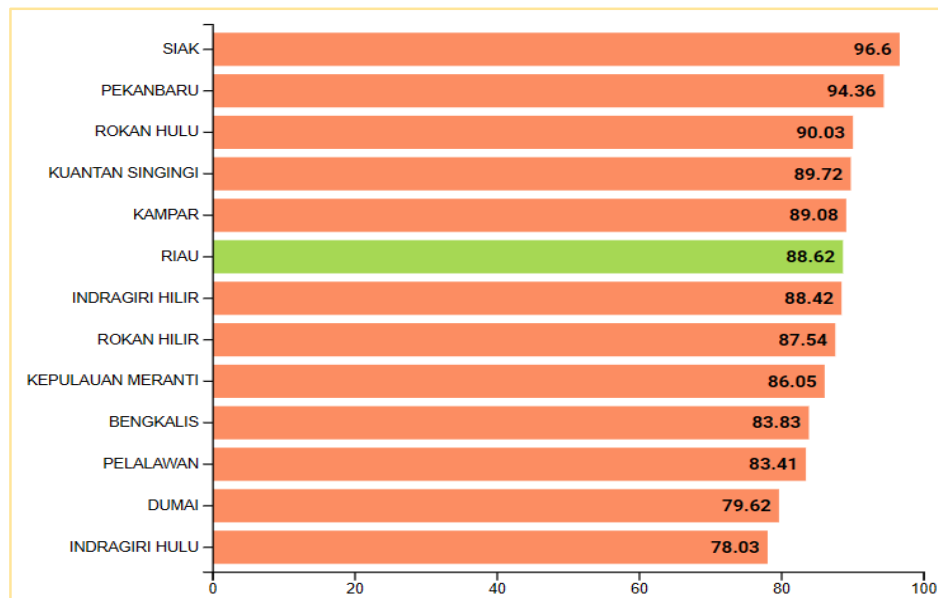
mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 5%. Jumlah wilayah dengan angka kematian tertinggi adalah Kabupaten Rokan Hulu (17%) dan Kota Pekanbaru (4%,).

E. PELAYANAN KESEHATAN HAJI

Pelayanan Kesehatan yang dilakukan di Daerah adalah berupa pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang merupakan salah satu syarat bagi jemaah haji melakukan pelunasan biaya perjalanan haji sesuai amanat PMA No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Haji Reguler.

Dalam melakukan Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji, Tim Penyelenggara Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2118 tahun 2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Istithaah Kesehatan Haji. Alur Pelayanan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 6.35
CAPAIAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI PROVINSI RIAU TAHUN 1445 H/2024 M



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

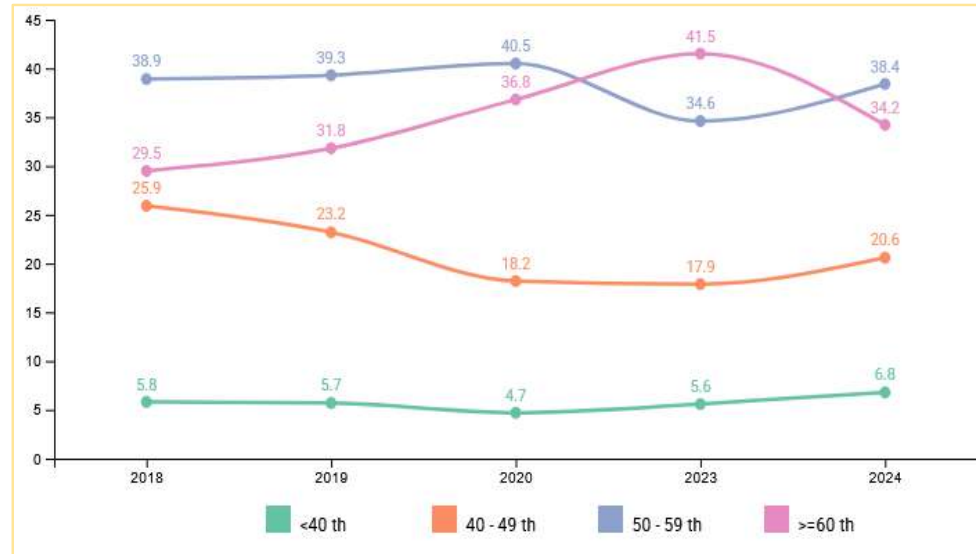
Dari calon Jemaah haji yang melakukan pemeriksaan Kesehatan 88,62% sejumlah 6.327 orang, yang dilaporkan di Aplikasi siskohatkes, hanya 5.607 orang. Cakupan pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan yang tertinggi di Kabupaten Siak sebesar 96,60 %, sedangkan yang terendah yaitu di Kota Dumai (79,62%) dan Kabupaten Indragiri Hulu (78,03%).

Singkatnya, data dengan jelas menunjukkan bahwa mayoritas jemaah haji dari Riau pada 1445 H/ 2024 M, yang termasuk dalam kategori "istitha'ah dengan pendampingan" berada dalam kelompok usia 50-59 tahun dan >60 tahun,



mencerminkan demografi usia umum untuk jemaah haji dan pentingnya pendampingan yang disediakan.

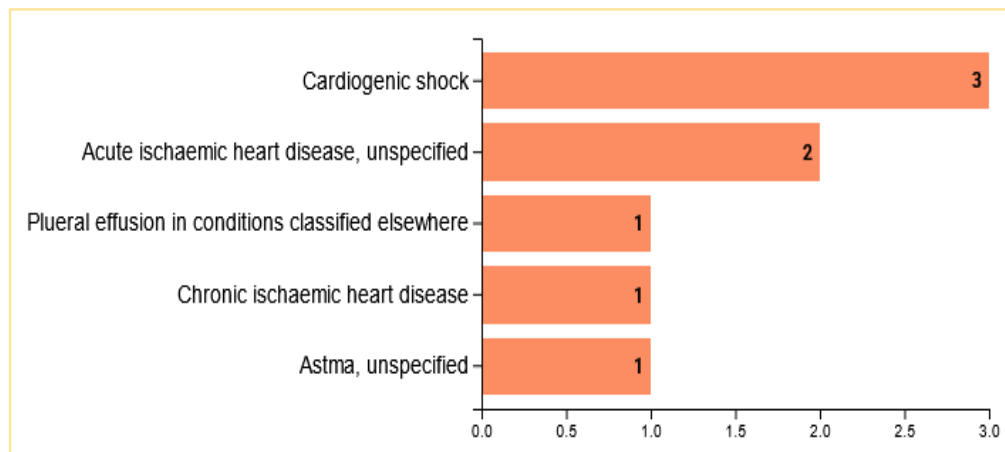
GAMBAR 6.36
TREND KELOMPOK UMUR JEMAAH HAJI PROVINSI RIAU TAHUN 2018 - 2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Pada tahun 2024 dapat 8 (delapan) jamaah Haji Riau wafat di Arab Saudi tahun 1445 H/2024 M. Ada 7 (tujuh) orang jamaah yang meninggal di RS Arab Saudi dan 1 (satu) orang meninggal di tenda Arafah pada saat wukuf. Sebagian besar jamaah yang meninggal (5 orang) berumur ≥ 60 tahun. Dan 3 (tiga) orang jamaah yang berumur 50-59 tahun.

GAMBAR 6.37
DIAGNOSA PENYEBAB WAFAT JEMAAH HAJI PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



Penyakit jantung merupakan penyebab utama kematian jemaah haji dari Riau, mencakup dari 8 kasus (75%). Ini sejalan dengan temuan sebelumnya mengenai tingginya persentase jemaah Risti (Risiko Tinggi), di mana penyakit jantung dan kondisi terkait sering menjadi faktor utama.



BAB VII

KESEHATAN LINGKUNGAN



PROFIL KESEHATAN PROVINSI RIAU 2024

BAB VII KESEHATAN LINGKUNGAN

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Upaya pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar pada prinsipnya dimaksudkan untuk memperkecil atau meniadakan faktor resiko terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan akibat dari lingkungan yang kurang sehat.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan kualitas lingkungan, antara lain: melakukan pembinaan kesehatan lingkungan pada masyarakat, Pengawasan Kualitas Air Minum, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pengawasan Tempat Fasilitas Umum (TFU), Pembinaan Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Pengawasan Limbah Fasyankes, Pembinaan Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Kesehatan Lingkungan serta terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat di Provinsi Riau kedepannya.

Berhubung pencapaian tujuan penyehatan lingkungan merupakan akumulasi pelaksanaan kegiatan dari berbagai lintas sektor, peran swasta dan masyarakat dimana pengelolaan kesehatan lingkungan merupakan penanganan yang paling kompleks. Dan evaluasi terhadap pencapaian hasil Program Kesehatan Lingkungan merupakan dasar untuk merancang perencanaan penyehatan lingkungan kedepannya.

A. AIR MINUM

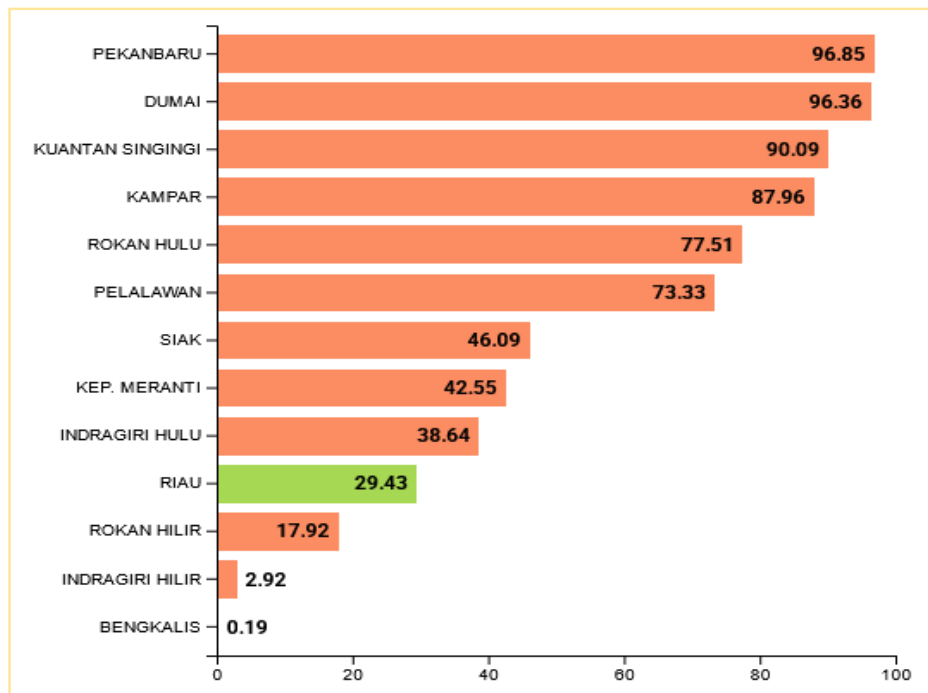
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi, dan tindak lanjut. Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dalam pengawasan kualitas air minum adalah Inspeksi Kesehatan Lingkungan atau IKL. Pelaksanaan IKL dilakukan oleh tenaga sanitarian puskesmas, kader kesehatan lingkungan, atau kader lain di desa yang telah mendapatkan pelatihan praktis pemantauan kualitas sarana air



minum.

Untuk sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar di Provinsi Riau tahun 2024 sebesar 29,43% menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, masih jauh dari target yang ditetapkan (72%). Sedangkan untuk melihat jelasnya gambaran sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar di kabupaten/kota tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

GAMBAR 7.1
PERSENTASE AIR MINUM DIPERIKSA KUALITAS AIRNYA SESUAI STANDAR
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Pada tahun 2024, sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar sebesar 29,4%. Kabupaten/kota dengan persentase tertinggi sarana air minum yang diawasi sesuai standar yaitu Kota Pekanbaru (96,85%), Kota Dumai (96,4%) dan Kabupaten Kuantan Singingi (90,1%). Sedangkan Kabupaten/kota terendah yaitu Kabupaten Bengkalis (0,2%), Kabupaten Indragiri Hilir (2,9%) dan Kabupaten Rokan Hilir (17,9%). Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar untuk Provinsi belum mencapai target (72%) dan semua Kabupaten/kota sudah mencapai target baru 50%.



Rumah tangga harus memiliki akses air minum layak dan bersih dalam mendukung kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kebutuhan air minum, tidak hanya dilihat dari kuantitasnya tetapi juga dari kualitas air minum. Pemenuhan kebutuhan air minum di rumah tangga dapat diukur dari akses air minum layak.

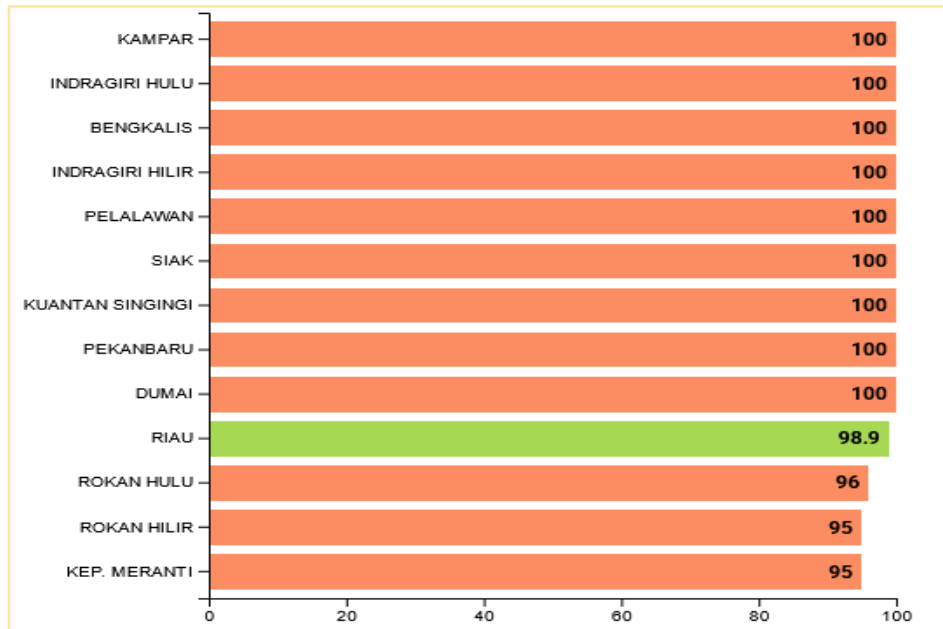
B. AKSES SANITASI LAYAK

Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Definisi sanitasi dari WHO merujuk kepada penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti *urine* dan *feses*. Istilah sanitasi juga mengacu kepada pemeliharaan kondisi higienis melalui upaya pengelolaan sampah dan pengolahan limbah cair. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit.

Fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) adalah Fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa, tangki septic/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), yang digunakan sendiri atau Bersama. Perilaku buang air besar sembarangan dapat meningkatkan risiko masyarakat terkena penyakit menular. Dan KK yang telah melakukan stop buang air besar sembarang di Provinsi Riau Tahun 2024 sudah mencapai 99% belum mencapai target 100%, namun meningkat dibandingkan Tahun 2023 (95%), tahun 2022 (87%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



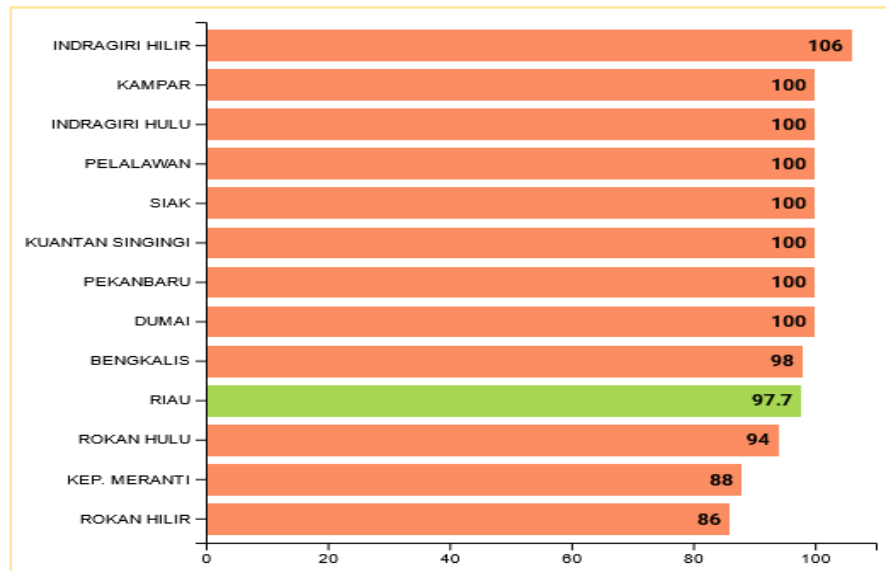
GAMBAR 7.2
PERSENTASE KK STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Persentase KK stop buang air besar sembarangan di Provinsi Riau tahun 2024 sudah mencapai 98,9% meningkat dibandingkan tahun 2023 (95%).

GAMBAR 7. 3
PERSENTASE KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Untuk Provinsi Riau tahun 2024 keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) adalah sebesar 97,7% meningkat dibandingkan tahun

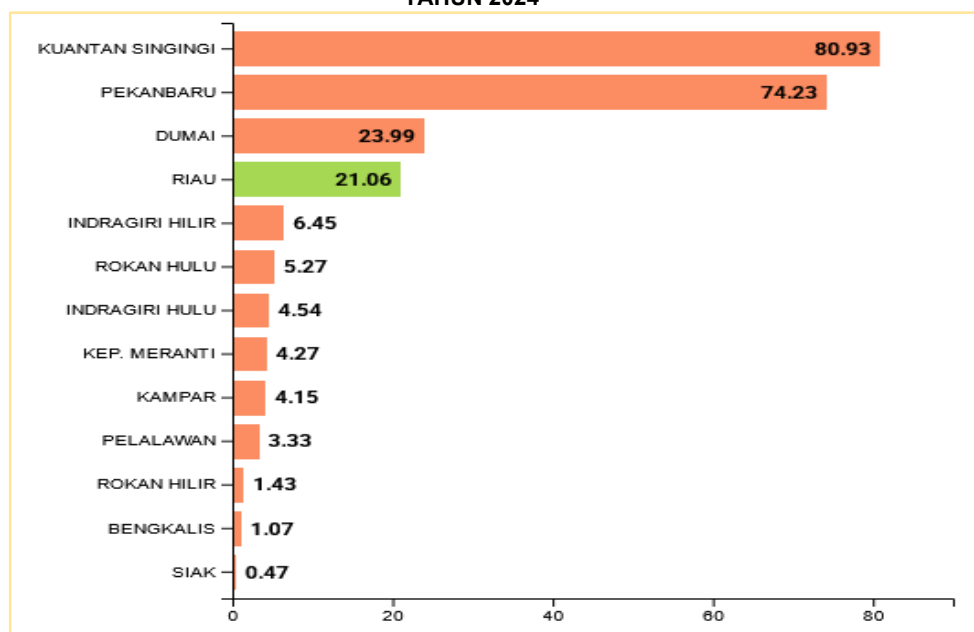


2023 sebesar 91 %. Ini artinya tinggal sekitar 2,3 % kepala keluarga yang harus di edukasi agar perhatian tentang kebutuhan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) .

Untuk capaian akses tertinggi terhadap fasilitas kesehatan yang layak ada 8 Kabupaten/Kota yang telah mencapai 100%, sedangkan ada 4 kabupaten/kota lagi yang perlu ditingkatkan promosi kesehatan, guna menimbulkan kesadaran akan pentingnya sanitasi yang layak (jamban sehat). Sedangkan KK dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang aman di Provinsi Riau tahun 2024 masih sangat rendah yakni sekitar masih sangat rendah yakni sekitar 21% terjadi penurunan dibandingkan tahun 2023 (27%), ini artinya masih banyak KK dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang tidak aman atau sekitar 79 %.

Kondisi ini harus mendapat perhatian khusus baik oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri akan pentingnya fasilitas sanitasi yang aman, mengingat dampaknya terhadap kesehatan. Untuk gambaran KK dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang aman di kabupaten/kota Provinsi Riau tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini .

GAMBAR 7.4
PERSENTASE KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG AMAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dari grafik di atas terlihat bahwa Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah yang memiliki KK dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang aman terbanyak sekitar 81,8%, diikuti Kota Pekanbaru sekitar 74 % dan Kota Dumai



sekitar 24%. Sedangkan Daerah yang sangat minim KK dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang aman, yakni Kabupaten Siak merupakan kabupaten yang terendah terhadap KK dengan akses terhadap fasilitas yang aman sebesar 0,5%, diikuti Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir masing-masing sebesar 1, %

C. SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menyatakan bahwa STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan. Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM yang bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

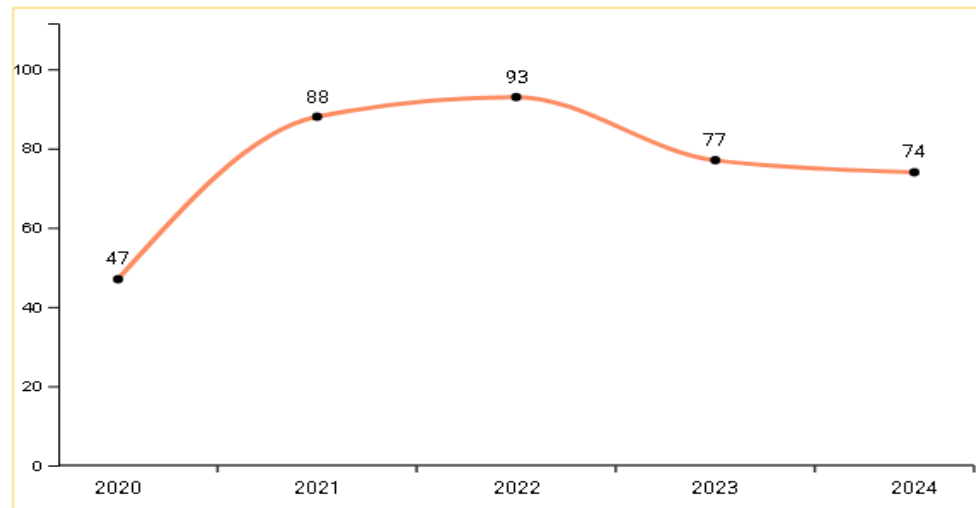
Pilar STBM terdiri atas perilaku :

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS);
2. Cuci Tangan Pakai Sabun;
3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

Persentase desa yang melaksanakan STBM tahun 2019-2024 terlihat fluktuatif dimana pada tahun 2019 (83%) dan terjadi penurunan yang signifikan tahun 2020 (47%) hal ini disebabkan karena dunia dilanda wabah virus covid-19 kemudian terjadi peningkatan signifikan di tahun 2021 (88%). Untuk capaian tahun 2024 adalah 51%. Terjadi penurunan pada tahun 2023 dimana capaiannya sebesar 77%. Hal ini disebabkan beberapa kendala kegiatan program, termasuk pembinaan STBM ke masyarakat di desa.



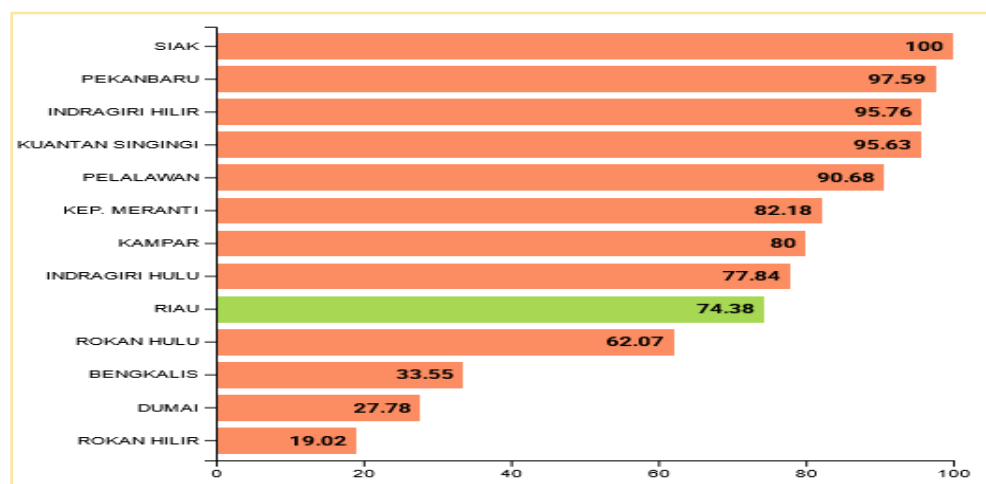
GAMBAR 7.5
PERSENTASE DESA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) PROVINSI RIAU
TAHUN 2020 – 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Dari grafik di atas menggambarkan persentase desa STBM dalam 5 (lima) tahun terakhir terlihat penurunan mencapai 3%, ini terkait perilaku masyarakat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya buang air besar pada tempatnya guna menghindari resiko terkena penyakit menular dan penyakit berbasis lingkungan, selain itu program STBM ini termasuk dalam salah satu indikator sensitif terkait dengan penanggulangan stunting.

GAMBAR 7.6
PERSENTASE DESA AKTIF MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025



Dari grafik diatas Implementasi STBM di setiap Kabupaten/Kota juga bervariasi, dengan persentase tertinggi dengan capaian 100% yakni Kabupaten Siak, diikuti Kota Pekanbaru dengan capaian sebesar 97,59% dan Kabupaten Indragiri Hilir 95,76% Kemudian kabupaten/kota yang terendah yakni Kabupaten Rokan Hilir 19,02% diikuti Kota Dumai 27,78% dan Kabupaten Bengkalis 33,55%. Dan capaian 4 kabupaten/kota belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 60%. Kondisi ini menuntut perhatian dan komitmen dari pemerintah daerah untuk dapat memfasilitasi sarana sanitasi dan mendorong masyarakat agar hidup berperilaku hidup sehat.

D. TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR

Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar adalah TFU yang dilakukan pengawasan dengan menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun. TFU adalah lokasi, sarana, dan prasarana antara lain: fasilitas kesehatan; fasilitas pendidikan; tempat ibadah; hotel; rumah makan dan usaha lain yang sejenis; sarana olahraga; sarana transportasi darat, laut, udara, dan kereta api; stasiun dan terminal; pasar dan pusat perbelanjaan; pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara; dan tempat dan fasilitas umum lainnya.

Ruang lingkup pengawasan pada TFU telah ditetapkan yaitu pada tiga lokus yang menjadi prioritas sesuai dengan indikator Renstra Direktorat Kesehatan Lingkungan tahun 2020 – 2024, Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan sesuai standar minimal pada 3 (tiga) lokus dari tempat dan fasilitas umum tersebut, yaitu:

1. Sekolah yang dimaksud adalah sekolah yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama;
2. Puskesmas yang dimaksud adalah yang berada di wilayah kerjanya;
3. Pasar adalah pasar rakyat yang telah dilakukan revitalisasi dan terdaftar di Kementerian Perdagangan.

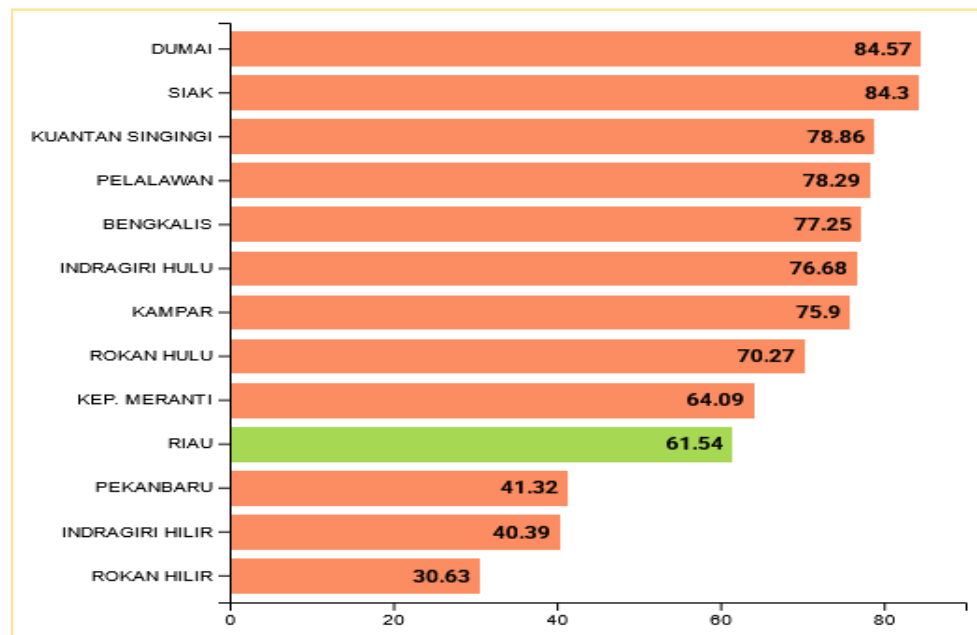
Pengawasan sesuai standar yang dimaksud adalah kunjungan untuk



mengetahui faktor risiko kesehatan lingkungan dengan menggunakan formulir IKL melalui pengamatan fisik media lingkungan, pengukuran media lingkungan dan analisis risiko kesehatan lingkungan serta rekomendasi perbaikan.

TFU dinyatakan telah dilakukan pengawasan sesuai standar apabila telah dilakukan IKL dengan mengisi form yang sudah ditentukan dan melakukan pengukuran kualitas lingkungan dengan peralatan pendukung (Sanitarian Kit) yang tersedia di Puskesmas atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit akibat lingkungan dan selanjutnya memberikan rekomendasi hasil pengawasan tersebut pada sektor terkait untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan dalam upaya mewujudkan TFU yang bersih, aman, nyaman dan sehat.

GAMBAR 7.7
PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR
PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Secara Provinsi persentase TFU yang dilakukan pengawasan sesuai standar pada tahun 2024 adalah sebesar 61,5% terjadi penurunan sedikit dibanding tahun 2023 (62,1%), meningkat bila dibandingkan tahun 2022 adalah 45,9%. Angka ini sudah belum mencapai dari target tahun 2024 yaitu 65%.

Kabupaten/Kota dengan persentase tertinggi adalah Kota Dumai (84,5%), Kabupaten Siak (84,3%), dan Kabupaten Kuantan Singingi (78,9%). Kabupaten/Kota dengan capaian terendah Kabupaten Rokan Hilir (30,6%),



Kabupaten Indragiri Hilir (40,4%), dan Kota Pekanbaru (41,3%). Gambaran jelas persentase TFU yang dilakukan pengawasan sesuai standar tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di atas.

Kegiatan yang telah dilakukan pada Program Pengawasan TFU di Provinsi Riau Tahun 2024 yaitu Koordinasi, Advokasi, Sosialisasi Pembinaan ke stakeholder, lintas sektor terkait, dan masyarakat pasar.

E. TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP)

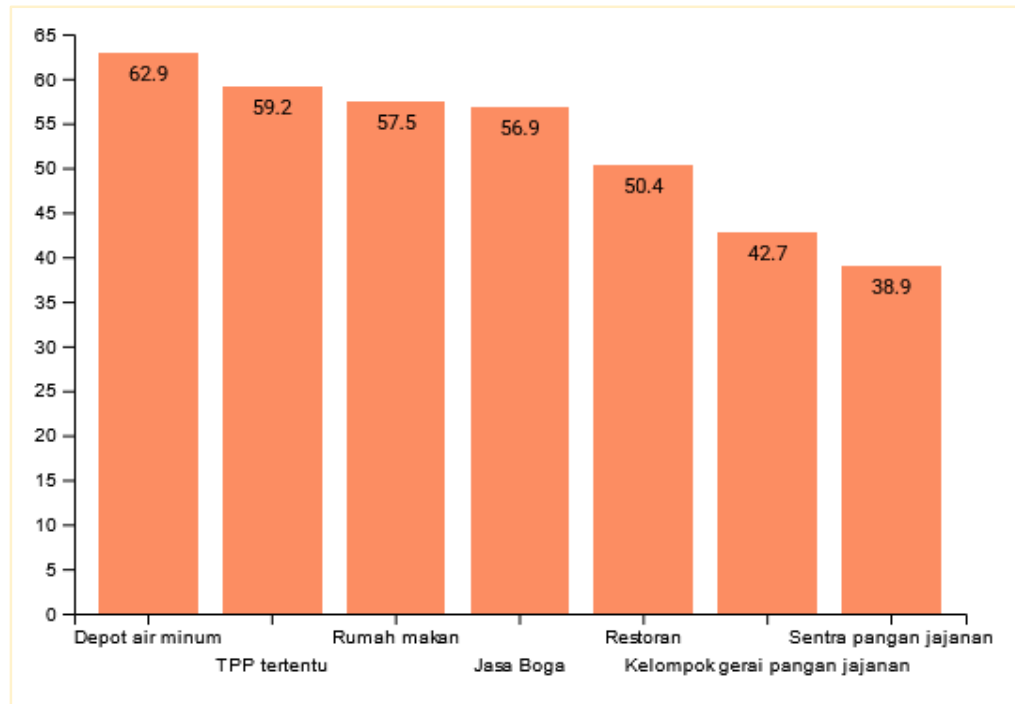
Tempat Pengolahan Pangan siap saji yang selanjutnya disebut Tempat Pengolahan Pangan (TPP) adalah sarana produksi untuk menyiapkan, mengolah, mengemas, menyimpan, menyajikan dan/atau mengangkut pangan olahan siap saji baik yang bersifat komersial maupun non komersial. TPP yang menjadi sasaran prioritas pengawasan dan pembinaan adalah TPP komersial. TPP komersial adalah usaha penyediaan pangan siap saji yang memperdagangkan produknya secara rutin, yaitu jasa boga/katering, restoran, TPP tertentu dan Depot Air Minum (DAM), gerai pangan jajanan, gerai pangan jajanan keliling, dapur gerai pangan jajanan, dan sentra gerai pangan jajanan/kantin.

Dalam rangka memastikan TPP memenuhi syarat higiene sanitasi, maka perlu dilakukan IKL oleh petugas puskesmas, TPP juga dapat melakukan penilaian mandiri terkait kondisi higiene sanitasinya dengan mengisi buku rapor yang sudah dikembangkan oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan agar TPP tersebut mendapatkan gambaran kondisi higiene sanitasi dan dapat melakukan perbaikan kualitas TPP secara mandiri sebelum petugas datang untuk melakukan IKL.

Apabila TPP memenuhi syarat berdasarkan hasil IKL maka dapat mengajukan sertifikat laik higiene sanitasi ke Dinas Kesehatan setempat dengan memenuhi persyaratan lainnya yaitu pemeriksaan sampel pangan dan penjamah pangan yang sudah dilatih higiene sanitasi pangan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat. Untuk gambaran pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan di Provinsi Riau Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



GAMBAR 7.8
PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) MEMENUHI SYARAT KESEHATAN
BERDASARKAN JENIS PROVINSI RIAU TAHUN 2024

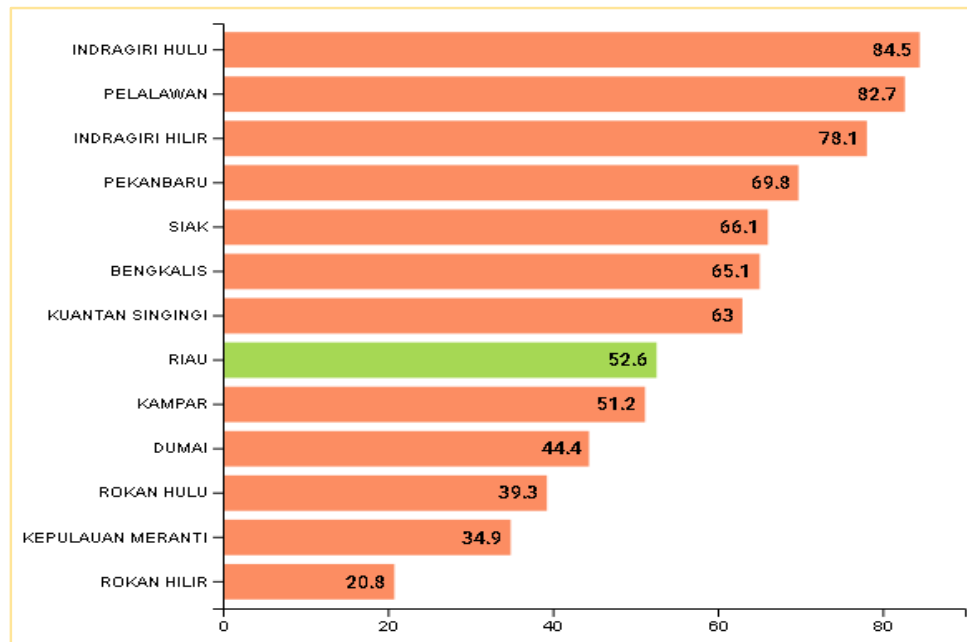


Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar secara Provinsi pada tahun 2024 adalah sebesar 51,6% menurun dibandingkan tahun 2023 (53,4%) menurun dibandingkan pada tahun 2022 (46,6%). Capaian ini sudah memenuhi target tahun 2024 untuk TPP yang memenuhi syarat sesuai standar yaitu sebesar 50%. Untuk gambaran pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan di Provinsi Riau Tahun 2024 di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



GAMBAR 7.9
PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT
KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2025

Kabupaten/Kota dengan persentase tertinggi TPP yang memenuhi syarat sesuai standar adalah Kabupaten Indragiri Hulu (84,5%), Kabupaten Pelalawan (82,7%), Kabupaten Indragiri Hilir (78,1%). Sedangkan Kabupaten/Kota dengan persentase terendah adalah Kabupaten Rokan Hilir (20,8%), Kabupaten Kepulauan Meranti (34,9%), dan Kabupaten Rokan Hulu (39,3%). Rincian lengkap tentang persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di atas.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Pengawasan TPP di Tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut;

1. Penganggaran kegiatan yang terbatas
2. Pendataan TPP yang belum baik;
3. Adanya peraturan terbaru mengenai sistem perizinan TPP dan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) TPP dengan syarat yang lebih kompleks dibanding peraturan sebelumnya.
4. Terbatasnya sosialisasi tentang Penjamah makanan;
5. Masih banyak Penjamah makanan yang belum memiliki Sertifikat.



Untuk itu perlu dilakukan meningkatkan pembinaan yang melibat semua lintas program/sektor terkait, sebagaimana kita ketahui bahwa TPP memiliki potensi yang cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit, bahkan keracunan akibat dari makanan yang dihasilkannya. Untuk itu diperlukan pembinaan dan evaluasi rutin untuk semua TPP, dan diprioritaskan untuk TPP yang belum memenuhi syarat dan atau TPP yang belum pernah dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan yaitu sebanyak 47,4%.



LAMPIRAN PROFIL

TABEL 1

LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH RUMAH TANGGA,
DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH (km2)	JUMLAH			JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH RUMAH TANGGA	RATA-RATA JIWA/RUMAH TANGGA	KEPADATAN PENDUDUK per km2
			DESA	KELURAHAN	DESA + KELURAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1401	KAMPAR	10,352.803	242	8	250	894,848	209,359	4	86.4
1402	INDRAGIRI HULU	7,871.850	178	16	194	468,366	117,092	4	59.5
1403	BENGKALIS	8,616.358	136	19	155	591,800	147,950	4	68.7
1404	INDRAGIRI HILIR	13,521.263	197	39	236	684,860	171,215	4	50.7
1405	PELALAWAN	13,262.113	104	14	118	414,943	103,736	4	31.3
1406	ROKAN HULU	7,658.149	139	6	145	593,486	148,372	4	77.5
1407	ROKAN HILIR	9,068.458	159	25	184	673,323	168,331	4	74.2
1408	SIAK	7,805.538	122	9	131	483,754	120,939	4	62.0
1409	KUANTAN SINGINGI	5,457.862	218	11	229	349,251	87,313	4	64.0
1410	KEPULAUAN MERANTI	3,623.558	96	5	101	213,720	53,430	4	59.0
1471	PEKANBARU	638.331	0	83	83	1,026,671	256,668	4	1608.4
1472	DUMAI	2,059.613	0	36	36	333,031	83,258	4	161.7
PROVINSI RIAU		89,935.896	1591	271	1,862	6,728,053	1,667,663	4	74.8

Sumber: - BPS Provinsi Riau, 2024

TABEL 2

JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI+PEREMPUAN	RASIO JENIS KELAMIN
1	2	3	4	5	6
1	0 - 4	301,640	289,060	590,700	104.4
2	5 - 9	310,400	295,960	606,360	104.9
3	10 - 14	304,780	289,640	594,420	105.2
4	15 - 19	292,960	274,540	567,500	106.7
5	20 - 24	287,370	272,730	560,100	105.4
6	25 - 29	284,530	274,510	559,040	103.7
7	30 - 34	276,060	267,600	543,660	103.2
8	35 - 39	265,890	259,930	525,820	102.3
9	40 - 44	248,610	241,910	490,520	102.8
10	45 - 49	229,960	220,780	450,740	104.2
11	50 - 54	196,420	186,890	383,310	105.1
12	55 - 59	157,620	147,780	305,400	106.7
13	60 - 64	119,840	112,240	232,080	106.8
14	65 - 69	81,090	76,340	157,430	106.2
15	70 - 74	48,700	46,963	95,663	103.7
16	75+	31,300	34,010	65,310	92.0
PROVINSI RIAU		3,437,170	3,290,883	6,728,053	104.4
ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (DEPENDENCY RATIO)				45.7	

Sumber: - BPS Provinsi Riau, 2024

TABEL 3

**PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF
DAN IJAZAH TERTINGGI YANG DIPEROLEH MENURUT JENIS KELAMIN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

NO	VARIABEL	JUMLAH			PERSENTASE		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI+ PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI+ PEREMPUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS	1,638,030	1,575,489	3,213,519			
2	PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF	1,355,812	1,075,868	2,431,680	82.8	68.3	75.7
3	PERSENTASE PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN:						
	a. TIDAK MEMILIKI IJAZAH SD	313,931	312,354	626,285	19.2	19.8	19.5
	b. SD/MI	265,013	280,081	545,094	16.2	17.8	17.0
	c. SMP/ MTs	263,070	284,213	547,283	16.1	18.0	17.0
	d. SMA/ MA	420,467	345,661	766,128	25.7	21.9	23.8
	e. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	87,722	76,961	164,683	5.4	4.9	5.1
	f. DIPLOMA I/DIPLOMA II	26,930	35,307	62,237	1.6	2.2	1.9
	g. AKADEMI/DIPLOMA III	27,577	31,315	58,892	1.7	2.0	1.8
	h. S1/DIPLOMA IV	82,911	92,516	175,427	5.1	5.9	5.5
	i. S2/S3 (MASTER/DOKTOR)	3,634	3,256	6,890	0.2	0.2	0.2

Sumber: - BPS Provinsi Riau, 2024

TABEL 4

JUMLAH FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

FASILITAS KESEHATAN	PEMILIKAN/PENGELOLA							
	KEMENKES/KEMEN LAIN	PEM.PROV	PEM.KAB/KOTA	TNI/POLRI	BUMN	SWASTA	ORGANISASI KEMASYARAKATAN	JUMLAH
2	3	4	5	6	7	8	9	10
RUMAH SAKIT UMUM	1	2	17	4	2	55	0	81
RUMAH SAKIT KHUSUS	0	1	0	0	0	0	0	1
PUSKESMAS RAWAT INAP	0	0	119	0	0	0	0	119
- JUMLAH TEMPAT TIDUR	0	0	1099	0	0	0	0	1,099
PUSKESMAS NON RAWAT INAP	0	0	122	0	0	0	0	122
PUSKESMAS KELILING	0	0	132	0	0	0	0	132
PUSKESMAS PEMBANTU	0	0	1026	0	0	0	0	1,026
KLINIK PRATAMA	22	1	1	29	10	508	0	571
KLINIK UTAMA	0	0	0	0	0	56	0	56
TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER	0	0	0	0	0	953	0	953
TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI	0	0	0	0	0	492	0	492
TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER SPESIALIS	0	0	0	0	0	66	0	66
TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN	0	0	0	0	0	1612	0	1,612
TEMPAT PRAKTK MANDIRI PERAWAT	0	0	0	0	0	88	0	88
GRIYA SEHAT	0	0	0	0	0	0	0	0
PANTI SEHAT	0	0	0	0	0	5	0	5
UNIT TRANSFUSI DARAH	0	0	8	0	0	13	0	21
LABORATORIUM KESEHATAN	0	1	8	0	0	23	0	32
INDUSTRI FARMASI	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA)	0	0	0	0	0	0	0	0
USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT)	0	0	0	0	0	8	0	8
PRODUKSI ALAT KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)	0	0	0	0	0	6	0	6
INDUSTRI KOSMETIKA	0	0	0	0	0	2	0	2
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF)	0	0	0	0	0	59	0	59
PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK)	0	0	0	0	0	71	0	71
APOTEK	0	0	0	0	0	1150	0	1,150
TOKO OBAT	0	0	0	0	0	410	0	410
TOKO ALKES	0	0	0	0	0	68	0	68

Sumber: - BidangYankes, SDK & Farmasi Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

Tabel 5

**JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BARU RAWAT JALAN, RAWAT INAP, DAN KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KODE KAB	SARANA PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH KUNJUNGAN						KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA		
		RAWAT JALAN			RAWAT INAP			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JUMLAH KUNJUNGAN		3.462.730	4.377.421	7.681.887	269.942	369.937	639.879	55.933	56.967	112.900
JUMLAH PENDUDUK KAB/KOTA		3.437.155	3.290.898	6.728.053	3.437.155	3.290.898	6.728.053			
CAKUPAN KUNJUNGAN (%)		100,7	133,0	114,2	7,9	11,2	9,5			
A	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama									
1401	KAMPAR	100.365	100.282	200.647	563	594	1.157	2.387	2434	4.821
1402	INDRAGIRI HULU	97.010	77.150	174.160	1.245	1.117	2.362	934	580	1.514
1403	BENGKALIS	274.100	348.276	622.376	18.442	25.339	43.781	4.846	5218	10.064
1404	INDRAGIRI HILIR	114.084	192.997	307.081	2.133	3.581	5.714	0	0	0
1405	PELALAWAN	95.294	101.024	196.318	16.840	23.178	40.018	1.837	2588	4.425
1406	ROKAN HULU	132.256	127.068	259.324	1.356	1.302	2.658	0	0	0
1407	ROKAN HILIR	208.316	162.468	290.355	2.068	2.321	4.389	302	454	756
1408	SIAK	110.010	139.465	249.475	1.008	1.392	2.400	340	359	699
1409	KUANTAN SINGINGI	91.523	101.435	192.958	2.697	1.857	4.554	0	0	0
1410	KEPULAUAN MERANTI	65.285	87.245	152.280	396	589	985	432	301	733
1471	PEKANBARU	181.744	264.239	445.983	1.027	1.029	2.056	0	0	0
1472	DUMAI	44.761	59.491	104.252	470	800	1.270	0	0	0
SUB JUMLAH I		1.514.748	1.598.672	2.904.854	46.177	60.778	106.955	11.078	11.934	23.012
B	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut									
1	RS Umum Daerah Arifin Achmad	79.415	108.361	187.776	9.919	12.621	22.540	44	88	132
2	RS Umum Awal Bros Pekanbaru	13.756	15.147	28.903	2.541	2.142	4.683	50	91	141
3	RS Umum Islam Ibnu Sina	48.161	74.373	122.534	4.053	6.013	10.066	703	1.336	2.039
4	RS Umum Prima Pekanbaru	76.878	90.224	167.102	8.739	9.477	18.216	1.341	1.893	3.234
5	RS Umum Awal Bros Panam	159.007	183.093	342.100	10.106	10.742	20.848	1.392	1.990	3.382
6	RS Santa Maria Pekanbaru	83.963	90.133	174.096	7.241	7.974	15.215	605	1.016	1.621
7	RS Umum Eka Hospital Pekanbaru	68.841	72.874	141.715	4.951	4.849	9.800	28	40	68
8	RS Umum Syafira	120.155	151.064	271.219	9.177	13.077	22.254	1.498	2.364	3.862
9	RS Ibu dan Anak Zainab	20.953	31.471	52.424	3.102	6.988	10.090	0	0	0
10	RS Umum Daerah Petala Bumi	18.804	22.427	41.231	1.652	1.780	3.432	0	0	0
11	RS Umum Pekanbaru Medical Center	15.470	27.878	43.348	1.477	4.926	6.403	1.852	1.600	3.452
12	RS Umum Aulia Hospital	75.250	111.470	186.720	9.554	10.904	20.458	1.206	1.324	2.530

KODE KAB	SARANA PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH KUNJUNGAN						KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA		
		RAWAT JALAN			RAWAT INAP			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	RS Jiwa Tampan	11.516	9.681	21.197	1.661	607	2.268	13.177	10.288	23.465
14	RS Umum Bina Kasih	8.656	15.782	24.438	557	1.483	2.040	0	0	0
15	RS Tk. IV Pekanbaru	1.795	3.924	5.719	235	431	666	0	0	0
16	RSU TNI-AU Lanud Roesmin Nurjadin	664	923	1.587	74	71	145	0	0	0
17	RS Bhayangkara Pekan Baru Polda Riau	9.439	11.740	21.179	1.009	974	1.983	878	769	1.647
18	RS Prof. Dr. Tabrani	16.573	25.322	41.895	1.932	2.655	4.587	0	0	0
19	RS Umum Sansani	58.371	86.208	144.579	7.301	11.672	18.973	1.329	1.492	2.821
20	RS Khusus Mata SMEC Pekanbaru	31.798	37.928	69.726	479	504	983	0	0	0
21	RS Awal Bros A. Yani	5.666	219.412	225.078	6.844	8.354	15.198	2.612	3.545	6.157
22	RS Eria	100	14.188	14.288	2.273	4.106	6.379	0	0	0
23	RS Ibu Anak Budhi Mulia	17.514	31.224	48.738	767	2.805	3.572	0	0	0
24	RS Khusus Mata Pekanbaru Eye Center	7.439	8.785	16.224	43	59	102	0	0	0
25	RS Umum Universitas Riau	2.008	3.754	5.762	230	628	858	0	0	0
26	RS Umum Lancang Kuning	2.807	3.114	5.921	384	527	911	1.859	1.102	2.961
27	RS Ibu dan Anak Annisa	12.341	22.145	34.486	657	2.699	3.356	0	0	0
28	RSIA Hermina Rumbai	481	681	1.162	27	35	62	0	0	0
29	RSD Pekanbaru Madani	9.169	11.646	20.815	652	981	1.633	0	0	0
30	RS Hermina	25.500	25.473	50.973	10.721	11.421	22.142	0	0	0
31	RSIA Andini	12.980	26.740	39.720	20	1.269	1.289	0	0	0
32	RS Umum Daerah Bangkinang	28.402	37.451	65.853	3.859	4.612	8.471	2.034	2.040	4.074
33	RS Umum Tandun	14.956	12.777	27.733	968	1.324	2.292	0	0	0
34	RS Umum Mesra	13.300	18.991	32.291	2.876	4.535	7.411	2	1	3
35	RS Ibu Anak Norfa Husada	900	2.700	3.600	135	1.554	1.689	0	0	0
36	RS Ibu Anak Bunda Anisyah	113	1.994	2.107	391	1.493	1.884	0	0	0
37	RS Ibu Anak Husada Bunda	1.095	7.040	8.135	277	1.998	2.275	0	0	0
38	RS Nurlima	942	1.152	2.094	320	370	690	0	0	0
39	RS Pelita	1.342	1.640	2.982	519	467	986	0	0	0
40	RS Umum Daerah Rokan Hulu	30.258	42.023	72.281	3.029	4.757	7.786	0	0	0
41	RS Umum Awal Bros Ujung Batu	30.258	92.612	173.172	8.754	9.081	17.835	1.228	789	2.017
42	RS Umum Surya Insani	20.022	26.812	46.834	3.738	5.755	9.493	0	0	0
43	RS Umum Azzahra	2.537	4.166	6.703	624	1.170	1.794	0	0	0
44	RS Doa Ibunda	344	280	624	118	86	204	0	0	0
45	RSIA Harapan Medika	2.686	8.678	11.364	164	522	686	0	0	0
46	RS Umum Daerah Indrasari Rengat	22.582	25.463	48.045	2.880	3.363	6.243	0	0	0
47	RS Ibu dan Anak Safira	1.314	6.940	8.254	359	1.594	1.953	0	0	0
48	RS Umum Kasih Ibu Rengat	8.087	15.000	23.087	1.163	4.435	5.598	0	0	0
49	RS Muizzah	6.159	8.051	14.210	1.630	2.714	4.344	0	0	0

KODE KAB	SARANA PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH KUNJUNGAN						KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA		
		RAWAT JALAN			RAWAT INAP			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan	37.868	46.919	84.787	5.490	7.228	12.718	1.901	1.728	3.629
51	RS Umum Daerah Tengku Sulung	731	1.290	2.021	100	177	277	0	0	0
52	RS Umum Daerah Raja Musa	4.685	7.745	12.430	943	1.605	2.548	0	0	0
53	RSIA Bunda Puja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	RS 3M Plus	15.800	18.548	34.348	1.493	1.753	3.246	0	0	0
55	RS Umum Efarina	26.415	27.897	54.312	8.643	10.757	19.400	0	0	0
56	RS Umum Daerah Selasih Riau	20.619	24.991	45.610	3.147	3.470	6.617	84	251	335
57	RS Umum Amalia Medika	32.610	28.056	60.666	2.323	4.905	7.228	1.753	2.337	4.090
58	RS Umum Medicare Sorek	15.650	20.080	35.730	2.727	4.046	6.773	0	0	0
59	RS Umum Daerah Teluk Kuantan	29.968	35.471	65.439	2.796	3.042	5.838	400	286	686
60	RS Ibu dan Anak Milano	1.831	14.078	15.909	893	3.801	4.694	0	0	0
61	RS Umum Daerah Tengku Rafian Siak Sri Indrapura	40.440	48.698	89.138	4.604	6.719	11.323	886	948	1.834
62	RSUD Minas	809	1.086	1.895	17	36	53	0	0	0
63	RSUD Tualang	9.220	9.225	18.445	404	603	1.007	330	441	771
64	RS Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	40.954	43.020	83.974	3.237	4.895	8.132	534	494	1.028
65	RS Umum Daerah Dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi	17.995	28.812	46.807	4.463	6.340	10.803	191	14	205
66	RS Umum Indah	2.300	1.677	3.977	678	399	1.077	0	0	0
67	RS Umum Cahaya	682	1.036	1.718	968	1.717	2.685	0	0	0
68	RSIA Athaya Medika	4.257	8.331	12.588	599	1.064	1.663	0	0	0
69	RS Awal Bros Bagan Batu	29.376	37.449	66.825	5.440	6.599	12.039	0	0	0
70	RS Ibunda	3.270	4.626	7.896	1.096	1.304	2.400	0	0	0
71	RS Umum Daerah Bengkalis	42.284	49.879	92.163	5.178	6.466	11.644	1.068	1.050	2.118
72	RS Umum Pertamina Hulu Rokan (PHR)	11.782	14.818	26.600	48	49	97	0	0	0
73	RS Umum Daerah Kec. Mandau	99.375	119.520	218.895	5.097	6.184	11.281	3.246	3.210	6.456
74	RS Umum Permata Hati	60.403	75.075	135.478	3.642	4.608	8.250	532	958	1.490
75	RS Umum Mutia Sari	38.833	64.959	103.792	2.687	4.792	7.479	0	0	0
76	RS Umum Thursina	21.423	24.025	45.448	1.790	3.240	5.030	0	0	0
77	RS Umum Daerah Kota Dumai	56.389	67.586	123.975	8.068	10.153	18.221	2.080	1.536	3.616
78	RS Pertamina Dumai	27.205	32.215	59.420	1.153	1.931	3.084	4	3	7
79	RS Bhayangkara Dumai	73	102	175	0	0	0	0	0	0
80	RS awal Bros Dumai	48.214	66.582	114.796	5.457	6.942	12.399	0	0	0
81	RS Graha Yasmin	5.589	3.823	9.412	397	1.728	2.125	0	0	0
82	Naray Hospital	165	175	340	5	2	7	8	9	17
PROVINSI RIAU		1.947.982	2.778.749	4.777.033	223.765	309.159	532.924	44.855	45.033	89.888

Sumber: Bidang Yankes Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

Catatan: Puskesmas non rawat inap hanya melayani kunjungan rawat jalan

TABEL 6

**PERSENTASE RUMAH SAKIT DENGAN KEMAMPUAN PELAYANAN GAWAT DARURAT LEVEL I
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KODEKAB	KAB/KOTA	JUMLAH	MEMPUNYAI KEMAMPUAN PELAYANAN GAWAT DARURAT LEVEL I	
			JUMLAH	%
1	2	3	4	5
1401	KAMPAR	8	8	100
1402	INDRAGIRI HULU	4	2	50
1403	BENGKALIS	6	6	100
1404	INDRAGIRI HILIR	5	5	100
1405	PELALAWAN	4	4	100
1406	ROKAN HULU	6	6	100
1407	ROKAN HILIR	6	6	100
1408	SIAK	3	3	100
1409	KUANTAN SINGINGI	2	2	100
1410	KEPULAUAN MERANTI	1	1	100
1471	PEKANBARU	31	31	100
1472	DUMAI	6	6	100
PROVINSI RIAU		82	80	100

Sumber: Bidang Yankes Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 7

ANGKA KEMATIAN PASIEN DI RUMAH SAKIT
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

NO	NAMA RUMAH SAKIT	JUMLAH TEMPAT TIDUR	PASIEEN KELUAR (HIDUP + MATI)			PASIEEN KELUAR MATI			PASIEEN KELUAR MATI ≥ 48 JAM DIRAWAT			Gross Death Rate			Net Death Rate		
			L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	RS Umum Daerah Arifin Achmad	520	10.898	13.588	24.486	979	967	1.946	295	268	563	89,8	71,2	79,5	27,1	19,7	23,0
2	RS Umum Awal Bros Pekanbaru	325	12.165	13.987	26.152	505	443	948	427	386	813	41,5	31,7	36,2	35,1	27,6	31,1
3	RS Umum Islam Ibnu Sina	120	6.299	4.699	10.998	141	143	284	62	81	143	22,4	30,4	25,8	9,8	17,2	13,0
4	RS Umum Prima Pekanbaru	193	8.739	9.477	18.216	105	112	217	78	99	177	12,0	11,8	11,9	8,9	10,4	9,7
5	RS Umum Awal Bros Panam	261	9.910	10.614	20.524	259	271	530	143	167	310	26,1	25,5	25,8	14,4	15,7	15,1
6	RS Santa Maria Pekanbaru	200	7.241	7.974	15.215	300	357	657	177	180	357	41,4	44,8	43,2	24,4	22,6	23,5
7	RS Umum Eka Hospital Pekanbaru	200	4.951	4.849	9.800	59	55	114	44	45	89	11,9	11,3	11,6	8,9	9,3	9,1
8	RS Umum Syafira	180	9.177	13.077	22.254	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	RS Ibu dan Anak Zainab	75	3.102	6.988	10.090	6	6	12	3	5	8	1,9	0,9		1,0	0,7	0,8
10	RS Umum Daerah Petala Bumi	100	1.615	1.746	3.361	52	34	86	0	0	0	32,2	19,5	25,6	0,0	0,0	0,0
11	RS Umum Pekanbaru Medical Center	100	1.476	4.880	6.356	31	35	66	15	19	34	21,0	7,2	10,4	10,2	3,9	5,3
12	RS Umum Aulia Hospital	172	7555	12500	20.055	98	165	263	75	90	165	13,0	13,2	13,1	9,9	7,2	8,2
13	RS Jiwa Tampan	284	1.652	606	2.258	1	0	1	0	0	0	0,6	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
14	RS Umum Bina Kasih	50	558	1.484	2.042	6	11	17	0	3	3	10,8	7,4	8,3	0,0	2,0	1,5
15	RS Tk. IV Pekanbaru	52	185	289	474	5	5	10	0	0	0	11,0	10,0	21,0	0,0	0,0	0,0
16	RSU TNI-AU Lanud Roesmin Nurjadin	52	74	71	145	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	RS Bhayangkara Pekan Baru Polda Riau	98	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	RS Prof. Dr. Tabrani	123	1.932	2.655	4.587	28	40	68	21	36	57	14,5	15,1	14,8	10,9	13,6	12,4
19	RS Umum Sansani	150	6.947	11.511	18.458	132	157	289	68	104	172	19,0	13,6	15,7	9,8	9,0	9,3
20	RS Khusus Mata SMEC Pekanbaru	16	479	504	983	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	RS Awal Bros A. Yani	201	8.138	9.871	18.009	181	233	414	130	103	233	22,2	23,6	23,0	16,0	10,4	12,9
22	RS Eria	100	2.384	4.541	6.925	26	24	50	4	6	10	10,9	5,3	7,2	1,7	1,3	1,4
23	RS Ibu Anak Budhi Mulia	59	767	2.805	3.572	4	8	12	0	0	0	5,2	2,9	3,4	0,0	0,0	0,0
24	RS Khusus Mata Pekanbaru Eye Center	16	43	59	102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	RS Umum Universitas Riau	51	229	636	865	3	0	3	0	0	0	13,1	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
26	RS Umum Lancang Kuning	102	780	681	1.461	12	24	36	10	15	25	5,4	19,1	24,6	4,1	1,3	17,1
27	RS Ibu dan Anak Annisa	26	657	2699	3.356	10	3	13	4	0	4	15,2	1,1	3,9	6,1	0,0	1,2
28	RSIA Hermina Rumbai	25	27	36	62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	RSD Pekanbaru Madani	102	589	1.044	1.633	36	22	58	18	12	30	61,1	21,1	35,5	30,6	11,5	18,4
30	RS Hermina	100	3.621	3.685	7.306	122	131	253	78	98	176	33,7	35,5	34,6	21,5	26,6	24,1
31	RSIA Andini	28	15	1.275	1.290	0	2	2	0	1	1	0,0	1,6	1,6	0,0	0,8	0,8
32	RS Umum Daerah Bangkinang	119	3.859	4.612	8.471	181	143	324	99	100	199	46,9	31,0	38,2	25,7	21,7	23,5
33	RS Umum Tandun	51	968	1.324	2.292	4	3	7	1	2	3	4,1	2,3	3,1	1,0	1,5	1,3
34	RS Umum Mesra	79	1.579	2.578	4.157	8	10	18	1	1	2	5,1	3,9	4,3	0,6	0,4	0,5
35	RS Ibu Anak Norfa Husada	36	135	1.554	1.689	2	2	4	0	0	0	14,8	1,3	2,4	0,0	0,0	0,0
36	RS Ibu Anak Bunda Anisyah	31	391	1.492	1.883	7	5	12	4	1	5	17,9	3,4	6,4	10,2	0,7	2,7
37	RS Ibu Anak Husada Bunda	38	277	1.998	2.275	2	3	5	0	1	1	7,2	1,5	2,2	0,0	0,5	0,4
38	RS Nurlima	50	135	1.554	1.689	2	2	4	0	0	0	14,8	1,3	2,4	0,0	0,0	0,0
39	RS Pelita	100	519	467	986	7	5	12	4	1	5	13,5	10,7	12,2	7,7	2,1	5,1
40	RS Umum Daerah Rokan Hulu	126	3.029	4.757	7.786	152	203	355	30	58	88	50,2	42,7	45,6	9,9	12,2	11,3
41	RS Umum Awal Bros Ujung Batu	145	7.978	9.788	17.766	117	143	260	70	109	179	14,7	14,6	14,6	8,8	11,1	10,1
42	RS Umum Surya Insani	102	3.738	5.755	9.493	85	122	207	42	40	82	22,7	21,2	21,8	11,2	7,0	8,6
43	RS Umum Azzahra	52	624	1.170	1.794	4	8	12	2	6	8	6,4	6,8	6,7	3,2	5,1	4,5
44	RS Doa Ibunda	32	113	76	189	2	1	3	1	1	2	17,7	13,2	15,9	8,8	13,2	10,6
45	RSIA Harapan Medika	25	201	537	738	2	0	2	0	0	0	10,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
46	RS Umum Daerah Indrasari Rengat	144	2.992	3.476	6.468	166	152	318	90	100	190	55,5	43,7	49,2	30,1	28,8	29,4

NO	NAMA RUMAH SAKIT	JUMLAH TEMPAT TIDUR	PASIENT KELUAR (HIDUP + MATI)			PASIENT KELUAR MATI			PASIENT KELUAR MATI ≥ 48 JAM DIRAWAT			Gross Death Rate			Net Death Rate		
			L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
47	RS Ibu dan Anak Safira	37	359	1.594	1.953	1	0	1	0	0	0	2,8	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
48	RS Umum Kasih Ibu Rengat	52	1.167	4.446	5.613	27	44	71	0	3	3	23,1	9,9	12,6	0,0	0,7	0,5
49	RS Muizzah	56	1.630	2.714	4.344	36	45	81	11	12	23	22,1	16,6	18,6	6,7	4,4	5,3
50	RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan	265	5.490	7.228	12.718	461	433	894	232	234	466	84,0	59,9	70,3	42,3	32,4	36,6
51	RS Umum Daerah Tengku Sulung	50	751	1235	1.986	3	5	8	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	RS Umum Daerah Raja Musa	50	839	1.451	2.290	9	6	15	4	6	10	10,7	4,1	6,6	4,8	4,1	4,4
53	RSIA Bunda Puja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	RS 3M Plus	67	1.571	1.675	3.246	41	27	68	0	0	0	26,1	16,1	20,9	0,0	0,0	0,0
55	RS Umum Efarina	221	8622	10715	19.337	59	72	131	28	38	66	6,8	6,7	6,8	3,2	3,5	3,4
56	RS Umum Daerah Selasih Riau	133	121	124	245	121	124	245	44	61	105	1.000,0	1.000,0	1.000,0	363,6	491,9	428,6
57	RS Umum Amalia Medika	70	2.322	4.904	7.226	27	23	50	5	6	11	11,6	4,7	6,9	2,2	1,2	1,5
58	RS Umum Medicare Sorek	65	2.727	4.046	6.773	11	12	23	11	9	20	4,0	3,0	3,4	4,0	0,7	3,0
59	RS Umum Daerah Teluk Kuantan	117	4.254	4.607	8.861	258	278	536	108	117	225	60,6	60,3	60,5	25,4	25,4	25,4
60	RS Ibu dan Anak Milano	64	690	4.027	4.717	12	6	18	6	2	8	17,4	1,5	3,8	8,7	0,5	1,7
61	RS Umum Daerah Tengku Rafian Siak Sri Indrapura	126	4.604	6.719	11.323	196	164	360	98	82	180	42,6	24,4	31,8	21,3	12,2	15,9
62	RSUD Minas	50	17	36	53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	RSUD Tualang	60	309	704	1.013	2	1	3	2	1	3	6,5	1,4	3,0	6,5	1,4	3,0
64	RS Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	127	4.075	4.057	8.132	151	141	292	85	72	157	37,1	34,8	35,9	20,9	17,7	19,3
65	RS Umum Daerah Dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi	121	30.099	42.193	72.292	282	245	527	117	88	205	9,4	5,8	7,3	3,9	2,1	2,8
66	RS Umum Indah	60	678	399	1.077	20	11	31	12	15	27	29,5	27,6	28,8	17,7	37,6	25,1
67	RS Umum Cahaya	58	986	1.717	2.703	6	9	15	1	2	3	6,1	5,2	5,5	1,0	1,2	1,1
68	RSIA Athaya Medika	54	643	1.408	2.051	17	16	33	7	3	10	26,4	11,4	16,1	10,9	2,1	4,9
69	RS Awal Bros Bagan Batu	121	2.125	2.552	4.677	95	96	191	62	55	117	44,7	37,6	40,8	29,2	21,6	25,0
70	RS Ibunda	62	3.270	4.626	7.896	38	55	93	20	32	52	11,6	11,9	11,8	6,1	6,9	6,6
71	RS Umum Daerah Bengkalis	208	5.178	6.466	11.644	187	167	354	11	10	21	36,1	25,8	30,4	2,1	1,5	1,8
72	RS Umum Pertamina Hulu Rokan (PHR)	50	48	49	97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	RS Umum Daerah Kec. Mandau	163	5.359	5.702	11.061	294	262	556	134	193	327	54,9	45,9	50,3	25,0	33,8	29,6
74	RS Umum Permata Hati	127	3.642	4.608	8.250	86	96	182	31	41	72	23,6	20,8	22,1	8,5	8,9	8,7
75	RS Umum Mutia Sari	72	2.687	4.792	7.479	34	30	64	27	20	47	12,7	6,3	8,6	10,0	4,2	6,3
76	RS Umum Thursina	54	1.790	3.240	5.030	7	6	13	2	2	4	3,9	1,9	2,6	1,1	0,6	0,8
77	RS Umum Daerah Kota Dumai	309	8.068	10.153	18.221	325	149	474	163	135	298	40,3	14,7	26,0	20,2	13,3	16,4
78	RS Pertamina Dumai	74	1.153	1.931	3.084	40	42	82	18	28	46	34,7	21,8	26,6	15,6	14,5	14,9
79	RS Bhayangkara Dumai	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80	RS awal Bros Dumai	130	5.457	6.942	12.399	135	117	252	77	63	140	24,7	16,9	20,3	14,1	9,1	11,3
81	RS Graha Yasmin	50	397	1.728	2.125	2	7	9	2	7	9	5,0	4,1	4,2	5,0	4,1	4,2
82	Naray Hospital	108	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PROVINSI RIAU		8.704	249.876	348.759	598.634	6.825	6.739	13.588	3.314	3.475	6.789	27,3	19,3	22,7	13,3	10,0	11,3

Sumber: Bidang Yankes Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

Keterangan: ^a termasuk rumah sakit swasta

TABEL 8

INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

NO	NAMA RUMAH SAKIT	JUMLAH TEMPAT TIDUR	PASIENT KELUAR (HIDUP + MATI)	JUMLAH HARI PERAWATAN	JUMLAH LAMA DIRAWAT	BOR (%)	BTO (KALI)	TOI (HARI)	ALOS (HARI)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	RS Umum Daerah Arifin Achmad	520	24.486	132.956	133.450	70,1	47	2	5
2	RS Umum Awal Bros Pekanbaru	325	26.152	102.130	109.403	86,1	80	1	4
3	RS Umum Islam Ibnu Sina	120	10.998	30.556	28.750	69,8	92	1	3
4	RS Umum Prima Pekanbaru	193	18.216	52.200	50.344	74,1	94	1	3
5	RS Umum Awal Bros Panam	261	20.524	70.820	69.641	74,3	79	1	3
6	RS Santa Maria Pekanbaru	200	15.215	51.219	50.746	70,2	76	1	3
7	RS Umum Eka Hospital Pekanbaru	200	9.800	32.288	32.847	44,2	49	4	3
8	RS Umum Syafira	180	22.254	56.237	73.560	85,6	124	0	3
9	RS Ibu dan Anak Zainab	75	10.090	21.188	21.703	77,4	135	1	2
10	RS Umum Daerah Petala Bumi	100	3.361	0	0	0,0	34	11	0
11	RS Umum Pekanbaru Medical Center	100	6.356	17.122	16.176	46,9	64	3	3
12	RS Umum Aulia Hospital	172	20.055	53.776	53.401	85,7	117	1	3
13	RS Jiwa Tampan	284	2.258	0	0	0,0	8	46	0
14	RS Umum Bina Kasih	50	2.042	4.326	4.903	23,7	41	7	2
15	RS Tk. IV Pekanbaru	52	474	0	0	0,0	9	0	0
16	RSU TNI-AU Lanud Roesmin Nurjadin	52	110	354	354	5,2	2	59	3
17	RS Bhayangkara Pekan Baru Polda Riau	98	0	0	0	0,0	0	0	0
18	RS Prof. Dr. Tabrani	123	4.587	14.673	16.310	32,7	37	7	4
19	RS Umum Sansani	150	18.458	46.186	59.603	84,4	123	0	3
20	RS Khusus Mata SMEC Pekanbaru	16	983	2.296	1.348	39,3	61	4	1
21	RS Awal Bros A. Yani	201	18.009	54.262	57.814	74,0	90	1	3
22	RS Eria	100	6.925	19.580	12.975	53,6	69	2	2
23	RS Ibu Anak Budhi Mulia	59	3.572	12.860	9.288	59,7	61	2	3
24	RS Khusus Mata Pekanbaru Eye Center	16	102	126	126	21,6	6	56	1
25	RS Umum Universitas Riau	51	865	3.087	2.242	16,6	17	18	3
26	RS Umum Lancang Kuning	102	1.461	7.900	7.500	21,2	14	21	5
27	RS Ibu dan Anak Annisa	26	3.356	9.405	6.049	99,1	129	0	1
28	RSIA Hermina Rumbai	25	62	102	151	1,1	2	146	2
29	RSD Pekanbaru Madani	102	1.633	5.835	4.327	15,7	16	19	3
30	RS Hermina	100	7.306	22.142	29.274	60,7	73	2	4
31	RSIA Andini	28	1.290	4.144	2.815	40,5	46	5	2
32	RS Umum Daerah Bangkinang	119	8.471	29.202	21.665	67,2	71	2	3
33	RS Umum Tandun	51	2.292	9.794	7.502	52,6	45	4	3
34	RS Umum Mesra	79	4.157	25.876	21.849	89,7	53	1	5
35	RS Ibu Anak Norfa Husada	36	1.689	12.107	4.971	92,1	47	1	3
36	RS Ibu Anak Bunda Anisyah	31	1.883	8.699	1.886	76,9	61	1	1
37	RS Ibu Anak Husada Bunda	38	2.275	9.714	7.439	70,0	60	2	3
38	RS Nurlima	50	1.689	12.107	4.971	66,3	34	4	3
39	RS Pelita	100	986	2.345	3.271	6,4	10	35	3
40	RS Umum Daerah Rokan Hulu	126	7.786	24.344	32.236	52,9	62	3	4

NO	NAMA RUMAH SAKIT	JUMLAH TEMPAT TIDUR	PASIEEN KELUAR (HIDUP + MATI)	JUMLAH HARI PERAWATAN	JUMLAH LAMA DIRAWAT	BOR (%)	BTO (KALI)	TOI (HARI)	ALOS (HARI)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	RS Umum Awal Bros Ujung Batu	145	17.766	48.219	46.960	91,1	123	0	3
42	RS Umum Surya Insani	102	9.493	27.773	26.333	74,6	93	1	3
43	RS Umum Azzahra	52	1.794	4.126	5.925	21,7	35	8	3
44	RS Doa Ibunda	32	189	139	306	1,2	6	61	2
45	RSIA Harapan Medika	25	738	1.696	1.696	18,6	30	10	2
46	RS Umum Daerah Indrasari Rengat	144	6.468	22.226	20.143	42,3	45	5	3
47	RS Ibu dan Anak Safira	37	1.953	2.364	365	17,5	53	6	0
48	RS Umum Kasih Ibu Rengat	52	5.613	17.870	16.619	94,2	108	0	3
49	RS Muizzah	56	4.344	18.142	15.666	88,8	78	1	4
50	RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan	265	12.718	58.225	56.590	60,2	48	3	4
51	RS Umum Daerah Tengku Sulung	50	1.986	1.997	1.454	10,9	13	25	3
52	RS Umum Daerah Raja Musa	50	2.290	2.464	5.873	13,5	46	7	3
53	RSIA Bunda Puja	12	0	0	0	0,0	0	0	0
54	RS 3M Plus	67	3.246	0	0	0,0	48	8	0
55	RS Umum Efarina	221	19.337	58.524	51.369	72,6	87	0	0
56	RS Umum Daerah Selasih Riau	133	6.585	26.004	19.688	53,6	50	3	3
57	RS Umum Amalia Medika	70	7.226	22.627	22.626	88,6	103	0	3
58	RS Umum Medicare Sorek	65	6.773	15.929	18.960	67,1	104	1	3
59	RS Umum Daerah Teluk Kuantan	117	8.861	0	0	0,0	76	5	0
60	RS Ibu dan Anak Milano	64	4.717	14.526	14.526	62,2	74	2	3
61	RS Umum Daerah Tengku Rafian Siak Sri Indrapura	126	11.323	0	0	0,0	90	4	0
62	RSUD Minas	50	53	122	76	0,7	1	342	1
63	RSUD Tualang	60	1.013	0	0	0,0	17	22	0
64	RS Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	127	8.132	19.143	19.548	41,3	64	3	2
65	RS Umum Daerah Dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi	121	72.292	49.228	12.289	111,5	597	0	0
66	RS Umum Indah	60	1.077	4.308	4.308	19,7	18	16	4
67	RS Umum Cahaya	58	2.703	7	3	0,0	47	8	0
68	RSIA Athaya Medika	54	2.051	3.208	2	16,3	38	8	0
69	RS Awal Bros Bagan Batu	121	4.677	37.224	38.817	84,3	39	1	8
70	RS Ibunda	62	7.896	623	7.155	2,8	127	3	1
71	RS Umum Daerah Bengkalis	208	11.644	55.062	43.967	72,5	55,98	1,79	3,78
72	RS Umum Pertamina Hulu Rokan (PHR)	50	97	285	231	1,6	1,94	185,21	2,38
73	RS Umum Daerah Kec. Mandau	163	11.061	51.579	44.212	86,7	67,86	0,72	4,00
74	RS Umum Permata Hati	127	8.250	23.203	22.703	50,1	64,96	2,81	2,75
75	RS Umum Mutia Sari	72	7.478	23.298	17.643	88,7	103,88	0,40	2,36
76	RS Umum Thursina	54	5.030	17.496	12.466	88,8	93,15	0,44	2,48
77	RS Umum Daerah Kota Dumai	309	18.221	75.568	67.591	67,0	58,97	2,04	3,71
78	RS Pertamina Dumai	74	3.084	10.624	10.352	39,3	41,68	5,31	3,36
79	RS Bhayangkara Dumai	50	0	0	0	0,0	0,00	0,00	0,00
80	RS awal Bros Dumai	130	12.399	37.104	35.672	78,2	95,38	0,83	2,88
81	RS Graha Yasmin	50	2.125	6.946	4.813	38,1	42,50	5,32	2,26
82	Naray Hospital	108	7	13	8	0,03	0,06	5630	1,14
PROVINSI RIAU		8.704	604.939	1.719.850	1.627.845	54,1	70	2	3

Sumber: Bidang Yankes Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

masuk rumah sakit swasta

TABEL 9

**PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL
MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS	KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL*
1	2	3	4
1401	KAMPAR	31	v
1402	INDRAGIRI HULU	20	v
1403	BENGKALIS	20	v
1404	INDRAGIRI HILIR	30	v
1405	PELALAWAN	14	x
1406	ROKAN HULU	23	v
1407	ROKAN HILIR	21	x
1408	SIAK	16	v
1409	KUANTAN SINGINGI	25	v
1410	KEPULAUAN MERANTI	10	v
1471	PEKANBARU	21	v
1472	DUMAI	10	v
JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI 80% OBAT DAN VAKSIN ESENSIAL			234
JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAPOR			241
% PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT & VAKSIN ESENSIAL			97.10

Sumber: UPT. Farmasi dan Logistik (Aplikasi E-MONEV Katalog Obat KEMENKES RI)

Keterangan: *) beri tanda "V" jika puskesmas memiliki obat dan vaksin esensial $\geq 80\%$

*) beri tanda "X" jika puskesmas memiliki obat dan vaksin esensial $< 80\%$

*) jika puskesmas tersebut tidak melapor, **mohon dikosongkan atau tidak memberi tanda "V" maupun "X"**

TABEL 10

**PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

NO	NAMA OBAT	SATUAN	KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL*
1	2	3	4
1	Albendazol /Pirantel Pamoat	Tablet	v
2	Alopurinol	Tablet	v
3	Amlodipin/Kaptopril	Tablet	v
4	Amoksisilin 500 mg	Tablet	v
5	Amoksisilin sirup	Botol	v
6	Antasida tablet kunyah/ antasida suspensi	Tablet/Botol	v
7	Amitriptilin tablet salut 25 mg (HCl)	Tablet	x
8	Asam Askorbat (Vitamin C)	Tablet	v
9	Asiklovir	Tablet	v
10	Betametason salep	Tube	v
11	Deksametason tablet/deksametason injeksi	Ampul	v
12	Diazepam injeksi 5 mg/ml	Ampul	v
13	Diazepam	Tablet	v
14	Dihidroartemisin+piperakuin (DHP) dan primaquin	Tablet	x
15	Difenhidramin Inj. 10 mg/ml	Ampul	v
16	Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1 % (sebagai HCl)	Ampul	v
17	Fitomenadion (Vitamin K) injeksi	Ampul	v
18	Furosemid 40 mg/Hidroklorotiazid (HCT)	Tablet	v
19	Garam Oralit serbuk	Kantong	v
20	Glibenklamid/Metformin	Tablet	v
21	Hidrokortison krim/salep	Tube	x
22	Kotrimoksazol (dewasa) kombinasi tablet/Kotrimoksazol suspensi	Tablet/Botol	v
23	Ketokonazol tablet 200 mg	Tablet	v
24	Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet 4 mg	Tablet	v
25	Lidokain inj	Ampul	v
26	Magnesium Sulfat injeksi	Ampul	x
27	Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg-1 ml	Ampul	x
28	Natrium Diklofenak	Tablet	v
29	OAT FDC Kat 1	Paket	v
30	Oksitosin injeksi	Ampul	v
31	Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml	Botol	v
32	Parasetamol 500 mg	Tablet	v
33	Prednison 5 mg	Tablet	v
34	Retinol 100.000/200.000 IU	Tablet	v
35	Salbutamol	Tablet	v
36	Salep Mata/Tetes Mata Antibiotik	Tablet	v
37	Simvastatin	Tablet	v
38	Tablet Tambah Darah	Tablet	v
39	Vitamin B6 (Piridoksin)	Tablet	v
40	Zinc 20 mg	Tablet	v
JUMLAH ITEM OBAT INDIKATOR YANG TERSEDIA DI KABUPATEN/KOTA			35
% KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL			87.50%

Sumber: UPT Farmasi dan Logistik (Aplikasi E-MONEV Katalog Obat KEMENKES RI)

Keterangan: *) beri tanda "V" jika kabupaten/kota memiliki obat esensial

*) beri tanda "X" jika kabupaten/kota tidak memiliki obat esensial

TABEL 11

**PERSENTASE KETERSEDIAAN VAKSIN IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL)
MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	KETERSEDIAAN VAKSIN IDL*
1	2	3
1401	KAMPAR	V
1402	INDRAGIRI HULU	V
1403	BENGKALIS	V
1404	INDRAGIRI HILIR	V
1405	PELALAWAN	V
1406	ROKAN HULU	V
1407	ROKAN HILIR	V
1408	SIAK	V
1409	KUANTAN SINGINGI	V
1410	KEPULAUAN MERANTI	V
1471	PEKANBARU	X
1472	DUMAI	V
JUMLAH KAB/KOTA YANG MEMILIKI 100% VAKSIN IDL		11
JUMLAH KAB/KOTA YANG MELAPOR		12
% KAB/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN VAKSIN IDL		91.67%

Sumber: UPT Farmasi dan Logistik (Aplikasi E-MONEV Katalog Obat KEMENKES RI)

Keterangan: *) beri tanda "V" jika Puskesmas memiliki 100% vaksin IDL

*) beri tanda "X" jika Puskesmas memiliki <100% vaksin IDL

TABEL 12

**JUMLAH POSYANDU MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	POSYANDU					JUMLAH POSBINDU PTM**
		AKTIF		TIDAK AKTIF*		JUMLAH	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1401	KAMPAR	634	97.8	14	2.2	648	
1402	INDRAGIRI HULU	398	98.5	6	1.5	404	
1403	BENGKALIS	527	99.6	2	0.4	529	
1404	INDRAGIRI HILIR	598	94.3	36	5.7	634	
1405	PELALAWAN	373	100.0	0	0.0	373	
1406	ROKAN HULU	593	99.8	1	0.2	594	
1407	ROKAN HILIR	507	89.4	60	10.6	567	
1408	SIAK	443	99.8	1	0.2	444	
1409	KUANTAN SINGINGI	367	98.4	6	1.6	373	
1410	KEPULAUAN MERANTI	260	100.0	0	0.0	260	
1471	PEKANBARU	658	99.8	1	0.2	659	
1472	DUMAI	201	100.0	0	0.0	201	
PROVINSI RIAU		5,559	97.8	127	2.2	5,686	
RASIO POSYANDU PER 100 BALITA		1.0					

Sumber : Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

Sumber: Microsite komdat Kesmas Tahun 2025

*Posyandu aktif: berdasarkan indikator (Memiliki Minimal 5 Orang kader, Memberikan pelayanan di Posyandu dan Melakukan kegiatan rutin Posyandu minimal 8 kali dalam setahun)

**PTM: Penyakit Tidak Menular (Pobindu PTM tidak tersendiri lagi, tapi sudah terintegrasi di satu Posyandu atau yang disebut Posyandu ILP yang melayani semua siklus hidup)

*** Indikator Posyandu Aktif sesuai Permenkes No.13 Tahun 2022

TABEL 13

**JUMLAH TENAGA MEDIS MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KODEKAB	KABUPATEN/KOTA	DR SPESIALIS			DOKTER			TOTAL			DOKTER GIGI			DOKTER GIGI SPESIALIS			TOTAL		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	PUSKESMAS																		
1401	KAMPAR	1	1	2	28	76	104	29	77	106	9	49	58	0	0	0	9	49	58
1402	INDRAGIRI HULU	34	10	44	34	102	103	68	112	180	2	22	24	1	3	4	3	25	28
1403	BENGKALIS	1	2	3	30	124	154	31	126	157	8	40	48	0	0	0	8	40	48
1404	INDRAGIRI HILIR	0	0	0	12	55	67	12	55	67	3	28	31	0	0	0	3	28	31
1405	PELALAWAN	0	1	1	13	52	65	13	53	66	3	22	25	0	0	0	3	22	25
1406	ROKAN HULU	0	0	0	23	62	85	23	62	85	3	19	22	0	0	0	3	19	22
1407	ROKAN HILIR	1	0	1	48	138	186	49	138	187	4	29	33	0	0	0	4	29	33
1408	SIAK	0	0	0	48	55	103	48	55	103	3	21	24	0	0	0	3	21	24
1409	KUANTAN SINGINGI	0	0	0	21	54	75	21	54	75	4	26	30	0	0	0	4	26	30
1410	KEPULAUAN MERANTI	0	0	0	18	29	47	18	29	47	2	11	13	0	0	0	2	11	13
1471	PEKANBARU	0	0	0	21	112	133	21	112	133	10	60	70	0	0	0	10	60	70
1472	DUMAI	0	0	0	22	69	91	22	69	91	1	15	16	0	0	0	1	15	16
JUMLAH		37	14	51	318	928	1.213	355	942	1.297	52	342	394	1	3	4	53	345	398
B	RUMAH SAKIT																		
1401	KAMPAR	22	32	54	24	59	83	46	91	137	1	5	6	0	2	2	1	7	8
1402	INDRAGIRI HULU	19	7	26	14	44	58	33	51	84	1	0	1	1	3	4	2	3	5
1403	BENGKALIS	69	57	126	32	89	121	101	146	247	6	15	21	0	3	3	6	18	24
1404	INDRAGIRI HILIR	37	14	51	21	42	63	58	56	114	0	4	4	1	0	1	1	4	5
1405	PELALAWAN	54	25	79	19	34	53	73	59	132	3	7	10	0	0	0	3	7	10
1406	ROKAN HULU	39	18	57	20	38	58	59	56	115	2	4	6	1	2	3	3	6	9
1407	ROKAN HILIR	59	28	87	28	41	69	87	69	156	1	4	5	0	0	0	1	4	5
1408	SIAK	19	16	35	15	35	50	34	51	85	2	8	10	0	0	0	2	8	10
1409	KUANTAN SINGINGI	18	9	27	9	27	36	27	36	63	2	3	5	0	0	0	2	3	5
1410	KEPULAUAN MERANTI	10	6	16	10	9	19	20	15	35	1	2	3	0	0	0	1	2	3
1471	PEKANBARU	360	278	638	295	519	814	655	797	1.452	30	90	120	14	29	43	44	119	163
1472	DUMAI	67	28	95	19	64	83	87	92	179	2	8	10	0	2	2	2	10	12
JUMLAH		773	518	1.291	506	1.001	1.507	1.280	1.519	2.799	51	150	201	17	41	58	68	191	259
C	SARKES LAINNYA																		
1401	KAMPAR	33	26	59	59	130	189	92	156	248	10	65	75	0	0	0	10	65	75
1402	INDRAGIRI HULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1403	BENGKALIS	7	6	13	22	60	82	29	66	95	2	21	23	0	0	0	2	21	23
1404	INDRAGIRI HILIR	0	0	0	23	18	41	23	18	41	1	2	3	0	0	0	1	2	3
1405	PELALAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1406	ROKAN HULU	29	10	39	43	83	126	72	93	165	2	19	21	0	0	0	2	19	21
1407	ROKAN HILIR	0	0	0	39	51	90	39	51	90	1	9	10	0	0	0	1	9	10
1408	SIAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1409	KUANTAN SINGINGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410	KEPULAUAN MERANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1471	PEKANBARU	34	39	73	132	405	537	166	444	610	37	286	323	3	2	5	40	288	328
1472	DUMAI	3	1	4	47	97	144	50	98	148	3	17	20	0	0	0	3	17	20
JUMLAH		0	106	82	188	365	844	1.209	471	926	56	419	475	3	2	5	59	421	480
PROVINSI RIAU		916	614	1.530	1.189	2.773	3.929	2.106	3.387	5.493	159	911	1.070	21	46	67	180	957	1.137
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK				22,7			58,4			81,6			15,9			1,0			16,9

Sumber: Bidang SDK & Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor

a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali

TABEL 14

**JUMLAH TENAGA TENAGA KEPERAWATAN DAN TENAGA KEBIDANAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KODEKAB	KABUPATEN/KOTA	TENAGA KEPERAWATAN			TENAGA KEBIDANAN
		L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6
A	PUSKESMAS				
1401	KAMPAR	147	442	589	903
1402	INDRAGIRI HULU	164	365	529	615
1403	BENGKALIS	74	275	349	430
1404	INDRAGIRI HILIR	116	298	414	679
1405	PELALAWAN	71	200	271	519
1406	ROKAN HULU	81	195	276	468
1407	ROKAN HILIR	183	490	673	1.115
1408	SIAK	50	250	300	416
1409	KUANTAN SINGINGI	80	261	341	557
1410	KEPULAUAN MERANTI	39	101	140	206
1471	PEKANBARU	13	184	197	201
1472	DUMAI	38	172	210	353
JUMLAH		1.056	3.233	4.289	6.462
B	RUMAH SAKIT				
1401	KAMPAR	81	168	249	68
1402	INDRAGIRI HULU	67	152	219	95
1403	BENGKALIS	146	437	583	303
1404	INDRAGIRI HILIR	78	215	293	169
1405	PELALAWAN	46	197	243	156
1406	ROKAN HULU	85	236	321	93
1407	ROKAN HILIR	117	209	326	168
1408	SIAK	66	207	273	159
1409	KUANTAN SINGINGI	45	174	219	68
1410	KEPULAUAN MERANTI	36	79	115	70

KODEKAB	KABUPATEN/KOTA	TENAGA KEPERAWATAN			TENAGA KEBIDANAN
		L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6
1471	PEKANBARU	958	3.049	4.007	833
1472	DUMAI	159	456	615	179
JUMLAH		1.884	5.579	7.463	2.361
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN					
C	SARANA KESEHATAN LAINNYA				
1401	KAMPAR	72	157	229	216
1402	INDRAGIRI HULU	0	0	0	0
1403	BENGKALIS	12	44	56	66
1404	INDRAGIRI HILIR	48	34	82	104
1405	PELALAWAN	0	0	0	0
1406	ROKAN HULU	50	74	124	398
1407	ROKAN HILIR	26	29	55	65
1408	SIAK	0	0	0	0
1409	KUANTAN SINGINGI	0	0	0	0
1410	KEPULAUAN MERANTI	0	0	0	0
1471	PEKANBARU	7	209	216	75
1472	DUMAI	31	96	127	218
JUMLAH		246	643	889	1.142
PROVINSI RIAU		2.940	8.812	11.752	8.823
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK				174,7	131,1

Sumber: Bidang SDK & Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor

a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali

**JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KODEKAB	KABUPATEN/KOTA	TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT			TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN			TENAGA GIZI		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	PUSKESMAS									
1401	KAMPAR	25	84	109	9	31	40	1	50	51
1402	INDRAGIRI HULU	17	40	57	9	18	27	2	23	25
1403	BENGKALIS	6	53	59	5	26	31	3	40	43
1404	INDRAGIRI HILIR	26	57	83	8	22	30	5	25	30
1405	PELALAWAN	19	52	71	2	12	14	2	29	31
1406	ROKAN HULU	20	59	79	6	22	28	4	34	38
1407	ROKAN HILIR	17	88	105	12	18	30	4	33	37
1408	SIAK	17	58	75	5	16	21	2	30	32
1409	KUANTAN SINGINGI	18	52	70	18	26	44	0	49	49
1410	KEPULAUAN MERANTI	7	26	33	4	6	10	1	14	15
1471	PEKANBARU	9	71	80	6	31	37	1	48	49
1472	DUMAI	7	23	30	6	2	8	0	28	28
JUMLAH		188	663	851	90	230	320	25	403	428
B	RUMAH SAKIT									
1401	KAMPAR	5	19	24	1	1	2	0	16	16
1402	INDRAGIRI HULU	2	2	4	0	0	0	2	8	10
1403	BENGKALIS	8	45	53	4	8	12	0	29	29
1404	INDRAGIRI HILIR	2	12	14	0	3	3	0	16	16
1405	PELALAWAN	17	36	53	3	7	10	0	24	24
1406	ROKAN HULU	5	20	25	2	7	9	0	1	1
1407	ROKAN HILIR	7	18	25	1	0	1	0	14	14
1408	SIAK	10	38	48	2	1	3	0	24	24
1409	KUANTAN SINGINGI	1	10	11	2	0	2	1	12	12
1410	KEPULAUAN MERANTI	3	10	13	0	0	0	0	7	7
1471	PEKANBARU	19	86	105	9	21	30	5	117	122
1472	DUMAI	7	23	30	6	2	8	0	3	3
JUMLAH		86	319	405	30	48	78	8	270	278
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN										
C	SARANA KESEHATAN LAINNYA									
1401	KAMPAR	3	5	8	0	2	2	1	9	10
1402	INDRAGIRI HULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1403	BENGKALIS	0	4	4	0	0	0	0	1	1
1404	INDRAGIRI HILIR	15	33	48	7	8	15	1	4	5
1405	PELALAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1406	ROKAN HULU	14	34	48	0	3	3	2	16	18
1407	ROKAN HILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1408	SIAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1409	KUANTAN SINGINGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410	KEPULAUAN MERANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1471	PEKANBARU	0	10	10	1	1	2	2	4	6
1472	DUMAI	10	25	35	2	6	8	0	6	6
JUMLAH		42	111	153	10	20	30	6	40	46
PROVINSI RIAU		274	982	1.256	120	278	398	33	673	706
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK				18,7			5,9			10,5

Sumber: Bidang SDK & Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor

a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali

**JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISIAN MEDIK MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KODEKAB	KABUPATEN/KOTA	AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK			TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA LAINNYA			KETERAPIAN FISIK			KETEKNISIAN MEDIK		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	PUSKESMAS												
1401	KAMPAR	1	57	58	0	0	0	0	0	0	8	59	67
1402	INDRAGIRI HULU	9	44	53	5	5	10	2	4	6	18	47	65
1403	BENGKALIS	6	36	42	0	0	0	0	0	0	3	16	19
1404	INDRAGIRI HILIR	18	24	42	9	29	38	2	2	4	5	26	31
1405	PELALAWAN	1	25	26	0	4	4	0	1	1	0	0	0
1406	ROKAN HULU	5	40	45	0	0	0	1	11	12	2	27	29
1407	ROKAN HILIR	7	57	64	0	0	0	4	28	32	5	30	35
1408	SIAK	1	1	2	6	21	27	0	0	0	6	21	27
1409	KUANTAN SINGINGI	0	2	2	6	40	46	0	2	2	8	32	40
1410	KEPULAUAN MERANTI	3	14	17	3	11	14	0	0	0	5	8	13
1471	PEKANBARU	3	50	53	2	41	43	0	0	0	5	33	38
1472	DUMAI	3	22	25	0	0	0	1	4	5	5	24	29
JUMLAH		57	372	429	31	151	182	10	52	62	70	323	393
B	RUMAH SAKIT												
1401	KAMPAR	2	13	15	4	9	13	3	5	8	5	12	17
1402	INDRAGIRI HULU	0	2	2	10	23	33	2	4	6	0	0	0
1403	BENGKALIS	10	81	91	19	25	44	11	29	40	23	45	68
1404	INDRAGIRI HILIR	7	25	32	17	39	56	7	5	12	0	0	0
1405	PELALAWAN	2	31	33	10	7	17	3	10	13	2	0	2
1406	ROKAN HULU	8	38	46	7	13	20	2	2	4	14	0	14
1407	ROKAN HILIR	1	3	4	18	35	53	4	3	7	16	16	32
1408	SIAK	1	4	5	14	39	53	1	2	3	11	0	11
1409	KUANTAN SINGINGI	0	1	1	15	27	42	0	1	1	13	0	13
1410	KEPULAUAN MERANTI	2	0	2	5	19	24	2	1	3	7	0	7
1471	PEKANBARU	0	0	0	172	465	637	43	30	73	120	0	120
1472	DUMAI	4	59	63	11	30	41	8	17	25	16	48	64
JUMLAH		37	257	294	302	731	1.033	86	109	195	227	121	348
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	SARANA KESEHATAN LAINNYA												
1401	KAMPAR	3	21	24	3	5	8	0	3	3	5	17	22
1402	INDRAGIRI HULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1403	BENGKALIS	2	13	15	1	2	3	1	1	2	1	5	6
1404	INDRAGIRI HILIR	7	11	18	0	1	0	2	2	4	1	2	3
1405	PELALAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1406	ROKAN HULU	1	8	9	0	0	0	2	16	18	2	16	18

KODEKAB	KABUPATEN/KOTA	AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK			TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA LAINNYA			KETERAPIAN FISIK			KETEKNISIAN MEDIS		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1407	ROKAN HILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1408	SIAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1409	KUANTAN SINGINGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410	KEPULAUAN MERANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1471	PEKANBARU	4	29	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1472	DUMAI	1	18	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		18	100	118	4	8	11	5	22	27	9	40	49
PROVINSI RIAU		94	629	723	333	882	1.215	96	161	257	297	444	741
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK				10,7			18,1			3,8			11,0

Sumber: Bidang SDK & Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor

a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali

**JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	TENAGA KEFARMASIAN								
		TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN			APOTEKER			TOTAL		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	PUSKESMAS									
1401	KAMPAR	2	41	43	2	23	25	4	64	68
1402	INDRAGIRI HULU	3	36	39	8	30	38	11	66	77
1403	BENGKALIS	5	45	50	4	33	37	9	78	87
1404	INDRAGIRI HILIR	7	24	31	6	19	26	14	43	57
1405	PELALAWAN	10	23	33	3	21	24	13	44	57
1406	ROKAN HULU	5	26	31	8	19	27	13	45	58
1407	ROKAN HILIR	4	63	67	3	56	59	7	119	126
1408	SIAK	3	35	38	0	22	22	3	57	60
1409	KUANTAN SINGINGI	3	31	34	4	35	39	7	66	73
1410	KEPULAUAN MERANTI	3	18	21	4	10	14	7	28	35
1471	PEKANBARU	4	32	36	6	24	30	10	56	66
1472	DUMAI	1	20	21	1	13	14	2	33	35
JUMLAH		50	394	444	49	305	355	100	699	799
B	RUMAH SAKIT									
1401	KAMPAR	3	14	17	0	9	9	3	23	26
1402	INDRAGIRI HULU	2	17	19	4	7	11	6	24	30
1403	BENGKALIS	15	91	106	7	45	52	22	136	158
1404	INDRAGIRI HILIR	5	23	28	1	21	22	6	44	50
1405	PELALAWAN	8	39	47	5	20	25	13	59	72
1406	ROKAN HULU	5	29	34	5	20	25	10	49	59
1407	ROKAN HILIR	6	30	36	2	36	38	8	66	74
1408	SIAK	1	30	31	1	18	19	2	48	50
1409	KUANTAN SINGINGI	4	10	14	2	15	17	6	25	31
1410	KEPULAUAN MERANTI	2	10	12	2	6	8	4	16	20
1471	PEKANBARU	39	370	409	33	235	268	72	605	677
1472	DUMAI	8	56	64	1	38	39	9	94	103
JUMLAH		98	719	817	63	470	533	161	1.189	1.350
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN										
C	SARANA KESEHATAN LAINNYA									
1401	KAMPAR	7	27	34	5	51	56	12	78	90
1402	INDRAGIRI HULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1403	BENGKALIS	0	9	9	3	21	24	3	30	33
1404	INDRAGIRI HILIR	3	11	14	5	23	28	8	34	42
1405	PELALAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1406	ROKAN HULU	0	27	27	15	49	64	15	76	91
1407	ROKAN HILIR	9	24	33	6	43	49	15	67	82
1408	SIAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1409	KUANTAN SINGINGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410	KEPULAUAN MERANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1471	PEKANBARU	4	47	51	14	131	145	18	178	196
1472	DUMAI	7	123	130	7	52	59	14	175	189
JUMLAH		30	268	298	55	370	425	85	638	723
PROVINSI RIAU		148	1.113	1.261	112	775	887	260	1.888	2.149
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK				18,7			13,2			31,9

Sumber: Bidang SDK & Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor

a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali

PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN

TOTAL

PEJABAT STRUKTURAL

TENAGA PENDIDIK

TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN

L	P	L+P
---	---	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

A	PUSKESMAS												
1401	KAMPAR	0	0	0	0	0	0	101	62	163	101	62	163
1402	INDRAGIRI HULU	5	9	14	0	0	0	137	226	363	142	235	377
1403	BENGKALIS	11	10	21	1	0	1	126	113	239	138	123	261
1404	INDRAGIRI HILIR	12	8	20	0	0	0	0	0	0	12	8	20
1405	PELALAWAN	1	3	4	1	5	6	77	72	149	79	80	159
1406	ROKAN HULU	9	4	13	0	0	0	66	63	129	75	67	142
1407	ROKAN HILIR	4	7	11	0	0	0	60	137	197	64	144	208
1408	SIAK	4	4	8	0	0	0	0	0	0	4	4	8
1409	KUANTAN SINGINGI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1410	KEPULAUAN MERANTI	0	0	0	0	0	0	34	19	53	34	19	53
1471	PEKANBARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1472	DUMAI	0	0	0	0	0	0	86	104	190	86	104	190

JUMLAH	47	45	92	2	5	7	687	796	1.483	736	846	1.582
--------	----	----	----	---	---	---	-----	-----	-------	-----	-----	-------

B	RUMAH SAKIT												
1401	KAMPAR	5	4	9	0	0	0	164	101	265	169	105	274
1402	INDRAGIRI HULU	5	9	14	0	0	0	45	62	107	50	71	121
1403	BENGKALIS	17	25	42	0	0	0	306	441	747	323	466	789
1404	INDRAGIRI HILIR	12	9	21	1	0	1	111	136	247	124	145	269
1405	PELALAWAN	16	41	57	0	0	0	62	99	161	78	140	218
1406	ROKAN HULU	5	6	11	0	0	0	167	190	357	172	196	368
1407	ROKAN HILIR	3	6	9	0	0	0	84	78	162	87	84	171
1408	SIAK	8	14	22	0	0	0	110	71	181	118	85	203
1409	KUANTAN SINGINGI	4	4	8	0	0	0	96	90	186	100	94	194
1410	KEPULAUAN MERANTI	3	1	4	0	0	0	31	16	47	34	17	51
1471	PEKANBARU	59	76	135	3	1	4	82	79	161	144	156	300
1472	DUMAI	11	12	23	0	0	0	354	349	703	365	361	726

[illegible]

JUMLAH	148	207	355	4	1	5	1.612	1.712	3.324	1.764	1.920	3.684
--------	-----	-----	-----	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

[illegible][illegible]

1401	KAMPAR	1	1	2	0	0	0	58	83	141	132	232	364
------	--------	---	---	---	---	---	---	----	----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

KODEKAB	KABUPATEN/KOTA	TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN									TOTAL		
		PEJABAT STRUKTURAL			TENAGA PENDIDIK			TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1403	BENGKALIS	0	1	1	0	0	0	22	58	80	22	59	81
1404	INDRAGIRI HILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1405	PELALAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1406	ROKAN HULU	2	7	9	1	1	2	125	77	202	128	85	213
1407	ROKAN HILIR	0	0	0	0	0	0	21	28	49	21	28	49
1408	SIAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1409	KUANTAN SINGINGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410	KEPULAUAN MERANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1471	PEKANBARU	4	1	5	0	0	0	261	370	631	265	371	636
1472	DUMAI	7	13	20	0	0	0	49	70	119	56	83	139
JUMLAH		14	23	37	1	1	2	536	686	1.222	624	858	1.482
PROVINSI RIAU		195	252	447	6	6	12	2.299	2.508	4.807	2.500	2.766	5.266
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK		6,6			0,2		71,4						

Sumber: Bidang SDK & Kefarmasian, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

Keterangan : - Pada penghitungan jumlah di tingkat kabupaten/kota, tenaga yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali

TABEL 19

**CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN PENDUDUK MENURUT JENIS KEPESERTAAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

NO	JENIS KEPESERTAAN	PESERTA JAMINAN KESEHATAN	
		JUMLAH	%
1	2	3	4
PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)			
1	PBI APBN	2,443,585	0.4
SUB JUMLAH PBI		1,557,610	0.2
		4,001,195	0.6
NON PBI			
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	1,860,364	0.3
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) /mandiri	910,149	0.1
3	Bukan Pekerja (BP)	97,905	0.0
SUB JUMLAH NON PBI		2,868,418	0.4
PROVINSI RIAU		6,869,613	1.0

Sumber : Bidang Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Riau,2024

**ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

NO	SUMBER BIAYA	ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN	
		Rupiah	%
1	2	3	4
	ANGGARAN KESEHATAN BERSUMBER:		
1.	APBD KAB/KOTA	Rp 5,601,654,428,708	
	a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kab/kota	Rp 5,137,237,725,446	91,71
	b. Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 423,291,142,624	7,55
	- DAK fisik	Rp 201,357,537,587	
	1. Reguler	Rp 158,762,676,856	
	2. Penugasan	Rp 32,295,065,687	
	3. Afirmasi	Rp0	
	- DAK non fisik	Rp 221,933,605,037	
	1. BOK	Rp 221,458,961,837	
	2. Akreditasi	Rp 282,256,200	
	3. Jampersal	Rp0	
	4. BOK Stunting	Rp0	
	5. BPOM	Rp192,387,000	
2.	APBD PROVINSI	Rp0	
	a. Belanja Langsung	Rp0	
	b. Belanja Tidak Langsung	Rp0	
	c. Dana Alokasi Khusus (DAK) : BOK	Rp0	
3.	APBN :	Rp41,125,221,544	0,73
	a. Dana Dekonsentrasi	Rp0	
	b. Lain-lain (sebutkan), misal bansos kapitasi	Rp41.125.221.544	
4.	PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) (sebutkan <i>project</i> dan sumber dananya)	Rp192.726.094	
5.	SUMBER PEMERINTAH LAIN*	Rp0	
TOTAL ANGGARAN KESEHATAN		Rp3.994.673.379.055	
TOTAL APBD KAB/KOTA		Rp29.782.245.480.320	
% APBD KESEHATAN THD APBD KAB/KOTA			13,4
ANGGARAN KESEHATAN PERKAPITA		Rp24.236	

Sumber: Sekretariat Dinkes Prov. Riau, 2024

TABEL 21

JUMLAH KELAHIRAN MENURUT JENIS KELAMIN MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAHIRAN								
		LAKI-LAKI			PEREMPUAN			LAKI-LAKI + PEREMPUAN		
		HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1401	KAMPAR	7,275	5	7,280	7,041	2	7,043	14,316	7	14,323
1402	INDRAGIRI HULU	3,549	11	3,560	3,432	14	3,446	6,981	25	7,006
1403	BENGKALIS	5,018	26	5,044	4,937	15	4,952	9,955	41	9,996
1404	INDRAGIRI HILIR	4,578	41	4,619	4,301	25	4,326	8,879	66	8,945
1405	PELALAWAN	3,606	3	3,609	3,485	4	3,489	7,091	7	7,098
1406	ROKAN HULU	4,993	6	4,999	4,820	8	4,828	9,813	14	9,827
1407	ROKAN HILIR	6,590	11	6,601	6,498	11	6,509	13,088	22	13,110
1408	SIAK	3,429	22	3,451	3,188	24	3,212	6,617	46	6,663
1409	KUANTAN SINGINGI	2,147	5	2,152	2,481	5	2,486	4,628	10	4,638
1410	KEPULAUAN MERANTI	1,285	10	1,295	1,139	9	1,148	2,424	19	2,443
1471	PEKANBARU	8,372	33	8,405	8,304	21	8,325	16,676	54	16,730
1472	DUMAI	4,540	17	4,557	4,328	9	4,337	8,868	26	8,894
PROVINSI RIAU		55,382	190	55,572	53,954	147	54,101	109,336	337	109,673
ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN)			3.4				2.7			

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024
Keterangan : Angka Lahir Mati (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan Angka Lahir Mati yang sebenarnya di populasi

TABEL 22

JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAHIR HIDUP	KEMATIAN IBU			
			JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL	JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN	JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS	JUMLAH KEMATIAN IBU
1	2	4	5	6	7	8
1401	KAMPAR	14,316	3	0	5	8
1402	INDRAGIRI HULU	6,981	3	1	9	13
1403	BENGKALIS	9,955	2	1	2	5
1404	INDRAGIRI HILIR	8,879	8	4	5	17
1405	PELALAWAN	7,091	2	0	0	2
1406	ROKAN HULU	9,813	2	0	3	5
1407	ROKAN HILIR	13,088	6	1	13	20
1408	SIAK	6,617	0	1	6	7
1409	KUANTAN SINGINGI	4,628	0	2	2	4
1410	KEPULAUAN MERANTI	2,424	1	2	2	5
1471	PEKANBARU	16,676	4	0	10	14
1472	DUMAI	8,868	1	1	5	7
JUMLAH (KAB/KOTA)		109,336	32	13	62	107
ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)						98

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

Keterangan:

- Jumlah kematian ibu = jumlah kematian ibu hamil + jumlah kematian ibu bersalin + jumlah kematian ibu nifas
- Angka Kematian Ibu (dilaporkan) tersebut di atas belum bisa menggambarkan AKI yang sebenarnya di populasi

TABEL 23

**JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	PENYEBAB KEMATIAN IBU									
		PERDARAHAN	GANGGUAN HIPERTENSI	INFEKSI	KELAINAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH*	GANGGUAN METABOLIK**	GANGGUAN CEREBRO VASKULAR***	COVID-19	KOMPLIKASI PASCA KEGUGURAN (ABORTUS)	LAIN-LAIN	JUMLAH KEMATIAN IBU
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1401	KAMPAR	1	1	1	0	1	0	0	0	5	9
1402	INDRAGIRI HULU	3	1	0	0	0	0	0	0	9	13
1403	BENGKALIS	1	1	1	0	0	0	0	0	2	5
1404	INDRAGIRI HILIR	0	5	0	0	0	0	0	0	12	17
1405	PELALAWAN	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
1406	ROKAN HULU	0	3	0	1	1	0	0	0	0	5
1407	ROKAN HILIR	7	6	0	0	0	0	0	0	7	20
1408	SIAK	1	1	0	0	0	0	0	0	5	7
1409	KUANTAN SINGINGI	1	1	0	0	0	0	0	0	2	4
1410	KEPULAUAN MERANTI	2	3	0	0	0	0	0	0	0	5
1471	PEKANBARU	3	5	3	1	2	0	0	0	0	14
1472	DUMAI	3	0	0	1	0	0	0	0	2	6
PROVINSI RIAU		22	28	5	3	4	0	0	0	45	107

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

- * penyakit jantung kongenital, PPCM (Peripartum cardiomyopathy), aneurisma aorta, dll
** SLE (Systemic lupus erthematosus), dll
*** stroke, aneurisma otak, dll

TABEL 24

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	IBU HAMIL							IBU BERSALIN/NIFAS								
		JUMLAH	K1		K4		K6		JUMLAH	PERSALINAN DI FASYANKES		KF1		KF LENGKAP		IBU NIFAS MENDAPAT VIT A	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1401	KAMPAR	17,121	15,676	91.6	15,028	87.8	14567	85.1	17,024	14,428	84.8	14,429	84.8	14,307	84.0	14,429	84.8
1402	INDRAGIRI HULU	8,753	6,759	77.2	7,327	83.7	6765	77.3	8,701	6,859	78.8	6,979	80.2	6,707	77.1	6,972	80.1
1403	BENGKALIS	11,354	11,296	99.5	10,670	94.0	9673	85.2	11,342	9,860	86.9	9,940	87.6	10,159	89.6	9,945	87.7
1404	INDRAGIRI HILIR	12,282	9,190	74.8	7,076	57.6	5003	40.7	12,223	6,320	51.7	7,336	60.0	5,726	46.8	7,490	61.3
1405	PELALAWAN	7,465	7,276	97.5	7,143	95.7	7057	94.5	7,435	7,091	95.4	7,384	99.3	7,295	98.1	7,384	99.3
1406	ROKAN HULU	11,296	10,499	92.9	9,955	88.1	8819	78.1	11,237	9,842	87.6	9,854	87.7	9,854	87.7	9,854	87.7
1407	ROKAN HILIR	13,003	12,526	96.3	5,156	39.7	6491	49.9	12,974	6,740	52.0	13,495	104.0	11,003	84.8	13,397	103.3
1408	SIAK	9,337	7,919	84.8	6,954	74.5	6872	73.6	9,276	5,810	62.6	6,641	71.6	6,386	68.8	6,640	71.6
1409	KUANTAN SINGINGI	6,576	5,224	79.4	4,864	74.0	4657	70.8	6,488	4,600	70.9	4,683	72.2	4,564	70.3	4,683	72.2
1410	KEPULAUAN MERANTI	3,952	2,501	63.3	2,438	61.7	2397	60.7	3,933	2,411	61.3	2,441	62.1	215	5.5	2,441	62.1
1471	PEKANBARU	17,556	15,776	89.9	15,460	88.1	15249	86.9	17,431	15,162	87.0	15,158	87.0	14,210	81.5	15,158	87.0
1472	DUMAI	5,869	9,331	159.0	8,923	152.0	8898	151.6	5,839	8,898	152.4	8,898	152.4	7,923	135.7	8,898	152.4
PROVINSI RIAU		124,564	113,973	91.5	100,994	81.1	96,448	77.4	123,903	98,021	79.1	107,238	86.5	98,349	79.4	107,291	74.64

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 25

**CAKUPAN IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH IBU HAMIL	IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL											
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5		Td2+	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1401	KAMPAR	17,121	1,135	6.6	1,337	7.8	2,735	16.0	3,361	19.6	3,585	20.9	11,018	64.4
1402	INDRAGIRI HULU	8,753	0	0.0	169	1.9	991	11.3	1,435	16.4	3,691	42.2	6,286	71.8
1403	BENGKALIS	11,354	17	0.1	75	0.7	1,480	13.0	3,079	27.1	6,558	57.8	11,192	98.6
1404	INDRAGIRI HILIR	12,282	434	3.5	880	7.2	1,445	11.8	983	8.0	910	7.4	4,218	34.3
1405	PELALAWAN	7,465	563	7.5	755	10.1	967	13.0	995	13.3	1,365	18.3	4,082	54.7
1406	ROKAN HULU	11,296	712	6.3	1,657	14.7	2,995	26.5	3,720	32.9	3,228	28.6	11,600	102.7
1407	ROKAN HILIR	13,003	1,521	11.7	1,912	14.7	4,220	32.5	4,730	36.4	4,265	32.8	15,127	116.3
1408	SIAK	9,337	371	4.0	525	5.6	724	7.8	679	7.3	977	10.5	2,905	31.1
1409	KUANTAN SINGINGI	6,576	170	2.6	196	3.0	470	7.1	815	12.4	376	5.7	1,857	28.2
1410	KEPULAUAN MERANTI	3,952	24	0.6	31	0.8	214	5.4	208	5.3	2,023	51.2	2,476	62.7
1471	PEKANBARU	17,556	73	0.4	235	1.3	511	2.9	1,209	6.9	7,724	44.0	9,679	55.1
1472	DUMAI	5,869	162	2.8	254	4.3	732	12.5	968	16.5	2,129	36.3	4,083	69.6
PROVINSI RIAU		124,564	5,182	4.2	8,026	6.4	17,484	14.0	22,182	17.8	36,831	29.6	84,523	67.9

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 26

**PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH WUS TIDAK HAMIL (15-39 TAHUN)	IMUNISASI Td PADA WUS TIDAK HAMIL									
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1401	KAMPAR	166,376	790	0.5	575	0.3	1,197	0.7	1,105	0.7	1,564	0.9
1402	INDRAGIRI HULU	112,147	0	0.0	1,225	1.1	4,494	4.0	4,483	4.0	10,285	9.2
1403	BENGKALIS	113,430	0	0.0	77	0.1	811	0.7	737	0.6	1,037	0.9
1404	INDRAGIRI HILIR	125,933	483	0.4	488	0.4	1,017	0.8	509	0.4	559	0.4
1405	PELALAWAN	116,415	131	0.1	155	0.1	243	0.2	223	0.2	194	0.2
1406	ROKAN HULU	152,173	374	0.2	907	0.6	1,787	1.2	2,096	1.4	2,217	1.5
1407	ROKAN HILIR	155,052	142	0.1	506	0.3	2,026	1.3	3,157	2.0	966	0.6
1408	SIAK	105,156	153	0.1	308	0.3	528	0.5	243	0.2	319	0.3
1409	KUANTAN SINGINGI	64,781	71	0.1	213	0.3	1,059	1.6	841	1.3	3,655	5.6
1410	KEPULAUAN MERANTI	44,709	23	0.1	76	0.2	101	0.2	81	0.2	427	1.0
1471	PEKANBARU	158,966	6,660	4.2	6,682	4.2	6,230	3.9	5,975	3.8	827	0.5
1472	DUMAI	58,039	97	0.2	95	0.2	259	0.4	283	0.5	474	0.8
PROVINSI RIAU		1,373,177	8,924	0.6	11,307	0.8	19,752	1.4	19,733	1.4	22,524	1.6

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 27

PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS	JUMLAH WUS (15-39 TAHUN)	IMUNISASI Td PADA WUS									
				Td1		Td2		Td3		Td4		Td5	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1401	KAMPAR	31	184,168	1,997	1.1	1,912	1.0	3,840	2.1	4,466	2.4	5,149	2.8
1402	INDRAGIRI HULU	20	112,147	454	0.4	1,394	1.2	2,216	2.0	5,918	5.3	13,976	12.5
1403	BENGKALIS	20	125,122	161	0.1	267	0.2	1,381	1.1	2,251	1.8	3,591	2.9
1404	INDRAGIRI HILIR	30	136,807	917	0.7	1,368	1.0	2,462	1.8	1,492	1.1	1,469	1.1
1405	PELALAWAN	14	120,949	715	0.6	930	0.8	1,411	1.2	1,580	1.3	1,369	1.1
1406	ROKAN HULU	23	152,172	1,086	0.7	2,564	1.7	4,782	3.1	5,816	3.8	5,445	3.6
1407	ROKAN HILIR	21	13,002	137	1.1	604	4.6	1,493	11.5	2,261	17.4	2,221	17.1
1408	SIAK	16	105,156	524	0.5	833	0.8	1,252	1.2	922	0.9	1,296	1.2
1409	KUANTAN SINGINGI	25	58,171	105	0.2	270	0.5	1,198	2.1	1,131	1.9	4,774	8.2
1410	KEPULAUAN MERANT	10	33,821	39	0.1	126	0.4	338	1.0	376	1.1	595	1.8
1471	PEKANBARU	21	134,677	89	0.1	283	0.2	550	0.4	1,233	0.9	4,930	3.7
1472	DUMAI	10	68,053	248	0.4	327	0.5	963	1.4	1,122	1.6	2,451	3.6
PROVINSI RIAU		241	1,244,245	6,472	0.5	10,878	0.9	21,886	1.8	28,568	2.3	47,266	3.8

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 28

JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN DAN MENGONSUMSI TABLET TAMBAH DARAH (TTD) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS	JUMLAH IBU HAMIL	TTD (90 TABLET)			
				IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN	%	IBU HAMIL YANG MENGONSUMSI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1401	KAMPAR	31	17,121	15,028	87.78	15,028	87.78
1402	INDRAGIRI HULU	20	8,753	7,328	83.72	7,328	83.72
1403	BENGKALIS	20	11,354	11,296	99.49	10,670	93.98
1404	INDRAGIRI HILIR	30	12,282	8,079	65.78	8,079	65.78
1405	PELALAWAN	14	7,465	2,495	33.42	2,495	33.42
1406	ROKAN HULU	23	11,296	9,955	88.13	9,955	88.13
1407	ROKAN HILIR	21	13,003	13,799	106.12	13,799	106.12
1408	SIAK	16	9,337	6,929	74.21	6,929	74.21
1409	KUANTAN SENGINGI	25	6,576	3,753	57.07	3,671	55.82
1410	KEP. MERANTI	10	3,952	2,495	63.13	2,495	63.13
1471	PEKANBARU	21	17,556	11,869	67.61	11,848	67.49
1472	DUMAI	10	10,014	9,013	90.00	8,772	87.60
PROVINSI RIAU		241	128,709	102,039	79.28	101,069	78.53

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 29

PESERTA KB AKTIF METODE MODERN MENURUT JENIS KONTRASEPSI,DAN PESERTA KB AKTIF MENGALAMI EFEK SAMPING, KOMPLIKASI KEGAGALAN DAN DROP OUT MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUS	PESERTA KB AKTIF METODE MODERN																		EFEK SAMPING BER-KB	%	KOMPLIK ASI BER- KB	%	KEGAGAL AN BER- KB	%	DROP OUT BER- KB	%
			KONDOM	%	PIL	%	SUNTIK	%	AKDR	%	IMPLAN	%	MOW	%	MOP	%	MAL	%	JUMLAH	%								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1401	KAMPAR	162,919	6,186	5.5	23,418	20.7	55,310	49.0	3,276	2.9	11,148	9.9	2,458	2.2	31	0.0	49	0.0	112,975	69.3	436	0.4	85	0.1	40	0.0	2,960	2.6
1402	INDRAGIRI HULU	87,446	1,839	3.3	9,690	17.2	25,731	45.8	1,926	3.4	8,259	14.7	493	0.9	41	0.1	586	1.0	56,238	64.3	6	0.0	17	0.0	56	0.1	4,082	7.3
1403	BENGKALIS	94,860	2,503	4.6	9,144	16.7	32,291	58.9	1,134	2.1	4,846	8.8	86	0.2	0	0.0	0	0.0	54,850	57.8	25	0.0	33	0.1	22	0.0	20	0.0
1404	INDRAGIRI HILIR	114,068	2,640	3.2	20,164	24.5	50,885	61.9	2,083	2.5	2,834	3.4	158	0.2	611	0.7	0	0.0	82,209	72.1	187	0.2	317	0.4	41	0.0	1,114	1.4
1405	PELALAWAN	81,065	3,588	4.7	18,338	24.0	24,526	32.1	13,209	17.3	8,152	10.7	441	0.6	20	0.0	0	0.0	76,426	94.3	0	0.0	53	0.1	5	0.0	0	0.0
1406	ROKAN HULU	110,979	1,824	11.3	4,038	24.9	5,689	35.1	866	5.3	1,844	11.4	101	0.6	0	0.0	471	2.9	16,206	14.6	496	3.1	196	1.2	41	0.3	2,764	17.1
1407	ROKAN HILIR	113,832	6,454	8.3	22,890	29.6	38,869	50.2	1,225	1.6	3,913	5.1	81	0.1	11	0.0	0	0.0	77,356	68.0	0	0.0	55	0.1	19	0.0	2,279	2.9
1408	SIAK	85,197	1,698	2.5	21,708	32.5	32,710	48.9	7,526	11.3	1,356	2.0	347	0.5	178	0.3	421	0.6	66,879	78.5	256	0.4	170	0.3	181	0.3	314	0.5
1409	KUANTAN SINGINGI	61,890	898	2.6	5,159	15.0	17,819	51.9	1,999	5.8	3,985	11.6	450	1.3	55	0.2	154	0.4	34,350	55.5	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0
1410	KEPULAUAN MERANTI	32,928	809	3.6	3,490	15.5	12,425	55.1	449	2.0	2,393	10.6	485	2.2	111	0.5	1,042	4.6	22,555	68.5	387	1.7	6	0.0	2	0.0	464	2.1
1471	PEKANBARU	166,869	1,353	6.2	4,267	19.6	7,166	32.9	1,248	5.7	3,756	17.3	198	0.9	23	0.1	1,691	7.8	21,767	13.0	30	0.1	0	0.0	11	0.1	6,705	30.8
1472	DUMAI	56,287	6,467	12.7	14,318	28.1	23,218	45.6	1,287	2.5	2,792	5.5	28	0.1	0	0.0	1,078	2.1	50,902	90.4	1,192	2.3	0	0.0	24	0.0	116	0.2
PROVINSI RIAU		1,168,340	36,259	5.9	156,624	25.4	326,639	52.9	36,228	5.9	55,278	9.0	5,326	0.9	1,081	0.2	5,492	0.9	617,435	52.8	3,016	0.5	933	0.2	442	0.1	20,818	3.4

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

Keterangan:

AKDR: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim

MOP : Metode Operasi Pria

MOW : Metode Operasi Wanita

MAL : Metode Amenore Laktasi

TABEL 30

**PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DENGAN STATUS 4 TERLALU (4T) DAN ALKI YANG MENJADI PESERTA KB AKTIF
MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS	JUMLAH PUS	PUS 4T	%	PUS 4T PADA KB AKTIF	%	PUS ALKI	%	PUS ALKI PADA KB AKTIF	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1401	KAMPAR	31	162,919	19,558	12.0	3,284	16.8	0	0.0	0	0.0
1402	INDRAGIRI HULU	20	87,446	7,129	8.2	2,289	32.1	0	0.0	370	0.0
1403	BENGKALIS	20	94,860	16,500	17.4	3,099	18.8	0	0.0	0	0.0
1404	INDRAGIRI HILIR	30	114,068	13,603	11.9	7,969	58.6	4,144	3.6	1,128	27.2
1405	PELALAWAN	14	81,065	5,664	7.0	5,664	100.0	0	0.0	0	0.0
1406	ROKAN HULU	23	110,979	16,618	15.0	3,264	19.6	0	0.0	0	0.0
1407	ROKAN HILIR	21	113,832	18,158	16.0	6,230	34.3	6,397	5.6	5,489	85.8
1408	SIAK	16	85,197	17,039	20.0	642	3.8	154	0.2	32	20.8
1409	KUANTAN SINGINGI	25	61,890	8,029	13.0	3,721	46.3	58	0.1	58	100.0
1410	KEPULAUAN MERANTI	10	32,928	5,664	17.2	5,473	96.6	0	0.0	0	0.0
1471	PEKANBARU	21	166,869	13,570	8.1	2,686	19.8	0	0.0	84	0.0
1472	DUMAI	10	56,287	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
PROVINSI RIAU		241	1,168,340	141,532	12.1	44,321	31.3	10,753	0.0	7,161	66.6

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

Keterangan :

ALKI : Anemia, LiLA<23,5, Penyakit Kronis, dan IMS

4 Terlalu (4T), yaitu : 1) berusia kurang dari 20 tahun; 2) berusia lebih dari 35 tahun; 3) telah memiliki anak hidup lebih dari 3 orang; anak dengan lainnya kurang dari 2 tahun, atau

4) jarak kelahiran antara satu

TABEL 31

CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH IBU BERSALIN	PESERTA KB PASCA PERSALINAN																	
			KONDOM	%	SUNTIK	%	PIL	%	AKDR	%	MOP	%	MOW	%	IMPLAN	%	MAL	%	JUMLAH	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1401	KAMPAR	17,024	382	18.4	837	40.3	644	31.0	53	2.5	0	0.0	23	1.1	140	6.7	0	0.0	2,079	12.2
1402	INDRAGIRI HULU	8,701	88	3.0	1,794	60.3	512	17.2	64	2.2	0	0.0	20	0.7	497	16.7	643	21.6	2,975	34.2
1403	BENGKALIS	11,342	198	8.1	1,449	59.4	370	15.2	107	4.4	0	0.0	1	0.0	316	12.9	0	0.0	2,441	21.5
1404	INDRAGIRI HILIR	12,223	1,420	19.6	2,968	40.9	2,456	33.8	120	1.7	6	0.1	11	0.2	275	3.8	0	0.0	7,262	59.4
1405	PELALAWAN	7,435	102	42.5	0	0.0	138	57.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	240	3.2
1406	ROKAN HULU	11,237	711	9.7	3,509	47.8	2,367	32.3	254	3.5	0	0.0	79	1.1	414	5.6	266	3.6	7,334	65.3
1407	ROKAN HILIR	12,974	1,322	14.8	3,839	42.9	2,985	33.3	55	0.6	0	0.0	57	0.6	695	7.8	0	0.0	8,953	69.0
1408	SIAK	9,276	177	4.4	1,893	47.1	1,088	27.1	298	7.4	9	0.2	124	3.1	417	10.4	154	3.8	4,015	43.3
1409	KUANTAN SINGINGI	6,488	31	1.9	1,312	79.3	115	6.9	59	3.6	0	0.0	18	1.1	120	7.3	0	0.0	1,655	25.5
1410	KEPULAUAN MERANTI	3,933	27	1.5	715	39.1	139	7.6	25	1.4	0	0.0	33	1.8	123	6.7	766	41.9	1,828	46.5
1471	PEKANBARU	17,431	591	7.8	3,999	52.7	1,049	13.8	693	9.1	24	0.3	184	2.4	1,027	13.5	204	2.7	7,591	43.5
1472	DUMAI	5,839	908	11.7	3,829	49.2	2,179	28.0	275	3.5	0	0.0	34	0.4	551	7.1	486	6.3	7,776	133.2
PROVINSI RIAU		123,903	5,957	10.7	26,144	46.8	14,042	25.1	2,003	3.6	39	0.1	584	1.0	4,575	8.2	2,519	4.5	55,863	45.1

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 32

JUMLAH DAN PERSENTASE KOMPLIKASI KEBIDANAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH IBU HAMIL	PERKIRAAN BUMIL DENGAN KOMPLIKASI KEBIDANAN	BUMIL DENGAN KOMPLIKASI KEBIDANAN YANG DITANGANI		JUMLAH KOMPLIKASI KEBIDANAN											JUMLAH KOMPLIKASI DALAM KEHAMILAN	JUMLAH KOMPLIKASI DALAM PERSALINAN	JUMLAH KOMPLIKASI PASCA PERSALINAN (NIFAS)
				JUMLAH	%	KURANG ENERGI KRONIS (KEK)	ANEMIA	PERDARAHAN	TUBERKULOSIS	MALARIA	INFEKSI LAINNYA	PREKLAMPSIA/ EKLAMSIDA	DIABETES MELITUS	JANTUNG	COVID-19	PENYEBAB LAINNYA			
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1401	KAMPAR	17,121	3,424	1,065	31.1	942	591	19	1	0	1	38	8	1	0	0	1,601	0	0
1402	INDRAGIRI HULU	8,753	1,751	1,450	82.8	429	667	5	0	0	2	28	5	1	0	322	1,064	433	7
1403	BENGKALIS	11,354	2,271	1,614	71.1	823	2,284	26	3	0	0	34	22	3	1	470	1,380	232	2
1404	INDRAGIRI HILIR	12,282	2,456	591	24.1	1,637	177	0	5	0	0	272	0	0	0	96	2,187	0	0
1405	PELALAWAN	7,465	1,493	2,233	149.6	394	296	58	0	0	1	57	0	0	0	167	664	505	2
1406	ROKAN HULU	11,296	2,259	849	37.6	459	414	12	0	0	13	4	0	1	0	0	903	0	0
1407	ROKAN HILIR	13,003	2,601	411	15.8	1,665	2,096	100	0	1	0	117	9	0	0	315	411	0	0
1408	SIAK	9,337	1,867	922	49.4	670	540	51	1	0	1	85	31	4	0	0	922	1	6
1409	KUANTAN SINGINGI	6,576	1,315	716	54.4	300	878	12	0	0	2	45	2	2	0	389	1,630	2	2
1410	KEPULAUAN MERANTI	3,952	790	666	84.3	248	215	15	0	0	1	49	4	0	0	50	582	4	0
1471	PEKANBARU	17,556	3,511	1,285	36.6	479	1,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,384	0	0
1472	DUMAI	5,869	2,003	1,644	82.1	468	478	68	1	0	20	65	4	1	0	537	1,325	315	4
PROVINSI RIAU		124,564	24,913	13,446	54.0	8,514	10,541	366	11	1	41	794	85	13	1	2,346	15,053	1,492	23

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 33

JUMLAH DAN PERSENTASE KOMPLIKASI NEONATAL
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAHIR HIDUP			PERKIRAAN NEONATAL KOMPLIKASI			JUMLAH KOMPLIKASI PADA NEONATUS															
								BBLR		ASFIKSIA		INFEKSI		TETANUS NEONATOR UM		KELAINAN KONGENIT AL		COVID-19		LAIN-LAIN		TOTAL	
		L	P	L + P	L	P	L + P	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1401	KAMPAR	7,275	7,041	14,316	1,091	1,056	2,147	277	12.90	7	0.3	2	0.1	0	0.0	10	0.5	0	0.0	8	0.4	304	14.2
1402	INDRAGIRI HULU	3,549	3,432	6,981	532	515	1,047	63	6.02	10	1.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	15	1.4	90	8.6
1403	BENGKALIS	5,018	4,937	9,955	753	741	1,493	26	1.74	22	1.5	6	0.4	0	0.0	5	0.3	0	0.0	16	1.1	75	5.0
1404	INDRAGIRI HILIR	4,578	4,301	8,879	687	645	1,332	282	21.17	47	3.5	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	31	2.3	361	27.1
1405	PELALAWAN	3,606	3,485	7,091	541	523	1,064	48	4.51	5	0.5	75	7.1	0	0.0	5	0.5	0	0.0	437	41.1	570	53.6
1406	ROKAN HULU	4,993	4,820	9,813	749	723	1,472	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1407	ROKAN HILIR	6,590	6,498	13,088	989	975	1,963	214	10.90	14	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	315	16.0	543	27.7
1408	SIAK	3,429	3,188	6,617	514	478	993	179	18.03	10	1.0	2	0.2	0	0.0	3	0.3	0	0.0	203	20.5	397	40.0
1409	KUANTAN SINGINGI	2,147	2,481	4,628	322	372	694	116	16.71	25	3.6	3	0.4	3	0.4	0	0.0	0	0.0	18	2.6	165	23.8
1410	KEPULAUAN MERANTAU	1,285	1,139	2,424	193	171	364	103	28.33	4	1.1	0	0.0	0	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	107	29.5
1471	PEKANBARU	8,372	8,304	16,676	1,256	1,246	2,501	278	11.11	146	5.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	74	3.0	498	19.9
1472	DUMAI	4,540	4,328	8,868	681	649	1,330	81	6.09	74	5.6	2	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	71	5.3	229	17.2
PROVINSI RIAU		55,382	53,954	109,336	8,307	8,093	16,400	1,667	10.16	364	2.2	92	0.6	3	0.0	25	0.2	0	0.0	1,188	7.2	3,339	20.4

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 34

JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, POST NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN														
		LAKI - LAKI					PEREMPUAN					LAKI - LAKI + PEREMPUAN				
		NEONATAL	POST NEONATAL	BALITA			NEONAT AL	POST NEONATAL	BALITA			NEONATAL	POST NEONATAL	BALITA		
				BAYI	ANAK BALITA	JUMLAH TOTAL			BAYI	ANAK BALITA	JUMLAH TOTAL			BAYI	ANAK BALITA	JUMLAH TOTAL
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22
1401	KAMPAR	46	3	49	0	49	20	4	24	3	27	66	7	73	3	76
1402	INDRAGIRI HULU	28	2	30	0	30	19	4	23	0	23	47	6	53	0	53
1403	BENGKALIS	45	4	49	0	49	31	4	35	1	36	76	8	84	1	85
1404	INDRAGIRI HILIR	70	6	76	1	77	46	4	50	0	50	116	10	126	1	127
1405	PELALAWAN	14	0	14	1	15	8	0	8	1	9	22	0	22	2	24
1406	ROKAN HULU	35	0	35	0	35	29	1	30	0	30	64	1	65	0	65
1407	ROKAN HILIR	29	5	34	0	34	17	2	19	1	20	46	7	53	1	54
1408	SIAK	31	5	36	3	39	16	3	19	3	22	47	8	55	6	61
1409	KUANTAN SINGINGI	40	4	44	3	47	24	2	26	0	26	64	6	70	3	73
1410	KEPULAUAN MERANTI	19	4	23	0	23	10	2	12	1	13	29	6	35	1	36
1471	PEKANBARU	43	7	50	2	52	31	9	40	2	42	74	16	90	4	94
1472	DUMAI	48	6	54	13	67	26	9	35	8	43	74	15	89	21	110
JUMLAH (KAB/KOTA)		448	46	494	23	517	277	44	321	20	341	725	90	815	43	858
ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)		8.1		8.9	0.4	9.3	5.1		5.9	0.4	6.3	6.6		7.5	0.4	7.8

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024
Keterangan : - Angka Kematian (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan AKN/AKB/AKABA yang sebenarnya di populasi

TABEL 35

JUMLAH KEMATIAN NEONATAL DAN POST NEONATAL MENURUT PENYEBAB UTAMA DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE	KABUPATEN/KOTA	PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI)								PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29 HARI-11 BULAN)									
		BBLR DAN PREMATURITAS	ASFIKZIA	TETANUS NEONATORUM	INFEKSI	KELAINAN KONGENITAL	COVID- 19	KELAINAN CARDIOVASKUL AR DAN RESPIRATORI	LAIN- LAIN	KONDISI PERINATAL	PNEUM ONIA	DIARE	KELAINAN KONGENIT AL JANTUNG	KELAINAN KONGENITA L LANNYA	MENIN GITIS	PENYAKI T SARAF	DEMAM BERDARAH	LAIN- LAIN	TENGSELAM, CEDERA, KECELAKAAN
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1401	KAMPAR	31	15	0	1	12	0	0	7	0	0	1	0	3	0	0	0	3	0
1402	INDRAGIRI HULU	21	10	0	0	1	0	0	15	1	3	0	0	0	0	0	0	2	0
1403	BENGKALIS	26	23	0	6	5	0	0	16	0	3	0	0	0	0	1	0	4	0
1404	INDRAGIRI HILIR	42	48	0	3	7	0	0	16	1	1	4	0	0	0	0	0	4	0
1405	PELALAWAN	3	9	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1406	ROKAN HULU	23	14	0	8	13	0	0	6	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0
1407	ROKAN HILIR	20	4	0	2	11	0	0	9	0	1	1	0	0	0	1	0	4	0
1408	SIAK	15	14	0	1	6	0	0	11	0	3	2	0	1	0	0	0	2	0
1409	KUANTAN SINGINGI	29	21	1	4	5	0	0	4	1	3	0	0	2	0	0	0	0	0
1410	KEPULAUAN MERANTI	5	3	0	0	1	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
1471	PEKANBARU	23	23	0	9	7	0	0	12	4	8	0	0	4	0	0	0	0	0
1472	DUMAI	6	11	0	9	2	0	0	46	0	1	0	0	8	0	1	0	5	0
PROVINSI RIAU		244	195	1	43	75	0	0	167	7	25	8	0	19	0	3	0	31	0

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 36

JUMLAH KEMATIAN ANAK BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	PENYEBAB KEMATIAN ANAK BALITA (12-59 BULAN)									
		PNEUMONIA	KELAINAN KONGENITAL	PENYAKIT SARAF	DEMAM BERDARAH	KELAINAN KONGENITAL JANTUNG	TENGGELOM, CEDERA , KECELAKAAN LALU LINTAS	KELAINAN KONGENITAL LAINNYA	COVID-19	DIARE	LAIN-LAIN
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1401	KAMPAR	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
1402	INDRAGIRI HULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1403	BENGKALIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1404	INDRAGIRI HILIR	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1405	PELALAWAN	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1406	ROKAN HULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1407	ROKAN HILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1408	SIAK	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
1409	KUANTAN SINGINGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
1410	KEPULAUAN MERANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1471	PEKANBARU	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0
1472	DUMAI	1	1	0	0	0	1	0	0	2	16
PROVINSI RIAU		1	6	3	0	0	3	0	0	4	26

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 37

BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DAN PREMATUR MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAHIR HIDUP			BAYI BARU LAHIR DITIMBANG						BAYI BBLR						PREMATUR					
					L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P	
		L	P	L + P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1401	KAMPAR	7,275	7,041	14,316	7,275	100.0	7,041	100.0	14,316	100.0	142	2.0	135	1.9	277	1.93	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1402	INDRAGIRI HULU	3,549	3,432	6,981	3,548	100.0	3,431	100.0	6,979	100.0	10	0.3	11	0.3	21	0.30	13	0.4	7	0.2	20	0.3
1403	BENGKALIS	5,018	4,937	9,955	5,018	100.0	4,937	100.0	9,955	100.0	16	0.3	10	0.2	26	0.26	7	0.1	4	0.1	11	0.1
1404	INDRAGIRI HILIR	4,578	4,301	8,879	4,465	97.5	4,253	98.9	8,718	98.2	156	3.5	127	3.0	283	3.25	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1405	PELALAWAN	3,606	3,485	7,091	5,072	140.7	5,014	143.9	10,086	142.2	21	0.4	27	0.5	48	0.48	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1406	ROKAN HULU	4,993	4,820	9,813	4,993	100.0	4,820	100.0	9,813	100.0	44	0.9	50	1.0	94	0.96	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1407	ROKAN HILIR	6,590	6,498	13,088	6,590	100.0	6,498	100.0	13,088	100.0	35	0.5	48	0.7	83	0.63	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1408	SIAK	3,429	3,188	6,617	3,451	100.6	3,212	100.8	6,663	100.7	61	1.8	62	1.9	123	1.85	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1409	KUANTAN SINGINGI	2,147	2,481	4,628	2,147	100.0	2,027	81.7	4,174	90.2	67	3.1	49	2.4	116	2.78	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1410	KEPULAUAN MERANTI	1,285	1,139	2,424	1,285	100.0	1,139	100.0	2,424	100.0	63	4.9	48	4.2	111	4.58	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1471	PEKANBARU	8,372	8,304	16,676	5,052	60.3	4,930	59.4	9,982	59.9	144	2.9	134	2.7	278	2.79	1	0.0	3	0.0	4	0.0
1472	DUMAI	4,540	4,328	8,868	4,543	100.1	4,325	99.9	8,868	100.0	92	2.0	99	2.3	191	2.15	28	0.6	27	0.6	55	0.6
PROVINSI RIAU		55,382	53,954	109,336	53,439	96.5	51,627	95.7	105,066	96.1	851	1.6	800	1.5	1,651	1.57	49	0.1	41	0.1	90	0.1

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 38

CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAHIR HIDUP			KUNJUNGAN NEONATAL 1 KALI (KN1)						KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP)						BAYI BARU LAHIR YANG DILAKUKAN SCREENING HIPOTIROID KONGENITAL					
					L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P	
		L	P	L + P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1401	KAMPAR	7,275	7,041	14,316	7,275	100.0	7,041	100.0	14,316	100.0	7,093	97.5	6,873	97.6	13,966	97.6	1,470	20.2	1,450	20.6	2,920	20.4
1402	INDRAGIRI HULU	3,549	3,432	6,981	3,548	100.0	3,431	100.0	6,979	100.0	3,470	97.8	3,352	97.7	6,822	97.7	605	17.0	725	21.1	1,330	19.1
1403	BENGKALIS	5,018	4,937	9,955	5,018	100.0	4,937	100.0	9,955	100.0	4,998	99.6	4,789	97.0	9,787	98.3	1,002	20.0	931	18.9	1,933	19.4
1404	INDRAGIRI HILIR	4,578	4,301	8,879	4,246	92.7	3,998	93.0	8,244	92.8	4,119	90.0	3,861	89.8	7,980	89.9	698	15.2	635	14.8	1,333	15.0
1405	PELALAWAN	3,606	3,485	7,091	3,436	95.3	3,655	104.9	7,091	100.0	3,436	95.3	3,655	104.9	7,091	100.0	247	6.8	219	6.3	466	6.6
1406	ROKAN HULU	4,993	4,820	9,813	5,011	100.4	4,839	100.4	9,850	100.4	4,760	95.3	4,573	94.9	9,333	95.1	369	7.4	295	6.1	664	6.8
1407	ROKAN HILIR	6,590	6,498	13,088	7,579	115.0	7,510	115.6	15,089	115.3	4,785	72.6	4,615	71.0	9,400	71.8	630	9.6	637	9.8	1,267	9.7
1408	SIAK	3,429	3,188	6,617	3,432	100.1	3,222	101.1	6,654	100.6	3,401	99.2	3,223	101.1	6,624	100.1	430	12.5	422	13.2	852	12.9
1409	KUANTAN SINGINGI	2,147	2,481	4,628	2,155	100.4	2,095	84.4	4,250	91.8	2,340	109.0	2,224	89.6	4,564	98.6	529	24.6	482	19.4	1,011	21.8
1410	KEPULAUAN MERANTI	1,285	1,139	2,424	1,286	100.1	1,138	99.9	2,424	100.0	1,273	99.1	1,147	100.7	2,420	99.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1471	PEKANBARU	8,372	8,304	16,676	7,740	92.5	7,407	89.2	15,147	90.8	7,362	87.9	7,047	84.9	14,409	86.4	8,450	100.9	7,792	93.8	16,242	97.4
1472	DUMAI	4,540	4,328	8,868	4,540	100.0	4,328	100.0	8,868	100.0	4,540	100.0	4,328	100.0	8,868	100.0	2,071	45.6	1,832	42.3	3,903	44.0
PROVINSI RIAU		55,382	53,954	109,336	55,266	99.8	53,601	99.3	108,867	99.6	51,577	93.1	49,687	92.1	101,264	92.6	16,501	29.8	15,420	28.6	31,921	29.2

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 39

BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD* DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI < 6 BULAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	BAYI BARU LAHIR				BAYI USIA < 6 BULAN		
		JUMLAH	DATA RILL (eppgbm)	MENDAPAT IMD		JUMLAH BAYI YANG DI RECALL	DIBERI ASI EKSKLUSIF	
			JUMLAH	JUMLAH	%		JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1401	KAMPAR	14,316	7,108	6,401	90.05	3,267	2,810	86.01
1402	INDRAGIRI HULU	6,981	4,495	3,839	85.41	2,139	1,398	65.36
1403	BENGKALIS	9,955	6,684	6,762	101.17	1,378	981	71.19
1404	INDRAGIRI HILIR	8,879	4,475	4,598	102.75	1,419	1,022	72.02
1405	PELALAWAN	7,091	2,379	1,987	83.52	1,637	1,590	97.13
1406	ROKAN HULU	9,813	6,607	5,716	86.51	2,185	1,839	84.16
1407	ROKAN HILIR	13,088	7,832	7,123	90.95	1,547	1,365	88.24
1408	SIAK	6,617	5,044	4,594	91.08	1,622	1,264	77.93
1409	KUANTAN SINGINGI	4,628	3,575	3,176	88.84	1,424	922	64.75
1410	KEPULAUAN MERANTI	2,424	1,960	1,795	91.58	879	514	58.48
1471	PEKANBARU	16,676	12,054	10,917	90.57	1,756	1,268	72.21
1472	DUMAI	8,868	5,894	4,243	71.99	2,433	1,239	50.92
PROVINSI RIAU		109,336	68,107	61,151	89.79	21,686	16,212	74.76

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024
Keterangan: IMD = Inisiasi Menyusui Dini

TABEL 40

**CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BAYI			PELAYANAN KESEHATAN BAYI					
		L	P	L + P	L		P		L + P	
					JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1401	KAMPAR	8,374	7,977	16,351	7,093	84.7	6,873	86.2	13,966	85.4
1402	INDRAGIRI HULU	3,952	3,761	7,713	3,470	87.8	3,352	89.1	6,822	88.4
1403	BENGKALIS	5,568	5,395	10,963	4,998	89.8	4,789	88.8	9,787	89.3
1404	INDRAGIRI HILIR	6,001	5,745	11,746	4,119	68.6	3,861	67.2	7,980	67.9
1405	PELALAWAN	3,370	3,237	6,607	3,436	102.0	3,655	112.9	7,091	107.3
1406	ROKAN HULU	5,516	5,264	10,780	4,760	86.3	4,573	86.9	9,333	86.6
1407	ROKAN HILIR	5,752	5,503	11,255	4,785	83.2	4,615	83.9	9,400	83.5
1408	SIAK	4,055	3,911	7,966	3,401	83.9	3,223	82.4	6,624	83.2
1409	KUANTAN SINGINGI	3,105	2,934	6,039	2,340	75.4	2,224	75.8	4,564	75.6
1410	KEPULAUAN MERANTI	1,851	1,703	3,554	1,273	68.8	1,147	67.4	2,420	68.1
1471	PEKANBARU	8,434	8,048	16,482	7,362	87.3	7,047	87.6	14,409	87.4
1472	DUMAI	2,563	2,501	5,064	4,540	177.1	4,328	173.1	8,868	175.1
JUMLAH (KAB/KOTA)		58,541	55,979	114,520	51,577	88.1	49,687	89	101,264	88.4

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 41

**CAKUPAN DESA/KELURAHAN *UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION (UCI)* MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	DESA/ KELURAHAN <i>UCI</i>	% DESA/ KELURAHAN <i>UCI</i>
1	2	3	4	5
1401	KAMPAR	250	168	67.2
1402	INDRAGIRI HULU	194	78	40.2
1403	BENGKALIS	155	124	80.0
1404	INDRAGIRI HILIR	236	82	34.7
1405	PELALAWAN	118	79	66.9
1406	ROKAN HULU	145	125	86.2
1407	ROKAN HILIR	187	151	80.7
1408	SIAK	131	40	30.5
1409	KUANTAN SINGINGI	229	76	33.2
1410	KEPULAUAN MERANTI	101	24	23.8
1471	PEKANBARU	83	19	22.9
1472	DUMAI	36	20	55.6
PROVINSI RIAU		1,865	986	52.9

Sumber: Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 42

CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B0 (0 -7 HARI) DAN BCG PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAHIR HIDUP			BAYI DIIMUNISASI																							
					HB0																				BCG			
		< 24 Jam						1 - 7 Hari						HB0 Total														
L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P						
L	P	L+P	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1401	KAMPAR	8,171	7,784	15,955	5,293	64.8	5,122	65.8	10,415	65.3	4,001	46.6	3,967	48.0	7,968	47.3	4,001	46.6	3,967	48.0	12,239	47.3	4,778	55.7	4,725	57.2	12,274	56.4
1402	INDRAGIRI HULU	4,020	3,871	7,891	1,991	49.5	2,014	52.0	4,005	50.8	1,976	49.2	2,008	51.9	3,984	50.5	1,976	49.2	2,008	51.9	3,984	50.5	2,561	63.7	2,539	65.6	5,100	64.6
1403	BENGKALIS	5,169	4,978	10,147	3,671	71.0	3,823	76.8	7,494	73.9	1,693	32.8	1,530	30.7	3,223	31.8	1,693	32.8	1,530	30.7	3,223	31.8	2,292	44.3	2,114	42.5	4,406	43.4
1404	INDRAGIRI HILIR	5,568	5,362	10,930	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,130	38.3	2,124	39.6	4,254	38.9	2,130	38.3	2,124	39.6	4,254	38.9	2,970	53.3	2,790	52.0	5,760	52.7
1405	PELALAWAN	6,099	5,876	11,975	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,900	47.5	2,648	45.1	5,548	46.3	2,900	47.5	2,648	45.1	5,548	46.3	2,189	35.9	2,468	42.0	4,657	38.9
1406	ROKAN HULU	8,145	7,846	15,991	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4,218	51.8	4,033	51.4	8,251	51.6	4,218	51.8	4,033	51.4	8,251	51.6	4,929	60.5	4,789	61.0	9,718	60.8
1407	ROKAN HILIR	7,482	7,205	14,687	4,325	57.8	4,352	60.4	8,677	59.1	2,951	39.4	2,758	38.3	5,709	38.9	2,951	39.4	2,758	38.3	5,709	38.9	3,910	52.3	3,795	52.7	7,705	52.5
1408	SIAK	5,292	5,096	10,388	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,688	31.9	1,687	33.1	3,375	32.5	1,688	31.9	1,687	33.1	3,375	32.5	2,492	47.1	2,431	47.7	4,923	47.4
1409	KUANTAN SINGINGI	2,601	2,504	5,105	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,510	58.1	1,425	56.9	2,935	57.5	1,510	58.1	1,425	56.9	2,935	57.5	1,910	73.4	1,813	72.4	3,723	72.9
1410	KEPULAUAN MERANTI	1,372	1,319	2,691	1,133	82.6	950	72.0	2,083	77.4	820	59.8	755	57.2	1,575	58.5	820	59.8	755	57.2	1,575	58.5	955	69.6	911	69.1	1,866	69.3
1471	PEKANBARU	10,046	9,695	19,741	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6,147	61.2	5,769	59.5	11,916	60.4	6,147	61.2	5,769	59.5	11,916	60.4	5,642	56.2	5,326	54.9	10,968	55.6
1472	DUMAI	2,992	2,882	5,874	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,698	56.8	1,775	61.6	3,473	59.1	1,698	56.8	1,775	61.6	3,473	59.1	1,862	62.2	1,935	67.1	3,797	64.6
PROVINSI RIAU		66,957	64,418	131,375	16,413	24.5	16,261	25.2	32,674	24.9	31,732	47.4	30,479	47.3	62,211	47.4	31,732	47.4	30,479	47.3	62,211	47.4	36,490	54.5	35,636	55.3	74,897	57.0

Sumber: Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 43

CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4*, CAMPAK RUBELA, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN,KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BAYI (SURVIVING INFANT)			BAYI DIIMUNISASI																							
					DPT-HB-Hib3						POLIO 4*						CAMPAK RUBELA						IMUNISASI DASAR LENGKAP					
					L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P	
		L	P	L+P	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1401	KAMPAR	8,171	7,784	15,955	5,818	71.2%	4,826	62.0%	10,307	64.6%	5,323	65.1%	4,943	63.5%	11,266	64.3	6,329	77.5%	6,777	87.1%	13,150	82.4%	5,565	68.1%	6,029	77.5%	13,150	82.4%
1402	INDRAGIRI HULU	4,082	3,885	7,967	2,562	62.8%	2,513	64.7%	5,075	63.7%	2,473	60.6%	2,428	62.5%	4,901	61.5	2,683	65.7%	2,667	68.6%	5,350	67.2%	2,203	54.0%	2,223	57.2%	4,526	56.8%
1403	BENGKALIS	5,462	5,293	10,755	2,613	47.8%	2,348	44.4%	4,961	46.1%	2,616	47.9%	2,343	44.3%	4,959	46.1	4,041	74.0%	3,747	70.8%	7,788	72.4%	3,524	64.5%	3,244	61.3%	6,768	62.9%
1404	INDRAGIRI HILIR	5,906	5,655	11,561	2,944	49.8%	2,835	50.1%	5,779	50.0%	3,114	52.7%	2,984	52.8%	6,098	52.7	3,854	65.3%	3,772	66.7%	7,626	66.0%	3,049	51.6%	3,020	53.4%	6,069	52.5%
1405	PELALAWAN	3,631	3,487	7,118	2,707	74.6%	2,551	73.2%	5,258	73.9%	2,723	75.0%	2,551	73.2%	5,274	74.1	3,579	98.6%	3,250	93.2%	6,829	95.9%	2,797	77.0%	3,135	89.9%	5,932	83.3%
1406	ROKAN HULU	5,539	5,285	10,824	4,989	90.1%	4,826	91.3%	9,815	90.7%	5,309	95.8%	5,158	97.6%	10,467	96.7	6,082	109.8%	5,813	110.0%	11,895	109.9%	5,453	98.4%	5,234	99.0%	10,687	98.7%
1407	ROKAN HILIR	6,294	6,021	12,315	3,921	62.3%	3,799	63.1%	7,720	62.7%	4,124	65.5%	4,019	66.7%	8,143	66.1	4,855	77.1%	4,690	77.9%	9,545	77.5%	4,251	67.5%	4,119	68.4%	8,370	68.0%
1408	SIAK	4,417	4,261	8,678	2,266	51.3%	2,243	52.6%	4,509	52.0%	2,304	52.2%	2,303	54.0%	4,607	53.1	2,960	67.0%	2,882	67.6%	5,842	67.3%	2,735	61.9%	2,671	62.7%	5,406	62.3%
1409	KUANTAN SINGINGI	3,091	2,920	6,011	1,665	53.9%	1,563	53.5%	3,228	53.7%	1,662	53.8%	1,543	52.8%	3,205	53.3	1,930	62.4%	1,886	64.6%	3,816	63.5%	1,437	46.5%	1,412	48.4%	4,049	67.4%
1410	KEPULAUAN MERANTI	1,868	1,718	3,586	948	50.7%	895	52.1%	1,843	51.4%	948	50.7%	893	52.0%	1,841	51.3	1,128	60.4%	1,032	60.1%	2,160	60.2%	1,012	54.2%	904	52.6%	2,016	56.2%
1471	PEKANBARU	8,441	8,054	16,495	4,702	55.7%	4,528	56.2%	9,230	56.0%	4,617	54.7%	4,473	55.5%	9,090	55.1	5,921	70.1%	5,527	68.6%	11,448	69.4%	5,395	63.9%	5,007	62.2%	10,402	63.1%
1472	DUMAI	2,799	2,731	5,530	2,462	88.0%	2,464	90.2%	4,926	89.1%	2,443	87.3%	2,417	88.5%	4,860	87.9	3,096	110.6%	3,101	113.5%	6,197	112.1%	2,596	92.7%	2,599	95.2%	5,195	93.9%
PROVINSI RIAU		59,701	57,094	116,795	37,597	63.0	35,391	62.0%	72,651	62.2	37,656	63.1%	36,055	63.2%	74,711	64.0	46,458	77.8%	45,144	79.1%	91,646	78.5%	40,017	67.0%	39,597	69.4%	82,570	70.7%

Sumber: Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024 (Aplikasi ASIK)

Keterangan:

*khusus untuk provinsi DIY, diisi dengan imunisasi IPV dosis ke 3
MR = measles rubella

TABEL 44

**CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4 DAN CAMPAK RUBELA 2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN (BADUTA)
MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BADUTA			BADUTA DIIMUNISASI											
					DPT-HB-Hib4						CAMPAK RUBELA 2					
					L		P		L + P		L		P		L + P	
		L	P	L+P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1401	KAMPAR	8,380	7,978	16,358	3,992	47.6%	3,747	47.0%	9,362	57.2%	4,077	48.7	3,815	47.8	9,619	48.2
1402	INDRAGIRI HULU	3,964	3,803	7,767	1,799	45.4%	1,822	47.9%	3,621	46.6%	1,861	46.9	1,904	50.1	3,765	48.5
1403	BENGKALIS	4,966	4,862	9,828	1,657	33.4%	1,510	31.1%	3,167	32.2%	1,686	34.0	1,572	32.3	3,258	33.2
1404	INDRAGIRI HILIR	5,347	5,087	10,434	1,105	20.7%	1,080	21.2%	2,185	20.9%	1,160	21.7	1,077	21.2	2,237	21.4
1405	PELALAWAN	5,715	5,794	11,509	1,952	34.2%	1,799	31.0%	3,751	32.6%	1,985	34.7	1,890	32.6	3,875	33.7
1406	ROKAN HULU	7,666	7,447	15,113	3,613	47.1%	3,145	42.2%	6,758	44.7%	4,125	53.8	3,998	53.7	8,123	53.7
1407	ROKAN HILIR	7,292	6,974	14,266	2,347	32.2%	2,149	30.8%	4,496	31.5%	2,506	34.4	2,299	33.0	4,805	33.7
1408	SIAK	4,848	4,877	9,725	1,232	25.4%	1,104	22.6%	2,336	24.0%	1,293	26.7	1,229	25.2	2,522	25.9
1409	KUANTAN SINGINGI	2,578	2,400	4,978	994	38.6%	1,028	42.8%	2,022	40.6%	1,041	40.4	1,059	44.1	2,100	42.2
1410	KEPULAUAN MERANTI	1,315	1,235	2,550	625	47.5%	622	50.4%	1,247	48.9%	690	52.5	679	55.0	1,369	53.7
1471	PEKANBARU	10,686	10,110	20,796	2,247	21.0%	2,009	19.9%	4,256	20.5%	2,266	21.2	2,039	20.2	4,305	20.7
1472	DUMAI	3,043	2,929	5,972	1,149	37.8%	1,309	44.7%	2,458	41.2%	1,258	41.3	1,338	45.7	2,596	43.5
PROVINSI RIAU		65,800	63,496	129,296	22,712	34.5%	21,324	33.6%	45,659	35.3%	23,948	36.4	22,899	36.1	48,574	37.6

Sumber: Bidang P2P, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024 (Aplikasi ASIK)

TABEL 45

CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	BAYI 6-11 BULAN			ANAK BALITA (12-59 BULAN)			BALITA (6-59 BULAN)		
		JUMLAH BAYI	MENDAPAT VIT A		JUMLAH	MENDAPAT VIT A		JUMLAH	MENDAPAT VIT A	
			S	%		S	%		S	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1401	KAMPAR	8,476	7,034	82.99	39,408	35,505	90	47,884	42,539	88.84
1402	INDRAGIRI HULU	5,470	4,832	88.34	24,798	20,286	82	30,268	25,118	82.99
1403	BENGKALIS	7,136	5,777	80.96	28,451	20,778	73	35,587	26,555	74.62
1404	INDRAGIRI HILIR	6,058	4,990	82.37	28,888	24,062	83	34,946	29,052	83.13
1405	PELALAWAN	4,618	3,154	68.30	17,299	13,909	80	21,917	17,063	77.85
1406	ROKAN HULU	8,270	6,546	79.15	42,110	38,947	92	50,380	45,493	90.30
1407	ROKAN HILIR	8,356	6,439	77.06	34,171	27,768	81	42,527	34,207	80.44
1408	SIAK	5,967	5,257	88.10	25,685	23,706	92	31,652	28,963	91.50
1409	KUANTAN SINGINGI	5,198	4,670	89.84	18,288	15,804	86	23,486	20,474	87.18
1410	KEPULAUAN MERANTI	2,006	1,899	94.67	10,248	9,709	95	12,254	11,608	94.73
1471	PEKANBARU	6,902	6,147	89.06	37,276	33,522	90	44,178	39,669	89.79
1472	DUMAI	4,879	2,767	56.71	15,606	12,399	79	20,485	15,166	74.03
PROVINSI RIAU		73,336	59,512	81.15	322,228	276,395	85.78	395,564	335,907	84.92

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

Keterangan: Pelaporan pemberian vitamin A dilakukan pada Februari dan Agustus, maka perhitungan bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A dalam setahun dihitung dengan mengakumulasi bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A di bulan Februari dan yang mendapat vitamin A di bulan Agustus. Untuk perhitungan anak balita 12-59 bulan yang mendapat vitamin A menggunakan data bulan Agustus.

TABEL 46

**CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

NO	KABUPATEN/KOTA	SASARAN BALITA (USIA 0-59 BULAN)	SASARAN ANAK BALITA (USIA 12-59 BULAN)	BALITA MEMILIKI BUKU KIA		DATA RILL	BALITA DIPANTAU PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN		BALITA DILAYANI SDIDTK		BALITA DILAYANI MTBS	
				JUMLAH	%		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1401	KAMPAR	83,614	67,263	56,659	67.76	49,305	41,507	84.18	56,659	84.2	10,144	15.1
1402	INDRAGIRI HULU	39,936	32,223	30,636	76.71	29,855	20,122	67.40	32,872	102.0	13,169	40.9
1403	BENGKALIS	56,332	45,369	39,619	70.33	37,088	15,195	40.97	39,619	87.3	18,876	41.6
1404	INDRAGIRI HILIR	57,446	45,700	22,214	38.67	31,596	20,888	66.11	16,912	37.0	20,433	44.7
1405	PELALAWAN	36,948	30,341	30,195	81.72	26,361	17,236	65.38	30,195	99.5	1,004	3.3
1406	ROKAN HULU	50,617	39,837	51,296	101.34	47,960	39,051	81.42	31,927	80.1	7,715	19.4
1407	ROKAN HILIR	57,503	46,248	58,831	102.31	43,767	31,795	72.65	63,482	137.3	20,599	44.5
1408	SIAK	41,972	34,006	35,866	105.47	32,416	23,570	72.71	34,184	100.5	17,905	52.7
1409	KUANTAN SINGINGI	30,013	23,974	21,330	88.97	23,956	18,230	76.10	21,993	91.7	17,428	72.7
1410	KEPULAUAN MERANTI	18,249	14,695	13,197	89.81	11,762	9,090	77.28	12,005	81.7	10,068	68.5
1471	PEKANBARU	88,876	72,394	50,268	69.44	42,998	32,360	75.26	17,216	23.8	14,138	19.5
1472	DUMAI	29,194	24,130	23,464	97.24	14,669	10,441	71.18	25,823	107.0	22,404	92.8
PROVINSI RIAU		590,700	476,180	433,575	91.05	391,733	279,485	47.31	382,887	80.41	173,883	29.44

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 47

**JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	BALITA								
		JUMLAH SASARAN BALITA (S)			DITIMBANG					
					JUMLAH (D)			% (D/S)		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1401	KAMPAR	42,764	40,850	83,614	20,692	20,815	41,507	48.4	51.0	49.6
1402	INDRAGIRI HULU	20,398	19,538	39,936	10,405	9,717	20,122	51.0	49.7	50.4
1403	BENGKALIS	28,790	27,542	56,332	7859	7,336	15,195	27.3	26.6	27.0
1404	INDRAGIRI HILIR	29,392	28,054	57,446	10803	10,085	20,888	36.8	35.9	36.4
1405	PELALAWAN	18,837	18,111	36,948	8914	8,322	17,236	47.3	45.9	46.6
1406	ROKAN HULU	25,741	24,876	50,617	20197	18,854	39,051	78.5	75.8	77.1
1407	ROKAN HILIR	29,300	28,203	57,503	24713	20,822	45,535	84.3	73.8	79.2
1408	SIAK	21,424	20,548	41,972	12190	11,380	23,570	56.9	55.4	56.2
1409	KUANTAN SINGINGI	15,366	14,647	30,013	9429	8,801	18,230	61.4	60.1	60.7
1410	KEPULAUAN MERANTI	9,317	8,932	18,249	4701	4,389	9,090	50.5	49.1	49.8
1471	PEKANBARU	45,414	43,462	88,876	13484	18,876	32,360	29.7	43.4	36.4
1472	DUMAI	14,895	14,299	29,194	10429	9,926	20,355	70.0	69.4	69.7
PROVINSI RIAU		301,638	289,062	590,700	153,816	149,323	303,139	51.0	51.7	51.32

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 48

STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/U, TB/U, DAN BB/TB MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS	JUMLAH BALITA YANG DITIMBANG	BALITA BERAT BADAN KURANG (BB/U) < -2SD		JUMLAH BALITA YANG DIUKUR TINGGI BADAN	BALITA PENDEK (TB/U) < 2SD		JUMLAH BALITA YANG DIUKUR	BALITA GIZI KURANG (BB/TB : < -2 s.d -3 SD)		BALITA GIZI BURUK (BB/TB: < -3 SD)		
				JUMLAH	%		JUMLAH	%		JUMLAH	%	JUMLAH	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1401	KAMPAR	31	49.906	1.412	2,83	49.884	455	0,91	49.906	861	1,73	27	0,05	
1402	INDRAGIRI HULU	20	16.950	1.057	6,24	16.941	1.101	6,50	16.950	574	3,39	41	0,24	
1403	BENGKALIS	20	12.392	1.061	8,56	12.369	982	7,94	12.392	610	4,92	106	0,86	
1404	INDRAGIRI HILIR	30	24.831	1.033	4,16	24.824	626	2,52	24.831	590	2,38	25	0,10	
1405	PELALAWAN	14	20.435	129	0,63	20.414	115	0,56	20.435	72	0,35	9	0,04	
1406	ROKAN HULU	23	43.365	775	1,79	43.312	526	1,21	43.365	705	1,63	53	0,12	
1407	ROKAN HILIR	21	35.574	800	2,25	35.534	1.373	3,86	35.574	466	1,31	65	0,18	
1408	SIAK	16	22.656	1.427	6,30	22.587	543	2,40	22.656	904	3,99	47	0,21	
1409	KUANTAN SINGINGI	25	19.576	1.846	9,43	19.571	2.204	11,26	19.576	956	4,88	38	0,19	
1410	KEPULAUAN MERANTI	10	9.239	648	7,01	9.749	946	9,70	9.776	351	3,59	32	0,33	
1471	PEKANBARU	21	31.596	641	2,03	31.596	279	0,88	31.596	453	1,43	18	0,06	
1472	DUMAI	10	11.018	190	1,72	10.963	198	1,81	11.018	123	1,12	10	0,09	
PROVINSI RIAU			241	297.538	11.019	3,70	297.744	9.348	3,14	298.075	6.665	2,24	471	0,16

Sumber: Bidang Kesmas (e-ppgm), Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 49

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA SERTA USIA PENDIDIKAN DASAR MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	PESERTA DIDIK SEKOLAH									USIA PENDIDIKAN DASAR (KELAS 1-9)			SEKOLAH								
		KELAS 1 SD/MI			KELAS 7 SMP/MTS			KELAS 10 SMA/MA						SD/MI			SMP/MTS			SMA/MA		
		JUMLAH PESERTA DIDIK	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	%	JUMLAH PESERTA DIDIK	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	%	JUMLAH PESERTA DIDIK	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	%	JUMLAH	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	%	JUMLAH	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	%	JUMLAH	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	%	JUMLAH	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1401	KAMPAR	34,602	33,661	97.3	19,704	19,166	97.3	13,319	13,293	99.8	67,625	66,120	97.8	560	540	96.4	246	235	95.5	149	138	92.6
1402	INDRAGIRI HULU	53,356	49,986	93.7	26,817	25,637	95.6	22,708	21,988	96.8	80,178	75,623	94.3	337	337	100.0	118	118	100.0	72	72	100.0
1403	BENGKALIS	13,671	12,998	95.1	13,317	12,997	97.6	11,563	11,249	97.3	121,904	117,184	96.1	401	401	100.0	179	179	100.0	113	113	100.0
1404	INDRAGIRI HILIR	13,120	6,265	47.8	8,554	4,629	54.1	7,774	4,812	61.9	44,302	10,894	24.6	589	316	53.7	306	125	40.8	126	68	54.0
1405	PELALAWAN	10,702	9,513	88.9	8,638	6,442	74.6	8,910	4,607	51.7	73,221	46,279	63.2	243	242	99.6	109	105	96.3	56	52	92.9
1406	ROKAN HULU	31,690	15,182	47.9	15,145	10,280	67.9	13,404	8,981	67.0	60,239	34,443	57.2	408	354	86.8	186	157	84.4	109	96	88.1
1407	ROKAN HILIR	16,042	16,042	100.0	13,949	13,949	100.0	11,092	11,092	100.0	84,064	75,044	89.3	79,623	69,758	87.6	27,654	23,535	85.1	19,993	17,371	86.9
1408	SIAK	19,002	18,129	95.4	11,745	11,148	94.9	8,348	7,945	95.2	81,473	75,415	92.6	21,122	17,375	82.3	7,870	7,414	94.2	5,012	4,894	97.6
1409	KUANTAN SINGINGI	16,379	13,788	84.2	7,053	6,233	88.4	2,137	1,888	88.3	59,336	40,042	67.5	293	287	98.0	105	98	93.3	55	48	87.3
1410	KEPULAUAN MERANTI	3,633	3,633	100.0	3,272	3,273	100.0	2,671	2,671	100.0	9,577	9,577	100.0	22,272	22,272	100.0	33,163	33,163	100.0	8,868	8,868	100.0
1471	PEKANBARU	23,190	21,655	93.4	18,423	17,084	92.7	20,443	16,937	82.8	160,723	143,416	89.2	382	363	95.0	208	186	89.4	160	142	88.8
1472	DUMAI	8,953	8,445	94.3	7,373	7,208	97.8	8,236	7,851	95.3	62,722	52,671	84.0	120	116	96.7	66	53	80.3	47	38	80.9
PROVINSI RIAU		244,340	209,297	85.7	153,990	138,046	89.6	130,605	113,314	86.8	905,364	746,708	82.5	126,350	112,361	88.9	70,210	65,368	93.1	34,760	31,900	91.8

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT						
		TUMPATAN GIGI TETAP	PENCABUTAN GIGI TETAP	JUMLAH KUNJUNGAN	RASIO TUMPATAN/ PENCABUTAN	JUMLAH KASUS GIGI	JUMLAH KASUS DIRUJUK	% KASUS DIRUJUK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1401	KAMPAR	22.554	355	22.909	63,5	3.392	64	0,0
1402	INDRAGIRI HULU	22	758	780	0,0	4.145	241	0,1
1403	BENGKALIS	501	5.812	6.313	0,1	15.078	1.241	0,1
1404	INDRAGIRI HILIR	424	4.149	4.573	0,1	15.579	408	0,0
1405	PELALAWAN	201	1.067	1.268	0,2	4.828	462	0,1
1406	ROKAN HULU	75	1.430	1.505	0,1	2.274	398	0,2
1407	ROKAN HILIR	60	4.862	14.294	0,0	12.525	82	0,0
1408	SIAK	717	2.853	3.570	0,3	15.930	1.033	0,1
1409	KUANTAN SINGINGI	124	691	815	0,2	3.392	64	0,0
1410	KEPULAUAN MERANTI	435	2.829	3.264	0,2	7.503	961	0,1
1471	PEKANBARU	2.846	3.697	6.543	0,8	30.325	5.588	0,2
1472	DUMAI	802	2.137	2.939	0,4	17.018	1.063	0,1
PROVINSI RIAU		28.761	30.640	68.773	0,9	131.989	11.605	0,1

Sumber: Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024
Keterangan: pelayanan kesehatan gigi meliputi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas

TABEL 51

PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK SD DAN SETINGKAT MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS)																							
		JUMLAH SD/MI	JUMLAH SD/MI DGN SIKAT GIGI MASSAL	%	JUMLAH SD/MI MENDAPAT YAN. GIGI	%	JUMLAH MURID SD/MI			MURID SD/MI DIPERIKSA						MURID SD/MI PERLU PERAWATAN			MURID SD/MI MENDAPAT PERAWATAN						
							L	P	L + P	L	%	P	%	L + P	%	L	P	L + P	L	%	P	%	L + P	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1401	KAMPAR	508	413	81.3	390	76.8	42,862	43,190	86,052	15,534	36.2	22,318	51.7	37,852	44.0	11,088	11,748	22,836	5,654	51.0	7,005	59.6	12,659	55.4	
1402	INDRAGIRI HULU	359	359	100.0	359	100.0	13,350	13,352	13,260	750	5.6	741	5.5	1,491	11.2	429	477	906	500	116.6	448	93.9	948	104.6	
1403	BENGKALIS	282	146	51.8	199	70.6	21,738	20,460	42,198	9,505	43.7	8,746	42.7	18,251	43.3	3,303	3,623	6,926	1,512	45.8	1,599	44.1	3,111	44.9	
1404	INDRAGIRI HILIR	396	22	5.6	237	59.8	5,632	5,104	10,736	491	8.7	537	10.5	1,028	9.6	224	239	463	94	42.0	109	45.6	203	43.8	
1405	PELALAWAN	245	244	99.6	237	96.7	30,829	27,801	58,630	9,947	32.3	9,709	34.9	19,656	33.5	2,682	2,778	5,460	997	37.2	1,061	38.2	2,058	37.7	
1406	ROKAN HULU	168	116	69.0	101	60.1	25,333	25,163	50,496	4,689	18.5	4,775	19.0	9,464	18.7	4,089	3,835	7,924	485	11.9	533	13.9	1,018	12.8	
1407	ROKAN HILIR	447	141	31.5	399	89.3	36,180	35,296	71,476	27,915	77.2	2,712	7.7	30,627	42.8	12,314	12,823	25,137	1,951	15.8	2,314	18.0	4,265	17.0	
1408	SIAK	280	210	75.0	250	89.3	23,284	21,671	44,955	20,951	90.0	20,468	94.4	41,419	92.1	8,460	9,104	17,564	2,621	31.0	2,759	25.4	5,380	30.6	
1409	KUANTAN SINGINGI	245	194	79.2	194	79.2	12,546	11,245	23,791	9,542	76.1	8,942	79.5	18,484	77.7	5,342	3,125	8,467	3,552	66.5	2,311	74.0	5,863	69.2	
1410	KEPULAUAN MERANTI	119	100	84.0	216	181.5	7,795	6,904	14,699	6,527	83.7	6,791	98.4	13,318	90.6	3,071	2,806	5,877	674	21.9	674	24.0	1,348	22.9	
1471	PEKANBARU	304	162	53.3	134	44.1	37,048	34,467	71,515	26,397	71.3	24,323	70.6	50,720	70.9	7,413	7,006	14,419	2,534	34.2	2,837	40.5	5,371	37.2	
1472	DUMAI	123	71	57.7	122	99.2	18,588	17,099	35,687	12,016	64.6	11,587	67.8	23,603	66.1	3,079	4,564	7,643	1,130	36.7	1,331	29.2	2,461	32.2	
PROVINSI RIAU		3,476	2,178	62.7	2,838	81.6	275,185	261,752	523,495	144,264	52.4	121,649	46.5	265,913	50.8	61,494	62,128	123,622	21,704	35.3	22,981	37.0	44,685	36.1	

Sumber: Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 52

**PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN														
		JUMLAH			MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR						BERISIKO					
					LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1401	KAMPAR	275,057	269,975	545,032	134,461	48.9	143,927	53.3	278,388	51.1	98,157	73.0	105,067	73.0	203,223	73.0
1402	INDRAGIRI HULU	151,721	156,174	307,895	37,974	25.0	49,428	31.6	87,402	28.4	11,535	30.4	14,441	29.2	25,976	29.7
1403	BENGKALIS	336,011	322,835	658,846	158,967	47.3	201,651	62.5	360,618	91.7	70,560	44.4	85,089	42.2	155,649	43.2
1404	INDRAGIRI HILIR	181,723	174,597	356,320	54,148	29.8	64,011	36.7	118,159	33.2	11,800	21.8	13,567	21.2	25,367	21.5
1405	PELALAWAN	116,123	114,577	230,700	32,799	28.2	52,068	45.4	84,867	36.8	10,850	33.1	17,474	33.6	28,324	33.4
1406	ROKAN HULU	200,896	193,151	394,047	116,452	58.0	134,080	69.4	250,532	63.6	33,038	28.4	37,306	27.8	70,344	28.1
1407	ROKAN HILIR	257,246	248,858	506,104	199,782	77.7	259,141	104.1	458,923	90.7	63,107	31.6	113,319	43.7	176,426	38.4
1408	SIAK	161,687	155,265	316,952	142,221	88.0	156,039	100.5	298,260	94.1	65,391	46.0	74,417	47.7	139,808	46.9
1409	KUANTAN SINGINGI	121,769	117,524	239,293	51,246	42.1	77,671	66.1	128,917	53.9	9,148	17.9	14,932	19.2	24,080	18.7
1410	KEPULAUAN MERANTI	62,904	59,804	122,708	49,453	78.6	58,927	98.5	108,380	88.3	14,331	29.0	23,999	40.7	38,330	35.4
1471	PEKANBARU	427,938	414,787	842,725	54,931	12.8	79,945	19.3	134,876	16.0	13,952	25.4	20,306	25.4	34,258	25.4
1472	DUMAI	113,532	107,709	221,241	96,005	84.6	103,751	96.3	199,756	90.3	29,452	30.7	37,144	35.8	66,596	33.3
PROVINSI RIAU		2,406,607	2,335,256	4,741,863	1,128,439	46.9	1,380,639	59.1	2,509,078	52.9	431,321	38.2	557,061	40.3	988,381	39.4

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 53

CALON PENGANTIN (CATIN) MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH CATIN TERDAFTAR DI KUA ATAU LEMBAGA AGAMA LAINNYA			CATIN MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN						CATIN PEREMPUAN ANEMIA		CATIN PEREMPUAN GIZI KURANG	
					LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN					
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	15	16
1401	KAMPAR	8,350	8,350	16,700	8,350	100.0	8,350	100.0	16,700	100.0	0	0.0	0	0.0
1402	INDRAGIRI HULU	2,131	2,135	4,266	2,129	99.9	2,135	100.0	4,264	100.0	221	10.4	34	1.6
1403	BENGKALIS	2,212	2,303	4,515	2,179	98.5	2,322	100.8	4,501	99.7	121	5.2	183	7.9
1404	INDRAGIRI HILIR	11,107	11,069	22,176	4,313	38.8	4,313	39.0	8,626	38.9	430	10.0	0	0.0
1405	PELALAWAN	1,515	1,515	3,030	1,421	93.8	1,421	93.8	2,842	93.8	0	0.0	0	0.0
1406	ROKAN HULU	1,002	1,012	2,014	1,002	100.0	1,012	100.0	2,014	100.0	0	0.0	0	0.0
1407	ROKAN HILIR	3,479	3,891	7,370	2,760	79.3	3,653	93.9	6,413	87.0	3	0.1	19	0.5
1408	SIAK	1,063	1,063	2,126	1,059	99.6	1,059	99.3	2,118	99.6	69	6.5	46	4.3
1409	KUANTAN SINGINGI	1,509	1,477	2,986	1,500	99.4	1,467	99.3	2,967	99.4	0	0.0	0	0.0
1410	KEPULAUAN MERANTI	975	975	1,950	975	100.0	975	100.0	1,950	100.0	122	12.5	356	36.5
1471	PEKANBARU	2,320	2,439	4,759	2,093	90.2	2,312	94.8	4,405	92.6	153	6.6	57	2.5
1472	DUMAI	1,835	1,835	3,670	1,273	69.4	1,526	83.2	2,799	76.3	86	5.6	13	0.9
PROVINSI RIAU		37,498	38,064	75,562	29,054	77.5	30,545	80.2	59,599	78.9	1,205	3.9	708	2.3

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 54

**CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	USIA LANJUT (60TAHUN+)								
		JUMLAH			MENDAPAT SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR					
		L	P	L+P	L	%	P	%	L+P	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1401	KAMPAR	34,865	33,518	68,383	17,074	49.0	18,196	54.3	35,270	51.6
1402	INDRAGIRI HULU	19,314	17,805	37,119	10,000	51.8	20,333	114.2	30,333	81.7
1403	BENGKALIS	27,795	27,569	55,364	16,214	58.3	18,882	68.5	35,096	63.4
1404	INDRAGIRI HILIR	33,087	29,010	62,097	14,215	43.0	15,404	53.1	29,619	47.7
1405	PELALAWAN	13,114	11,177	24,291	8,817	67.2	10,859	97.2	19,676	81.0
1406	ROKAN HULU	22,546	21,571	44,117	9,000	39.9	9,584	44.4	18,584	42.1
1407	ROKAN HILIR	27,130	25,694	52,824	3,538	13.0	3,665	14.3	7,203	13.6
1408	SIAK	16,768	14,517	31,285	6,342	37.8	9,697	66.8	16,039	51.3
1409	KUANTAN SINGINGI	16,729	17,829	34,558	13,475	80.5	15,881	89.1	29,356	84.9
1410	KEPULAUAN MERANTI	11,511	11,638	23,149	10,887	94.6	16,587	142.5	27,474	118.7
1471	PEKANBARU	44,592	45,898	90,490	10,230	22.9	12,803	27.9	23,033	25.5
1472	DUMAI	13,486	13,363	26,849	11,800	87.5	12,511	93.6	24,311	90.5
PROVINSI RIAU		280,937	269,589	550,526	131,592	46.8	164,402	61.0	295,994	53.8

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 55

PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	PUSKESMAS									
			MELAKSANAKAN KLAS IBU HAMIL	MELAKSANAKAN ORIENTASI P4K	MELAKSANAKAN KLAS IBU BALITA	MELAKSANAKAN KLAS SDIDTK	MELAKSANAKAN MTBS	MELAKSANAKAN KEGIATAN KESEHATAN REMAJA	MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN KLAS 1	MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN KLAS 7	MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN KLAS 10	MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN KLAS 1, 7, 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1401	KAMPAR	31	31	31	31	31	31	0	0	0	0	0
1402	INDRAGIRI HULU	20	0	0	20	0	0	20	20	20	20	20
1403	BENGKALIS	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
1404	INDRAGIRI HILIR	30	30	30	30	30	30	16	16	16	16	16
1405	PELALAWAN	14	14	14	14	14	14	0	14	14	14	14
1406	ROKAN HULU	23	23	23	23	23	23	12	23	23	23	23
1407	ROKAN HILIR	21	21	0	21	21	21	21	21	21	21	21
1408	SIAK	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1409	KUANTAN SINGINGI	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1410	KEPULAUAN MERANTI	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1471	PEKANBARU	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
1472	DUMAI	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
PROVINSI RIAU		241	219	198	239	219	219	169	194	194	194	194
			90.9	82.2	99.2	90.9	90.9	70.1	80.5	80.5	80.5	80.5

Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Prov. Riau, 2024
catatan: diisi dengan tanda "V"

TABEL 56

**JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK,
DAN TREATMENT COVERAGE (TC) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS YANG MENDAPATKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR	JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS DEWASA (> 14 THN)					KASUS TUBERKULOSIS ANAK 0-14 TAHUN
			LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1401	KAMPAR	13,272	781	65.5	412	34.5	1,193	144
1402	INDRAGIRI HULU	6,410	441	61.8	273	38.2	714	56
1403	BENGKALIS	12,943	873	65.9	451	34.1	1,324	152
1404	INDRAGIRI HILIR	12,784	721	63.4	416	36.6	1,137	99
1405	PELALAWAN	5,710	564	66.4	285	33.6	849	42
1406	ROKAN HULU	17,891	920	66.9	455	33.1	1,375	112
1407	ROKAN HILIR	16,350	879	68.0	414	32.0	1,293	48
1408	SIAK	9,221	450	64.2	251	35.8	701	105
1409	KUANTAN SINGINGI	6,577	349	63.8	198	36.2	547	35
1410	KEPULAUAN MERANTI	4,320	216	63.2	126	36.8	342	13
1471	PEKANBARU	34,435	3,361	62.5	2,018	37.5	5,379	660
1472	DUMAI	8,026	738	68.8	335	31.2	1,073	142
PROVINSI RIAU		147,939	10,293	64.6	5,634	35.4	15,927	1,608
JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS		147,939						
% ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS (TBC) MENDAPATKAN PELAYANAN TUBERKULOSIS SESUAI ST						100.0		
PERKIRAAN INSIDEN TUBERKULOSIS (DALAM ABSOLUT)							23,315	
TREATMENT COVERAGE (TC-%)							75.21%	
CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS ANAK (%)								35.73%

Sumber: Bidang P2P (SITB) Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

Keterangan: Jumlah pasien adalah seluruh pasien tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah

ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS YANG DITEMUKAN DAN DIOBATI ^{*)}			JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS YANG DITEMUKAN DAN DIOBATI ^{*)}			ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE) TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS						ANGKA PENGOBATAN LENGKAP (COMPLETE RATE) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS						ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS RATE/SR) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS						JUMLAH KEMATIAN SELAMA PENGOBATAN TUBERKULOSIS	
								LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN			
		L	P	L + P	L	P	L + P	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1401	KAMPAR	381	201	582	798	429	1.227	207	54,3	101	50,2	308	52,9	523	65,5	283	66,0	806	65,7	730	91,5	384	89,5	1.114	90,8	2	0,2
1402	INDRAGIRI HULU	261	151	412	389	265	654	150	57,5	93	61,6	243	59,0	205	52,7	150	56,6	355	54,3	355	91,3	243	91,7	598	91,4	37	5,7
1403	BENGKALIS	346	157	503	831	421	1.252	205	59,2	67	42,7	272	54,1	564	67,9	321	76,2	885	70,7	769	92,5	388	92,2	1.157	92,4	31	2,5
1404	INDRAGIRI HILIR	289	159	448	598	397	995	93	32,2	56	35,2	149	33,3	438	73,2	310	78,1	748	75,2	531	88,8	366	92,2	897	90,2	32	3,2
1405	PELALAWAN	233	134	367	534	302	836	72	30,9	35	26,1	107	29,2	396	74,2	243	80,5	639	76,4	468	87,6	278	92,1	746	89,2	9	1,1
1406	ROKAN HULU	397	179	576	931	489	1.420	278	70,0	138	77,1	416	72,2	594	63,8	332	67,9	926	65,2	872	93,7	470	96,1	1.342	94,5	38	2,7
1407	ROKAN HILIR	428	232	660	748	429	1.177	40	9,3	22	9,5	62	9,4	639	85,4	370	86,2	1.009	85,7	679	90,8	392	91,4	1.071	91,0	53	4,5
1408	SIAK	227	104	331	422	236	658	131	57,7	53	51,0	184	55,6	252	59,7	158	66,9	410	62,3	383	90,8	211	89,4	594	90,3	28	4,3
1409	KUANTAN SINGINGI	193	103	296	305	179	484	105	54,4	70	68,0	175	59,1	174	57,0	97	54,2	271	56,0	279	91,5	167	93,3	446	92,1	21	4,3
1410	KEPULAUAN MERANTI	25	19	44	179	103	282	7	28,0	3	15,8	10	22,7	148	82,7	98	95,1	246	87,2	155	86,6	101	98,1	256	90,8	17	6,0
1471	PEKANBARU	1.024	499	1.523	2.725	1.794	4.519	499	48,7	282	56,5	781	51,3	1.886	69,2	1.321	73,6	3.207	71,0	2.385	87,5	1.603	89,4	3.988	88,2	171	3,8
1472	DUMAI	364	142	506	643	356	999	252	69,2	103	72,5	355	70,2	331	51,5	224	62,9	555	55,6	583	90,7	327	91,9	910	91,1	38	3,8
PROVINSI RIAU		4.168	2.080	6.248	9.103	5.400	14.503	2.039	48,9	1.023	49,2	3.062	49,0	6.150	67,6	3.907	72,4	10.057	69,3	8.189	90,0	4.930	91,3	13.119	90,5	477	3,3

Sumber: Bidang P2P (SITB) Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

Keterangan:

*) Kasus Tuberkulosis ditemukan dan diobati berdasarkan kohort yang sama dari kasus penemuan kasus yang dinilai kesembuhan dan pengobatan lengkap
Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll

TABEL 58

PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BALITA	BALITA BATUK ATAU KESUKARAN BERNAPAS			PERKIRAAN PNEUMONIA BALITA	REALISASI PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA PADA BALITA								BATUK BUKAN PNEUMONIA		
			JUMLAH KUNJUNGAN	DIBERIKAN TATALAKSANA STANDAR (DIHITUNG NAPAS / LIHAT TDDK*)	PERSENTASE YANG DIBERIKAN TATALAKSANA STANDAR		PNEUMONIA		PNEUMONIA BERAT		JUMLAH			%			
							L	P	L	P	L	P	L + P		L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
1401	KAMPAR	82,736	14,280	14,280	100	2,209	71	42	3	2	74	44	118	14162.00	7,090	7,072	14,162
1402	INDRAGIRI HULU	42,742	5,513	5,513	100	1,141	17	4	0	0	17	4	21	1.84	2,800	2,692	5,492
1403	BENGKALIS	65,885	13,872	12,787	92	1,759	84	90	1	0	85	90	175	9.95	6,617	7,081	13,698
1404	INDRAGIRI HILIR	69,435	7,003	6,988	100	1,854	2	5	1	1	3	6	9	0.49	3,660	3,334	6,994
1405	PELALAWAN	50,707	7,260	7,260	100	1,354	80	42	5	0	85	42	127	9.38	3,593	3,540	7,133
1406	ROKAN HULU	50,617	6,281	6,281	100	2,058	36	23	2	8	38	31	69	3.35	3,242	2,970	6,212
1407	ROKAN HILIR	67,332	21,590	21,580	100	1,798	27	39	1	1	28	40	68	3.78	10,691	10,831	21,522
1408	SIAK	44,097	10,801	10,801	100	1,177	127	88	14	5	141	93	234	19.88	5,492	5,075	10,567
1409	KUANTAN SINGINGI	35,625	5,606	5,412	97	951	19	27	1	1	19	27	46	4.84	2,823	2,737	5,560
1410	KEPULAUAN MERANTI	19,169	4,729	4,729	100	512	55	29	6	9	64	32	96	18.75	2,440	2,195	4,635
1471	PEKANBARU	108,525	14,309	14,309	100	2,898	312	249	0	3	312	252	564	19.46	7,152	6,593	13,745
1472	DUMAI	35,535	9,783	9,783	100	949	141	110	50	26	191	136	327	34.46	5,016	4,440	9,456
PROVINSI RIAU		672,405	121,027	119,723	99	18,660	971	748	84	56	1057	797	1854	9.94	60,616	58,560	119,176

Sumber: Bidang P2P Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

Keterangan:

* TDDK = tarikan dinding dada ke dalam

Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

Persentase perkiraan kasus pneumonia pada balita berbeda untuk setiap provinsi, sesuai hasil riskesdas

TABEL 59

JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

NO	KELOMPOK UMUR	KASUS H I V			
		L	P	L+P	PROPORSI KELOMPOK UMUR
1	2	3	4	5	6
1	≤ 4 TAHUN	6	6	12	1.2
2	5 - 14 TAHUN	4	5	9	0.9
3	15 - 19 TAHUN	38	6	44	4.4
4	20 - 24 TAHUN	183	22	205	20.4
5	25 - 49 TAHUN	520	141	661	65.7
6	≥ 50 TAHUN	49	26	75	7.5
PROVINSI RIAU		800	206	1,006	
PROPORSI JENIS KELAMIN		79.5	20.5		
Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV					159,436
Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar					126,505
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar					79.3

Sumber: Bidang P2P (SIHA) Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus baru yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

TABEL 60

**PRESENTASE ODHIV BARU MENDAPATKAN PENGOBATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	ODHIV BARU DITEMUKAN	ODHIV BARU DITEMUKAN DAN MENDAPAT PENGOBATAN ARV	PERSENTASE ODHIV BARU MENDAPAT PENGOBATAN ARV
1	2	3	4	5
1401	KAMPAR	18	14	77.78
1402	INDRAGIRI HULU	41	25	60.98
1403	BENGKALIS	58	52	89.66
1404	INDRAGIRI HILIR	38	37	97.37
1405	PELALAWAN	46	46	100.00
1406	ROKAN HULU	37	29	78.38
1407	ROKAN HILIR	58	41	70.69
1408	SIAK	30	18	60.00
1409	KUANTAN SINGINGI	6	6	100.00
1410	KEPULAUAN MERANTI	24	16	66.67
1471	PEKANBARU	603	493	81.76
1472	DUMAI	47	47	100.00
PROVINSI RIAU		1,006	824	81.91

Sumber: Bidang P2P (SIHA) Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 61

KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK SEMUA UMUR	JUMLAH PENDUDUK BALITA	JUMLAH TARGET PENEMUAN		DIARE										MENDAPAT ZINC DAN ORALIT			
						DILAYANI				MENDAPAT ORALIT				MENDAPAT ZINC					
						SEMUA UMUR		BALITA		SEMUA UMUR		BALITA		BALITA					
				SEMUA UMUR	BALITA	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1401	KAMPAR	894,848	83,614	24,161	14,097	4,916	20.35	1,264	8.97	4,916	100.00	0	0.00	5	0.40	1258	99.53		
1402	INDRAGIRI HULU	468,366	39,936	12,646	6,733	1,916	15.15	599	8.90	1,916	100.00	10	1.67	15	2.50	561	93.66		
1403	BENGKALIS	591,800	56,332	15,979	9,498	2,188	13.69	1,019	10.73	2,188	100.00	18	1.77	28	2.75	919	90.19		
1404	INDRAGIRI HILIR	684,860	57,446	18,491	9,685	2,327	12.58	492	5.08	2,327	100.00	30	6.10	3	0.61	414	84.15		
1405	PELALAWAN	414,943	36,948	11,203	6,229	1,217	10.86	333	5.35	1,217	100.00	0	0.00	7	2.10	304	91.29		
1406	ROKAN HULU	593,486	50,617	2,513	727	1,558	62.00	599	82.39	1,558	100.00	36	6.01	4	0.67	527	87.98		
1407	ROKAN HILIR	673,323	57,503	18,180	9,695	4,867	26.77	1,817	18.74	4,867	100.00	34	1.87	73	4.02	1543	84.92		
1408	SIAK	495,470	46,436	13,378	7,829	5,978	44.69	1,712	21.87	5,978	100.00	188	11.0	68	3.97	977	57.07		
1409	KUANTAN SINGINGI	356,246	30,013	9,619	5,060	1,420	14.76	416	8.22	1,420	100.00	1	0.24	10	2.40	404	97.12		
1410	KEPULAUAN MERANTI	213,720	18,249	5,770	3,077	1,662	28.80	471	15.31	1,662	100.00	0	0.00	0	0.00	466	98.94		
1471	PEKANBARU	1,026,671	88,876	27,720	14,984	5,515	19.90	1,248	8.33	5,515	100.00	4	0.32	18	1.44	1191	95.43		
1472	DUMAI	343,597	35,535	25,770	3,234	4,901	19.02	1,327	41.03	4,901	100.00	0	0.00	2	0.15	1216	91.64		
PROVINSI RIAU		6,757,330	601,505	185,430	90,850	38,465	289	11,297	235	38,465	1,200	321	2.84	233	2.06	9,780	86.57		
ANGKA KESAKITAN DIARE PER 1.000 PENDUDUK				270	843														

Sumber: Bidang P2P Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

Ket:

- Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS
- Persentase perkiraan jumlah kasus diare yang datang ke fasyankes besarnya sesuai dengan perkiraan daerah, namun jika tidak tersedia maka menggunakan perkiraan 10% dari perkiraan jumlah penderita untuk semua umur dan 20% untuk balita

TABEL 62

DETEKSI DINI HEPATITIS B PADA IBU HAMIL MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH IBU HAMIL	JUMLAH IBU HAMIL DIPERIKSA			% BUMIL DIPERIKSA	% BUMIL REAKTIF
			REAKTIF	NON REAKTIF	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
1401	KAMPAR	17,121	47	9,036	9,083	53.1	0.52
1402	INDRAGIRI HULU	8,753	88	5,662	5,750	65.7	1.53
1403	BENGKALIS	11,354	116	10,879	10,995	96.8	1.06
1404	INDRAGIRI HILIR	12,282	59	5,788	5,847	47.6	1.01
1405	PELALAWAN	7,465	121	7,736	7,857	105.3	1.54
1406	ROKAN HULU	11,296	82	8,156	8,238	72.9	1.00
1407	ROKAN HILIR	13,003	122	8,226	8,348	64.2	1.46
1408	SIAK	9,337	74	5,720	5,794	62.1	1.28
1409	KUANTAN SINGINGI	6,576	39	4,014	4,053	61.6	0.96
1410	KEPULAUAN MERANTI	2,960	13	2,465	2,478	83.7	0.52
1471	PEKANBARU	17,556	204	21,654	21,858	124.5	0.93
1472	DUMAI	5,869	87	6,719	6,806	116.0	1.28
PROVINSI RIAU		123,572	1,052	96,055	97,107	78.6	1.08

Sumber: Bidang P2P Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 63

**JUMLAH BAYI YANG LAHIR DARI IBU REAKTIF HBsAg dan MENDAPATKAN HBIG
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BAYI YANG LAHIR DARI IBU HBsAg Reaktif	JUMLAH BAYI YANG LAHIR DARI IBU HBsAg REAKTIF MENDAPAT HBIG					
			< 24 Jam		≥ 24 Jam		TOTAL	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1401	KAMPAR	26	26	100	0	0.0	26	100
1402	INDRAGIRI HULU	35	32	91	3	8.6	35	100
1403	BENGKALIS	48	39	81	9	18.8	48	100
1404	INDRAGIRI HILIR	81	81	100	0	0.0	81	100
1405	PELALAWAN	16	16	100	0	0.0	16	100
1406	ROKAN HULU	41	39	95	2	4.9	41	100
1407	ROKAN HILIR	161	161	100	0	0.0	161	100
1408	SIAK	92	92	100	0	0.0	92	100
1409	KUANTAN SINGINGI	98	98	100	0	0.0	98	100
1410	KEPULAUAN MERANTI	22	22	100	0	0.0	22	100
1471	PEKANBARU	247	247	100	0	0.0	247	100
1472	DUMAI	48	36	75	5	10.4	41	85.42
PROVINSI RIAU		915	889	97	19	2.1	908	99.23

Sumber: Bidang P2P Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 64

**KASUS BARU KUSTA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	KASUS BARU								
		PAUSI BASILER (PB)/ KUSTA KERING			MULTI BASILER (MB)/ KUSTA BASAH			PB + MB		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1401	KAMPAR	0	0	0	10	5	15	10	5	15
1402	INDRAGIRI HULU	0	0	0	4	1	5	4	1	5
1403	BENGKALIS	0	0	0	5	5	10	5	5	10
1404	INDRAGIRI HILIR	1	3	4	25	10	35	26	13	39
1405	PELALAWAN	0	0	0	4	2	6	4	2	6
1406	ROKAN HULU	1	0	1	1	0	1	2	0	2
1407	ROKAN HILIR	0	0	0	4	1	5	4	1	5
1408	SIAK	0	0	0	5	1	6	5	1	6
1409	KUANTAN SINGINGI	0	0	0	3	1	4	3	1	4
1410	KEPULAUAN MERANTI	0	0	0	1	1	2	1	1	2
1471	PEKANBARU	0	0	0	7	1	8	7	1	8
1472	DUMAI	0	2	2	5	6	11	5	8	13
PROVINSI RIAU		2	5	7	74	34	108	76	39	115
PROPORSI JENIS KELAMIN		28.6	71.4		68.5	31.5		66.1	33.9	
ANGKA PENEMUAN KASUS BARU (NCDR/NEW CASE DETECTION RATE) PER 100.000 PENDUDUK								1.1	0.6	1.7

Sumber: Bidang P2P Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 65

**KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 2, PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN,
MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

NO	KABUPATEN/KOTA	KASUS BARU							
		PENDERITA KUSTA	CACAT TINGKAT 0		CACAT TINGKAT 2		PENDERITA KUSTA ANAK <15 TAHUN		PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN DENGAN CACAT TINGKAT 2
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1401	KAMPAR	15	8	53.3	7	46.7	2	13.3	0
1402	INDRAGIRI HULU	5	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0
1403	BENGKALIS	10	10	100.0	0	0.0	2	20.0	0
1404	INDRAGIRI HILIR	39	37	94.9	0	0.0	1	2.6	0
1405	PELALAWAN	6	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0
1406	ROKAN HULU	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0
1407	ROKAN HILIR	5	5	100.0	0	0.0	1	20.0	0
1408	SIAK	6	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0
1409	KUANTAN SINGINGI	4	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0
1410	KEPULAUAN MERANTI	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0
1471	PEKANBARU	8	0	0.0	2	25.0	0	0.0	0
1472	DUMAI	13	11	84.6	2	15.4	2	15.4	0
PROVINSI RIAU		115	96	83.5	11	9.6	8	7.0	0
ANGKA CACAT TINGKAT 2 PER 1.000.000 PENDUDUK					1.6				

Sumber: Bidang P2P Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 66

JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS, USIA, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	KASUS TERDAFTAR								
		PAUSI BASILER/KUSTA KERING			MULTI BASILER/KUSTA BASAH			JUMLAH		
		ANAK	DEWASA	TOTAL	ANAK	DEWASA	TOTAL	ANAK	DEWASA	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1401	KAMPAR	0	0	0	2	14	16	2	14	16
1402	INDRAGIRI HULU	0	0	0	0	4	4	0	4	4
1403	BENGKALIS	0	0	0	2	8	10	2	8	10
1404	INDRAGIRI HILIR	1	2	3	0	41	41	1	43	44
1405	PELALAWAN	0	0	0	0	7	7	0	7	7
1406	ROKAN HULU	0	1	1	0	1	1	0	2	2
1407	ROKAN HILIR	0	0	0	2	5	7	2	5	7
1408	SIAK	0	0	0	0	6	6	0	6	6
1409	KUANTAN SINGINGI	0	0	0	1	4	5	1	4	5
1410	KEPULAUAN MERANTI	0	0	0	0	2	2	0	2	2
1471	PEKANBARU	0	0	0	0	9	9	0	9	9
1472	DUMAI	1	1	2	3	7	10	4	8	12
PROVINSI RIAU		2	4	6	10	108	118	12	112	124
ANGKA PREVALENSI PER 10.000 PENDUDUK										0.2

Sumber: Bidang P2P Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 67

PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (RELEASE FROM TREATMENT/RFT) MENURUT TIPE, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	KUSTA (PB)			KUSTA (MB)		
		TAHUN -1			TAHUN -2		
		JML PENDERITA BARU ^a	JML PENDERITA RFT	RFT RATE PB (%)	JML PENDERITA BARU ^b	JML PENDERITA RFT	RFT RATE MB (%)
1	2	4	5	6	7	8	9
1401	KAMPAR	0	0	0	3	3	100.0
1402	INDRAGIRI HULU	0	0	0	4	4	100.0
1403	BENGKALIS	0	0	0	4	3	75.0
1404	INDRAGIRI HILIR	8	6	0	34	24	70.6
1405	PELALAWAN	0	0	0	1	0	0.0
1406	ROKAN HULU	0	0	0	3	3	100.0
1407	ROKAN HILIR	0	0	0	9	7	77.8
1408	SIAK	1	1	100	2	2	100.0
1409	KUANTAN SINGINGI	0	0	0	1	1	100.0
1410	KEPULAUAN MERANTI	0	0	0	3	1	33.3
1471	PEKANBARU	2	2	100	2	1	50.0
1472	DUMAI	0	0	0	12	7	58.3
PROVINSI RIAU		11	9	81.8	78	56	71.8

Sumber: Bidang P2P Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

Keterangan :

- a = Penderita kusta PB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 1 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2021, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2020 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu
- b= Penderita kusta MB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 2 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2021, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2019 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu

TABEL 68

**JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK <15 TAHUN	JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO)
1	2	3	4
1401	KAMPAR	256,284	20
1402	INDRAGIRI HULU	119,640	16
1403	BENGKALIS	155,716	13
1404	INDRAGIRI HILIR	180,029	11
1405	PELALAWAN	165,698	1
1406	ROKAN HULU	231,113	17
1407	ROKAN HILIR	227,205	5
1408	SIAK	153,919	7
1409	KUANTAN SINGINGI	79,523	3
1410	KEPULAUAN MERANTI	46,617	4
1471	PEKANBARU	286,135	9
1472	DUMAI	85,130	5
PROVINSI RIAU		1,987,009	111
AFP RATE (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN			5.6

Sumber: Bidang P2P Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

TABEL 69

JUMLAH KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KASUS PD3I																
		DIFTERI				PERTUSIS			TETANUS NEONATORUM				HEPATITIS B			SUSPEK CAMPAK		
		JUMLAH KASUS			MENINGGAL				JUMLAH KASUS			MENINGGAL	JUMLAH KASUS					
		L	P	L+P		L	P	L+P	L	P	L+P		L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1401	KAMPAR	2	2	4	0	10	14	24	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
1402	INDRAGIRI HULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	9
1403	BENGKALIS	0	1	1	0	8	6	14	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7
1404	INDRAGIRI HILIR	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
1405	PELALAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8
1406	ROKAN HULU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	4	2	6
1407	ROKAN HILIR	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	13	20
1408	SIAK	5	7	12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5
1409	KUANTAN SINGINGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
1410	KEPULAUAN MERANTI	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	6	10
1471	PEKANBARU	8	6	14	0	21	34	55	0	0	0	0	0	0	0	23	24	47
1472	DUMAI	3	0	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	6	14
PROVINSI RIAU		19	18	37	1	41	55	96	0	2	2	1	0	0	0	67	70	137
CASE FATALITY RATE (%)					2.7							50.0						
INCIDENCE RATE SUSPEK CAMPAK																1.0	1.0	2.0

Sumber: Bidang P2P Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 70

**KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI < 24 JAM
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

NO	KABUPATEN/KOTA	KLB DI DESA/KELURAHAN		
		JUMLAH	DITANGANI <24 JAM	%
1	2	3	4	5
1401	KAMPAR	2	2	100.0
1402	INDRAGIRI HULU	0	0	100.0
1403	BENGKALIS	1	1	100.0
1404	INDRAGIRI HILIR	7	7	100.0
1405	PELALAWAN	1	1	100.0
1406	ROKAN HULU	1	1	100.0
1407	ROKAN HILIR	33	33	100.0
1408	SIAK	4	4	100.0
1409	KUANTAN SINGINGI	1	1	100.0
1410	KEPULAUAN MERANTI	1	1	100.0
1471	PEKANBARU	11	11	100.0
1472	DUMAI	6	6	100.0
PROVINSI RIAU		68	68	100.0

Sumber: Bidang P2P Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 71

JUMLAH PENDERITA DAN KEMATIAN PADA KLB MENURUT JENIS KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS KEJADIAN LUAR BIASA	YANG TERSERANG		WAKTU KEJADIAN (TANGGAL)			JUMLAH PENDERITA			KELOMPOK UMUR PENDERITA														JUMLAH KEMATIAN			JUMLAH PENDUDUK TERANCAM			ATTACK RATE (%)			CFR (%)			
			JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL	DIKETAHUI	DITANGGU-LANGI	AKHIR	L	P	L+P	0-7 HARI	8-28 HARI	1-11 BLN	1-4 THN	5-9 THN	10-14 THN	15-19 THN	20-44 THN	45-54 THN	55-69 THN	70+ THN	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
1	DUMAI	DBD/DHF	1	1	13/02/2024	13/02/2024	11/03/2024	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6.208	12.057	18.265	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0				
2	DUMAI	DIFTERI	2	2	01/08/2024	01/08/2024	28/08/2024	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	16.522	16.449	32.971	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
3	DUMAI	DIFTERI	1	1	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.069	3.115	6.184	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
4	DUMAI	DBD/DHF	1	1	27/12/2024	27/12/2024	09/01/2025	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4.822	4.125	8.947	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
5	BENGKALIS	PERTUSIS	1	1	20/03/2024	20/03/2024	-	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.499	1.527	3.026	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
6	PEKANBARU	DIFTERI	1	1	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	17.710	16.914	34.624	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
7	PEKANBARU	PERTUSIS	2	2	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	2	1	3	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.846	28.848	58.694	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
8	PEKANBARU	DIFTERI	1	1	28/06/2024	28/06/2024	26/07/2024	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17.710	16.914	34.624	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
9	PEKANBARU	DIFTERI	1	1	01/07/2024	01/07/2024	31/07/2024	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12.136	11.934	24.070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
10	PEKANBARU	KERACUNAN PANGAN	1	1	07/07/2024	07/07/2024	08/07/2024	11	36	47	0	0	0	2	5	2	2	27	7	2	0	0	0	0	16	46	62	68,8	78,3	75,8	0,0	0,0	0,0				
11	PEKANBARU	PERTUSIS	1	1	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.711	6.332	13.043	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
12	PEKANBARU	RABIES	1	1	29/10/2024	29/10/2024	29/12/2024	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	109.048	104.077	213.125	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0			
13	PEKANBARU	PERTUSIS	1	1	18/12/2024	18/12/2024	18/01/25	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.603	3.520	7.123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
14	PEKANBARU	PERTUSIS	1	1	24/12/2024	24/12/2024	24/01/2025	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.312	12.802	26.114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
15	PEKANBARU	LEPTOSPIROSIS	1	1	31/01/2024	31/01/2024	20/02/2024	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6.711	6.332	13.043	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
16	KAMPAR	PERTUSIS	1	1	16/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.943	6.593	13.536	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
17	KAMPAR	PERTUSIS	1	1	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.943	6.593	13.536	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
18	KAMPAR	PERTUSIS	1	1	08/07/2024	08/07/2024	26/07/2024	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.943	6.593	13.536	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
19	KAMPAR	KERACUNAN PANGAN	1	1	30/07/2024	30/07/2024	31/07/2024	1	18	19	0	0	0	0	0	17	2	0	0	0	0	0	0	0	5	4	9	21,1	414,0	208,8	0,0	0,0	0,0				
20	KAMPAR	PERTUSIS	1	1	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.943	6.593	13.536	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
21	KAMPAR	PERTUSIS	1	1	19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634	4.001	4.635	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
22	KAMPAR	KERACUNAN PANGAN	1	1	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	3	7	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.751	1.656	3.407	0,2	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0				
23	KAMPAR	PERTUSIS	1	1	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.943	6.593	13.536	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
24	KAMPAR	PERTUSIS	1	1	14/12/2024	14/12/2024	14/12/2024	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.943	6.593	13.536	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
25	KUANTAN SINGINGI	CHIKUNGUNYA	1	8	13/11/2024	13/11/2024	BELUM BERAKHIR	14	27	41	0	0	0	1	2	2	3	16	11	6	0	0	0	0	10.989	10.732	21.721	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0				
26	SIAK	DIFTERI	1	1	23/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	250	160	410	0,0	0,6	0,2	0,0	0,0	100,0	100,0			
27	SIAK	DIFTERI	1	1	09/07/2024	09/07/2024	14/09/2024	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1.472	1.342	2.814	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
28	SIAK	DIFTERI	1	1	17/09/2024	17/09/2024	24/09/2024	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	190	386	0,0	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0				
29	SIAK	DIFTERI	1	1	22/10/2024	18/10/2024	25/10/2024	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	100	110	210	0,0	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0				
30	PELALAWAN	RABIES	1	1	18/04/2024	18/04/2024	21/04/2024	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	55	48	103	0,0	2,1	1,0	0,0	100,0	100,0				
31	KEP. MERANTI	KERACUNAN PANGAN	1	1	29/05/2024	29/05/2024	01/06/2024	26	39	65	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	39	65	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0				
32	ROKAN HULU	RABIES	1	1	03/09/2024	03/09/2024	30/08/2024	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1.519	1.459	2.978	0,1	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0				
33	INDRAGIRI HILIR	MALARIA	1	1	14/09/2024	14/09/2024	MASIH BERLANGSUNG	131	109	240	0	0	2	7	19	28	19	99	36	24	6	0	0	0	450	426	876	29,1	25,6	27,4	0,0	0,0	0,0				
34	INDRAGIRI HILIR	MALARIA	1	1	29/09/2024	29/09/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	595	1.245	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0				
35	INDRAGIRI HILIR	MALARIA	1	1	30/09/2024	30/09/2024	MASIH BERLANGSUNG	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	443	394	837	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0				
36	INDRAGIRI HILIR	MALARIA	1	1	10/10/2024	10/10/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0																												

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS KEJADIAN LUAR BIASA	YANG TERSERANG		WAKTU KEJADIAN (TANGGAL)			JUMLAH PENDERITA			KELOMPOK UMUR PENDERITA														JUMLAH KEMATIAN			JUMLAH PENDUDUK TERANCAM			ATTACK RATE (%)			CFR (%)		
			JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL	DIKETAHUI	DITANGGULANGI	AKHIR	L	P	L+P	0-7 HARI	8-28 HARI	1-11 BLN	1-4 THN	5-9 THN	10-14 THN	15-19 THN	20-44 THN	45-54 THN	55-69 THN	70+ THN	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
70	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	06/02/2024	06/02/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753	706	1.459	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71	ROKAN HILIR	MALARIA		1	17/02/2024	17/02/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	532	464	996	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	ROKAN HILIR	MALARIA		1	07/02/2024	07/02/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1.917	1.743	3.660	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	ROKAN HILIR	MALARIA		1	23/02/2024	23/02/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ROKAN HILIR	MALARIA	1	2	13/03/2024	13/03/2024	MASIH BERLANGSUNG	8	5	13	0	0	0	0	1	0	0	9	1	0	2	0	0	0	10.641	10.206	20.847	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
75	ROKAN HILIR	MALARIA		1	09/03/2024	09/03/2024	MASIH BERLANGSUNG	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	5.734	5.532	11.266	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76	ROKAN HILIR	MALARIA		2	19/03/2024	19/03/2024	MASIH BERLANGSUNG	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6.112	5.803	11.915	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
77	ROKAN HILIR	MALARIA		1	08/03/2024	08/03/2024	MASIH BERLANGSUNG	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.471	1.417	2.888	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78	ROKAN HILIR	MALARIA		1	28/03/2024	28/03/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2.247	2.138	4.385	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	ROKAN HILIR	MALARIA		1	07/03/2024	07/03/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1.544	1.448	2.992	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80	ROKAN HILIR	MALARIA	1	3	08/03/2024	08/03/2024	MASIH BERLANGSUNG	21	13	34	0	0	0	0	1	1	2	22	5	3	0	0	0	6.456	6.040	12.496	0,3	0,2	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81	ROKAN HILIR	MALARIA		1	09/03/2024	09/03/2024	MASIH BERLANGSUNG	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	447	430	877	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82	ROKAN HILIR	MALARIA		1	11/03/2024	11/03/2024	MASIH BERLANGSUNG	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2.562	2.522	5.084	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83	ROKAN HILIR	MALARIA		1	13/03/2024	13/03/2024	MASIH BERLANGSUNG	8	6	14	0	0	0	0	0	1	2	8	2	0	1	0	0	5.444	5.118	10.562	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	ROKAN HILIR	MALARIA		1	26/03/2024	26/03/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	720	654	1.374	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85	ROKAN HILIR	MALARIA		1	28/03/2024	28/03/2024	MASIH BERLANGSUNG	16	9	25	0	0	0	1	1	4	3	12	2	2	0	0	0	3.845	3.619	7.464	0,4	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	ROKAN HILIR	MALARIA	1	2	25/03/2024	25/03/2024	MASIH BERLANGSUNG	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	1.285	1.170	2.455	0,3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	23/03/2024	23/03/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3.845	3.619	7.464	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	24/04/2024	24/04/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2.247	2.138	4.385	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89	ROKAN HILIR	MALARIA		1	16/04/2024	16/04/2024	MASIH BERLANGSUNG	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1.890	1.775	3.665	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90	ROKAN HILIR	MALARIA		1	19/04/2024	19/04/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1.566	1.460	3.026	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	ROKAN HILIR	MALARIA		1	20/04/2024	20/04/2024	MASIH BERLANGSUNG	8	4	12	0	0	0	0	0	2	1	6	2	1	0	0	0	6.641	6.418	13.059	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92	ROKAN HILIR	MALARIA		1	26/04/2024	26/04/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1.566	1.460	3.026	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	03/04/2024	03/04/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	753	706	1.459	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94	ROKAN HILIR	MALARIA		1	27/04/2024	27/04/2024	MASIH BERLANGSUNG	3	0	3	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	532	464	996	0,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	20/04/2024	20/04/2024	MASIH BERLANGSUNG	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	5.444	5.118	10.562	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96	ROKAN HILIR	MALARIA		1	25/04/2024	25/04/2024	MASIH BERLANGSUNG	2	2	4	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	447	430	877	0,4	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	ROKAN HILIR	MALARIA		1	02/04/2024	02/04/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	754	784	1.538	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	ROKAN HILIR	MALARIA		2	29/04/2024	29/04/2024	MASIH BERLANGSUNG	30	21	51	0	0	0	0	4	3	4	34	4	2	0	0	0	8.963	8.415	17.378	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	23/04/2024	23/04/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	386	364	750	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100	ROKAN HILIR	MALARIA		1	24/04/2024	24/04/2024	MASIH BERLANGSUNG	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1.211	1.104	2.315	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	02/04/2024	02/04/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	754	784	1.538	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102	ROKAN HILIR	MALARIA	1	2	27/05/2024	27/05/2024	MASIH BERLANGSUNG	15	7	22	0	0	0	0	1	2	1	13	2	2	1	0	0	8.888	8.556	17.444	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	ROKAN HILIR	MALARIA		1	30/05/2024	30/05/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	0																					

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS KEJADIAN LUAR BIASA	YANG TERSERANG		WAKTU KEJADIAN (TANGGAL)			JUMLAH PENDERITA			KELOMPOK UMUR PENDERITA													JUMLAH KEMATIAN			JUMLAH PENDUDUK TERANCAM			ATTACK RATE (%)			CFR (%)		
			JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL	DIKETAHUI	DITANGGULANGI	AKHIR	L	P	L+P	0-7 HARI	8-28 HARI	1-11 BLN	1-4 THN	5-9 THN	10-14 THN	15-19 THN	20-44 THN	45-54 THN	55-69 THN	70+ THN	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	31	32	33	34		
144	ROKAN HILIR	MALARIA			29/07/2024	29/07/2024	MASIH BERLANGSUNG	4	1	5	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	8.297	8.054	16.351	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
145	ROKAN HILIR	MALARIA		1	11/07/2024	11/07/2024	MASIH BERLANGSUNG	2	2	4	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1.890	1.775	3.665	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
146	ROKAN HILIR	MALARIA		1	13/07/2024	13/07/2024	MASIH BERLANGSUNG	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2.008	1.893	3.901	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
147	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	18/07/2024	18/07/2024	MASIH BERLANGSUNG	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2.247	2.138	4.385	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
148	ROKAN HILIR	MALARIA		1	16/07/2024	16/07/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.933	3.786	7.719	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
149	ROKAN HILIR	MALARIA		1	15/07/2024	15/07/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1.544	1.448	2.992	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
150	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	09/07/2024	09/07/2024	MASIH BERLANGSUNG	3	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2.562	2.522	5.084	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
151	ROKAN HILIR	MALARIA		3	18/07/2024	18/07/2024	MASIH BERLANGSUNG	59	57	116	0	0	0	2	3	14	16	60	13	8	0	0	0	11.630	10.972	22.602	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
152	ROKAN HILIR	MALARIA		1	15/07/2024	15/07/2024	MASIH BERLANGSUNG	3	1	4	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	1.338	1.244	2.582	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
153	ROKAN HILIR	MALARIA		1	29/07/2024	29/07/2024	MASIH BERLANGSUNG	32	25	57	0	0	0	1	3	6	8	27	7	5	0	0	0	2.777	2.561	5.338	1,2	1,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
154	ROKAN HILIR	MALARIA		1	12/07/2024	12/07/2024	MASIH BERLANGSUNG	5	5	10	0	0	0	0	2	1	0	7	0	0	0	0	0	447	430	877	1,1	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
155	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	22/07/2024	22/07/2024	MASIH BERLANGSUNG	4	2	6	0	0	0	0	3	0	0	2	1	0	0	0	0	958	910	1.868	0,4	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
156	ROKAN HILIR	MALARIA		1	20/07/2024	20/07/2024	MASIH BERLANGSUNG	8	4	12	0	0	0	0	1	4	1	4	1	0	1	0	0	532	464	996	1,5	0,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
157	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	08/07/2024	08/07/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	754	784	1.538	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
158	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	22/07/2024	22/07/2024	MASIH BERLANGSUNG	10	10	20	0	0	0	0	0	0	2	14	1	3	0	0	0	1.211	1.104	2.315	0,8	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0		
159	ROKAN HILIR	MALARIA		1	10/07/2024	10/07/2024	MASIH BERLANGSUNG	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	386	364	750	1,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
160	ROKAN HILIR	MALARIA		1	09/07/2024	09/07/2024	MASIH BERLANGSUNG	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2.582	2.471	5.053	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
161	ROKAN HILIR	MALARIA	1	2	10/07/2024	10/07/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1.579	1.466	3.045	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
162	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	09/08/2024	09/08/2024	MASIH BERLANGSUNG	14	11	25	0	0	0	1	3	4	1	11	0	3	2	0	0	6.641	6.418	13.059	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
163	ROKAN HILIR	MALARIA		1	10/08/2024	10/08/2024	MASIH BERLANGSUNG	5	3	8	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	5.734	5.532	11.266	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
164	ROKAN HILIR	MALARIA		1	04/08/2024	04/08/2024	MASIH BERLANGSUNG	2	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	4.297	4.266	8.563	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
165	ROKAN HILIR	MALARIA		1	05/08/2024	05/08/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2.179	2.017	4.196	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
166	ROKAN HILIR	MALARIA		1	22/08/2024	22/08/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1.566	1.460	3.026	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
167	ROKAN HILIR	MALARIA		1	27/08/2024	27/08/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4.000	3.788	7.788	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
168	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	24/08/2024	24/08/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3.933	3.786	7.719	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
169	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	20/08/2024	20/08/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10.876	10.842	21.718	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
170	ROKAN HILIR	MALARIA	1	3	07/08/2024	07/08/2024	MASIH BERLANGSUNG	40	29	69	0	0	0	1	5	7	8	33	9	6	0	0	0	0	5.786	5.513	11.299	0,7	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
171	ROKAN HILIR	MALARIA		2	06/08/2024	06/08/2024	MASIH BERLANGSUNG	26	16	42	0	0	0	1	2	4	5	21	4	4	1	0	0	0	6.186	5.854	12.040	0,4	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
172	ROKAN HILIR	MALARIA		1	10/08/2024	10/08/2024	MASIH BERLANGSUNG	36	8	44	0	0	0	1	4	6	2	24	4	2	1	0	0	0	5.444	5.118	10.562	0,7	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
173	ROKAN HILIR	MALARIA		1	05/08/2024	05/08/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	720	654	1.374	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
174	ROKAN HILIR	MALARIA		1	22/08/2024	22/08/2024	MASIH BERLANGSUNG	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1.338	1.244	2.582	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
175	ROKAN HILIR	MALARIA	1	2	10/08/2024	10/08/2024	MASIH BERLANGSUNG	8	8	16	0	0	0	0	1	0	1	3	5	3	3	0	0	0	1.285	1.170	2.455	0,6	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
176	ROKAN HILIR	MALARIA		1	01/08/2024	01/08/2024	MASIH BERLANGSUNG	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	205	204	409	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
177	ROKAN HILIR	MALARIA		1	09/08/2024	09/08/2024	MASIH BERLANGSUNG	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.910	1.892	3.802	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
178	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	08/08/2024	08/08/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.092	1.018	2.110	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
179	ROKAN HILIR	MALARIA		1	15/08/2024	15/08/2024	MASIH BERLANGSUNG	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3.469	3.288	6.757	0,0								

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS KEJADIAN LUAR BIASA	YANG TERSERANG		WAKTU KEJADIAN (TANGGAL)			JUMLAH PENDERITA			KELOMPOK UMUR PENDERITA														JUMLAH KEMATIAN			JUMLAH PENDUDUK TERANCAM			ATTACK RATE (%)			CFR (%)		
			JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL	DIKETAHUI	DITANGGULANGI	AKHIR	L	P	L+P	0-7 HARI	8-28 HARI	1-11 BLN	1-4 THN	5-9 THN	10-14 THN	15-19 THN	20-44 THN	45-54 THN	55-69 THN	70+ THN	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
218	ROKAN HILIR	MALARIA		1	10/10/2024	10/10/2024	MASIH BERLANGSUNG	8	7	15	0	0	0	0	1	0	4	10	0	0	0	0	0	0	0	2.341	2.235	4.576	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
219	ROKAN HILIR	MALARIA		1	19/10/2024	19/10/2024	MASIH BERLANGSUNG	30	17	47	0	0	0	1	3	8	5	21	8	1	0	0	0	0	3.845	3.619	7.464	0,8	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
220	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	22/10/2024	22/10/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	532	464	996	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
221	ROKAN HILIR	MALARIA		1	31/10/2024	31/10/2024	MASIH BERLANGSUNG	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3.762	3.658	7.420	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
222	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	15/10/2024	15/10/2024	MASIH BERLANGSUNG	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2.850	2.738	5.588	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
223	ROKAN HILIR	MALARIA		1	22/10/2024	22/10/2024	MASIH BERLANGSUNG	15	4	19	0	0	0	0	1	0	1	13	2	2	0	0	0	0	1.211	1.104	2.315	1,2	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
224	ROKAN HILIR	MALARIA		1	27/10/2024	27/10/2024	MASIH BERLANGSUNG	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	386	364	750	0,8	0,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
225	ROKAN HILIR	MALARIA		1	24/10/2024	24/10/2024	MASIH BERLANGSUNG	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2.582	2.471	5.053	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
226	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	16/10/2024	16/10/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	951	946	1.897	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
227	ROKAN HILIR	MALARIA		1	07/10/2024	07/10/2024	MASIH BERLANGSUNG	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.592	1.448	3.040	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
228	ROKAN HILIR	MALARIA		1	25/10/2024	25/10/2024	MASIH BERLANGSUNG	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1.508	1.442	2.950	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
229	ROKAN HILIR	MALARIA		1	19/10/2024	19/10/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	1	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2.055	1.817	3.872	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
230	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	13/11/2024	13/11/2024	MASIH BERLANGSUNG	7	1	8	0	0	0	1	0	1	0	5	0	0	1	0	0	0	8.649	8.311	16.960	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
231	ROKAN HILIR	MALARIA		1	16/11/2024	16/11/2024	MASIH BERLANGSUNG	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4.297	4.266	8.563	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
232	ROKAN HILIR	MALARIA		1	08/11/2024	08/11/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2.179	2.017	4.196	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
233	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	23/11/2024	23/11/2024	MASIH BERLANGSUNG	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3.933	3.786	7.719	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
234	ROKAN HILIR	MALARIA		1	10/11/2024	10/11/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2.247	2.138	4.385	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
235	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	06/11/2024	06/11/2024	MASIH BERLANGSUNG	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2.562	2.522	5.084	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
236	ROKAN HILIR	MALARIA		1	18/11/2024	18/11/2024	MASIH BERLANGSUNG	19	11	30	0	0	0	1	1	1	1	20	2	4	0	0	0	0	5.444	5.118	10.562	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
237	ROKAN HILIR	MALARIA		3	23/11/2024	23/11/2024	MASIH BERLANGSUNG	21	5	26	0	0	0	1	1	2	2	12	5	3	0	0	0	0	5.012	4.703	9.715	0,4	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
238	ROKAN HILIR	MALARIA	3		25/11/2024	25/11/2024	MASIH BERLANGSUNG	41	21	62	0	0	0	4	1	4	3	38	9	3	0	0	0	0	6.456	6.040	12.496	0,6	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
239	ROKAN HILIR	MALARIA	1	2	03/11/2024	03/11/2024	MASIH BERLANGSUNG	4	1	5	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	0	1.285	1.170	2.455	0,3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
240	ROKAN HILIR	MALARIA		1	26/11/2024	26/11/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	3	4	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	737	668	1.405	0,1	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
241	ROKAN HILIR	MALARIA		1	14/11/2024	14/11/2024	MASIH BERLANGSUNG	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1.910	1.892	3.802	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
242	ROKAN HILIR	MALARIA		1	18/11/2024	18/11/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	1	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1.079	1.019	2.098	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
243	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	22/11/2024	22/11/2024	MASIH BERLANGSUNG	27	10	37	0	0	0	0	1	1	3	4	18	6	4	0	0	0	1.211	1.104	2.315	2,2	0,9	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
244	ROKAN HILIR	MALARIA		1	14/11/2024	14/11/2024	MASIH BERLANGSUNG	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2.850	2.738	5.588	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
245	ROKAN HILIR	MALARIA		1	12/11/2024	12/11/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1.596	1.476	3.072	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
246	ROKAN HILIR	MALARIA		1	06/11/2024	06/11/2024	MASIH BERLANGSUNG	6	1	7	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	386	364	750	1,6	0,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
247	ROKAN HILIR	MALARIA		1	29/11/2024	29/11/2024	MASIH BERLANGSUNG	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2.582	2.471	5.053	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
248	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	18/11/2024	18/11/2024	MASIH BERLANGSUNG	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3.727	3.532	7.259	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
249	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	03/11/2024	03/11/2024	MASIH BERLANGSUNG	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	1.508	1.442	2.950	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
250	ROKAN HILIR	MALARIA		1	06/11/2024	06/11/2024	MASIH BERLANGSUNG	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	2.055	1.817	3.872	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
251	ROKAN HILIR	MALARIA		2	22/11/2024	22/11/2024	MASIH BERLANGSUNG	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	3.531	3.298	6.829	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
252	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	03/11/2024	03/11/2024	MASIH BERLANGSUNG	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1.991	1.870	3.861	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
253	ROKAN HILIR	MALARIA	1	1	26/12/2024	26/12/2024	MASIH BERLANGSUNG	2	2	4	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	6.641	6.418	13.059	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
254	ROKAN HILIR	MALARIA		1	03/12/2024	03/12/2024	MASIH BERLANGSUNG	1	2	3	0	0	0	0	0	1																				

TABEL 72

**KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)								
		JUMLAH KASUS			MENINGGAL			CFR (%)		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1401	KAMPAR	123	133	256	2	1	3	1.6	0.8	1.2
1402	INDRAGIRI HULU	16	19	35	1	0	1	6.3	0.0	2.9
1403	BENGKALIS	368	343	711	1	2	3	0.3	0.6	0.4
1404	INDRAGIRI HILIR	54	27	81	1	0	1	1.9	0.0	1.2
1405	PELALAWAN	48	34	82	0	0	0	0.0	0.0	0.0
1406	ROKAN HULU	108	107	215	0	3	3	0.0	2.8	1.4
1407	ROKAN HILIR	75	78	153	2	0	2	2.7	0.0	1.3
1408	SIAK	91	90	181	0	0	0	0.0	0.0	0.0
1409	KUANTAN SINGINGI	68	61	129	0	0	0	0.0	0.0	0.0
1410	KEPULAUAN MERANTI	17	14	31	0	0	0	0.0	0.0	0.0
1471	PEKANBARU	297	254	551	1	1	2	0.3	0.4	0.4
1472	DUMAI	461	327	788	4	0	4	0.9	0.0	0.5
PROVINSI RIAU		1,726	1,487	3,213	12	7	19	0.7	0.5	0.6
ANGKA KESAKITAN DBD PER 100.000 PENDUDUK		44.0								

Sumber: Bidang P2P Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

TABEL 73

KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE KAB	KABUPATEN KOTA	SUSPEK	MALARIA														
			KONFIRMASI LABORATORIUM			% KONFIRMASI LABORATORIUM	POSITIF			PENGOBATAN STANDAR	% PENGOBATAN STANDAR	MENINGGAL			CFR		
			MIKROSKOPIS	RAPID DIAGNOSTIC TEST (RDT)	TOTAL		L	P	L+P			L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1401	KAMPAR	335	19	316	335	100.0	5	1	6	6	100	0	0	0	0.0	0	0
1402	INDRAGIRI HULU	143	88	55	143	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
1403	BENGKALIS	1,086	26	1,060	1,086	100.0	6	1	7	4	57	0	0	0	0.0	0	0
1404	INDRAGIRI HILIR	4,059	1,271	2,788	4,059	100.0	141	108	249	248	100	0	0	0	0.0	0	0
1405	PELALAWAN	900	650	250	900	100.0	4	0	4	4	100	0	0	0	0.0	0	0
1406	ROKAN HULU	197	68	129	197	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
1407	ROKAN HILIR	7,735	2,454	5,281	7,735	100.0	1,574	875	2,449	2,430	99	0	0	0	0.0	0	0
1408	SIAK	925	24	901	925	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
1409	KUANTAN SINGINGI	125	45	80	125	100.0	1	0	1	1	100	0	0	0	0.0	0	0
1410	KEPULAUAN MERANTI	34	2	32	34	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
1471	PEKANBARU	1,033	100	933	1,033	100.0	38	4	42	42	0	0	0	0	0.0	0	0
1472	DUMAI	391	25	366	391	100.0	5	3	8	8	100	0	0	0	0.0	1	-1
PROVINSI RIAU		16,963	4,772	12,191	16,963	100.0	1,774	992	2,766	2,743	99	0	0	0	0.0	0.0	0.0
ANGKA KESAKITAN (ANNUAL PARASITE INCIDENCE) PER 1.000 PENDUDUK																	
0.41																	

Sumber: Sumber: Bidang P2P (SISMAL V3) Dinas kesehatan Prov. Riau
Ket: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

TABEL 74

**PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	PENDERITA KRONIS FILARIASIS														
		KASUS KRONIS TAHUN SEBELUMNYA			KASUS KRONIS BARU DITEMUKAN			KASUS KRONIS PINDAH			KASUS KRONIS MENINGGAL			JUMLAH SELURUH KASUS KRONIS		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1401	KAMPAR	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
1402	INDRAGIRI HULU	14	10	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	10	24
1403	BENGKALIS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1404	INDRAGIRI HILIR	13	6	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	6	19
1405	PELALAWAN	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	7
1406	ROKAN HULU	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
1407	ROKAN HILIR	13	6	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	6	19
1408	SIAK	8	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	10
1409	KUANTAN SINGINGI	5	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	8
1410	KEPULAUAN MERANTI	6	5	11	2	0	2	0	1	1	0	0	0	8	4	12
1471	PEKANBARU	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
1472	DUMAI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
PROVINSI RIAU		67	38	105	3	1	4	0	1	1	0	0	0	71	37	108

Sumber: Bidang P2P Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

Keterangan : Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

TABEL 75

PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI BERUSIA ≥ 15 TAHUN			MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN					
					LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1401	KAMPAR	92,625	91,000	183,625	42,865	46.3	59,194	65.0	102,059	55.6
1402	INDRAGIRI HULU	46,707	51,146	97,853	8,606	18.4	14,093	27.6	22,699	23.2
1403	BENGKALIS	68,009	65,342	133,351	43,003	63.2	53,834	82.4	96,873	72.6
1404	INDRAGIRI HILIR	83,743	77,302	161,045	19,416	23.2	23,800	30.8	43,216	26.8
1405	PELALAWAN	52,100	48,093	100,193	8,928	17.1	13,267	27.6	22,195	22.2
1406	ROKAN HULU	60,776	58,404	119,180	29,002	47.7	32,366	55.4	61,368	51.5
1407	ROKAN HILIR	59,866	57,122	116,988	49,408	82.5	60,318	105.6	109,726	93.8
1408	SIAK	39,799	37,956	77,755	32,556	81.8	36,674	96.6	69,230	89.0
1409	KUANTAN SINGINGI	37,261	35,962	73,223	11,424	30.7	18,109	50.4	29,533	40.3
1410	KEPULAUAN MERANTI	21,347	20,110	41,457	14,995	70.2	16,962	84.3	35,357	85.3
1471	PEKANBARU	132,962	129,545	262,507	19,398	14.6	27,914	21.5	47,312	18.0
1472	DUMAI	40,577	38,714	79,291	27,558	67.9	32,526	84.0	60,084	75.8
PROVINSI RIAU		735,773	710,695	1,446,468	307,159	41.7	389,057	54.7	699,652	48.4

Sumber: Bidang P2P Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 76

PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDERITA DM	PENDERITA DM YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR	
			JUMLAH	%
1	2	4	5	6
1401	KAMPAR	6,778	8,403	124.0
1402	INDRAGIRI HULU	4,398	5,854	133.1
1403	BENGKALIS	8,774	19,180	218.6
1404	INDRAGIRI HILIR	3,628	3,588	98.9
1405	PELALAWAN	2,095	2,095	100.0
1406	ROKAN HULU	5,258	5,258	100.0
1407	ROKAN HILIR	5,801	5,801	100.0
1408	SIAK	3,785	4,626	122.2
1409	KUANTAN SINGINGI	4,963	4,963	100.0
1410	KEPULAUAN MERANTI	1,607	2,413	150.2
1471	PEKANBARU	19,803	17,745	89.6
1472	DUMAI	4,172	4,549	109.0
PROVINSI RIAU		71,062	84,475	118.9

Sumber: Bidang P2P Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 77

CAKUPAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DENGAN METODE IVA DAN KANKER PAYUDARA DENGAN PEMERIKSAAN KLINIS (SADANIS)
MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS MELAKSANAKAN KEGIATAN DETEKSI DINI IVA & SADANIS*	PEREMPUAN USIA 30-50 TAHUN	PEMERIKSAAN IVA		PEMERIKSAAN SADANIS		IVA POSITIF		CURIGA KANKER LEHER RAHIM		KRIOTERAPI		IVA POSITIF DAN CURIGA KANKER LEHER RAHIM DIRUJUK		TUMOR/ BENJOLAN		CURIGA KANKER PAYUDARA		TUMOR DAN CURIGA KANKER PAYUDARA DIRUJUK	
				JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1401	KAMPAR	31	101,722	1,359	1.3	2390.0	2.3	6	0.4	4	0.3	0	0.0	10	100.0	15	0.6	6	0.3	10	47.6
1402	INDRAGIRI HULU	6	73,321	79	0.1	1717	2.3	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	0.3	5	0.3	8	72.7
1403	BENGKALIS	20	33,279	1,935	5.8	3875.0	11.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1404	INDRAGIRI HILIR	11	22,236	1,200	5.4	1200.0	5.4	7	0.6	7	0.6	7	100.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0
1405	PELALAWAN	14	38,943	633	1.6	633.0	1.6	4	0.6	0	0.0	0	0.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1406	ROKAN HULU	23	89,456	1,068	1.2	1068.0	1.2	5	0.5	5	0.5	0	0.0	5	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1407	ROKAN HILIR	21	144,191	67	0.0	67	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1408	SIAK	15	84,568	888	1.1	888.0	1.1	10	1.1	0	0.0	0	0.0	10	100.0	8	0.9	0	0.0	8	100.0
1409	KUANTAN SINGINGI	13	54,279	2,677	4.9	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	0.0	0	0.0	0	0.0
1410	KEPULAUAN MERANTI	10	36,338	52	0.1	52.0	0.1	1	1.9	1	1.9	0	0.0	1	50.0	2	3.8	0	0.0	0	0.0
1471	PEKANBARU	21	188,023	1,556	0.8	1475.0	0.8	7	0.4	1	0.1	0	0.0	8	100.0	3	0.2	1	0.1	4	100.0
1472	DUMAI	10	42,927	933	2.2	887.0	2.1	26	2.8	20	2.1	20	76.9	20	76.9	14	1.6	14	1.6	14	50.0
PROVINSI RIAU		195	909,283	12,447	1.4	14,252	0.0	67	0.5	38	0.3	27	40.3	58	74.4	57	0.4	26	0.2	44	53.0

Sumber: Bidang P2P Dinas Kesehatan Prov. Riau,2024

Keterangan: IVA: Inspeksi Visual dengan Asam asetat

TABEL 78

PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	SASARAN ODGJ BERAT	PELAYANAN KESEHATAN ODGJ BERAT										
			SKIZOFRENIA			PSIKOTIK AKUT			TOTAL			MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	
			0-14 th	15 - 59 th	≥ 60 th	0-14 th	15 - 59 th	≥ 60 th	0-14 th	15 - 59 th	≥ 60 th	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1401	KAMPAR	1,241	3	1,101	30	0	17	0	3	1,115	30	1,148	92.5
1402	INDRAGIRI HULU	709	1	468	43	0	16	1	1	484	43	528	74.5
1403	BENGKALIS	988	1	678	14	0	24	1	1	702	15	718	72.7
1404	INDRAGIRI HILIR	1,074		1,051	42	0	39	3	0	0	0	1,135	105.7
1405	PELALAWAN	761	0	731	21	0	9	0	0	740	21	761	100.0
1406	ROKAN HULU	892	2	760	10	0	2	0	2	762	10	774	86.8
1407	ROKAN HILIR	771	0	716	21	0	19	0	0	735	21	756	98.1
1408	SIAK	720	0	688	0	0	5	0	0	693	0	693	96.3
1409	KUANTAN SINGINGI	535	0	421	32	0	16	1	0	437	33	470	87.9
1410	KEPULAUAN MERANTI	291	1	376	19	0	5	0	0	0	0	371	127.5
1471	PEKANBARU	1,826	8	909	94	0	28	3	8	937	97	1,042	57.1
1472	DUMAI	529	1	512	35	0	16	2	1	528	37	566	107.0
JUMLAH (KAB/KOTA)		10,337	17	8,411	361	0	196	11	16	7,133	307	8,962	86.7

Sumber: Bidang P2P Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 79

PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR

**PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH SARANA AIR MINUM	SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/ DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR (AMAN)	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1401	KAMPAR	250	73602	64,741	87.96
1402	INDRAGIRI HULU	194	176	68	38.64
1403	BENGKALIS	155	192233	357	0.19
1404	INDRAGIRI HILIR	236	137	4	2.92
1405	PELALAWAN	118	30	22	73.33
1406	ROKAN HULU	145	209	162	77.51
1407	ROKAN HILIR	184	3064	549	17.92
1408	SIAK	131	447	206	46.09
1409	KUANTAN SINGINGI	229	212	191	90.09
1410	KEPULAUAN MERANTI	101	70945	30,186	42.55
1471	PEKANBARU	83	5711	5,531	96.85
1472	DUMAI	36	55	53	96.36
JUMLAH (KAB/KOTA)		1,862	346,821	102,070	29.43

Sumber: Bidang P2P Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

Keterangan : Jenis Sarana Air Minum yang dilkaukan Pengawasan adalah : Sarana Komunal dan PDAM

TABEL 80

**JUMLAH KEPALA KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG AMAN (JAMBAN SEHAT) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KK	JUMLAH KK PENGGUNA						KK SBS		KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK		PERSENTASE KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG AMAN
			AKSES SANITASI AMAN	AKSES SANITASI LAYAK SENDIRI	AKSES LAYAK BERSAMA	AKSES BELUM LAYAK	BABS TERTUTUP	BABS TERBUKA	JUMLAH	%	JUMLAH	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1401	KAMPAR	188,249	7,820	177,472	2,922	15	68,664	0	188,229	100	188,214	100	4.15
1402	INDRAGIRI HULU	121,821	5,529	114,452	2,381	7,498	8,532	0	129,860	107	122,362	100	4.54
1403	BENGKALIS	192,284	2,064	176,539	9,481	4,200	120	0	192,284	100	188,084	98	1.07
1404	INDRAGIRI HILIR	183,353	11,820	126,113	56,765	475	35,149	11,820	195,173	106	194,698	106	6.45
1405	PELALAWAN	107,203	3,573	98,911	4,765	0	0	0	107,249	100	107,249	100	3.33
1406	ROKAN HULU	155,580	8,202	134,680	2,961	3,518	3,380	1,169	149,361	96	145,843	94	5.27
1407	ROKAN HILIR	158,624	2,276	132,223	1,392	14,659	10,451	2,276	150,550	95	135,891	86	1.43
1408	SIAK	111,505	521	109,076	2,028	17,750	521	0	129,375	116	111,625	100	0.47
1409	KUANTAN SINGINGI	115,508	93,484	43,853	5,131	3,103	12,913	2,298	145,571	126	142,468	123	80.93
1410	KEPULAUAN MERANTI	74,043	3,161	60,932	1,313	5,233	1,068	793	70,639	95	65,406	88	4.27
1471	PEKANBARU	291,520	216,401	84,030	5,869	1,243	0	0	307,543	105	306,300	105	74.23
1472	DUMAI	103,964	24,937	88,665	1,220	14,079	0	0	128,901	124	114,822	110	23.99
PROVINSI RIAU		1,803,654	379,788	1,346,946	96,228	71,773	140,798	18,356	1,894,735	105	1,822,962	101	21.06

Sumber: Bidang Kesmas Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

Keterangan : KK = Kepala Keluarga, SBS = Stop Buang Air Besar Sembarangan

TABEL 81

**SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DAN RUMAH SEHAT MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH KK	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)															
				DESA/KELURAHAN STOP BABS (SBS)		KK CUCI TANGAN PAKAI SABUN (CTPS)		KK PENGELOLAAN AIR MINUM DAN MAKANAN RUMAH TANGGA (PAMMRT)		KK PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA (PSRT)		KK PENGELOLAAN LIMBAH CAIR RUMAH TANGGA (PLCRT)		DESA/KELURAHAN 5 PILAR STBM		KK PENGELOLAAN KUALITAS UDARA DALAM RUMAH TANGGA (PKURT)		KK AKSES RUMAH SEHAT	
				JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1401	KAMPAR	250	230.351	231	92,40	184.260	80,0	188.579	81,9	177.140	77	164.740	71,52	200	80,00	129.056	56,03	186.849	81,11
1402	INDRAGIRI HULU	194	121.575	156	80,41	107.471	88,4	108.204	89,0	57.630	47	56.063	46,11	151	77,84	0	0,00	5.717	4,70
1403	BENGKALIS	155	203.054	131	84,52	115.106	56,7	112.071	55,2	87.153	43	89.274	43,97	52	33,55	5717	2,82	13.180	6,49
1404	INDRAGIRI HILIR	236	183.353	143	60,59	20.110	11,0	17.699	9,7	5.479	3	5.316	2,90	226	95,76	0	0,00	5.717	3,12
1405	PELALAWAN	118	107.203	95	80,51	90.529	84,4	0	0	0	0	0	0,00	107	90,68	0	0,00	18106	16,89
1406	ROKAN HULU	145	158.169	97	66,90	103.186	65,2	102.773	65,0	108.787	69	101.272	64,03	90	62,07	49.470	31,28	155.876	98,55
1407	ROKAN HILIR	184	158.624	76	41,30	81.117	51,1	83.300	52,5	60.306	38	51.164	32,25	35	19,02	0	0,00	55.602	35,05
1408	SIAK	131	111.505	122	93,13	81.031	72,7	53.457	47,9	10.568	9	24.027	21,55	131	100,00	0	0,00	108.733	97,51
1409	KUANTAN SENGINGI	229	115.508	99	43,23	18.461	16,0	14.183	12,3	4.905	4	6.475	5,61	219	95,63	1.142	0,99	1.142	0,99
1410	KEP. MERANTI	101	56.491	58	57,43	38.456	68,1	42.679	75,6	36.820	65	29.133	51,57	83	82,18	8.774	15,53	34.379	60,86
1471	PEKANBARU	83	193.674	83	100,00	165.381	85,39	158.850	82,0	147.340	76	144.024	74,36	81	97,59	31.630	16,33	161.806	83,55
1472	DUMAI	36	103.964	36	100	80.959	77,87	80.696	77,6	55.105	53	57.415	55,23	10	27,78	50.532	48,61	52.815	50,80
PROVINSI RIAU		1.862	1.743.471	1327	71,27	1.086.067	62,29	962.491	55,2	751.233	43	728.903	41,81	1385	74,38	276.321	15,8	799.922	45,88

Sumber: Bidang Kesmas Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

* SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)

TABEL 82

PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	TFU TERDAFTAR					TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL)									
		SEKOLAH		PUSKES MAS	PASAR SEHAT	TOTAL	SARANA PENDIDIKAN				PUSKESMAS		PASARSEHAT		TOTAL	
							SD/MI		SMP/MTs							
		SD/MI	SMP/MTs				∑	%	∑	%	∑	%	∑	%	∑	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1401	KAMPAR	546	233	31	2	812	447	81.9	138	59.23	29	93.5	2	100.0	616	75.9
1402	INDRAGIRI HULU	331	107	20	18	476	275	83.1	55	51.40	17	85.0	18	100.0	365	76.68
1403	BENGKALIS	401	179	19	34	633	321	80.0	137	76.54	16	84.2	15	44.1	489	77.25
1404	INDRAGIRI HILIR	904	290	30	9	1,233	342	37.8	119	41.03	28	93.3	9	100.0	498	40.39
1405	PELALAWAN	235	99	14	2	350	189	80.4	68	68.69	15	107.1	2	100.0	274	78.29
1406	ROKAN HULU	391	183	22	6	602	289	73.9	114	62.30	14	63.6	6	100.0	423	70.27
1407	ROKAN HILIR	493	225	20	3	741	153	31.0	60	26.67	11	55.0	3	100.0	227	30.63
1408	SIAK	254	144	14	2	414	233	91.7	105	72.917	9	64.3	2	100.0	349	84.30
1409	KUANTAN SENGINGI	280	104	25	64	473	227	81.1	78	75.00	23	92.0	45	70.3	373	78.86
1410	KEP. MERANTI	168	79	10	2	259	119	70.8	35	44.30	10	100.0	2	100.0	166	64.09
1471	PEKANBARU	480	161	21	6	668	175	36.5	80	49.69	15	71.4	6	100.0	276	41.32
1472	DUMAI	118	57	10	3	188	101	85.6	47	82.46	8	80.0	3	100.0	159	84.57
PROVINSI RIAU		4,601	1,861	236	151	6,849	2,871	62.4	1,036	55.67	195	82.6	113	74.8	4,215	61.54

Sumber: Bidang Kesmas Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

TABEL 83

PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	JASA BOGA			RESTORAN			TPP TERTENTU			DEPOT AIR MINUM			RUMAH MAKAN			KELOMPOK GERAI PANGAN JAJANAN			SENTRA PANGAN JAJANAN/KANTIN		
		TERDAFTAR	LAIK HSP		TERDAFTAR	LAIK HSP		TERDAFTAR	LAIK HSP		TERDAFTAR	LAIK HSP		TERDAFTAR	LAIK HSP		TERDAFTAR	LAIK HSP		TERDAFTAR	LAIK HSP	
			JML	%		JML	%		JML	%		JML	%		JML	%		JML	%		JML	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1401	KAMPAR	54	20	37.04	248	79	31.85	41	32	78.05	219	88	40.18	11	11	100.00	268	101	37.7	3	1	33.33
1402	INDRAGIRI HULU	84	74	88.10	111	68	61.26	1	1	100	198	125	63.13	81	64	79.01	3	3	100.0	1	1	100.00
1403	BENGKALIS	114	63	55.26	86	48	55.81	58	49	84.48	91	57	62.64	6	5	83.33	251	148	59.0	40	22	55.00
1404	INDRAGIRI HILIR	23	21	91.30	72	64	88.89	1	1	100	268	231	86.19	310	224	72.26	21	10	47.6	257	156	60.70
1405	PELALAWAN	75	60	80.00	52	46	88.46	37	30	81.08	232	200	86.21	270	240	88.89	477	360	75.5	115	91	79.13
1406	ROKAN HULU	80	58	72.50	16	9	56.25	346	117	33.8	161	88	54.66	391	124	31.71	392	44	11.2	534	78	14.61
1407	ROKAN HILIR	132	22	16.67	35	3	8.57	0	0	0	301	82	27.24	265	81	30.57	563	116	20.6	259	108	41.70
1408	SIAK	9	6	66.67	3	2	66.67	178	171	96.07	214	158	73.83	238	138	57.98	110	63	57.3	445	196	44.04
1409	KUANTAN SENGINGI	49	21	42.86	16	7	43.75	1	1	100.00	233	197	84.55	234	157	67.09	74	46	62.2	259	105	40.54
1410	KEP. MERANTI	5	2	40.00	23	10	43.48	0	0	0	64	39	60.94	0	0	0.00	52	29	55.8	9	4	44.44
1471	PEKANBARU	58	41	70.69	239	124	51.88	1	1	100	412	246	59.71	12	10	83.33	3	3	100.0	74	17	22.97
1472	DUMAI	1	1	100.00	82	35	42.68	89	43	48.31	23	8	34.78	16	0	0.00	132	79	59.8	24	6	25.00
PROVINSI RIAU		684	389	56.87	983	495	50.36	753	446	59.23	2416	1519	62.87	1834	1054	57.47	2346	1002	42.7	2020	785	38.86

Sumber: Bidang Kesmas Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

DAFTAR RUMAH SAKIT DI PROVINSI RIAU 2024

NO	KABUPATEN	RUMAH SAKIT																															
		SWASTA				PEMERINTAH				JML	SWASTA		PEMERINTAH		JML	KEPEMILIKAN								STATUS AKREDITASI					RATING				
		A	B	C	D	A	B	C	D		UMUM	KHUSUS	UMUM	KHUSUS		KEMEN LAIN	PEM PROV	EM KAB/KOT	BUMN	TNI/ POLRI	SWASTA	JUMLAH	PARIPURNA	UTAMA	MADYA	DASAR	PERDANA	BINTANG-5	BINTANG-4	BINTANG-3	BINTANG-2	BINTANG-1	
1401	KAMPAR	0	0	4	2	0	0	1	1	8	3	3	2	0	8	0	0	1	1	0	6	8	4	4	0	0	0	4	4				
1402	INDRAGIRI HULU	0	0	1	2	0	0	1	0	4	2	1	1	0	4	0	0	1	0	0	3	4	3	1	0	0	0	3	1				
1403	BENGKALIS	0	0	1	3	0	1	1	0	6	4	0	2	0	6	0	0	2	0	0	4	6	5	1	0	0	0	5	1				
1404	INDRAGIRI HILIR	0	0	1	1	0	0	1	2	5	1	1	3	0	5	0	0	3	0	0	2	5	4	0	0	0	0	4	0				
1405	PELALAWAN	0	0	1	2	0	0	1	0	4	3	0	1	0	4	0	0	1	0	0	3	4	4	0	0	0	0	4	0				
1406	ROKAN HULU	0	0	3	2	0	0	1	0	6	4	1	1	0	6	0	0	1	0	0	5	6	5	0	0	0	0	5	0				
1407	ROKAN HILIR	0	0	2	3	0	0	1	0	6	4	1	1	0	6	0	0	1	0	0	5	6	5	1	0	0	0	5	1				
1408	SIAK	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	3	0	3	0	0	3	0	0	0	3	1	2	0	0	0	1	2				
1409	KUANTAN SINGINGI	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	1	0	2	0	0	1	0	0	1	2	2	0	0	0	0	2	0				
1410	KEPULAUAN MERANTI	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0				
1471	PEKANBARU	1	3	19	2	1	1	3	1	31	24	2	4	1	31	1	3	1	0	3	23	31	28	3	0	0	0	28	3				
1472	DUMAI	0	0	2	1	0	1	0	2	6	3	0	3	0	6	0	0	1	1	1	3	6	6	0	0	0	0	6	0				
JUMLAH		1	3	35	18	1	3	13	8	82	48	10	23	1	82	1	3	17	2	4	55	82	68	12	0	0	0	68	12	0	0	0	

Sumber: Bidang Yankes Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

KETERANGAN

1 RS DOA IBUNDA KAB ROHUL BELUM AKREDITASI

1 RSIA BUNDA PUJA KAB INHIL BELUM AKREDITASI

RUMAH SAKIT DI PROVINSI RIAU TAHUN 2024

NO	KAB/KOTA	RUMAH SAKIT	ALAMAT
1	Kuantan Singingi	1 RS Umum Daerah Teluk Kuantan	Jl Kesehatan No. 1 Sinambek
2		2 RS Ibu dan Anak Milano	Jl Perintis Kemerdekaan KM 2 Jao Teluk Kuantan
3	Indragiri Hulu	1 RS Umum Daerah Indrasari Rengat	Jl Lintas Timur Sumatera Rengat Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau
4		2 RS Umum Kasih Ibu Rengat	Jl Azki Aris Kampung Dagang Rengat
5		3 RS Ibu dan Anak Safira	Jl. Jendral Sudirman No.79 Air Molek, Kel. Sekar Mawar, Kec. Pasir Penyu, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau
6		4 RS Muizzah	Jl. Lintas Timur Belilas Kel. Pangkalan Kasai
7	Indragiri Hilir	1 RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan	Jl Veteran No. 52 Tembilahan
8		2 RS Umum Daerah Raja Musa	Jl Tunas Harapan Sungai Guntung Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri hilir, Provinsi Riau
9		3 RS Umum Daerah Tengku Sulung	Jl Penunjang Pulau Kijang, Kec.Reteh, Kab. Inhil, Prov Riau
10		4 RS 3M Plus	Jl. Lingkar II No. 11-13 Tembilahan
11		5 RS Ibu dan Anak Bunda Puja	Jl. Batang Tuaka No. 1, RT/RW 001/002, Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan
12	Pelalawan	1 RS Umum Daerah Selasih Riau	Jl Rumah Sakit No.01 Pkl Kerinci
13		2 RS Umum Efarina	Jl Lintas Timur No.1 Pangkalan Kerinci Riau
14		3 RS Umum Medicare Sorek	Jl Dt. Laksamana Sorek I kec Pkl.Kuras
15		4 RS Umum Amalia Medika	Jl Lintas Timur Pangkalan Kerinci - Pelalawan - Riau
16	Siak	1 RS Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura	Jl Raja Kecil No.1 Kampung dalam,Siak Sri Indrapura
17		2 RS Umum Daerah Tualang	Jl. Raya Perawang Minas Km. 10 Kelurahan Perawang Barat Kecamatan Tualang
18		3 RS Umum Daerah Minas	Jl. Yos Sudarso Km. 26, Minas, Siak
19	Kampar	1 RS Umum Daerah Bangkinang	Jl Lingkar Bangkinang-Batu Belah, Kampar, Riau
20		2 RS Umum Tandun	Desa Talang danto, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau
21		3 RS Umum Mesra	Jl Raya Pasir Putih No. 3A-C Kec. Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau
22		4 RS Ibu Anak Husada Bunda	Jl Prof. M. Yamin, SH Salo, Kec.Salo Kab. Kampar, Riau 28451
23		5 RS Ibu Anak Bunda Anisyah	JL. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 52, Kampar
24		6 RS Ibu Anak Norfa Husada	JL. MAYOR ALI RASYID NO 17 ABCD BANGKINANG KOTA, KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
25		7 RS Umum Pelita	Jl. Raya Pekanbaru – Sungai Pagar, RT.001/RW.001 Dusun I Harapan Makmur, Desa Lubuk Sakat, Kec. Perhentian Raja.
26		8 RS Nurlima	Jl. Raya Lintas Pekanbaru-Taluk Kuantan Km 62 Desa Lipat Kain Selatan, Kec. Kampar Kiri
27	Rokan Hulu	1 RS Umum Daerah Rokan Hulu	Jl Syekh Ismail, Pasir Pengaraian
28		2 RS Umum Awal Bros Ujung Batu	Jl. Jenderal Sudirman No. 314
29		3 RS Umum Azzahra	Jl. Rambutan No. 03 RK Harapan, Ujung Batu
30		4 RS Umum Surya Insani	Jl Diponegoro KM 4 Pasir Pengaraian
31		5 RS Ibu dan Anak Harapan Medika	Jl. Jendral Sudirman No. 265 Ujungbatu Kab. Rokan Hulu
32		6 Rs doa ibunda	jln. Jendral sudirman km 3 ujungbatu
33	Bengkalis	1 RS Umum Daerah Bengkalis	Jl Kelapapati Tengah No.90, Bengkalis
34		2 RS Umum Daerah Kec.Mandau	Jl Stadion No.10 Duri Bengkalis
35		3 RS Umum Mutia Sari	Jl. Bathin Betuah No. 1A, Air Jamban, Mandau, Bengkalis
36		4 RS Pertamina Hulu Rokan	Komplek Merapi Camp PT Pertamina Hulu Rokan Duri, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau
37		5 RS Umum Thursina	Jl Hangtuah No. 93
38		6 RS Umum Permata Hati	Jl Jend. Sudirman No. 37,Kelurahan Gajah Sakti,Kecamatan Mandau,Kabupaten Bengkalis,Duri-RIAU,28784
39	ROKAN HILIR	1 RS Umum Indah	Jl Jenderal Sudirman, KM 02, Kel. Bahtera Makmur Kota, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Riau.
40		2 RS Umum Cahaya	Jl Lintas Riau Ujung Tanjung, Kec. Tanah Puth RT 024 RW 009
41		3 RS Ibunda	Jl. Lintas Riau Km 4 Bagan Batu Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir Prov. Riau
42		4 RS Ibu dan Anak Athaya Medika	Jl. Lintas-Medan Kepenghuluan Ujung Tanjung Putih
43		5 RS Umum Daerah Dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi	Jl Pahlawan No.13, Bagansiapiapi
44		6 RS Umum Awal Bros Bagan Batu	Jl. Lintas Riau-Sumatera Utara KM. 1 Desa/Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah
45	KEPULAUAN MERANTI	1 RS Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	Jl Dorak
46	PEKANBARU	1 RS Umum Daerah Arifin Achmad	Jl Diponegoro No. 2, Pekanbaru

NO	KAB/KOTA	RUMAH SAKIT	ALAMAT
47		2 RS Tk. IV Pekanbaru	Jl Kesehatan No 2 Pekanbaru
48		3 RS Bhayangkara Tk. III Kota Pekanbaru	JL KARTINI NO. 14 PEKANBARU
49		4 RS Santa Maria Pekanbaru	Jl Ahmad Yani No. 68 Rt/Rw 001/001 Kel.Pulau Karam Kec. Sukajadi
50		5 RS Umum Eka Hospital Pekanbaru	Jl Soekarno- Hatta Km.6,5
51		6 RS Umum Syafira	Jl Jenderal Sudirman No.134, Pekanbaru
52		7 RS Umum Daerah Petala Bumi	Jl Dr. Soetomo No.65 Kota Pekanbaru Provinsi Riau
53		8 RS Umum Islam Ibnu Sina	Jl Melati No.60 Pekanbaru
54		9 RS Jiwa Tampan	Jl H.R. Subrantas Km.12,5 Pekanbaru
55		10 RS Prof. Dr. Tabrani	Jl Jend. Sudirman 410, Pekanbaru
56		11 RS Umum Bina Kasih	Jl. Samanhudi No. 3-5 Kel. Sago - Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru - Riau - 28151
57		12 RS Angkatan Udara dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadi	Jl. Adi Sucipto No. 123 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau
58		13 RS Umum Awal Bros Pekanbaru	Jl Jend. Sudirman No.117, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya - Riau, Kode Pos 28282
59		14 RS Murni Teguh Eria	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 163 kelurahan kampung tengah, kecamatan sukajadi, pekanbaru, provinsi riau
60		15 RS Ibu dan Anak Andini	Jl. Tuanku Tambusai No. 55 Pekanbaru Kelurahan Tangkerang Barat / Kecamatan Marpoyan Damai Provinsi Riau
61		16 RS Umum Lancang Kuning	Jl Ronggowarsito Ujung No.5A Pekanbaru
62		17 RS Umum Pekanbaru Medical Center	Jl Lembaga Pemasyarakatan No.25, Gobah Pekanbaru
63		18 RS Umum Sansani	Jl Soekarno Hatta (Arengka Atas) Pekanbaru
64		19 RS Awal Bros A. Yani	Jln. Jend. A. Yani No. 73
65		20 RS Ibu dan Anak Annisa	Jl Garuda No.66 Kel.Tangkerang Tengah Kec.Marpoyan Damai
66		21 RS Ibu dan Anak Zainab	Jl Ronggowarsito I No I Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sail Kota Pekanbaru
67		22 RS Ibu dan Anak Hermina Rumbai	Jl. Khayangan No.53, Limbungan Baru, Rumbai Pesisir, Pekanbaru City, Riau 28261
68		23 RS Umum Awal Bros Panam	Jl HR. Soebrantas No 88 Panam, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kodepos: 28293
69		24 RS Khusus Mata Pekanbaru Eye Center	Jl Soekarno Hatta No 236 Pekanbaru
70		25 RS Umum Universitas Riau	Jl.Binawidya H.R.Subrantas Kampus Universitas Riau Km 12.5 Panam Pekanbaru Riau 28293
71		26 RS Khusus Mata SMEC Pekanbaru	Jl Arifin Ahmad No. 92 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
72		27 RS Ibu Anak Budhi Mulia	Jl Soekarno Hatta no 228 Pekanbaru
73		28 Aulia Hospital	Jl. HR Soebrantas No. 63 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Pekanbaru Riau
74		29 RS Umum Prima Pekanbaru	Jl Bima NO.1 T. Tambusai Ujung Kel. Delima Kec. Binawidya, Pekanbaru
75		30 RS Daerah Madani Kota Pekanbaru	Jl. Garuda Sakti Pekanbaru KM 2
76		31 RS Hermina Pekanbaru	Jl. Tuanku Tambusai RT. 03 RW. 02 Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru
77	Dumai	1 RS Awal Bros Dumai	Jl. Jenderal Sudirman No. 88, RT 013 RW 000, Kel. Bintang, Kec. Dumai Kota
78		2 RS Umum Daerah Kota Dumai	Jl Tanjung Jati No.4, Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai . Provinsi Riau
79		3 RS Pertamina Dumai	Jl Raya Bukit Datuk,Dumai
80		4 RS Bhayangkara Tk.IV Dumai	Jl. Hangtuah No.01 Kel. Buluh Kasap Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau
81		5 RS Graha Yasmine	Jl. Marlan Jaya, Bukit Datuk, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai
82		6 Naray Hospital	Jl. Dr. Wahidin No. 98 – 99, Kel. Purnama, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai Riau

Sumber: Bidang Yankes Dinas kesehatan Prov. Riau, 2024

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 2024

NO	KABUPATEN	JUMLAH PUSKESMAS	PUSKESMAS RAWAT INAP	TEMPAT TIDUR	PUSKESMAS NON RAWAT INAP	PUSKESMAS KELILING	PUSTU
1	2	3	4	5	6	7	8
1401	KAMPAR	31	8	107	23	6	183
1402	INDRAGIRI HULU	20	11	92	9	3	135
1403	BENGKALIS	20	7	67	13	20	59
1404	INDRAGIRI HILIR	30	26	126	4	0	210
1405	PELALAWAN	14	10	53	4	18	36
1406	ROKAN HULU	23	10	99	13	23	80
1407	ROKAN HILIR	21	10	188	11	0	91
1408	SIAK	16	7	70	9	0	96
1409	KUANTAN SINGINGI	25	14	143	11	25	63
1410	KEPULAUAN MERANTI	10	7	98	3	8	27
1471	PEKANBARU	21	6	26	15	21	34
1472	DUMAI	10	3	30	7	8	12
RIAU		241	119	1099	122	132	1026

Sumber: Bidang Yankes, Dinkes Prov. Riau

REKAPITULASI AKREDITASI KABUPATEN/KOTA PUSKESMAS DI PROVINSI RIAU TAHUN 2024

No.	Kabupaten	Jumlah Puskesmas	Akreditasi Dasar	Akreditasi Madya	Akreditasi Utama	Akreditasi Paripurna	Belum Akreditasi
1401	KAMPAR	31	0	6	13	12	0
1402	INDRAGIRI HULU	20	0	4	8	8	0
1403	BENGKALIS	20	0	1	5	13	1
1404	INDRAGIRI HILIR	30	1	7	15	7	0
1405	PELALAWAN	14	0	1	8	5	0
1406	ROKAN HULU	23	0	9	9	4	1
1407	ROKAN HILIR	21	1	3	10	7	0
1408	SIAK	16	0	0	6	9	1
1409	KUANTAN SINGINGI	25	0	8	14	3	0
1410	KEPULAUAN MERANTI	10	0	2	4	4	0
1471	PEKANBARU	21	0	0	6	15	0
1472	DUMAI	10	0	0	4	6	0
Riau		241	2	41	102	93	3

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 2024

KODE KAB	KABUPATEN	KLINIK PRATAMA	KLINIK UTAMA	TEMPAT PRAKTEK MANDIRI DOKTER	TEMPAT PRAKTEK MANDIRI DOKTER GIGI	TEMPAT PRAKTEK MANDIRI dr. SPESIALIS	TEMPAT PRAKTEK MANDIRI BIDAN	TEMPAT PRAKTEK MANDIRI PERAWAT	GRIYA SEHAT	PANTI SEHAT	UNIT TRANSFUSI DARAH	LAB KESEHATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1401	KAMPAR	75	2	152	32	11	396	35	0	1	1	1
1402	INDRAGIRI HULU	33	3	93	22	4	99	4	0	0	1	0
1403	BENGKALIS	42	2	96	32	0	144	0	0	0	2	2
1404	INDRAGIRI HILIR	23	2	55	9	4	112	11	0	0	1	2
1405	PELALAWAN	41	1	37	18	0	51	0	0	0	1	0
1406	ROKAN HULU	32	3	97	26	1	108	7	0	0	1	1
1407	ROKAN HILIR	24	0	68	13	0	263	7	0	0	1	0
1408	SIAK	26	2	37	9	0	112	0	0	4	1	1
1409	KUANTAN SINGINGI	37	4	35	23	4	139	19	0	0	1	3
1410	KEPULAUAN MERANTI	6	0	25	8	2	8	0	0	0	1	0
1471	PEKANBARU	211	32	192	268	21	39	2	0	0	1	10
1472	DUMAI	37	3	66	32	19	141	3	0	0	1	3
RIAU		587	54	953	492	66	1612	88	0	5	13	23

SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN TAHUN 2024

KODE KAB	KABUPATEN KOTA	INDUSTRI FARMASI	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL	USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL	PRODUKSI ALAT KESEHATAN	PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA	INDUSTRI KOSMETIKA	PBF	PAK	APOTEK	TOKO OBAT	TOKO ALKES
1401	KAMPAR	0	0	3	0	1	0	1	1	172	21	0
1402	INDRAGIRI HULU	0	0	1	0	0	0	2	0	71	25	0
1403	BENGKALIS	0	0	0	0	0	0	1	0	102	56	0
1404	INDRAGIRI HILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	62	56	0
1405	PELALAWAN	0	0	0	0	1	0	1	0	48	56	0
1406	ROKAN HULU	0	0	2	0	0	0	0	0	83	27	0
1407	ROKAN HILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	67	31	0
1408	SIAK	0	0	1	0	2	0	0	0	62	29	0
1409	KUANTAN SINGINGI	0	0	0	0	0	0	1	0	61	8	6
1410	KEPULAUAN MERANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	21	11	0
1471	PEKANBARU	0	0	1	0	2	2	52	67	332	34	61
1472	DUMAI	0	0	0	0	0	0	1	3	69	56	1
RIAU		0	0	8	0	6	2	59	71	1150	410	68

Sumber: Bidang SDK Dinkes Prov. Riau

10 Penyakit Terbesar Rawat Inap di Rumah Sakit Provinsi Riau Tahun 2024

No	ICD10	Deskripsi	Total
1	K30	Dyspepsia	14577
2	A01.0	Typhoid fever	10074
3	A09	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	9134
4	J18.9	Pneumonia, unspecified	7148
5	E11.9	Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications	6971
6	K21.9	Gastro-oesophageal reflux disease without oesophagitis	6894
7	I10	Essential (primary) hypertension	6352
8	J18.0	Bronchopneumonia, unspecified	5120
9	A09.9	Gastroenteritis and colitis of unspecified origin	4563
10	J06.9	Acute upper respiratory infection, unspecified	3100
		dan lain-lain	120807
Jumlah			194740

10 Penyakit Terbesar Rawat Jalan di Rumah Sakit Provinsi Riau Tahun 2024

No	ICD10	Deskripsi	Total
1	K30	Dyspepsia	52294
2	I10	Essential (primary) hypertension	45446
3	M54.5	Low back pain	35653
4	J06.9	Acute upper respiratory infection, unspecified	26958
5	E11.9	Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complication	23221
6	K04.1	Necrosis of pulp	22244
7	K04.0	Pulpitis	20066
8	I50.0	Congestive heart failure	19832
9	E11	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	12278
10	R52.2	Other chronic pain	11826
		dan lain-lain	342376
Jumlah			612194

10 Penyakit Terbesar Kunjungan di Rumah Sakit Provinsi Riau Tahun 2024

No	ICD10	Deskripsi	Total
1	K30	Dyspepsia	99394
2	I10	Essential (primary) hypertension	94054
3	M54.5	Low back pain	70963
4	E11.9	Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complication	69907
5	J06.9	Acute upper respiratory infection, unspecified	48944
6	J00	Acute nasopharyngitis [common cold]	48914
7	K04.1	Necrosis of pulp	35411
8	B08.4	Enteroviral vesicular stomatitis with exanthem	32885
9	K04.0	Pulpitis	31665
10	I50.0	Congestive heart failure	27784
		dan lain-lain	1431990
		Jumlah	1991911

